



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

Jl. Mohamad Hatta No. 1, Mbay, Nagekeo, Flores
NUSA TENGGARA TIMUR



PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

NAGEKEO
the heart of flores



DAFTAR ISI

HALAMAN

1. Daftar isi	i - ii
2. Batang Tubuh Peraturan Daerah.....	iii - xi
3. Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran.....	1 - 1
4. Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	2 - 6
5. Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....	7 - 7
6. Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	
1.3.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	8 - 12
1.3.2 Dinas Kesehatan	13 - 18
1.3.3 RSUD Aeramo	19 - 20
1.3.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21 - 22
1.3.5 BLUD SPAM	23 - 23
1.3.6 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.....	24 - 25
1.3.7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	26 - 28
1.3.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29 - 30
1.3.9 Dinas Sosial.....	31 - 33
1.3.10 Dinas Pangan	34 - 35
1.3.11 Dinas Lingkungan Hidup.....	36 - 38
1.3.12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	39 - 42
1.3.13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43 - 45
1.3.14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46 - 48
1.3.15 Dinas Perhubungan	49 - 51
1.3.16 Dinas Komunikasi dan Informatika	52 - 53
1.3.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	54 - 56
1.3.18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57 - 59
1.3.19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	60 - 61
1.3.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.....	62 - 64
1.3.21 Dinas Kelautan dan Perikanan	65 - 66
1.3.22 Dinas Pariwisata	67 - 68
1.3.23 Dinas Pertanian	69 - 70
1.3.24 Dinas Peternakan	71 - 72
1.3.25 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	73 - 74
1.3.26 Sekretariat Daerah.....	75 - 78
1.3.27 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	79 - 81
1.3.28 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	82 - 85
1.3.29 Badan Keuangan Daerah	86 - 90
1.3.30 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	91 - 92
1.3.31 Inspektorat.....	93 - 95
1.3.32 Kecamatan Aesesa.....	96 - 99
1.3.33 Kecamatan Boawae.....	100 - 103
1.3.34 Kecamatan Mauponggo.....	104 - 106
1.3.35 Kecamatan Nangaroro.....	107 - 109
1.3.36 Kecamatan Wolowae	110 - 113
1.3.37 Kecamatan Keo Tengah	114 - 116
1.3.38 Kecamatan Aesesa Selatan	117 - 119
1.3.39 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	120 - 121
7. Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	122 - 181
8. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	182 - 182
9. Lampiran III Laporan Operasional	183 - 184
10. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas	185 - 185
11. Lampiran V Neraca.....	186 - 187
12. Lampiran VI Laporan Arus Kas.....	188 - 189
13. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan	190 - 572
14. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	573 - 574

15. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Putang Tidak Tertagih	575 - 575
16. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	576 - 576
17. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	577 - 577
18. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	578 - 586
19. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	587 - 587
20. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan	588 - 588
21. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	589 - 591
22. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah	592 - 592
23. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek	593 - 593
24. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang	594 - 594
25. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran berikut	595 - 595
26. Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah...	596 - 596
27. Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.....	597 - 597



BUPATI NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang profesional perlu pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
dan

BUPATI NAGEKEO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp	702.853.486.223,09
2.	Belanja Daerah	Rp	721.124.381.735,29 (-)
			Surplus/ (Defisit) Rp (18.270.895.512,20)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan		
	Pembiayaan	Rp	37.615.244.080,99
	b. Pengeluaran		
	Pembiayaan	Rp	5.000.000.000,00 (-)
			Pembiayaan Netto Rp 32.615.244.080,99

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(35.062.381.742,91) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|----|---|
| Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 737.915.867.966,00 |
| Realisasi | | <u>Rp 702.853.486.223,09 (-)</u> |
| | | Selisih Kurang Rp(35.062.381.742,91) |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(50.603.180.289,71) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|----|---|
| Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 771.727.562.025,00 |
| Realisasi | | <u>Rp 721.124.381.735,29(-)</u> |
| | | Selisih Kurang Rp(50.603.180.289,71) |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp15.540.798.546,80 rincian sebagai berikut :

Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp (33.811.694.059,00)

Realisasi Rp (18.270.895.512,20) (-)

Selisih Lebih Rp15.540.798.546,80

- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(1.196.449.978,01) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 38.811.694.059,00

Realisasi Rp 37.615.244.080,99 (-)

Selisih Kurang Rp(1.196.449.978,01)

- (5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

Realisasi Rp 5.000.000.000,00 (-)

Selisih Rp 0,00

- (6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(1.196.449.978,01) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 33.811.694.059,00

Realisasi Rp 32.615.244.080,99 (-)

Selisih Kurang Rp(1.196.449.978,01)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 37.811.694.058,68
2. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 14.344.348.568,79

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan - Laporan Operasional	Rp 672.873.758.164,98
2. Beban	<u>Rp 650.233.802.528,29 (-)</u>
Surplus/ (Defisit) Operasi	Rp 22.639.955.636,69
3. Kegiatan Non Operasional	
a. Surplus/Defisit Non Operasional	<u>Rp (2.655.098.417,44)</u>
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>Rp (2.655.098.417,44) (+)</u>
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 19.984.857.219,25
4. Pos Luar Biasa	
a. Beban Luar Biasa	Rp 0,00
Jumlah Beban Luar Biasa	<u>Rp 0,00 (+)</u>
Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional	Rp 19.984.857.219,25

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal	Rp 2.048.089.882.945,89
2. Ekuitas Akhir	Rp 2.038.589.655.418,39

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 2.052.107.356.713,82
b. Jumlah Kewajiban	Rp 13.517.701.295,43
c. Jumlah Ekuitas	Rp 2.038.589.655.418,39

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp 40.404.133.159,69
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 95.115.887.788,30
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp (118.324.534.165,50)
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 3.272.735.708,00
e. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp 20.293.504.555,80

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. lampiran III : Laporan Operasional
 - d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
 - e. lampiran V : Neraca
 - f. lampiran VI : Laporan Arus Kas
 - g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.


Ditetapkan di Mbay

pada tanggal, 15 Juli 2023

The seal of Kabupaten Nagekeo, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'KABUPATEN NAGEKEO' and 'PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR'.
BUPATI NAGEKEO,
JOHANES DON BOSCO DO

Diundangkan di Mbay

pada tanggal, 15 Juli 2023

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, featuring the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO' and 'SETDA' in the center.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,
LUKAS MERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023 NOMOR 1

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 01



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	%
1	PENDAPATAN DAERAH				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.210.826.688,00	34.260.033.777,09	(17.950.792.910,91)	65,62
3	Pajak Daerah	11.319.781.170,00	5.588.247.094,00	(5.731.534.076,00)	49,37
4	Retribusi Daerah	13.177.405.529,00	2.879.649.883,20	(10.297.755.645,80)	21,85
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.614.351.128,00	2.207.175.564,00	(407.175.564,00)	84,43
6	Lain-lain PAD yang Sah	25.099.288.861,00	23.584.961.235,89	(1.514.327.625,11)	93,97
				-	-
7	PENDAPATAN TRANSFER	679.146.119.178,00	662.574.102.398,00	(16.572.016.780,00)	97,56
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.648.738.088,00	644.616.163.489,00	(8.032.574.599,00)	98,77
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.497.381.090,00	17.957.938.909,00	(8.539.442.181,00)	67,77
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	(539.572.052,00)	91,77
11	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	(539.572.052,00)	91,77
13	JUMLAH PENDAPATAN (7+20+24)	737.915.867.966,00	702.853.486.223,09	(35.062.381.742,91)	95,25
14	BELANJA				
15	BELANJA OPERASI	511.025.944.824,00	476.000.097.333,79	(35.025.847.490,21)	93,15
16	Belanja Pegawai	276.305.411.495,00	267.524.611.956,00	(8.780.799.539,00)	96,82
17	Belanja Barang dan Jasa	194.767.666.529,00	169.078.523.799,79	(25.689.142.729,21)	86,81
18	Belanja Bunga	-	-	-	-
19	Belanja Subsidi	-	-	-	-
20	Belanja Hibah	18.106.796.800,00	17.552.418.715,00	(554.378.085,00)	96,94
21	Belanja Bantuan Sosial	21.846.070.000,00	21.844.542.863,00	(1.527.137,00)	99,99
22	BELANJA MODAL	125.972.561.078,00	113.999.290.488,50	(11.973.270.589,50)	90,50
23	Belanja Modal Tanah	3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	(89.500.000,00)	97,16
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.031.320.607,00	13.940.302.529,00	(3.091.018.078,00)	81,85
25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.336.271.259,00	17.863.000.833,00	(1.473.270.426,00)	92,38
26	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.033.933.712,00	70.200.187.042,50	(6.833.746.669,50)	91,13
27	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.422.445.500,00	8.936.710.084,00	(485.735.416,00)	94,84
28	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
29	BELANJA TAK TERDUGA	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	(3.604.062.210,00)	55,25
30	Belanja Tak Terduga	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	(3.604.062.210,00)	55,25
31	BELANJA TRANSFER	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00	-	100,00
32	Belanja Bagi Hasil	1.052.020.780,00	1.052.020.780,00	-	100,00
33	Belanja Bantuan Keuangan	125.622.910.700,00	125.622.910.700,00	-	100,00
34	JUMLAH BELANJA	771.727.562.025,00	721.124.381.735,29	(50.603.180.289,71)	93,44
35	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	(33.811.694.059,00)	(18.270.895.512,20)	15.540.798.546,80	54,04
36	PEMBIAYAAN				
37	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.811.694.059,00	37.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	96,92
38	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.811.694.059,00	37.552.994.945,99	(258.699.113,01)	99,32
39	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	62.249.135,00	(937.750.865,00)	6,22
40	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
41	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
42	PEMBIAYAAN NETO (66-73)	33.811.694.059,00	32.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	96,46
43	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (57 + 74)	-	14.344.348.568,79	14.344.348.568,79	





PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	737.915.867.966,00	702.853.486.223,09	(35.062.381.742,91)	95,25
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.968.713.968,00	20.254.194.608,68	(4.714.519.359,32)	81,12
4.1.01	PENDIDIKAN	184.020.000,00	51.227.680,00	(132.792.320,00)	27,84
4.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	184.020.000,00	51.227.680,00	(132.792.320,00)	27,84
4.1.02	KESEHATAN	12.599.564.460,00	16.978.064.380,68	4.378.499.920,68	134,75
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	12.599.564.460,00	16.978.064.380,68	4.378.499.920,68	134,75
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.184.229.508,00	3.219.290.548,00	(8.964.938.960,00)	26,42
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.184.229.508,00	3.219.290.548,00	(8.964.938.960,00)	26,42
4.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	1.912.000,00	1.912.000,00	-
4.1.04.1-04.0-00.0-00.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	1.912.000,00	1.912.000,00	-
4.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	900.000,00	3.700.000,00	2.800.000,00	411,11
4.1.05.1-05.0-00.0-00.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	900.000,00	3.700.000,00	2.800.000,00	411,11
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	542.830.500,00	189.841.000,00	(352.989.500,00)	34,97
4.2.07	TENAGA KERJA	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-
4.2.07.2-07.3-32.0-00.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-
4.2.09	PANGAN	101.000.000,00	26.922.000,00	(74.078.000,00)	26,66
4.2.09.2-09.0-00.0-00.01	DINAS PANGAN DAERAH	101.000.000,00	26.922.000,00	(74.078.000,00)	26,66
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	110,00
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	110,00
4.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	50.000,00	650.000,00	600.000,00	1.300,00
4.2.12.2-12.0-00.0-00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	50.000,00	650.000,00	600.000,00	1.300,00
4.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
4.2.13.2-13.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
4.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	500.000,00	900.000,00	400.000,00	180,00
4.2.14.2-14.0-00.0-00.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	500.000,00	900.000,00	400.000,00	180,00
4.2.15	PERHUBUNGAN	262.000.000,00	72.154.000,00	(189.846.000,00)	27,54
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	262.000.000,00	72.154.000,00	(189.846.000,00)	27,54
4.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	123.067.000,00	60.740.000,00	(62.327.000,00)	49,36
4.2.16.2-16.0-00.0-00.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	123.067.000,00	60.740.000,00	(62.327.000,00)	49,36
4.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	51.500.000,00	21.625.000,00	(29.875.000,00)	41,99
4.2.17.2-17.0-00.0-00.01	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	51.500.000,00	21.625.000,00	(29.875.000,00)	41,99
4.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	213.500,00	500.000,00	286.500,00	234,19
4.2.19.2-19.0-00.0-00.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	213.500,00	500.000,00	286.500,00	234,19
4.2.23	PERPUSTAKAAN	2.500.000,00	3.200.000,00	700.000,00	128,00
4.2.23.2-23.0-00.0-00.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	2.500.000,00	3.200.000,00	700.000,00	128,00
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	954.589.444,00	537.726.474,00	(416.862.970,00)	56,33
4.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	83.789.444,00	56.619.074,00	(27.170.370,00)	67,57
4.3.25.3-25.0-00.0-00.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	83.789.444,00	56.619.074,00	(27.170.370,00)	67,57
4.3.26	PARIWISATA	20.000.000,00	14.200.000,00	(5.800.000,00)	71,00
4.3.26.3-26.0-00.0-00.01	DINAS PARIWISATA	20.000.000,00	14.200.000,00	(5.800.000,00)	71,00
4.3.27	PERTANIAN	850.800.000,00	466.907.400,00	(383.892.600,00)	54,88
4.3.27.3-27.0-00.0-00.01	DINAS PERTANIAN	517.500.000,00	209.960.000,00	(307.540.000,00)	40,57
4.3.27.3-27.0-00.0-00.02	DINAS PETERNAKAN	333.300.000,00	256.947.400,00	(76.352.600,00)	77,09
4.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00
4.4.02	SEKRETARIAT DPRD	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00
4.4.02.4-02.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DPRD	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	710.680.530.854,00	681.556.786.489,41	(29.123.744.364,59)	95,90
4.5.01	PERENCANAAN	10.000.000,00	500.000,00	(9.500.000,00)	5,00
4.5.01.5-01.0-00.0-00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.000.000,00	500.000,00	(9.500.000,00)	5,00
4.5.02	KEUANGAN	710.670.530.854,00	681.556.286.489,41	(29.114.244.364,59)	95,90
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	710.670.530.854,00	681.556.286.489,41	(29.114.244.364,59)	95,90
4.7	UNSUR KEWILAYAHAN	767.703.200,00	313.737.651,00	(453.965.549,00)	40,87
4.7.01	KECAMATAN	767.703.200,00	313.737.651,00	(453.965.549,00)	40,87
4.7.01.7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN AESESA	373.460.000,00	132.700.000,00	(240.760.000,00)	35,53
4.7.01.7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN BOAWAE	282.400.000,00	92.720.000,00	(189.680.000,00)	32,83
4.7.01.7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN MAUPONGGO	38.000.000,00	37.030.000,00	(970.000,00)	97,45
4.7.01.7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN NANGARORO	49.243.200,00	43.773.651,00	(5.469.549,00)	88,89
4.7.01.7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN KEO TENGAH	24.600.000,00	7.514.000,00	(17.086.000,00)	30,54
5	BELANJA DAERAH	771.727.562.025,00	721.124.381.735,29	(50.603.180.289,71)	93,44
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	460.374.973.311,00	423.756.030.597,21	(36.618.942.713,79)	92,05
5.1.01	PENDIDIKAN	189.260.565.375,00	181.933.366.618,00	(7.327.198.757,00)	96,13
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	189.260.565.375,00	181.933.366.618,00	(7.327.198.757,00)	96,13

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.132.800,00	146.132.800,00	-	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN MAUPONGGO	2.379.081.798,00	2.357.033.536,00	(22.048.262,00)	99,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	2.342.060.798,00	2.320.562.536,00	(21.498.262,00)	99,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.473.201.781,00	1.466.925.136,00	(6.276.645,00)	99,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.859.017,00	853.637.400,00	(15.221.617,00)	98,25
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	37.021.000,00	36.471.000,00	(550.000,00)	98,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.021.000,00	36.471.000,00	(550.000,00)	98,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN NANGARORO	2.295.838.239,00	2.265.505.572,00	(30.332.667,00)	98,68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	2.285.455.839,00	2.256.705.572,00	(28.750.267,00)	98,74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1.468.640.281,00	1.450.012.299,00	(18.627.982,00)	98,73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.815.558,00	806.693.273,00	(10.122.285,00)	98,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	10.382.400,00	8.800.000,00	(1.582.400,00)	84,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.382.400,00	8.800.000,00	(1.582.400,00)	84,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN WOLOWAE	1.087.287.643,00	1.038.450.382,00	(48.837.261,00)	95,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	1.059.685.643,00	1.011.682.315,00	(48.003.328,00)	95,47
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	753.625.743,00	746.671.916,00	(6.953.827,00)	99,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.059.900,00	265.010.399,00	(41.049.501,00)	86,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	27.602.000,00	26.768.067,00	(833.933,00)	96,98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.602.000,00	26.768.067,00	(833.933,00)	96,98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN KEO TENGAH	1.338.938.961,00	1.306.169.171,00	(32.769.790,00)	97,55
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	1.305.688.961,00	1.273.039.171,00	(32.649.790,00)	97,50
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	941.450.793,00	933.111.971,00	(8.338.822,00)	99,11
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.238.168,00	339.927.200,00	(24.310.968,00)	93,33
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	33.250.000,00	33.130.000,00	(120.000,00)	99,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.250.000,00	33.130.000,00	(120.000,00)	99,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN AESESA SELATAN	1.127.743.674,00	1.093.104.410,00	(34.639.264,00)	96,93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	1.096.477.674,00	1.061.838.410,00	(34.639.264,00)	96,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	690.068.978,00	682.509.011,00	(7.559.967,00)	98,90
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.408.696,00	379.329.399,00	(27.079.297,00)	93,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	31.266.000,00	31.266.000,00	-	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.266.000,00	31.266.000,00	-	100,00
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2.353.767.561,00	2.274.902.728,00	(78.864.833,00)	96,65
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.353.767.561,00	2.274.902.728,00	(78.864.833,00)	96,65
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.353.767.561,00	2.274.902.728,00	(78.864.833,00)	96,65
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.349.267.561,00	2.270.452.728,00	(78.814.833,00)	96,65
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	614.865.934,00	613.491.296,00	(1.374.638,00)	99,78
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.544.827,00	960.104.632,00	(77.440.195,00)	92,54
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	696.856.800,00	696.856.800,00	-	100,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,89
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,89
SURPLUS/(DEFISIT)		(33.811.694.059,00)	(18.270.895.512,20)	15.540.798.546,80	54,04
6	PEMBIAYAAN DAERAH	43.811.694.059,00	42.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	97,27
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	43.811.694.059,00	42.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	97,27
6.5.02	KEUANGAN	43.811.694.059,00	42.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	97,27
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	43.811.694.059,00	42.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	97,27
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.811.694.059,00	37.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	96,92
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.811.694.059,00	37.552.994.945,99	(258.699.113,01)	99,32
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	62.249.135,00	(937.750.865,00)	6,22
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
PEMBIAYAAN NETO		33.811.694.059,00	32.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	96,46
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		-	14.344.348.568,79	14.344.348.568,79	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN DAERAH				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.210.826.688,00	34.260.033.777,09	65,62	33.276.127.700,03
3	Pajak Daerah	11.319.781.170,00	5.588.247.094,00	49,37	4.915.584.868,00
4	Retribusi Daerah	13.177.405.529,00	2.879.649.883,20	21,85	2.563.893.827,51
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.614.351.128,00	2.207.175.564,00	84,43	3.688.014.444,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	25.099.288.861,00	23.584.961.235,89	93,97	22.108.634.560,52
7	PENDAPATAN TRANSFER	679.146.119.178,00	662.574.102.398,00	97,56	651.601.375.462,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.648.738.088,00	644.616.163.489,00	98,77	638.034.248.168,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.497.381.090,00	17.957.938.909,00	67,77	13.567.127.294,00
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	91,77	15.824.910.133,00
11	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	91,77	15.824.910.133,00
13	JUMLAH PENDAPATAN (7+20+24)	737.915.867.966,00	702.853.486.223,09	95,25	700.702.413.295,03
14	BELANJA				
15	BELANJA OPERASI	511.025.944.824,00	476.000.097.333,79	93,15	478.233.112.157,21
16	Belanja Pegawai	276.305.411.495,00	267.524.611.956,00	96,82	263.787.905.340,00
17	Belanja Barang dan Jasa	194.767.666.529,00	169.078.523.799,79	86,81	186.246.100.112,21
18	Belanja Bunga	-	-	-	-
19	Belanja Subsidi	-	-	-	-
20	Belanja Hibah	18.106.796.800,00	17.552.418.715,00	96,94	11.751.630.550,00
21	Belanja Bantuan Sosial	21.846.070.000,00	21.844.542.863,00	99,99	16.447.476.155,00
22	BELANJA MODAL	125.972.561.078,00	113.999.290.488,50	90,50	177.034.170.277,63
23	Belanja Modal Tanah	3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	97,16	-
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.031.320.607,00	13.940.302.529,00	81,85	60.974.475.110,00
25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.336.271.259,00	17.863.000.833,00	92,38	37.508.371.047,80
26	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.033.933.712,00	70.200.187.042,50	91,13	76.696.279.403,28
27	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.422.445.500,00	8.936.710.084,00	94,84	1.837.244.716,55
28	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	17.800.000,00
29	BELANJA TAK TERDUGA	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	55,25	3.700.259.187,00
30	Belanja Tak Terduga	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	55,25	3.700.259.187,00
31	BELANJA TRANSFER	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00	100,00	139.732.366.600,00
32	Belanja Bagi Hasil	1.052.020.780,00	1.052.020.780,00	100,00	1.063.000.000,00
33	Belanja Bantuan Keuangan	125.622.910.700,00	125.622.910.700,00	100,00	138.669.366.600,00
34	JUMLAH BELANJA	771.727.562.025,00	721.124.381.735,29	93,44	798.699.908.221,84
35	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	(33.811.694.059,00)	(18.270.895.512,20)	54,04	(97.997.494.926,81)
36	PEMBIAYAAN				
37	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.811.694.059,00	37.615.244.080,99	96,92	140.809.188.985,49
38	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.811.694.059,00	37.552.994.945,99	99,32	140.711.624.112,49
39	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	62.249.135,00	6,22	97.564.873,00
40	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
41	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
42	PEMBIAYAAN NETO (66-73)	33.811.694.059,00	32.615.244.080,99	96,46	135.809.188.985,49
43	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (57 + 74)	-	14.344.348.568,79		37.811.694.058,68

BUPATI NAGEKEO,

JOHANES DON BOSCO DO

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	184.020.000,00	51.227.680,00	(132.792.320,00)	27,84
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184.020.000,00	51.227.680,00	(132.792.320,00)	27,84
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	64.020.000,00	19.449.000,00	(44.571.000,00)	30,38
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	120.000.000,00	31.778.680,00	(88.221.320,00)	26,48
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	189.260.565.375,00	181.933.366.618,00	(7.327.198.757,00)	96,13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	137.891.241.975,00	131.507.118.294,00	(6.384.123.681,00)	95,37
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.203.200,00	141.084.215,00	(118.985,00)	99,92
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.366.200,00	5.366.200,00	0,00	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.366.200,00	5.366.200,00	0,00	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.366.200,00	5.366.200,00	0,00	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.195.000,00	109.158.015,00	(36.985,00)	99,97
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	109.195.000,00	109.158.015,00	(36.985,00)	99,97
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.195.000,00	109.158.015,00	(36.985,00)	99,97
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.642.000,00	26.560.000,00	(82.000,00)	99,69
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	26.642.000,00	26.560.000,00	(82.000,00)	99,69
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.642.000,00	26.560.000,00	(82.000,00)	99,69
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	137.109.488.394,00	130.736.620.329,00	(6.372.868.065,00)	95,35
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	136.855.948.394,00	130.487.934.329,00	(6.368.014.065,00)	95,35
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	136.855.948.394,00	130.487.934.329,00	(6.368.014.065,00)	95,35
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	136.855.948.394,00	130.487.934.329,00	(6.368.014.065,00)	95,35
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230.340.000,00	225.557.000,00	(4.783.000,00)	97,92
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	230.340.000,00	225.557.000,00	(4.783.000,00)	97,92
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	217.140.000,00	212.370.000,00	(4.770.000,00)	97,80
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.187.000,00	(13.000,00)	99,90
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.200.000,00	23.129.000,00	(71.000,00)	99,69
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.200.000,00	23.129.000,00	(71.000,00)	99,69
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	23.129.000,00	(71.000,00)	99,69
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
01.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.068.500,00	454.377.569,00	(690.931,00)	99,85
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.376.500,00	123.014.869,00	(361.631,00)	99,71
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	100,00
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	118.373.500,00	118.011.869,00	(361.631,00)	99,69
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.373.500,00	118.011.869,00	(361.631,00)	99,69
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.069.000,00	144.065.000,00	(4.000,00)	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	144.069.000,00	144.065.000,00	(4.000,00)	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.069.000,00	144.065.000,00	(4.000,00)	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	936.000,00	840.000,00	(96.000,00)	89,74
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	936.000,00	840.000,00	(96.000,00)	89,74
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	936.000,00	840.000,00	(96.000,00)	89,74
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.052.000,00	168.822.700,00	(229.300,00)	99,86
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	169.052.000,00	168.822.700,00	(229.300,00)	99,86
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.052.000,00	168.822.700,00	(229.300,00)	99,86
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.234.381,00	61.201.000,00	(3.033.381,00)	95,28
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.920.000,00	1.800.000,00	(1.120.000,00)	61,64

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	1.800.000,00	(1.120.000,00)	61,64
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	1.800.000,00	(1.120.000,00)	61,64
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.616.381,00	14.703.000,00	(1.913.381,00)	88,48
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.616.381,00	14.703.000,00	(1.913.381,00)	88,48
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.616.381,00	14.703.000,00	(1.913.381,00)	88,48
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.698.000,00	44.698.000,00	0,00	100,00
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	44.698.000,00	44.698.000,00	0,00	100,00
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.698.000,00	44.698.000,00	0,00	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.447.500,00	109.035.181,00	(7.412.319,00)	93,63
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.147.500,00	106.735.181,00	(7.412.319,00)	93,51
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.147.500,00	106.735.181,00	(7.412.319,00)	93,51
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.147.500,00	106.735.181,00	(7.412.319,00)	93,51
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	51.015.630.400,00	50.072.698.324,00	(942.932.076,00)	98,15
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.052.166.600,00	25.470.317.053,00	(581.849.547,00)	97,77
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	481.421.000,00	480.401.000,00	(1.020.000,00)	99,79
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	481.421.000,00	480.401.000,00	(1.020.000,00)	99,79
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	100,00
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.631.000,00	475.611.000,00	(1.020.000,00)	99,79
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	241.677.000,00	239.807.000,00	(1.870.000,00)	99,23
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	241.677.000,00	239.807.000,00	(1.870.000,00)	99,23
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	100,00
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.087.000,00	235.217.000,00	(1.870.000,00)	99,21
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	570.520.100,00	570.520.100,00	0,00	100,00
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	320.670.100,00	320.670.100,00	0,00	100,00
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	21.080.000,00	21.080.000,00	0,00	100,00
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.590.100,00	299.590.100,00	0,00	100,00
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	249.850.000,00	249.850.000,00	0,00	100,00
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	249.850.000,00	249.850.000,00	0,00	100,00
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	100,00
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	100,00
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	100,00
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	196.868.100,00	195.848.100,00	(1.020.000,00)	99,48
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	66.898.100,00	65.878.100,00	(1.020.000,00)	98,48
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	100,00
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.628.100,00	60.608.100,00	(1.020.000,00)	98,34
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	129.970.000,00	129.970.000,00	0,00	100,00
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.970.000,00	129.970.000,00	0,00	100,00
02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.714.767.600,00	1.710.517.600,00	(4.250.000,00)	99,75
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.714.767.600,00	1.710.517.600,00	(4.250.000,00)	99,75
02.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	34.570.000,00	34.570.000,00	0,00	100,00
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.197.600,00	1.675.947.600,00	(4.250.000,00)	99,75
02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	163.545.500,00	161.845.500,00	(1.700.000,00)	98,96
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	163.545.500,00	161.845.500,00	(1.700.000,00)	98,96
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	100,00
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.405.500,00	151.705.500,00	(1.700.000,00)	98,89
02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	568.866.000,00	563.551.000,00	(5.315.000,00)	99,07
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	568.866.000,00	563.551.000,00	(5.315.000,00)	99,07
02.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	100,00
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.596.000,00	558.281.000,00	(5.315.000,00)	99,06
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	28.031.400,00	26.161.400,00	(1.870.000,00)	93,33
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	13.041.400,00	11.171.400,00	(1.870.000,00)	85,66
02.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	100,00
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.971.400,00	6.101.400,00	(1.870.000,00)	76,54
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	100,00
02.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	100,00
02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	13.970.000,00	13.970.000,00	0,00	100,00
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	13.970.000,00	13.970.000,00	0,00	100,00
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.970.000,00	13.970.000,00	0,00	100,00
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.531.360.000,00	2.531.360.000,00	0,00	100,00
02.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	1.415.378.000,00	1.415.378.000,00	0,00	100,00
02.2.01.22.5.1.01	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00
02.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.377.578.000,00	1.377.578.000,00	0,00	100,00
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	1.115.982.000,00	1.115.982.000,00	0,00	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.115.982.000,00	1.115.982.000,00	0,00	100,00
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	48.968.100,00	45.371.100,00	(3.597.000,00)	92,65
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	48.968.100,00	45.371.100,00	(3.597.000,00)	92,65
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.968.100,00	45.371.100,00	(3.597.000,00)	92,65
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	96.428.200,00	88.243.200,00	(8.185.000,00)	91,51
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	96.428.200,00	88.243.200,00	(8.185.000,00)	91,51
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.428.200,00	88.243.200,00	(8.185.000,00)	91,51
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.089.843.600,00	2.049.233.600,00	(40.610.000,00)	98,06
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	2.089.843.600,00	2.049.233.600,00	(40.610.000,00)	98,06
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.089.843.600,00	2.049.233.600,00	(40.610.000,00)	98,06
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	279.064.800,00	258.709.800,00	(20.355.000,00)	92,71
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	279.064.800,00	258.709.800,00	(20.355.000,00)	92,71
02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.064.800,00	258.709.800,00	(20.355.000,00)	92,71
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	112.495.200,00	107.133.230,00	(5.361.970,00)	95,23
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	88.729.200,00	87.009.630,00	(1.719.570,00)	98,06
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.729.200,00	87.009.630,00	(1.719.570,00)	98,06
02.2.01.28.5.2	BELANJA MODAL	23.766.000,00	20.123.600,00	(3.642.400,00)	84,67
02.2.01.28.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.766.000,00	20.123.600,00	(3.642.400,00)	84,67
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16.875.360.000,00	16.388.664.423,00	(486.695.577,00)	97,12
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	15.111.048.600,00	14.631.711.273,00	(479.337.327,00)	96,83
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.226.328.600,00	7.123.518.256,00	(102.810.344,00)	98,58
02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	7.884.720.000,00	7.508.193.017,00	(376.526.983,00)	95,22
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	1.764.311.400,00	1.756.953.150,00	(7.358.250,00)	99,58
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.387.754.600,00	1.405.189.350,00	17.434.750,00	101,26
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	376.556.800,00	351.763.800,00	(24.793.000,00)	93,42
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.088.019.200,00	19.733.449.341,00	(354.569.859,00)	98,23
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	910.691.500,00	906.271.500,00	(4.420.000,00)	99,51
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	88.849.500,00	84.429.500,00	(4.420.000,00)	95,03
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.649.500,00	78.229.500,00	(4.420.000,00)	94,65
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	821.842.000,00	821.842.000,00	0,00	100,00
02.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.042.000,00	12.042.000,00	0,00	100,00
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	809.800.000,00	809.800.000,00	0,00	100,00
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	612.361.000,00	610.049.000,00	(2.312.000,00)	99,62
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	55.361.000,00	53.049.000,00	(2.312.000,00)	95,82
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.161.000,00	46.849.000,00	(2.312.000,00)	95,30
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	557.000.000,00	557.000.000,00	0,00	100,00
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	557.000.000,00	557.000.000,00	0,00	100,00
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	2.524.112.500,00	2.496.853.500,00	(27.259.000,00)	98,92
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	195.102.500,00	167.843.500,00	(27.259.000,00)	86,03
02.2.02.06.5.1.01	Belanja Pegawai	10.430.000,00	10.430.000,00	0,00	100,00
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.672.500,00	157.413.500,00	(27.259.000,00)	85,24
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	2.329.010.000,00	2.329.010.000,00	0,00	100,00
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.329.010.000,00	2.329.010.000,00	0,00	100,00
02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	836.603.000,00	827.253.000,00	(9.350.000,00)	98,88
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	77.394.000,00	68.044.000,00	(9.350.000,00)	87,92
02.2.02.09.5.1.01	Belanja Pegawai	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	100,00
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.824.000,00	59.474.000,00	(9.350.000,00)	86,41
02.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	759.209.000,00	759.209.000,00	0,00	100,00
02.2.02.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	759.209.000,00	759.209.000,00	0,00	100,00
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.748.134.600,00	2.742.524.600,00	(5.610.000,00)	99,80
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	2.748.134.600,00	2.742.524.600,00	(5.610.000,00)	99,80
02.2.02.14.5.1.01	Belanja Pegawai	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	100,00
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.718.684.600,00	2.713.074.600,00	(5.610.000,00)	99,79
02.2.02.14.5.1.05	Belanja Hibah	18.620.000,00	18.620.000,00	0,00	100,00
02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	357.291.000,00	353.891.000,00	(3.400.000,00)	99,05
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	357.291.000,00	353.891.000,00	(3.400.000,00)	99,05
02.2.02.15.5.1.01	Belanja Pegawai	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	100,00
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.501.000,00	349.101.000,00	(3.400.000,00)	99,04
02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	523.665.600,00	519.075.600,00	(4.590.000,00)	99,12
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	523.665.600,00	519.075.600,00	(4.590.000,00)	99,12
02.2.02.17.5.1.01	Belanja Pegawai	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.865.600,00	513.275.600,00	(4.590.000,00)	99,11
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	296.949.000,00	294.229.000,00	(2.720.000,00)	99,08
02.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	296.949.000,00	294.229.000,00	(2.720.000,00)	99,08
02.2.02.24.5.1.01	Belanja Pegawai	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	100,00
02.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.159.000,00	289.439.000,00	(2.720.000,00)	99,07
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	108.714.900,00	107.871.900,00	(843.000,00)	99,22
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	70.194.900,00	69.351.900,00	(843.000,00)	98,80
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.194.900,00	69.351.900,00	(843.000,00)	98,80
02.2.02.37.5.2	BELANJA MODAL	38.520.000,00	38.520.000,00	0,00	100,00
02.2.02.37.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.520.000,00	38.520.000,00	0,00	100,00
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	576.152.400,00	562.672.400,00	(13.480.000,00)	97,66
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	576.152.400,00	562.672.400,00	(13.480.000,00)	97,66
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.152.400,00	562.672.400,00	(13.480.000,00)	97,66
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	82.923.700,00	82.913.700,00	(10.000,00)	99,99
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	82.923.700,00	82.913.700,00	(10.000,00)	99,99
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.923.700,00	82.913.700,00	(10.000,00)	99,99
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.500.220.000,00	10.229.844.141,00	(270.375.859,00)	97,43
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	9.566.475.400,00	9.328.521.541,00	(237.953.859,00)	97,51
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.438.975.400,00	5.323.872.643,00	(115.102.757,00)	97,88
02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	4.127.500.000,00	4.004.648.898,00	(122.851.102,00)	97,02
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	933.744.600,00	901.322.600,00	(32.422.000,00)	96,53
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	751.262.900,00	719.927.900,00	(31.335.000,00)	95,83
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	182.481.700,00	181.394.700,00	(1.087.000,00)	99,40
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.509.314.600,00	4.506.441.930,00	(2.872.670,00)	99,94
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	215.889.000,00	213.969.000,00	(1.920.000,00)	99,11
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.389.000,00	25.469.000,00	(1.920.000,00)	92,99
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	100,00
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.119.000,00	20.199.000,00	(1.920.000,00)	91,32
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	188.500.000,00	188.500.000,00	0,00	100,00
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.500.000,00	188.500.000,00	0,00	100,00
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.880.535.000,00	1.878.155.000,00	(2.380.000,00)	99,87
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.107.000,00	197.727.000,00	(2.380.000,00)	98,81
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	62.240.000,00	62.240.000,00	0,00	100,00
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.867.000,00	135.487.000,00	(2.380.000,00)	98,27
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	1.680.428.000,00	1.680.428.000,00	0,00	100,00
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.680.428.000,00	1.680.428.000,00	0,00	100,00
02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.203.317.200,00	2.206.317.200,00	3.000.000,00	100,14
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.143.639.200,00	2.146.639.200,00	3.000.000,00	100,14
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	587.839.200,00	590.839.200,00	3.000.000,00	100,51
02.2.03.11.5.1.05	Belanja Hibah	1.555.800.000,00	1.555.800.000,00	0,00	100,00
02.2.03.11.5.2	BELANJA MODAL	59.678.000,00	59.678.000,00	0,00	100,00
02.2.03.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.678.000,00	59.678.000,00	0,00	100,00
02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	78.220.000,00	77.710.000,00	(510.000,00)	99,35
02.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	3.220.000,00	2.710.000,00	(510.000,00)	84,16
02.2.03.12.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00
02.2.03.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.020.000,00	(510.000,00)	66,67
02.2.03.12.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
02.2.03.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	131.353.400,00	130.290.730,00	(1.062.670,00)	99,19
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	131.353.400,00	130.290.730,00	(1.062.670,00)	99,19
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.353.400,00	130.290.730,00	(1.062.670,00)	99,19
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	366.130.000,00	362.490.000,00	(3.640.000,00)	99,01
02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	366.130.000,00	362.490.000,00	(3.640.000,00)	99,01
02.2.04.10.5.1	BELANJA OPERASI	366.130.000,00	362.490.000,00	(3.640.000,00)	99,01
02.2.04.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.830.000,00	54.190.000,00	(3.640.000,00)	93,71
02.2.04.10.5.1.05	Belanja Hibah	308.300.000,00	308.300.000,00	0,00	100,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	91.678.000,00	91.628.000,00	(50.000,00)	99,95
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.678.000,00	91.628.000,00	(50.000,00)	99,95
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	91.678.000,00	91.628.000,00	(50.000,00)	99,95
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.678.000,00	91.628.000,00	(50.000,00)	99,95
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.678.000,00	91.628.000,00	(50.000,00)	99,95
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	100,00
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	100,00
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	100,00
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	153.015.000,00	152.922.000,00	(93.000,00)	99,94
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	153.015.000,00	152.922.000,00	(93.000,00)	99,94
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	153.015.000,00	152.922.000,00	(93.000,00)	99,94
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	151.382.000,00	151.322.000,00	(60.000,00)	99,96
05.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.582.000,00	148.522.000,00	(60.000,00)	99,96
05.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	1.633.000,00	1.600.000,00	(33.000,00)	97,98
05.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.633.000,00	1.600.000,00	(33.000,00)	97,98
	SURPLUS / DEFISIT	(189.076.545.375,00)	(181.882.138.938,00)	7.194.406.437,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(189.076.545.375,00)	(181.882.138.938,00)	7.194.406.437,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
 Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.594.564.460,00	2.112.445.576,20	(482.118.883,80)	81,42
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.594.564.460,00	2.112.445.576,20	(482.118.883,80)	81,42
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.712.000.000,00	504.218.226,20	(1.207.781.773,80)	29,45
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	882.564.460,00	1.608.227.350,00	725.662.890,00	182,22
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	101.649.429.677,00	89.643.186.697,00	(12.006.242.980,00)	88,19
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.993.309.935,00	50.041.097.413,00	(952.212.522,00)	98,13
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.037.000,00	477.222.960,00	(122.814.040,00)	79,53
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.652.000,00	62.397.000,00	(57.255.000,00)	52,15
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	119.652.000,00	62.397.000,00	(57.255.000,00)	52,15
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.652.000,00	62.397.000,00	(57.255.000,00)	52,15
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55.234.000,00	51.864.000,00	(3.370.000,00)	93,90
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.234.000,00	51.864.000,00	(3.370.000,00)	93,90
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.234.000,00	51.864.000,00	(3.370.000,00)	93,90
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	425.151.000,00	362.961.960,00	(62.189.040,00)	85,37
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	421.471.000,00	359.281.960,00	(62.189.040,00)	85,24
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.471.000,00	359.281.960,00	(62.189.040,00)	85,24
01.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	3.680.000,00	3.680.000,00	-	100,00
01.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.680.000,00	3.680.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.431.217.669,00	45.147.930.680,00	(283.286.989,00)	99,38
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.721.237.669,00	44.454.717.680,00	(266.519.989,00)	99,40
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.721.237.669,00	44.454.717.680,00	(266.519.989,00)	99,40
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	44.721.237.669,00	44.454.717.680,00	(266.519.989,00)	99,40
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	682.730.000,00	665.963.000,00	(16.767.000,00)	97,54
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	682.730.000,00	665.963.000,00	(16.767.000,00)	97,54
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	658.490.000,00	646.370.000,00	(12.120.000,00)	98,16
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	19.593.000,00	(4.647.000,00)	80,83
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.890.000,00	25.890.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.890.000,00	25.890.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.890.000,00	25.890.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.102.554.380,00	1.921.678.699,00	(180.875.681,00)	91,40
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.269.000,00	67.503.999,00	(7.765.001,00)	89,68
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.269.000,00	67.503.999,00	(7.765.001,00)	89,68
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.269.000,00	67.503.999,00	(7.765.001,00)	89,68
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	709.728.180,00	617.312.800,00	(92.415.380,00)	86,98
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	320.825.000,00	317.419.000,00	(3.406.000,00)	98,94
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.135.000,00	315.729.000,00	(3.406.000,00)	98,93
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	388.903.180,00	299.893.800,00	(89.009.380,00)	77,11
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.296.980,00	299.893.800,00	(26.403.180,00)	91,91
01.2.06.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.606.200,00	-	(62.606.200,00)	-
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	368.527.600,00	343.657.500,00	(24.870.100,00)	93,25
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	368.527.600,00	343.657.500,00	(24.870.100,00)	93,25
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.527.600,00	343.657.500,00	(24.870.100,00)	93,25
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	618.363.600,00	598.648.400,00	(19.715.200,00)	96,81
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	618.363.600,00	598.648.400,00	(19.715.200,00)	96,81
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.363.600,00	598.648.400,00	(19.715.200,00)	96,81
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.320.000,00	(300.000,00)	81,48
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.320.000,00	(300.000,00)	81,48
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.320.000,00	(300.000,00)	81,48
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.540.000,00	8.060.000,00	(2.480.000,00)	76,47
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.540.000,00	8.060.000,00	(2.480.000,00)	76,47
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.540.000,00	8.060.000,00	(2.480.000,00)	76,47
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.506.000,00	285.176.000,00	(33.330.000,00)	89,54

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	318.506.000,00	285.176.000,00	(33.330.000,00)	89,54
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.506.000,00	285.176.000,00	(33.330.000,00)	89,54
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.352.138.086,00	2.083.507.904,00	(268.630.182,00)	88,58
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	371.333.703,00	338.325.950,00	(33.007.753,00)	91,11
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	365.207.703,00	335.262.950,00	(29.944.753,00)	91,80
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.207.703,00	335.262.950,00	(29.944.753,00)	91,80
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	6.126.000,00	3.063.000,00	(3.063.000,00)	50,00
01.2.08.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.126.000,00	3.063.000,00	(3.063.000,00)	50,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.291.000,00	81.194.000,00	(97.000,00)	99,88
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	76.791.000,00	76.694.000,00	(97.000,00)	99,87
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.791.000,00	76.694.000,00	(97.000,00)	99,87
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.899.513.383,00	1.663.987.954,00	(235.525.429,00)	87,60
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.772.962.383,00	1.537.511.954,00	(235.450.429,00)	86,72
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	3.380.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.769.582.383,00	1.534.131.954,00	(235.450.429,00)	86,69
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	126.551.000,00	126.476.000,00	(75.000,00)	99,94
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.551.000,00	126.476.000,00	(75.000,00)	99,94
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.362.800,00	410.757.170,00	(96.605.630,00)	80,96
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	376.671.800,00	301.426.170,00	(75.245.630,00)	80,02
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	376.671.800,00	301.426.170,00	(75.245.630,00)	80,02
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.671.800,00	301.426.170,00	(75.245.630,00)	80,02
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.020.000,00	61.780.000,00	(18.240.000,00)	77,21
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	65.020.000,00	46.780.000,00	(18.240.000,00)	71,95
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.020.000,00	46.780.000,00	(18.240.000,00)	71,95
01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.691.000,00	16.991.000,00	(1.700.000,00)	90,90
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	18.691.000,00	16.991.000,00	(1.700.000,00)	90,90
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.691.000,00	16.991.000,00	(1.700.000,00)	90,90
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.980.000,00	30.560.000,00	(1.420.000,00)	95,56
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	31.980.000,00	30.560.000,00	(1.420.000,00)	95,56
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.980.000,00	30.560.000,00	(1.420.000,00)	95,56
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.162.325.742,00	36.673.153.598,00	(10.489.172.144,00)	77,76
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	13.688.191.980,00	10.365.685.412,00	(3.322.506.568,00)	75,73
02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	7.170.158.051,00	4.662.328.997,00	(2.507.829.054,00)	65,02
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	162.927.490,00	27.049.000,00	(135.878.490,00)	16,60
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.927.490,00	27.049.000,00	(135.878.490,00)	16,60
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	7.007.230.561,00	4.635.279.997,00	(2.371.950.564,00)	66,15
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.272.867.766,00	-	(2.272.867.766,00)	-
02.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.435.280.000,00	4.435.280.000,00	-	100,00
02.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	299.082.795,00	199.999.997,00	(99.082.798,00)	66,87
02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	1.036.219.640,00	1.036.219.640,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.003.719.640,00	1.003.719.640,00	-	100,00
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.003.719.640,00	1.003.719.640,00	-	100,00
02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	175.524.539,00	106.011.490,00	(69.513.049,00)	60,40
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	72.899.200,00	27.947.700,00	(44.951.500,00)	38,34
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.899.200,00	27.947.700,00	(44.951.500,00)	38,34
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	102.625.339,00	78.063.790,00	(24.561.549,00)	76,07
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.625.339,00	78.063.790,00	(24.561.549,00)	76,07
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.856.000,00	248.812.266,00	(2.043.734,00)	99,19
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	71.776.000,00	69.809.058,00	(1.966.942,00)	97,26
02.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	13.720.000,00	13.720.000,00	-	100,00
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.056.000,00	56.089.058,00	(1.966.942,00)	96,61
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	179.080.000,00	179.003.208,00	(76.792,00)	99,96
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.080.000,00	29.080.000,00	-	100,00
02.2.01.13.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	149.923.208,00	(76.792,00)	99,95
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	789.467.700,00	765.117.900,00	(24.349.800,00)	96,92
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	17.570.000,00	17.370.000,00	(200.000,00)	98,86
02.2.01.14.5.1.01	Belanja Pegawai	2.370.000,00	2.370.000,00	-	100,00
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.000.000,00	(200.000,00)	98,68
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	771.897.700,00	747.747.900,00	(24.149.800,00)	96,87
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	771.897.700,00	747.747.900,00	(24.149.800,00)	96,87
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.241.746.556,00	2.546.409.813,00	(695.336.743,00)	78,55
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	3.241.666.556,00	2.546.409.813,00	(695.256.743,00)	78,55

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	27.770.000,00	25.860.000,00	(1.910.000,00)	93,12
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.213.896.556,00	2.520.549.813,00	(693.346.743,00)	78,43
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	80.000,00	-	(80.000,00)	-
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000,00	-	(80.000,00)	-
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	924.219.494,00	901.252.494,00	(22.967.000,00)	97,51
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	924.219.494,00	901.252.494,00	(22.967.000,00)	97,51
02.2.01.17.5.1.01	Belanja Pegawai	9.650.000,00	9.650.000,00	-	100,00
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.569.494,00	891.602.494,00	(22.967.000,00)	97,49
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	99.532.812,00	(467.188,00)	99,53
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.532.812,00	(467.188,00)	99,53
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.532.812,00	(467.188,00)	99,53
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.463.117.762,00	26.296.452.186,00	(7.166.665.576,00)	78,58
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.702.711.938,00	1.345.013.738,00	(357.698.200,00)	78,99
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.198.388.000,00	876.723.000,00	(321.665.000,00)	73,16
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.760.000,00	7.760.000,00	-	100,00
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.190.628.000,00	868.963.000,00	(321.665.000,00)	72,98
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	504.323.938,00	468.290.738,00	(36.033.200,00)	92,86
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.323.938,00	468.290.738,00	(36.033.200,00)	92,86
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	689.140.000,00	591.760.000,00	(97.380.000,00)	85,87
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	543.540.000,00	454.308.000,00	(89.232.000,00)	83,58
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.210.000,00	(680.000,00)	64,02
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.650.000,00	453.098.000,00	(88.552.000,00)	83,65
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	145.600.000,00	137.452.000,00	(8.148.000,00)	94,40
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.600.000,00	137.452.000,00	(8.148.000,00)	94,40
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	649.052.000,00	568.000.000,00	(81.052.000,00)	87,51
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	219.052.000,00	141.541.000,00	(77.511.000,00)	64,62
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.090.000,00	2.090.000,00	-	100,00
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.962.000,00	139.451.000,00	(77.511.000,00)	64,27
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	430.000.000,00	426.459.000,00	(3.541.000,00)	99,18
02.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	430.000.000,00	426.459.000,00	(3.541.000,00)	99,18
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	531.896.000,00	441.833.580,00	(90.062.420,00)	83,07
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	531.896.000,00	441.833.580,00	(90.062.420,00)	83,07
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.896.000,00	441.833.580,00	(90.062.420,00)	83,07
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	572.885.000,00	483.165.000,00	(89.720.000,00)	84,34
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	572.885.000,00	483.165.000,00	(89.720.000,00)	84,34
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.885.000,00	483.165.000,00	(89.720.000,00)	84,34
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	418.100.000,00	340.138.000,00	(77.962.000,00)	81,35
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	418.100.000,00	340.138.000,00	(77.962.000,00)	81,35
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.100.000,00	340.138.000,00	(77.962.000,00)	81,35
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	505.240.800,00	454.981.800,00	(50.259.000,00)	90,05
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	505.240.800,00	454.981.800,00	(50.259.000,00)	90,05
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.240.800,00	454.981.800,00	(50.259.000,00)	90,05
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	94.320.000,00	88.110.000,00	(6.210.000,00)	93,42
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	94.320.000,00	88.110.000,00	(6.210.000,00)	93,42
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.320.000,00	88.110.000,00	(6.210.000,00)	93,42
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	363.244.200,00	352.614.200,00	(10.630.000,00)	97,07
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	363.244.200,00	352.614.200,00	(10.630.000,00)	97,07
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.244.200,00	352.614.200,00	(10.630.000,00)	97,07
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	172.062.000,00	140.954.000,00	(31.108.000,00)	81,92
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	172.062.000,00	140.954.000,00	(31.108.000,00)	81,92
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.062.000,00	140.954.000,00	(31.108.000,00)	81,92
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	505.051.000,00	468.505.000,00	(36.546.000,00)	92,76
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	505.051.000,00	468.505.000,00	(36.546.000,00)	92,76
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.051.000,00	468.505.000,00	(36.546.000,00)	92,76
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	175.162.856,00	168.295.856,00	(6.867.000,00)	96,08
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	175.162.856,00	168.295.856,00	(6.867.000,00)	96,08
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.162.856,00	168.295.856,00	(6.867.000,00)	96,08
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	159.390.000,00	79.450.000,00	(79.940.000,00)	49,85
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	159.390.000,00	79.450.000,00	(79.940.000,00)	49,85
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.390.000,00	79.450.000,00	(79.940.000,00)	49,85
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.960.825.000,00	1.987.427.704,00	(973.397.296,00)	67,12
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	2.406.445.000,00	1.433.047.704,00	(973.397.296,00)	59,55
02.2.02.15.5.1.01	Belanja Pegawai	3.210.000,00	1.410.000,00	(1.800.000,00)	43,93
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.403.235.000,00	1.431.637.704,00	(971.597.296,00)	59,57
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	554.380.000,00	554.380.000,00	-	100,00
02.2.02.15.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	554.380.000,00	554.380.000,00	-	100,00
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	227.339.000,00	183.832.000,00	(43.507.000,00)	80,86

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	227.339.000,00	183.832.000,00	(43.507.000,00)	80,86
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.339.000,00	183.832.000,00	(43.507.000,00)	80,86
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.066.989.000,00	725.627.000,00	(341.362.000,00)	68,01
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.066.989.000,00	725.627.000,00	(341.362.000,00)	68,01
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.989.000,00	725.627.000,00	(341.362.000,00)	68,01
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	38.580.000,00	16.060.000,00	(22.520.000,00)	41,63
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	38.580.000,00	16.060.000,00	(22.520.000,00)	41,63
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.580.000,00	16.060.000,00	(22.520.000,00)	41,63
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.560.000,00	14.750.000,00	(8.810.000,00)	62,61
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	23.560.000,00	14.750.000,00	(8.810.000,00)	62,61
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.560.000,00	14.750.000,00	(8.810.000,00)	62,61
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	56.660.000,00	36.010.000,00	(20.650.000,00)	63,55
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	56.660.000,00	36.010.000,00	(20.650.000,00)	63,55
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.660.000,00	36.010.000,00	(20.650.000,00)	63,55
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	22.268.000,00	19.625.080,00	(2.642.920,00)	88,13
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	22.268.000,00	19.625.080,00	(2.642.920,00)	88,13
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.268.000,00	19.625.080,00	(2.642.920,00)	88,13
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.820.807.600,00	2.523.064.650,00	(3.297.742.950,00)	43,35
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	5.715.807.600,00	2.433.154.650,00	(3.282.652.950,00)	42,57
02.2.02.25.5.1.01	Belanja Pegawai	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.606.357.600,00	2.323.704.650,00	(3.282.652.950,00)	41,45
02.2.02.25.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	105.000.000,00	89.910.000,00	(15.090.000,00)	85,63
02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.000.000,00	89.910.000,00	(15.090.000,00)	85,63
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.661.999.484,00	13.823.258.017,00	(838.741.467,00)	94,28
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	14.640.144.484,00	13.801.403.017,00	(838.741.467,00)	94,27
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.638.454.484,00	13.799.713.017,00	(838.741.467,00)	94,27
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	21.855.000,00	21.855.000,00	-	100,00
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.855.000,00	21.855.000,00	-	100,00
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	9.773.200,00	2.452.500,00	(7.320.700,00)	25,09
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	9.773.200,00	2.452.500,00	(7.320.700,00)	25,09
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.773.200,00	2.452.500,00	(7.320.700,00)	25,09
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	97.315.000,00	60.981.948,00	(36.333.052,00)	62,66
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	94.740.000,00	59.631.948,00	(35.108.052,00)	62,94
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.740.000,00	59.631.948,00	(35.108.052,00)	62,94
02.2.02.32.5.2	BELANJA MODAL	2.575.000,00	1.350.000,00	(1.225.000,00)	52,43
02.2.02.32.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.575.000,00	1.350.000,00	(1.225.000,00)	52,43
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.292.526.084,00	1.165.114.473,00	(127.411.611,00)	90,14
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	1.236.191.084,00	1.108.779.473,00	(127.411.611,00)	89,69
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.234.501.084,00	1.107.089.473,00	(127.411.611,00)	89,68
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	56.335.000,00	56.335.000,00	-	100,00
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.335.000,00	56.335.000,00	-	100,00
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	212.494.000,00	156.416.040,00	(56.077.960,00)	73,61
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	209.994.000,00	153.916.040,00	(56.077.960,00)	73,30
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.994.000,00	3.916.040,00	(6.077.960,00)	39,18
02.2.02.34.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	75,00
02.2.02.34.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
02.2.02.34.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	424.905.600,00	59.011.600,00	(365.894.000,00)	13,89
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	424.905.600,00	59.011.600,00	(365.894.000,00)	13,89
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.905.600,00	59.011.600,00	(365.894.000,00)	13,89
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.820.000,00	-	(8.820.000,00)	-
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	8.820.000,00	-	(8.820.000,00)	-
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	-	(8.820.000,00)	-
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	11.016.000,00	11.016.000,00	-	100,00
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	11.016.000,00	11.016.000,00	-	100,00
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.016.000,00	11.016.000,00	-	100,00
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.016.000,00	11.016.000,00	-	100,00
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.736.685.000,00	1.724.793.200,00	(11.891.800,00)	99,32
03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	32.095.000,00	27.370.000,00	(4.725.000,00)	85,28
03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.320.000,00	2.320.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.320.000,00	2.320.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	2.320.000,00	-	100,00
03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	29.775.000,00	25.050.000,00	(4.725.000,00)	84,13
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.775.000,00	25.050.000,00	(4.725.000,00)	84,13
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.775.000,00	25.050.000,00	(4.725.000,00)	84,13

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.652.900.000,00	1.650.760.000,00	(2.140.000,00)	99,87
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.646.500.000,00	1.644.500.000,00	(2.000.000,00)	99,88
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.646.500.000,00	1.644.500.000,00	(2.000.000,00)	99,88
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.646.500.000,00	1.644.500.000,00	(2.000.000,00)	99,88
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.400.000,00	6.260.000,00	(140.000,00)	97,81
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.260.000,00	(140.000,00)	97,81
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.260.000,00	(140.000,00)	97,81
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.690.000,00	46.663.200,00	(5.026.800,00)	90,28
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.690.000,00	46.663.200,00	(5.026.800,00)	90,28
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.690.000,00	46.663.200,00	(5.026.800,00)	90,28
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.690.000,00	46.663.200,00	(5.026.800,00)	90,28
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	81.900.000,00	64.070.000,00	(17.830.000,00)	78,23
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14.240.000,00	10.820.000,00	(3.420.000,00)	75,98
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6.560.000,00	3.140.000,00	(3.420.000,00)	47,87
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.560.000,00	3.140.000,00	(3.420.000,00)	47,87
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	3.140.000,00	(3.420.000,00)	47,87
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	14.240.000,00	3.000.000,00	(11.240.000,00)	21,07
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	14.240.000,00	3.000.000,00	(11.240.000,00)	21,07
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.240.000,00	3.000.000,00	(11.240.000,00)	21,07
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.240.000,00	3.000.000,00	(11.240.000,00)	21,07
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	53.420.000,00	50.250.000,00	(3.170.000,00)	94,07
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	53.420.000,00	50.250.000,00	(3.170.000,00)	94,07
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.420.000,00	50.250.000,00	(3.170.000,00)	94,07
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.420.000,00	50.250.000,00	(3.170.000,00)	94,07
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.675.209.000,00	1.140.072.486,00	(535.136.514,00)	68,06
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.161.851.000,00	745.734.486,00	(416.116.514,00)	64,19
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.161.851.000,00	745.734.486,00	(416.116.514,00)	64,19
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.161.851.000,00	745.734.486,00	(416.116.514,00)	64,19
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.851.000,00	745.734.486,00	(416.116.514,00)	64,19
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	513.358.000,00	394.338.000,00	(119.020.000,00)	76,82
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	513.358.000,00	394.338.000,00	(119.020.000,00)	76,82
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	513.358.000,00	394.338.000,00	(119.020.000,00)	76,82
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.358.000,00	394.338.000,00	(119.020.000,00)	76,82
	SURPLUS / DEFISIT	(99.054.865.217,00)	(87.530.741.120,80)	11.524.124.096,20	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(99.054.865.217,00)	(87.530.741.120,80)	11.524.124.096,20	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
 Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.001 BLUD RSUD AERAMO

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	10.005.000.000,00	14.865.618.804,48	4.860.618.804,48	148,58
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.005.000.000,00	14.865.618.804,48	4.860.618.804,48	148,58
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.005.000.000,00	14.865.618.804,48	4.860.618.804,48	148,58
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	36.193.331.445,00	28.301.663.285,28	(7.891.668.159,72)	78,20
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.192.295.338,00	7.216.866.508,00	(5.975.428.830,00)	54,71
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.119.000,00	34.371.000,00	(1.748.000,00)	95,16
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.842.000,00	1.530.000,00	(312.000,00)	83,06
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.842.000,00	1.530.000,00	(312.000,00)	83,06
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.842.000,00	1.530.000,00	(312.000,00)	83,06
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.977.000,00	1.815.000,00	(162.000,00)	91,81
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.977.000,00	1.815.000,00	(162.000,00)	91,81
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.977.000,00	1.815.000,00	(162.000,00)	91,81
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.400.000,00	11.723.000,00	(677.000,00)	94,54
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.400.000,00	11.723.000,00	(677.000,00)	94,54
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	11.723.000,00	(677.000,00)	94,54
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	19.900.000,00	19.303.000,00	(597.000,00)	97,00
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.900.000,00	19.303.000,00	(597.000,00)	97,00
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	19.303.000,00	(597.000,00)	97,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.681.000,00	4.516.000,00	(165.000,00)	96,48
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.681.000,00	4.516.000,00	(165.000,00)	96,48
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.681.000,00	4.516.000,00	(165.000,00)	96,48
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.681.000,00	4.516.000,00	(165.000,00)	96,48
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.800.790.470,00	1.676.959.803,00	(123.830.667,00)	93,12
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.955.000,00	10.456.000,00	(6.499.000,00)	61,67
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.955.000,00	10.456.000,00	(6.499.000,00)	61,67
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.955.000,00	10.456.000,00	(6.499.000,00)	61,67
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.532.770,00	205.518.000,00	(2.014.770,00)	99,03
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.780.000,00	4.780.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.780.000,00	4.780.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	202.752.770,00	200.738.000,00	(2.014.770,00)	99,01
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.752.770,00	200.738.000,00	(2.014.770,00)	99,01
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.257.000,00	57.588.696,00	(11.668.304,00)	83,15
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.703.000,00	7.588.696,00	(3.114.304,00)	70,90
01.2.06.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.290.000,00	2.290.000,00	-	100,00
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.413.000,00	5.298.696,00	(3.114.304,00)	62,98
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	58.554.000,00	50.000.000,00	(8.554.000,00)	85,39
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.554.000,00	50.000.000,00	(8.554.000,00)	85,39
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	713.610.700,00	635.903.957,00	(77.706.743,00)	89,11
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	713.320.700,00	635.903.957,00	(77.416.743,00)	89,15
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.290.000,00	2.290.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.030.700,00	633.613.957,00	(77.416.743,00)	89,11
01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	290.000,00	-	(290.000,00)	-
01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.000,00	-	(290.000,00)	-
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	330.860.000,00	324.671.650,00	(6.188.350,00)	98,13
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	330.860.000,00	324.671.650,00	(6.188.350,00)	98,13
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.290.000,00	2.290.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.570.000,00	322.381.650,00	(6.188.350,00)	98,12
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	433.460.000,00	432.341.500,00	(1.118.500,00)	99,74
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	433.460.000,00	432.341.500,00	(1.118.500,00)	99,74
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.460.000,00	432.341.500,00	(1.118.500,00)	99,74
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.115.000,00	10.480.000,00	(18.635.000,00)	36,00
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	29.115.000,00	10.480.000,00	(18.635.000,00)	36,00
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.115.000,00	10.480.000,00	(18.635.000,00)	36,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.253.187.000,00	1.245.083.499,00	(8.103.501,00)	99,35
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.737.000,00	323.383.499,00	(5.353.501,00)	98,37
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	328.737.000,00	323.383.499,00	(5.353.501,00)	98,37
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.737.000,00	323.383.499,00	(5.353.501,00)	98,37
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	924.450.000,00	921.700.000,00	(2.750.000,00)	99,70
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	924.450.000,00	921.700.000,00	(2.750.000,00)	99,70

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	924.450.000,00	921.700.000,00	(2.750.000,00)	99,70
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.517.868,00	88.978.020,00	(8.539.848,00)	91,24
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.127.868,00	64.703.020,00	(8.424.848,00)	88,48
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.127.868,00	64.703.020,00	(8.424.848,00)	88,48
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.127.868,00	64.703.020,00	(8.424.848,00)	88,48
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.390.000,00	24.275.000,00	(115.000,00)	99,53
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	24.390.000,00	24.275.000,00	(115.000,00)	99,53
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.390.000,00	24.275.000,00	(115.000,00)	99,53
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	10.000.000.000,00	4.166.958.186,00	(5.833.041.814,00)	41,67
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.000.000.000,00	4.166.958.186,00	(5.833.041.814,00)	41,67
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000.000,00	4.153.949.186,00	(5.346.050.814,00)	43,73
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	250.000.000,00	130.990.000,00	(119.010.000,00)	52,40
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000.000,00	4.022.959.186,00	(5.227.040.814,00)	43,49
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	13.009.000,00	(486.991.000,00)	2,60
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	13.009.000,00	(486.991.000,00)	2,60
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.001.036.107,00	21.084.796.777,28	(1.916.239.329,72)	91,67
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	13.737.651.107,00	12.172.309.205,28	(1.565.341.901,72)	88,61
02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.076.990.000,00	3.076.648.625,00	(341.375,00)	99,99
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.076.990.000,00	3.076.648.625,00	(341.375,00)	99,99
02.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	8.490.000,00	8.490.000,00	-	100,00
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.068.500.000,00	3.068.158.625,00	(341.375,00)	99,99
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	892.940.000,00	744.350.000,00	(148.590.000,00)	83,36
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	892.940.000,00	744.350.000,00	(148.590.000,00)	83,36
02.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	2.890.000,00	2.210.000,00	(680.000,00)	76,47
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.050.000,00	742.140.000,00	(147.910.000,00)	83,38
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.333.942.607,00	2.372.647.699,28	(961.294.907,72)	71,17
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	46.840.832,00	46.840.832,00	-	100,00
02.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	6.980.000,00	6.980.000,00	-	100,00
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.860.832,00	39.860.832,00	-	100,00
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	3.287.101.775,00	2.325.806.867,28	(961.294.907,72)	70,76
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	947.101.775,00	-	(947.101.775,00)	-
02.2.01.13.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.340.000.000,00	2.325.806.867,28	(14.193.132,72)	99,39
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.683.910.301,00	2.663.106.977,00	(20.803.324,00)	99,22
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	17.430.000,00	17.030.000,00	(400.000,00)	97,71
02.2.01.14.5.1.01	Belanja Pegawai	17.430.000,00	17.030.000,00	(400.000,00)	97,71
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	2.666.480.301,00	2.646.076.977,00	(20.403.324,00)	99,23
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.666.480.301,00	2.646.076.977,00	(20.403.324,00)	99,23
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.059.002.200,00	810.361.678,00	(248.640.522,00)	76,52
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	1.059.002.200,00	810.361.678,00	(248.640.522,00)	76,52
02.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.053.122.200,00	804.481.678,00	(248.640.522,00)	76,39
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.690.865.999,00	2.505.194.226,00	(185.671.773,00)	93,10
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.690.865.999,00	2.505.194.226,00	(185.671.773,00)	93,10
02.2.01.17.5.1.01	Belanja Pegawai	28.800.000,00	26.110.000,00	(2.690.000,00)	90,66
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.662.065.999,00	2.479.084.226,00	(182.981.773,00)	93,13
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.263.385.000,00	8.912.487.572,00	(350.897.428,00)	96,21
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.056.900.000,00	2.043.720.172,00	(13.179.828,00)	99,36
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	2.056.900.000,00	2.043.720.172,00	(13.179.828,00)	99,36
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.056.900.000,00	2.043.720.172,00	(13.179.828,00)	99,36
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6.956.485.000,00	6.845.745.000,00	(110.740.000,00)	98,41
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	6.956.485.000,00	6.845.745.000,00	(110.740.000,00)	98,41
02.2.02.32.5.1.01	Belanja Pegawai	6.950.000.000,00	6.840.000.000,00	(110.000.000,00)	98,42
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.485.000,00	5.745.000,00	(740.000,00)	88,59
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	250.000.000,00	23.022.400,00	(226.977.600,00)	9,21
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	23.022.400,00	(226.977.600,00)	9,21
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	23.022.400,00	(226.977.600,00)	9,21
	SURPLUS / DEFISIT	(26.188.331.445,00)	(13.436.044.480,80)	12.752.286.964,20	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(26.188.331.445,00)	(13.436.044.480,80)	12.752.286.964,20	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	9.149.229.508,00	1.236.714.166,00	(7.912.515.342,00)	13,52
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.149.229.508,00	1.236.714.166,00	(7.912.515.342,00)	13,52
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	9.049.229.508,00	1.135.614.166,00	(7.913.615.342,00)	12,55
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	101.100.000,00	1.100.000,00	101,10
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	93.610.751.751,00	85.633.809.432,93	(7.976.942.318,07)	91,48
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.972.468.872,00	7.715.931.830,00	(256.537.042,00)	96,78
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.788.100,00	106.612.900,00	(1.175.200,00)	98,91
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.656.600,00	61.814.400,00	(842.200,00)	98,66
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.656.600,00	61.814.400,00	(842.200,00)	98,66
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.656.600,00	61.814.400,00	(842.200,00)	98,66
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.131.500,00	44.798.500,00	(333.000,00)	99,26
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	45.131.500,00	44.798.500,00	(333.000,00)	99,26
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.131.500,00	44.798.500,00	(333.000,00)	99,26
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.558.452.994,00	3.505.020.764,00	(53.432.230,00)	98,50
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.136.604.994,00	3.096.987.764,00	(39.617.230,00)	98,74
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.136.604.994,00	3.096.987.764,00	(39.617.230,00)	98,74
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.136.604.994,00	3.096.987.764,00	(39.617.230,00)	98,74
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	421.848.000,00	408.033.000,00	(13.815.000,00)	96,73
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	421.848.000,00	408.033.000,00	(13.815.000,00)	96,73
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	158.520.000,00	144.720.000,00	(13.800.000,00)	91,29
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.328.000,00	263.313.000,00	(15.000,00)	99,99
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.072.200,00	537.422.534,00	(11.649.666,00)	97,88
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.976.100,00	49.968.000,00	(8.100,00)	99,98
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	49.976.100,00	49.968.000,00	(8.100,00)	99,98
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.976.100,00	49.968.000,00	(8.100,00)	99,98
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.246.100,00	20.246.100,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.246.100,00	20.246.100,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.246.100,00	20.246.100,00	-	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.716.000,00	1.440.000,00	(276.000,00)	83,92
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.716.000,00	1.440.000,00	(276.000,00)	83,92
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.716.000,00	1.440.000,00	(276.000,00)	83,92
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	28.645.000,00	28.287.000,00	(358.000,00)	98,75
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	28.645.000,00	28.287.000,00	(358.000,00)	98,75
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.645.000,00	28.287.000,00	(358.000,00)	98,75
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	443.409.000,00	432.401.434,00	(11.007.566,00)	97,52
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	443.409.000,00	432.401.434,00	(11.007.566,00)	97,52
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.409.000,00	432.401.434,00	(11.007.566,00)	97,52
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	551.410.000,00	519.791.000,00	(31.619.000,00)	94,27
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	551.410.000,00	519.791.000,00	(31.619.000,00)	94,27
01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.410.000,00	1.410.000,00	-	100,00
01.2.07.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	-	100,00
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	550.000.000,00	518.381.000,00	(31.619.000,00)	94,25
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550.000.000,00	518.381.000,00	(31.619.000,00)	94,25
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	977.495.858,00	967.294.000,00	(10.201.858,00)	98,96
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.745.000,00	2.745.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.745.000,00	2.745.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.745.000,00	2.745.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.513.858,00	24.570.000,00	(4.943.858,00)	83,25
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.513.858,00	24.570.000,00	(4.943.858,00)	83,25
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.513.858,00	24.570.000,00	(4.943.858,00)	83,25
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945.237.000,00	939.979.000,00	(5.258.000,00)	99,44
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	945.237.000,00	939.979.000,00	(5.258.000,00)	99,44
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.237.000,00	939.979.000,00	(5.258.000,00)	99,44
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.228.249.720,00	2.079.790.632,00	(148.459.088,00)	93,34
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505.567.000,00	416.007.323,00	(89.559.677,00)	82,29
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	505.567.000,00	416.007.323,00	(89.559.677,00)	82,29
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.567.000,00	416.007.323,00	(89.559.677,00)	82,29
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.722.682.720,00	1.663.783.309,00	(58.899.411,00)	96,58
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.722.682.720,00	1.663.783.309,00	(58.899.411,00)	96,58
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.722.682.720,00	1.663.783.309,00	(58.899.411,00)	96,58
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.422.062.198,00	4.175.773.200,00	(246.288.998,00)	94,43
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.422.062.198,00	4.175.773.200,00	(246.288.998,00)	94,43
02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.720.152.198,00	2.575.594.200,00	(144.557.998,00)	94,69

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	321.320.000,00	300.311.000,00	(21.009.000,00)	93,46
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	21.320.000,00	21.320.000,00	-	100,00
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	278.991.000,00	(21.009.000,00)	93,00
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	2.398.832.198,00	2.275.283.200,00	(123.548.998,00)	94,85
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.938.000,00	85.030.500,00	(64.907.500,00)	56,71
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.248.894.198,00	2.190.252.700,00	(58.641.498,00)	97,39
02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	1.701.910.000,00	1.600.179.000,00	(101.731.000,00)	94,02
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	201.910.000,00	201.179.000,00	(731.000,00)	99,64
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.910.000,00	1.910.000,00	-	100,00
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.269.000,00	(731.000,00)	99,63
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	1.399.000.000,00	(101.000.000,00)	93,27
02.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.500.000.000,00	1.399.000.000,00	(101.000.000,00)	93,27
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.958.334.628,00	6.867.598.361,44	(1.090.736.266,56)	86,29
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.958.334.628,00	6.867.598.361,44	(1.090.736.266,56)	86,29
03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	7.958.334.628,00	6.867.598.361,44	(1.090.736.266,56)	86,29
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	870.429.000,00	607.201.500,00	(263.227.500,00)	69,76
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	77.810.000,00	49.140.000,00	(28.670.000,00)	63,15
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.619.000,00	558.061.500,00	(234.557.500,00)	70,41
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	7.087.905.628,00	6.260.396.861,44	(827.508.766,56)	88,33
03.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.987.905.628,00	6.161.096.861,44	(826.808.766,56)	88,17
03.2.01.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.300.000,00	(700.000,00)	99,30
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.317.200.000,00	2.149.638.530,74	(167.561.469,26)	92,77
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.317.200.000,00	2.149.638.530,74	(167.561.469,26)	92,77
05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.317.200.000,00	2.149.638.530,74	(167.561.469,26)	92,77
05.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	177.200.000,00	151.261.250,00	(25.938.750,00)	85,36
05.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	25.510.000,00	14.290.000,00	(11.220.000,00)	56,02
05.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.690.000,00	136.971.250,00	(14.718.750,00)	90,30
05.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	2.140.000.000,00	1.998.377.280,74	(141.622.719,26)	93,38
05.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	740.000.000,00	740.000.000,00	-	100,00
05.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.400.000.000,00	1.258.377.280,74	(141.622.719,26)	89,88
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18.346.610.657,00	17.044.677.716,22	(1.301.932.940,78)	92,90
07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	18.346.610.657,00	17.044.677.716,22	(1.301.932.940,78)	92,90
07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	18.346.610.657,00	17.044.677.716,22	(1.301.932.940,78)	92,90
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.567.479.979,00	5.388.451.686,22	(179.028.292,78)	96,78
07.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	32.210.000,00	31.610.000,00	(600.000,00)	98,14
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.535.269.979,00	5.356.841.686,22	(178.428.292,78)	96,78
07.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	12.779.130.678,00	11.656.226.030,00	(1.122.904.648,00)	91,21
07.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-
07.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.729.130.678,00	11.656.226.030,00	(1.072.904.648,00)	91,57
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.845.218.500,00	2.421.489.135,00	(423.729.365,00)	85,11
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.845.218.500,00	2.421.489.135,00	(423.729.365,00)	85,11
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.845.218.500,00	2.421.489.135,00	(423.729.365,00)	85,11
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	245.218.500,00	202.714.900,00	(42.503.600,00)	82,67
08.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	20.140.000,00	8.390.000,00	(11.750.000,00)	41,66
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.078.500,00	194.324.900,00	(30.753.600,00)	86,34
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	2.600.000.000,00	2.218.774.235,00	(381.225.765,00)	85,34
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.600.000.000,00	2.218.774.235,00	(381.225.765,00)	85,34
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	48.675.456.896,00	44.209.518.301,53	(4.465.938.594,47)	90,83
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	48.675.456.896,00	44.209.518.301,53	(4.465.938.594,47)	90,83
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	46.421.348.206,00	42.129.514.811,53	(4.291.833.394,47)	90,75
10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.256.629.500,00	1.170.204.785,00	(86.424.715,00)	93,12
10.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	49.530.000,00	39.200.000,00	(10.330.000,00)	79,14
10.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.207.099.500,00	1.131.004.785,00	(76.094.715,00)	93,70
10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	45.164.718.706,00	40.959.310.026,53	(4.205.408.679,47)	90,69
10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.164.718.706,00	40.959.310.026,53	(4.205.408.679,47)	90,69
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	2.254.108.690,00	2.080.003.490,00	(174.105.200,00)	92,28
10.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	201.910.000,00	199.999.800,00	(1.910.200,00)	99,05
10.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	1.910.000,00	-	(1.910.000,00)	-
10.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.999.800,00	(200,00)	100,00
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	2.052.198.690,00	1.880.003.690,00	(172.195.000,00)	91,61
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.052.198.690,00	1.880.003.690,00	(172.195.000,00)	91,61
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.073.400.000,00	1.049.182.358,00	(24.217.642,00)	97,74
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	993.800.000,00	973.663.323,00	(20.136.677,00)	97,97
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	993.800.000,00	973.663.323,00	(20.136.677,00)	97,97
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	993.800.000,00	973.663.323,00	(20.136.677,00)	97,97
12.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.210.000,00	1.610.000,00	(4.600.000,00)	25,93
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.590.000,00	972.053.323,00	(15.536.677,00)	98,43
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	79.600.000,00	75.519.035,00	(4.080.965,00)	94,87
12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	79.600.000,00	75.519.035,00	(4.080.965,00)	94,87
12.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.100.000,00	68.019.035,00	(4.080.965,00)	94,34
12.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	68.019.035,00	(4.080.965,00)	94,34
12.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
12.2.04.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	9.086.572.908,00	1.174.899.766,00	(7.911.673.142,00)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	9.086.572.908,00	1.174.899.766,00	(7.911.673.142,00)	

Lampiran t. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juli 2023

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02 BLUD SPAM

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	3.035.000.000,00	1.982.576.382,00	(1.052.423.618,00)	65,32
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.035.000.000,00	1.982.576.382,00	(1.052.423.618,00)	65,32
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.035.000.000,00	1.982.576.382,00	(1.052.423.618,00)	65,32
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.468.495.000,00	2.515.831.301,00	(952.663.699,00)	72,53
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.468.495.000,00	2.515.831.301,00	(952.663.699,00)	72,53
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.468.495.000,00	2.515.831.301,00	(952.663.699,00)	72,53
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.468.495.000,00	2.515.831.301,00	(952.663.699,00)	72,53
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.468.495.000,00	2.515.831.301,00	(952.663.699,00)	72,53
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.507.160.000,00	1.846.563.459,00	(660.596.541,00)	73,65
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961.335.000,00	669.267.842,00	(292.067.158,00)	69,62
	SURPLUS / DEFISIT	(433.495.000,00)	(533.254.919,00)	(99.759.919,00)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(433.495.000,00)	(533.254.919,00)	(99.759.919,00)	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1-04.0-00.0-00.01.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	-	1.912.000,00	1.912.000,00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.912.000,00	1.912.000,00	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	1.912.000,00	1.912.000,00	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	25.526.364.660,00	25.375.821.009,00	(150.543.651,00)	99,41
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.502.734.460,00	1.461.079.809,00	(41.654.651,00)	97,23
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.668.300,00	114.443.000,00	(225.300,00)	99,80
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.848.300,00	60.709.500,00	(138.800,00)	99,77
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.848.300,00	60.709.500,00	(138.800,00)	99,77
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.848.300,00	60.709.500,00	(138.800,00)	99,77
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.820.000,00	53.733.500,00	(86.500,00)	99,84
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	53.820.000,00	53.733.500,00	(86.500,00)	99,84
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.820.000,00	53.733.500,00	(86.500,00)	99,84
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.019.670.360,00	989.586.303,00	(30.084.057,00)	97,05
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	926.704.360,00	896.961.303,00	(29.743.057,00)	96,79
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	926.704.360,00	896.961.303,00	(29.743.057,00)	96,79
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	926.704.360,00	896.961.303,00	(29.743.057,00)	96,79
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.966.000,00	92.625.000,00	(341.000,00)	99,63
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	92.966.000,00	92.625.000,00	(341.000,00)	99,63
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	80.760.000,00	80.760.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.206.000,00	11.865.000,00	(341.000,00)	97,21
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.569.900,00	13.483.900,00	(86.000,00)	99,37
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.569.900,00	13.483.900,00	(86.000,00)	99,37
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.569.900,00	13.483.900,00	(86.000,00)	99,37
01.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.769.900,00	8.683.900,00	(86.000,00)	99,02
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.619.200,00	179.335.799,00	(1.283.401,00)	99,29
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.125.000,00	9.125.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.125.000,00	9.125.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	9.125.000,00	-	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.867.000,00	17.849.000,00	(18.000,00)	99,90
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.867.000,00	17.849.000,00	(18.000,00)	99,90
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.867.000,00	17.849.000,00	(18.000,00)	99,90
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.355.200,00	54.271.799,00	(83.401,00)	99,85
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	54.355.200,00	54.271.799,00	(83.401,00)	99,85
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.355.200,00	54.271.799,00	(83.401,00)	99,85
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.872.000,00	900.000,00	(972.000,00)	48,08
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.872.000,00	900.000,00	(972.000,00)	48,08
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000,00	900.000,00	(972.000,00)	48,08
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.200.000,00	10.190.000,00	(10.000,00)	99,90
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.190.000,00	(10.000,00)	99,90
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.190.000,00	(10.000,00)	99,90
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.940.350,00	67.228.585,00	(1.711.765,00)	97,52
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	320.000,00	-	(320.000,00)	-
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	320.000,00	-	(320.000,00)	-
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	-	(320.000,00)	-
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.350.350,00	7.278.585,00	(1.071.765,00)	87,17
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.350.350,00	7.278.585,00	(1.071.765,00)	87,17
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.350.350,00	7.278.585,00	(1.071.765,00)	87,17
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.391.000,00	6.150.000,00	(241.000,00)	96,23
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.391.000,00	6.150.000,00	(241.000,00)	96,23
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.391.000,00	6.150.000,00	(241.000,00)	96,23
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.879.000,00	53.800.000,00	(79.000,00)	99,85
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.879.000,00	53.800.000,00	(79.000,00)	99,85

01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.879.000,00	53.800.000,00	(79.000,00)	99,85
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.266.350,00	97.002.222,00	(8.264.128,00)	92,15
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.266.350,00	97.002.222,00	(8.264.128,00)	92,15
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	105.266.350,00	97.002.222,00	(8.264.128,00)	92,15
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.266.350,00	97.002.222,00	(8.264.128,00)	92,15
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	258.711.000,00	243.621.000,00	(15.090.000,00)	94,17
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	258.711.000,00	243.621.000,00	(15.090.000,00)	94,17
02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	120.071.000,00	118.241.000,00	(1.830.000,00)	98,48
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	120.071.000,00	118.241.000,00	(1.830.000,00)	98,48
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.071.000,00	18.241.000,00	(1.830.000,00)	90,88
02.2.03.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	138.640.000,00	125.380.000,00	(13.260.000,00)	90,44
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	138.640.000,00	125.380.000,00	(13.260.000,00)	90,44
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.640.000,00	5.380.000,00	(13.260.000,00)	28,86
02.2.03.05.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.600.000.000,00	1.524.696.000,00	(75.304.000,00)	95,29
03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	800.000.000,00	755.854.500,00	(44.145.500,00)	94,48
03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	800.000.000,00	755.854.500,00	(44.145.500,00)	94,48
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	800.000.000,00	755.854.500,00	(44.145.500,00)	94,48
03.2.01.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000.000,00	755.854.500,00	(44.145.500,00)	94,48
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	800.000.000,00	768.841.500,00	(31.158.500,00)	96,11
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	800.000.000,00	768.841.500,00	(31.158.500,00)	96,11
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	800.000.000,00	768.841.500,00	(31.158.500,00)	96,11
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000.000,00	768.841.500,00	(31.158.500,00)	96,11
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	22.164.919.200,00	22.146.424.200,00	(18.495.000,00)	99,92
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	22.164.919.200,00	22.146.424.200,00	(18.495.000,00)	99,92
04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	22.164.919.200,00	22.146.424.200,00	(18.495.000,00)	99,92
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.164.919.200,00	22.146.424.200,00	(18.495.000,00)	99,92
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.290.000,00	2.290.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	962.629.200,00	944.134.200,00	(18.495.000,00)	98,08
04.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.200.000.000,00	21.200.000.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(25.526.364.660,00)	(25.373.909.009,00)	152.455.651,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(25.526.364.660,00)	(25.373.909.009,00)	152.455.651,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.522.470.898,00	3.369.141.313,00	(153.329.585,00)	95,65
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.822.513.748,00	1.744.232.763,00	(78.280.985,00)	95,70
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.871.000,00	56.868.000,00	(3.000,00)	99,99
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.052.000,00	34.052.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.052.000,00	34.052.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.052.000,00	34.052.000,00	-	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.138.000,00	13.138.000,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.138.000,00	13.138.000,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.138.000,00	13.138.000,00	-	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.681.000,00	9.678.000,00	(3.000,00)	99,97
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.681.000,00	9.678.000,00	(3.000,00)	99,97
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.681.000,00	9.678.000,00	(3.000,00)	99,97
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.403.961.558,00	1.391.269.035,00	(12.692.523,00)	99,10
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.270.874.458,00	1.258.183.035,00	(12.691.423,00)	99,00
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.270.874.458,00	1.258.183.035,00	(12.691.423,00)	99,00
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.270.874.458,00	1.258.183.035,00	(12.691.423,00)	99,00
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.504.300,00	74.504.000,00	(300,00)	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.504.300,00	74.504.000,00	(300,00)	100,00
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	73.680.000,00	73.680.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.300,00	824.000,00	(300,00)	99,96
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.390.000,00	41.390.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	41.390.000,00	41.390.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.390.000,00	41.390.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.194.000,00	1.194.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.194.000,00	1.194.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.194.000,00	1.194.000,00	-	100,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.998.800,00	15.998.000,00	(800,00)	99,99
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.998.800,00	15.998.000,00	(800,00)	99,99
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.998.800,00	15.998.000,00	(800,00)	99,99
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.775.000,00	7.775.000,00	-	100,00
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.427.000,00	1.427.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.427.000,00	1.427.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.427.000,00	1.427.000,00	-	100,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.348.000,00	6.348.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.348.000,00	6.348.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.548.000,00	1.548.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.568.000,00	84.566.378,00	(1.622,00)	100,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.027.000,00	2.027.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.027.000,00	2.027.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.027.000,00	2.027.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.939.000,00	22.939.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.939.000,00	22.939.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.939.000,00	22.939.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	2.039.400,00	(600,00)	99,97
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.039.400,00	(600,00)	99,97
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.039.400,00	(600,00)	99,97
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.232.000,00	2.232.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.232.000,00	2.232.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.232.000,00	2.232.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.330.000,00	55.328.978,00	(1.022,00)	100,00
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	55.330.000,00	55.328.978,00	(1.022,00)	100,00
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.330.000,00	55.328.978,00	(1.022,00)	100,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.982.000,00	13.982.000,00	(50.000.000,00)	21,85
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.982.000,00	13.982.000,00	(50.000.000,00)	21,85
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.184.000,00	2.184.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.000,00	494.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	61.798.000,00	11.798.000,00	(50.000.000,00)	19,09
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.798.000,00	11.798.000,00	(50.000.000,00)	19,09
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.423.490,00	11.372.550,00	(50.940,00)	99,55
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.362.000,00	1.362.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.362.000,00	1.362.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.362.000,00	1.362.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.319.490,00	8.268.550,00	(50.940,00)	99,39
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.319.490,00	8.268.550,00	(50.940,00)	99,39
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.319.490,00	8.268.550,00	(50.940,00)	99,39
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.742.000,00	1.742.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.742.000,00	1.742.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.742.000,00	1.742.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.932.700,00	178.399.800,00	(15.532.900,00)	91,99
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.252.700,00	172.719.800,00	(15.532.900,00)	91,75
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	188.252.700,00	172.719.800,00	(15.532.900,00)	91,75
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.252.700,00	172.719.800,00	(15.532.900,00)	91,75
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.564.229.250,00	1.528.094.150,00	(36.135.100,00)	97,69
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.494.703.650,00	1.458.658.550,00	(36.045.100,00)	97,59
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.046.570.000,00	1.043.820.000,00	(2.750.000,00)	99,74
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.046.570.000,00	1.043.820.000,00	(2.750.000,00)	99,74
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.046.570.000,00	1.043.820.000,00	(2.750.000,00)	99,74
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12.653.000,00	7.153.000,00	(5.500.000,00)	56,53
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.653.000,00	7.153.000,00	(5.500.000,00)	56,53
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.653.000,00	7.153.000,00	(5.500.000,00)	56,53
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	63.780.000,00	50.580.000,00	(13.200.000,00)	79,30
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	63.780.000,00	50.580.000,00	(13.200.000,00)	79,30
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.780.000,00	50.580.000,00	(13.200.000,00)	79,30
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	88.262.000,00	73.786.900,00	(14.475.100,00)	83,60
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	88.262.000,00	73.786.900,00	(14.475.100,00)	83,60
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.262.000,00	73.786.900,00	(14.475.100,00)	83,60
02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	263.163.000,00	263.043.000,00	(120.000,00)	99,95
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	263.163.000,00	263.043.000,00	(120.000,00)	99,95
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.163.000,00	263.043.000,00	(120.000,00)	99,95
02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.275.650,00	20.275.650,00	-	100,00
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.288.000,00	12.288.000,00	-	100,00
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.598.000,00	10.598.000,00	-	100,00
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	7.987.650,00	7.987.650,00	-	100,00
02.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.987.650,00	7.987.650,00	-	100,00
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	69.525.600,00	69.435.600,00	(90.000,00)	99,87
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	8.953.700,00	8.953.700,00	-	100,00
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.953.700,00	8.953.700,00	-	100,00
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.953.700,00	8.953.700,00	-	100,00
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	25.092.000,00	25.052.000,00	(40.000,00)	99,84
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.092.000,00	25.052.000,00	(40.000,00)	99,84
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.092.000,00	25.052.000,00	(40.000,00)	99,84
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	35.479.900,00	35.429.900,00	(50.000,00)	99,86
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.479.900,00	35.429.900,00	(50.000,00)	99,86
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.479.900,00	35.429.900,00	(50.000,00)	99,86

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	135.727.900,00	96.814.400,00	(38.913.500,00)	71,33
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	69.331.900,00	32.160.400,00	(37.171.500,00)	46,39
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.194.900,00	14.723.400,00	(1.471.500,00)	90,91
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.194.900,00	14.723.400,00	(1.471.500,00)	90,91
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.194.900,00	14.723.400,00	(1.471.500,00)	90,91
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.800.000,00	7.310.000,00	(16.490.000,00)	30,71
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.800.000,00	7.310.000,00	(16.490.000,00)	30,71
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	7.310.000,00	(16.490.000,00)	30,71
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20.400.000,00	1.320.000,00	(19.080.000,00)	6,47
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	1.320.000,00	(19.080.000,00)	6,47
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	1.320.000,00	(19.080.000,00)	6,47
04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.937.000,00	8.807.000,00	(130.000,00)	98,55
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.337.000,00	2.207.000,00	(130.000,00)	94,44
04.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.000,00	517.000,00	(130.000,00)	79,91
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00
04.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00
04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.127.000,00	11.197.000,00	(930.000,00)	92,33
04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.127.000,00	11.197.000,00	(930.000,00)	92,33
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.127.000,00	11.197.000,00	(930.000,00)	92,33
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.127.000,00	11.197.000,00	(930.000,00)	92,33
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	54.269.000,00	53.457.000,00	(812.000,00)	98,50
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	14.174.000,00	13.462.000,00	(712.000,00)	94,98
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.174.000,00	13.462.000,00	(712.000,00)	94,98
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.174.000,00	13.462.000,00	(712.000,00)	94,98
04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	40.095.000,00	39.995.000,00	(100.000,00)	99,75
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.095.000,00	39.995.000,00	(100.000,00)	99,75
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.095.000,00	39.995.000,00	(100.000,00)	99,75
	SURPLUS / DEFISIT	(3.522.470.898,00)	(3.369.141.313,00)	153.329.585,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.522.470.898,00)	(3.369.141.313,00)	153.329.585,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1-05.0-00.0-00.02.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	900.000,00	3.700.000,00	2.800.000,00	411,11
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900.000,00	3.700.000,00	2.800.000,00	411,11
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	900.000,00	3.700.000,00	2.800.000,00	411,11
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.932.428.619,00	3.880.081.567,00	(52.347.052,00)	98,67
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.636.251.415,00	1.615.519.422,00	(20.731.993,00)	98,73
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.222.983.486,00	1.210.711.918,00	(12.271.568,00)	99,00
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.139.288.186,00	1.127.516.618,00	(11.771.568,00)	98,97
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.139.288.186,00	1.127.516.618,00	(11.771.568,00)	98,97
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.139.288.186,00	1.127.516.618,00	(11.771.568,00)	98,97
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.695.300,00	83.195.300,00	(500.000,00)	99,40
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.695.300,00	83.195.300,00	(500.000,00)	99,40
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	78.480.000,00	78.480.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.215.300,00	4.715.300,00	(500.000,00)	90,41
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.052.000,00	97.430.000,00	(622.000,00)	99,37
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.480.000,00	2.480.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	2.480.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.422.000,00	7.407.000,00	(15.000,00)	99,80
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.422.000,00	7.407.000,00	(15.000,00)	99,80
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.422.000,00	7.407.000,00	(15.000,00)	99,80
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	4.249.700,00	(300,00)	99,99
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.250.000,00	4.249.700,00	(300,00)	99,99
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.249.700,00	(300,00)	99,99
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.020.000,00	(600.000,00)	62,96
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.020.000,00	(600.000,00)	62,96
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.020.000,00	(600.000,00)	62,96
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.280.000,00	82.273.300,00	(6.700,00)	99,99
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	82.280.000,00	82.273.300,00	(6.700,00)	99,99
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.280.000,00	82.273.300,00	(6.700,00)	99,99
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.262.000,00	49.262.000,00	-	100,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.262.000,00	49.262.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	49.262.000,00	49.262.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.262.000,00	49.262.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.893.500,00	89.075.632,00	(6.817.868,00)	92,89
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.507.000,00	1.445.000,00	(62.000,00)	95,89
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.507.000,00	1.445.000,00	(62.000,00)	95,89
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.507.000,00	1.445.000,00	(62.000,00)	95,89
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.386.500,00	15.630.632,00	(6.755.868,00)	69,82
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.386.500,00	15.630.632,00	(6.755.868,00)	69,82
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.386.500,00	15.630.632,00	(6.755.868,00)	69,82
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.460.429,00	155.439.872,00	(1.020.557,00)	99,35
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.251.000,00	13.931.580,00	(319.420,00)	97,76
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.251.000,00	13.931.580,00	(319.420,00)	97,76
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.251.000,00	13.931.580,00	(319.420,00)	97,76
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.829.429,00	137.752.292,00	(77.137,00)	99,94
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	137.829.429,00	137.752.292,00	(77.137,00)	99,94
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.829.429,00	137.752.292,00	(77.137,00)	99,94
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000,00	3.756.000,00	(624.000,00)	85,75

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.380.000,00	3.756.000,00	(624.000,00)	85,75
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	3.756.000,00	(624.000,00)	85,75
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.296.177.204,00	2.264.562.145,00	(31.615.059,00)	98,62
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
03.2.01	Kabupaten/Kota	72.775.000,00	69.925.000,00	(2.850.000,00)	96,08
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				
03.2.01.02		72.775.000,00	69.925.000,00	(2.850.000,00)	96,08
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.775.000,00	69.925.000,00	(2.850.000,00)	96,08
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.775.000,00	69.925.000,00	(2.850.000,00)	96,08
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
03.2.02		2.187.342.204,00	2.158.747.145,00	(28.595.059,00)	98,69
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				
03.2.02.02		77.388.000,00	77.388.000,00	-	100,00
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	77.388.000,00	77.388.000,00	-	100,00
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.388.000,00	77.388.000,00	-	100,00
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
03.2.02.03		70.246.800,00	70.199.200,00	(47.600,00)	99,93
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.246.800,00	70.199.200,00	(47.600,00)	99,93
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.556.800,00	68.509.200,00	(47.600,00)	99,93
03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.620.154.404,00	1.619.839.290,00	(315.114,00)	99,98
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.343.754.404,00	1.343.754.404,00	-	100,00
03.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	6.760.000,00	6.760.000,00	-	100,00
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.336.994.404,00	1.336.994.404,00	-	100,00
03.2.02.05.5.2	BELANJA MODAL	276.400.000,00	276.084.886,00	(315.114,00)	99,89
03.2.02.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	276.400.000,00	276.084.886,00	(315.114,00)	99,89
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
03.2.02.06		34.088.000,00	34.088.000,00	-	100,00
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	34.088.000,00	34.088.000,00	-	100,00
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.088.000,00	34.088.000,00	-	100,00
03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	385.465.000,00	357.232.655,00	(28.232.345,00)	92,68
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	385.465.000,00	357.232.655,00	(28.232.345,00)	92,68
03.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	5.070.000,00	5.070.000,00	-	100,00
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.395.000,00	352.162.655,00	(28.232.345,00)	92,58
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
03.2.03		36.060.000,00	35.890.000,00	(170.000,00)	99,53
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				
03.2.03.02		28.560.000,00	28.390.000,00	(170.000,00)	99,40
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.560.000,00	28.390.000,00	(170.000,00)	99,40
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.560.000,00	28.390.000,00	(170.000,00)	99,40
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
03.2.03.04		7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(3.931.528.619,00)	(3.876.381.567,00)	55.147.052,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.931.528.619,00)	(3.876.381.567,00)	55.147.052,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.211.135.886,00	3.103.129.374,00	(108.006.512,00)	96,64
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.946.305.586,00	1.903.436.914,00	(42.868.672,00)	97,80
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.874.800,00	47.610.467,00	(264.333,00)	99,45
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.733.000,00	29.548.667,00	(184.333,00)	99,38
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.733.000,00	29.548.667,00	(184.333,00)	99,38
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.733.000,00	29.548.667,00	(184.333,00)	99,38
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.141.800,00	18.061.800,00	(80.000,00)	99,56
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	18.141.800,00	18.061.800,00	(80.000,00)	99,56
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.141.800,00	18.061.800,00	(80.000,00)	99,56
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.709.770.564,00	1.669.150.882,00	(40.619.682,00)	97,62
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.620.460.564,00	1.587.459.082,00	(33.001.482,00)	97,96
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.460.564,00	1.587.459.082,00	(33.001.482,00)	97,96
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.620.460.564,00	1.587.459.082,00	(33.001.482,00)	97,96
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.310.000,00	81.691.800,00	(7.618.200,00)	91,47
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	89.310.000,00	81.691.800,00	(7.618.200,00)	91,47
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	80.520.000,00	73.680.000,00	(6.840.000,00)	91,51
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.790.000,00	8.011.800,00	(778.200,00)	91,15
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.720.000,00	7.670.000,00	(50.000,00)	99,35
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.720.000,00	7.670.000,00	(50.000,00)	99,35
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.720.000,00	7.670.000,00	(50.000,00)	99,35
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.870.000,00	(50.000,00)	98,29
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.698.000,00	34.435.500,00	(262.500,00)	99,24
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.358.000,00	2.358.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.358.000,00	2.358.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.358.000,00	2.358.000,00	-	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.644.000,00	5.641.000,00	(3.000,00)	99,95
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.644.000,00	5.641.000,00	(3.000,00)	99,95
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.644.000,00	5.641.000,00	(3.000,00)	99,95
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.696.000,00	20.436.700,00	(259.300,00)	98,75
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	20.696.000,00	20.436.700,00	(259.300,00)	98,75
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.696.000,00	20.436.700,00	(259.300,00)	98,75
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.776.000,00	24.776.000,00	-	100,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.776.000,00	24.776.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	23.766.000,00	23.766.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.766.000,00	23.766.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.631.222,00	19.256.328,00	(1.374.894,00)	93,34
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.230.000,00	13.168.000,00	(62.000,00)	99,53
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.230.000,00	13.168.000,00	(62.000,00)	99,53
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.230.000,00	13.168.000,00	(62.000,00)	99,53
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.401.222,00	6.088.328,00	(1.312.894,00)	82,26
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.401.222,00	6.088.328,00	(1.312.894,00)	82,26
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.901.222,00	5.888.328,00	(12.894,00)	99,78
01.2.08.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000,00	200.000,00	(1.300.000,00)	13,33
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.835.000,00	100.537.737,00	(297.263,00)	99,71
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.365.000,00	17.280.425,00	(84.575,00)	99,51
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.365.000,00	17.280.425,00	(84.575,00)	99,51
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.365.000,00	17.280.425,00	(84.575,00)	99,51
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.470.000,00	83.257.312,00	(212.688,00)	99,75
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	83.470.000,00	83.257.312,00	(212.688,00)	99,75
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.470.000,00	83.257.312,00	(212.688,00)	99,75
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	154.357.000,00	133.132.933,00	(21.224.067,00)	86,25

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	154.357.000,00	133.132.933,00	(21.224.067,00)	86,25
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.593.000,00	48.473.933,00	(119.067,00)	99,75
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.593.000,00	48.473.933,00	(119.067,00)	99,75
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.593.000,00	48.473.933,00	(119.067,00)	99,75
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	37.439.000,00	26.294.000,00	(11.145.000,00)	70,23
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	37.439.000,00	26.294.000,00	(11.145.000,00)	70,23
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.439.000,00	26.294.000,00	(11.145.000,00)	70,23
02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	68.325.000,00	58.365.000,00	(9.960.000,00)	85,42
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	68.325.000,00	58.365.000,00	(9.960.000,00)	85,42
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.325.000,00	58.365.000,00	(9.960.000,00)	85,42
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	8.201.000,00	3.672.900,00	(4.528.100,00)	44,79
03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	8.201.000,00	3.672.900,00	(4.528.100,00)	44,79
03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	8.201.000,00	3.672.900,00	(4.528.100,00)	44,79
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.201.000,00	3.672.900,00	(4.528.100,00)	44,79
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.201.000,00	3.672.900,00	(4.528.100,00)	44,79
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	234.000.500,00	222.540.000,00	(11.460.500,00)	95,10
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	114.189.500,00	113.060.000,00	(1.129.500,00)	99,01
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	41.285.000,00	41.085.000,00	(200.000,00)	99,52
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.285.000,00	41.085.000,00	(200.000,00)	99,52
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	6.900.000,00	(200.000,00)	97,18
04.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.175.000,00	33.175.000,00	-	100,00
04.2.01.02	Penyediaan Sandang	23.968.500,00	23.664.000,00	(304.500,00)	98,73
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.968.500,00	23.664.000,00	(304.500,00)	98,73
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.468.500,00	4.164.000,00	(304.500,00)	93,19
04.2.01.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	42.676.000,00	42.377.000,00	(299.000,00)	99,30
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.676.000,00	42.377.000,00	(299.000,00)	99,30
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.866.000,00	3.567.000,00	(299.000,00)	92,27
04.2.01.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00
04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	6.260.000,00	5.934.000,00	(326.000,00)	94,79
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.260.000,00	5.934.000,00	(326.000,00)	94,79
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	5.934.000,00	(326.000,00)	94,79
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	119.811.000,00	109.480.000,00	(10.331.000,00)	91,38
04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	33.780.000,00	33.780.000,00	-	100,00
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.780.000,00	33.780.000,00	-	100,00
04.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
04.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.770.000,00	32.770.000,00	-	100,00
04.2.02.04	Penyediaan Sandang	30.795.000,00	30.785.000,00	(10.000,00)	99,97
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.795.000,00	30.785.000,00	(10.000,00)	99,97
04.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	1.500.000,00	(10.000,00)	99,34
04.2.02.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.275.000,00	28.275.000,00	-	100,00
04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	23.410.000,00	23.410.000,00	-	100,00
04.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.410.000,00	23.410.000,00	-	100,00
04.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
04.2.02.05.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.400.000,00	22.400.000,00	-	100,00
04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	31.826.000,00	21.505.000,00	(10.321.000,00)	67,57
04.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	31.826.000,00	21.505.000,00	(10.321.000,00)	67,57
04.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.826.000,00	21.505.000,00	(10.321.000,00)	67,57
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	600.542.000,00	579.014.177,00	(21.527.823,00)	96,42
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	600.542.000,00	579.014.177,00	(21.527.823,00)	96,42
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	131.626.000,00	129.221.497,00	(2.404.503,00)	98,17
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.647.000,00	128.242.497,00	(2.404.503,00)	98,16
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.647.000,00	128.242.497,00	(2.404.503,00)	98,16
05.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	979.000,00	979.000,00	-	100,00
05.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	979.000,00	979.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.104.000,00	3.799.000,00	(1.305.000,00)	74,43
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.014.000,00	709.000,00	(1.305.000,00)	35,20
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.014.000,00	709.000,00	(1.305.000,00)	35,20
05.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	3.090.000,00	3.090.000,00	-	100,00
05.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.090.000,00	3.090.000,00	-	100,00
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	186.556.000,00	184.031.067,00	(2.524.933,00)	98,65
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	185.577.000,00	183.052.067,00	(2.524.933,00)	98,64
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.577.000,00	183.052.067,00	(2.524.933,00)	98,64
05.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	979.000,00	979.000,00	-	100,00
05.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	979.000,00	979.000,00	-	100,00
05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	277.256.000,00	261.962.613,00	(15.293.387,00)	94,48
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	277.256.000,00	261.962.613,00	(15.293.387,00)	94,48
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.256.000,00	82.189.750,00	(15.066.250,00)	84,51
05.2.02.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	180.000.000,00	179.772.863,00	(227.137,00)	99,87
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	267.729.800,00	261.332.450,00	(6.397.350,00)	97,61
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	105.748.000,00	100.378.950,00	(5.369.050,00)	94,92
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	70.656.000,00	65.299.359,00	(5.356.641,00)	92,42
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.656.000,00	65.299.359,00	(5.356.641,00)	92,42
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.246.000,00	25.889.359,00	(5.356.641,00)	82,86
06.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00
06.2.01.02	Penyediaan Sandang	35.092.000,00	35.079.591,00	(12.409,00)	99,96
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.092.000,00	35.079.591,00	(12.409,00)	99,96
06.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.832.000,00	1.819.591,00	(12.409,00)	99,32
06.2.01.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.250.000,00	32.250.000,00	-	100,00
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	161.981.800,00	160.953.500,00	(1.028.300,00)	99,37
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	161.981.800,00	160.953.500,00	(1.028.300,00)	99,37
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	161.981.800,00	160.953.500,00	(1.028.300,00)	99,37
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.981.800,00	160.953.500,00	(1.028.300,00)	99,37
	SURPLUS / DEFISIT	(3.211.135.886,00)	(3.103.129.374,00)	108.006.512,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.211.135.886,00)	(3.103.129.374,00)	108.006.512,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	101.000.000,00	26.922.000,00	(74.078.000,00)	26,66
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.000.000,00	26.922.000,00	(74.078.000,00)	26,66
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	25.472.000,00	(74.528.000,00)	25,47
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000,00	1.450.000,00	450.000,00	145,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.322.837.213,00	2.094.807.668,00	(228.029.545,00)	90,18
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.396.893.213,00	1.312.902.988,00	(83.990.225,00)	93,99
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.611.100,00	15.611.100,00	-	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.933.000,00	13.933.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.933.000,00	13.933.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.933.000,00	13.933.000,00	-	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.678.100,00	1.678.100,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.678.100,00	1.678.100,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.678.100,00	1.678.100,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.157.368.813,00	1.148.252.793,00	(9.116.020,00)	99,21
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.096.034.813,00	1.086.918.793,00	(9.116.020,00)	99,17
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.096.034.813,00	1.086.918.793,00	(9.116.020,00)	99,17
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.096.034.813,00	1.086.918.793,00	(9.116.020,00)	99,17
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.314.000,00	60.314.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.314.000,00	60.314.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	60.120.000,00	60.120.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.000,00	194.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.066.000,00	37.715.814,00	(12.350.186,00)	75,33
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.685.000,00	1.676.000,00	(9.000,00)	99,47
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.685.000,00	1.676.000,00	(9.000,00)	99,47
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.685.000,00	1.676.000,00	(9.000,00)	99,47
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.727.000,00	17.668.000,00	(59.000,00)	99,67
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.727.000,00	17.668.000,00	(59.000,00)	99,67
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.727.000,00	17.668.000,00	(59.000,00)	99,67
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.210.000,00	6.209.800,00	(200,00)	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.210.000,00	6.209.800,00	(200,00)	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	6.209.800,00	(200,00)	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.214.000,00	10.932.014,00	(12.281.986,00)	47,09
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	23.214.000,00	10.932.014,00	(12.281.986,00)	47,09
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.214.000,00	10.932.014,00	(12.281.986,00)	47,09
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.863.300,00	9.865.322,00	(997.978,00)	90,81
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.092.000,00	1.090.000,00	(2.000,00)	99,82
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.092.000,00	1.090.000,00	(2.000,00)	99,82
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.000,00	1.090.000,00	(2.000,00)	99,82
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.771.300,00	8.775.322,00	(995.978,00)	89,81
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.771.300,00	8.775.322,00	(995.978,00)	89,81
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.771.300,00	8.775.322,00	(995.978,00)	89,81
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.984.000,00	101.457.959,00	(61.526.041,00)	62,25
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.524.000,00	100.307.959,00	(61.216.041,00)	62,10
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	161.524.000,00	100.307.959,00	(61.216.041,00)	62,10
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.524.000,00	100.307.959,00	(61.216.041,00)	62,10
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.150.000,00	(310.000,00)	78,77
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.460.000,00	1.150.000,00	(310.000,00)	78,77
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	1.150.000,00	(310.000,00)	78,77
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	243.880.000,00	231.641.665,00	(12.238.335,00)	94,98

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	243.880.000,00	231.641.665,00	(12.238.335,00)	94,98
02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	243.880.000,00	231.641.665,00	(12.238.335,00)	94,98
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	243.880.000,00	231.641.665,00	(12.238.335,00)	94,98
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.990.000,00	229.751.665,00	(12.238.335,00)	94,94
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	367.425.000,00	264.072.435,00	(103.352.565,00)	71,87
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	207.425.000,00	168.247.150,00	(39.177.850,00)	81,11
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	65.708.000,00	52.201.400,00	(13.506.600,00)	79,44
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.708.000,00	52.201.400,00	(13.506.600,00)	79,44
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.708.000,00	52.201.400,00	(13.506.600,00)	79,44
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100.000.000,00	83.250.000,00	(16.750.000,00)	83,25
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	83.250.000,00	(16.750.000,00)	83,25
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	83.250.000,00	(16.750.000,00)	83,25
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	41.717.000,00	32.795.750,00	(8.921.250,00)	78,61
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.717.000,00	32.795.750,00	(8.921.250,00)	78,61
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.717.000,00	32.795.750,00	(8.921.250,00)	78,61
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	160.000.000,00	95.825.285,00	(64.174.715,00)	59,89
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	160.000.000,00	95.825.285,00	(64.174.715,00)	59,89
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	95.825.285,00	(64.174.715,00)	59,89
03.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.110.000,00	93.935.285,00	(64.174.715,00)	59,41
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	228.558.000,00	219.034.600,00	(9.523.400,00)	95,83
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	25.000.000,00	19.727.000,00	(5.273.000,00)	78,91
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	25.000.000,00	19.727.000,00	(5.273.000,00)	78,91
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	19.727.000,00	(5.273.000,00)	78,91
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	19.727.000,00	(5.273.000,00)	78,91
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	203.558.000,00	199.307.600,00	(4.250.400,00)	97,91
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	203.558.000,00	199.307.600,00	(4.250.400,00)	97,91
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	195.558.000,00	191.307.600,00	(4.250.400,00)	97,83
04.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.090.000,00	2.090.000,00	-	100,00
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.468.000,00	189.217.600,00	(4.250.400,00)	97,80
04.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
04.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	86.081.000,00	67.155.980,00	(18.925.020,00)	78,01
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	86.081.000,00	67.155.980,00	(18.925.020,00)	78,01
05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.581.000,00	31.655.980,00	(18.925.020,00)	62,58
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.581.000,00	31.655.980,00	(18.925.020,00)	62,58
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.581.000,00	31.655.980,00	(18.925.020,00)	62,58
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.500.000,00	35.500.000,00	-	100,00
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00
05.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	700.000,00	700.000,00	-	100,00
05.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000,00	700.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(2.221.837.213,00)	(2.067.885.668,00)	153.951.545,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.221.837.213,00)	(2.067.885.668,00)	153.951.545,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	110,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	110,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	110,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.432.409.378,00	2.352.250.920,00	(80.158.458,00)	96,70
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.567.030.478,00	1.550.303.354,00	(16.727.124,00)	98,93
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.241.000,00	11.906.000,00	(335.000,00)	97,26
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.131.000,00	2.115.000,00	(16.000,00)	99,25
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.131.000,00	2.115.000,00	(16.000,00)	99,25
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.131.000,00	2.115.000,00	(16.000,00)	99,25
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.690.000,00	1.686.000,00	(4.000,00)	99,76
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.690.000,00	1.686.000,00	(4.000,00)	99,76
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	1.686.000,00	(4.000,00)	99,76
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.420.000,00	8.105.000,00	(315.000,00)	96,26
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.420.000,00	8.105.000,00	(315.000,00)	96,26
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	8.105.000,00	(315.000,00)	96,26
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.350.851.028,00	1.341.307.154,00	(9.543.874,00)	99,29
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.257.217.028,00	1.247.740.154,00	(9.476.874,00)	99,25
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.257.217.028,00	1.247.740.154,00	(9.476.874,00)	99,25
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.257.217.028,00	1.247.740.154,00	(9.476.874,00)	99,25
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.880.000,00	82.880.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	82.880.000,00	82.880.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	74.880.000,00	74.880.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.754.000,00	10.687.000,00	(67.000,00)	99,38
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.754.000,00	10.687.000,00	(67.000,00)	99,38
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.754.000,00	10.687.000,00	(67.000,00)	99,38
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.422.400,00	112.123.700,00	(2.298.700,00)	97,99
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.060.000,00	59.834.000,00	(226.000,00)	99,62
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.730.000,00	5.536.000,00	(194.000,00)	96,61
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.859.000,00	1.690.000,00	(169.000,00)	90,91
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.871.000,00	3.846.000,00	(25.000,00)	99,35
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	54.330.000,00	54.298.000,00	(32.000,00)	99,94
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.330.000,00	54.298.000,00	(32.000,00)	99,94
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.863.000,00	2.858.000,00	(5.000,00)	99,83
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.863.000,00	2.858.000,00	(5.000,00)	99,83
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.863.000,00	2.858.000,00	(5.000,00)	99,83
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.254.400,00	2.254.300,00	(100,00)	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.254.400,00	2.254.300,00	(100,00)	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.254.400,00	2.254.300,00	(100,00)	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720.000,00	720.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	720.000,00	720.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.525.000,00	46.457.400,00	(2.067.600,00)	95,74
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	48.525.000,00	46.457.400,00	(2.067.600,00)	95,74
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.525.000,00	46.457.400,00	(2.067.600,00)	95,74
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.556.150,00	49.245.500,00	(2.310.650,00)	95,52
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.091.150,00	9.214.500,00	(876.650,00)	91,31
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.091.150,00	9.214.500,00	(876.650,00)	91,31
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.091.150,00	9.214.500,00	(876.650,00)	91,31
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.465.000,00	40.031.000,00	(1.434.000,00)	96,54
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	41.465.000,00	40.031.000,00	(1.434.000,00)	96,54
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.465.000,00	40.031.000,00	(1.434.000,00)	96,54
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.959.900,00	35.721.000,00	(2.238.900,00)	94,10
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.959.900,00	35.721.000,00	(2.238.900,00)	94,10
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.959.900,00	35.721.000,00	(2.238.900,00)	94,10
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.959.900,00	35.721.000,00	(2.238.900,00)	94,10

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	269.161.000,00	248.341.000,00	(20.820.000,00)	92,26
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	15.353.000,00	14.882.000,00	(471.000,00)	96,93
02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	15.353.000,00	14.882.000,00	(471.000,00)	96,93
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.353.000,00	14.882.000,00	(471.000,00)	96,93
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.353.000,00	14.882.000,00	(471.000,00)	96,93
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	253.808.000,00	233.459.000,00	(20.349.000,00)	91,98
02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	253.808.000,00	233.459.000,00	(20.349.000,00)	91,98
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	253.808.000,00	233.459.000,00	(20.349.000,00)	91,98
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.808.000,00	233.459.000,00	(20.349.000,00)	91,98
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	231.157.400,00	229.635.766,00	(1.521.634,00)	99,34
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66.883.100,00	65.423.466,00	(1.459.634,00)	97,82
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	66.883.100,00	65.423.466,00	(1.459.634,00)	97,82
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.883.100,00	65.423.466,00	(1.459.634,00)	97,82
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.883.100,00	65.423.466,00	(1.459.634,00)	97,82
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	164.274.300,00	164.212.300,00	(62.000,00)	99,96
03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	164.274.300,00	164.212.300,00	(62.000,00)	99,96
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	164.274.300,00	164.212.300,00	(62.000,00)	99,96
03.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.540.000,00	3.540.000,00	-	100,00
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.734.300,00	160.672.300,00	(62.000,00)	99,96
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	148.483.400,00	141.442.600,00	(7.040.800,00)	95,26
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	148.483.400,00	141.442.600,00	(7.040.800,00)	95,26
04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	148.483.400,00	141.442.600,00	(7.040.800,00)	95,26
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	142.983.400,00	136.042.600,00	(6.940.800,00)	95,15
04.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	3.751.800,00	3.540.000,00	(211.800,00)	94,35
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.231.600,00	132.502.600,00	(6.729.000,00)	95,17
04.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.400.000,00	(100.000,00)	98,18
04.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.400.000,00	(100.000,00)	98,18
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	21.622.900,00	21.562.600,00	(60.300,00)	99,72
05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	21.622.900,00	21.562.600,00	(60.300,00)	99,72
05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.622.900,00	21.562.600,00	(60.300,00)	99,72
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.622.900,00	21.562.600,00	(60.300,00)	99,72
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.622.900,00	21.562.600,00	(60.300,00)	99,72
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	23.542.200,00	19.100.000,00	(4.442.200,00)	81,13
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.542.200,00	19.100.000,00	(4.442.200,00)	81,13
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	12.013.000,00	7.985.000,00	(4.028.000,00)	66,47
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.013.000,00	7.985.000,00	(4.028.000,00)	66,47
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.013.000,00	7.985.000,00	(4.028.000,00)	66,47
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.529.200,00	11.115.000,00	(414.200,00)	96,41
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.529.200,00	11.115.000,00	(414.200,00)	96,41
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.529.200,00	11.115.000,00	(414.200,00)	96,41
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	11.828.000,00	5.400.000,00	(6.428.000,00)	45,65
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	11.828.000,00	5.400.000,00	(6.428.000,00)	45,65
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	11.828.000,00	5.400.000,00	(6.428.000,00)	45,65
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.828.000,00	5.400.000,00	(6.428.000,00)	45,65
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.828.000,00	5.400.000,00	(6.428.000,00)	45,65
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	159.584.000,00	136.465.600,00	(23.118.400,00)	85,51
11.2.01	Pengelolaan Sampah	159.584.000,00	136.465.600,00	(23.118.400,00)	85,51
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	159.584.000,00	136.465.600,00	(23.118.400,00)	85,51

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	159.584.000,00	136.465.600,00	(23.118.400,00)	85,51
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.584.000,00	136.465.600,00	(23.118.400,00)	85,51
	SURPLUS / DEFISIT	(2.431.409.378,00)	(2.351.150.920,00)	80.258.458,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.431.409.378,00)	(2.351.150.920,00)	80.258.458,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	50.000,00	650.000,00	600.000,00	1.300,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000,00	650.000,00	600.000,00	1.300,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.000,00	650.000,00	600.000,00	1.300,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.123.083.023,00	3.073.255.348,00	(49.827.675,00)	98,40
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.813.803.423,00	1.775.248.790,00	(38.554.633,00)	97,87
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.982.100,00	23.982.100,00	-	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.509.000,00	3.509.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.509.000,00	3.509.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.509.000,00	3.509.000,00	-	100,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.569.000,00	3.569.000,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.569.000,00	3.569.000,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.569.000,00	3.569.000,00	-	100,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.184.000,00	3.184.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.184.000,00	3.184.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.184.000,00	3.184.000,00	-	100,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.988.100,00	3.988.100,00	-	100,00
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.988.100,00	3.988.100,00	-	100,00
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.988.100,00	3.988.100,00	-	100,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.244.000,00	3.244.000,00	-	100,00
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.244.000,00	3.244.000,00	-	100,00
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.244.000,00	3.244.000,00	-	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.244.000,00	3.244.000,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.244.000,00	3.244.000,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.244.000,00	3.244.000,00	-	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.244.000,00	3.244.000,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.244.000,00	3.244.000,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.244.000,00	3.244.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.465.730.298,00	1.433.750.315,00	(31.979.983,00)	97,82
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.376.370.298,00	1.351.230.315,00	(25.139.983,00)	98,17
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.376.370.298,00	1.351.230.315,00	(25.139.983,00)	98,17
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.376.370.298,00	1.351.230.315,00	(25.139.983,00)	98,17
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.856.000,00	62.016.000,00	(6.840.000,00)	90,07
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.856.000,00	62.016.000,00	(6.840.000,00)	90,07
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	54.000.000,00	47.160.000,00	(6.840.000,00)	87,33
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.856.000,00	14.856.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.994.000,00	6.994.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.994.000,00	6.994.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.994.000,00	6.994.000,00	-	100,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.510.000,00	4.510.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.510.000,00	4.510.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	4.510.000,00	-	100,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.319.000,00	52.959.000,00	(360.000,00)	99,32
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.713.000,00	15.713.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.713.000,00	15.713.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.713.000,00	15.713.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.767.000,00	1.767.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.767.000,00	1.767.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.767.000,00	1.767.000,00	-	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.260.000,00	(360.000,00)	77,78
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.260.000,00	(360.000,00)	77,78
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.260.000,00	(360.000,00)	77,78
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.919.000,00	29.919.000,00	-	100,00
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	29.919.000,00	29.919.000,00	-	100,00
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.919.000,00	29.919.000,00	-	100,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.349.000,00	122.349.000,00	-	100,00
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.140.000,00	5.140.000,00	-	100,00
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	5.140.000,00	5.140.000,00	-	100,00
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.140.000,00	5.140.000,00	-	100,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.060.000,00	95.060.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.380.000,00	3.380.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	3.380.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	91.680.000,00	91.680.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.680.000,00	91.680.000,00	-	100,00
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.149.000,00	22.149.000,00	-	100,00
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.07.11.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	20.459.000,00	20.459.000,00	-	100,00
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.459.000,00	20.459.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.954.625,00	51.431.750,00	(2.522.875,00)	95,32
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.795.000,00	3.330.000,00	(2.465.000,00)	57,46
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.795.000,00	3.330.000,00	(2.465.000,00)	57,46
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	3.330.000,00	(2.465.000,00)	57,46
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.159.625,00	27.101.750,00	(57.875,00)	99,79
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.159.625,00	27.101.750,00	(57.875,00)	99,79
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.159.625,00	27.101.750,00	(57.875,00)	99,79
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.668.400,00	85.976.625,00	(3.691.775,00)	95,88
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.212.800,00	68.951.025,00	(3.261.775,00)	95,48
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.212.800,00	68.951.025,00	(3.261.775,00)	95,48
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.212.800,00	68.951.025,00	(3.261.775,00)	95,48
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	5.550.000,00	(130.000,00)	97,71
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	5.550.000,00	(130.000,00)	97,71
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.550.000,00	(130.000,00)	97,71
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.775.600,00	11.475.600,00	(300.000,00)	97,45
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	11.775.600,00	11.475.600,00	(300.000,00)	97,45
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.775.600,00	11.475.600,00	(300.000,00)	97,45
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	555.185.000,00	553.569.530,00	(1.615.470,00)	99,71
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	77.857.000,00	77.857.000,00	-	100,00
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	57.857.000,00	57.857.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.857.000,00	57.857.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.167.000,00	56.167.000,00	-	100,00
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	313.260.000,00	313.237.050,00	(22.950,00)	99,99
02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00
02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	312.120.000,00	312.097.050,00	(22.950,00)	99,99
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	312.120.000,00	312.097.050,00	(22.950,00)	99,99
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.070.000,00	5.070.000,00	-	100,00
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.050.000,00	307.027.050,00	(22.950,00)	99,99
02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	128.766.000,00	128.021.000,00	(745.000,00)	99,42
02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	124.616.000,00	124.616.000,00	-	100,00
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	124.616.000,00	124.616.000,00	-	100,00
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.616.000,00	124.616.000,00	-	100,00
02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4.150.000,00	3.405.000,00	(745.000,00)	82,05
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.150.000,00	3.405.000,00	(745.000,00)	82,05

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	3.405.000,00	(745.000,00)	82,05
02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	35.302.000,00	34.454.480,00	(847.520,00)	97,60
02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	35.302.000,00	34.454.480,00	(847.520,00)	97,60
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.302.000,00	34.454.480,00	(847.520,00)	97,60
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.302.000,00	34.454.480,00	(847.520,00)	97,60
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	577.787.000,00	569.674.514,00	(8.112.486,00)	98,60
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	235.350.000,00	228.477.200,00	(6.872.800,00)	97,08
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	69.309.000,00	69.309.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.309.000,00	69.309.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.619.000,00	67.619.000,00	-	100,00
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	164.911.000,00	158.038.200,00	(6.872.800,00)	95,83
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	117.379.000,00	110.506.200,00	(6.872.800,00)	94,14
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	3.380.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.999.000,00	107.126.200,00	(6.872.800,00)	93,97
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	47.532.000,00	47.532.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.532.000,00	47.532.000,00	-	100,00
03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	1.130.000,00	1.130.000,00	-	100,00
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.130.000,00	1.130.000,00	-	100,00
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.130.000,00	1.130.000,00	-	100,00
03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	295.487.000,00	294.615.634,00	(871.366,00)	99,71
03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	9.614.000,00	9.194.000,00	(420.000,00)	95,63
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.614.000,00	9.194.000,00	(420.000,00)	95,63
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.614.000,00	9.194.000,00	(420.000,00)	95,63
03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	269.193.000,00	269.071.634,00	(121.366,00)	99,95
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	269.193.000,00	269.071.634,00	(121.366,00)	99,95
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.193.000,00	269.071.634,00	(121.366,00)	99,95
03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	16.680.000,00	16.350.000,00	(330.000,00)	98,02
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	16.680.000,00	16.350.000,00	(330.000,00)	98,02
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.680.000,00	16.350.000,00	(330.000,00)	98,02
03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	46.950.000,00	46.581.680,00	(368.320,00)	99,22
03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	30.300.000,00	29.931.680,00	(368.320,00)	98,78
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.300.000,00	29.931.680,00	(368.320,00)	98,78
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	29.931.680,00	(368.320,00)	98,78
03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	16.650.000,00	16.650.000,00	-	100,00
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.650.000,00	16.650.000,00	-	100,00
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	16.650.000,00	-	100,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	163.798.600,00	163.122.514,00	(676.086,00)	99,59
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	21.206.000,00	21.205.880,00	(120,00)	100,00
04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	21.206.000,00	21.205.880,00	(120,00)	100,00
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.206.000,00	21.205.880,00	(120,00)	100,00
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.206.000,00	21.205.880,00	(120,00)	100,00
04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00
04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	123.046.600,00	122.427.225,00	(619.375,00)	99,50
04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97.014.600,00	96.565.225,00	(449.375,00)	99,54
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	93.104.600,00	92.655.225,00	(449.375,00)	99,52
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.104.600,00	92.655.225,00	(449.375,00)	99,52
04.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	3.910.000,00	3.910.000,00	-	100,00
04.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.910.000,00	3.910.000,00	-	100,00
04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.005.000,00	7.005.000,00	-	100,00
04.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.005.000,00	7.005.000,00	-	100,00
04.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.005.000,00	7.005.000,00	-	100,00
04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.158.000,00	7.988.000,00	(170.000,00)	97,92

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.158.000,00	7.988.000,00	(170.000,00)	97,92
04.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.158.000,00	7.988.000,00	(170.000,00)	97,92
04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	10.869.000,00	10.869.000,00	-	100,00
04.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.869.000,00	10.869.000,00	-	100,00
04.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.869.000,00	10.869.000,00	-	100,00
04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.906.000,00	16.849.409,00	(56.591,00)	99,67
04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.906.000,00	16.849.409,00	(56.591,00)	99,67
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.906.000,00	16.849.409,00	(56.591,00)	99,67
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.906.000,00	16.849.409,00	(56.591,00)	99,67
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	12.509.000,00	11.640.000,00	(869.000,00)	93,05
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	12.509.000,00	11.640.000,00	(869.000,00)	93,05
05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6.088.000,00	5.219.000,00	(869.000,00)	85,73
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.088.000,00	5.219.000,00	(869.000,00)	85,73
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.088.000,00	5.219.000,00	(869.000,00)	85,73
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	6.421.000,00	6.421.000,00	-	100,00
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.421.000,00	6.421.000,00	-	100,00
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.421.000,00	6.421.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(3.123.033.023,00)	(3.072.605.348,00)	50.427.675,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.123.033.023,00)	(3.072.605.348,00)	50.427.675,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUR URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.413.091.399,00	4.025.595.446,00	(387.495.953,00)	91,22
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.724.876.330,00	1.696.693.549,00	(28.182.781,00)	98,37
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.933.000,00	28.919.000,00	(14.000,00)	99,95
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.933.000,00	28.919.000,00	(14.000,00)	99,95
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	28.933.000,00	28.919.000,00	(14.000,00)	99,95
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.933.000,00	28.919.000,00	(14.000,00)	99,95
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.331.252.770,00	1.325.208.190,00	(6.044.580,00)	99,55
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.251.817.770,00	1.245.773.190,00	(6.044.580,00)	99,52
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.251.817.770,00	1.245.773.190,00	(6.044.580,00)	99,52
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.251.817.770,00	1.245.773.190,00	(6.044.580,00)	99,52
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.435.000,00	79.435.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.435.000,00	79.435.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	74.880.000,00	74.880.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.555.000,00	4.555.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.913.400,00	243.532.084,00	(20.381.316,00)	92,28
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.600.400,00	14.504.000,00	(96.400,00)	99,34
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.600.400,00	14.504.000,00	(96.400,00)	99,34
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.400,00	14.504.000,00	(96.400,00)	99,34
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.186.000,00	64.186.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	56.886.000,00	56.886.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.886.000,00	56.886.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.788.000,00	13.764.000,00	(24.000,00)	99,83
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.788.000,00	13.764.000,00	(24.000,00)	99,83
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.788.000,00	13.764.000,00	(24.000,00)	99,83
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.310.000,00	8.310.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.310.000,00	8.310.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	8.310.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.029.000,00	142.768.084,00	(20.260.916,00)	87,57
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	163.029.000,00	142.768.084,00	(20.260.916,00)	87,57
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.029.000,00	142.768.084,00	(20.260.916,00)	87,57
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.976.000,00	14.940.000,00	(36.000,00)	99,76
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.156.000,00	9.156.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.156.000,00	9.156.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.156.000,00	9.156.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.420.000,00	2.384.000,00	(36.000,00)	98,51
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.420.000,00	2.384.000,00	(36.000,00)	98,51
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	2.384.000,00	(36.000,00)	98,51
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.801.160,00	84.094.275,00	(1.706.885,00)	98,01
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.801.160,00	84.094.275,00	(1.706.885,00)	98,01
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.801.160,00	84.094.275,00	(1.706.885,00)	98,01
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.801.160,00	84.094.275,00	(1.706.885,00)	98,01
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	280.488.800,00	256.821.600,00	(23.667.200,00)	91,56
02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	60.002.000,00	59.802.000,00	(200.000,00)	99,67
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	60.002.000,00	59.802.000,00	(200.000,00)	99,67
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.002.000,00	59.802.000,00	(200.000,00)	99,67
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.002.000,00	59.802.000,00	(200.000,00)	99,67

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	220.486.800,00	197.019.600,00	(23.467.200,00)	89,36
02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.944.000,00	41.944.000,00	-	100,00
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.944.000,00	41.944.000,00	-	100,00
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.944.000,00	41.944.000,00	-	100,00
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	178.542.800,00	155.075.600,00	(23.467.200,00)	86,86
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	178.542.800,00	155.075.600,00	(23.467.200,00)	86,86
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.542.800,00	155.075.600,00	(23.467.200,00)	86,86
2	PROGRAM PENATAAN DESA	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.056.038.100,00	1.020.792.080,00	(35.246.020,00)	96,66
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.056.038.100,00	1.020.792.080,00	(35.246.020,00)	96,66
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	988.023.000,00	961.186.980,00	(26.836.020,00)	97,28
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	988.023.000,00	961.186.980,00	(26.836.020,00)	97,28
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.023.000,00	961.186.980,00	(26.836.020,00)	97,28
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	35.059.000,00	27.159.000,00	(7.900.000,00)	77,47
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.059.000,00	27.159.000,00	(7.900.000,00)	77,47
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.059.000,00	27.159.000,00	(7.900.000,00)	77,47
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	32.956.100,00	32.446.100,00	(510.000,00)	98,45
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	32.956.100,00	32.446.100,00	(510.000,00)	98,45
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.956.100,00	32.446.100,00	(510.000,00)	98,45
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	627.131.169,00	559.597.769,00	(67.533.400,00)	89,23
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	627.131.169,00	559.597.769,00	(67.533.400,00)	89,23
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	45.772.000,00	38.154.000,00	(7.618.000,00)	83,36
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.772.000,00	38.154.000,00	(7.618.000,00)	83,36
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.772.000,00	38.154.000,00	(7.618.000,00)	83,36
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	64.464.000,00	56.304.000,00	(8.160.000,00)	87,34
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	64.464.000,00	56.304.000,00	(8.160.000,00)	87,34
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.464.000,00	56.304.000,00	(8.160.000,00)	87,34
05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	41.022.000,00	30.877.000,00	(10.145.000,00)	75,27
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	41.022.000,00	30.877.000,00	(10.145.000,00)	75,27
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.022.000,00	30.877.000,00	(10.145.000,00)	75,27
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	157.009.169,00	157.009.169,00	-	100,00
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	157.009.169,00	157.009.169,00	-	100,00
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.009.169,00	157.009.169,00	-	100,00
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	318.864.000,00	277.253.600,00	(41.610.400,00)	86,95
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	318.864.000,00	277.253.600,00	(41.610.400,00)	86,95
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.864.000,00	277.253.600,00	(41.610.400,00)	86,95
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	82.810.000,00	82.770.000,00	(40.000,00)	99,95
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	39.945.000,00	39.905.000,00	(40.000,00)	99,90

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39.945.000,00	39.905.000,00	(40.000,00)	99,90
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.945.000,00	39.905.000,00	(40.000,00)	99,90
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.945.000,00	39.905.000,00	(40.000,00)	99,90
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.865.000,00	42.865.000,00	-	100,00
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.865.000,00	42.865.000,00	-	100,00
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.865.000,00	42.865.000,00	-	100,00
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.865.000,00	42.865.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(4.412.091.399,00)	(4.024.595.446,00)	387.495.953,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.412.091.399,00)	(4.024.595.446,00)	387.495.953,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.413.091.399,00	4.025.595.446,00	(387.495.953,00)	91,22
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.724.876.330,00	1.696.693.549,00	(28.182.781,00)	98,37
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.933.000,00	28.919.000,00	(14.000,00)	99,95
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.933.000,00	28.919.000,00	(14.000,00)	99,95
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	28.933.000,00	28.919.000,00	(14.000,00)	99,95
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.933.000,00	28.919.000,00	(14.000,00)	99,95
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.331.252.770,00	1.325.208.190,00	(6.044.580,00)	99,55
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.251.817.770,00	1.245.773.190,00	(6.044.580,00)	99,52
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.251.817.770,00	1.245.773.190,00	(6.044.580,00)	99,52
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.251.817.770,00	1.245.773.190,00	(6.044.580,00)	99,52
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.435.000,00	79.435.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.435.000,00	79.435.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	74.880.000,00	74.880.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.555.000,00	4.555.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.913.400,00	243.532.084,00	(20.381.316,00)	92,28
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.600.400,00	14.504.000,00	(96.400,00)	99,34
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.600.400,00	14.504.000,00	(96.400,00)	99,34
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.400,00	14.504.000,00	(96.400,00)	99,34
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.186.000,00	64.186.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	56.886.000,00	56.886.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.886.000,00	56.886.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.788.000,00	13.764.000,00	(24.000,00)	99,83
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.788.000,00	13.764.000,00	(24.000,00)	99,83
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.788.000,00	13.764.000,00	(24.000,00)	99,83
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.310.000,00	8.310.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.310.000,00	8.310.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	8.310.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.029.000,00	142.768.084,00	(20.260.916,00)	87,57
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	163.029.000,00	142.768.084,00	(20.260.916,00)	87,57
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.029.000,00	142.768.084,00	(20.260.916,00)	87,57
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.976.000,00	14.940.000,00	(36.000,00)	99,76
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.156.000,00	9.156.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.156.000,00	9.156.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.156.000,00	9.156.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.420.000,00	2.384.000,00	(36.000,00)	98,51
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.420.000,00	2.384.000,00	(36.000,00)	98,51
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	2.384.000,00	(36.000,00)	98,51
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.801.160,00	84.094.275,00	(1.706.885,00)	98,01
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.801.160,00	84.094.275,00	(1.706.885,00)	98,01
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.801.160,00	84.094.275,00	(1.706.885,00)	98,01
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.801.160,00	84.094.275,00	(1.706.885,00)	98,01
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	280.488.800,00	256.821.600,00	(23.667.200,00)	91,56
02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	60.002.000,00	59.802.000,00	(200.000,00)	99,67
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	60.002.000,00	59.802.000,00	(200.000,00)	99,67
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.002.000,00	59.802.000,00	(200.000,00)	99,67
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.002.000,00	59.802.000,00	(200.000,00)	99,67

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	220.486.800,00	197.019.600,00	(23.467.200,00)	89,36
02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.944.000,00	41.944.000,00	-	100,00
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.944.000,00	41.944.000,00	-	100,00
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.944.000,00	41.944.000,00	-	100,00
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	178.542.800,00	155.075.600,00	(23.467.200,00)	86,86
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	178.542.800,00	155.075.600,00	(23.467.200,00)	86,86
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.542.800,00	155.075.600,00	(23.467.200,00)	86,86
2	PROGRAM PENATAAN DESA	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.250.000,00	353.423.448,00	(232.826.552,00)	60,29
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.497.000,00	55.497.000,00	-	100,00
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.056.038.100,00	1.020.792.080,00	(35.246.020,00)	96,66
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.056.038.100,00	1.020.792.080,00	(35.246.020,00)	96,66
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	988.023.000,00	961.186.980,00	(26.836.020,00)	97,28
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	988.023.000,00	961.186.980,00	(26.836.020,00)	97,28
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.023.000,00	961.186.980,00	(26.836.020,00)	97,28
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	35.059.000,00	27.159.000,00	(7.900.000,00)	77,47
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.059.000,00	27.159.000,00	(7.900.000,00)	77,47
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.059.000,00	27.159.000,00	(7.900.000,00)	77,47
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	32.956.100,00	32.446.100,00	(510.000,00)	98,45
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	32.956.100,00	32.446.100,00	(510.000,00)	98,45
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.956.100,00	32.446.100,00	(510.000,00)	98,45
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	627.131.169,00	559.597.769,00	(67.533.400,00)	89,23
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	627.131.169,00	559.597.769,00	(67.533.400,00)	89,23
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	45.772.000,00	38.154.000,00	(7.618.000,00)	83,36
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.772.000,00	38.154.000,00	(7.618.000,00)	83,36
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.772.000,00	38.154.000,00	(7.618.000,00)	83,36
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	64.464.000,00	56.304.000,00	(8.160.000,00)	87,34
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	64.464.000,00	56.304.000,00	(8.160.000,00)	87,34
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.464.000,00	56.304.000,00	(8.160.000,00)	87,34
05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	41.022.000,00	30.877.000,00	(10.145.000,00)	75,27
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	41.022.000,00	30.877.000,00	(10.145.000,00)	75,27
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.022.000,00	30.877.000,00	(10.145.000,00)	75,27
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	157.009.169,00	157.009.169,00	-	100,00
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	157.009.169,00	157.009.169,00	-	100,00
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.009.169,00	157.009.169,00	-	100,00
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	318.864.000,00	277.253.600,00	(41.610.400,00)	86,95
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	318.864.000,00	277.253.600,00	(41.610.400,00)	86,95
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.864.000,00	277.253.600,00	(41.610.400,00)	86,95
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	82.810.000,00	82.770.000,00	(40.000,00)	99,95
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	39.945.000,00	39.905.000,00	(40.000,00)	99,90

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39.945.000,00	39.905.000,00	(40.000,00)	99,90
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.945.000,00	39.905.000,00	(40.000,00)	99,90
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.945.000,00	39.905.000,00	(40.000,00)	99,90
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.865.000,00	42.865.000,00	-	100,00
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.865.000,00	42.865.000,00	-	100,00
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.865.000,00	42.865.000,00	-	100,00
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.865.000,00	42.865.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(4.412.091.399,00)	(4.024.595.446,00)	387.495.953,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.412.091.399,00)	(4.024.595.446,00)	387.495.953,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUR URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	500.000,00	900.000,00	400.000,00	180,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000,00	900.000,00	400.000,00	180,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	900.000,00	400.000,00	180,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.435.069.052,00	4.235.190.564,00	(1.199.878.488,00)	77,92
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.943.018.957,00	1.924.580.814,00	(18.438.143,00)	99,05
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.212.477.002,00	1.195.111.459,00	(17.365.543,00)	98,57
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.131.486.002,00	1.120.962.459,00	(10.523.543,00)	99,07
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.131.486.002,00	1.120.962.459,00	(10.523.543,00)	99,07
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.131.486.002,00	1.120.962.459,00	(10.523.543,00)	99,07
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.991.000,00	74.149.000,00	(6.842.000,00)	91,55
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.991.000,00	74.149.000,00	(6.842.000,00)	91,55
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	80.520.000,00	73.680.000,00	(6.840.000,00)	91,51
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.000,00	469.000,00	(2.000,00)	99,58
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.271.000,00	5.264.000,00	(7.000,00)	99,87
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.271.000,00	5.264.000,00	(7.000,00)	99,87
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.271.000,00	5.264.000,00	(7.000,00)	99,87
01.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.000,00	464.000,00	(7.000,00)	98,51
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.822.100,00	201.752.400,00	(69.700,00)	99,97
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.374.000,00	19.374.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	19.374.000,00	19.374.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.374.000,00	19.374.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.666.000,00	5.666.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.666.000,00	5.666.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.666.000,00	5.666.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.982.100,00	4.982.000,00	(100,00)	100,00
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	4.982.100,00	4.982.000,00	(100,00)	100,00
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.982.100,00	4.982.000,00	(100,00)	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	840.000,00	(60.000,00)	93,33
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	840.000,00	(60.000,00)	93,33
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	840.000,00	(60.000,00)	93,33
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.580.000,00	15.580.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.580.000,00	15.580.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	15.580.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.320.000,00	155.310.400,00	(9.600,00)	99,99
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	155.320.000,00	155.310.400,00	(9.600,00)	99,99
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.320.000,00	155.310.400,00	(9.600,00)	99,99
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	359.059.996,00	358.459.996,00	(600.000,00)	99,83
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.059.996,00	358.459.996,00	(600.000,00)	99,83
01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	760.000,00	(600.000,00)	55,88
01.2.07.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	760.000,00	(600.000,00)	55,88
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	357.699.996,00	357.699.996,00	-	100,00
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	357.699.996,00	357.699.996,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.957.859,00	107.952.859,00	(5.000,00)	100,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.195.000,00	(5.000,00)	99,58
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.195.000,00	(5.000,00)	99,58
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.195.000,00	(5.000,00)	99,58
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.637.859,00	8.637.859,00	-	100,00
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.637.859,00	8.637.859,00	-	100,00
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.637.859,00	8.637.859,00	-	100,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.431.000,00	47.040.100,00	(390.900,00)	99,18
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.431.000,00	47.040.100,00	(390.900,00)	99,18
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.431.000,00	47.040.100,00	(390.900,00)	99,18
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.431.000,00	47.040.100,00	(390.900,00)	99,18
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	168.837.800,00	145.936.900,00	(22.900.900,00)	86,44
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	168.837.800,00	145.936.900,00	(22.900.900,00)	86,44
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	6.755.000,00	-	(6.755.000,00)	-
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	6.755.000,00	-	(6.755.000,00)	-
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.755.000,00	-	(6.755.000,00)	-
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	162.082.800,00	145.936.900,00	(16.145.900,00)	90,04
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	102.142.800,00	85.996.900,00	(16.145.900,00)	84,19
02.2.02.13.5.1.01	Belanja Pegawai	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.682.800,00	84.536.900,00	(16.145.900,00)	83,96
02.2.02.13.5.2	BELANJA MODAL	59.940.000,00	59.940.000,00	-	100,00
02.2.02.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.940.000,00	59.940.000,00	-	100,00
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	2.170.902.282,00	1.503.577.850,00	(667.324.432,00)	69,26
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	537.234.182,00	427.754.450,00	(109.479.732,00)	79,62
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.200,00	4.375.200,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.375.200,00	4.375.200,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.375.200,00	4.375.200,00	-	100,00
03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.120.000,00	25.120.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.120.000,00	25.120.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.120.000,00	25.120.000,00	-	100,00
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	74.984.000,00	20.984.000,00	(54.000.000,00)	27,98
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	74.984.000,00	20.984.000,00	(54.000.000,00)	27,98
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.984.000,00	20.984.000,00	(54.000.000,00)	27,98
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	109.235.000,00	71.732.000,00	(37.503.000,00)	65,67
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	109.235.000,00	71.732.000,00	(37.503.000,00)	65,67
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.235.000,00	71.732.000,00	(37.503.000,00)	65,67
03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	283.502.982,00	265.526.250,00	(17.976.732,00)	93,66
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	283.502.982,00	265.526.250,00	(17.976.732,00)	93,66
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.502.982,00	265.526.250,00	(17.976.732,00)	93,66
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.017.000,00	40.017.000,00	-	100,00
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	40.017.000,00	40.017.000,00	-	100,00
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.017.000,00	40.017.000,00	-	100,00
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	542.457.000,00	542.457.000,00	-	100,00
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	542.457.000,00	542.457.000,00	-	100,00
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	542.457.000,00	542.457.000,00	-	100,00
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.457.000,00	542.457.000,00	-	100,00
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	849.011.100,00	326.990.400,00	(522.020.700,00)	38,51
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3.600.000,00	3.454.500,00	(145.500,00)	95,96
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.454.500,00	(145.500,00)	95,96
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.454.500,00	(145.500,00)	95,96
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	805.296.100,00	288.878.900,00	(516.417.200,00)	35,87
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	805.296.100,00	288.878.900,00	(516.417.200,00)	35,87
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.296.100,00	288.878.900,00	(516.417.200,00)	35,87
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	34.657.000,00	34.657.000,00	-	100,00
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
03.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	32.967.000,00	32.967.000,00	-	100,00
03.2.03.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.967.000,00	32.967.000,00	-	100,00
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5.458.000,00	-	(5.458.000,00)	-
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.458.000,00	-	(5.458.000,00)	-
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.458.000,00	-	(5.458.000,00)	-

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	242.200.000,00	206.376.000,00	(35.824.000,00)	85,21
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	242.200.000,00	206.376.000,00	(35.824.000,00)	85,21
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	242.200.000,00	206.376.000,00	(35.824.000,00)	85,21
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.200.000,00	206.376.000,00	(35.824.000,00)	85,21
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.152.310.013,00	661.095.000,00	(491.215.013,00)	57,37
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.152.310.013,00	661.095.000,00	(491.215.013,00)	57,37
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	320.610.013,00	317.610.000,00	(3.000.013,00)	99,06
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	320.610.013,00	317.610.000,00	(3.000.013,00)	99,06
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.410.000,00	1.410.000,00	(3.000.000,00)	31,97
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.200.013,00	316.200.000,00	(13,00)	100,00
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	831.700.000,00	343.485.000,00	(488.215.000,00)	41,30
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	831.700.000,00	343.485.000,00	(488.215.000,00)	41,30
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.700.000,00	343.485.000,00	(488.215.000,00)	41,30
	SURPLUS / DEFISIT	(5.434.569.052,00)	(4.234.290.564,00)	1.200.278.488,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.434.569.052,00)	(4.234.290.564,00)	1.200.278.488,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	500.000,00	900.000,00	400.000,00	180,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000,00	900.000,00	400.000,00	180,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	900.000,00	400.000,00	180,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.435.069.052,00	4.235.190.564,00	(1.199.878.488,00)	77,92
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.943.018.957,00	1.924.580.814,00	(18.438.143,00)	99,05
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.212.477.002,00	1.195.111.459,00	(17.365.543,00)	98,57
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.131.486.002,00	1.120.962.459,00	(10.523.543,00)	99,07
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.131.486.002,00	1.120.962.459,00	(10.523.543,00)	99,07
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.131.486.002,00	1.120.962.459,00	(10.523.543,00)	99,07
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.991.000,00	74.149.000,00	(6.842.000,00)	91,55
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.991.000,00	74.149.000,00	(6.842.000,00)	91,55
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	80.520.000,00	73.680.000,00	(6.840.000,00)	91,51
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.000,00	469.000,00	(2.000,00)	99,58
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.271.000,00	5.264.000,00	(7.000,00)	99,87
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.271.000,00	5.264.000,00	(7.000,00)	99,87
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.271.000,00	5.264.000,00	(7.000,00)	99,87
01.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.000,00	464.000,00	(7.000,00)	98,51
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.822.100,00	201.752.400,00	(69.700,00)	99,97
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.374.000,00	19.374.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	19.374.000,00	19.374.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.374.000,00	19.374.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.666.000,00	5.666.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.666.000,00	5.666.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.666.000,00	5.666.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.982.100,00	4.982.000,00	(100,00)	100,00
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	4.982.100,00	4.982.000,00	(100,00)	100,00
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.982.100,00	4.982.000,00	(100,00)	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	840.000,00	(60.000,00)	93,33
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	840.000,00	(60.000,00)	93,33
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	840.000,00	(60.000,00)	93,33
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.580.000,00	15.580.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.580.000,00	15.580.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	15.580.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.320.000,00	155.310.400,00	(9.600,00)	99,99
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	155.320.000,00	155.310.400,00	(9.600,00)	99,99
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.320.000,00	155.310.400,00	(9.600,00)	99,99
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	359.059.996,00	358.459.996,00	(600.000,00)	99,83
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.059.996,00	358.459.996,00	(600.000,00)	99,83
01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	760.000,00	(600.000,00)	55,88
01.2.07.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	760.000,00	(600.000,00)	55,88
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	357.699.996,00	357.699.996,00	-	100,00
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	357.699.996,00	357.699.996,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.957.859,00	107.952.859,00	(5.000,00)	100,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.195.000,00	(5.000,00)	99,58
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.195.000,00	(5.000,00)	99,58
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.195.000,00	(5.000,00)	99,58
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.637.859,00	8.637.859,00	-	100,00
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.637.859,00	8.637.859,00	-	100,00
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.637.859,00	8.637.859,00	-	100,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.431.000,00	47.040.100,00	(390.900,00)	99,18
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.431.000,00	47.040.100,00	(390.900,00)	99,18
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.431.000,00	47.040.100,00	(390.900,00)	99,18
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.431.000,00	47.040.100,00	(390.900,00)	99,18
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	168.837.800,00	145.936.900,00	(22.900.900,00)	86,44
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	168.837.800,00	145.936.900,00	(22.900.900,00)	86,44
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	6.755.000,00	-	(6.755.000,00)	-
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	6.755.000,00	-	(6.755.000,00)	-
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.755.000,00	-	(6.755.000,00)	-
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	162.082.800,00	145.936.900,00	(16.145.900,00)	90,04
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	102.142.800,00	85.996.900,00	(16.145.900,00)	84,19
02.2.02.13.5.1.01	Belanja Pegawai	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.682.800,00	84.536.900,00	(16.145.900,00)	83,96
02.2.02.13.5.2	BELANJA MODAL	59.940.000,00	59.940.000,00	-	100,00
02.2.02.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.940.000,00	59.940.000,00	-	100,00
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.170.902.282,00	1.503.577.850,00	(667.324.432,00)	69,26
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	537.234.182,00	427.754.450,00	(109.479.732,00)	79,62
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.200,00	4.375.200,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.375.200,00	4.375.200,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.375.200,00	4.375.200,00	-	100,00
03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.120.000,00	25.120.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.120.000,00	25.120.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.120.000,00	25.120.000,00	-	100,00
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	74.984.000,00	20.984.000,00	(54.000.000,00)	27,98
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	74.984.000,00	20.984.000,00	(54.000.000,00)	27,98
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.984.000,00	20.984.000,00	(54.000.000,00)	27,98
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	109.235.000,00	71.732.000,00	(37.503.000,00)	65,67
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	109.235.000,00	71.732.000,00	(37.503.000,00)	65,67
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.235.000,00	71.732.000,00	(37.503.000,00)	65,67
03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	283.502.982,00	265.526.250,00	(17.976.732,00)	93,66
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	283.502.982,00	265.526.250,00	(17.976.732,00)	93,66
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.502.982,00	265.526.250,00	(17.976.732,00)	93,66
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.017.000,00	40.017.000,00	-	100,00
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	40.017.000,00	40.017.000,00	-	100,00
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.017.000,00	40.017.000,00	-	100,00
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	542.457.000,00	542.457.000,00	-	100,00
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	542.457.000,00	542.457.000,00	-	100,00
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	542.457.000,00	542.457.000,00	-	100,00
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.457.000,00	542.457.000,00	-	100,00
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	849.011.100,00	326.990.400,00	(522.020.700,00)	38,51
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3.600.000,00	3.454.500,00	(145.500,00)	95,96
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.454.500,00	(145.500,00)	95,96
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.454.500,00	(145.500,00)	95,96
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	805.296.100,00	288.878.900,00	(516.417.200,00)	35,87
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	805.296.100,00	288.878.900,00	(516.417.200,00)	35,87
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.296.100,00	288.878.900,00	(516.417.200,00)	35,87
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	34.657.000,00	34.657.000,00	-	100,00
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
03.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	32.967.000,00	32.967.000,00	-	100,00
03.2.03.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.967.000,00	32.967.000,00	-	100,00
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5.458.000,00	-	(5.458.000,00)	-
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.458.000,00	-	(5.458.000,00)	-
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.458.000,00	-	(5.458.000,00)	-

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	242.200.000,00	206.376.000,00	(35.824.000,00)	85,21
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	242.200.000,00	206.376.000,00	(35.824.000,00)	85,21
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	242.200.000,00	206.376.000,00	(35.824.000,00)	85,21
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.200.000,00	206.376.000,00	(35.824.000,00)	85,21
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.152.310.013,00	661.095.000,00	(491.215.013,00)	57,37
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.152.310.013,00	661.095.000,00	(491.215.013,00)	57,37
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	320.610.013,00	317.610.000,00	(3.000.013,00)	99,06
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	320.610.013,00	317.610.000,00	(3.000.013,00)	99,06
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.410.000,00	1.410.000,00	(3.000.000,00)	31,97
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.200.013,00	316.200.000,00	(13,00)	100,00
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	831.700.000,00	343.485.000,00	(488.215.000,00)	41,30
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	831.700.000,00	343.485.000,00	(488.215.000,00)	41,30
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.700.000,00	343.485.000,00	(488.215.000,00)	41,30
	SURPLUS / DEFISIT	(5.434.569.052,00)	(4.234.290.564,00)	1.200.278.488,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.434.569.052,00)	(4.234.290.564,00)	1.200.278.488,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	262.000.000,00	72.154.000,00	(189.846.000,00)	27,54
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	262.000.000,00	72.154.000,00	(189.846.000,00)	27,54
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	260.000.000,00	68.704.000,00	(191.296.000,00)	26,42
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000,00	3.450.000,00	1.450.000,00	172,50
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.981.159.417,00	10.425.315.713,00	(555.843.704,00)	94,94
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.540.261.877,00	1.502.708.369,00	(37.553.508,00)	97,56
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.034.400,00	16.034.400,00	-	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.999.000,00	10.999.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.999.000,00	10.999.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.999.000,00	10.999.000,00	-	100,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	996.600,00	996.600,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	996.600,00	996.600,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.600,00	996.600,00	-	100,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	996.000,00	996.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	996.000,00	996.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.000,00	996.000,00	-	100,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	988.000,00	988.000,00	-	100,00
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	988.000,00	988.000,00	-	100,00
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.000,00	988.000,00	-	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	989.000,00	989.000,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	989.000,00	989.000,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.000,00	989.000,00	-	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.065.800,00	1.065.800,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.065.800,00	1.065.800,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.065.800,00	1.065.800,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.280.642.777,00	1.244.981.973,00	(35.660.804,00)	97,22
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.199.671.777,00	1.164.010.973,00	(35.660.804,00)	97,03
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.199.671.777,00	1.164.010.973,00	(35.660.804,00)	97,03
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.199.671.777,00	1.164.010.973,00	(35.660.804,00)	97,03
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.983.000,00	78.983.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	78.983.000,00	78.983.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	78.400.000,00	78.400.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.000,00	583.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	997.000,00	997.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	997.000,00	997.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.000,00	997.000,00	-	100,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	991.000,00	991.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	991.000,00	991.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.000,00	991.000,00	-	100,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.828.000,00	5.828.000,00	-	100,00
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.828.000,00	5.828.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.828.000,00	5.828.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.000,00	1.028.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.094.000,00	68.094.000,00	-	100,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.470.000,00	46.470.000,00	-	100,00
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	46.470.000,00	46.470.000,00	-	100,00
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.470.000,00	46.470.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.604.000,00	2.604.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.604.000,00	2.604.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.604.000,00	2.604.000,00	-	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.241.000,00	119.018.814,00	(222.186,00)	99,81
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	440.000,00	440.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	440.000,00	440.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	440.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.621.000,00	45.528.514,00	(92.486,00)	99,80
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.558.000,00	42.528.514,00	(29.486,00)	99,93
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.558.000,00	42.528.514,00	(29.486,00)	99,93
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	3.063.000,00	3.000.000,00	(63.000,00)	97,94
01.2.08.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.063.000,00	3.000.000,00	(63.000,00)	97,94
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.180.000,00	4.050.300,00	(129.700,00)	96,90
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.180.000,00	4.050.300,00	(129.700,00)	96,90
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	4.050.300,00	(129.700,00)	96,90
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.000.000,00	69.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	69.000.000,00	69.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	69.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.921.700,00	44.251.182,00	(1.670.518,00)	96,36
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.254.800,00	21.611.652,00	(1.643.148,00)	92,93
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.254.800,00	21.611.652,00	(1.643.148,00)	92,93
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.254.800,00	21.611.652,00	(1.643.148,00)	92,93
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.666.900,00	22.639.530,00	(27.370,00)	99,88
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.666.900,00	22.639.530,00	(27.370,00)	99,88
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.666.900,00	22.639.530,00	(27.370,00)	99,88
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.206.857.300,00	1.128.815.300,00	(78.042.000,00)	93,53
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	76.800.000,00	-	(76.800.000,00)	-
02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	76.800.000,00	-	(76.800.000,00)	-
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	-	(11.800.000,00)	-
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	-	(1.690.000,00)	-
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	-	(10.110.000,00)	-
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)	-
02.2.02.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)	-
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.698.000,00	120.265.000,00	(433.000,00)	99,64
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.698.000,00	120.265.000,00	(433.000,00)	99,64
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	120.698.000,00	120.265.000,00	(433.000,00)	99,64
02.2.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.008.000,00	118.575.000,00	(433.000,00)	99,64
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.009.359.300,00	1.008.550.300,00	(809.000,00)	99,92
02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	902.599.300,00	901.791.300,00	(808.000,00)	99,91
02.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	902.599.300,00	901.791.300,00	(808.000,00)	99,91
02.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00
02.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.989.300,00	900.181.300,00	(808.000,00)	99,91
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	106.760.000,00	106.759.000,00	(1.000,00)	100,00
02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	106.760.000,00	106.759.000,00	(1.000,00)	100,00
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.760.000,00	106.759.000,00	(1.000,00)	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8.191.340.440,00	7.771.092.244,00	(420.248.196,00)	94,87
03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	8.191.340.440,00	7.771.092.244,00	(420.248.196,00)	94,87
03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	50.498.600,00	50.497.600,00	(1.000,00)	100,00
03.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.498.600,00	50.497.600,00	(1.000,00)	100,00
03.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.498.600,00	50.497.600,00	(1.000,00)	100,00
03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	8.069.394.840,00	7.649.205.644,00	(420.189.196,00)	94,79
03.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	907.987.840,00	871.650.060,00	(36.337.780,00)	96,00
03.2.12.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.730.000,00	2.730.000,00	-	100,00
03.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	905.257.840,00	868.920.060,00	(36.337.780,00)	95,99
03.2.12.03.5.2	BELANJA MODAL	7.161.407.000,00	6.777.555.584,00	(383.851.416,00)	94,64
03.2.12.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.161.407.000,00	6.777.555.584,00	(383.851.416,00)	94,64
03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	71.447.000,00	71.389.000,00	(58.000,00)	99,92
03.2.12.04.5.1	BELANJA OPERASI	71.447.000,00	71.389.000,00	(58.000,00)	99,92

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.12.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.447.000,00	71.389.000,00	(58.000,00)	99,92
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	42.699.800,00	22.699.800,00	(20.000.000,00)	53,16
04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	42.699.800,00	22.699.800,00	(20.000.000,00)	53,16
04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	42.699.800,00	22.699.800,00	(20.000.000,00)	53,16
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.699.800,00	22.699.800,00	(20.000.000,00)	53,16
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.699.800,00	22.699.800,00	(20.000.000,00)	53,16
	SURPLUS / DEFISIT	(10.719.159.417,00)	(10.353.161.713,00)	365.997.704,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.719.159.417,00)	(10.353.161.713,00)	365.997.704,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Organisasi : 2.16.2.20.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	123.067.000,00	60.740.000,00	(62.327.000,00)	49,36
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.067.000,00	60.740.000,00	(62.327.000,00)	49,36
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	116.667.000,00	54.000.000,00	(62.667.000,00)	46,29
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.400.000,00	6.740.000,00	340.000,00	105,31
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.753.357.983,00	2.699.769.188,00	(53.588.795,00)	98,05
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.264.703.005,00	1.227.840.118,00	(36.862.887,00)	97,09
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.628.000,00	20.624.000,00	(4.000,00)	99,98
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.628.000,00	20.624.000,00	(4.000,00)	99,98
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.628.000,00	20.624.000,00	(4.000,00)	99,98
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.628.000,00	20.624.000,00	(4.000,00)	99,98
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	913.769.748,00	878.005.120,00	(35.764.628,00)	96,09
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	820.289.748,00	784.555.120,00	(35.734.628,00)	95,64
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	820.289.748,00	784.555.120,00	(35.734.628,00)	95,64
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	820.289.748,00	784.555.120,00	(35.734.628,00)	95,64
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.480.000,00	93.450.000,00	(30.000,00)	99,97
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	93.480.000,00	93.450.000,00	(30.000,00)	99,97
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	83.520.000,00	83.520.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	9.930.000,00	(30.000,00)	99,70
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.362.000,00	119.283.000,00	(79.000,00)	99,93
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.366.000,00	7.366.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.366.000,00	7.366.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.366.000,00	7.366.000,00	-	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.958.000,00	26.958.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	26.958.000,00	26.958.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.958.000,00	26.958.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.273.000,00	18.272.000,00	(1.000,00)	99,99
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.273.000,00	18.272.000,00	(1.000,00)	99,99
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.273.000,00	18.272.000,00	(1.000,00)	99,99
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.547.000,00	8.547.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.547.000,00	8.547.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.547.000,00	8.547.000,00	-	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.920.000,00	9.915.000,00	(5.000,00)	99,95
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.920.000,00	9.915.000,00	(5.000,00)	99,95
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.920.000,00	9.915.000,00	(5.000,00)	99,95
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.678.000,00	46.605.000,00	(73.000,00)	99,84
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	46.678.000,00	46.605.000,00	(73.000,00)	99,84
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.678.000,00	46.605.000,00	(73.000,00)	99,84
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.778.050,00	119.578.478,00	(199.572,00)	99,83
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.132.000,00	8.115.000,00	(17.000,00)	99,79
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.132.000,00	8.115.000,00	(17.000,00)	99,79
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.132.000,00	8.115.000,00	(17.000,00)	99,79
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.271.050,00	57.222.478,00	(48.572,00)	99,92
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.271.050,00	57.222.478,00	(48.572,00)	99,92
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.271.050,00	57.222.478,00	(48.572,00)	99,92
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.920.000,00	7.800.000,00	(120.000,00)	98,48
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.800.000,00	(120.000,00)	98,48
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.800.000,00	(120.000,00)	98,48
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.455.000,00	46.441.000,00	(14.000,00)	99,97
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	46.455.000,00	46.441.000,00	(14.000,00)	99,97
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.455.000,00	46.441.000,00	(14.000,00)	99,97
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.165.207,00	90.349.520,00	(815.687,00)	99,11
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.165.207,00	90.349.520,00	(815.687,00)	99,11
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.165.207,00	90.349.520,00	(815.687,00)	99,11
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.165.207,00	90.349.520,00	(815.687,00)	99,11

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	741.691.378,00	732.578.221,00	(9.113.157,00)	98,77
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	741.691.378,00	732.578.221,00	(9.113.157,00)	98,77
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	660.599.378,00	651.729.371,00	(8.870.007,00)	98,66
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	279.680.000,00	271.144.741,00	(8.535.259,00)	96,95
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	5.670.000,00	5.670.000,00	-	100,00
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.010.000,00	265.474.741,00	(8.535.259,00)	96,89
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	380.919.378,00	380.584.630,00	(334.748,00)	99,91
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.919.378,00	380.584.630,00	(334.748,00)	99,91
02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	52.007.000,00	51.865.700,00	(141.300,00)	99,73
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	52.007.000,00	51.865.700,00	(141.300,00)	99,73
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.007.000,00	51.865.700,00	(141.300,00)	99,73
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	29.085.000,00	28.983.150,00	(101.850,00)	99,65
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	29.085.000,00	28.983.150,00	(101.850,00)	99,65
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.085.000,00	28.983.150,00	(101.850,00)	99,65
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SE	117.948.000,00	117.601.000,00	(347.000,00)	99,71
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	117.948.000,00	117.601.000,00	(347.000,00)	99,71
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	91.345.000,00	91.175.000,00	(170.000,00)	99,81
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.345.000,00	91.175.000,00	(170.000,00)	99,81
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.345.000,00	91.175.000,00	(170.000,00)	99,81
02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	26.603.000,00	26.426.000,00	(177.000,00)	99,33
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.603.000,00	26.426.000,00	(177.000,00)	99,33
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.603.000,00	26.426.000,00	(177.000,00)	99,33
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	28.769.000,00	28.762.900,00	(6.100,00)	99,98
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.769.000,00	28.762.900,00	(6.100,00)	99,98
02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.769.000,00	28.762.900,00	(6.100,00)	99,98
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.769.000,00	28.762.900,00	(6.100,00)	99,98
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.769.000,00	28.762.900,00	(6.100,00)	99,98
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	600.246.600,00	592.986.949,00	(7.259.651,00)	98,79
03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600.246.600,00	592.986.949,00	(7.259.651,00)	98,79
03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	28.881.000,00	28.687.750,00	(193.250,00)	99,33
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.881.000,00	28.687.750,00	(193.250,00)	99,33
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.881.000,00	28.687.750,00	(193.250,00)	99,33
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	43.126.000,00	42.308.799,00	(817.201,00)	98,11
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	43.126.000,00	42.308.799,00	(817.201,00)	98,11
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.126.000,00	42.308.799,00	(817.201,00)	98,11
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	528.239.600,00	521.990.400,00	(6.249.200,00)	98,82
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	500.524.600,00	494.275.400,00	(6.249.200,00)	98,75
03.2.02.10.5.1.01	Belanja Pegawai	2.090.000,00	2.090.000,00	-	100,00
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.434.600,00	492.185.400,00	(6.249.200,00)	98,75
03.2.02.10.5.2	BELANJA MODAL	27.715.000,00	27.715.000,00	-	100,00
03.2.02.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.715.000,00	27.715.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(2.630.290.983,00)	(2.639.029.188,00)	(8.738.205,00)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.630.290.983,00)	(2.639.029.188,00)	(8.738.205,00)	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUR URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	51.500.000,00	21.625.000,00	(29.875.000,00)	41,99
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.500.000,00	21.625.000,00	(29.875.000,00)	41,99
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.500.000,00	21.625.000,00	(29.875.000,00)	41,99
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.702.490.877,00	3.598.075.067,00	(104.415.810,00)	97,18
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.738.535.782,00	1.710.176.669,00	(28.359.113,00)	98,37
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.006.000,00	22.996.000,00	(10.000,00)	99,96
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.548.000,00	12.543.000,00	(5.000,00)	99,96
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.548.000,00	12.543.000,00	(5.000,00)	99,96
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.548.000,00	12.543.000,00	(5.000,00)	99,96
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.458.000,00	10.453.000,00	(5.000,00)	99,95
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.458.000,00	10.453.000,00	(5.000,00)	99,95
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.458.000,00	10.453.000,00	(5.000,00)	99,95
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.425.897.582,00	1.400.307.121,00	(25.590.461,00)	98,21
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.311.219.282,00	1.287.133.821,00	(24.085.461,00)	98,16
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.311.219.282,00	1.287.133.821,00	(24.085.461,00)	98,16
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.311.219.282,00	1.287.133.821,00	(24.085.461,00)	98,16
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.560.000,00	93.060.000,00	(1.500.000,00)	98,41
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.560.000,00	93.060.000,00	(1.500.000,00)	98,41
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	82.560.000,00	82.560.000,00	-	100
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	87,5
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.118.300,00	20.113.300,00	(5.000,00)	99,98
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.118.300,00	20.113.300,00	(5.000,00)	99,98
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.118.300,00	20.113.300,00	(5.000,00)	99,98
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.954.000,00	138.269.800,00	(684.200,00)	99,51
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.159.000,00	3.159.000,00	-	100
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.159.000,00	3.159.000,00	-	100
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.159.000,00	3.159.000,00	-	100
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.020.000,00	(600.000,00)	62,96
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.020.000,00	(600.000,00)	62,96
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.020.000,00	(600.000,00)	62,96
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.175.000,00	134.090.800,00	(84.200,00)	99,94
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	134.175.000,00	134.090.800,00	(84.200,00)	99,94
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.175.000,00	134.090.800,00	(84.200,00)	99,94
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.672.800,00	101.668.008,00	(4.792,00)	100
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.264.800,00	11.260.008,00	(4.792,00)	99,96
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.264.800,00	11.260.008,00	(4.792,00)	99,96
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.264.800,00	11.260.008,00	(4.792,00)	99,96
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.408.000,00	90.408.000,00	-	100
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	90.408.000,00	90.408.000,00	-	100
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.408.000,00	90.408.000,00	-	100
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.005.400,00	46.935.740,00	(2.069.660,00)	95,78
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.545.400,00	45.475.740,00	(2.069.660,00)	95,65
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.545.400,00	45.475.740,00	(2.069.660,00)	95,65
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.545.400,00	45.475.740,00	(2.069.660,00)	95,65
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.014.318.745,00	1.012.359.945,00	(1.958.800,00)	99,81
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.014.318.745,00	1.012.359.945,00	(1.958.800,00)	99,81
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	314.318.745,00	312.359.945,00	(1.958.800,00)	99,38
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	136.053.100,00	134.094.300,00	(1.958.800,00)	98,56
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.043.100,00	133.084.300,00	(1.958.800,00)	98,55
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	178.265.645,00	178.265.645,00	-	100
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.826.590,00	12.826.590,00	-	100
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.439.055,00	165.439.055,00	-	100

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100
02.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	31.499.000,00	29.469.000,00	(2.030.000,00)	93,56
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31.499.000,00	29.469.000,00	(2.030.000,00)	93,56
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	17.989.000,00	17.989.000,00	-	100
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.989.000,00	2.989.000,00	-	100
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.989.000,00	2.989.000,00	-	100
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13.510.000,00	11.480.000,00	(2.030.000,00)	84,97
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.510.000,00	11.480.000,00	(2.030.000,00)	84,97
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.510.000,00	11.480.000,00	(2.030.000,00)	84,97
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.173.000,00	34.173.000,00	-	100
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.173.000,00	34.173.000,00	-	100
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.827.000,00	15.827.000,00	-	100
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.827.000,00	15.827.000,00	-	100
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	400.799.850,00	374.000.550,00	(26.799.300,00)	93,31
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	237.235.600,00	214.946.300,00	(22.289.300,00)	90,6
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	237.235.600,00	214.946.300,00	(22.289.300,00)	90,6
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	237.235.600,00	214.946.300,00	(22.289.300,00)	90,6
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.235.600,00	214.946.300,00	(22.289.300,00)	90,6
05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	163.564.250,00	159.054.250,00	(4.510.000,00)	97,24
05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	163.564.250,00	159.054.250,00	(4.510.000,00)	97,24
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	163.564.250,00	159.054.250,00	(4.510.000,00)	97,24
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.564.250,00	159.054.250,00	(4.510.000,00)	97,24
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.988.500,00	142.618.348,00	(22.370.152,00)	86,44
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	164.988.500,00	142.618.348,00	(22.370.152,00)	86,44
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	73.094.500,00	58.016.848,00	(15.077.652,00)	79,37
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.094.500,00	58.016.848,00	(15.077.652,00)	79,37
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.094.500,00	58.016.848,00	(15.077.652,00)	79,37
06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	91.894.000,00	84.601.500,00	(7.292.500,00)	92,06
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	91.894.000,00	84.601.500,00	(7.292.500,00)	92,06
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.894.000,00	84.601.500,00	(7.292.500,00)	92,06
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	90.438.000,00	86.947.200,00	(3.490.800,00)	96,14
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	90.438.000,00	86.947.200,00	(3.490.800,00)	96,14
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	90.438.000,00	86.947.200,00	(3.490.800,00)	96,14
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.438.000,00	86.947.200,00	(3.490.800,00)	96,14
08.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.428.000,00	85.937.200,00	(3.490.800,00)	96,1
	SURPLUS / DEFISIT	(3.650.990.877,00)	(3.576.450.067,00)	74.540.810,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.650.990.877,00)	(3.576.450.067,00)	74.540.810,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	51.500.000,00	21.625.000,00	(29.875.000,00)	41,99
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.500.000,00	21.625.000,00	(29.875.000,00)	41,99
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.500.000,00	21.625.000,00	(29.875.000,00)	41,99
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.702.490.877,00	3.598.075.067,00	(104.415.810,00)	97,18
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.738.535.782,00	1.710.176.669,00	(28.359.113,00)	98,37
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.006.000,00	22.996.000,00	(10.000,00)	99,96
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.548.000,00	12.543.000,00	(5.000,00)	99,96
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.548.000,00	12.543.000,00	(5.000,00)	99,96
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.548.000,00	12.543.000,00	(5.000,00)	99,96
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.458.000,00	10.453.000,00	(5.000,00)	99,95
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.458.000,00	10.453.000,00	(5.000,00)	99,95
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.458.000,00	10.453.000,00	(5.000,00)	99,95
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.425.897.582,00	1.400.307.121,00	(25.590.461,00)	98,21
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.311.219.282,00	1.287.133.821,00	(24.085.461,00)	98,16
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.311.219.282,00	1.287.133.821,00	(24.085.461,00)	98,16
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.311.219.282,00	1.287.133.821,00	(24.085.461,00)	98,16
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.560.000,00	93.060.000,00	(1.500.000,00)	98,41
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.560.000,00	93.060.000,00	(1.500.000,00)	98,41
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	82.560.000,00	82.560.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	87,50
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.118.300,00	20.113.300,00	(5.000,00)	99,98
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.118.300,00	20.113.300,00	(5.000,00)	99,98
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.118.300,00	20.113.300,00	(5.000,00)	99,98
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.954.000,00	138.269.800,00	(684.200,00)	99,51
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.159.000,00	3.159.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.159.000,00	3.159.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.159.000,00	3.159.000,00	-	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.020.000,00	(600.000,00)	62,96
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.020.000,00	(600.000,00)	62,96
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.020.000,00	(600.000,00)	62,96
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.175.000,00	134.090.800,00	(84.200,00)	99,94
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	134.175.000,00	134.090.800,00	(84.200,00)	99,94
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.175.000,00	134.090.800,00	(84.200,00)	99,94
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.672.800,00	101.668.008,00	(4.792,00)	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.264.800,00	11.260.008,00	(4.792,00)	99,96
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.264.800,00	11.260.008,00	(4.792,00)	99,96
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.264.800,00	11.260.008,00	(4.792,00)	99,96
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.408.000,00	90.408.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	90.408.000,00	90.408.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.408.000,00	90.408.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.005.400,00	46.935.740,00	(2.069.660,00)	95,78
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.545.400,00	45.475.740,00	(2.069.660,00)	95,65
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.545.400,00	45.475.740,00	(2.069.660,00)	95,65
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.545.400,00	45.475.740,00	(2.069.660,00)	95,65
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.014.318.745,00	1.012.359.945,00	(1.958.800,00)	99,81
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.014.318.745,00	1.012.359.945,00	(1.958.800,00)	99,81
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	314.318.745,00	312.359.945,00	(1.958.800,00)	99,38
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	136.053.100,00	134.094.300,00	(1.958.800,00)	98,56
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.043.100,00	133.084.300,00	(1.958.800,00)	98,55
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	178.265.645,00	178.265.645,00	-	100,00
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.826.590,00	12.826.590,00	-	100,00
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.439.055,00	165.439.055,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100,00
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100,00
02.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100,00
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.534.000,00	49.784.000,00	(750.000,00)	98,52
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	31.499.000,00	29.469.000,00	(2.030.000,00)	93,56
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31.499.000,00	29.469.000,00	(2.030.000,00)	93,56
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	17.989.000,00	17.989.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.989.000,00	2.989.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.989.000,00	2.989.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13.510.000,00	11.480.000,00	(2.030.000,00)	84,97
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.510.000,00	11.480.000,00	(2.030.000,00)	84,97
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.510.000,00	11.480.000,00	(2.030.000,00)	84,97
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.881.700,00	28.641.000,00	(240.700,00)	99,17
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.249.000,00	65.813.755,00	(14.435.245,00)	82,01
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.173.000,00	34.173.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.173.000,00	34.173.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.827.000,00	15.827.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.827.000,00	15.827.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	400.799.850,00	374.000.550,00	(26.799.300,00)	93,31
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	237.235.600,00	214.946.300,00	(22.289.300,00)	90,60
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	237.235.600,00	214.946.300,00	(22.289.300,00)	90,60
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	237.235.600,00	214.946.300,00	(22.289.300,00)	90,60
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.235.600,00	214.946.300,00	(22.289.300,00)	90,60
05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	163.564.250,00	159.054.250,00	(4.510.000,00)	97,24
05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	163.564.250,00	159.054.250,00	(4.510.000,00)	97,24
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	163.564.250,00	159.054.250,00	(4.510.000,00)	97,24
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.564.250,00	159.054.250,00	(4.510.000,00)	97,24
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86,00
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86,00
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86,00
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.044.300,00	21.539.000,00	(3.505.300,00)	86,00
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.988.500,00	142.618.348,00	(22.370.152,00)	86,44
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	164.988.500,00	142.618.348,00	(22.370.152,00)	86,44
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	73.094.500,00	58.016.848,00	(15.077.652,00)	79,37
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.094.500,00	58.016.848,00	(15.077.652,00)	79,37
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.094.500,00	58.016.848,00	(15.077.652,00)	79,37
06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	91.894.000,00	84.601.500,00	(7.292.500,00)	92,06
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	91.894.000,00	84.601.500,00	(7.292.500,00)	92,06
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.894.000,00	84.601.500,00	(7.292.500,00)	92,06
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.202.000,00	26.725.600,00	(476.400,00)	98,25
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	90.438.000,00	86.947.200,00	(3.490.800,00)	96,14
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	90.438.000,00	86.947.200,00	(3.490.800,00)	96,14
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	90.438.000,00	86.947.200,00	(3.490.800,00)	96,14
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.438.000,00	86.947.200,00	(3.490.800,00)	96,14
08.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.428.000,00	85.937.200,00	(3.490.800,00)	96,10
	SURPLUS / DEFISIT	(3.650.990.877,00)	(3.576.450.067,00)	74.540.810,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.650.990.877,00)	(3.576.450.067,00)	74.540.810,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUR URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.291.442.131,00	2.131.664.269,00	(159.777.862,00)	93,03
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.652.903.031,00	1.618.360.369,00	(34.542.662,00)	97,91
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.973.000,00	17.968.000,00	(5.000,00)	99,97
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.895.000,00	2.895.000,00	-	100
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.895.000,00	2.895.000,00	-	100
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.895.000,00	2.895.000,00	-	100
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.078.000,00	15.073.000,00	(5.000,00)	99,97
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.078.000,00	15.073.000,00	(5.000,00)	99,97
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.078.000,00	15.073.000,00	(5.000,00)	99,97
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.315.946.058,00	1.296.898.843,00	(19.047.215,00)	98,55
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.232.715.058,00	1.220.507.843,00	(12.207.215,00)	99,01
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.232.715.058,00	1.220.507.843,00	(12.207.215,00)	99,01
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.232.715.058,00	1.220.507.843,00	(12.207.215,00)	99,01
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas A	80.632.000,00	73.792.000,00	(6.840.000,00)	91,52
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.632.000,00	73.792.000,00	(6.840.000,00)	91,52
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	80.520.000,00	73.680.000,00	(6.840.000,00)	91,51
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000,00	112.000,00	-	100
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100
01.2.02.07	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.479.000,00	1.479.000,00	-	100
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.479.000,00	1.479.000,00	-	100
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.479.000,00	1.479.000,00	-	100
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.059.000,00	5.059.000,00	-	100
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.059.000,00	5.059.000,00	-	100
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.059.000,00	5.059.000,00	-	100
01.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.000,00	259.000,00	-	100
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.463.900,00	191.976.482,00	(11.487.418,00)	94,35
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.561.000,00	1.561.000,00	-	100
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.561.000,00	1.561.000,00	-	100
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.561.000,00	1.561.000,00	-	100
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.174.000,00	20.298.000,00	(6.876.000,00)	74,7
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.174.000,00	1.724.000,00	(450.000,00)	79,3
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.460.000,00	1.010.000,00	(450.000,00)	69,18
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.000,00	714.000,00	-	100
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	18.574.000,00	(6.426.000,00)	74,3
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	18.574.000,00	(6.426.000,00)	74,3
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.120.000,00	7.120.000,00	-	100
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.120.000,00	7.120.000,00	-	100
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	7.120.000,00	-	100
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.450.900,00	3.450.900,00	-	100
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.450.900,00	3.450.900,00	-	100
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.900,00	3.450.900,00	-	100
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	900.000,00	-	100
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	100
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.976.000,00	2.968.000,00	(8.000,00)	99,73
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.976.000,00	2.968.000,00	(8.000,00)	99,73
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.976.000,00	2.968.000,00	(8.000,00)	99,73
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.282.000,00	155.678.582,00	(4.603.418,00)	97,13
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	160.282.000,00	155.678.582,00	(4.603.418,00)	97,13
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.282.000,00	155.678.582,00	(4.603.418,00)	97,13
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.658.423,00	28.966.972,00	(1.691.451,00)	94,48
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.281.000,00	1.281.000,00	-	100
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.281.000,00	1.281.000,00	-	100
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.281.000,00	1.281.000,00	-	100
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.579.423,00	13.977.972,00	(1.601.451,00)	89,72

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.579.423,00	13.977.972,00	(1.601.451,00)	89,72
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.579.423,00	13.977.972,00	(1.601.451,00)	89,72
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	2.100.000,00	(90.000,00)	95,89
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.190.000,00	2.100.000,00	(90.000,00)	95,89
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.100.000,00	(90.000,00)	95,89
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.608.000,00	11.608.000,00	-	100
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.608.000,00	11.608.000,00	-	100
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.608.000,00	11.608.000,00	-	100
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.802.650,00	77.491.072,00	(2.311.578,00)	97,1
01.2.09.01	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.222.650,00	74.414.072,00	(1.808.578,00)	97,63
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.222.650,00	74.414.072,00	(1.808.578,00)	97,63
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.222.650,00	74.414.072,00	(1.808.578,00)	97,63
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.580.000,00	3.077.000,00	(503.000,00)	85,95
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.580.000,00	3.077.000,00	(503.000,00)	85,95
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	3.077.000,00	(503.000,00)	85,95
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	28.782.000,00	21.872.000,00	(6.910.000,00)	75,99
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	28.782.000,00	21.872.000,00	(6.910.000,00)	75,99
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	28.782.000,00	21.872.000,00	(6.910.000,00)	75,99
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.782.000,00	16.872.000,00	(6.910.000,00)	70,94
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.782.000,00	16.872.000,00	(6.910.000,00)	70,94
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	80.909.000,00	70.660.800,00	(10.248.200,00)	87,33
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	80.909.000,00	70.660.800,00	(10.248.200,00)	87,33
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	80.909.000,00	70.660.800,00	(10.248.200,00)	87,33
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.909.000,00	68.660.800,00	(10.248.200,00)	87,01
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.010.000,00	(680.000,00)	59,76
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.219.000,00	67.650.800,00	(9.568.200,00)	87,61
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100
03.2.01.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100
4	MODAL	124.769.000,00	109.949.000,00	(14.820.000,00)	88,12
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	124.769.000,00	109.949.000,00	(14.820.000,00)	88,12
04.2.01.01	Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.914.000,00	87.120.000,00	(13.794.000,00)	86,33
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.914.000,00	87.120.000,00	(13.794.000,00)	86,33
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.914.000,00	87.120.000,00	(13.794.000,00)	86,33
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	23.855.000,00	22.829.000,00	(1.026.000,00)	95,7
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.855.000,00	22.829.000,00	(1.026.000,00)	95,7
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.855.000,00	22.829.000,00	(1.026.000,00)	95,7
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	388.653.900,00	297.393.900,00	(91.260.000,00)	76,52
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	388.653.900,00	297.393.900,00	(91.260.000,00)	76,52
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	63.008.500,00	59.821.500,00	(3.187.000,00)	94,94
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.008.500,00	59.821.500,00	(3.187.000,00)	94,94
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.008.500,00	59.821.500,00	(3.187.000,00)	94,94
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	238.176.000,00	191.369.000,00	(46.807.000,00)	80,35
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	238.176.000,00	191.369.000,00	(46.807.000,00)	80,35
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.176.000,00	191.369.000,00	(46.807.000,00)	80,35
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	87.469.400,00	46.203.400,00	(41.266.000,00)	52,82
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.469.400,00	46.203.400,00	(41.266.000,00)	52,82
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.469.400,00	46.203.400,00	(41.266.000,00)	52,82
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05
	SURPLUS / DEFISIT	(2.291.442.131,00)	(2.131.664.269,00)	159.777.862,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.291.442.131,00)	(2.131.664.269,00)	159.777.862,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.291.442.131,00	2.131.664.269,00	(159.777.862,00)	93,03
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.652.903.031,00	1.618.360.369,00	(34.542.662,00)	97,91
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.973.000,00	17.968.000,00	(5.000,00)	99,97
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.895.000,00	2.895.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.895.000,00	2.895.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.895.000,00	2.895.000,00	-	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.078.000,00	15.073.000,00	(5.000,00)	99,97
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.078.000,00	15.073.000,00	(5.000,00)	99,97
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.078.000,00	15.073.000,00	(5.000,00)	99,97
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.315.946.058,00	1.296.898.843,00	(19.047.215,00)	98,55
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.232.715.058,00	1.220.507.843,00	(12.207.215,00)	99,01
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.232.715.058,00	1.220.507.843,00	(12.207.215,00)	99,01
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.232.715.058,00	1.220.507.843,00	(12.207.215,00)	99,01
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas A	80.632.000,00	73.792.000,00	(6.840.000,00)	91,52
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.632.000,00	73.792.000,00	(6.840.000,00)	91,52
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	80.520.000,00	73.680.000,00	(6.840.000,00)	91,51
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000,00	112.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00
01.2.02.07	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.479.000,00	1.479.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.479.000,00	1.479.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.479.000,00	1.479.000,00	-	100,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.059.000,00	5.059.000,00	-	100,00
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.059.000,00	5.059.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.059.000,00	5.059.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.000,00	259.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.463.900,00	191.976.482,00	(11.487.418,00)	94,35
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.561.000,00	1.561.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.561.000,00	1.561.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.561.000,00	1.561.000,00	-	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.174.000,00	20.298.000,00	(6.876.000,00)	74,70
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.174.000,00	1.724.000,00	(450.000,00)	79,30
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.460.000,00	1.010.000,00	(450.000,00)	69,18
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.000,00	714.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	18.574.000,00	(6.426.000,00)	74,30
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	18.574.000,00	(6.426.000,00)	74,30
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.120.000,00	7.120.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.120.000,00	7.120.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	7.120.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.450.900,00	3.450.900,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.450.900,00	3.450.900,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.900,00	3.450.900,00	-	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	900.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.976.000,00	2.968.000,00	(8.000,00)	99,73
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.976.000,00	2.968.000,00	(8.000,00)	99,73
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.976.000,00	2.968.000,00	(8.000,00)	99,73
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.282.000,00	155.678.582,00	(4.603.418,00)	97,13
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	160.282.000,00	155.678.582,00	(4.603.418,00)	97,13
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.282.000,00	155.678.582,00	(4.603.418,00)	97,13
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.658.423,00	28.966.972,00	(1.691.451,00)	94,48
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.281.000,00	1.281.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.281.000,00	1.281.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.281.000,00	1.281.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.579.423,00	13.977.972,00	(1.601.451,00)	89,72

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.579.423,00	13.977.972,00	(1.601.451,00)	89,72
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.579.423,00	13.977.972,00	(1.601.451,00)	89,72
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	2.100.000,00	(90.000,00)	95,89
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.190.000,00	2.100.000,00	(90.000,00)	95,89
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.100.000,00	(90.000,00)	95,89
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.608.000,00	11.608.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.608.000,00	11.608.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.608.000,00	11.608.000,00	-	100,00
01.2.09	Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.802.650,00	77.491.072,00	(2.311.578,00)	97,10
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.222.650,00	74.414.072,00	(1.808.578,00)	97,63
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.222.650,00	74.414.072,00	(1.808.578,00)	97,63
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.222.650,00	74.414.072,00	(1.808.578,00)	97,63
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.580.000,00	3.077.000,00	(503.000,00)	85,95
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.580.000,00	3.077.000,00	(503.000,00)	85,95
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	3.077.000,00	(503.000,00)	85,95
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	28.782.000,00	21.872.000,00	(6.910.000,00)	75,99
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	28.782.000,00	21.872.000,00	(6.910.000,00)	75,99
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	28.782.000,00	21.872.000,00	(6.910.000,00)	75,99
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.782.000,00	16.872.000,00	(6.910.000,00)	70,94
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.782.000,00	16.872.000,00	(6.910.000,00)	70,94
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	80.909.000,00	70.660.800,00	(10.248.200,00)	87,33
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	80.909.000,00	70.660.800,00	(10.248.200,00)	87,33
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	80.909.000,00	70.660.800,00	(10.248.200,00)	87,33
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.909.000,00	68.660.800,00	(10.248.200,00)	87,01
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.010.000,00	(680.000,00)	59,76
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.219.000,00	67.650.800,00	(9.568.200,00)	87,61
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	124.769.000,00	109.949.000,00	(14.820.000,00)	88,12
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	124.769.000,00	109.949.000,00	(14.820.000,00)	88,12
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.914.000,00	87.120.000,00	(13.794.000,00)	86,33
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.914.000,00	87.120.000,00	(13.794.000,00)	86,33
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.914.000,00	87.120.000,00	(13.794.000,00)	86,33
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	23.855.000,00	22.829.000,00	(1.026.000,00)	95,70
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.855.000,00	22.829.000,00	(1.026.000,00)	95,70
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.855.000,00	22.829.000,00	(1.026.000,00)	95,70
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	388.653.900,00	297.393.900,00	(91.260.000,00)	76,52
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	388.653.900,00	297.393.900,00	(91.260.000,00)	76,52
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	63.008.500,00	59.821.500,00	(3.187.000,00)	94,94
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.008.500,00	59.821.500,00	(3.187.000,00)	94,94
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.008.500,00	59.821.500,00	(3.187.000,00)	94,94
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	238.176.000,00	191.369.000,00	(46.807.000,00)	80,35
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	238.176.000,00	191.369.000,00	(46.807.000,00)	80,35
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.176.000,00	191.369.000,00	(46.807.000,00)	80,35
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	87.469.400,00	46.203.400,00	(41.266.000,00)	52,82
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.469.400,00	46.203.400,00	(41.266.000,00)	52,82
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.469.400,00	46.203.400,00	(41.266.000,00)	52,82
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.425.200,00	13.428.200,00	(1.997.000,00)	87,05
	SURPLUS / DEFISIT	(2.291.442.131,00)	(2.131.664.269,00)	159.777.862,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.291.442.131,00)	(2.131.664.269,00)	159.777.862,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARHAGA
 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kemudaan dan Olahraga

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	213.500,00	500.000,00	286.500,00	234,19
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	213.500,00	500.000,00	286.500,00	234,19
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	213.500,00	500.000,00	286.500,00	234,19
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.614.411.430,00	4.558.361.529,63	(56.049.900,37)	98,79
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.383.076.000,00	1.367.002.298,00	(16.073.702,00)	98,84
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.234.500,00	20.058.500,00	(2.176.000,00)	90,21
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.543.500,00	12.397.500,00	(2.146.000,00)	85,24
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.543.500,00	12.397.500,00	(2.146.000,00)	85,24
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.543.500,00	12.397.500,00	(2.146.000,00)	85,24
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.551.000,00	1.521.000,00	(30.000,00)	98,07
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.551.000,00	1.521.000,00	(30.000,00)	98,07
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.551.000,00	1.521.000,00	(30.000,00)	98,07
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.140.000,00	6.140.000,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.140.000,00	6.140.000,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.140.000,00	6.140.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.167.054.350,00	1.155.531.024,00	(11.523.326,00)	99,01
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.056.374.350,00	1.044.894.124,00	(11.480.226,00)	98,91
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.056.374.350,00	1.044.894.124,00	(11.480.226,00)	98,91
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.056.374.350,00	1.044.894.124,00	(11.480.226,00)	98,91
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.680.000,00	110.636.900,00	(43.100,00)	99,96
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	110.680.000,00	110.636.900,00	(43.100,00)	99,96
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	73.680.000,00	73.680.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	36.956.900,00	(43.100,00)	99,88
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.203.000,00	5.171.000,00	(32.000,00)	99,38
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.203.000,00	5.171.000,00	(32.000,00)	99,38
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.203.000,00	5.171.000,00	(32.000,00)	99,38
01.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.000,00	371.000,00	(32.000,00)	92,06
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.400.000,00	116.018.274,00	(381.726,00)	99,67
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.464.000,00	7.449.000,00	(15.000,00)	99,80
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.464.000,00	7.449.000,00	(15.000,00)	99,80
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.464.000,00	7.449.000,00	(15.000,00)	99,80
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.058.000,00	2.058.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.058.000,00	2.058.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.058.000,00	2.058.000,00	-	100,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.550.000,00	16.548.000,00	(2.000,00)	99,99
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	16.550.000,00	16.548.000,00	(2.000,00)	99,99
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	16.548.000,00	(2.000,00)	99,99
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.318.000,00	88.953.274,00	(364.726,00)	99,59
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	89.318.000,00	88.953.274,00	(364.726,00)	99,59
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.318.000,00	88.953.274,00	(364.726,00)	99,59
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.397.150,00	10.590.500,00	(806.650,00)	92,92
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	331.000,00	331.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	331.000,00	331.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.000,00	331.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.416.150,00	6.609.500,00	(806.650,00)	89,12
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.416.150,00	6.609.500,00	(806.650,00)	89,12
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.416.150,00	6.609.500,00	(806.650,00)	89,12
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.787.000,00	59.633.000,00	(1.154.000,00)	98,10
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.279.000,00	57.125.000,00	(1.154.000,00)	98,02
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.279.000,00	57.125.000,00	(1.154.000,00)	98,02
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.279.000,00	57.125.000,00	(1.154.000,00)	98,02

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.508.000,00	2.508.000,00	-	100,00
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.508.000,00	2.508.000,00	-	100,00
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.508.000,00	2.508.000,00	-	100,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	403.252.000,00	376.528.160,00	(26.723.840,00)	93,37
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	403.252.000,00	376.528.160,00	(26.723.840,00)	93,37
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	13.974.000,00	13.974.000,00	-	100,00
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.974.000,00	13.974.000,00	-	100,00
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.974.000,00	13.974.000,00	-	100,00
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	389.278.000,00	362.554.160,00	(26.723.840,00)	93,14
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	389.278.000,00	362.554.160,00	(26.723.840,00)	93,14
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	9.760.000,00	9.760.000,00	-	100,00
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.518.000,00	352.794.160,00	(26.723.840,00)	92,96
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.459.125.430,00	2.446.041.472,63	(13.083.957,37)	99,47
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.111.459.300,00	1.105.795.850,00	(5.663.450,00)	99,49
03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	185.494.000,00	179.830.550,00	(5.663.450,00)	96,95
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	185.494.000,00	179.830.550,00	(5.663.450,00)	96,95
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.494.000,00	179.830.550,00	(5.663.450,00)	96,95
03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	475.965.300,00	475.965.300,00	-	100,00
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	475.965.300,00	475.965.300,00	-	100,00
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.965.300,00	475.965.300,00	-	100,00
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	546.971.530,00	544.450.400,00	(2.521.130,00)	99,54
03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	81.645.400,00	79.211.400,00	(2.434.000,00)	97,02
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.645.400,00	79.211.400,00	(2.434.000,00)	97,02
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.645.400,00	79.211.400,00	(2.434.000,00)	97,02
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	465.326.130,00	465.239.000,00	(87.130,00)	99,98
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	465.326.130,00	465.239.000,00	(87.130,00)	99,98
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.326.130,00	465.239.000,00	(87.130,00)	99,98
03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	103.000.000,00	103.000.000,00	-	100,00
03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	103.000.000,00	103.000.000,00	-	100,00
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.000.000,00	103.000.000,00	-	100,00
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	103.000.000,00	-	100,00
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	697.694.600,00	692.795.222,63	(4.899.377,37)	99,30
03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	220.863.000,00	219.169.200,00	(1.693.800,00)	99,23
03.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	220.863.000,00	219.169.200,00	(1.693.800,00)	99,23
03.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.863.000,00	219.169.200,00	(1.693.800,00)	99,23
03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	476.831.600,00	473.626.022,63	(3.205.577,37)	99,33
03.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	348.615.600,00	345.435.272,63	(3.180.327,37)	99,09
03.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.615.600,00	345.435.272,63	(3.180.327,37)	99,09
03.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	128.216.000,00	128.190.750,00	(25.250,00)	99,98
03.2.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.016.000,00	1.016.000,00	-	100,00
03.2.05.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.200.000,00	127.174.750,00	(25.250,00)	99,98
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	368.958.000,00	368.789.599,00	(168.401,00)	99,95
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	368.958.000,00	368.789.599,00	(168.401,00)	99,95
04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	368.958.000,00	368.789.599,00	(168.401,00)	99,95
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	368.958.000,00	368.789.599,00	(168.401,00)	99,95
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.958.000,00	368.789.599,00	(168.401,00)	99,95
	SURPLUS / DEFISIT	(4.614.197.930,00)	(4.557.861.529,63)	56.336.400,37	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.614.197.930,00)	(4.557.861.529,63)	56.336.400,37	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.500.000,00	3.200.000,00	700.000,00	128,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000,00	3.200.000,00	700.000,00	128,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.500.000,00	3.200.000,00	700.000,00	128,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.665.959.964,00	5.641.926.429,00	(24.033.535,00)	99,58
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.487.226.064,00	1.469.752.960,00	(17.473.104,00)	98,83
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.510.800,00	47.299.800,00	(211.000,00)	99,56
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.180.000,00	41.984.000,00	(196.000,00)	99,54
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.985.000,00	18.968.000,00	(17.000,00)	99,91
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.985.000,00	18.968.000,00	(17.000,00)	99,91
01.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	23.195.000,00	23.016.000,00	(179.000,00)	99,23
01.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.195.000,00	23.016.000,00	(179.000,00)	99,23
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.330.800,00	5.315.800,00	(15.000,00)	99,72
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.330.800,00	5.315.800,00	(15.000,00)	99,72
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.330.800,00	5.315.800,00	(15.000,00)	99,72
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.241.737.424,00	1.227.620.040,00	(14.117.384,00)	98,86
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.152.909.424,00	1.138.802.040,00	(14.107.384,00)	98,78
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.152.909.424,00	1.138.802.040,00	(14.107.384,00)	98,78
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.152.909.424,00	1.138.802.040,00	(14.107.384,00)	98,78
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.740.000,00	64.740.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.740.000,00	64.740.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	63.840.000,00	63.840.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.146.000,00	14.136.000,00	(10.000,00)	99,93
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.146.000,00	14.136.000,00	(10.000,00)	99,93
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.146.000,00	14.136.000,00	(10.000,00)	99,93
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.942.000,00	9.942.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.942.000,00	9.942.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.942.000,00	9.942.000,00	-	100,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.417.000,00	6.417.000,00	-	100,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.417.000,00	6.417.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.417.000,00	6.417.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.617.000,00	1.617.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.443.000,00	119.645.120,00	(2.797.880,00)	97,71
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.302.000,00	16.290.000,00	(12.000,00)	99,93
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	16.302.000,00	16.290.000,00	(12.000,00)	99,93
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.302.000,00	16.290.000,00	(12.000,00)	99,93
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.019.000,00	7.019.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.992.000,00	6.992.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.992.000,00	6.992.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	27.000,00	27.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000,00	27.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.780.000,00	4.780.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.780.000,00	4.780.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	4.780.000,00	-	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.808.000,00	1.560.000,00	(1.248.000,00)	55,56
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.808.000,00	1.560.000,00	(1.248.000,00)	55,56
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.808.000,00	1.560.000,00	(1.248.000,00)	55,56
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.614.000,00	87.076.120,00	(1.537.880,00)	98,26
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	88.614.000,00	87.076.120,00	(1.537.880,00)	98,26
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.614.000,00	87.076.120,00	(1.537.880,00)	98,26
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.727.000,00	10.727.000,00	-	100,00
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.727.000,00	10.727.000,00	-	100,00
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	10.727.000,00	10.727.000,00	-	100,00
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.727.000,00	10.727.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.247.840,00	9.999.000,00	(248.840,00)	97,57

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.025.840,00	7.891.000,00	(134.840,00)	98,32
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.025.840,00	7.891.000,00	(134.840,00)	98,32
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.025.840,00	7.891.000,00	(134.840,00)	98,32
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.222.000,00	2.108.000,00	(114.000,00)	94,87
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.222.000,00	2.108.000,00	(114.000,00)	94,87
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.222.000,00	2.108.000,00	(114.000,00)	94,87
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.143.000,00	48.045.000,00	(98.000,00)	99,80
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.143.000,00	48.045.000,00	(98.000,00)	99,80
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.143.000,00	48.045.000,00	(98.000,00)	99,80
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.143.000,00	48.045.000,00	(98.000,00)	99,80
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.968.936.900,00	3.967.717.812,00	(1.219.088,00)	99,97
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	844.153.800,00	842.956.712,00	(1.197.088,00)	99,86
02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	786.283.000,00	785.760.086,00	(522.914,00)	99,93
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	270.673.000,00	270.150.086,00	(522.914,00)	99,81
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.890.000,00	2.890.000,00	-	100,00
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.783.000,00	267.260.086,00	(522.914,00)	99,80
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	515.610.000,00	515.610.000,00	-	100,00
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	515.610.000,00	515.610.000,00	-	100,00
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	57.870.800,00	57.196.626,00	(674.174,00)	98,84
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	57.870.800,00	57.196.626,00	(674.174,00)	98,84
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.870.800,00	57.196.626,00	(674.174,00)	98,84
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.124.783.100,00	3.124.761.100,00	(22.000,00)	100,00
02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	50.311.000,00	50.289.000,00	(22.000,00)	99,96
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.088.000,00	37.078.000,00	(10.000,00)	99,97
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.398.000,00	35.388.000,00	(10.000,00)	99,97
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	13.223.000,00	13.211.000,00	(12.000,00)	99,91
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.223.000,00	13.211.000,00	(12.000,00)	99,91
02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.018.917.100,00	3.018.917.100,00	-	100,00
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	3.018.917.100,00	3.018.917.100,00	-	100,00
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.018.917.100,00	3.018.917.100,00	-	100,00
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	55.555.000,00	55.555.000,00	-	100,00
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	37.009.000,00	37.009.000,00	-	100,00
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.009.000,00	37.009.000,00	-	100,00
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	18.546.000,00	18.546.000,00	-	100,00
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.546.000,00	18.546.000,00	-	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	175.530.900,00	174.149.557,00	(1.381.343,00)	99,21
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	68.690.700,00	68.188.100,00	(502.600,00)	99,27
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	38.690.900,00	38.215.300,00	(475.600,00)	98,77
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.690.900,00	38.215.300,00	(475.600,00)	98,77
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.690.900,00	38.215.300,00	(475.600,00)	98,77
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.800,00	29.972.800,00	(27.000,00)	99,91
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.172.800,00	17.172.800,00	-	100,00
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.172.800,00	17.172.800,00	-	100,00
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	12.827.000,00	12.800.000,00	(27.000,00)	99,79
02.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.827.000,00	12.800.000,00	(27.000,00)	99,79
02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	106.840.200,00	105.961.457,00	(878.743,00)	99,18
02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	106.840.200,00	105.961.457,00	(878.743,00)	99,18
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	106.840.200,00	105.961.457,00	(878.743,00)	99,18
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.840.200,00	105.961.457,00	(878.743,00)	99,18
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	10.266.000,00	6.396.000,00	(3.870.000,00)	62,30
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	10.266.000,00	6.396.000,00	(3.870.000,00)	62,30
03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.266.000,00	6.396.000,00	(3.870.000,00)	62,30
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.266.000,00	6.396.000,00	(3.870.000,00)	62,30
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.266.000,00	6.396.000,00	(3.870.000,00)	62,30
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	24.000.100,00	23.910.100,00	(90.000,00)	99,63
03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	24.000.100,00	23.910.100,00	(90.000,00)	99,63

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	24.000.100,00	23.910.100,00	(90.000,00)	99,63
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.100,00	23.910.100,00	(90.000,00)	99,63
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.100,00	23.910.100,00	(90.000,00)	99,63
	SURPLUS / DEFISIT	(5.663.459.964,00)	(5.638.726.429,00)	24.733.535,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.663.459.964,00)	(5.638.726.429,00)	24.733.535,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	83.789.444,00	56.619.074,00	(27.170.370,00)	67,57
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.789.444,00	56.619.074,00	(27.170.370,00)	67,57
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	23.789.444,00	8.564.074,00	(15.225.370,00)	36,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.000.000,00	48.055.000,00	(11.945.000,00)	80,09
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.855.681.663,00	3.767.306.287,94	(88.375.375,06)	97,71
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.411.241.363,00	1.394.196.148,00	(17.045.215,00)	98,79
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.489.300,00	46.474.300,00	(15.000,00)	99,97
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.802.600,00	21.802.600,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.802.600,00	21.802.600,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.802.600,00	21.802.600,00	-	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.686.700,00	24.671.700,00	(15.000,00)	99,94
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	24.686.700,00	24.671.700,00	(15.000,00)	99,94
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.686.700,00	24.671.700,00	(15.000,00)	99,94
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.155.283.743,00	1.141.700.111,00	(13.583.632,00)	98,82
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.066.607.743,00	1.053.110.111,00	(13.497.632,00)	98,73
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.066.607.743,00	1.053.110.111,00	(13.497.632,00)	98,73
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.066.607.743,00	1.053.110.111,00	(13.497.632,00)	98,73
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.560.000,00	82.560.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	82.560.000,00	82.560.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	82.560.000,00	82.560.000,00	-	100,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.005.000,00	1.005.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.005.000,00	1.005.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.000,00	1.005.000,00	-	100,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.111.000,00	5.025.000,00	(86.000,00)	98,32
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.111.000,00	5.025.000,00	(86.000,00)	98,32
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.111.000,00	5.025.000,00	(86.000,00)	98,32
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.345.700,00	61.539.700,00	(806.000,00)	98,71
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.605.000,00	3.605.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.605.000,00	3.605.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.605.000,00	3.605.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.890.000,00	21.365.000,00	(525.000,00)	97,60
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.890.000,00	21.365.000,00	(525.000,00)	97,60
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.890.000,00	21.365.000,00	(525.000,00)	97,60
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.209.700,00	6.209.700,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.209.700,00	6.209.700,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.209.700,00	6.209.700,00	-	100,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.863.000,00	5.850.000,00	(13.000,00)	99,78
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.863.000,00	5.850.000,00	(13.000,00)	99,78
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.863.000,00	5.850.000,00	(13.000,00)	99,78
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.778.000,00	24.510.000,00	(268.000,00)	98,92
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	24.778.000,00	24.510.000,00	(268.000,00)	98,92
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.778.000,00	24.510.000,00	(268.000,00)	98,92
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.952.720,00	85.791.052,00	(161.668,00)	99,81
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.652.720,00	82.491.052,00	(161.668,00)	99,80
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	82.652.720,00	82.491.052,00	(161.668,00)	99,80
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.652.720,00	82.491.052,00	(161.668,00)	99,80
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.169.900,00	58.690.985,00	(2.478.915,00)	95,95
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.369.900,00	53.215.985,00	(1.153.915,00)	97,88
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.369.900,00	53.215.985,00	(1.153.915,00)	97,88
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.369.900,00	53.215.985,00	(1.153.915,00)	97,88
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	5.475.000,00	(1.325.000,00)	80,51
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	5.475.000,00	(1.325.000,00)	80,51
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	5.475.000,00	(1.325.000,00)	80,51
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	460.377.500,00	459.727.270,00	(650.230,00)	99,86

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	389.718.000,00	389.132.770,00	(585.230,00)	99,85
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	389.718.000,00	389.132.770,00	(585.230,00)	99,85
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	389.718.000,00	389.132.770,00	(585.230,00)	99,85
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.118.000,00	383.532.770,00	(585.230,00)	99,85
03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	70.659.500,00	70.594.500,00	(65.000,00)	99,91
03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	70.659.500,00	70.594.500,00	(65.000,00)	99,91
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	62.809.500,00	62.744.500,00	(65.000,00)	99,90
03.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.119.500,00	61.054.500,00	(65.000,00)	99,89
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	7.850.000,00	7.850.000,00	-	100,00
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.850.000,00	7.850.000,00	-	100,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.680.480.800,00	1.610.284.369,94	(70.196.430,06)	95,82
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	69.999.800,00	68.323.000,00	(1.676.800,00)	97,60
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90
04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	10.000.000,00	9.105.000,00	(895.000,00)	91,05
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.105.000,00	(895.000,00)	91,05
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.105.000,00	(895.000,00)	91,05
04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	29.999.800,00	29.248.000,00	(751.800,00)	97,49
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	29.999.800,00	29.248.000,00	(751.800,00)	97,49
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.800,00	29.248.000,00	(751.800,00)	97,49
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.610.481.000,00	1.541.961.369,94	(68.519.630,06)	95,75
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	987.481.000,00	982.154.669,94	(5.326.330,06)	99,46
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	987.481.000,00	982.154.669,94	(5.326.330,06)	99,46
04.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	43.940.000,00	42.250.000,00	(1.690.000,00)	96,15
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.541.000,00	939.904.669,94	(3.636.330,06)	99,61
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	623.000.000,00	559.806.700,00	(63.193.300,00)	89,86
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	623.000.000,00	559.806.700,00	(63.193.300,00)	89,86
04.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.340.000,00	8.650.000,00	(1.690.000,00)	83,66
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.660.000,00	551.156.700,00	(61.503.300,00)	89,96
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	303.582.000,00	303.098.500,00	(483.500,00)	99,84
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	24.029.000,00	23.819.000,00	(210.000,00)	99,13
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	24.029.000,00	23.819.000,00	(210.000,00)	99,13
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.029.000,00	23.819.000,00	(210.000,00)	99,13
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.029.000,00	23.819.000,00	(210.000,00)	99,13
06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	279.553.000,00	279.279.500,00	(273.500,00)	99,90
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	279.553.000,00	279.279.500,00	(273.500,00)	99,90
06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	279.553.000,00	279.279.500,00	(273.500,00)	99,90
06.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.760.000,00	6.760.000,00	-	100,00
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.793.000,00	272.519.500,00	(273.500,00)	99,90
	SURPLUS / DEFISIT	(3.771.892.219,00)	(3.710.687.213,94)	61.205.005,06	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.771.892.219,00)	(3.710.687.213,94)	61.205.005,06	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	14.200.000,00	(5.800.000,00)	71,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	14.200.000,00	(5.800.000,00)	71,00
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	7.300.000,00	(7.700.000,00)	48,67
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000,00	6.900.000,00	1.900.000,00	138,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.821.394.460,00	4.671.909.281,51	(149.485.178,49)	96,90
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.596.365.410,00	1.577.721.890,00	(18.643.520,00)	98,83
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.573.000,00	14.555.000,00	(18.000,00)	99,88
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.400.000,00	9.382.000,00	(18.000,00)	99,81
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.400.000,00	9.382.000,00	(18.000,00)	99,81
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	9.382.000,00	(18.000,00)	99,81
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.173.000,00	5.173.000,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.173.000,00	5.173.000,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.173.000,00	5.173.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.411.976.010,00	1.399.915.340,00	(12.060.670,00)	99,15
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.321.848.610,00	1.309.787.940,00	(12.060.670,00)	99,09
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.321.848.610,00	1.309.787.940,00	(12.060.670,00)	99,09
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.321.848.610,00	1.309.787.940,00	(12.060.670,00)	99,09
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.861.000,00	85.861.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.861.000,00	85.861.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	82.560.000,00	82.560.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.301.000,00	3.301.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.266.400,00	4.266.400,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.266.400,00	4.266.400,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.266.400,00	4.266.400,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.998.000,00	34.390.800,00	(607.200,00)	98,27
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.017.000,00	1.017.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.017.000,00	1.017.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.000,00	1.017.000,00	-	100,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.559.000,00	1.559.000,00	-	100,00
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.559.000,00	1.559.000,00	-	100,00
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.559.000,00	1.559.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.902.000,00	9.902.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.902.000,00	9.902.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.902.000,00	9.902.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.110.000,00	5.050.800,00	(59.200,00)	98,84
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.110.000,00	5.050.800,00	(59.200,00)	98,84
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	5.050.800,00	(59.200,00)	98,84
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.080.000,00	(540.000,00)	66,67
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.080.000,00	(540.000,00)	66,67
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.080.000,00	(540.000,00)	66,67
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.990.000,00	8.982.000,00	(8.000,00)	99,91
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.990.000,00	8.982.000,00	(8.000,00)	99,91
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.990.000,00	8.982.000,00	(8.000,00)	99,91
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.333.500,00	77.601.000,00	(732.500,00)	99,06
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	197.000,00	197.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	197.000,00	197.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.000,00	197.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.376.500,00	8.804.000,00	(572.500,00)	93,89
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.376.500,00	8.804.000,00	(572.500,00)	93,89
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.376.500,00	8.804.000,00	(572.500,00)	93,89
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000,00	2.600.000,00	(160.000,00)	94,20
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.760.000,00	2.600.000,00	(160.000,00)	94,20
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.600.000,00	(160.000,00)	94,20
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.484.900,00	51.259.750,00	(5.225.150,00)	90,75

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.984.900,00	51.259.750,00	(725.150,00)	98,61
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.984.900,00	51.259.750,00	(725.150,00)	98,61
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.984.900,00	51.259.750,00	(725.150,00)	98,61
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.924.021.350,00	1.839.958.541,51	(84.062.808,49)	95,63
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.909.369.350,00	1.825.306.541,51	(84.062.808,49)	95,60
02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.904.439.350,00	1.820.386.541,51	(84.052.808,49)	95,59
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	138.718.000,00	138.412.600,00	(305.400,00)	99,78
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6.980.000,00	6.980.000,00	-	100,00
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.738.000,00	131.432.600,00	(305.400,00)	99,77
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	1.765.721.350,00	1.681.973.941,51	(83.747.408,49)	95,26
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.221.350,00	111.865.263,00	(5.356.087,00)	95,43
02.2.03.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.648.500.000,00	1.570.108.678,51	(78.391.321,49)	95,24
02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.930.000,00	4.920.000,00	(10.000,00)	99,80
02.2.03.05.1	BELANJA OPERASI	4.930.000,00	4.920.000,00	(10.000,00)	99,80
02.2.03.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	4.920.000,00	(10.000,00)	99,80
02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	14.652.000,00	14.652.000,00	-	100,00
02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	10.151.000,00	10.151.000,00	-	100,00
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.151.000,00	10.151.000,00	-	100,00
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.151.000,00	10.151.000,00	-	100,00
02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	4.501.000,00	4.501.000,00	-	100,00
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.501.000,00	4.501.000,00	-	100,00
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.501.000,00	4.501.000,00	-	100,00
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	387.023.800,00	384.538.250,00	(2.485.550,00)	99,36
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	387.023.800,00	384.538.250,00	(2.485.550,00)	99,36
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	317.600.800,00	317.145.650,00	(455.150,00)	99,86
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	317.600.800,00	317.145.650,00	(455.150,00)	99,86
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	3.380.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.220.800,00	313.765.650,00	(455.150,00)	99,86
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	69.423.000,00	67.392.600,00	(2.030.400,00)	97,08
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	69.423.000,00	67.392.600,00	(2.030.400,00)	97,08
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.733.000,00	65.702.600,00	(2.030.400,00)	97,00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	109.077.000,00	109.077.000,00	-	100,00
04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspre, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	98.228.000,00	98.228.000,00	-	100,00
04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	98.228.000,00	98.228.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.228.000,00	98.228.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.228.000,00	98.228.000,00	-	100,00
04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10.849.000,00	10.849.000,00	-	100,00
04.2.02.01	Pengembangan Riset	10.849.000,00	10.849.000,00	-	100,00
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.849.000,00	10.849.000,00	-	100,00
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.849.000,00	10.849.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	804.906.900,00	760.613.600,00	(44.293.300,00)	94,50
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	804.906.900,00	760.613.600,00	(44.293.300,00)	94,50
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	793.536.900,00	749.243.600,00	(44.293.300,00)	94,42
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	793.536.900,00	749.243.600,00	(44.293.300,00)	94,42
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	793.536.900,00	749.243.600,00	(44.293.300,00)	94,42
05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	11.370.000,00	11.370.000,00	-	100,00
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.370.000,00	11.370.000,00	-	100,00
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.370.000,00	11.370.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(4.801.394.460,00)	(4.657.709.281,51)	143.685.178,49	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.801.394.460,00)	(4.657.709.281,51)	143.685.178,49	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	517.500.000,00	209.960.000,00	(307.540.000,00)	40,57
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	517.500.000,00	209.960.000,00	(307.540.000,00)	40,57
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	446.000.000,00	165.810.000,00	(280.190.000,00)	37,18
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	71.500.000,00	44.150.000,00	(27.350.000,00)	61,75
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	13.165.597.126,00	12.607.946.785,00	(557.650.341,00)	95,76
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.984.398.299,00	8.806.636.896,00	(177.761.403,00)	98,02
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.063.400,00	71.533.400,00	(530.000,00)	99,26
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.063.400,00	71.533.400,00	(530.000,00)	99,26
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.063.400,00	71.533.400,00	(530.000,00)	99,26
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.063.400,00	71.533.400,00	(530.000,00)	99,26
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.313.074.899,00	8.174.331.045,00	(138.743.854,00)	98,33
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.196.756.999,00	8.058.527.045,00	(138.229.954,00)	98,31
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.196.756.999,00	8.058.527.045,00	(138.229.954,00)	98,31
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.196.756.999,00	8.058.527.045,00	(138.229.954,00)	98,31
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	116.317.900,00	115.804.000,00	(513.900,00)	99,56
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	116.317.900,00	115.804.000,00	(513.900,00)	99,56
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	97.680.000,00	97.680.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.637.900,00	18.124.000,00	(513.900,00)	97,24
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.370.800,00	98.369.303,00	(1.497,00)	100,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.667.000,00	4.667.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.667.000,00	4.667.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.667.000,00	4.667.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.327.000,00	17.327.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.327.000,00	17.327.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.327.000,00	17.327.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.424.800,00	4.423.800,00	(1.000,00)	99,98
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.424.800,00	4.423.800,00	(1.000,00)	99,98
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.424.800,00	4.423.800,00	(1.000,00)	99,98
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.952.000,00	71.951.503,00	(497,00)	100,00
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	71.952.000,00	71.951.503,00	(497,00)	100,00
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.952.000,00	71.951.503,00	(497,00)	100,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.183.000,00	69.183.000,00	-	100,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.183.000,00	69.183.000,00	-	100,00
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	69.183.000,00	69.183.000,00	-	100,00
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.183.000,00	69.183.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.932.600,00	156.036.000,00	(896.600,00)	99,43
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525.000,00	-	(525.000,00)	-
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	525.000,00	-	(525.000,00)	-
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	-	(525.000,00)	-
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.917.600,00	8.546.000,00	(371.600,00)	95,83
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.917.600,00	8.546.000,00	(371.600,00)	95,83
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.917.600,00	8.546.000,00	(371.600,00)	95,83
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.490.000,00	9.490.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.490.000,00	9.490.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.490.000,00	9.490.000,00	-	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.000.000,00	138.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	138.000.000,00	138.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000,00	138.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.773.600,00	237.184.148,00	(37.589.452,00)	86,32
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.920.000,00	75.920.000,00	-	100,00
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.920.000,00	75.920.000,00	-	100,00
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.120.000,00	71.120.000,00	-	100,00
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.712.600,00	7.696.470,00	(16.130,00)	99,79
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.712.600,00	7.696.470,00	(16.130,00)	99,79

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.712.600,00	7.696.470,00	(16.130,00)	99,79
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.141.000,00	153.567.678,00	(37.573.322,00)	80,34
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	191.141.000,00	153.567.678,00	(37.573.322,00)	80,34
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.141.000,00	153.567.678,00	(37.573.322,00)	80,34
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.791.788.950,00	2.617.198.672,00	(174.590.278,00)	93,75
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.410.789.600,00	2.241.028.212,00	(169.761.388,00)	92,96
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	58.382.000,00	44.428.000,00	(13.954.000,00)	76,10
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.382.000,00	44.428.000,00	(13.954.000,00)	76,10
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.382.000,00	44.428.000,00	(13.954.000,00)	76,10
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.352.407.600,00	2.196.600.212,00	(155.807.388,00)	93,38
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.294.467.600,00	2.138.910.212,00	(155.557.388,00)	93,22
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	27.440.000,00	27.440.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.267.027.600,00	2.111.470.212,00	(155.557.388,00)	93,14
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	57.940.000,00	57.690.000,00	(250.000,00)	99,57
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.940.000,00	57.690.000,00	(250.000,00)	99,57
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	380.999.350,00	376.170.460,00	(4.828.890,00)	98,73
02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	380.999.350,00	376.170.460,00	(4.828.890,00)	98,73
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	380.999.350,00	376.170.460,00	(4.828.890,00)	98,73
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.450.000,00	5.070.000,00	(3.380.000,00)	60,00
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.549.350,00	371.100.460,00	(1.448.890,00)	99,61
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	662.489.677,00	478.306.217,00	(184.183.460,00)	72,20
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	151.702.000,00	10.038.200,00	(141.663.800,00)	6,62
03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	151.702.000,00	10.038.200,00	(141.663.800,00)	6,62
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.702.000,00	10.038.200,00	(141.663.800,00)	6,62
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.702.000,00	10.038.200,00	(141.663.800,00)	6,62
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	510.787.677,00	468.268.017,00	(42.519.660,00)	91,68
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	59.637.677,00	31.179.017,00	(28.458.660,00)	52,28
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.263.660,00	21.805.000,00	(28.458.660,00)	43,38
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.263.660,00	21.805.000,00	(28.458.660,00)	43,38
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	9.374.017,00	9.374.017,00	-	100,00
03.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.374.017,00	9.374.017,00	-	100,00
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	451.150.000,00	437.089.000,00	(14.061.000,00)	96,88
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	451.150.000,00	437.089.000,00	(14.061.000,00)	96,88
03.2.02.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.780.000,00	3.780.000,00	-	100,00
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.370.000,00	433.309.000,00	(14.061.000,00)	96,86
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	726.920.200,00	705.805.000,00	(21.115.200,00)	97,10
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	726.920.200,00	705.805.000,00	(21.115.200,00)	97,10
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	726.920.200,00	705.805.000,00	(21.115.200,00)	97,10
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	726.920.200,00	705.805.000,00	(21.115.200,00)	97,10
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.920.200,00	705.805.000,00	(21.115.200,00)	97,10
	SURPLUS / DEFISIT	(12.648.097.126,00)	(12.397.986.785,00)	250.110.341,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(12.648.097.126,00)	(12.397.986.785,00)	250.110.341,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	333.300.000,00	256.947.400,00	(76.352.600,00)	77,09
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	333.300.000,00	256.947.400,00	(76.352.600,00)	77,09
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	333.000.000,00	256.447.400,00	(76.552.600,00)	77,01
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	300.000,00	500.000,00	200.000,00	166,67
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.979.123.077,00	3.766.126.470,00	(212.996.607,00)	94,65
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.583.048.127,00	2.553.910.157,00	(29.137.970,00)	98,87
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.579.400,00	24.578.400,00	(1.000,00)	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.579.400,00	24.578.400,00	(1.000,00)	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.579.400,00	24.578.400,00	(1.000,00)	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.579.400,00	24.578.400,00	(1.000,00)	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.314.218.227,00	2.291.678.430,00	(22.539.797,00)	99,03
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.222.538.227,00	2.199.998.430,00	(22.539.797,00)	98,99
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.222.538.227,00	2.199.998.430,00	(22.539.797,00)	98,99
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.222.538.227,00	2.199.998.430,00	(22.539.797,00)	98,99
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.680.000,00	91.680.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	91.680.000,00	91.680.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	91.080.000,00	91.080.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.656.600,00	84.020.800,00	(5.635.800,00)	93,71
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.159.000,00	4.659.000,00	(500.000,00)	90,31
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.159.000,00	1.159.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.000,00	1.159.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50
01.2.06.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.903.000,00	16.903.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.903.000,00	16.903.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.903.000,00	16.903.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.879.600,00	6.938.800,00	(940.800,00)	88,06
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.879.600,00	6.938.800,00	(940.800,00)	88,06
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.879.600,00	6.938.800,00	(940.800,00)	88,06
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.715.000,00	55.520.000,00	(4.195.000,00)	92,97
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	59.715.000,00	55.520.000,00	(4.195.000,00)	92,97
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.715.000,00	55.520.000,00	(4.195.000,00)	92,97
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.605.800,00	102.567.500,00	(38.300,00)	99,96
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.605.800,00	15.567.500,00	(38.300,00)	99,75
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.605.800,00	15.567.500,00	(38.300,00)	99,75
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.605.800,00	15.567.500,00	(38.300,00)	99,75
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.000.000,00	87.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	87.000.000,00	87.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	87.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.988.100,00	51.065.027,00	(923.073,00)	98,22
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.698.100,00	46.970.027,00	(728.073,00)	98,47
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.698.100,00	46.970.027,00	(728.073,00)	98,47
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.698.100,00	46.970.027,00	(728.073,00)	98,47
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000,00	4.095.000,00	(195.000,00)	95,45
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.290.000,00	4.095.000,00	(195.000,00)	95,45
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	4.095.000,00	(195.000,00)	95,45
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	633.690.750,00	615.173.855,00	(18.516.895,00)	97,08
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	143.691.750,00	138.678.750,00	(5.013.000,00)	96,51
02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	115.243.500,00	110.230.500,00	(5.013.000,00)	95,65
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	115.243.500,00	110.230.500,00	(5.013.000,00)	95,65
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.243.500,00	110.230.500,00	(5.013.000,00)	95,65
02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	28.448.250,00	28.448.250,00	-	100,00
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.448.250,00	28.448.250,00	-	100,00
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.448.250,00	28.448.250,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	489.999.000,00	476.495.105,00	(13.503.895,00)	97,24
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	489.999.000,00	476.495.105,00	(13.503.895,00)	97,24
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	489.999.000,00	476.495.105,00	(13.503.895,00)	97,24
02.2.06.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.160.000,00	5.470.000,00	(1.690.000,00)	76,40
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.839.000,00	471.025.105,00	(11.813.895,00)	97,55
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	29.385.000,00	24.326.000,00	(5.059.000,00)	82,78
03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	29.385.000,00	24.326.000,00	(5.059.000,00)	82,78
03.2.04.01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	14.985.000,00	9.926.000,00	(5.059.000,00)	66,24
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.985.000,00	9.926.000,00	(5.059.000,00)	66,24
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.985.000,00	9.926.000,00	(5.059.000,00)	66,24
03.2.04.02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	633.000.200,00	473.550.458,00	(159.449.742,00)	74,81
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	534.609.200,00	375.584.458,00	(159.024.742,00)	70,25
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	534.609.200,00	375.584.458,00	(159.024.742,00)	70,25
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	534.609.200,00	375.584.458,00	(159.024.742,00)	70,25
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.719.200,00	373.694.458,00	(159.024.742,00)	70,15
04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	75.831.000,00	75.416.000,00	(415.000,00)	99,45
04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	54.465.000,00	54.420.000,00	(45.000,00)	99,92
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.465.000,00	54.420.000,00	(45.000,00)	99,92
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.465.000,00	54.420.000,00	(45.000,00)	99,92
04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21.366.000,00	20.996.000,00	(370.000,00)	98,27
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.366.000,00	20.996.000,00	(370.000,00)	98,27
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.366.000,00	20.996.000,00	(370.000,00)	98,27
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	22.560.000,00	22.550.000,00	(10.000,00)	99,96
04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	22.560.000,00	22.550.000,00	(10.000,00)	99,96
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.560.000,00	22.550.000,00	(10.000,00)	99,96
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.560.000,00	22.550.000,00	(10.000,00)	99,96
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	99.999.000,00	99.166.000,00	(833.000,00)	99,17
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	99.999.000,00	99.166.000,00	(833.000,00)	99,17
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	99.999.000,00	99.166.000,00	(833.000,00)	99,17
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.999.000,00	99.166.000,00	(833.000,00)	99,17
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.000,00	99.166.000,00	(833.000,00)	99,17
	SURPLUS / DEFISIT	(3.645.823.077,00)	(3.509.179.070,00)	136.644.007,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.645.823.077,00)	(3.509.179.070,00)	136.644.007,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.412.263.212,00	2.391.732.976,00	(20.530.236,00)	99,15
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.589.217.912,00	1.582.398.043,00	(6.819.869,00)	99,57
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.393.000,00	53.350.000,00	(43.000,00)	99,92
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.522.000,00	27.484.000,00	(38.000,00)	99,86
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.522.000,00	27.484.000,00	(38.000,00)	99,86
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.522.000,00	27.484.000,00	(38.000,00)	99,86
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.871.000,00	25.866.000,00	(5.000,00)	99,98
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.871.000,00	25.866.000,00	(5.000,00)	99,98
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.871.000,00	25.866.000,00	(5.000,00)	99,98
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.325.979.932,00	1.322.801.606,00	(3.178.326,00)	99,76
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.245.217.932,00	1.242.778.606,00	(2.439.326,00)	99,80
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.245.217.932,00	1.242.778.606,00	(2.439.326,00)	99,80
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.245.217.932,00	1.242.778.606,00	(2.439.326,00)	99,80
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.120.000,00	74.397.000,00	(723.000,00)	99,04
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	75.120.000,00	74.397.000,00	(723.000,00)	99,04
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	64.560.000,00	63.840.000,00	(720.000,00)	98,88
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.557.000,00	(3.000,00)	99,97
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.642.000,00	5.626.000,00	(16.000,00)	99,72
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.642.000,00	5.626.000,00	(16.000,00)	99,72
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.642.000,00	5.626.000,00	(16.000,00)	99,72
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.940.000,00	4.940.000,00	-	100,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.940.000,00	4.940.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.940.000,00	4.940.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.313.100,00	79.353.900,00	(959.200,00)	98,81
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.462.000,00	1.462.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.462.000,00	1.462.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.462.000,00	1.462.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.224.000,00	10.216.000,00	(8.000,00)	99,92
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.224.000,00	10.216.000,00	(8.000,00)	99,92
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.224.000,00	10.216.000,00	(8.000,00)	99,92
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.039.100,00	10.039.100,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.039.100,00	10.039.100,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.039.100,00	10.039.100,00	-	100,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.396.000,00	13.379.000,00	(17.000,00)	99,87
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	13.396.000,00	13.379.000,00	(17.000,00)	99,87
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.396.000,00	13.379.000,00	(17.000,00)	99,87
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.192.000,00	44.257.800,00	(934.200,00)	97,93
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	45.192.000,00	44.257.800,00	(934.200,00)	97,93
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.192.000,00	44.257.800,00	(934.200,00)	97,93
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.690.000,00	26.690.000,00	-	100,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.690.000,00	26.690.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.879.180,00	29.883.372,00	(1.995.808,00)	93,74
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.992.180,00	3.996.372,00	(1.995.808,00)	66,69
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.992.180,00	3.996.372,00	(1.995.808,00)	66,69
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.180,00	3.996.372,00	(1.995.808,00)	66,69
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	2.190.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.190.000,00	2.190.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.190.000,00	-	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.437.000,00	22.437.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.437.000,00	22.437.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.437.000,00	22.437.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.022.700,00	65.379.165,00	(643.535,00)	99,03
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.022.700,00	65.379.165,00	(643.535,00)	99,03
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.022.700,00	65.379.165,00	(643.535,00)	99,03
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.022.700,00	65.379.165,00	(643.535,00)	99,03
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	30.951.000,00	29.827.500,00	(1.123.500,00)	96,37
02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	30.951.000,00	29.827.500,00	(1.123.500,00)	96,37
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	30.951.000,00	29.827.500,00	(1.123.500,00)	96,37
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.951.000,00	29.827.500,00	(1.123.500,00)	96,37
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.951.000,00	29.827.500,00	(1.123.500,00)	96,37
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	249.699.300,00	249.401.000,00	(298.300,00)	99,88
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	249.699.300,00	249.401.000,00	(298.300,00)	99,88
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	249.699.300,00	249.401.000,00	(298.300,00)	99,88
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	249.699.300,00	249.401.000,00	(298.300,00)	99,88
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.699.300,00	249.401.000,00	(298.300,00)	99,88
3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	220.715.800,00	217.529.933,00	(3.185.867,00)	98,56
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	220.715.800,00	217.529.933,00	(3.185.867,00)	98,56
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	90.752.000,00	89.929.166,00	(822.834,00)	99,09
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.752.000,00	89.929.166,00	(822.834,00)	99,09
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.752.000,00	89.929.166,00	(822.834,00)	99,09
03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	90.546.800,00	88.521.267,00	(2.025.533,00)	97,76
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	90.546.800,00	88.521.267,00	(2.025.533,00)	97,76
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.370.000,00	2.370.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.176.800,00	86.151.267,00	(2.025.533,00)	97,70
03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	39.417.000,00	39.079.500,00	(337.500,00)	99,14
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	39.417.000,00	39.079.500,00	(337.500,00)	99,14
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.417.000,00	39.079.500,00	(337.500,00)	99,14
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	236.843.400,00	229.388.300,00	(7.455.100,00)	96,85
04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	236.843.400,00	229.388.300,00	(7.455.100,00)	96,85
04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	86.843.400,00	85.830.400,00	(1.013.000,00)	98,83
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	86.843.400,00	85.830.400,00	(1.013.000,00)	98,83
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.843.400,00	85.830.400,00	(1.013.000,00)	98,83
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	150.000.000,00	143.557.900,00	(6.442.100,00)	95,71
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	143.557.900,00	(6.442.100,00)	95,71
04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	6.760.000,00	1.690.000,00	(5.070.000,00)	25,00
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.240.000,00	141.867.900,00	(1.372.100,00)	99,04
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	39.828.800,00	39.071.200,00	(757.600,00)	98,10
04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	39.828.800,00	39.071.200,00	(757.600,00)	98,10
04.2.01.01	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	39.828.800,00	39.071.200,00	(757.600,00)	98,10
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.828.800,00	39.071.200,00	(757.600,00)	98,10
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.828.800,00	39.071.200,00	(757.600,00)	98,10
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	45.007.000,00	44.117.000,00	(890.000,00)	98,02
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.180.000,00	(820.000,00)	95,90
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.000.000,00	19.180.000,00	(820.000,00)	95,90
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.180.000,00	(820.000,00)	95,90
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.180.000,00	(820.000,00)	95,90
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	25.007.000,00	24.937.000,00	(70.000,00)	99,72
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.007.000,00	24.937.000,00	(70.000,00)	99,72
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.007.000,00	24.937.000,00	(70.000,00)	99,72
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.007.000,00	24.937.000,00	(70.000,00)	99,72
	SURPLUS / DEFISIT	(2.412.263.212,00)	(2.390.682.976,00)	21.580.236,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.412.263.212,00)	(2.390.682.976,00)	21.580.236,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.2.10.3.29.01 Sekretariat Daerah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	21.222.806.094,00	19.698.587.868,00	(1.524.218.226,00)	92,82
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.419.592.794,00	11.937.138.534,00	(482.454.260,00)	96,12
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.913.000,00	33.780.350,00	(132.650,00)	99,61
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.455.000,00	32.334.350,00	(120.650,00)	99,63
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.455.000,00	32.334.350,00	(120.650,00)	99,63
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.455.000,00	32.334.350,00	(120.650,00)	99,63
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	238.000,00	234.000,00	(4.000,00)	98,32
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	238.000,00	234.000,00	(4.000,00)	98,32
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.000,00	234.000,00	(4.000,00)	98,32
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	367.000,00	367.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	367.000,00	367.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.000,00	367.000,00	-	100,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	233.000,00	225.000,00	(8.000,00)	96,57
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	233.000,00	225.000,00	(8.000,00)	96,57
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.000,00	225.000,00	(8.000,00)	96,57
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	620.000,00	620.000,00	-	100,00
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	620.000,00	620.000,00	-	100,00
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.000,00	620.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.866.868.000,00	4.833.936.885,00	(32.931.115,00)	99,32
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.430.184.000,00	4.407.316.485,00	(22.867.515,00)	99,48
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.430.184.000,00	4.407.316.485,00	(22.867.515,00)	99,48
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.430.184.000,00	4.407.316.485,00	(22.867.515,00)	99,48
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.116.000,00	85.696.000,00	(3.420.000,00)	96,16
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	89.116.000,00	85.696.000,00	(3.420.000,00)	96,16
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	72.360.000,00	69.460.000,00	(2.900.000,00)	95,99
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.756.000,00	16.236.000,00	(520.000,00)	96,90
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	347.568.000,00	340.924.400,00	(6.643.600,00)	98,09
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	347.568.000,00	340.924.400,00	(6.643.600,00)	98,09
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	318.720.000,00	312.840.000,00	(5.880.000,00)	98,16
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.848.000,00	28.084.400,00	(763.600,00)	97,35
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.020.000,00	18.065.000,00	(955.000,00)	94,98
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.391.000,00	13.436.000,00	(955.000,00)	93,36
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.391.000,00	13.436.000,00	(955.000,00)	93,36
01.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.791.000,00	3.836.000,00	(955.000,00)	80,07
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.629.000,00	4.629.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.629.000,00	4.629.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.029.000,00	1.029.000,00	-	100,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.600.000,00	44.600.000,00	-	100,00
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.600.000,00	44.600.000,00	-	100,00
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.600.000,00	44.600.000,00	-	100,00
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	44.600.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	615.160.949,00	514.211.506,00	(100.949.443,00)	83,59
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.927.000,00	27.854.000,00	(73.000,00)	99,74
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.927.000,00	27.854.000,00	(73.000,00)	99,74
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.927.000,00	27.854.000,00	(73.000,00)	99,74
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.908.949,00	41.790.000,00	(118.949,00)	99,72
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	40.218.949,00	40.100.000,00	(118.949,00)	99,70
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.218.949,00	40.100.000,00	(118.949,00)	99,70
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.512.000,00	65.297.000,00	(17.215.000,00)	79,14
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	82.512.000,00	65.297.000,00	(17.215.000,00)	79,14
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.512.000,00	65.297.000,00	(17.215.000,00)	79,14
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.375.000,00	32.000.050,00	(5.374.950,00)	85,62
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	37.375.000,00	32.000.050,00	(5.374.950,00)	85,62
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.375.000,00	32.000.050,00	(5.374.950,00)	85,62
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.896.000,00	17.952.000,00	(1.944.000,00)	90,23
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.896.000,00	17.952.000,00	(1.944.000,00)	90,23
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.896.000,00	17.952.000,00	(1.944.000,00)	90,23
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.780.000,00	120.571.018,00	(208.982,00)	99,83

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	312.551.000,00	312.261.000,00	(290.000,00)	99,91
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	292.740.000,00	292.740.000,00	-	100,00
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.811.000,00	19.521.000,00	(290.000,00)	98,54
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	73.826.000,00	72.925.477,00	(900.523,00)	98,78
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.826.000,00	72.925.477,00	(900.523,00)	98,78
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.826.000,00	72.925.477,00	(900.523,00)	98,78
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	136.660.000,00	115.635.032,00	(21.024.968,00)	84,62
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	136.660.000,00	115.635.032,00	(21.024.968,00)	84,62
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.660.000,00	115.635.032,00	(21.024.968,00)	84,62
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	148.170.000,00	98.055.000,00	(50.115.000,00)	66,18
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	41.000.000,00	22.675.000,00	(18.325.000,00)	55,30
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	22.675.000,00	(18.325.000,00)	55,30
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	22.675.000,00	(18.325.000,00)	55,30
03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	32.500.000,00	15.330.000,00	(17.170.000,00)	47,17
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	15.330.000,00	(17.170.000,00)	47,17
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	15.330.000,00	(17.170.000,00)	47,17
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	74.670.000,00	60.050.000,00	(14.620.000,00)	80,42
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	74.670.000,00	60.050.000,00	(14.620.000,00)	80,42
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.670.000,00	60.050.000,00	(14.620.000,00)	80,42
4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	153.208.000,00	26.938.000,00	(126.270.000,00)	17,58
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	153.208.000,00	26.938.000,00	(126.270.000,00)	17,58
04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	153.208.000,00	26.938.000,00	(126.270.000,00)	17,58
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	153.208.000,00	26.938.000,00	(126.270.000,00)	17,58
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.208.000,00	26.938.000,00	(126.270.000,00)	17,58
5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.707.407.900,00	3.132.738.360,00	(574.669.540,00)	84,50
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.707.407.900,00	3.132.738.360,00	(574.669.540,00)	84,50
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.707.407.900,00	3.132.738.360,00	(574.669.540,00)	84,50
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	558.817.900,00	73.648.360,00	(485.169.540,00)	13,18
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	0	(3.380.000,00)	-
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.437.900,00	73.648.360,00	(481.789.540,00)	13,26
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	(89.500.000,00)	97,16
05.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	(89.500.000,00)	97,16
	SURPLUS / DEFISIT	(21.222.806.094,00)	(19.698.587.868,00)	1.524.218.226,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(21.222.806.094,00)	(19.698.587.868,00)	1.524.218.226,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	19.488.790.846,00	18.519.284.504,00	(969.506.342,00)	95,03
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.201.273.846,00	11.806.521.591,00	(394.752.255,00)	96,76
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.450.000,00	5.450.000,00	-	100,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.450.000,00	5.450.000,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.450.000,00	5.450.000,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	5.450.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.184.451.800,00	1.134.287.405,00	(50.164.395,00)	95,76
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.066.721.800,00	1.032.637.405,00	(34.084.395,00)	96,80
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.066.721.800,00	1.032.637.405,00	(34.084.395,00)	96,80
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.066.721.800,00	1.032.637.405,00	(34.084.395,00)	96,80
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.480.000,00	96.400.000,00	(16.080.000,00)	85,70
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.480.000,00	96.400.000,00	(16.080.000,00)	85,70
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	96.480.000,00	80.400.000,00	(16.080.000,00)	83,33
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.216.000,00	60.997.000,00	(85.219.000,00)	41,72
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	146.216.000,00	60.997.000,00	(85.219.000,00)	41,72
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	146.216.000,00	60.997.000,00	(85.219.000,00)	41,72
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.216.000,00	60.997.000,00	(85.219.000,00)	41,72
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.887.000,00	288.601.854,00	(5.285.146,00)	98,20
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.101.000,00	4.099.000,00	(2.000,00)	99,95
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.101.000,00	4.099.000,00	(2.000,00)	99,95
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.101.000,00	4.099.000,00	(2.000,00)	99,95
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.380.000,00	93.164.732,00	(215.268,00)	99,77
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.380.000,00	3.380.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	3.380.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	89.784.732,00	(215.268,00)	99,76
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	89.784.732,00	(215.268,00)	99,76
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.266.000,00	56.279.455,00	(4.986.545,00)	91,86
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	61.266.000,00	56.279.455,00	(4.986.545,00)	91,86
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.266.000,00	56.279.455,00	(4.986.545,00)	91,86
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.492.000,00	40.484.667,00	(7.333,00)	99,98
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.492.000,00	40.484.667,00	(7.333,00)	99,98
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.492.000,00	40.484.667,00	(7.333,00)	99,98
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.744.000,00	3.744.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.744.000,00	3.744.000,00	-	100,00
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.744.000,00	3.744.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.904.000,00	90.830.000,00	(74.000,00)	99,92
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	90.904.000,00	90.830.000,00	(74.000,00)	99,92
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.904.000,00	90.830.000,00	(74.000,00)	99,92
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.580.000,00	213.884.000,00	(696.000,00)	99,68
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.080.000,00	53.386.000,00	(694.000,00)	98,72
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.080.000,00	53.386.000,00	(694.000,00)	98,72
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.080.000,00	53.386.000,00	(694.000,00)	98,72
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.500.000,00	160.498.000,00	(2.000,00)	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	160.500.000,00	160.498.000,00	(2.000,00)	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.500.000,00	160.498.000,00	(2.000,00)	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.418.400,00	597.541.344,00	(133.877.056,00)	81,70
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	716.231.400,00	584.101.344,00	(132.130.056,00)	81,55
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	716.231.400,00	584.101.344,00	(132.130.056,00)	81,55
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	716.231.400,00	584.101.344,00	(132.130.056,00)	81,55
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.459.982.000,00	1.440.232.335,00	(19.749.665,00)	98,65
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.382.902.000,00	1.363.671.335,00	(19.230.665,00)	98,61
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.382.902.000,00	1.363.671.335,00	(19.230.665,00)	98,61
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.382.902.000,00	1.363.671.335,00	(19.230.665,00)	98,61
02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	77.080.000,00	76.561.000,00	(519.000,00)	99,33
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	77.080.000,00	76.561.000,00	(519.000,00)	99,33
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.080.000,00	76.561.000,00	(519.000,00)	99,33
	SURPLUS / DEFISIT	(19.487.290.846,00)	(18.518.084.504,00)	969.206.342,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(19.487.290.846,00)	(18.518.084.504,00)	969.206.342,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUR URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	500.000,00	(9.500.000,00)	5,00
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	500.000,00	(9.500.000,00)	5,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	500.000,00	(9.500.000,00)	5,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.148.901.682,00	3.510.947.344,00	(637.954.338,00)	84,62
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.075.385.182,00	2.013.680.498,00	(61.704.684,00)	97,03
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.755.000,00	75.543.700,00	(12.211.300,00)	86,08
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.421.000,00	32.919.400,00	(501.600,00)	98,50
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.421.000,00	32.919.400,00	(501.600,00)	98,50
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.421.000,00	32.919.400,00	(501.600,00)	98,50
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.985.000,00	16.734.000,00	(251.000,00)	98,52
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.985.000,00	16.734.000,00	(251.000,00)	98,52
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.985.000,00	16.734.000,00	(251.000,00)	98,52
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.380.000,00	7.909.700,00	(8.470.300,00)	48,29
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.380.000,00	7.909.700,00	(8.470.300,00)	48,29
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	7.909.700,00	(8.470.300,00)	48,29
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.117.000,00	10.529.800,00	(1.587.200,00)	86,90
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.117.000,00	10.529.800,00	(1.587.200,00)	86,90
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.117.000,00	10.529.800,00	(1.587.200,00)	86,90
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.852.000,00	7.450.800,00	(1.401.200,00)	84,17
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.852.000,00	7.450.800,00	(1.401.200,00)	84,17
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.852.000,00	7.450.800,00	(1.401.200,00)	84,17
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.469.656.519,00	1.446.840.214,00	(22.816.305,00)	98,45
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.375.519,00	1.255.764.014,00	(13.611.505,00)	98,93
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.269.375.519,00	1.255.764.014,00	(13.611.505,00)	98,93
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.269.375.519,00	1.255.764.014,00	(13.611.505,00)	98,93
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144.709.000,00	139.989.000,00	(4.720.000,00)	96,74
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	144.709.000,00	139.989.000,00	(4.720.000,00)	96,74
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	141.360.000,00	137.240.000,00	(4.120.000,00)	97,09
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.349.000,00	2.749.000,00	(600.000,00)	82,08
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.488.000,00	14.902.200,00	(1.585.800,00)	90,38
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.488.000,00	14.902.200,00	(1.585.800,00)	90,38
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.488.000,00	14.902.200,00	(1.585.800,00)	90,38
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.712.000,00	11.439.000,00	(273.000,00)	97,67
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.712.000,00	11.439.000,00	(273.000,00)	97,67
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.712.000,00	11.439.000,00	(273.000,00)	97,67
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.201.000,00	17.632.000,00	(1.569.000,00)	91,83
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.201.000,00	17.632.000,00	(1.569.000,00)	91,83
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.201.000,00	17.632.000,00	(1.569.000,00)	91,83
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.171.000,00	7.114.000,00	(1.057.000,00)	87,06
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.171.000,00	7.114.000,00	(1.057.000,00)	87,06
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.171.000,00	7.114.000,00	(1.057.000,00)	87,06
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.974.000,00	17.486.000,00	(488.000,00)	97,28
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.508.000,00	6.498.000,00	(10.000,00)	99,85
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.508.000,00	6.498.000,00	(10.000,00)	99,85
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.508.000,00	6.498.000,00	(10.000,00)	99,85
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.876.000,00	5.398.000,00	(478.000,00)	91,87
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.876.000,00	5.398.000,00	(478.000,00)	91,87
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.876.000,00	5.398.000,00	(478.000,00)	91,87
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.590.000,00	5.590.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.590.000,00	5.590.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.000,00	790.000,00	-	100,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.780.000,00	1.812.400,00	(967.600,00)	65,19
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.780.000,00	1.812.400,00	(967.600,00)	65,19
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.780.000,00	1.812.400,00	(967.600,00)	65,19
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	1.812.400,00	(967.600,00)	65,19
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.193.000,00	321.142.160,00	(13.050.840,00)	96,09

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	18.635.000,00	0,00	(18.635.000,00)	0,00
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.635.000,00	0,00	(18.635.000,00)	0,00
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.635.000,00	0,00	(18.635.000,00)	0,00
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	19.110.000,00	16.508.000,00	(2.602.000,00)	86,38
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.110.000,00	16.508.000,00	(2.602.000,00)	86,38
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.110.000,00	16.508.000,00	(2.602.000,00)	86,38
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	173.656.000,00	127.417.600,00	(46.238.400,00)	73,37
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	23.904.000,00	0,00	(23.904.000,00)	0,00
02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	23.904.000,00	0,00	(23.904.000,00)	0,00
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.904.000,00	0,00	(23.904.000,00)	0,00
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.904.000,00	0,00	(23.904.000,00)	0,00
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	137.654.000,00	127.417.600,00	(10.236.400,00)	92,56
02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	137.654.000,00	127.417.600,00	(10.236.400,00)	92,56
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	137.654.000,00	127.417.600,00	(10.236.400,00)	92,56
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.654.000,00	127.417.600,00	(10.236.400,00)	92,56
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	12.098.000,00	0,00	(12.098.000,00)	0,00
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	12.098.000,00	0,00	(12.098.000,00)	0,00
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.098.000,00	0,00	(12.098.000,00)	0,00
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.098.000,00	0,00	(12.098.000,00)	0,00
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	508.591.700,00	373.527.943,00	(135.063.757,00)	73,44
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	166.895.100,00	139.818.120,00	(27.076.980,00)	83,78
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.739.000,00	2.720.000,00	(5.019.000,00)	35,15
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.739.000,00	2.720.000,00	(5.019.000,00)	35,15
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.739.000,00	2.720.000,00	(5.019.000,00)	35,15
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.716.300,00	5.911.000,00	(2.805.300,00)	67,82
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.716.300,00	5.911.000,00	(2.805.300,00)	67,82
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.716.300,00	5.911.000,00	(2.805.300,00)	67,82
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.905.200,00	30.271.520,00	(5.633.680,00)	84,31
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.905.200,00	30.271.520,00	(5.633.680,00)	84,31
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.905.200,00	30.271.520,00	(5.633.680,00)	84,31
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.410.000,00	3.075.000,00	(335.000,00)	90,18
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.410.000,00	3.075.000,00	(335.000,00)	90,18
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	3.075.000,00	(335.000,00)	90,18
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.270.000,00	10.940.000,00	(8.330.000,00)	56,77
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.270.000,00	10.940.000,00	(8.330.000,00)	56,77
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.270.000,00	10.940.000,00	(8.330.000,00)	56,77
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	91.854.600,00	86.900.600,00	(4.954.000,00)	94,61
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	91.854.600,00	86.900.600,00	(4.954.000,00)	94,61
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.854.600,00	86.900.600,00	(4.954.000,00)	94,61
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	145.926.600,00	106.501.620,00	(39.424.980,00)	72,98
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.261.000,00	39.177.620,00	(4.083.380,00)	90,56
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.261.000,00	39.177.620,00	(4.083.380,00)	90,56
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.261.000,00	39.177.620,00	(4.083.380,00)	90,56
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.596.000,00	10.310.000,00	(286.000,00)	97,30
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.596.000,00	10.310.000,00	(286.000,00)	97,30
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.596.000,00	10.310.000,00	(286.000,00)	97,30
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.321.000,00	3.880.000,00	(441.000,00)	89,79
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.321.000,00	3.880.000,00	(441.000,00)	89,79

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.321.000,00	3.880.000,00	(441.000,00)	89,79
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.246.500,00	30.471.000,00	(33.775.500,00)	47,43
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	64.246.500,00	30.471.000,00	(33.775.500,00)	47,43
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.246.500,00	30.471.000,00	(33.775.500,00)	47,43
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.654.000,00	11.520.000,00	(134.000,00)	98,85
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.654.000,00	11.520.000,00	(134.000,00)	98,85
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.654.000,00	11.520.000,00	(134.000,00)	98,85
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.848.100,00	11.143.000,00	(705.100,00)	94,05
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.848.100,00	11.143.000,00	(705.100,00)	94,05
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.848.100,00	11.143.000,00	(705.100,00)	94,05
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	195.770.000,00	127.208.203,00	(68.561.797,00)	64,98
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.548.000,00	55.664.000,00	(7.884.000,00)	87,59
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.548.000,00	55.664.000,00	(7.884.000,00)	87,59
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.548.000,00	55.664.000,00	(7.884.000,00)	87,59
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.883.000,00	5.846.000,00	(37.000,00)	99,37
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.883.000,00	5.846.000,00	(37.000,00)	99,37
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.883.000,00	5.846.000,00	(37.000,00)	99,37
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.956.000,00	2.686.000,00	(5.270.000,00)	33,76
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.956.000,00	2.686.000,00	(5.270.000,00)	33,76
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.956.000,00	2.686.000,00	(5.270.000,00)	33,76
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.940.000,00	4.638.400,00	(8.301.600,00)	35,85
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.940.000,00	4.638.400,00	(8.301.600,00)	35,85
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	4.638.400,00	(8.301.600,00)	35,85
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.742.000,00	5.520.800,00	(221.200,00)	96,15
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.742.000,00	5.520.800,00	(221.200,00)	96,15
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.742.000,00	5.520.800,00	(221.200,00)	96,15
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	99.701.000,00	52.853.003,00	(46.847.997,00)	53,01
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	99.701.000,00	52.853.003,00	(46.847.997,00)	53,01
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.701.000,00	52.853.003,00	(46.847.997,00)	53,01
	SURPLUS / DEFISIT	(4.138.901.682,00)	(3.510.447.344,00)	628.454.338,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.138.901.682,00)	(3.510.447.344,00)	628.454.338,00	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	18.635.000,00	0,00	(18.635.000,00)	-
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.635.000,00	0,00	(18.635.000,00)	-
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.635.000,00	0,00	(18.635.000,00)	-
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	19.110.000,00	16.508.000,00	(2.602.000,00)	86,38
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.110.000,00	16.508.000,00	(2.602.000,00)	86,38
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.110.000,00	16.508.000,00	(2.602.000,00)	86,38
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	173.656.000,00	127.417.600,00	(46.238.400,00)	73,37
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	23.904.000,00	0,00	(23.904.000,00)	-
02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	23.904.000,00	0,00	(23.904.000,00)	-
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.904.000,00	0,00	(23.904.000,00)	-
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.904.000,00	0,00	(23.904.000,00)	-
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	137.654.000,00	127.417.600,00	(10.236.400,00)	92,56
02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	137.654.000,00	127.417.600,00	(10.236.400,00)	92,56
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	137.654.000,00	127.417.600,00	(10.236.400,00)	92,56
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.654.000,00	127.417.600,00	(10.236.400,00)	92,56
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	12.098.000,00	0,00	(12.098.000,00)	-
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	12.098.000,00	0,00	(12.098.000,00)	-
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.098.000,00	0,00	(12.098.000,00)	-
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.098.000,00	0,00	(12.098.000,00)	-
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	508.591.700,00	373.527.943,00	(135.063.757,00)	73,44
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	166.895.100,00	139.818.120,00	(27.076.980,00)	83,78
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.739.000,00	2.720.000,00	(5.019.000,00)	35,15
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.739.000,00	2.720.000,00	(5.019.000,00)	35,15
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.739.000,00	2.720.000,00	(5.019.000,00)	35,15
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.716.300,00	5.911.000,00	(2.805.300,00)	67,82
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.716.300,00	5.911.000,00	(2.805.300,00)	67,82
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.716.300,00	5.911.000,00	(2.805.300,00)	67,82
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.905.200,00	30.271.520,00	(5.633.680,00)	84,31
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.905.200,00	30.271.520,00	(5.633.680,00)	84,31
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.905.200,00	30.271.520,00	(5.633.680,00)	84,31
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.410.000,00	3.075.000,00	(335.000,00)	90,18
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.410.000,00	3.075.000,00	(335.000,00)	90,18
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	3.075.000,00	(335.000,00)	90,18
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.270.000,00	10.940.000,00	(8.330.000,00)	56,77
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.270.000,00	10.940.000,00	(8.330.000,00)	56,77
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.270.000,00	10.940.000,00	(8.330.000,00)	56,77
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	91.854.600,00	86.900.600,00	(4.954.000,00)	94,61
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	91.854.600,00	86.900.600,00	(4.954.000,00)	94,61
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.854.600,00	86.900.600,00	(4.954.000,00)	94,61
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	145.926.600,00	106.501.620,00	(39.424.980,00)	72,98
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.261.000,00	39.177.620,00	(4.083.380,00)	90,56
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.261.000,00	39.177.620,00	(4.083.380,00)	90,56
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.261.000,00	39.177.620,00	(4.083.380,00)	90,56
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.596.000,00	10.310.000,00	(286.000,00)	97,30
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.596.000,00	10.310.000,00	(286.000,00)	97,30
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.596.000,00	10.310.000,00	(286.000,00)	97,30
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.321.000,00	3.880.000,00	(441.000,00)	89,79
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.321.000,00	3.880.000,00	(441.000,00)	89,79

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.321.000,00	3.880.000,00	(441.000,00)	89,79
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.246.500,00	30.471.000,00	(33.775.500,00)	47,43
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	64.246.500,00	30.471.000,00	(33.775.500,00)	47,43
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.246.500,00	30.471.000,00	(33.775.500,00)	47,43
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.654.000,00	11.520.000,00	(134.000,00)	98,85
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.654.000,00	11.520.000,00	(134.000,00)	98,85
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.654.000,00	11.520.000,00	(134.000,00)	98,85
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.848.100,00	11.143.000,00	(705.100,00)	94,05
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.848.100,00	11.143.000,00	(705.100,00)	94,05
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.848.100,00	11.143.000,00	(705.100,00)	94,05
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	195.770.000,00	127.208.203,00	(68.561.797,00)	64,98
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.548.000,00	55.664.000,00	(7.884.000,00)	87,59
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.548.000,00	55.664.000,00	(7.884.000,00)	87,59
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.548.000,00	55.664.000,00	(7.884.000,00)	87,59
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.883.000,00	5.846.000,00	(37.000,00)	99,37
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.883.000,00	5.846.000,00	(37.000,00)	99,37
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.883.000,00	5.846.000,00	(37.000,00)	99,37
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.956.000,00	2.686.000,00	(5.270.000,00)	33,76
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.956.000,00	2.686.000,00	(5.270.000,00)	33,76
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.956.000,00	2.686.000,00	(5.270.000,00)	33,76
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.940.000,00	4.638.400,00	(8.301.600,00)	35,85
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.940.000,00	4.638.400,00	(8.301.600,00)	35,85
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	4.638.400,00	(8.301.600,00)	35,85
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.742.000,00	5.520.800,00	(221.200,00)	96,15
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.742.000,00	5.520.800,00	(221.200,00)	96,15
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.742.000,00	5.520.800,00	(221.200,00)	96,15
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	99.701.000,00	52.853.003,00	(46.847.997,00)	53,01
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	99.701.000,00	52.853.003,00	(46.847.997,00)	53,01
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.701.000,00	52.853.003,00	(46.847.997,00)	53,01
	SURPLUS / DEFISIT	(4.138.901.682,00)	(3.510.447.344,00)	628.454.338,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.138.901.682,00)	(3.510.447.344,00)	628.454.338,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	710.670.530.854,00	681.556.286.489,41	(29.114.244.364,59)	95,90
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.965.489.576,00	12.962.834.043,41	(12.002.655.532,59)	51,92
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	11.319.781.170,00	5.588.247.094,00	(5.731.534.076,00)	49,37
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	302.276.377,00	322.577.366,00	20.300.989,00	106,72
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.614.351.128,00	2.207.175.564,00	(407.175.564,00)	84,43
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.729.080.901,00	4.844.834.019,41	(5.884.246.881,59)	45,16
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	679.146.119.178,00	662.574.102.398,00	(16.572.016.780,00)	97,56
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.648.738.088,00	644.616.163.489,00	(8.032.574.599,00)	98,77
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.497.381.090,00	17.957.938.909,00	(8.539.442.181,00)	67,77
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	(539.572.052,00)	91,77
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	(539.572.052,00)	91,77
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	153.743.929.031,00	148.530.815.684,00	(5.213.113.347,00)	96,61
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.811.443.975,00	12.477.071.212,00	(334.372.763,00)	97,39
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.943.000,00	56.668.800,00	(4.274.200,00)	92,99
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.660.000,00	23.236.800,00	(423.200,00)	98,21
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.660.000,00	23.236.800,00	(423.200,00)	98,21
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.660.000,00	23.236.800,00	(423.200,00)	98,21
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.283.000,00	33.432.000,00	(3.851.000,00)	89,67
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	37.283.000,00	33.432.000,00	(3.851.000,00)	89,67
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.283.000,00	33.432.000,00	(3.851.000,00)	89,67
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.072.410.006,00	11.962.892.389,00	(109.517.617,00)	99,09
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.575.155.006,00	11.498.041.389,00	(77.113.617,00)	99,33
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.575.155.006,00	11.498.041.389,00	(77.113.617,00)	99,33
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.575.155.006,00	11.498.041.389,00	(77.113.617,00)	99,33
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	472.194.000,00	455.123.000,00	(17.071.000,00)	96,38
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	472.194.000,00	455.123.000,00	(17.071.000,00)	96,38
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	356.640.000,00	347.100.000,00	(9.540.000,00)	97,33
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.554.000,00	108.023.000,00	(7.531.000,00)	93,48
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.061.000,00	9.728.000,00	(15.333.000,00)	38,82
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.061.000,00	9.728.000,00	(15.333.000,00)	38,82
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.061.000,00	9.728.000,00	(15.333.000,00)	38,82
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.596.324,00	159.530.907,00	(107.065.417,00)	59,84
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.251.000,00	7.130.000,00	(121.000,00)	98,33
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.251.000,00	7.130.000,00	(121.000,00)	98,33
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.251.000,00	7.130.000,00	(121.000,00)	98,33
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.005.204,00	1.341.000,00	(1.664.204,00)	44,62
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.005.204,00	1.341.000,00	(1.664.204,00)	44,62
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.005.204,00	1.341.000,00	(1.664.204,00)	44,62
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.535.120,00	37.622.000,00	(913.120,00)	97,63
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.535.120,00	37.622.000,00	(913.120,00)	97,63
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.535.120,00	37.622.000,00	(913.120,00)	97,63
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.726.000,00	15.890.100,00	(1.835.900,00)	89,64
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.726.000,00	15.890.100,00	(1.835.900,00)	89,64
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.726.000,00	15.890.100,00	(1.835.900,00)	89,64
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	900.000,00	(720.000,00)	55,56
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	900.000,00	(720.000,00)	55,56
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	900.000,00	(720.000,00)	55,56
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.401.000,00	9.486.500,00	(30.914.500,00)	23,48
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	40.401.000,00	9.486.500,00	(30.914.500,00)	23,48
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.401.000,00	9.486.500,00	(30.914.500,00)	23,48

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.058.000,00	87.161.307,00	(70.896.693,00)	55,15
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	158.058.000,00	87.161.307,00	(70.896.693,00)	55,15
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.058.000,00	87.161.307,00	(70.896.693,00)	55,15
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.539.000,00	10.539.000,00	-	100,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.539.000,00	10.539.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	10.539.000,00	10.539.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.539.000,00	10.539.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.528.245,00	204.126.930,00	(52.401.315,00)	79,57
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.072.800,00	6.112.000,00	(960.800,00)	86,42
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.072.800,00	6.112.000,00	(960.800,00)	86,42
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.072.800,00	6.112.000,00	(960.800,00)	86,42
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.455.445,00	69.014.930,00	(51.440.515,00)	57,29
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	120.455.445,00	69.014.930,00	(51.440.515,00)	57,29
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.455.445,00	69.014.930,00	(51.440.515,00)	57,29
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.000.000,00	129.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	129.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	129.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.427.400,00	83.313.186,00	(61.114.214,00)	57,69
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.552.400,00	53.693.186,00	(48.859.214,00)	52,36
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	102.552.400,00	53.693.186,00	(48.859.214,00)	52,36
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.552.400,00	53.693.186,00	(48.859.214,00)	52,36
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.875.000,00	29.620.000,00	(12.255.000,00)	70,73
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	31.060.000,00	18.805.000,00	(12.255.000,00)	60,54
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.060.000,00	18.805.000,00	(12.255.000,00)	60,54
01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	10.815.000,00	10.815.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.815.000,00	10.815.000,00	-	100,00
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	137.653.291.823,00	133.669.154.731,00	(3.984.137.092,00)	97,11
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.535.015.500,00	1.349.439.682,00	(185.575.818,00)	87,91
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	65.163.000,00	51.456.200,00	(13.706.800,00)	78,97
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.163.000,00	51.456.200,00	(13.706.800,00)	78,97
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.163.000,00	51.456.200,00	(13.706.800,00)	78,97
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.735.000,00	52.866.000,00	(5.869.000,00)	90,01
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.735.000,00	52.866.000,00	(5.869.000,00)	90,01
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.735.000,00	52.866.000,00	(5.869.000,00)	90,01
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	18.501.000,00	15.040.000,00	(3.461.000,00)	81,29
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.501.000,00	15.040.000,00	(3.461.000,00)	81,29
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.501.000,00	15.040.000,00	(3.461.000,00)	81,29
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.257.000,00	7.589.000,00	(2.668.000,00)	73,99
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.257.000,00	7.589.000,00	(2.668.000,00)	73,99
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.257.000,00	7.589.000,00	(2.668.000,00)	73,99
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	16.846.000,00	8.250.000,00	(8.596.000,00)	48,97
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.846.000,00	8.250.000,00	(8.596.000,00)	48,97
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.846.000,00	8.250.000,00	(8.596.000,00)	48,97
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	36.270.000,00	31.250.000,00	(5.020.000,00)	86,16
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	36.270.000,00	31.250.000,00	(5.020.000,00)	86,16
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.270.000,00	31.250.000,00	(5.020.000,00)	86,16
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	606.817.000,00	557.767.080,00	(49.049.920,00)	91,92
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	606.817.000,00	557.767.080,00	(49.049.920,00)	91,92
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.817.000,00	557.767.080,00	(49.049.920,00)	91,92
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	509.032.600,00	442.113.552,00	(66.919.048,00)	86,85
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	509.032.600,00	442.113.552,00	(66.919.048,00)	86,85
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.032.600,00	442.113.552,00	(66.919.048,00)	86,85
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	134.094.900,00	120.869.600,00	(13.225.300,00)	90,14
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	134.094.900,00	120.869.600,00	(13.225.300,00)	90,14
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.094.900,00	120.869.600,00	(13.225.300,00)	90,14

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2.768.000,00	1.550.000,00	(1.218.000,00)	56,00
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.768.000,00	1.550.000,00	(1.218.000,00)	56,00
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.768.000,00	1.550.000,00	(1.218.000,00)	56,00
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	8.733.000,00	3.149.850,00	(5.583.150,00)	36,07
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	8.733.000,00	3.149.850,00	(5.583.150,00)	36,07
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.733.000,00	3.149.850,00	(5.583.150,00)	36,07
02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4.347.000,00	1.550.000,00	(2.797.000,00)	35,66
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	4.347.000,00	1.550.000,00	(2.797.000,00)	35,66
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.347.000,00	1.550.000,00	(2.797.000,00)	35,66
02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	63.451.000,00	55.988.400,00	(7.462.600,00)	88,24
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	63.451.000,00	55.988.400,00	(7.462.600,00)	88,24
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.451.000,00	55.988.400,00	(7.462.600,00)	88,24
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	868.411.800,00	764.117.516,00	(104.294.284,00)	87,99
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244.471.000,00	220.478.272,00	(23.992.728,00)	90,19
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	244.471.000,00	220.478.272,00	(23.992.728,00)	90,19
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	58.800.000,00	55.400.000,00	(3.400.000,00)	94,22
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.671.000,00	165.078.272,00	(20.592.728,00)	88,91
02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.342.000,00	14.297.000,00	(45.000,00)	99,69
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.342.000,00	14.297.000,00	(45.000,00)	99,69
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.342.000,00	14.297.000,00	(45.000,00)	99,69
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	48.828.000,00	48.446.000,00	(382.000,00)	99,22
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	48.828.000,00	48.446.000,00	(382.000,00)	99,22
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.828.000,00	48.446.000,00	(382.000,00)	99,22
02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	119.853.800,00	75.081.753,00	(44.772.047,00)	62,64
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	119.853.800,00	75.081.753,00	(44.772.047,00)	62,64
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.853.800,00	75.081.753,00	(44.772.047,00)	62,64
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	85.518.000,00	77.483.339,00	(8.034.661,00)	90,60
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	85.518.000,00	77.483.339,00	(8.034.661,00)	90,60
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.518.000,00	77.483.339,00	(8.034.661,00)	90,60
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	27.587.000,00	27.091.400,00	(495.600,00)	98,20
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	27.587.000,00	27.091.400,00	(495.600,00)	98,20
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.587.000,00	27.091.400,00	(495.600,00)	98,20
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	38.620.000,00	29.100.800,00	(9.519.200,00)	75,35
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	38.620.000,00	29.100.800,00	(9.519.200,00)	75,35
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.620.000,00	29.100.800,00	(9.519.200,00)	75,35
02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	49.554.000,00	47.020.750,00	(2.533.250,00)	94,89
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	49.554.000,00	47.020.750,00	(2.533.250,00)	94,89
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.554.000,00	47.020.750,00	(2.533.250,00)	94,89
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.151.000,00	32.995.000,00	(156.000,00)	99,53
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	33.151.000,00	32.995.000,00	(156.000,00)	99,53
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.151.000,00	32.995.000,00	(156.000,00)	99,53
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	65.356.000,00	61.832.752,00	(3.523.248,00)	94,61
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	65.356.000,00	61.832.752,00	(3.523.248,00)	94,61
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.356.000,00	61.832.752,00	(3.523.248,00)	94,61
02.2.02.10.5.2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-
02.2.02.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	141.131.000,00	130.290.450,00	(10.840.550,00)	92,32
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	141.131.000,00	130.290.450,00	(10.840.550,00)	92,32
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.131.000,00	130.290.450,00	(10.840.550,00)	92,32

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.11.5.2	BELANJA MODAL	3.090.000,00	3.090.000,00	-	100,00
02.2.02.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.090.000,00	3.090.000,00	-	100,00
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	520.808.400,00	430.603.620,00	(90.204.780,00)	82,68
02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	72.116.600,00	64.985.600,00	(7.131.000,00)	90,11
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.116.600,00	64.985.600,00	(7.131.000,00)	90,11
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.116.600,00	64.985.600,00	(7.131.000,00)	90,11
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	18.948.000,00	18.639.000,00	(309.000,00)	98,37
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.948.000,00	18.639.000,00	(309.000,00)	98,37
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.948.000,00	18.639.000,00	(309.000,00)	98,37
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	297.272.200,00	233.141.020,00	(64.131.180,00)	78,43
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	297.272.200,00	233.141.020,00	(64.131.180,00)	78,43
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.272.200,00	233.141.020,00	(64.131.180,00)	78,43
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	106.372.600,00	99.673.000,00	(6.699.600,00)	93,70
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	106.372.600,00	99.673.000,00	(6.699.600,00)	93,70
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.372.600,00	99.673.000,00	(6.699.600,00)	93,70
02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26.099.000,00	14.165.000,00	(11.934.000,00)	54,27
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	26.099.000,00	14.165.000,00	(11.934.000,00)	54,27
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.099.000,00	14.165.000,00	(11.934.000,00)	54,27
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	134.729.056.123,00	131.124.993.913,00	(3.604.062.210,00)	97,32
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00	-	100,00
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00	-	100,00
02.2.04.08.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.052.020.780,00	1.052.020.780,00	-	100,00
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.622.910.700,00	125.622.910.700,00	-	100,00
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	(3.604.062.210,00)	55,25
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	(3.604.062.210,00)	55,25
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	(3.604.062.210,00)	55,25
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	969.758.000,00	735.465.305,00	(234.292.695,00)	75,84
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	969.758.000,00	735.465.305,00	(234.292.695,00)	75,84
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	85.354.000,00	84.591.000,00	(763.000,00)	99,11
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.354.000,00	84.591.000,00	(763.000,00)	99,11
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.354.000,00	84.591.000,00	(763.000,00)	99,11
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	44.123.000,00	39.407.000,00	(4.716.000,00)	89,31
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	44.123.000,00	39.407.000,00	(4.716.000,00)	89,31
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.123.000,00	39.407.000,00	(4.716.000,00)	89,31
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	103.341.000,00	73.092.785,00	(30.248.215,00)	70,73
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	103.341.000,00	73.092.785,00	(30.248.215,00)	70,73
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.341.000,00	73.092.785,00	(30.248.215,00)	70,73
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	90.398.000,00	29.288.000,00	(61.110.000,00)	32,40
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	90.398.000,00	29.288.000,00	(61.110.000,00)	32,40
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.398.000,00	29.288.000,00	(61.110.000,00)	32,40
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	156.438.000,00	146.887.820,00	(9.550.180,00)	93,90
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	156.438.000,00	146.887.820,00	(9.550.180,00)	93,90
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.438.000,00	146.887.820,00	(9.550.180,00)	93,90
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	148.243.000,00	143.054.500,00	(5.188.500,00)	96,50
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	148.243.000,00	143.054.500,00	(5.188.500,00)	96,50
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.243.000,00	143.054.500,00	(5.188.500,00)	96,50
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	210.945.000,00	151.066.800,00	(59.878.200,00)	71,61
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	210.945.000,00	151.066.800,00	(59.878.200,00)	71,61
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.945.000,00	151.066.800,00	(59.878.200,00)	71,61
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	66.887.000,00	41.930.400,00	(24.956.600,00)	62,69
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	66.887.000,00	41.930.400,00	(24.956.600,00)	62,69
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.887.000,00	41.930.400,00	(24.956.600,00)	62,69
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64.029.000,00	26.147.000,00	(37.882.000,00)	40,84
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	64.029.000,00	26.147.000,00	(37.882.000,00)	40,84
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.029.000,00	26.147.000,00	(37.882.000,00)	40,84
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.309.435.233,00	1.649.124.436,00	(660.310.797,00)	71,41

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.309.435.233,00	1.649.124.436,00	(660.310.797,00)	71,41
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	370.484.000,00	108.661.284,00	(261.822.716,00)	29,33
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	370.484.000,00	108.661.284,00	(261.822.716,00)	29,33
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.484.000,00	108.661.284,00	(261.822.716,00)	29,33
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	114.638.000,00	98.631.250,00	(16.006.750,00)	86,04
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	114.638.000,00	98.631.250,00	(16.006.750,00)	86,04
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.638.000,00	98.631.250,00	(16.006.750,00)	86,04
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	149.509.400,00	148.566.000,00	(943.400,00)	99,37
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.904.000,00	9.366.000,00	(538.000,00)	94,57
04.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.204.000,00	5.666.000,00	(538.000,00)	91,33
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	139.605.400,00	139.200.000,00	(405.400,00)	99,71
04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.605.400,00	139.200.000,00	(405.400,00)	99,71
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	273.247.600,00	175.503.600,00	(97.744.000,00)	64,23
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	273.247.600,00	175.503.600,00	(97.744.000,00)	64,23
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.247.600,00	175.503.600,00	(97.744.000,00)	64,23
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	255.367.000,00	222.018.000,00	(33.349.000,00)	86,94
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	255.367.000,00	222.018.000,00	(33.349.000,00)	86,94
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.367.000,00	222.018.000,00	(33.349.000,00)	86,94
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	98.023.000,00	89.171.500,00	(8.851.500,00)	90,97
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	98.023.000,00	89.171.500,00	(8.851.500,00)	90,97
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.023.000,00	89.171.500,00	(8.851.500,00)	90,97
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	31.047.000,00	29.680.000,00	(1.367.000,00)	95,60
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	22.847.000,00	21.480.000,00	(1.367.000,00)	94,02
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.847.000,00	21.480.000,00	(1.367.000,00)	94,02
04.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	8.200.000,00	8.200.000,00	-	100,00
04.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.200.000,00	8.200.000,00	-	100,00
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	197.166.000,00	133.443.900,00	(63.722.100,00)	67,68
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	197.166.000,00	133.443.900,00	(63.722.100,00)	67,68
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.166.000,00	133.443.900,00	(63.722.100,00)	67,68
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	736.521.233,00	603.161.302,00	(133.359.931,00)	81,89
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	680.989.233,00	547.629.302,00	(133.359.931,00)	80,42
04.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	312.506.733,00	218.842.802,00	(93.663.931,00)	70,03
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.482.500,00	328.786.500,00	(39.696.000,00)	89,23
04.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	55.532.000,00	55.532.000,00	-	100,00
04.2.01.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.532.000,00	55.532.000,00	-	100,00
04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	39.449.000,00	22.075.900,00	(17.373.100,00)	55,96
04.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	39.449.000,00	22.075.900,00	(17.373.100,00)	55,96
04.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.449.000,00	22.075.900,00	(17.373.100,00)	55,96
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	24.065.000,00	14.349.200,00	(9.715.800,00)	59,63
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	24.065.000,00	14.349.200,00	(9.715.800,00)	59,63
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.065.000,00	14.349.200,00	(9.715.800,00)	59,63
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.918.000,00	3.862.500,00	(16.055.500,00)	19,39
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	19.918.000,00	3.862.500,00	(16.055.500,00)	19,39
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.918.000,00	3.862.500,00	(16.055.500,00)	19,39
	SURPLUS/(DEFISIT)	556.926.601.823,00	533.025.470.805,41	(23.901.131.017,59)	
00.0.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH	43.811.694.059,00	42.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	97,27
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.811.694.059,00	37.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	96,92
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.811.694.059,00	37.552.994.945,99	(258.699.113,01)	99,32
00.0.00.00.6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	62.249.135,00	(937.750.865,00)	6,22
00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
	PEMBIAYAAN NETO	33.811.694.059,00	32.615.244.080,99	(1.196.449.978,01)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	590.738.295.882,00	565.640.714.886,40	(25.097.580.995,60)	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.438.751.340,00	4.261.632.845,00	(177.118.495,00)	96,01
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.567.518.340,00	1.537.757.376,00	(29.760.964,00)	98,10
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.367.000,00	19.632.450,00	(734.550,00)	96,39
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.987.000,00	9.855.000,00	(132.000,00)	98,68
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.987.000,00	9.855.000,00	(132.000,00)	98,68
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.987.000,00	9.855.000,00	(132.000,00)	98,68
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.410.000,00	1.397.600,00	(12.400,00)	99,12
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.410.000,00	1.397.600,00	(12.400,00)	99,12
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	1.397.600,00	(12.400,00)	99,12
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.485.000,00	1.475.000,00	(10.000,00)	99,33
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.485.000,00	1.475.000,00	(10.000,00)	99,33
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.485.000,00	1.475.000,00	(10.000,00)	99,33
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.325.000,00	2.065.000,00	(260.000,00)	88,82
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.325.000,00	2.065.000,00	(260.000,00)	88,82
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	2.065.000,00	(260.000,00)	88,82
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.550.000,00	2.289.850,00	(260.150,00)	89,80
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.289.850,00	(260.150,00)	89,80
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.289.850,00	(260.150,00)	89,80
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.610.000,00	2.550.000,00	(60.000,00)	97,70
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.610.000,00	2.550.000,00	(60.000,00)	97,70
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	2.550.000,00	(60.000,00)	97,70
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.342.556.822,00	1.330.985.062,00	(11.571.760,00)	99,14
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.265.456.822,00	1.256.099.362,00	(9.357.460,00)	99,26
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.265.456.822,00	1.256.099.362,00	(9.357.460,00)	99,26
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.265.456.822,00	1.256.099.362,00	(9.357.460,00)	99,26
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.480.000,00	73.266.000,00	(2.214.000,00)	97,07
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	75.480.000,00	73.266.000,00	(2.214.000,00)	97,07
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	73.680.000,00	71.470.000,00	(2.210.000,00)	97,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.796.000,00	(4.000,00)	99,78
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	540.000,00	539.700,00	(300,00)	99,94
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	540.000,00	539.700,00	(300,00)	99,94
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	539.700,00	(300,00)	99,94
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.416.000,00	97.814.894,00	(15.601.106,00)	86,24
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.741.000,00	2.639.000,00	(102.000,00)	96,28
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.741.000,00	2.639.000,00	(102.000,00)	96,28
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.741.000,00	2.639.000,00	(102.000,00)	96,28
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.512.000,00	16.723.000,00	(2.789.000,00)	85,71
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	19.512.000,00	16.723.000,00	(2.789.000,00)	85,71
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.512.000,00	16.723.000,00	(2.789.000,00)	85,71
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.950.000,00	13.696.700,00	(253.300,00)	98,18
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.950.000,00	13.696.700,00	(253.300,00)	98,18
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	13.696.700,00	(253.300,00)	98,18
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.213.000,00	64.756.194,00	(12.456.806,00)	83,87
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	77.213.000,00	64.756.194,00	(12.456.806,00)	83,87
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.213.000,00	64.756.194,00	(12.456.806,00)	83,87
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.100.000,00	1.590.000,00	(510.000,00)	75,71
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000,00	1.590.000,00	(510.000,00)	75,71
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	2.100.000,00	1.590.000,00	(510.000,00)	75,71
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	1.590.000,00	(510.000,00)	75,71
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.316.118,00	42.013.250,00	(302.868,00)	99,28

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	478.250,00	(271.750,00)	63,77
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	478.250,00	(271.750,00)	63,77
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	478.250,00	(271.750,00)	63,77
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.844.118,00	17.820.000,00	(24.118,00)	99,86
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.844.118,00	17.820.000,00	(24.118,00)	99,86
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.844.118,00	17.820.000,00	(24.118,00)	99,86
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.722.000,00	23.715.000,00	(7.000,00)	99,97
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	23.722.000,00	23.715.000,00	(7.000,00)	99,97
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.722.000,00	23.715.000,00	(7.000,00)	99,97
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.662.400,00	40.621.720,00	(1.040.680,00)	97,50
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.442.400,00	40.121.720,00	(320.680,00)	99,21
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.442.400,00	40.121.720,00	(320.680,00)	99,21
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.442.400,00	40.121.720,00	(320.680,00)	99,21
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000,00	500.000,00	(720.000,00)	40,98
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.220.000,00	500.000,00	(720.000,00)	40,98
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	500.000,00	(720.000,00)	40,98
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	995.775.000,00	889.039.869,00	(106.735.131,00)	89,28
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	418.233.000,00	369.727.055,00	(48.505.945,00)	88,40
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.756.000,00	13.352.480,00	(3.403.520,00)	79,69
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.756.000,00	13.352.480,00	(3.403.520,00)	79,69
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.756.000,00	13.352.480,00	(3.403.520,00)	79,69
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	245.874.000,00	219.487.560,00	(26.386.440,00)	89,27
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	245.874.000,00	219.487.560,00	(26.386.440,00)	89,27
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.874.000,00	219.487.560,00	(26.386.440,00)	89,27
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29.887.000,00	25.760.200,00	(4.126.800,00)	86,19
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	29.887.000,00	25.760.200,00	(4.126.800,00)	86,19
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.887.000,00	25.760.200,00	(4.126.800,00)	86,19
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	78.107.000,00	71.101.815,00	(7.005.185,00)	91,03
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	78.107.000,00	71.101.815,00	(7.005.185,00)	91,03
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.107.000,00	71.101.815,00	(7.005.185,00)	91,03
02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	47.609.000,00	40.025.000,00	(7.584.000,00)	84,07
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	47.609.000,00	40.025.000,00	(7.584.000,00)	84,07
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.609.000,00	40.025.000,00	(7.584.000,00)	84,07
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	157.976.000,00	112.996.718,00	(44.979.282,00)	71,53
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	86.722.000,00	48.732.900,00	(37.989.100,00)	56,19
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	86.722.000,00	48.732.900,00	(37.989.100,00)	56,19
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.722.000,00	48.732.900,00	(37.989.100,00)	56,19
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	71.254.000,00	64.263.818,00	(6.990.182,00)	90,19
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.254.000,00	64.263.818,00	(6.990.182,00)	90,19
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.254.000,00	64.263.818,00	(6.990.182,00)	90,19
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	342.112.000,00	331.491.196,00	(10.620.804,00)	96,90
02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	292.112.000,00	281.491.196,00	(10.620.804,00)	96,36
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	292.112.000,00	281.491.196,00	(10.620.804,00)	96,36
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.112.000,00	281.491.196,00	(10.620.804,00)	96,36
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77.454.000,00	74.824.900,00	(2.629.100,00)	96,61
02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.727.000,00	13.720.000,00	(7.000,00)	99,95
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.727.000,00	13.720.000,00	(7.000,00)	99,95
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.727.000,00	13.720.000,00	(7.000,00)	99,95
02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.676.000,00	28.555.500,00	(2.120.500,00)	93,09
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.676.000,00	28.555.500,00	(2.120.500,00)	93,09
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.676.000,00	28.555.500,00	(2.120.500,00)	93,09
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	33.051.000,00	32.549.400,00	(501.600,00)	98,48
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	33.051.000,00	32.549.400,00	(501.600,00)	98,48
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.051.000,00	32.549.400,00	(501.600,00)	98,48
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.875.458.000,00	1.834.835.600,00	(40.622.400,00)	97,83
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.875.458.000,00	1.834.835.600,00	(40.622.400,00)	97,83
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.875.458.000,00	1.834.835.600,00	(40.622.400,00)	97,83
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.875.458.000,00	1.834.835.600,00	(40.622.400,00)	97,83
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.875.458.000,00	1.834.835.600,00	(40.622.400,00)	97,83
	SURPLUS / DEFISIT	(4.438.751.340,00)	(4.261.632.845,00)	177.118.495,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.438.751.340,00)	(4.261.632.845,00)	177.118.495,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.159.449.273,00	5.088.199.030,00	(1.071.250.243,00)	82,61
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.720.674.473,00	3.470.541.724,00	(250.132.749,00)	93,28
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.944.500,00	58.822.500,00	(122.000,00)	99,79
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.970.000,00	27.965.000,00	(5.000,00)	99,98
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.970.000,00	27.965.000,00	(5.000,00)	99,98
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.970.000,00	27.965.000,00	(5.000,00)	99,98
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.129.500,00	23.129.500,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.129.500,00	23.129.500,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.129.500,00	23.129.500,00	-	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.845.000,00	7.728.000,00	(117.000,00)	98,51
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.845.000,00	7.728.000,00	(117.000,00)	98,51
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.845.000,00	7.728.000,00	(117.000,00)	98,51
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.969.744.858,00	2.893.674.781,00	(76.070.077,00)	97,44
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.840.424.458,00	2.790.423.381,00	(50.001.077,00)	98,24
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.840.424.458,00	2.790.423.381,00	(50.001.077,00)	98,24
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.840.424.458,00	2.790.423.381,00	(50.001.077,00)	98,24
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.169.000,00	77.116.000,00	(26.053.000,00)	74,75
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	103.169.000,00	77.116.000,00	(26.053.000,00)	74,75
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	60.960.000,00	60.890.000,00	(70.000,00)	99,89
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.209.000,00	16.226.000,00	(25.983.000,00)	38,44
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.432.400,00	12.418.400,00	(14.000,00)	99,89
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.432.400,00	12.418.400,00	(14.000,00)	99,89
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.432.400,00	12.418.400,00	(14.000,00)	99,89
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.719.000,00	13.717.000,00	(2.000,00)	99,99
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.719.000,00	13.717.000,00	(2.000,00)	99,99
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.719.000,00	13.717.000,00	(2.000,00)	99,99
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.983.000,00	11.983.000,00	-	100,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.983.000,00	11.983.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.983.000,00	11.983.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.183.000,00	7.183.000,00	-	100,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274.651.000,00	124.795.978,00	(149.855.022,00)	45,44
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.140.000,00	14.390.000,00	(750.000,00)	95,05
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.140.000,00	14.390.000,00	(750.000,00)	95,05
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.140.000,00	14.390.000,00	(750.000,00)	95,05
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	259.511.000,00	110.405.978,00	(149.105.022,00)	42,54
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	259.511.000,00	110.405.978,00	(149.105.022,00)	42,54
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.511.000,00	110.405.978,00	(149.105.022,00)	42,54
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.555.000,00	167.464.113,00	(11.090.887,00)	93,79
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.763.000,00	1.763.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.763.000,00	1.763.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.763.000,00	1.763.000,00	-	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.873.000,00	4.693.000,00	(1.180.000,00)	79,91
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.873.000,00	4.693.000,00	(1.180.000,00)	79,91
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.873.000,00	4.693.000,00	(1.180.000,00)	79,91
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.150.000,00	14.567.000,00	(5.583.000,00)	72,29
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	20.150.000,00	14.567.000,00	(5.583.000,00)	72,29
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	14.567.000,00	(5.583.000,00)	72,29
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.369.000,00	126.041.113,00	(4.327.887,00)	96,68
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	130.369.000,00	126.041.113,00	(4.327.887,00)	96,68
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.369.000,00	126.041.113,00	(4.327.887,00)	96,68
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.493.463,00	115.355.000,00	(3.138.463,00)	97,35
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.297.000,00	1.297.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.297.000,00	1.297.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.297.000,00	1.297.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.512.000,00	12.962.000,00	(1.550.000,00)	89,32
	SURPLUS / DEFISIT	(6.159.449.273,00)	(5.088.199.030,00)	1.071.250.243,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.159.449.273,00)	(5.088.199.030,00)	1.071.250.243,00	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.846.000,00	42.732.000,00	(2.114.000,00)	95,29
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.846.000,00	42.732.000,00	(2.114.000,00)	95,29
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	24.718.000,00	24.699.000,00	(19.000,00)	99,92
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.718.000,00	24.699.000,00	(19.000,00)	99,92
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.718.000,00	24.699.000,00	(19.000,00)	99,92
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.808.000,00	2.496.000,00	(312.000,00)	88,89
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.808.000,00	2.496.000,00	(312.000,00)	88,89
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.808.000,00	2.496.000,00	(312.000,00)	88,89
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.078.136,00	2.078.136,00	-	100,00
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.078.136,00	2.078.136,00	-	100,00
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.078.136,00	2.078.136,00	-	100,00
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.640.000,00	13.615.000,00	(25.000,00)	99,82
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	13.640.000,00	13.615.000,00	(25.000,00)	99,82
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.640.000,00	13.615.000,00	(25.000,00)	99,82
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.036.000,00	135.966.000,00	(70.000,00)	99,95
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	136.036.000,00	135.966.000,00	(70.000,00)	99,95
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.036.000,00	135.966.000,00	(70.000,00)	99,95
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.850.050,00	55.238.401,00	(611.649,00)	98,90
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.205.000,00	5.178.146,00	(26.854,00)	99,48
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.205.000,00	5.178.146,00	(26.854,00)	99,48
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.205.000,00	5.178.146,00	(26.854,00)	99,48
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.645.050,00	29.060.255,00	(584.795,00)	98,03
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.645.050,00	29.060.255,00	(584.795,00)	98,03
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.645.050,00	29.060.255,00	(584.795,00)	98,03
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.598.600,00	94.630.810,00	(1.967.790,00)	97,96
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.388.600,00	88.523.810,00	(1.864.790,00)	97,94
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.388.600,00	88.523.810,00	(1.864.790,00)	97,94
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.388.600,00	88.523.810,00	(1.864.790,00)	97,94
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.210.000,00	6.107.000,00	(103.000,00)	98,34
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.210.000,00	6.107.000,00	(103.000,00)	98,34
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	6.107.000,00	(103.000,00)	98,34
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.474.000,00	60.384.000,00	(90.000,00)	99,85
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.357.000,00	14.327.000,00	(30.000,00)	99,79
02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	7.557.000,00	7.537.000,00	(20.000,00)	99,74
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.557.000,00	7.537.000,00	(20.000,00)	99,74
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.557.000,00	7.537.000,00	(20.000,00)	99,74
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.800.000,00	6.790.000,00	(10.000,00)	99,85
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	6.790.000,00	(10.000,00)	99,85
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.790.000,00	(10.000,00)	99,85
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	42.547.000,00	42.487.000,00	(60.000,00)	99,86
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	42.547.000,00	42.487.000,00	(60.000,00)	99,86
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.547.000,00	42.487.000,00	(60.000,00)	99,86
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.547.000,00	42.487.000,00	(60.000,00)	99,86
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.382.186.590,00	2.367.895.340,00	(14.291.250,00)	99,40
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.920.000,00	13.660.000,00	(260.000,00)	98,13
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.760.000,00	4.560.000,00	(200.000,00)	95,80
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.760.000,00	4.560.000,00	(200.000,00)	95,80
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.560.000,00	(200.000,00)	95,80
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.160.000,00	9.100.000,00	(60.000,00)	99,34

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.160.000,00	9.100.000,00	(60.000,00)	99,34
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	9.100.000,00	(60.000,00)	99,34
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.368.266.590,00	2.354.235.340,00	(14.031.250,00)	99,41
03.2.02.01					
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	236.975.000,00	233.739.000,00	(3.236.000,00)	98,63
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	236.975.000,00	233.739.000,00	(3.236.000,00)	98,63
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.580.000,00	3.580.000,00	-	100,00
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.395.000,00	230.159.000,00	(3.236.000,00)	98,61
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	51.665.590,00	51.543.590,00	(122.000,00)	99,76
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.860.000,00	37.738.000,00	(122.000,00)	99,68
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.290.000,00	2.290.000,00	-	100,00
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.570.000,00	35.448.000,00	(122.000,00)	99,66
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	13.805.590,00	13.805.590,00	-	100,00
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.805.590,00	13.805.590,00	-	100,00
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.995.960.000,00	1.985.637.250,00	(10.322.750,00)	99,48
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.995.960.000,00	1.985.637.250,00	(10.322.750,00)	99,48
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.110.000,00	7.110.000,00	-	100,00
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.988.850.000,00	1.978.527.250,00	(10.322.750,00)	99,48
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	83.666.000,00	83.315.500,00	(350.500,00)	99,58
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	83.666.000,00	83.315.500,00	(350.500,00)	99,58
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.666.000,00	83.315.500,00	(350.500,00)	99,58
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.690.000,00	11.690.000,00	-	100,00
04.2.01	Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.690.000,00	11.690.000,00	-	100,00
04.2.01.01					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.760.000,00	4.760.000,00	-	100,00
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.760.000,00	4.760.000,00	-	100,00
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	629.041.000,00	621.034.000,00	(8.007.000,00)	98,73
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	629.041.000,00	621.034.000,00	(8.007.000,00)	98,73
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	629.041.000,00	621.034.000,00	(8.007.000,00)	98,73
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	629.041.000,00	621.034.000,00	(8.007.000,00)	98,73
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.041.000,00	621.034.000,00	(8.007.000,00)	98,73
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.430.000,00	94.350.000,00	(1.080.000,00)	98,87
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.430.000,00	94.350.000,00	(1.080.000,00)	98,87
06.2.01.01					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.120.000,00	5.050.000,00	(70.000,00)	98,63
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.120.000,00	5.050.000,00	(70.000,00)	98,63
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	5.050.000,00	(70.000,00)	98,63
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.310.000,00	6.310.000,00	-	100,00
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.310.000,00	6.310.000,00	-	100,00
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	6.310.000,00	-	100,00
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.690.000,00	8.620.000,00	(70.000,00)	99,19
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.690.000,00	8.620.000,00	(70.000,00)	99,19
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.690.000,00	8.620.000,00	(70.000,00)	99,19
06.2.01.04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5.120.000,00	5.090.000,00	(30.000,00)	99,41
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.120.000,00	5.090.000,00	(30.000,00)	99,41
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	5.090.000,00	(30.000,00)	99,41
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.080.000,00	4.030.000,00	(50.000,00)	98,77
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.030.000,00	(50.000,00)	98,77
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.030.000,00	(50.000,00)	98,77
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.570.000,00	3.500.000,00	(70.000,00)	98,04
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.570.000,00	3.500.000,00	(70.000,00)	98,04
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.500.000,00	(70.000,00)	98,04
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.630.000,00	5.630.000,00	-	100,00
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.630.000,00	5.630.000,00	-	100,00
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	5.630.000,00	-	100,00
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00
06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5.440.000,00	4.860.000,00	(580.000,00)	89,34
06.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	5.440.000,00	4.860.000,00	(580.000,00)	89,34

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	4.860.000,00	(580.000,00)	89,34
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.500.000,00	6.400.000,00	(100.000,00)	98,46
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.400.000,00	(100.000,00)	98,46
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.400.000,00	(100.000,00)	98,46
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00
06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8.690.000,00	8.680.000,00	(10.000,00)	99,88
06.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	8.690.000,00	8.680.000,00	(10.000,00)	99,88
06.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.690.000,00	8.680.000,00	(10.000,00)	99,88
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3.400.000,00	3.300.000,00	(100.000,00)	97,06
06.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.300.000,00	(100.000,00)	97,06
06.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.300.000,00	(100.000,00)	97,06
	SURPLUS / DEFISIT	(6.280.008.616,00)	(6.478.340.345,00)	(198.331.729,00)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.280.008.616,00)	(6.478.340.345,00)	(198.331.729,00)	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	19.990.000,00	19.310.000,00	(680.000,00)	96,60
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.878.028.800,00	1.862.561.999,00	(15.466.801,00)	99,18
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	146.132.800,00	146.132.800,00	-	100,00
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.132.800,00	146.132.800,00	-	100,00
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.495.861.000,00	1.400.592.600,00	(95.268.400,00)	93,63
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.492.411.000,00	1.397.142.600,00	(95.268.400,00)	93,62
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.411.000,00	1.397.142.600,00	(95.268.400,00)	93,62
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	63.326.000,00	63.326.000,00	-	100,00
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	63.326.000,00	63.326.000,00	-	100,00
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.326.000,00	63.326.000,00	-	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.077.000,00	31.047.000,00	(30.000,00)	99,90
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	31.077.000,00	31.047.000,00	(30.000,00)	99,90
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	20.880.000,00	20.860.000,00	(20.000,00)	99,90
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.880.000,00	20.860.000,00	(20.000,00)	99,90
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.880.000,00	20.860.000,00	(20.000,00)	99,90
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.197.000,00	10.187.000,00	(10.000,00)	99,90
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.218.000,00	9.208.000,00	(10.000,00)	99,89
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.218.000,00	9.208.000,00	(10.000,00)	99,89
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	979.000,00	979.000,00	-	100,00
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	979.000,00	979.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	217.562.000,00	217.562.000,00	-	100,00
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	217.562.000,00	217.562.000,00	-	100,00
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	217.562.000,00	217.562.000,00	-	100,00
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	217.562.000,00	217.562.000,00	-	100,00
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.562.000,00	217.562.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	186.999.000,00	186.999.000,00	-	100,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	186.999.000,00	186.999.000,00	-	100,00
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	182.039.000,00	182.039.000,00	-	100,00
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	182.039.000,00	182.039.000,00	-	100,00
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.039.000,00	182.039.000,00	-	100,00
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.960.000,00	4.960.000,00	-	100,00
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.960.000,00	4.960.000,00	-	100,00
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.960.000,00	4.960.000,00	-	100,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	192.497.000,00	192.371.000,00	(126.000,00)	99,93
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	192.497.000,00	192.371.000,00	(126.000,00)	99,93
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.547.000,00	9.537.000,00	(10.000,00)	99,90
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.547.000,00	9.537.000,00	(10.000,00)	99,90
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.547.000,00	9.537.000,00	(10.000,00)	99,90
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13.734.000,00	13.734.000,00	-	100,00
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.734.000,00	13.734.000,00	-	100,00
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.734.000,00	13.734.000,00	-	100,00
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.300.000,00	15.250.000,00	(50.000,00)	99,67
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.300.000,00	15.250.000,00	(50.000,00)	99,67
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.250.000,00	(50.000,00)	99,67
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	20.836.000,00	20.836.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	19.857.000,00	19.857.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.857.000,00	19.857.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	979.000,00	979.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	979.000,00	979.000,00	-	100,00
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	91.195.000,00	91.159.000,00	(36.000,00)	99,96
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	90.216.000,00	90.180.000,00	(36.000,00)	99,96
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.216.000,00	90.180.000,00	(36.000,00)	99,96
06.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	979.000,00	979.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	979.000,00	979.000,00	-	100,00
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.385.000,00	15.385.000,00	-	100,00
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	15.385.000,00	15.385.000,00	-	100,00
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.385.000,00	15.385.000,00	-	100,00
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.620.000,00	15.610.000,00	(10.000,00)	99,94
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	15.620.000,00	15.610.000,00	(10.000,00)	99,94
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.620.000,00	15.610.000,00	(10.000,00)	99,94
06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.880.000,00	10.860.000,00	(20.000,00)	99,82
06.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	10.880.000,00	10.860.000,00	(20.000,00)	99,82
06.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	10.860.000,00	(20.000,00)	99,82
	SURPLUS / DEFISIT	(8.662.062.551,00)	(8.678.723.777,00)	(16.661.226,00)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.662.062.551,00)	(8.678.723.777,00)	(16.661.226,00)	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Mauponggo

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	38.000.000,00	37.030.000,00	(970.000,00)	97,45
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.000.000,00	37.030.000,00	(970.000,00)	97,45
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	36.500.000,00	37.000.000,00	500.000,00	101,37
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000,00	30.000,00	(1.470.000,00)	2,00
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.379.081.798,00	2.357.033.536,00	(22.048.262,00)	99,07
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.750.577.798,00	1.741.224.336,00	(9.353.462,00)	99,47
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.043.000,00	27.862.500,00	(180.500,00)	99,36
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.134.000,00	24.123.500,00	(10.500,00)	99,96
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.134.000,00	24.123.500,00	(10.500,00)	99,96
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.134.000,00	24.123.500,00	(10.500,00)	99,96
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.909.000,00	3.739.000,00	(170.000,00)	95,65
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.909.000,00	3.739.000,00	(170.000,00)	95,65
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.909.000,00	3.739.000,00	(170.000,00)	95,65
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.477.828.781,00	1.472.762.136,00	(5.066.645,00)	99,66
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.358.691.781,00	1.353.825.136,00	(4.866.645,00)	99,64
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.358.691.781,00	1.353.825.136,00	(4.866.645,00)	99,64
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.358.691.781,00	1.353.825.136,00	(4.866.645,00)	99,64
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.280.000,00	105.100.000,00	(180.000,00)	99,83
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	105.280.000,00	105.100.000,00	(180.000,00)	99,83
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	101.880.000,00	101.880.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.220.000,00	(180.000,00)	94,71
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.974.000,00	3.974.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.974.000,00	3.974.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.974.000,00	3.974.000,00	-	100,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.883.000,00	9.863.000,00	(20.000,00)	99,80
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.883.000,00	9.863.000,00	(20.000,00)	99,80
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.883.000,00	9.863.000,00	(20.000,00)	99,80
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.022.000,00	18.022.000,00	-	100,00
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18.022.000,00	18.022.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.022.000,00	18.022.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.622.000,00	9.622.000,00	-	100,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.985.000,00	1.985.000,00	-	100,00
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.985.000,00	1.985.000,00	-	100,00
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.985.000,00	1.985.000,00	-	100,00
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	1.985.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.131.200,00	91.574.200,00	(557.000,00)	99,40
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.329.000,00	3.329.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.329.000,00	3.329.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.329.000,00	3.329.000,00	-	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.809.000,00	23.259.000,00	(550.000,00)	97,69
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	23.809.000,00	23.259.000,00	(550.000,00)	97,69
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.809.000,00	23.259.000,00	(550.000,00)	97,69
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.020.000,00	21.020.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.020.000,00	21.020.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.020.000,00	21.020.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.664.200,00	6.664.200,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.664.200,00	6.664.200,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.664.200,00	6.664.200,00	-	100,00
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.182.000,00	2.182.000,00	-	100,00
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.182.000,00	2.182.000,00	-	100,00
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.182.000,00	2.182.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.127.000,00	35.120.000,00	(7.000,00)	99,98
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	35.127.000,00	35.120.000,00	(7.000,00)	99,98
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.127.000,00	35.120.000,00	(7.000,00)	99,98
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.212.000,00	13.212.000,00	-	100,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.212.000,00	13.212.000,00	-	100,00
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	13.212.000,00	13.212.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.212.000,00	13.212.000,00	-	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.203.550,00	37.689.000,00	(3.514.550,00)	91,47
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.595.550,00	15.081.000,00	(3.514.550,00)	81,10
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.595.550,00	15.081.000,00	(3.514.550,00)	81,10
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.595.550,00	15.081.000,00	(3.514.550,00)	81,10
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.358.000,00	21.358.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.358.000,00	21.358.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.358.000,00	21.358.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.152.267,00	78.117.500,00	(34.767,00)	99,96
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.892.267,00	73.857.500,00	(34.767,00)	99,95
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.892.267,00	73.857.500,00	(34.767,00)	99,95
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.892.267,00	73.857.500,00	(34.767,00)	99,95
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000,00	4.260.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.260.000,00	4.260.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.260.000,00	-	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.357.000,00	9.357.000,00	-	100,00
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.357.000,00	9.357.000,00	-	100,00
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.357.000,00	9.357.000,00	-	100,00
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.357.000,00	9.357.000,00	-	100,00
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.357.000,00	9.357.000,00	-	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	493.240.000,00	480.725.200,00	(12.514.800,00)	97,46
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.574.000,00	41.574.000,00	-	100,00
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.790.000,00	18.790.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.790.000,00	18.790.000,00	-	100,00
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.790.000,00	18.790.000,00	-	100,00
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.984.000,00	15.984.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.984.000,00	15.984.000,00	-	100,00
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.984.000,00	15.984.000,00	-	100,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	451.666.000,00	439.151.200,00	(12.514.800,00)	97,23
03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6.376.000,00	6.376.000,00	-	100,00
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.376.000,00	6.376.000,00	-	100,00
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.376.000,00	6.376.000,00	-	100,00
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	298.080.000,00	296.642.700,00	(1.437.300,00)	99,52
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	298.080.000,00	296.642.700,00	(1.437.300,00)	99,52
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	2.820.000,00	(1.410.000,00)	66,67
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.850.000,00	293.822.700,00	(27.300,00)	99,99
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	147.210.000,00	136.132.500,00	(11.077.500,00)	92,48
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	147.210.000,00	136.132.500,00	(11.077.500,00)	92,48
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.210.000,00	136.132.500,00	(11.077.500,00)	92,48
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.760.000,00	17.760.000,00	-	100,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.760.000,00	17.760.000,00	-	100,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.260.000,00	9.260.000,00	-	100,00
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.260.000,00	9.260.000,00	-	100,00
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.260.000,00	9.260.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	87.464.000,00	87.404.000,00	(60.000,00)	99,93
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	87.464.000,00	87.404.000,00	(60.000,00)	99,93
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	87.464.000,00	87.404.000,00	(60.000,00)	99,93
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	87.464.000,00	87.404.000,00	(60.000,00)	99,93

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.464.000,00	87.404.000,00	(60.000,00)	99,93
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.683.000,00	20.563.000,00	(120.000,00)	99,42
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.683.000,00	20.563.000,00	(120.000,00)	99,42
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.960.000,00	6.880.000,00	(80.000,00)	98,85
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.960.000,00	6.880.000,00	(80.000,00)	98,85
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.880.000,00	(80.000,00)	98,85
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	4.585.000,00	4.545.000,00	(40.000,00)	99,13
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.585.000,00	4.545.000,00	(40.000,00)	99,13
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.585.000,00	4.545.000,00	(40.000,00)	99,13
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	5.738.000,00	5.738.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.738.000,00	5.738.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.738.000,00	5.738.000,00	-	100,00
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(2.341.081.798,00)	(2.320.003.536,00)	21.078.262,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.341.081.798,00)	(2.320.003.536,00)	21.078.262,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Nangaroro

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	49.243.200,00	43.773.651,00	(5.469.549,00)	88,89
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.243.200,00	43.773.651,00	(5.469.549,00)	88,89
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	42.963.200,00	43.559.651,00	596.451,00	101,39
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.280.000,00	214.000,00	(6.066.000,00)	3,41
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.295.838.239,00	2.265.505.572,00	(30.332.667,00)	98,68
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.665.497.839,00	1.635.389.172,00	(30.108.667,00)	98,19
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.405.000,00	15.405.000,00	-	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.179.000,00	4.179.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.179.000,00	4.179.000,00	-	100,00
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.179.000,00	4.179.000,00	-	100,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	857.000,00	857.000,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	857.000,00	857.000,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.000,00	857.000,00	-	100,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	857.000,00	857.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	857.000,00	857.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.000,00	857.000,00	-	100,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.094.000,00	1.094.000,00	-	100,00
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.094.000,00	1.094.000,00	-	100,00
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.000,00	1.094.000,00	-	100,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.457.000,00	1.457.000,00	-	100,00
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.457.000,00	1.457.000,00	-	100,00
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.457.000,00	1.457.000,00	-	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.204.000,00	6.204.000,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.204.000,00	6.204.000,00	-	100,00
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.204.000,00	6.204.000,00	-	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	757.000,00	757.000,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	757.000,00	757.000,00	-	100,00
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.000,00	757.000,00	-	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.494.020.281,00	1.475.392.299,00	(18.627.982,00)	98,75
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.366.760.281,00	1.352.692.299,00	(14.067.982,00)	98,97
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.366.760.281,00	1.352.692.299,00	(14.067.982,00)	98,97
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.366.760.281,00	1.352.692.299,00	(14.067.982,00)	98,97
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.440.000,00	70.440.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.440.000,00	70.440.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	68.640.000,00	68.640.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.940.000,00	30.380.000,00	(4.560.000,00)	86,95
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.940.000,00	30.380.000,00	(4.560.000,00)	86,95
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	33.240.000,00	28.680.000,00	(4.560.000,00)	86,28
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16.780.000,00	16.780.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	16.780.000,00	16.780.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.780.000,00	16.780.000,00	-	100,00
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.060.000,00	3.060.000,00	-	100,00
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	680.000,00	680.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	-	100,00
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.530.000,00	1.530.000,00	-	100,00
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.628.000,00	29.588.400,00	(3.039.600,00)	90,68
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.830.000,00	1.830.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.830.000,00	1.830.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	1.830.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.938.000,00	7.938.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.938.000,00	7.938.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.938.000,00	7.938.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.480.000,00	9.440.400,00	(3.039.600,00)	75,64
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.480.000,00	9.440.400,00	(3.039.600,00)	75,64
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	9.440.400,00	(3.039.600,00)	75,64
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.440.000,00	7.440.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.440.000,00	7.440.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.940.000,00	2.940.000,00	-	100,00
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.940.000,00	2.940.000,00	-	100,00
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	2.940.000,00	-	100,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.382.400,00	8.800.000,00	(1.582.400,00)	84,76
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.382.400,00	8.800.000,00	(1.582.400,00)	84,76
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	10.382.400,00	8.800.000,00	(1.582.400,00)	84,76
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.382.400,00	8.800.000,00	(1.582.400,00)	84,76
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.709.498,00	43.845.350,00	(1.864.148,00)	95,92
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.506.000,00	5.506.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.506.000,00	5.506.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.506.000,00	5.506.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.633.498,00	14.769.350,00	(1.864.148,00)	88,79
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.633.498,00	14.769.350,00	(1.864.148,00)	88,79
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.633.498,00	14.769.350,00	(1.864.148,00)	88,79
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	2.190.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.190.000,00	2.190.000,00	-	100,00
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.190.000,00	-	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.380.000,00	21.380.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.380.000,00	21.380.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.380.000,00	21.380.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.762.660,00	57.768.123,00	(4.994.537,00)	92,04
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.762.660,00	57.768.123,00	(4.994.537,00)	92,04
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.762.660,00	57.768.123,00	(4.994.537,00)	92,04
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.762.660,00	57.768.123,00	(4.994.537,00)	92,04
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.409.200,00	51.367.200,00	(42.000,00)	99,92
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.394.200,00	33.352.200,00	(42.000,00)	99,87
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.480.000,00	24.440.000,00	(40.000,00)	99,84
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.480.000,00	24.440.000,00	(40.000,00)	99,84

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	24.440.000,00	(40.000,00)	99,84
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.914.200,00	8.912.200,00	(2.000,00)	99,98
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.914.200,00	8.912.200,00	(2.000,00)	99,98
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.914.200,00	8.912.200,00	(2.000,00)	99,98
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.015.000,00	18.015.000,00	-	100,00
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.015.000,00	18.015.000,00	-	100,00
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.015.000,00	18.015.000,00	-	100,00
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.015.000,00	18.015.000,00	-	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	318.169.000,00	318.007.000,00	(162.000,00)	99,95
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.109.000,00	48.027.000,00	(82.000,00)	99,83
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.450.000,00	35.368.000,00	(82.000,00)	99,77
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.450.000,00	35.368.000,00	(82.000,00)	99,77
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.450.000,00	35.368.000,00	(82.000,00)	99,77
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.659.000,00	12.659.000,00	-	100,00
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.659.000,00	12.659.000,00	-	100,00
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.659.000,00	12.659.000,00	-	100,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	270.060.000,00	269.980.000,00	(80.000,00)	99,97
03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	38.200.000,00	38.200.000,00	-	100,00
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.200.000,00	38.200.000,00	-	100,00
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	38.200.000,00	-	100,00
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230.000.000,00	229.920.000,00	(80.000,00)	99,97
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	230.000.000,00	229.920.000,00	(80.000,00)	99,97
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	229.920.000,00	(80.000,00)	99,97
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.705.200,00	24.705.200,00	-	100,00
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.705.200,00	24.705.200,00	-	100,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	24.705.200,00	24.705.200,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.705.200,00	24.705.200,00	-	100,00
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.705.200,00	24.705.200,00	-	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	175.800.000,00	175.800.000,00	-	100,00
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	175.800.000,00	175.800.000,00	-	100,00
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	175.800.000,00	175.800.000,00	-	100,00
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	175.800.000,00	175.800.000,00	-	100,00
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.800.000,00	175.800.000,00	-	100,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.257.000,00	60.237.000,00	(20.000,00)	99,97
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.257.000,00	60.237.000,00	(20.000,00)	99,97
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.500.000,00	21.480.000,00	(20.000,00)	99,91
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	21.480.000,00	(20.000,00)	99,91
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.480.000,00	(20.000,00)	99,91
06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	18.724.000,00	18.724.000,00	-	100,00
06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	18.724.000,00	18.724.000,00	-	100,00
06.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.724.000,00	18.724.000,00	-	100,00
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20.033.000,00	20.033.000,00	-	100,00
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	20.033.000,00	20.033.000,00	-	100,00
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.033.000,00	20.033.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(2.246.595.039,00)	(2.221.731.921,00)	24.863.118,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.246.595.039,00)	(2.221.731.921,00)	24.863.118,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUR URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.087.287.643,00	1.038.450.382,00	(48.837.261,00)	95,51
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	970.979.943,00	952.564.283,00	(18.415.660,00)	98,10
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.429.000,00	6.899.000,00	(1.530.000,00)	81,85
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.435.000,00	1.095.000,00	(340.000,00)	76,31
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.435.000,00	1.095.000,00	(340.000,00)	76,31
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.435.000,00	1.095.000,00	(340.000,00)	76,31
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.204.000,00	1.204.000,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.204.000,00	1.204.000,00	-	100,00
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.204.000,00	1.204.000,00	-	100,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.680.000,00	1.510.000,00	(170.000,00)	89,88
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.510.000,00	(170.000,00)	89,88
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.510.000,00	(170.000,00)	89,88
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.830.000,00	980.000,00	(850.000,00)	53,55
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.830.000,00	980.000,00	(850.000,00)	53,55
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	980.000,00	(850.000,00)	53,55
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.170.000,00	1.000.000,00	(170.000,00)	85,47
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.000.000,00	(170.000,00)	85,47
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.000.000,00	(170.000,00)	85,47
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	756.075.743,00	749.071.916,00	(7.003.827,00)	99,07
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	684.985.743,00	678.031.916,00	(6.953.827,00)	98,98
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	684.985.743,00	678.031.916,00	(6.953.827,00)	98,98
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	684.985.743,00	678.031.916,00	(6.953.827,00)	98,98
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.990.000,00	63.990.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.990.000,00	63.990.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	63.840.000,00	63.840.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	100,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.850.000,00	1.800.000,00	(50.000,00)	97,30
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000,00	1.800.000,00	(50.000,00)	97,30
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.800.000,00	(50.000,00)	97,30
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.448.000,00	7.598.000,00	(850.000,00)	89,94
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.999.000,00	5.659.000,00	(340.000,00)	94,33
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.999.000,00	5.659.000,00	(340.000,00)	94,33
01.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.199.000,00	859.000,00	(340.000,00)	71,64
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.095.000,00	1.095.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.095.000,00	1.095.000,00	-	100,00
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.000,00	1.095.000,00	-	100,00
01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.354.000,00	844.000,00	(510.000,00)	62,33
01.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.354.000,00	844.000,00	(510.000,00)	62,33
01.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.354.000,00	844.000,00	(510.000,00)	62,33
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.883.000,00	4.693.000,00	(1.190.000,00)	79,77
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.709.000,00	1.539.000,00	(170.000,00)	90,05
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.709.000,00	1.539.000,00	(170.000,00)	90,05
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.709.000,00	1.539.000,00	(170.000,00)	90,05
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.274.000,00	254.000,00	(1.020.000,00)	19,94
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.274.000,00	254.000,00	(1.020.000,00)	19,94
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.274.000,00	254.000,00	(1.020.000,00)	19,94
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.198.000,00	100.400.067,00	(3.797.933,00)	96,36
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.602.000,00	26.768.067,00	(833.933,00)	96,98
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	27.602.000,00	26.768.067,00	(833.933,00)	96,98
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.602.000,00	26.768.067,00	(833.933,00)	96,98
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.657.000,00	2.648.000,00	(9.000,00)	99,66
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.657.000,00	2.648.000,00	(9.000,00)	99,66
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.657.000,00	2.648.000,00	(9.000,00)	99,66
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.659.000,00	5.658.000,00	(1.000,00)	99,98
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.659.000,00	5.658.000,00	(1.000,00)	99,98
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.659.000,00	5.658.000,00	(1.000,00)	99,98
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.736.000,00	14.736.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.736.000,00	14.736.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.736.000,00	14.736.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.544.000,00	50.590.000,00	(2.954.000,00)	94,48
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	53.544.000,00	50.590.000,00	(2.954.000,00)	94,48
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.544.000,00	50.590.000,00	(2.954.000,00)	94,48
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.802.900,00	24.792.000,00	(4.010.900,00)	86,07
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.802.900,00	3.792.000,00	(4.010.900,00)	48,60
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.802.900,00	3.792.000,00	(4.010.900,00)	48,60
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.802.900,00	3.792.000,00	(4.010.900,00)	48,60
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.143.300,00	59.110.300,00	(33.000,00)	99,94
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.143.300,00	59.110.300,00	(33.000,00)	99,94
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	59.143.300,00	59.110.300,00	(33.000,00)	99,94
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.143.300,00	59.110.300,00	(33.000,00)	99,94
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.577.000,00	15.877.000,00	(1.700.000,00)	90,33
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.596.000,00	896.000,00	(1.700.000,00)	34,51
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.596.000,00	896.000,00	(1.700.000,00)	34,51
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.596.000,00	896.000,00	(1.700.000,00)	34,51
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.596.000,00	896.000,00	(1.700.000,00)	34,51
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.830.000,00	5.830.000,00	-	100,00
02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.090.000,00	4.090.000,00	-	100,00
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.090.000,00	4.090.000,00	-	100,00
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	4.090.000,00	-	100,00
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.545.000,00	1.545.000,00	-	100,00
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.545.000,00	1.545.000,00	-	100,00
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	1.545.000,00	-	100,00
02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	2.055.000,00	2.055.000,00	-	100,00
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.055.000,00	2.055.000,00	-	100,00
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	2.055.000,00	-	100,00
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.551.000,00	5.551.000,00	-	100,00
02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.811.000,00	3.811.000,00	-	100,00
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.811.000,00	3.811.000,00	-	100,00
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.811.000,00	3.811.000,00	-	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.962.000,00	32.222.000,00	(13.740.000,00)	70,11
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.702.000,00	16.597.000,00	(9.105.000,00)	64,57

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.142.000,00	11.317.000,00	(1.825.000,00)	86,11
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.142.000,00	11.317.000,00	(1.825.000,00)	86,11
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.142.000,00	11.317.000,00	(1.825.000,00)	86,11
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.560.000,00	5.280.000,00	(7.280.000,00)	42,04
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.560.000,00	5.280.000,00	(7.280.000,00)	42,04
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.560.000,00	5.280.000,00	(7.280.000,00)	42,04
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.260.000,00	15.625.000,00	(4.635.000,00)	77,12
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13.517.000,00	10.427.000,00	(3.090.000,00)	77,14
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.517.000,00	10.427.000,00	(3.090.000,00)	77,14
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.517.000,00	10.427.000,00	(3.090.000,00)	77,14
03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.928.000,00	1.588.000,00	(340.000,00)	82,37
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.928.000,00	1.588.000,00	(340.000,00)	82,37
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.928.000,00	1.588.000,00	(340.000,00)	82,37
03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.055.000,00	850.000,00	(1.205.000,00)	41,36
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.055.000,00	850.000,00	(1.205.000,00)	41,36
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	850.000,00	(1.205.000,00)	41,36
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.690.000,00	6.325.000,00	(2.365.000,00)	72,78
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.875.000,00	1.545.000,00	(2.330.000,00)	39,87
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.330.000,00	-	(2.330.000,00)	-
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.330.000,00	-	(2.330.000,00)	-
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.330.000,00	-	(2.330.000,00)	-
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.545.000,00	1.545.000,00	-	100,00
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.545.000,00	1.545.000,00	-	100,00
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	1.545.000,00	-	100,00
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00
04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****	2.475.000,00	2.440.000,00	(35.000,00)	98,59
04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****	2.475.000,00	2.440.000,00	(35.000,00)	98,59
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.475.000,00	2.440.000,00	(35.000,00)	98,59
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	2.440.000,00	(35.000,00)	98,59
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.192.000,00	3.771.000,00	(5.421.000,00)	41,02
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.192.000,00	3.771.000,00	(5.421.000,00)	41,02
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.781.000,00	1.781.000,00	-	100,00
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.781.000,00	1.781.000,00	-	100,00
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.781.000,00	1.781.000,00	-	100,00
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.580.000,00	1.530.000,00	(1.050.000,00)	59,30
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.580.000,00	1.530.000,00	(1.050.000,00)	59,30
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	1.530.000,00	(1.050.000,00)	59,30
05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2.411.000,00	200.000,00	(2.211.000,00)	8,30
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.411.000,00	200.000,00	(2.211.000,00)	8,30
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.411.000,00	200.000,00	(2.211.000,00)	8,30
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.420.000,00	260.000,00	(2.160.000,00)	10,74
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.420.000,00	260.000,00	(2.160.000,00)	10,74
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	260.000,00	(2.160.000,00)	10,74
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.886.700,00	27.691.099,00	(7.195.601,00)	79,37
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.886.700,00	27.691.099,00	(7.195.601,00)	79,37
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.055.000,00	1.530.000,00	(525.000,00)	74,45
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.055.000,00	1.530.000,00	(525.000,00)	74,45
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	1.530.000,00	(525.000,00)	74,45

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.164.000,00	2.164.000,00	-	100,00
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.164.000,00	2.164.000,00	-	100,00
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.164.000,00	2.164.000,00	-	100,00
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	1.634.000,00	1.634.000,00	-	100,00
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.634.000,00	1.634.000,00	-	100,00
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.634.000,00	1.634.000,00	-	100,00
06.2.01.04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2.070.000,00	850.000,00	(1.220.000,00)	41,06
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.070.000,00	850.000,00	(1.220.000,00)	41,06
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	850.000,00	(1.220.000,00)	41,06
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.949.000,00	1.949.000,00	-	100,00
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.949.000,00	1.949.000,00	-	100,00
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.949.000,00	1.949.000,00	-	100,00
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12.356.000,00	10.780.399,00	(1.575.601,00)	87,25
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.356.000,00	10.780.399,00	(1.575.601,00)	87,25
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.356.000,00	10.780.399,00	(1.575.601,00)	87,25
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.324.000,00	1.324.000,00	-	100,00
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.324.000,00	1.324.000,00	-	100,00
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.324.000,00	1.324.000,00	-	100,00
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	1.644.000,00	1.644.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.644.000,00	1.644.000,00	-	100,00
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.644.000,00	1.644.000,00	-	100,00
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.302.000,00	282.000,00	(1.020.000,00)	21,66
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.302.000,00	282.000,00	(1.020.000,00)	21,66
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.302.000,00	282.000,00	(1.020.000,00)	21,66
06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	654.000,00	654.000,00	-	100,00
06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	654.000,00	654.000,00	-	100,00
06.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.000,00	654.000,00	-	100,00
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.112.700,00	62.700,00	(1.050.000,00)	5,63
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	1.112.700,00	62.700,00	(1.050.000,00)	5,63
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.112.700,00	62.700,00	(1.050.000,00)	5,63
06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00
06.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00
06.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.709.000,00	1.199.000,00	(510.000,00)	70,16
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	1.709.000,00	1.199.000,00	(510.000,00)	70,16
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.709.000,00	1.199.000,00	(510.000,00)	70,16
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.429.000,00	984.000,00	(445.000,00)	68,86
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.429.000,00	984.000,00	(445.000,00)	68,86
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.429.000,00	984.000,00	(445.000,00)	68,86
06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembanguan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.804.000,00	954.000,00	(850.000,00)	52,88
06.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	1.804.000,00	954.000,00	(850.000,00)	52,88
06.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.804.000,00	954.000,00	(850.000,00)	52,88
	SURPLUS / DEFISIT	(1.087.287.643,00)	(1.038.450.382,00)	48.837.261,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.087.287.643,00)	(1.038.450.382,00)	48.837.261,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Keo Tengah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	24.600.000,00	7.514.000,00	(17.086.000,00)	30,54
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.600.000,00	7.514.000,00	(17.086.000,00)	30,54
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	24.600.000,00	7.514.000,00	(17.086.000,00)	30,54
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.338.938.961,00	1.306.169.171,00	(32.769.790,00)	97,55
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.179.171.961,00	1.167.282.171,00	(11.889.790,00)	98,99
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.047.000,00	24.937.000,00	(1.110.000,00)	95,74
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.787.000,00	12.717.000,00	(70.000,00)	99,45
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.787.000,00	12.717.000,00	(70.000,00)	99,45
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.787.000,00	12.717.000,00	(70.000,00)	99,45
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.550.000,00	2.240.000,00	(310.000,00)	87,84
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.240.000,00	(310.000,00)	87,84
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.240.000,00	(310.000,00)	87,84
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.040.000,00	1.900.000,00	(140.000,00)	93,14
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	1.900.000,00	(140.000,00)	93,14
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	1.900.000,00	(140.000,00)	93,14
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.040.000,00	1.820.000,00	(220.000,00)	89,22
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	1.820.000,00	(220.000,00)	89,22
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	1.820.000,00	(220.000,00)	89,22
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.040.000,00	1.860.000,00	(180.000,00)	91,18
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	1.860.000,00	(180.000,00)	91,18
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	1.860.000,00	(180.000,00)	91,18
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.040.000,00	2.020.000,00	(20.000,00)	99,02
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.020.000,00	(20.000,00)	99,02
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.020.000,00	(20.000,00)	99,02
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.550.000,00	2.380.000,00	(170.000,00)	93,33
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.380.000,00	(170.000,00)	93,33
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.380.000,00	(170.000,00)	93,33
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	941.240.793,00	932.471.971,00	(8.768.822,00)	99,07
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	872.810.793,00	864.471.971,00	(8.338.822,00)	99,04
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	872.810.793,00	864.471.971,00	(8.338.822,00)	99,04
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	872.810.793,00	864.471.971,00	(8.338.822,00)	99,04
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.840.000,00	63.840.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.840.000,00	63.840.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	63.840.000,00	63.840.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.550.000,00	2.380.000,00	(170.000,00)	93,33
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.380.000,00	(170.000,00)	93,33
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.380.000,00	(170.000,00)	93,33
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.040.000,00	1.780.000,00	(260.000,00)	87,25
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	1.780.000,00	(260.000,00)	87,25
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	1.780.000,00	(260.000,00)	87,25
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.008.000,00	6.008.000,00	-	100,00
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.008.000,00	6.008.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.008.000,00	6.008.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.000,00	1.208.000,00	-	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.412.000,00	112.116.400,00	(1.295.600,00)	98,86
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.198.000,00	1.198.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.198.000,00	1.198.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.000,00	1.198.000,00	-	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.250.000,00	33.130.000,00	(120.000,00)	99,64
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	33.250.000,00	33.130.000,00	(120.000,00)	99,64
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.250.000,00	33.130.000,00	(120.000,00)	99,64
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.902.000,00	6.902.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.902.000,00	6.902.000,00	-	100,00
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.902.000,00	6.902.000,00	-	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.218.000,00	4.218.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.218.000,00	4.218.000,00	-	100,00
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.218.000,00	4.218.000,00	-	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	984.000,00	0	(984.000,00)	-
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	984.000,00	0	(984.000,00)	-
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	984.000,00	0	(984.000,00)	-
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.860.000,00	66.668.400,00	(191.600,00)	99,71
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	66.860.000,00	66.668.400,00	(191.600,00)	99,71
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.860.000,00	66.668.400,00	(191.600,00)	99,71
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.871.368,00	29.871.000,00	(368,00)	100,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.012.000,00	1.012.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.012.000,00	1.012.000,00	-	100,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.012.000,00	1.012.000,00	-	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.310.368,00	6.310.000,00	(368,00)	99,99
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.310.368,00	6.310.000,00	(368,00)	99,99
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.310.368,00	6.310.000,00	(368,00)	99,99
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.549.000,00	22.549.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.549.000,00	22.549.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.549.000,00	22.549.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.592.800,00	61.877.800,00	(715.000,00)	98,86
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.942.800,00	58.227.800,00	(715.000,00)	98,79
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.942.800,00	58.227.800,00	(715.000,00)	98,79
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.942.800,00	58.227.800,00	(715.000,00)	98,79
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.137.000,00	42.685.000,00	(2.452.000,00)	94,57
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.200.000,00	10.020.000,00	(180.000,00)	98,24
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.100.000,00	4.980.000,00	(120.000,00)	97,65
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	4.980.000,00	(120.000,00)	97,65
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	4.980.000,00	(120.000,00)	97,65
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.100.000,00	5.040.000,00	(60.000,00)	98,82
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.040.000,00	(60.000,00)	98,82
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.040.000,00	(60.000,00)	98,82
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.227.000,00	22.385.000,00	(1.842.000,00)	92,40
02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	14.867.000,00	13.915.000,00	(952.000,00)	93,60
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.867.000,00	13.915.000,00	(952.000,00)	93,60
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.867.000,00	13.915.000,00	(952.000,00)	93,60
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.400.000,00	3.380.000,00	(20.000,00)	99,41
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.380.000,00	(20.000,00)	99,41
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.380.000,00	(20.000,00)	99,41
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.960.000,00	5.090.000,00	(870.000,00)	85,40
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.960.000,00	5.090.000,00	(870.000,00)	85,40
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.960.000,00	5.090.000,00	(870.000,00)	85,40
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.800.000,00	6.600.000,00	(200.000,00)	97,06
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.400.000,00	3.240.000,00	(160.000,00)	95,29
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.240.000,00	(160.000,00)	95,29
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.240.000,00	(160.000,00)	95,29
02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.910.000,00	3.680.000,00	(230.000,00)	94,12
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.910.000,00	3.680.000,00	(230.000,00)	94,12
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.910.000,00	3.680.000,00	(230.000,00)	94,12
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	3.680.000,00	(230.000,00)	94,12
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.074.000,00	29.070.000,00	(4.004.000,00)	87,89
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.074.000,00	29.070.000,00	(4.004.000,00)	87,89
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.468.000,00	8.400.000,00	(2.068.000,00)	80,24

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.468.000,00	8.400.000,00	(2.068.000,00)	80,24
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.468.000,00	8.400.000,00	(2.068.000,00)	80,24
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.606.000,00	20.670.000,00	(1.936.000,00)	91,44
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.606.000,00	20.670.000,00	(1.936.000,00)	91,44
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.606.000,00	20.670.000,00	(1.936.000,00)	91,44
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.420.000,00	6.170.000,00	(1.250.000,00)	83,15
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.420.000,00	6.170.000,00	(1.250.000,00)	83,15
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.420.000,00	6.170.000,00	(1.250.000,00)	83,15
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.420.000,00	6.170.000,00	(1.250.000,00)	83,15
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	6.170.000,00	(1.250.000,00)	83,15
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.038.000,00	6.350.000,00	(6.688.000,00)	48,70
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.038.000,00	6.350.000,00	(6.688.000,00)	48,70
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.898.000,00	3.660.000,00	(3.238.000,00)	53,06
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.898.000,00	3.660.000,00	(3.238.000,00)	53,06
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.898.000,00	3.660.000,00	(3.238.000,00)	53,06
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.140.000,00	2.690.000,00	(3.450.000,00)	43,81
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.140.000,00	2.690.000,00	(3.450.000,00)	43,81
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.140.000,00	2.690.000,00	(3.450.000,00)	43,81
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	61.098.000,00	54.612.000,00	(6.486.000,00)	89,38
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.098.000,00	54.612.000,00	(6.486.000,00)	89,38
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.602.000,00	22.306.000,00	(2.296.000,00)	90,67
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.602.000,00	22.306.000,00	(2.296.000,00)	90,67
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.602.000,00	22.306.000,00	(2.296.000,00)	90,67
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.614.000,00	6.334.000,00	(2.280.000,00)	73,53
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.614.000,00	6.334.000,00	(2.280.000,00)	73,53
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.614.000,00	6.334.000,00	(2.280.000,00)	73,53
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.442.000,00	4.592.000,00	(850.000,00)	84,38
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.442.000,00	4.592.000,00	(850.000,00)	84,38
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.442.000,00	4.592.000,00	(850.000,00)	84,38
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.930.000,00	4.820.000,00	(110.000,00)	97,77
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.930.000,00	4.820.000,00	(110.000,00)	97,77
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	4.820.000,00	(110.000,00)	97,77
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.860.000,00	9.300.000,00	(560.000,00)	94,32
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	9.860.000,00	9.300.000,00	(560.000,00)	94,32
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	9.300.000,00	(560.000,00)	94,32
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.650.000,00	7.260.000,00	(390.000,00)	94,90
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	7.260.000,00	(390.000,00)	94,90
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.260.000,00	(390.000,00)	94,90
	SURPLUS / DEFISIT	(1.314.338.961,00)	(1.298.655.171,00)	15.683.790,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.314.338.961,00)	(1.298.655.171,00)	15.683.790,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Aesesa Selatan

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.127.743.674,00	1.093.104.410,00	(34.639.264,00)	96,93
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	960.246.674,00	940.454.410,00	(19.792.264,00)	97,94
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.028.000,00	28.828.000,00	(4.200.000,00)	87,28
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.320.000,00	5.150.000,00	(170.000,00)	96,80
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.320.000,00	5.150.000,00	(170.000,00)	96,80
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	5.150.000,00	(170.000,00)	96,80
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.640.000,00	3.110.000,00	(1.530.000,00)	67,03
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.640.000,00	3.110.000,00	(1.530.000,00)	67,03
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	3.110.000,00	(1.530.000,00)	67,03
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.400.000,00	2.040.000,00	(1.360.000,00)	60,00
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	2.040.000,00	(1.360.000,00)	60,00
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	2.040.000,00	(1.360.000,00)	60,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.312.000,00	2.972.000,00	(340.000,00)	89,73
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.312.000,00	2.972.000,00	(340.000,00)	89,73
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.312.000,00	2.972.000,00	(340.000,00)	89,73
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.086.000,00	10.796.000,00	(290.000,00)	97,38
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.086.000,00	10.796.000,00	(290.000,00)	97,38
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.086.000,00	10.796.000,00	(290.000,00)	97,38
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	1.190.000,00	(510.000,00)	70,00
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.190.000,00	(510.000,00)	70,00
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.190.000,00	(510.000,00)	70,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	694.405.978,00	685.592.011,00	(8.813.967,00)	98,73
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	621.428.978,00	613.869.011,00	(7.559.967,00)	98,78
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	621.428.978,00	613.869.011,00	(7.559.967,00)	98,78
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	621.428.978,00	613.869.011,00	(7.559.967,00)	98,78
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.841.000,00	64.818.000,00	(23.000,00)	99,96
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.841.000,00	64.818.000,00	(23.000,00)	99,96
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	63.840.000,00	63.840.000,00	-	100,00
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.000,00	978.000,00	(23.000,00)	97,70
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.554.000,00	1.055.000,00	(499.000,00)	67,89
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.554.000,00	1.055.000,00	(499.000,00)	67,89
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.554.000,00	1.055.000,00	(499.000,00)	67,89
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,00	1.020.000,00	(680.000,00)	60,00
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.020.000,00	(680.000,00)	60,00
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.020.000,00	(680.000,00)	60,00
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.842.000,00	2.790.000,00	(52.000,00)	98,17
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.842.000,00	2.790.000,00	(52.000,00)	98,17
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.842.000,00	2.790.000,00	(52.000,00)	98,17
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.285.000,00	10.530.000,00	(1.755.000,00)	85,71
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.412.000,00	6.040.000,00	(372.000,00)	94,20
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.412.000,00	6.040.000,00	(372.000,00)	94,20
01.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.612.000,00	1.240.000,00	(372.000,00)	76,92
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.700.000,00	1.020.000,00	(680.000,00)	60,00
01.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.020.000,00	(680.000,00)	60,00
01.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.020.000,00	(680.000,00)	60,00
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.793.000,00	1.260.000,00	(533.000,00)	70,27

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.793.000,00	1.260.000,00	(533.000,00)	70,27
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.793.000,00	1.260.000,00	(533.000,00)	70,27
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.380.000,00	2.210.000,00	(170.000,00)	92,86
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.380.000,00	2.210.000,00	(170.000,00)	92,86
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.210.000,00	(170.000,00)	92,86
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.445.400,00	80.593.092,00	(1.852.308,00)	97,75
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	551.000,00	551.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	551.000,00	551.000,00	-	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.000,00	551.000,00	-	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.690.000,00	35.680.000,00	(10.000,00)	99,97
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.424.000,00	4.414.000,00	(10.000,00)	99,77
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.424.000,00	4.414.000,00	(10.000,00)	99,77
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	31.266.000,00	31.266.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.266.000,00	31.266.000,00	-	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.016.400,00	15.014.200,00	(2.200,00)	99,99
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.016.400,00	15.014.200,00	(2.200,00)	99,99
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.016.400,00	15.014.200,00	(2.200,00)	99,99
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.480.000,00	2.480.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.480.000,00	2.480.000,00	-	100,00
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	2.480.000,00	-	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.708.000,00	26.867.892,00	(1.840.108,00)	93,59
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	28.708.000,00	26.867.892,00	(1.840.108,00)	93,59
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.708.000,00	26.867.892,00	(1.840.108,00)	93,59
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.903.100,00	57.104.000,00	(2.799.100,00)	95,33
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.903.100,00	12.104.000,00	(2.799.100,00)	81,22
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.903.100,00	12.104.000,00	(2.799.100,00)	81,22
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.903.100,00	12.104.000,00	(2.799.100,00)	81,22
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.179.196,00	77.807.307,00	(371.889,00)	99,52
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.379.196,00	75.007.307,00	(371.889,00)	99,51
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.379.196,00	75.007.307,00	(371.889,00)	99,51
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.379.196,00	75.007.307,00	(371.889,00)	99,51
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.840.000,00	8.500.000,00	(340.000,00)	96,15
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.040.000,00	2.040.000,00	-	100,00
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.040.000,00	-	100,00
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	-	100,00
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.400.000,00	3.060.000,00	(340.000,00)	90,00
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.400.000,00	3.060.000,00	(340.000,00)	90,00
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.060.000,00	(340.000,00)	90,00
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.060.000,00	(340.000,00)	90,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.990.000,00	30.270.000,00	(3.720.000,00)	89,06
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.990.000,00	30.270.000,00	(3.720.000,00)	89,06
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.250.000,00	26.530.000,00	(3.720.000,00)	87,70
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.250.000,00	26.530.000,00	(3.720.000,00)	87,70
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	26.530.000,00	(3.720.000,00)	87,70
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.740.000,00	3.740.000,00	-	100,00
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.740.000,00	3.740.000,00	-	100,00
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	3.740.000,00	-	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.940.000,00	46.750.000,00	(3.190.000,00)	93,61
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49.940.000,00	46.750.000,00	(3.190.000,00)	93,61

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	46.100.000,00	43.930.000,00	(2.170.000,00)	95,29
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.100.000,00	43.930.000,00	(2.170.000,00)	95,29
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.100.000,00	43.930.000,00	(2.170.000,00)	95,29
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.840.000,00	2.820.000,00	(1.020.000,00)	73,44
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	2.820.000,00	(1.020.000,00)	73,44
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	2.820.000,00	(1.020.000,00)	73,44
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.188.000,00	2.848.000,00	(340.000,00)	89,34
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.188.000,00	2.848.000,00	(340.000,00)	89,34
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.188.000,00	2.848.000,00	(340.000,00)	89,34
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.188.000,00	2.848.000,00	(340.000,00)	89,34
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.188.000,00	2.848.000,00	(340.000,00)	89,34
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.539.000,00	64.282.000,00	(7.257.000,00)	89,86
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.539.000,00	64.282.000,00	(7.257.000,00)	89,86
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.570.000,00	2.720.000,00	(850.000,00)	76,19
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.570.000,00	2.720.000,00	(850.000,00)	76,19
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	2.720.000,00	(850.000,00)	76,19
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5.058.000,00	3.570.000,00	(1.488.000,00)	70,58
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.058.000,00	3.570.000,00	(1.488.000,00)	70,58
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.058.000,00	3.570.000,00	(1.488.000,00)	70,58
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.380.000,00	2.380.000,00	-	100,00
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.380.000,00	2.380.000,00	-	100,00
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.380.000,00	-	100,00
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.760.000,00	3.570.000,00	(1.190.000,00)	75,00
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.760.000,00	3.570.000,00	(1.190.000,00)	75,00
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	3.570.000,00	(1.190.000,00)	75,00
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	13.860.000,00	12.000.000,00	(1.860.000,00)	86,58
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	13.860.000,00	12.000.000,00	(1.860.000,00)	86,58
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	12.000.000,00	(1.860.000,00)	86,58
06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2.380.000,00	1.870.000,00	(510.000,00)	78,57
06.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.380.000,00	1.870.000,00	(510.000,00)	78,57
06.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	1.870.000,00	(510.000,00)	78,57
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.077.000,00	10.986.000,00	(91.000,00)	99,18
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	11.077.000,00	10.986.000,00	(91.000,00)	99,18
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.077.000,00	10.986.000,00	(91.000,00)	99,18
06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.240.000,00	6.000.000,00	(1.240.000,00)	82,87
06.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	7.240.000,00	6.000.000,00	(1.240.000,00)	82,87
06.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.240.000,00	6.000.000,00	(1.240.000,00)	82,87
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.180.000,00	7.180.000,00	-	100,00
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	7.180.000,00	7.180.000,00	-	100,00
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.180.000,00	7.180.000,00	-	100,00
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.754.000,00	7.726.000,00	(28.000,00)	99,64
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	7.754.000,00	7.726.000,00	(28.000,00)	99,64
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.754.000,00	7.726.000,00	(28.000,00)	99,64
	SURPLUS / DEFISIT	(1.127.743.674,00)	(1.093.104.410,00)	34.639.264,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.127.743.674,00)	(1.093.104.410,00)	34.639.264,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUR URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.000.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.353.767.561,00	2.274.902.728,00	(78.864.833,00)	96,65
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	797.194.511,00	784.695.278,00	(12.499.233,00)	98,43
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.690.900,00	5.989.000,00	(701.900,00)	89,51
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.690.900,00	5.989.000,00	(701.900,00)	89,51
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.690.900,00	5.989.000,00	(701.900,00)	89,51
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.690.900,00	5.989.000,00	(701.900,00)	89,51
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	625.894.934,00	622.351.296,00	(3.543.638,00)	99,43
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	567.455.934,00	566.081.296,00	(1.374.638,00)	99,76
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	567.455.934,00	566.081.296,00	(1.374.638,00)	99,76
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	567.455.934,00	566.081.296,00	(1.374.638,00)	99,76
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.439.000,00	56.270.000,00	(2.169.000,00)	96,29
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	58.439.000,00	56.270.000,00	(2.169.000,00)	96,29
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	45.720.000,00	45.720.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.719.000,00	10.550.000,00	(2.169.000,00)	82,95
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.811.000,00	74.397.042,00	(4.413.958,00)	94,40
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.320.000,00	6.140.000,00	(180.000,00)	97,15
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.820.000,00	1.690.000,00	(130.000,00)	92,86
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000,00	0	(130.000,00)	0,00
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,89
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,89
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.611.000,00	10.240.000,00	(3.371.000,00)	75,23
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.611.000,00	10.240.000,00	(3.371.000,00)	75,23
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.611.000,00	10.240.000,00	(3.371.000,00)	75,23
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.620.000,00	3.849.842,00	(770.158,00)	83,33
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.620.000,00	3.849.842,00	(770.158,00)	83,33
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	3.849.842,00	(770.158,00)	83,33
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.676.000,00	52.583.200,00	(92.800,00)	99,82
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	52.676.000,00	52.583.200,00	(92.800,00)	99,82
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.676.000,00	52.583.200,00	(92.800,00)	99,82
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.093.110,00	10.073.000,00	(2.020.110,00)	83,30
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.025.000,00	435.000,00	(1.590.000,00)	21,48
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.025.000,00	435.000,00	(1.590.000,00)	21,48
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	435.000,00	(1.590.000,00)	21,48
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.449.110,00	1.020.000,00	(429.110,00)	70,39
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.449.110,00	1.020.000,00	(429.110,00)	70,39
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.449.110,00	1.020.000,00	(429.110,00)	70,39
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.619.000,00	8.618.000,00	(1.000,00)	99,99
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.619.000,00	8.618.000,00	(1.000,00)	99,99
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.619.000,00	8.618.000,00	(1.000,00)	99,99
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.704.567,00	71.884.940,00	(1.819.627,00)	97,53
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.704.567,00	71.884.940,00	(1.819.627,00)	97,53
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.704.567,00	71.884.940,00	(1.819.627,00)	97,53
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.704.567,00	71.884.940,00	(1.819.627,00)	97,53
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	761.800.800,00	756.704.800,00	(5.096.000,00)	99,33
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	761.800.800,00	756.704.800,00	(5.096.000,00)	99,33
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	761.800.800,00	756.704.800,00	(5.096.000,00)	99,33
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	761.800.800,00	756.704.800,00	(5.096.000,00)	99,33
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.944.000,00	59.848.000,00	(5.096.000,00)	92,15
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	696.856.800,00	696.856.800,00	0,00	100,00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	662.102.250,00	604.271.650,00	(57.830.600,00)	91,27
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	662.102.250,00	604.271.650,00	(57.830.600,00)	91,27
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	142.500.000,00	133.610.000,00	(8.890.000,00)	93,76
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	142.500.000,00	133.610.000,00	(8.890.000,00)	93,76
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000,00	133.610.000,00	(8.890.000,00)	93,76
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	180.089.650,00	180.025.650,00	(64.000,00)	99,96
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	180.089.650,00	180.025.650,00	(64.000,00)	99,96
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.089.650,00	180.025.650,00	(64.000,00)	99,96
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	339.512.600,00	290.636.000,00	(48.876.600,00)	85,60
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	339.512.600,00	290.636.000,00	(48.876.600,00)	85,60
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.512.600,00	290.636.000,00	(48.876.600,00)	85,60
	SURPLUS / DEFISIT	(2.353.767.561,00)	(2.274.902.728,00)	78.864.833,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.353.767.561,00)	(2.274.902.728,00)	78.864.833,00	

KABUPATEN NAGEKEO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.353.767.561,00	2.274.902.728,00	(78.864.833,00)	96,65
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	797.194.511,00	784.695.278,00	(12.499.233,00)	98,43
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.690.900,00	5.989.000,00	(701.900,00)	89,51
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.690.900,00	5.989.000,00	(701.900,00)	89,51
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.690.900,00	5.989.000,00	(701.900,00)	89,51
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.690.900,00	5.989.000,00	(701.900,00)	89,51
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	625.894.934,00	622.351.296,00	(3.543.638,00)	99,43
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	567.455.934,00	566.081.296,00	(1.374.638,00)	99,76
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	567.455.934,00	566.081.296,00	(1.374.638,00)	99,76
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	567.455.934,00	566.081.296,00	(1.374.638,00)	99,76
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.439.000,00	56.270.000,00	(2.169.000,00)	96,29
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	58.439.000,00	56.270.000,00	(2.169.000,00)	96,29
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	45.720.000,00	45.720.000,00	-	100,00
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.719.000,00	10.550.000,00	(2.169.000,00)	82,95
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.811.000,00	74.397.042,00	(4.413.958,00)	94,40
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.320.000,00	6.140.000,00	(180.000,00)	97,15
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.820.000,00	1.690.000,00	(130.000,00)	92,86
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	-	100,00
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000,00	0	(130.000,00)	-
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,89
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,89
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.611.000,00	10.240.000,00	(3.371.000,00)	75,23
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.611.000,00	10.240.000,00	(3.371.000,00)	75,23
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.611.000,00	10.240.000,00	(3.371.000,00)	75,23
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.620.000,00	3.849.842,00	(770.158,00)	83,33
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.620.000,00	3.849.842,00	(770.158,00)	83,33
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	3.849.842,00	(770.158,00)	83,33
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.676.000,00	52.583.200,00	(92.800,00)	99,82
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	52.676.000,00	52.583.200,00	(92.800,00)	99,82
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.676.000,00	52.583.200,00	(92.800,00)	99,82
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.093.110,00	10.073.000,00	(2.020.110,00)	83,30
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.025.000,00	435.000,00	(1.590.000,00)	21,48
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.025.000,00	435.000,00	(1.590.000,00)	21,48
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	435.000,00	(1.590.000,00)	21,48
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.449.110,00	1.020.000,00	(429.110,00)	70,39
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.449.110,00	1.020.000,00	(429.110,00)	70,39
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.449.110,00	1.020.000,00	(429.110,00)	70,39
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.619.000,00	8.618.000,00	(1.000,00)	99,99
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.619.000,00	8.618.000,00	(1.000,00)	99,99
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.619.000,00	8.618.000,00	(1.000,00)	99,99
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.704.567,00	71.884.940,00	(1.819.627,00)	97,53
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.704.567,00	71.884.940,00	(1.819.627,00)	97,53
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.704.567,00	71.884.940,00	(1.819.627,00)	97,53
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.704.567,00	71.884.940,00	(1.819.627,00)	97,53
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.457.000,00	68.860.000,00	(2.597.000,00)	96,37
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	761.800.800,00	756.704.800,00	(5.096.000,00)	99,33
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	761.800.800,00	756.704.800,00	(5.096.000,00)	99,33
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	761.800.800,00	756.704.800,00	(5.096.000,00)	99,33
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	761.800.800,00	756.704.800,00	(5.096.000,00)	99,33
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.944.000,00	59.848.000,00	(5.096.000,00)	92,15
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	696.856.800,00	696.856.800,00	0,00	100,00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.213.000,00	60.371.000,00	(842.000,00)	98,62
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	662.102.250,00	604.271.650,00	(57.830.600,00)	91,27
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	662.102.250,00	604.271.650,00	(57.830.600,00)	91,27
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	142.500.000,00	133.610.000,00	(8.890.000,00)	93,76
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	142.500.000,00	133.610.000,00	(8.890.000,00)	93,76
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000,00	133.610.000,00	(8.890.000,00)	93,76
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	180.089.650,00	180.025.650,00	(64.000,00)	99,96
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	180.089.650,00	180.025.650,00	(64.000,00)	99,96
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.089.650,00	180.025.650,00	(64.000,00)	99,96
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	339.512.600,00	290.636.000,00	(48.876.600,00)	85,60
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	339.512.600,00	290.636.000,00	(48.876.600,00)	85,60
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.512.600,00	290.636.000,00	(48.876.600,00)	85,60
SURPLUS / DEFISIT		(2.353.767.561,00)	(2.274.902.728,00)	78.864.833,00	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(2.353.767.561,00)	(2.274.902.728,00)	78.864.833,00	



KABUPATEN NAGEKEO
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	352.761.817.057,00	327.476.205.601,22	107.368.463.254,00	96.035.274.995,99	-	-	-	-
1.01	PENDIDIKAN	178.155.697.875,00	170.872.426.399,00	10.860.174.500,00	10.816.390.219,00	-	-	-	-
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	137.772.868.475,00	131.389.106.425,00	118.373.500,00	118.011.869,00	-	-	-	-
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.203.200,00	141.084.215,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.366.200,00	5.366.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.195.000,00	109.158.015,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.642.000,00	26.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	137.109.488.394,00	130.736.620.329,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	136.855.948.394,00	130.487.934.329,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230.340.000,00	225.557.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.200.000,00	23.129.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.695.000,00	336.365.700,00	118.373.500,00	118.011.869,00	-	-	-	-
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.415.000,00	2.415.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.003.000,00	5.003.000,00	118.373.500,00	118.011.869,00	-	-	-	-
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.069.000,00	144.065.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	936.000,00	840.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.052.000,00	168.822.700,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.234.381,00	61.201.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.920.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.616.381,00	14.703.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.698.000,00	44.698.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.447.500,00	109.035.181,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.147.500,00	106.735.181,00	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.273.829.400,00	39.374.319.974,00	10.741.801.000,00	10.698.378.350,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.753.297.200,00	22.182.448.303,00	3.298.869.400,00	3.287.868.750,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	481.421.000,00	480.401.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	241.677.000,00	239.807.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	320.670.100,00	320.670.100,00	249.850.000,00	249.850.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	27.630.000,00	27.630.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	66.898.100,00	65.878.100,00	129.970.000,00	129.970.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	11.350.000,00	11.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.714.767.600,00	1.710.517.600,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	163.545.500,00	161.845.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	568.866.000,00	563.551.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.041.400,00	11.171.400,00	14.990.000,00	14.990.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	13.970.000,00	13.970.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.415.378.000,00	1.415.378.000,00	1.115.982.000,00	1.115.982.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	48.968.100,00	45.371.100,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	96.428.200,00	88.243.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.089.843.600,00	2.049.233.600,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	279.064.800,00	258.709.800,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	88.729.200,00	87.009.630,00	23.766.000,00	20.123.600,00	-	-	-	-
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.111.048.600,00	14.631.711.273,00	1.764.311.400,00	1.756.953.150,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.648.693.600,00	14.326.545.741,00	5.439.325.600,00	5.406.903.600,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	88.849.500,00	84.429.500,00	821.842.000,00	821.842.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	55.361.000,00	53.049.000,00	557.000.000,00	557.000.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	195.102.500,00	167.843.500,00	2.329.010.000,00	2.329.010.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	77.394.000,00	68.044.000,00	759.209.000,00	759.209.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.748.134.600,00	2.742.524.600,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	357.291.000,00	353.891.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	523.665.600,00	519.075.600,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	296.949.000,00	294.229.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70.194.900,00	69.351.900,00	38.520.000,00	38.520.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	576.152.400,00	562.672.400,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	82.923.700,00	82.913.700,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.566.475.400,00	9.328.521.541,00	933.744.600,00	901.322.600,00	-	-	-	-
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.505.708.600,00	2.502.835.930,00	2.003.606.000,00	2.003.606.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	27.389.000,00	25.469.000,00	188.500.000,00	188.500.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.107.000,00	197.727.000,00	1.680.428.000,00	1.680.428.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.143.639.200,00	2.146.639.200,00	59.678.000,00	59.678.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	3.220.000,00	2.710.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	131.353.400,00	130.290.730,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	366.130.000,00	362.490.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	366.130.000,00	362.490.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.000.000,00	109.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.000.000,00	109.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.000.000,00	109.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	KESEHATAN	119.695.619.918,00	103.854.260.065,00	18.147.141.204,00	14.090.589.917,28	-	-	-	-
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.879.248.323,00	56.541.604.121,00	1.306.356.950,00	716.359.800,00	-	-	-	-
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	632.476.000,00	507.913.960,00	3.680.000,00	3.680.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121.494.000,00	63.927.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	57.211.000,00	53.679.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.400.000,00	11.723.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	19.900.000,00	19.303.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	421.471.000,00	359.281.960,00	3.680.000,00	3.680.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.435.898.669,00	45.152.446.680,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.721.237.669,00	44.454.717.680,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	682.730.000,00	665.963.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.571.000,00	30.406.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.252.844.900,00	3.048.006.702,00	650.499.950,00	550.631.800,00	-	-	-	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92.224.000,00	77.959.999,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	325.605.000,00	322.199.000,00	591.655.950,00	500.631.800,00	-	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.703.000,00	7.588.696,00	58.554.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.081.848.300,00	979.561.457,00	290.000,00	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	949.223.600,00	923.320.050,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.320.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	433.460.000,00	432.341.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.540.000,00	8.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.621.000,00	295.656.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.468.148.086,00	3.194.552.403,00	137.177.000,00	134.039.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	693.944.703,00	658.646.449,00	6.126.000,00	3.063.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.791.000,00	76.694.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.697.412.383,00	2.459.211.954,00	126.551.000,00	126.476.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.880.668,00	484.735.190,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	449.799.668,00	366.129.190,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.410.000,00	71.055.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.691.000,00	16.991.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.980.000,00	30.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	9.500.000.000,00	4.153.949.186,00	500.000.000,00	13.009.000,00	-	-	-	-
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	9.500.000.000,00	4.153.949.186,00	500.000.000,00	13.009.000,00	-	-	-	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.322.577.595,00	44.383.720.258,00	16.840.784.254,00	13.374.230.117,28	-	-	-	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	12.407.627.771,00	10.922.296.238,00	15.018.215.316,00	11.615.698.379,28	-	-	-	-
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	162.927.490,00	27.049.000,00	7.007.230.561,00	4.635.279.997,00	-	-	-	-
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	32.500.000,00	32.500.000,00	1.003.719.640,00	1.003.719.640,00	-	-	-	-
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	72.899.200,00	27.947.700,00	102.625.339,00	78.063.790,00	-	-	-	-
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.076.990.000,00	3.076.648.625,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	892.940.000,00	744.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	118.616.832,00	116.649.890,00	3.466.181.775,00	2.504.810.075,28	-	-	-	-
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35.000.000,00	34.400.000,00	3.438.378.001,00	3.393.824.877,00	-	-	-	-
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.300.668.756,00	3.356.771.491,00	80.000,00	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.615.085.493,00	3.406.446.720,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	99.532.812,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.903.933.824,00	33.450.408.020,00	1.822.568.938,00	1.758.531.738,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.198.388.000,00	876.723.000,00	504.323.938,00	468.290.738,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	543.540.000,00	454.308.000,00	145.600.000,00	137.452.000,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	219.052.000,00	141.541.000,00	430.000.000,00	426.459.000,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	531.896.000,00	441.833.580,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	572.885.000,00	483.165.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	418.100.000,00	340.138.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	505.240.800,00	454.981.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	94.320.000,00	88.110.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	363.244.200,00	352.614.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	172.062.000,00	140.954.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	505.051.000,00	468.505.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	175.162.856,00	168.295.856,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	159.390.000,00	79.450.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.406.445.000,00	1.433.047.704,00	554.380.000,00	554.380.000,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	227.339.000,00	183.832.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.066.989.000,00	725.627.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	38.580.000,00	16.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.560.000,00	14.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	56.660.000,00	36.010.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	22.268.000,00	19.625.080,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.715.807.600,00	2.433.154.650,00	105.000.000,00	89.910.000,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16.697.044.484,00	15.845.123.189,00	21.855.000,00	21.855.000,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	9.773.200,00	2.452.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7.051.225.000,00	6.905.376.948,00	2.575.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.236.191.084,00	1.108.779.473,00	56.335.000,00	56.335.000,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	209.994.000,00	153.916.040,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	674.905.600,00	82.034.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.820.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	11.016.000,00	11.016.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	11.016.000,00	11.016.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.736.685.000,00	1.724.793.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	32.095.000,00	27.370.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.320.000,00	2.320.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	29.775.000,00	25.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.652.900.000,00	1.650.760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.646.500.000,00	1.644.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.400.000,00	6.260.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.690.000,00	46.663.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.690.000,00	46.663.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	81.900.000,00	64.070.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14.240.000,00	10.820.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7.680.000,00	7.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6.560.000,00	3.140.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	14.240.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	14.240.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	53.420.000,00	50.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	53.420.000,00	50.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.161.851.000,00	745.734.486,00	-	-	-	-	-	-
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.161.851.000,00	745.734.486,00	-	-	-	-	-	-
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.161.851.000,00	745.734.486,00	-	-	-	-	-	-
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	513.358.000,00	394.338.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	513.358.000,00	394.338.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.798.960.851,00	18.976.388.410,22	76.280.285.900,00	69.173.252.323,71	-	-	-	-
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.890.963.872,00	9.713.382.131,00	550.000.000,00	518.381.000,00	-	-	-	-
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.788.100,00	106.612.900,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.656.600,00	61.814.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.131.500,00	44.798.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.558.452.994,00	3.505.020.764,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.136.604.994,00	3.096.987.764,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	421.848.000,00	408.033.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.072.200,00	537.422.534,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.080.000,00	5.080.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.976.100,00	49.968.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.246.100,00	20.246.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.716.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	28.645.000,00	28.287.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	443.409.000,00	432.401.434,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.410.000,00	1.410.000,00	550.000.000,00	518.381.000,00	-	-	-	-
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.410.000,00	1.410.000,00	550.000.000,00	518.381.000,00	-	-	-	-
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	977.495.858,00	967.294.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.745.000,00	2.745.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.513.858,00	24.570.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945.237.000,00	939.979.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.228.249.720,00	2.079.790.632,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505.567.000,00	416.007.323,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.722.682.720,00	1.663.783.309,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.468.495.000,00	2.515.831.301,00	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.468.495.000,00	2.515.831.301,00	-	-	-	-	-	-
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	523.230.000,00	501.490.000,00	3.898.832.198,00	3.674.283.200,00	-	-	-	-
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	523.230.000,00	501.490.000,00	3.898.832.198,00	3.674.283.200,00	-	-	-	-
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	321.320.000,00	300.311.000,00	2.398.832.198,00	2.275.283.200,00	-	-	-	-
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	201.910.000,00	201.179.000,00	1.500.000.000,00	1.399.000.000,00	-	-	-	-
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	870.429.000,00	607.201.500,00	7.087.905.628,00	6.260.396.861,44	-	-	-	-
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	870.429.000,00	607.201.500,00	7.087.905.628,00	6.260.396.861,44	-	-	-	-
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	870.429.000,00	607.201.500,00	7.087.905.628,00	6.260.396.861,44	-	-	-	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	177.200.000,00	151.261.250,00	2.140.000.000,00	1.998.377.280,74	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	177.200.000,00	151.261.250,00	2.140.000.000,00	1.998.377.280,74	-	-	-	-
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	177.200.000,00	151.261.250,00	2.140.000.000,00	1.998.377.280,74	-	-	-	-
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	5.567.479.979,00	5.388.451.686,22	12.779.130.678,00	11.656.226.030,00	-	-	-	-
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	5.567.479.979,00	5.388.451.686,22	12.779.130.678,00	11.656.226.030,00	-	-	-	-
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	5.567.479.979,00	5.388.451.686,22	12.779.130.678,00	11.656.226.030,00	-	-	-	-
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	245.218.500,00	202.714.900,00	2.600.000.000,00	2.218.774.235,00	-	-	-	-
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	245.218.500,00	202.714.900,00	2.600.000.000,00	2.218.774.235,00	-	-	-	-
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	245.218.500,00	202.714.900,00	2.600.000.000,00	2.218.774.235,00	-	-	-	-
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.458.539.500,00	1.370.204.585,00	47.216.917.396,00	42.839.313.716,53	-	-	-	-
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.458.539.500,00	1.370.204.585,00	47.216.917.396,00	42.839.313.716,53	-	-	-	-
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1.256.629.500,00	1.170.204.785,00	45.164.718.706,00	40.959.310.026,53	-	-	-	-
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	201.910.000,00	199.999.800,00	2.052.198.690,00	1.880.003.690,00	-	-	-	-
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.065.900.000,00	1.041.682.358,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	993.800.000,00	973.663.323,00	-	-	-	-	-	-
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	993.800.000,00	973.663.323,00	-	-	-	-	-	-
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	72.100.000,00	68.019.035,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	72.100.000,00	68.019.035,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.876.364.660,00	23.801.325.009,00	1.650.000.000,00	1.574.496.000,00	-	-	-	-
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.452.734.460,00	1.411.279.809,00	50.000.000,00	49.800.000,00	-	-	-	-
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.668.300,00	114.443.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.848.300,00	60.709.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.820.000,00	53.733.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.019.670.360,00	989.586.303,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	926.704.360,00	896.961.303,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.966.000,00	92.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.569.900,00	13.483.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.569.900,00	13.483.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.619.200,00	129.535.799,00	50.000.000,00	49.800.000,00	-	-	-	-
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.125.000,00	9.125.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	50.000.000,00	49.800.000,00	-	-	-	-
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.867.000,00	17.849.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.355.200,00	54.271.799,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.872.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	37.200.000,00	37.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.200.000,00	10.190.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.940.350,00	67.228.585,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.350.350,00	7.278.585,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.391.000,00	6.150.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.879.000,00	53.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.266.350,00	97.002.222,00	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.266.350,00	97.002.222,00	-	-	-	-	-	-
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	258.711.000,00	243.621.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	258.711.000,00	243.621.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	120.071.000,00	118.241.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	138.640.000,00	125.380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.600.000.000,00	1.524.696.000,00	-	-	-	-
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	800.000.000,00	755.854.500,00	-	-	-	-
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	-	-	800.000.000,00	755.854.500,00	-	-	-	-
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	-	800.000.000,00	768.841.500,00	-	-	-	-
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	-	-	800.000.000,00	768.841.500,00	-	-	-	-
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	22.164.919.200,00	22.146.424.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	22.164.919.200,00	22.146.424.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	22.164.919.200,00	22.146.424.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.052.851.867,00	6.897.490.344,00	402.047.650,00	351.732.536,00	-	-	-	-
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.347.705.163,00	3.298.692.185,00	111.060.000,00	61.060.000,00	-	-	-	-
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.471.000,00	70.468.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.652.000,00	47.652.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.138.000,00	13.138.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.681.000,00	9.678.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.626.945.044,00	2.601.980.953,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.410.162.644,00	2.385.699.653,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.199.600,00	157.699.300,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.390.000,00	41.390.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.194.000,00	1.194.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.998.800,00	15.998.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.775.000,00	7.775.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.427.000,00	1.427.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.348.000,00	6.348.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.620.000,00	181.996.378,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.507.000,00	4.507.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.361.000,00	30.346.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.290.000,00	6.289.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.232.000,00	2.232.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.610.000,00	137.602.278,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.184.000,00	2.184.000,00	111.060.000,00	61.060.000,00	-	-	-	-
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.184.000,00	2.184.000,00	111.060.000,00	61.060.000,00	-	-	-	-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.316.990,00	100.448.182,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.869.000,00	2.807.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.705.990,00	23.899.182,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.742.000,00	73.742.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.393.129,00	333.839.672,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.251.000,00	13.931.580,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.082.129,00	310.472.092,00	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.060.000,00	9.436.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.556.241.600,00	1.520.106.500,00	7.987.650,00	7.987.650,00	-	-	-	-
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.486.716.000,00	1.450.670.900,00	7.987.650,00	7.987.650,00	-	-	-	-
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.046.570.000,00	1.043.820.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12.653.000,00	7.153.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63.780.000,00	50.580.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	88.262.000,00	73.786.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	263.163.000,00	263.043.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.288.000,00	12.288.000,00	7.987.650,00	7.987.650,00	-	-	-	-
1.05.02.2.02	Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	69.525.600,00	69.435.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	8.953.700,00	8.953.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	25.092.000,00	25.052.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	35.479.900,00	35.429.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.019.777.204,00	1.988.477.259,00	276.400.000,00	276.084.886,00	-	-	-	-
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	72.775.000,00	69.925.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	72.775.000,00	69.925.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.910.942.204,00	1.882.662.259,00	276.400.000,00	276.084.886,00	-	-	-	-
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	77.388.000,00	77.388.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	70.246.800,00	70.199.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.343.754.404,00	1.343.754.404,00	276.400.000,00	276.084.886,00	-	-	-	-
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	34.088.000,00	34.088.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	385.465.000,00	357.232.655,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	36.060.000,00	35.890.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	28.560.000,00	28.390.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	129.127.900,00	90.214.400,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.731.900,00	25.560.400,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.194.900,00	14.723.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.800.000,00	7.310.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20.400.000,00	1.320.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.337.000,00	2.207.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.127.000,00	11.197.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.127.000,00	11.197.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	54.269.000,00	53.457.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	14.174.000,00	13.462.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	40.095.000,00	39.995.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	SOSIAL	3.182.321.886,00	3.074.315.374,00	28.814.000,00	28.814.000,00	-	-	-	-
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.922.539.586,00	1.879.670.914,00	23.766.000,00	23.766.000,00	-	-	-	-
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.874.800,00	47.610.467,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.733.000,00	29.548.667,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.141.800,00	18.061.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.709.770.564,00	1.669.150.882,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.620.460.564,00	1.587.459.082,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.310.000,00	81.691.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.720.000,00	7.670.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.720.000,00	7.670.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.698.000,00	34.435.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.358.000,00	2.358.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.644.000,00	5.641.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.999.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.696.000,00	20.436.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.010.000,00	1.010.000,00	23.766.000,00	23.766.000,00	-	-	-	-
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.010.000,00	1.010.000,00	23.766.000,00	23.766.000,00	-	-	-	-
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.631.222,00	19.256.328,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.230.000,00	13.168.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.401.222,00	6.088.328,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.835.000,00	100.537.737,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.365.000,00	17.280.425,00	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.470.000,00	83.257.312,00	-	-	-	-	-	-
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	154.357.000,00	133.132.933,00	-	-	-	-	-	-
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	154.357.000,00	133.132.933,00	-	-	-	-	-	-
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.593.000,00	48.473.933,00	-	-	-	-	-	-
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	37.439.000,00	26.294.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	68.325.000,00	58.365.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	8.201.000,00	3.672.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	8.201.000,00	3.672.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	8.201.000,00	3.672.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	234.000.500,00	222.540.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	114.189.500,00	113.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	41.285.000,00	41.085.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	23.968.500,00	23.664.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	42.676.000,00	42.377.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	6.260.000,00	5.934.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	119.811.000,00	109.480.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	33.780.000,00	33.780.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	30.795.000,00	30.785.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	23.410.000,00	23.410.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	31.826.000,00	21.505.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	595.494.000,00	573.966.177,00	5.048.000,00	5.048.000,00	-	-	-	-
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	595.494.000,00	573.966.177,00	5.048.000,00	5.048.000,00	-	-	-	-
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	130.647.000,00	128.242.497,00	979.000,00	979.000,00	-	-	-	-
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.014.000,00	709.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	-	-	-	-
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	185.577.000,00	183.052.067,00	979.000,00	979.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	277.256.000,00	261.962.613,00	-	-	-	-	-	-
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	267.729.800,00	261.332.450,00	-	-	-	-	-	-
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	105.748.000,00	100.378.950,00	-	-	-	-	-	-
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	70.656.000,00	65.299.359,00	-	-	-	-	-	-
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	35.092.000,00	35.079.591,00	-	-	-	-	-	-
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	161.981.800,00	160.953.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	161.981.800,00	160.953.500,00	-	-	-	-	-	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37.423.882.660,00	32.836.105.193,63	15.444.963.474,00	14.874.368.060,00	-	-	-	-
2.07	TENAGA KERJA	2.126.718.612,00	552.733.800,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.564.217.912,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.393.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.522.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.871.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.325.979.932,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.245.217.932,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.642.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.313.100,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.462.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.224.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.039.100,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.396.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.192.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.690.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.690.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.879.180,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.992.180,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.437.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.022.700,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.022.700,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	30.951.000,00	29.827.500,00	-	-	-	-	-	-
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	30.951.000,00	29.827.500,00	-	-	-	-	-	-
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	30.951.000,00	29.827.500,00	-	-	-	-	-	-
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	249.699.300,00	249.401.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	249.699.300,00	249.401.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	249.699.300,00	249.401.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	236.843.400,00	229.388.300,00	-	-	-	-	-	-
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	236.843.400,00	229.388.300,00	-	-	-	-	-	-
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	86.843.400,00	85.830.400,00	-	-	-	-	-	-
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	150.000.000,00	143.557.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	45.007.000,00	44.117.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.180.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.000.000,00	19.180.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	25.007.000,00	24.937.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.007.000,00	24.937.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	418.795.800,00	395.088.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	280.488.800,00	256.821.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	60.002.000,00	59.802.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	60.002.000,00	59.802.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	220.486.800,00	197.019.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.944.000,00	41.944.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	178.542.800,00	155.075.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	55.497.000,00	55.497.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.497.000,00	55.497.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.497.000,00	55.497.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	82.810.000,00	82.770.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	39.945.000,00	39.905.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39.945.000,00	39.905.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.865.000,00	42.865.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.865.000,00	42.865.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	PANGAN	2.314.137.213,00	2.086.107.668,00	8.700.000,00	8.700.000,00	-	-	-	-
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.396.893.213,00	1.312.902.988,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.611.100,00	15.611.100,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.933.000,00	13.933.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.678.100,00	1.678.100,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.157.368.813,00	1.148.252.793,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.096.034.813,00	1.086.918.793,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.314.000,00	60.314.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.066.000,00	37.715.814,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.685.000,00	1.676.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.727.000,00	17.668.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.210.000,00	6.209.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.214.000,00	10.932.014,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.863.300,00	9.865.322,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.092.000,00	1.090.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.771.300,00	8.775.322,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.984.000,00	101.457.959,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.524.000,00	100.307.959,00	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	243.880.000,00	231.641.665,00	-	-	-	-	-	-
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	243.880.000,00	231.641.665,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	243.880.000,00	231.641.665,00	-	-	-	-	-	-
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	367.425.000,00	264.072.435,00	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	207.425.000,00	168.247.150,00	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	65.708.000,00	52.201.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100.000.000,00	83.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	41.717.000,00	32.795.750,00	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	160.000.000,00	95.825.285,00	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	160.000.000,00	95.825.285,00	-	-	-	-	-	-
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	220.558.000,00	211.034.600,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	25.000.000,00	19.727.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	25.000.000,00	19.727.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	195.558.000,00	191.307.600,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	195.558.000,00	191.307.600,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	85.381.000,00	66.455.980,00	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	85.381.000,00	66.455.980,00	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.581.000,00	31.655.980,00	-	-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	34.800.000,00	34.800.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-
2.10	PERTANAHAN	712.025.900,00	100.586.360,00	3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	-	-	-	-
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	153.208.000,00	26.938.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	153.208.000,00	26.938.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	153.208.000,00	26.938.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	558.817.900,00	73.648.360,00	3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	-	-	-	-
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	558.817.900,00	73.648.360,00	3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	-	-	-	-
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	558.817.900,00	73.648.360,00	3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	-	-	-	-
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	2.372.579.378,00	2.292.552.920,00	59.830.000,00	59.698.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.512.700.478,00	1.496.005.354,00	54.330.000,00	54.298.000,00	-	-	-	-
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.241.000,00	11.906.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.131.000,00	2.115.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.690.000,00	1.686.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.420.000,00	8.105.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.350.851.028,00	1.341.307.154,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.257.217.028,00	1.247.740.154,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.754.000,00	10.687.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.092.400,00	57.825.700,00	54.330.000,00	54.298.000,00	-	-	-	-
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.730.000,00	5.536.000,00	54.330.000,00	54.298.000,00	-	-	-	-
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.863.000,00	2.858.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.254.400,00	2.254.300,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720.000,00	720.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.525.000,00	46.457.400,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.556.150,00	49.245.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.091.150,00	9.214.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.465.000,00	40.031.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.959.900,00	35.721.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.959.900,00	35.721.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	269.161.000,00	248.341.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	15.353.000,00	14.882.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	15.353.000,00	14.882.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	253.808.000,00	233.459.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	253.808.000,00	233.459.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	231.157.400,00	229.635.766,00	-	-	-	-	-	-
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66.883.100,00	65.423.466,00	-	-	-	-	-	-
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	66.883.100,00	65.423.466,00	-	-	-	-	-	-
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	164.274.300,00	164.212.300,00	-	-	-	-	-	-
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	164.274.300,00	164.212.300,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	142.983.400,00	136.042.600,00	5.500.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	142.983.400,00	136.042.600,00	5.500.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	142.983.400,00	136.042.600,00	5.500.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	21.622.900,00	21.562.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	21.622.900,00	21.562.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.622.900,00	21.562.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	23.542.200,00	19.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.542.200,00	19.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	12.013.000,00	7.985.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.529.200,00	11.115.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	11.828.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	11.828.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	11.828.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	159.584.000,00	136.465.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	159.584.000,00	136.465.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	159.584.000,00	136.465.600,00	-	-	-	-	-	-
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.954.362.023,00	2.904.534.348,00	168.721.000,00	168.721.000,00	-	-	-	-
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.696.524.423,00	1.657.969.790,00	117.279.000,00	117.279.000,00	-	-	-	-
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.982.100,00	23.982.100,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.509.000,00	3.509.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.569.000,00	3.569.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.184.000,00	3.184.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.988.100,00	3.988.100,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.244.000,00	3.244.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.244.000,00	3.244.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.244.000,00	3.244.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.465.730.298,00	1.433.750.315,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.376.370.298,00	1.351.230.315,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.856.000,00	62.016.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.994.000,00	6.994.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.510.000,00	4.510.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.319.000,00	52.959.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.713.000,00	15.713.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.767.000,00	1.767.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.260.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.919.000,00	29.919.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.070.000,00	5.070.000,00	117.279.000,00	117.279.000,00	-	-	-	-
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	5.140.000,00	5.140.000,00	-	-	-	-
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.380.000,00	3.380.000,00	91.680.000,00	91.680.000,00	-	-	-	-
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.690.000,00	1.690.000,00	20.459.000,00	20.459.000,00	-	-	-	-
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.954.625,00	51.431.750,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.795.000,00	3.330.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.159.625,00	27.101.750,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.668.400,00	85.976.625,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.212.800,00	68.951.025,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	5.550.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.775.600,00	11.475.600,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	555.185.000,00	553.569.530,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	77.857.000,00	77.857.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	57.857.000,00	57.857.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	313.260.000,00	313.237.050,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	312.120.000,00	312.097.050,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	128.766.000,00	128.021.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	124.616.000,00	124.616.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4.150.000,00	3.405.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	35.302.000,00	34.454.480,00	-	-	-	-	-	-
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	35.302.000,00	34.454.480,00	-	-	-	-	-	-
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	530.255.000,00	522.142.514,00	47.532.000,00	47.532.000,00	-	-	-	-
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	187.818.000,00	180.945.200,00	47.532.000,00	47.532.000,00	-	-	-	-
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	69.309.000,00	69.309.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	117.379.000,00	110.506.200,00	47.532.000,00	47.532.000,00	-	-	-	-
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	1.130.000,00	1.130.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	295.487.000,00	294.615.634,00	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	9.614.000,00	9.194.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	269.193.000,00	269.071.634,00	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	16.680.000,00	16.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	46.950.000,00	46.581.680,00	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	30.300.000,00	29.931.680,00	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	16.650.000,00	16.650.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	159.888.600,00	159.212.514,00	3.910.000,00	3.910.000,00	-	-	-	-
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	21.206.000,00	21.205.880,00	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	21.206.000,00	21.205.880,00	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	119.136.600,00	118.517.225,00	3.910.000,00	3.910.000,00	-	-	-	-
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	93.104.600,00	92.655.225,00	3.910.000,00	3.910.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.005.000,00	7.005.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.158.000,00	7.988.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	10.869.000,00	10.869.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.906.000,00	16.849.409,00	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.906.000,00	16.849.409,00	-	-	-	-	-	-
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	12.509.000,00	11.640.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	12.509.000,00	11.640.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6.088.000,00	5.219.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	6.421.000,00	6.421.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.154.971.599,00	3.791.182.846,00	56.886.000,00	56.886.000,00	-	-	-	-
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.667.990.330,00	1.639.807.549,00	56.886.000,00	56.886.000,00	-	-	-	-
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.933.000,00	28.919.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.933.000,00	28.919.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.331.252.770,00	1.325.208.190,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.251.817.770,00	1.245.773.190,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.435.000,00	79.435.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.027.400,00	186.646.084,00	56.886.000,00	56.886.000,00	-	-	-	-
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.600.400,00	14.504.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000,00	7.300.000,00	56.886.000,00	56.886.000,00	-	-	-	-
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.788.000,00	13.764.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.310.000,00	8.310.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.029.000,00	142.768.084,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.976.000,00	14.940.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.156.000,00	9.156.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.420.000,00	2.384.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.801.160,00	84.094.275,00	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.801.160,00	84.094.275,00	-	-	-	-	-	-
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	586.250.000,00	353.423.448,00	-	-	-	-	-	-
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	586.250.000,00	353.423.448,00	-	-	-	-	-	-
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	586.250.000,00	353.423.448,00	-	-	-	-	-	-
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.056.038.100,00	1.020.792.080,00	-	-	-	-	-	-
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	1.056.038.100,00	1.020.792.080,00	-	-	-	-	-	-
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	988.023.000,00	961.186.980,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	35.059.000,00	27.159.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	32.956.100,00	32.446.100,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	844.693.169,00	777.159.769,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	844.693.169,00	777.159.769,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	45.772.000,00	38.154.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	282.026.000,00	273.866.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	41.022.000,00	30.877.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	157.009.169,00	157.009.169,00	-	-	-	-	-	-
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	318.864.000,00	277.253.600,00	-	-	-	-	-	-
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.965.088.056,00	3.765.209.568,00	469.980.996,00	469.980.996,00	-	-	-	-
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.565.944.961,00	1.547.506.818,00	377.073.996,00	377.073.996,00	-	-	-	-
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.212.477.002,00	1.195.111.459,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.131.486.002,00	1.120.962.459,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.991.000,00	74.149.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.271.000,00	5.264.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.271.000,00	5.264.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.448.100,00	182.378.400,00	19.374.000,00	19.374.000,00	-	-	-	-
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	19.374.000,00	19.374.000,00	-	-	-	-
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.666.000,00	5.666.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.982.100,00	4.982.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	840.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.580.000,00	15.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.320.000,00	155.310.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.360.000,00	760.000,00	357.699.996,00	357.699.996,00	-	-	-	-
2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.360.000,00	760.000,00	357.699.996,00	357.699.996,00	-	-	-	-
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.957.859,00	107.952.859,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.195.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.637.859,00	8.637.859,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.000.000,00	93.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.431.000,00	47.040.100,00	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.431.000,00	47.040.100,00	-	-	-	-	-	-
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	108.897.800,00	85.996.900,00	59.940.000,00	59.940.000,00	-	-	-	-
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	108.897.800,00	85.996.900,00	59.940.000,00	59.940.000,00	-	-	-	-
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	6.755.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	102.142.800,00	85.996.900,00	59.940.000,00	59.940.000,00	-	-	-	-
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.137.935.282,00	1.470.610.850,00	32.967.000,00	32.967.000,00	-	-	-	-
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	537.234.182,00	427.754.450,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.200,00	4.375.200,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.120.000,00	25.120.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	74.984.000,00	20.984.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	109.235.000,00	71.732.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	283.502.982,00	265.526.250,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.017.000,00	40.017.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	542.457.000,00	542.457.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	542.457.000,00	542.457.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	816.044.100,00	294.023.400,00	32.967.000,00	32.967.000,00	-	-	-	-
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3.600.000,00	3.454.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	805.296.100,00	288.878.900,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.690.000,00	1.690.000,00	32.967.000,00	32.967.000,00	-	-	-	-
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5.458.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	242.200.000,00	206.376.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	242.200.000,00	206.376.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.152.310.013,00	661.095.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.152.310.013,00	661.095.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	320.610.013,00	317.610.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	831.700.000,00	343.485.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	PERHUBUNGAN	3.700.719.417,00	3.593.790.129,00	7.280.440.000,00	6.831.525.584,00	-	-	-	-
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.486.228.877,00	1.448.738.369,00	54.033.000,00	53.970.000,00	-	-	-	-
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.034.400,00	16.034.400,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.999.000,00	10.999.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	996.600,00	996.600,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	996.000,00	996.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	988.000,00	988.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	989.000,00	989.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.065.800,00	1.065.800,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.280.642.777,00	1.244.981.973,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.199.671.777,00	1.164.010.973,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.983.000,00	78.983.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	997.000,00	997.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	991.000,00	991.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.828.000,00	5.828.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.828.000,00	5.828.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.624.000,00	21.624.000,00	46.470.000,00	46.470.000,00	-	-	-	-
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	46.470.000,00	46.470.000,00	-	-	-	-
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.604.000,00	2.604.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.178.000,00	116.018.814,00	3.063.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	440.000,00	440.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.558.000,00	42.528.514,00	3.063.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.180.000,00	4.050.300,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.000.000,00	69.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.921.700,00	44.251.182,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.254.800,00	21.611.652,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.666.900,00	22.639.530,00	-	-	-	-	-	-
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.141.857.300,00	1.128.815.300,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.800.000,00	-	65.000.000,00	-	-	-	-	-
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.800.000,00	-	65.000.000,00	-	-	-	-	-
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.698.000,00	120.265.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.698.000,00	120.265.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.009.359.300,00	1.008.550.300,00	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	902.599.300,00	901.791.300,00	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	106.760.000,00	106.759.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.029.933.440,00	993.536.660,00	7.161.407.000,00	6.777.555.584,00	-	-	-	-
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.029.933.440,00	993.536.660,00	7.161.407.000,00	6.777.555.584,00	-	-	-	-
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	50.498.600,00	50.497.600,00	-	-	-	-	-	-
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	907.987.840,00	871.650.060,00	7.161.407.000,00	6.777.555.584,00	-	-	-	-
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	71.447.000,00	71.389.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	42.699.800,00	22.699.800,00	-	-	-	-	-	-
2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	42.699.800,00	22.699.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.15.04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	42.699.800,00	22.699.800,00	-	-	-	-	-	-
2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	2.171.048.605,00	2.118.147.658,00	435.592.378,00	435.257.630,00	-	-	-	-
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.237.745.005,00	1.200.882.118,00	26.958.000,00	26.958.000,00	-	-	-	-
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.628.000,00	20.624.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.628.000,00	20.624.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	913.769.748,00	878.005.120,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	820.289.748,00	784.555.120,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.480.000,00	93.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.404.000,00	92.325.000,00	26.958.000,00	26.958.000,00	-	-	-	-
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.366.000,00	7.366.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	26.958.000,00	26.958.000,00	-	-	-	-
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.273.000,00	18.272.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.547.000,00	8.547.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.920.000,00	9.915.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.678.000,00	46.605.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.778.050,00	119.578.478,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.132.000,00	8.115.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.271.050,00	57.222.478,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.920.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.455.000,00	46.441.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.165.207,00	90.349.520,00	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.165.207,00	90.349.520,00	-	-	-	-	-	-
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	360.772.000,00	351.993.591,00	380.919.378,00	380.584.630,00	-	-	-	-
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	360.772.000,00	351.993.591,00	380.919.378,00	380.584.630,00	-	-	-	-
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	279.680.000,00	271.144.741,00	380.919.378,00	380.584.630,00	-	-	-	-
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	52.007.000,00	51.865.700,00	-	-	-	-	-	-
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	29.085.000,00	28.983.150,00	-	-	-	-	-	-
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	572.531.600,00	565.271.949,00	27.715.000,00	27.715.000,00	-	-	-	-
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	572.531.600,00	565.271.949,00	27.715.000,00	27.715.000,00	-	-	-	-
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	28.881.000,00	28.687.750,00	-	-	-	-	-	-
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	43.126.000,00	42.308.799,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	500.524.600,00	494.275.400,00	27.715.000,00	27.715.000,00	-	-	-	-
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.361.435.632,00	2.297.814.019,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.738.535.782,00	1.710.176.669,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.006.000,00	22.996.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.548.000,00	12.543.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.458.000,00	10.453.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.425.897.582,00	1.400.307.121,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.311.219.282,00	1.287.133.821,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.560.000,00	93.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.118.300,00	20.113.300,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.954.000,00	138.269.800,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.159.000,00	3.159.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.175.000,00	134.090.800,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.672.800,00	101.668.008,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.264.800,00	11.260.008,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.408.000,00	90.408.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.005.400,00	46.935.740,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.545.400,00	45.475.740,00	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50.534.000,00	49.784.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.534.000,00	49.784.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.534.000,00	49.784.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	28.881.700,00	28.641.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.881.700,00	28.641.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	28.881.700,00	28.641.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	400.799.850,00	374.000.550,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	237.235.600,00	214.946.300,00	-	-	-	-	-	-
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	237.235.600,00	214.946.300,00	-	-	-	-	-	-
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	163.564.250,00	159.054.250,00	-	-	-	-	-	-
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	163.564.250,00	159.054.250,00	-	-	-	-	-	-
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25.044.300,00	21.539.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.044.300,00	21.539.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.044.300,00	21.539.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	27.202.000,00	26.725.600,00	-	-	-	-	-	-
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	27.202.000,00	26.725.600,00	-	-	-	-	-	-
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	27.202.000,00	26.725.600,00	-	-	-	-	-	-
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	90.438.000,00	86.947.200,00	-	-	-	-	-	-
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	90.438.000,00	86.947.200,00	-	-	-	-	-	-
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	90.438.000,00	86.947.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	PENANAMAN MODAL	2.259.442.131,00	2.106.090.269,00	32.000.000,00	25.574.000,00	-	-	-	-
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.627.903.031,00	1.599.786.369,00	25.000.000,00	18.574.000,00	-	-	-	-
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.973.000,00	17.968.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.895.000,00	2.895.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.078.000,00	15.073.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.315.946.058,00	1.296.898.843,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.232.715.058,00	1.220.507.843,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.632.000,00	73.792.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.479.000,00	1.479.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.059.000,00	5.059.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.059.000,00	5.059.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.463.900,00	173.402.482,00	25.000.000,00	18.574.000,00	-	-	-	-
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.561.000,00	1.561.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.174.000,00	1.724.000,00	25.000.000,00	18.574.000,00	-	-	-	-
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.120.000,00	7.120.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.450.900,00	3.450.900,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.976.000,00	2.968.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.282.000,00	155.678.582,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.658.423,00	28.966.972,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.281.000,00	1.281.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.579.423,00	13.977.972,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.608.000,00	11.608.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.802.650,00	77.491.072,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.222.650,00	74.414.072,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.580.000,00	3.077.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	23.782.000,00	16.872.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	23.782.000,00	16.872.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	23.782.000,00	16.872.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	78.909.000,00	68.660.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	78.909.000,00	68.660.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	78.909.000,00	68.660.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	124.769.000,00	109.949.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	124.769.000,00	109.949.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.914.000,00	87.120.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	23.855.000,00	22.829.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	388.653.900,00	297.393.900,00	-	-	-	-	-	-
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	388.653.900,00	297.393.900,00	-	-	-	-	-	-
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	63.008.500,00	59.821.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	238.176.000,00	191.369.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	87.469.400,00	46.203.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	15.425.200,00	13.428.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.425.200,00	13.428.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.425.200,00	13.428.200,00	-	-	-	-	-	-
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.486.195.430,00	4.430.170.779,63	128.216.000,00	128.190.750,00	-	-	-	-
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.383.076.000,00	1.367.002.298,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.234.500,00	20.058.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.543.500,00	12.397.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.551.000,00	1.521.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.140.000,00	6.140.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.167.054.350,00	1.155.531.024,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.056.374.350,00	1.044.894.124,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.680.000,00	110.636.900,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.203.000,00	5.171.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.203.000,00	5.171.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.400.000,00	116.018.274,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.464.000,00	7.449.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.058.000,00	2.058.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.550.000,00	16.548.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.318.000,00	88.953.274,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.397.150,00	10.590.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	331.000,00	331.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.416.150,00	6.609.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.787.000,00	59.633.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.279.000,00	57.125.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.508.000,00	2.508.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	403.252.000,00	376.528.160,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	403.252.000,00	376.528.160,00	-	-	-	-	-	-
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	13.974.000,00	13.974.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	389.278.000,00	362.554.160,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.330.909.430,00	2.317.850.722,63	128.216.000,00	128.190.750,00	-	-	-	-
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.111.459.300,00	1.105.795.850,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	185.494.000,00	179.830.550,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	475.965.300,00	475.965.300,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	546.971.530,00	544.450.400,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	81.645.400,00	79.211.400,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	465.326.130,00	465.239.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	103.000.000,00	103.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	103.000.000,00	103.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	569.478.600,00	564.604.472,63	128.216.000,00	128.190.750,00	-	-	-	-
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	220.863.000,00	219.169.200,00	-	-	-	-	-	-
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	348.615.600,00	345.435.272,63	128.216.000,00	128.190.750,00	-	-	-	-
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	368.958.000,00	368.789.599,00	-	-	-	-	-	-
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	368.958.000,00	368.789.599,00	-	-	-	-	-	-
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	368.958.000,00	368.789.599,00	-	-	-	-	-	-
2.20	STATISTIK	117.948.000,00	117.601.000,00	-	-	-	-	-	-
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	117.948.000,00	117.601.000,00	-	-	-	-	-	-
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	117.948.000,00	117.601.000,00	-	-	-	-	-	-
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	91.345.000,00	91.175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	26.603.000,00	26.426.000,00	-	-	-	-	-	-
2.21	PERSANDIAN	28.769.000,00	28.762.900,00	-	-	-	-	-	-
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	28.769.000,00	28.762.900,00	-	-	-	-	-	-
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.769.000,00	28.762.900,00	-	-	-	-	-	-
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.769.000,00	28.762.900,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.22	KEBUDAYAAN	243.060.000,00	242.950.000,00	1.633.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	91.678.000,00	91.628.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.678.000,00	91.628.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	91.678.000,00	91.628.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	151.382.000,00	151.322.000,00	1.633.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	151.382.000,00	151.322.000,00	1.633.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	151.382.000,00	151.322.000,00	1.633.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-
2.23	PERPUSTAKAAN	1.849.881.864,00	1.827.522.672,00	3.616.547.100,00	3.616.344.100,00	-	-	-	-
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.436.975.064,00	1.419.692.960,00	50.251.000,00	50.060.000,00	-	-	-	-
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.315.800,00	24.283.800,00	23.195.000,00	23.016.000,00	-	-	-	-
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.985.000,00	18.968.000,00	23.195.000,00	23.016.000,00	-	-	-	-
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.330.800,00	5.315.800,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.241.737.424,00	1.227.620.040,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.152.909.424,00	1.138.802.040,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.740.000,00	64.740.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.146.000,00	14.136.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.942.000,00	9.942.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.417.000,00	6.417.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.417.000,00	6.417.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.114.000,00	103.328.120,00	16.329.000,00	16.317.000,00	-	-	-	-
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	16.302.000,00	16.290.000,00	-	-	-	-
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.992.000,00	6.992.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.780.000,00	4.780.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.808.000,00	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.614.000,00	87.076.120,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.727.000,00	10.727.000,00	-	-	-	-
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	10.727.000,00	10.727.000,00	-	-	-	-
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.247.840,00	9.999.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.025.840,00	7.891.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.222.000,00	2.108.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.143.000,00	48.045.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.143.000,00	48.045.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	402.640.800,00	401.433.712,00	3.566.296.100,00	3.566.284.100,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	328.543.800,00	327.346.712,00	515.610.000,00	515.610.000,00	-	-	-	-
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	270.673.000,00	270.150.086,00	515.610.000,00	515.610.000,00	-	-	-	-
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	57.870.800,00	57.196.626,00	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.097.000,00	74.087.000,00	3.050.686.100,00	3.050.674.100,00	-	-	-	-
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	37.088.000,00	37.078.000,00	13.223.000,00	13.211.000,00	-	-	-	-
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.018.917.100,00	3.018.917.100,00	-	-	-	-
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	37.009.000,00	37.009.000,00	18.546.000,00	18.546.000,00	-	-	-	-
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	10.266.000,00	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	10.266.000,00	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.266.000,00	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	KEARSIPAN	186.704.000,00	185.259.657,00	12.827.000,00	12.800.000,00	-	-	-	-
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	162.703.900,00	161.349.557,00	12.827.000,00	12.800.000,00	-	-	-	-
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	55.863.700,00	55.388.100,00	12.827.000,00	12.800.000,00	-	-	-	-
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	38.690.900,00	38.215.300,00	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	17.172.800,00	17.172.800,00	12.827.000,00	12.800.000,00	-	-	-	-
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	106.840.200,00	105.961.457,00	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	106.840.200,00	105.961.457,00	-	-	-	-	-	-
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	24.000.100,00	23.910.100,00	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	24.000.100,00	23.910.100,00	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	24.000.100,00	23.910.100,00	-	-	-	-	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25.300.235.159,00	25.888.885.444,94	2.123.161.012,00	2.063.663.603,51	-	-	-	-
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.847.831.663,00	3.759.456.287,94	7.850.000,00	7.850.000,00	-	-	-	-
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.411.241.363,00	1.394.196.148,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.489.300,00	46.474.300,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.802.600,00	21.802.600,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.686.700,00	24.671.700,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.155.283.743,00	1.141.700.111,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.066.607.743,00	1.053.110.111,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.560.000,00	82.560.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.005.000,00	1.005.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.111.000,00	5.025.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.345.700,00	61.539.700,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.605.000,00	3.605.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.890.000,00	21.365.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.209.700,00	6.209.700,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.863.000,00	5.850.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.778.000,00	24.510.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.952.720,00	85.791.052,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.652.720,00	82.491.052,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.169.900,00	58.690.985,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.369.900,00	53.215.985,00	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	5.475.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	452.527.500,00	451.877.270,00	7.850.000,00	7.850.000,00	-	-	-	-
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	389.718.000,00	389.132.770,00	-	-	-	-	-	-
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	389.718.000,00	389.132.770,00	-	-	-	-	-	-
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	62.809.500,00	62.744.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	-	-	-	-
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	62.809.500,00	62.744.500,00	7.850.000,00	7.850.000,00	-	-	-	-
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.680.480.800,00	1.610.284.369,94	-	-	-	-	-	-
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	69.999.800,00	68.323.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	30.000.000,00	29.970.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	10.000.000,00	9.105.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	29.999.800,00	29.248.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.610.481.000,00	1.541.961.369,94	-	-	-	-	-	-
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	987.481.000,00	982.154.669,94	-	-	-	-	-	-
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	623.000.000,00	559.806.700,00	-	-	-	-	-	-
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	303.582.000,00	303.098.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	24.029.000,00	23.819.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	24.029.000,00	23.819.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	279.553.000,00	279.279.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	279.553.000,00	279.279.500,00	-	-	-	-	-	-
3.26	PARIWISATA	3.055.673.110,00	2.989.935.340,00	1.765.721.350,00	1.681.973.941,51	-	-	-	-
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.596.365.410,00	1.577.721.890,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.573.000,00	14.555.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.400.000,00	9.382.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.173.000,00	5.173.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.411.976.010,00	1.399.915.340,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.321.848.610,00	1.309.787.940,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.861.000,00	85.861.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.266.400,00	4.266.400,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.998.000,00	34.390.800,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.017.000,00	1.017.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.559.000,00	1.559.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.902.000,00	9.902.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.110.000,00	5.050.800,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.080.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.990.000,00	8.982.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.333.500,00	77.601.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	197.000,00	197.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.376.500,00	8.804.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000,00	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.484.900,00	51.259.750,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.984.900,00	51.259.750,00	-	-	-	-	-	-
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	158.300.000,00	157.984.600,00	1.765.721.350,00	1.681.973.941,51	-	-	-	-
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	143.648.000,00	143.332.600,00	1.765.721.350,00	1.681.973.941,51	-	-	-	-
3.26.02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	138.718.000,00	138.412.600,00	1.765.721.350,00	1.681.973.941,51	-	-	-	-
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.930.000,00	4.920.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	14.652.000,00	14.652.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	10.151.000,00	10.151.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	4.501.000,00	4.501.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	387.023.800,00	384.538.250,00	-	-	-	-	-	-
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	387.023.800,00	384.538.250,00	-	-	-	-	-	-
3.26.03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	317.600.800,00	317.145.650,00	-	-	-	-	-	-
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	69.423.000,00	67.392.600,00	-	-	-	-	-	-
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	109.077.000,00	109.077.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	98.228.000,00	98.228.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	98.228.000,00	98.228.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10.849.000,00	10.849.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.04.2.02.01	Pengembangan Riset	10.849.000,00	10.849.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	804.906.900,00	760.613.600,00	-	-	-	-	-	-
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	804.906.900,00	760.613.600,00	-	-	-	-	-	-
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	793.536.900,00	749.243.600,00	-	-	-	-	-	-
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	11.370.000,00	11.370.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	PERTANIAN	17.004.223.186,00	16.234.326.238,00	140.497.017,00	139.747.017,00	-	-	-	-
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.494.263.426,00	11.287.864.053,00	73.183.000,00	72.683.000,00	-	-	-	-
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.642.800,00	96.111.800,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.642.800,00	96.111.800,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.627.293.126,00	10.466.009.475,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.419.295.226,00	10.258.525.475,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.680.000,00	91.680.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	116.317.900,00	115.804.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.027.400,00	178.890.103,00	4.000.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.826.000,00	5.826.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.230.000,00	34.230.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.304.400,00	11.362.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.667.000,00	127.471.503,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	69.183.000,00	69.183.000,00	-	-	-	-
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	69.183.000,00	69.183.000,00	-	-	-	-
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.538.400,00	258.603.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.523.400,00	24.113.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.490.000,00	9.490.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.761.700,00	288.249.175,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.618.100,00	122.890.027,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.712.600,00	7.696.470,00	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.431.000,00	157.662.678,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.367.539.700,00	3.174.682.527,00	57.940.000,00	57.690.000,00	-	-	-	-
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.352.849.600,00	2.183.338.212,00	57.940.000,00	57.690.000,00	-	-	-	-
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	58.382.000,00	44.428.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.294.467.600,00	2.138.910.212,00	57.940.000,00	57.690.000,00	-	-	-	-
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	524.691.100,00	514.849.210,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	380.999.350,00	376.170.460,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	115.243.500,00	110.230.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	28.448.250,00	28.448.250,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	489.999.000,00	476.495.105,00	-	-	-	-	-	-
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	489.999.000,00	476.495.105,00	-	-	-	-	-	-
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	682.500.660,00	493.258.200,00	9.374.017,00	9.374.017,00	-	-	-	-
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	151.702.000,00	10.038.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	151.702.000,00	10.038.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	501.413.660,00	458.894.000,00	9.374.017,00	9.374.017,00	-	-	-	-
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	50.263.660,00	21.805.000,00	9.374.017,00	9.374.017,00	-	-	-	-
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	451.150.000,00	437.089.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	29.385.000,00	24.326.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.03.2.04.01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	14.985.000,00	9.926.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.03.2.04.02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	633.000.200,00	473.550.458,00	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	534.609.200,00	375.584.458,00	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	534.609.200,00	375.584.458,00	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	75.831.000,00	75.416.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	54.465.000,00	54.420.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21.366.000,00	20.996.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	22.560.000,00	22.550.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	22.560.000,00	22.550.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	826.919.200,00	804.971.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	826.919.200,00	804.971.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	726.920.200,00	705.805.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	99.999.000,00	99.166.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	PERDAGANGAN	261.736.500,00	222.901.103,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	16.499.000,00	14.469.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16.499.000,00	14.469.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.989.000,00	2.989.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13.510.000,00	11.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80.249.000,00	65.813.755,00	-	-	-	-	-	-
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	80.249.000,00	65.813.755,00	-	-	-	-	-	-
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	80.249.000,00	65.813.755,00	-	-	-	-	-	-
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.988.500,00	142.618.348,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	164.988.500,00	142.618.348,00	-	-	-	-	-	-
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	73.094.500,00	58.016.848,00	-	-	-	-	-	-
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	91.894.000,00	84.601.500,00	-	-	-	-	-	-
3.31	PERINDUSTRIAN	870.226.100,00	868.267.300,00	194.092.645,00	194.092.645,00	-	-	-	-
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	836.053.100,00	834.094.300,00	178.265.645,00	178.265.645,00	-	-	-	-
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	836.053.100,00	834.094.300,00	178.265.645,00	178.265.645,00	-	-	-	-
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	136.053.100,00	134.094.300,00	178.265.645,00	178.265.645,00	-	-	-	-
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	34.173.000,00	34.173.000,00	15.827.000,00	15.827.000,00	-	-	-	-
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	34.173.000,00	34.173.000,00	15.827.000,00	15.827.000,00	-	-	-	-
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	34.173.000,00	34.173.000,00	15.827.000,00	15.827.000,00	-	-	-	-
3.32	TRANSMIGRASI	260.544.600,00	1.813.999.176,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	1.557.398.043,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	53.350.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	27.484.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	25.866.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.322.801.606,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.242.778.606,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	74.397.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	5.626.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4.940.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.940.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	79.353.900,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	1.462.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	10.216.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	10.039.100,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	13.379.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	44.257.800,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.690.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
3.32.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.690.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	29.883.372,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.260.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	3.996.372,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	2.190.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	22.437.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	65.379.165,00	-	-	-	-	-	-
3.32.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	65.379.165,00	-	-	-	-	-	-
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	220.715.800,00	217.529.933,00	-	-	-	-	-	-
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	220.715.800,00	217.529.933,00	-	-	-	-	-	-
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	90.752.000,00	89.929.166,00	-	-	-	-	-	-
3.32.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	90.546.800,00	88.521.267,00	-	-	-	-	-	-
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	39.417.000,00	39.079.500,00	-	-	-	-	-	-
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	39.828.800,00	39.071.200,00	-	-	-	-	-	-
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	39.828.800,00	39.071.200,00	-	-	-	-	-	-
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	39.828.800,00	39.071.200,00	-	-	-	-	-	-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	36.670.910.501,00	34.879.124.690,00	180.070.539,00	179.071.322,00	-	-	-	-
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	17.272.119.655,00	16.449.624.918,00	90.070.539,00	89.286.590,00	-	-	-	-
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.329.522.255,00	11.847.851.944,00	90.070.539,00	89.286.590,00	-	-	-	-
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.913.000,00	33.780.350,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.455.000,00	32.334.350,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	238.000,00	234.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	367.000,00	367.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	233.000,00	225.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.866.868.000,00	4.833.936.885,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.430.184.000,00	4.407.316.485,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.116.000,00	85.696.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	347.568.000,00	340.924.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.020.000,00	18.065.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.391.000,00	13.436.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.629.000,00	4.629.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.600.000,00	44.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.600.000,00	44.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	574.942.000,00	474.111.506,00	40.218.949,00	40.100.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.927.000,00	27.854.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.690.000,00	1.690.000,00	40.218.949,00	40.100.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.512.000,00	65.297.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.375.000,00	32.000.050,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.896.000,00	17.952.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	120.780.000,00	120.571.018,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.762.000,00	208.747.438,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	40.336.590,00	40.336.590,00	-	-	-	-
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	9.270.000,00	9.270.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	31.066.590,00	31.066.590,00	-	-	-	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.892.916.850,00	1.868.492.465,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.499.200,00	54.904.550,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.173.890.650,00	1.164.350.965,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.607.000,00	75.838.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	584.920.000,00	573.398.950,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.002.212,00	1.051.596.084,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	348.729.867,00	340.823.823,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	511.883.345,00	485.760.952,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.150.000,00	36.810.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.239.000,00	188.201.309,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.619.666.943,00	1.612.256.798,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	163.703.193,00	159.254.982,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	83.000.000,00	83.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.372.963.750,00	1.370.001.816,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.642.595.550,00	1.629.866.917,00	2.515.000,00	2.515.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	661.545.000,00	661.543.513,00	2.515.000,00	2.515.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	669.417.550,00	669.256.904,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	311.633.000,00	299.066.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	329.332.300,00	128.342.439,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	281.933.800,00	85.586.739,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	26.625.500,00	26.436.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	20.773.000,00	16.319.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	215.665.400,00	152.803.500,00	7.000.000,00	6.335.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	53.309.000,00	36.699.000,00	7.000.000,00	6.335.000,00	-	-	-	-
4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	55.753.000,00	37.291.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	106.603.400,00	78.813.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.848.715.400,00	3.685.335.910,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	592.771.900,00	438.826.779,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	48.882.000,00	35.432.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	161.005.000,00	64.620.289,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	382.884.900,00	338.774.490,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.940.535.600,00	2.931.620.925,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.118.808.600,00	2.115.305.725,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	24.923.000,00	19.763.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	796.804.000,00	796.552.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	315.407.900,00	314.888.206,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	141.926.000,00	141.916.437,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	153.892.000,00	153.381.869,00	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	19.589.900,00	19.589.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.093.882.000,00	916.437.064,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	280.977.000,00	176.646.363,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8.000.000,00	2.710.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	213.377.000,00	135.756.363,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	59.600.000,00	38.180.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	141.698.000,00	140.914.192,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.02.01	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	22.545.000,00	22.545.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	62.285.000,00	62.090.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	56.868.000,00	56.279.192,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	523.037.000,00	500.821.509,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	312.551.000,00	312.261.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	73.826.000,00	72.925.477,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	136.660.000,00	115.635.032,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	148.170.000,00	98.055.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	41.000.000,00	22.675.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	32.500.000,00	15.330.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	74.670.000,00	60.050.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	SEKRETARIAT DPRD	19.398.790.846,00	18.429.499.772,00	90.000.000,00	89.784.732,00	-	-	-	-
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.111.273.846,00	11.716.736.859,00	90.000.000,00	89.784.732,00	-	-	-	-
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.184.451.800,00	1.134.287.405,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.066.721.800,00	1.032.637.405,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.480.000,00	96.400.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.216.000,00	60.997.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	146.216.000,00	60.997.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.887.000,00	198.817.122,00	90.000.000,00	89.784.732,00	-	-	-	-
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.101.000,00	4.099.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.380.000,00	3.380.000,00	90.000.000,00	89.784.732,00	-	-	-	-
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.266.000,00	56.279.455,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.492.000,00	40.484.667,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.744.000,00	3.744.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.904.000,00	90.830.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.580.000,00	213.884.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.080.000,00	53.386.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.500.000,00	160.498.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.418.400,00	597.541.344,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	716.231.400,00	584.101.344,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.700.000,00	9.700.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.487.000,00	3.740.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.605.982.646,00	9.486.489.988,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.111.582.646,00	8.994.564.988,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	494.400.000,00	491.925.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	19.288.000,00	19.270.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	19.288.000,00	19.270.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.287.517.000,00	6.712.762.913,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	689.399.000,00	460.642.690,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	559.629.000,00	437.297.890,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	63.480.000,00	10.076.800,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	53.690.000,00	668.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	697.150.000,00	649.700.984,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	27.160.000,00	26.760.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.640.000,00	43.370.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	229.335.000,00	199.132.095,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	205.581.000,00	191.080.089,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	191.434.000,00	189.358.800,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	209.171.000,00	138.736.436,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	164.361.000,00	122.566.436,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	44.810.000,00	16.170.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.719.910.000,00	1.585.972.468,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.530.120.000,00	1.401.902.468,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8.500.000,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.290.000,00	670.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.511.905.000,00	2.437.478.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	132.575.000,00	97.630.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2.379.330.000,00	2.339.848.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.459.982.000,00	1.440.232.335,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.382.902.000,00	1.363.671.335,00	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	77.080.000,00	76.561.000,00	-	-	-	-	-	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	27.284.906.530,00	24.865.335.960,00	317.619.400,00	313.066.000,00	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00
5.01	PERENCANAAN	3.890.507.682,00	3.299.429.744,00	84.738.000,00	84.100.000,00	-	-	-	-
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.075.385.182,00	2.013.680.498,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.755.000,00	75.543.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.421.000,00	32.919.400,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.985.000,00	16.734.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.380.000,00	7.909.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.117.000,00	10.529.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.852.000,00	7.450.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.469.656.519,00	1.446.840.214,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.375.519,00	1.255.764.014,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144.709.000,00	139.989.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.488.000,00	14.902.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.712.000,00	11.439.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.201.000,00	17.632.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.171.000,00	7.114.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.974.000,00	17.486.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.508.000,00	6.498.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.876.000,00	5.398.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.590.000,00	5.590.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.780.000,00	1.812.400,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.780.000,00	1.812.400,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.193.000,00	321.142.160,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.740.000,00	1.739.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.201.000,00	75.395.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.700.000,00	17.605.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	77.350.000,00	72.848.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.202.000,00	153.555.160,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.025.163,00	130.021.344,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.347.163,00	48.344.344,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.678.000,00	81.677.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.001.500,00	20.834.680,00	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.001.500,00	20.834.680,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.306.530.800,00	912.221.303,00	84.738.000,00	84.100.000,00	-	-	-	-
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	869.784.800,00	535.843.493,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	33.004.400,00	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	96.412.000,00	84.598.626,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	11.220.400,00	9.784.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	31.782.300,00	24.201.350,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	73.588.900,00	61.071.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	12.592.800,00	9.751.050,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	611.184.000,00	346.436.867,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	399.001.000,00	359.869.810,00	84.738.000,00	84.100.000,00	-	-	-	-
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	21.732.000,00	16.435.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	352.648.000,00	322.874.220,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	24.621.000,00	20.560.590,00	84.738.000,00	84.100.000,00	-	-	-	-
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	37.745.000,00	16.508.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	18.635.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	19.110.000,00	16.508.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	508.591.700,00	373.527.943,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	166.895.100,00	139.818.120,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.739.000,00	2.720.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.716.300,00	5.911.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.905.200,00	30.271.520,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.410.000,00	3.075.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.270.000,00	10.940.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	91.854.600,00	86.900.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	145.926.600,00	106.501.620,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.261.000,00	39.177.620,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.596.000,00	10.310.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.321.000,00	3.880.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.246.500,00	30.471.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.654.000,00	11.520.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.848.100,00	11.143.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	195.770.000,00	127.208.203,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.548.000,00	55.664.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.883.000,00	5.846.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.956.000,00	2.686.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.940.000,00	4.638.400,00	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.742.000,00	5.520.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	99.701.000,00	52.853.003,00	-	-	-	-	-	-
5.02	KEUANGAN	18.784.091.508,00	17.178.445.771,00	230.781.400,00	227.376.000,00	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00
5.02.00	Non Program	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.00.0.00	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.790.089.975,00	12.455.717.212,00	21.354.000,00	21.354.000,00	-	-	-	-
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.943.000,00	56.668.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.660.000,00	23.236.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.283.000,00	33.432.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.072.410.006,00	11.962.892.389,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.575.155.006,00	11.498.041.389,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	472.194.000,00	455.123.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.061.000,00	9.728.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.596.324,00	159.530.907,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.251.000,00	7.130.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.005.204,00	1.341.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.535.120,00	37.622.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.726.000,00	15.890.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	40.401.000,00	9.486.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.058.000,00	87.161.307,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.539.000,00	10.539.000,00	-	-	-	-
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	10.539.000,00	10.539.000,00	-	-	-	-
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.528.245,00	204.126.930,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.072.800,00	6.112.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.455.445,00	69.014.930,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.000.000,00	129.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.612.400,00	72.498.186,00	10.815.000,00	10.815.000,00	-	-	-	-
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.552.400,00	53.693.186,00	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.060.000,00	18.805.000,00	10.815.000,00	10.815.000,00	-	-	-	-
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.918.145.700,00	2.541.070.818,00	6.090.000,00	3.090.000,00	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.535.015.500,00	1.349.439.682,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	65.163.000,00	51.456.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.735.000,00	52.866.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	18.501.000,00	15.040.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.257.000,00	7.589.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	16.846.000,00	8.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	36.270.000,00	31.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	606.817.000,00	557.767.080,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	509.032.600,00	442.113.552,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	134.094.900,00	120.869.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2.768.000,00	1.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	8.733.000,00	3.149.850,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4.347.000,00	1.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	63.451.000,00	55.988.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	862.321.800,00	761.027.516,00	6.090.000,00	3.090.000,00	-	-	-	-
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244.471.000,00	220.478.272,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.342.000,00	14.297.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	48.828.000,00	48.446.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	119.853.800,00	75.081.753,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	85.518.000,00	77.483.339,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	27.587.000,00	27.091.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.620.000,00	29.100.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	49.554.000,00	47.020.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.151.000,00	32.995.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	62.356.000,00	61.832.752,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	138.041.000,00	127.200.450,00	3.090.000,00	3.090.000,00	-	-	-	-
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	520.808.400,00	430.603.620,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	72.116.600,00	64.985.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	18.948.000,00	18.639.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	297.272.200,00	233.141.020,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	106.372.600,00	99.673.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26.099.000,00	14.165.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	-	-
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	969.758.000,00	735.465.305,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	969.758.000,00	735.465.305,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	85.354.000,00	84.591.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	44.123.000,00	39.407.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	103.341.000,00	73.092.785,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	90.398.000,00	29.288.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	156.438.000,00	146.887.820,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	148.243.000,00	143.054.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	210.945.000,00	151.066.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	66.887.000,00	41.930.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64.029.000,00	26.147.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.106.097.833,00	1.446.192.436,00	203.337.400,00	202.932.000,00	-	-	-	-
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.106.097.833,00	1.446.192.436,00	203.337.400,00	202.932.000,00	-	-	-	-
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	370.484.000,00	108.661.284,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	114.638.000,00	98.631.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9.904.000,00	9.366.000,00	139.605.400,00	139.200.000,00	-	-	-	-
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	273.247.600,00	175.503.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	255.367.000,00	222.018.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	98.023.000,00	89.171.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22.847.000,00	21.480.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	-	-
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	197.166.000,00	133.443.900,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	680.989.233,00	547.629.302,00	55.532.000,00	55.532.000,00	-	-	-	-
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	39.449.000,00	22.075.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	24.065.000,00	14.349.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.918.000,00	3.862.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	KEPEGAWAIAN	2.561.193.340,00	2.425.207.245,00	2.100.000,00	1.590.000,00	-	-	-	-
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.565.418.340,00	1.536.167.376,00	2.100.000,00	1.590.000,00	-	-	-	-
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.367.000,00	19.632.450,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.987.000,00	9.855.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.410.000,00	1.397.600,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.485.000,00	1.475.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.325.000,00	2.065.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.550.000,00	2.289.850,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.610.000,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.342.556.822,00	1.330.985.062,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.265.456.822,00	1.256.099.362,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.480.000,00	73.266.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	540.000,00	539.700,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.416.000,00	97.814.894,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.741.000,00	2.639.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.512.000,00	16.723.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.950.000,00	13.696.700,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.213.000,00	64.756.194,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.100.000,00	1.590.000,00	-	-	-	-
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	2.100.000,00	1.590.000,00	-	-	-	-
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.316.118,00	42.013.250,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	478.250,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.844.118,00	17.820.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.722.000,00	23.715.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.662.400,00	40.621.720,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.442.400,00	40.121.720,00	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	995.775.000,00	889.039.869,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	418.233.000,00	369.727.055,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.756.000,00	13.352.480,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	245.874.000,00	219.487.560,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29.887.000,00	25.760.200,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	78.107.000,00	71.101.815,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	47.609.000,00	40.025.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	157.976.000,00	112.996.718,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	86.722.000,00	48.732.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	71.254.000,00	64.263.818,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	342.112.000,00	331.491.196,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	292.112.000,00	281.491.196,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77.454.000,00	74.824.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.727.000,00	13.720.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.676.000,00	28.555.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	33.051.000,00	32.549.400,00	-	-	-	-	-	-
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.875.458.000,00	1.834.835.600,00	-	-	-	-	-	-
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.875.458.000,00	1.834.835.600,00	-	-	-	-	-	-
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.875.458.000,00	1.834.835.600,00	-	-	-	-	-	-
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.875.458.000,00	1.834.835.600,00	-	-	-	-	-	-
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	173.656.000,00	127.417.600,00	-	-	-	-	-	-
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	173.656.000,00	127.417.600,00	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	23.904.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	23.904.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	137.654.000,00	127.417.600,00	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	137.654.000,00	127.417.600,00	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	12.098.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	12.098.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.159.449.273,00	5.088.199.030,00	-	-	-	-	-	-
6.01	INSPEKTORAT	6.159.449.273,00	5.088.199.030,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.720.674.473,00	3.470.541.724,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.944.500,00	58.822.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.970.000,00	27.965.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.129.500,00	23.129.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.845.000,00	7.728.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.969.744.858,00	2.893.674.781,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.840.424.458,00	2.790.423.381,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.169.000,00	77.116.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.432.400,00	12.418.400,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.719.000,00	13.717.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.983.000,00	11.983.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.983.000,00	11.983.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274.651.000,00	124.795.978,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.140.000,00	14.390.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	259.511.000,00	110.405.978,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.555.000,00	167.464.113,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.763.000,00	1.763.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.873.000,00	4.693.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.150.000,00	14.567.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.369.000,00	126.041.113,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.493.463,00	115.355.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.297.000,00	1.297.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.839.463,00	20.221.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.357.000,00	93.837.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.302.652,00	98.446.352,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.204.900,00	78.988.600,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.990.000,00	9.350.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.107.752,00	10.107.752,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.935.795.100,00	1.285.043.648,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.371.898.000,00	869.450.648,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	227.898.000,00	125.741.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	130.300.000,00	104.355.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	392.773.000,00	203.194.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	122.552.000,00	121.823.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	181.016.000,00	141.206.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	153.185.000,00	54.808.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	164.174.000,00	118.322.648,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	563.897.100,00	415.593.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	321.322.100,00	293.868.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	242.575.000,00	121.725.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	502.979.700,00	332.613.658,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	39.118.000,00	18.153.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	31.491.000,00	18.153.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	7.627.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	463.861.700,00	314.460.658,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	91.020.000,00	67.132.382,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38.047.700,00	24.867.700,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	320.282.000,00	209.498.576,00	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14.512.000,00	12.962.000,00	-	-	-	-	-	-
7	UNSUR KEWILAYAHAN	23.075.476.083,00	22.695.788.686,00	533.783.399,00	529.396.507,00	-	-	-	-
7.01	KECAMATAN	23.075.476.083,00	22.695.788.686,00	533.783.399,00	529.396.507,00	-	-	-	-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.179.670.183,00	14.014.409.637,00	367.458.009,00	363.071.117,00	-	-	-	-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.270.400,00	253.653.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.173.400,00	155.314.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.826.000,00	14.936.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.873.000,00	13.693.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.179.000,00	16.381.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	16.615.000,00	15.085.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.202.000,00	29.521.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.402.000,00	8.722.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.193.312.398,00	12.073.026.168,00	13.544.000,00	13.544.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.825.400.898,00	10.715.961.618,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	263.111.000,00	263.088.000,00	10.866.000,00	10.866.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	831.358.500,00	822.210.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.610.000,00	4.610.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.787.000,00	79.767.000,00	2.678.000,00	2.678.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.550.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	179.055.000,00	178.449.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.440.000,00	5.440.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.188.000,00	57.556.800,00	979.000,00	979.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	47.446.000,00	46.707.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	680.000,00	680.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.700.000,00	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.343.000,00	3.810.000,00	979.000,00	979.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.890.000,00	2.720.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.354.000,00	844.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.398.000,00	8.208.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.219.000,00	2.049.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.395.000,00	5.395.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.784.000,00	764.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	733.054.236,00	721.245.528,00	300.083.209,00	297.279.117,00	-	-	-	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.471.000,00	26.453.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.586.000,00	18.519.000,00	291.501.209,00	288.697.117,00	-	-	-	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.117.000,00	6.108.000,00	8.582.000,00	8.582.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.210.400,00	105.093.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.085.700,00	86.026.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.808.000,00	2.496.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.691.136,00	9.691.136,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	37.144.000,00	36.135.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	435.941.000,00	430.723.292,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	52.851.800,00	51.269.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	51.051.800,00	49.469.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.640.326,00	383.242.861,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76.423.000,00	76.314.746,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.980.326,00	128.691.115,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.287.000,00	173.287.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.806.823,00	517.476.480,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	397.642.127,00	389.989.533,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.938.696,00	86.363.947,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.920.000,00	16.817.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.236.000,00	22.236.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.070.000,00	2.070.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	192.794.200,00	188.170.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.557.200,00	62.635.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.977.000,00	40.817.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.580.200,00	21.818.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	65.829.000,00	63.617.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	24.164.000,00	23.192.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.490.000,00	7.470.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.175.000,00	32.955.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	52.947.000,00	52.687.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	47.492.000,00	47.272.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	5.455.000,00	5.415.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.461.000,00	9.231.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.721.000,00	7.491.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.913.553.800,00	6.753.386.550,00	163.388.390,00	163.388.390,00	-	-	-	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	218.009.000,00	200.828.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	112.860.000,00	104.965.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.984.000,00	15.984.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	89.165.000,00	79.879.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.675.284.800,00	6.536.933.550,00	163.388.390,00	163.388.390,00	-	-	-	-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	426.893.000,00	423.347.001,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.233.958.800,00	2.216.252.699,00	159.938.390,00	159.938.390,00	-	-	-	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.865.581.000,00	3.748.832.350,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	-	-
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	148.852.000,00	148.501.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.260.000,00	15.625.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13.517.000,00	10.427.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.928.000,00	1.588.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.055.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.303.200,00	143.468.200,00	979.000,00	979.000,00	-	-	-	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	145.488.200,00	138.688.200,00	979.000,00	979.000,00	-	-	-	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	109.445.200,00	104.925.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36.043.000,00	33.763.000,00	979.000,00	979.000,00	-	-	-	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****	2.475.000,00	2.440.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****	2.475.000,00	2.440.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.104.722.000,00	1.084.206.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.104.722.000,00	1.084.206.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.781.000,00	1.781.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.580.000,00	1.530.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.084.430.000,00	1.072.785.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2.411.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.520.000,00	7.910.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	534.432.700,00	512.148.099,00	1.958.000,00	1.958.000,00	-	-	-	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	534.432.700,00	512.148.099,00	1.958.000,00	1.958.000,00	-	-	-	-
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.075.000,00	10.480.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	74.653.000,00	71.397.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	19.967.000,00	18.369.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.190.000,00	5.940.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.409.000,00	8.359.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13.374.000,00	11.024.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	41.922.000,00	38.306.399,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	28.184.000,00	28.024.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	46.539.000,00	44.679.000,00	979.000,00	979.000,00	-	-	-	-
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7.820.000,00	6.730.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	118.955.000,00	117.148.000,00	979.000,00	979.000,00	-	-	-	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	19.378.000,00	19.378.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	35.097.700,00	34.047.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17.610.000,00	16.360.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.889.000,00	8.379.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	59.286.000,00	58.413.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	16.084.000,00	15.114.000,00	-	-	-	-	-	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2.349.267.561,00	2.270.452.728,00	4.500.000,00	4.450.000,00	-	-	-	-
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.349.267.561,00	2.270.452.728,00	4.500.000,00	4.450.000,00	-	-	-	-
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	792.694.511,00	780.245.278,00	4.500.000,00	4.450.000,00	-	-	-	-
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.690.900,00	5.989.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.690.900,00	5.989.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	625.894.934,00	622.351.296,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	567.455.934,00	566.081.296,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.439.000,00	56.270.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.311.000,00	69.947.042,00	4.500.000,00	4.450.000,00	-	-	-	-
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	684.000,00	684.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.820.000,00	1.690.000,00	4.500.000,00	4.450.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.611.000,00	10.240.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.620.000,00	3.849.842,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.676.000,00	52.583.200,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.093.110,00	10.073.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.025.000,00	435.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.449.110,00	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.619.000,00	8.618.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.704.567,00	71.884.940,00	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.704.567,00	71.884.940,00	-	-	-	-	-	-
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	71.457.000,00	68.860.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	71.457.000,00	68.860.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	71.457.000,00	68.860.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	761.800.800,00	756.704.800,00	-	-	-	-	-	-
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	761.800.800,00	756.704.800,00	-	-	-	-	-	-
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	761.800.800,00	756.704.800,00	-	-	-	-	-	-
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	61.213.000,00	60.371.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	61.213.000,00	60.371.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	61.213.000,00	60.371.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	662.102.250,00	604.271.650,00	-	-	-	-	-	-
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	662.102.250,00	604.271.650,00	-	-	-	-	-	-
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	142.500.000,00	133.610.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	180.089.650,00	180.025.650,00	-	-	-	-	-	-
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	339.512.600,00	290.636.000,00	-	-	-	-	-	-
		511.025.944.824,00	476.000.097.333,79	125.972.561.078,00	113.999.290.488,50	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00

Lampiran II :Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 15 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2022 (Audited)	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	37.811.694.058,68	140.711.624.112,49
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	37.552.994.945,99	140.711.624.112,49
3	Subtotal (1 - 2)		258.699.112,69	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	14.344.348.568,79	37.811.694.058,68
5	Subtotal (3 + 4)		14.603.047.681,48	37.811.694.058,68
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(258.699.112,69)	-
7	Lain-lain	5.2.5	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		14.344.348.568,79	37.811.694.058,68

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2022 (Audited)	2021
1	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4		
2	PENDAPATAN -LO	5.4.1		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH -LO	5.4.1.1		
4	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	6.184.022.082,00	6.052.382.264,25
5	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	2.957.644.243,20	2.798.792.827,51
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	2.207.175.564,00	3.688.014.444,00
7	Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.4	23.881.160.172,18	23.374.715.232,96
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO (4 s.d. 7)		35.230.002.061,38	35.913.904.768,72
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2		
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO	5.4.1.2.1		
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		564.241.117.797,00	552.095.936.533,00
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		-	-
13	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	5.4.1.2.2		
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		17.095.766.009,00	14.237.835.068,00
15	Bantuan Keuangan		-	-
16	Jumlah Pendapatan Transfer -LO (11 s.d. 15)		581.336.883.806,00	566.333.771.601,00
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO	5.4.1.3		
18	Pendapatan Hibah - LO		50.287.522.249,60	285.947.670,47
19	Dana Darurat - LO		-	-
20	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO		6.019.350.048,00	15.824.910.133,00
21	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (18 s.d. 20)		56.306.872.297,60	16.110.857.803,47
22	Jumlah Pendapatan- LO (8 + 16 + 21)		672.873.758.164,98	618.358.534.173,19
23	BEBAN	5.4.2		
24	BEBAN OPERASI	5.4.2.1		
25	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	267.940.998.054,51	263.804.916.340,00
26	Beban Persediaan	5.4.2.1.2	65.509.979.574,88	60.952.675.483,16
27	Beban Jasa	5.4.2.1.3	79.609.741.598,90	80.571.174.797,41
28	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	6.424.693.701,50	13.634.746.653,70
29	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	31.121.832.328,00	25.063.927.504,00
30	Beban Bunga		-	-
31	Beban Subsidi		-	-
32	Beban Hibah	5.4.2.1.6	17.552.418.715,00	11.751.630.550,00
33	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.7	21.826.487.263,00	16.447.476.155,00
34	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.1.8	29.340.397.931,26	32.752.449.707,31
35	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.1.9	17.468.758.534,97	14.735.760.904,01
36	Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	5.4.2.1.10	64.636.131.020,67	62.088.929.877,97
37	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
38	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-
39	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.1.11	437.517.622,00	433.295.622,00
40	Beban penyisihan Piutang Pajak	5.4.2.1.12	321.995.074,34	(90.058.560,65)
41	Beban penyisihan Piutang Retribusi	5.4.2.1.13	177.285.360,00	(39.980.300,00)
42	Beban penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.2.1.14	484.605.685,83	294.108.940,90
43	Beban Penyisihan Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	5.4.2.1.15	(1.668.500,00)	127.885.222,00
44	Beban Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	5.4.2.1.16	-	33.655.000,00
45	Beban Penyisihan Dana Bergulir	5.4.2.1.17	1.980.671.970,00	1.121.615.850,50
46	Beban Lain-lain	5.4.2.1.18	572.131.113,43	1.100.496.975,00
47	Jumlah Beban Operasi (25 s.d. 46)		605.403.977.048,29	584.784.706.722,31

No.	Uraian	Reff CaLK	2022 (Audited)	2021
48	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2		
49	BEBAN BAGI HASIL			
50	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		656.442.065,00	522.000.000,00
51	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		395.578.715,00	541.000.000,00
52	BEBAN BANTUAN KEUANGAN			
53	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		43.777.804.700,00	47.266.274.600,00
54	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		-	2.182.000.000,00
55	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		-	-
56	Jumlah Beban Transfer (50 s.d. 55)		44.829.825.480,00	50.511.274.600,00
57	Jumlah Beban (47 + 56)		650.233.802.528,29	635.295.981.322,31
58	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (22-57)	5.4.2.3	22.639.955.636,69	(16.937.447.149,12)
59	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL -LO	5.4.3		
60	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
61	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
62	Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-
63	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
64	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.1	(2.655.098.417,44)	-
65	Jumlah Surplus/Defisit Non Operasional-LO (60 s/d 64)		(2.655.098.417,44)	-
66	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (51+58)		19.984.857.219,25	(16.937.447.149,12)
67	POS LUAR BIASA	5.4.4		
68	Beban Luar Biasa		-	3.700.259.187,00
69	Jumlah Beban Luar Biasa (68)		-	(3.700.259.187,00)
70	SURPLUS/DEFISIT-LO (66+69)	5.4.5	19.984.857.219,25	(20.637.706.336,12)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2022 (Audited)	2021
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	2.048.089.882.945,89	2.148.552.713.247,05
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	19.984.857.219,25	(20.637.706.336,12)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	5.6.3		
4	Koreksi Nilai Persediaan		-	-
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
6	Koreksi Ekuitas Lainnya			
7	Koreksi Ekuitas-Kas		(258.699.112,69)	-
8	Koreksi Ekuitas-Piutang		(1.229.340.930,25)	(3.913.116.062,00)
9	Koreksi Ekuitas- Persediaan		(209.416.949,34)	-
10	Koreksi Ekuitas- Aset Tetap		899.124.244,00	(7.375.560.710,67)
11	Koreksi Ekuitas- Penyusutan		(20.870.213.823,58)	(81.185.723.029,95)
12	Koreksi Ekuitas- Aset Lainnya		(7.831.457.774,79)	(8.719.334.193,72)
13	Koreksi Ekuitas- Kewajiban		14.919.599,90	21.368.610.031,30
14	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya (7 s.d. 13)		(29.485.084.746,75)	(79.825.123.965,04)
15	Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (4+5+14)		(29.485.084.746,75)	(79.825.123.965,04)
16	EKUITAS AKHIR (1+2+15)		2.038.589.655.418,39	2.048.089.882.945,89

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA
 Per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	Per 31 Desember 2022 (Audited)	Per 31 Desember 2021
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas	5.3.1.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	7.945.846.988,26	38.478.982.482,94
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	4.096.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	-
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	12.197.770.967,13	1.446.207.509,65
8	Kas Dana Kapitasi di FKTP	5.3.1.1.1.5	9.674.517,20	346.103.952,20
9	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.6	56.230.905,21	128.743.214,90
10	Setara Kas	5.3.1.1.1.7	-	-
11	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.8	83.981.178,00	66.467.216,00
12	Jumlah Kas (4 s.d. 11)		20.293.504.555,80	40.470.600.375,69
13	Piutang	5.3.1.1.2		
14	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	4.206.709.706,00	3.557.497.813,25
15	Penyisihan Piutang Pajak		(1.817.935.300,86)	(1.495.940.226,52)
16	Piutang Pajak Netto (14 - 15)		2.388.774.405,14	2.061.557.586,73
17	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	1.936.561.987,00	1.862.041.627,00
18	Penyisihan Piutang Retribusi		(1.597.414.587,00)	(1.420.129.227,00)
19	Piutang Retribusi Netto (17 -18)		339.147.400,00	441.912.400,00
20	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.3.1.1.2.3	2.568.309.530,30	1.955.283.483,00
21	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		(1.811.591.880,23)	(1.326.986.194,40)
22	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Netto (20-21)		756.717.650,07	628.297.288,60
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.4	476.668.795,00	5.252.936.088,00
24	Piutang Transfer Pemerintah Daerah	5.3.1.1.2.5	4.012.876.936,00	2.456.129.535,00
25	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.2.6	-	-
26	Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD	5.3.1.1.2.7	-	-
27	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.2.8	-	-
28	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.1.2.9	1.590.254.675,94	576.683.170,94
29	Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.10	962.779.777,33	983.554.777,33
30	Penyisihan Piutang Lainnya		(569.533.777,33)	(571.202.277,33)
31	Piutang Lain-lain Netto (29 - 30)		393.246.000,00	412.352.500,00
32	Jumlah Piutang (16+19+22+23+24+28+31)		9.957.685.862,15	11.829.868.569,27
33	Persediaan	5.3.1.1.3	18.871.472.939,04	25.096.416.410,77
34	Jumlah Aset Lancar (12+32+33)		49.122.663.356,99	77.396.885.355,73
35	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.1.4		
36	Investasi Non Permanen	5.3.1.1.5		
37	Investasi Non Permanen Lainnya			
38	Dana Pemberdayaan		9.499.438.595,00	9.561.687.730,00
39	Penyisihan Dana Pemberdayaan yang Diragukan Tertagih		(6.759.890.200,00)	(4.779.218.230,00)
40	Dana Pemberdayaan Netto (38 - 39)		2.739.548.395,00	4.782.469.500,00
41	Investasi Non Permanen Lainnya - Ternak		-	-
42	Jumlah Investasi Non Permanen (40+41)		2.739.548.395,00	4.782.469.500,00
43	Investasi Permanen	5.3.1.1.6		
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		38.699.670.000,00	33.699.670.000,00
45	Investasi Permanen Lainnya		-	-
46	Jumlah Investasi Permanen (44+45)		38.699.670.000,00	33.699.670.000,00
47	Jumlah Investasi Jangka Panjang (42+46)		41.439.218.395,00	38.482.139.500,00
48	ASET TETAP	5.3.1.2		
49	Tanah	5.3.1.2.1	777.912.254.381,71	774.938.314.381,71
50	Peralatan dan Mesin	5.3.1.2.2	285.400.295.730,04	278.652.348.623,72
51	Gedung dan Bangunan	5.3.1.2.3	553.285.552.863,66	466.199.496.896,11
52	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.2.4	1.149.850.484.372,68	1.066.398.022.301,43
53	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.2.5	28.040.548.056,58	25.999.965.556,58
54	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.2.6	46.651.771.546,01	76.170.144.650,13
55	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.2.7	(932.573.970.848,91)	(811.147.754.658,38)
56	Jumlah Aset Tetap (49 s.d. 55)		1.908.566.936.101,77	1.877.210.537.751,30

No.	Uraian	Reff CaLK	Per 31 Desember 2022 (Audited)	Per 31 Desember 2021
57	DANA CADANGAN	5.3.1.3		
58	Dana Cadangan		-	-
59	Jumlah Dana Cadangan (58)		-	-
60	ASET LAINNYA	5.3.1.4		
61	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.1	-	-
62	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.1.2	-	-
63	Tagihan Penjualan Angsuran Netto (61-62)		-	-
64	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1.3	6.407.658.794,00	7.684.309.110,01
65	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1.4	-	-
66	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (64-65)		6.407.658.794,00	7.684.309.110,01
67	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.1.5	4.707.411.220,00	4.591.691.220,00
68	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.1.6	(2.959.226.471,00)	(2.521.708.849,00)
69	Aset Tidak Berwujud Netto (67-68)		1.748.184.749,00	2.069.982.371,00
70	Aset Lain-lain	5.3.1.4.1.7	75.768.292.034,90	78.928.222.090,75
71	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.1.8	(31.993.816.982,84)	(27.184.210.284,08)
72	Aset Lain-lain Netto (67-68)		43.774.475.052,06	51.744.011.806,67
73	Aset Lain-lain - TDF-TKD	5.3.1.4.1.9	1.048.220.265,00	-
74	Jumlah Aset Lainnya (63+66+69+72+73)		52.978.538.860,06	61.498.303.287,68
75	JUMLAH ASET (34+47+56+59+74)		2.052.107.356.713,82	2.054.587.865.894,71
76	KEWAJIBAN	5.3.2		
77	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
78	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	5.949.155.987,01	2.658.906.317,01
79	Utang Bunga		-	-
80	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
81	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
82	Pendapatan Diterima Di Muka		-	-
83	Utang Belanja	5.3.2.1.2	4.833.916.498,51	32.181.000,00
84	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	2.734.628.809,91	3.806.895.631,81
85	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (78 s.d. 84)		13.517.701.295,43	6.497.982.948,82
86	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
87	Utang Kepada Pemerintah Pusat		-	-
88	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
89	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
89	Utang Kepada Masyarakat		-	-
90	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (87 s.d. 90)		-	-
91	JUMLAH KEWAJIBAN (85+90)		13.517.701.295,43	6.497.982.948,82
92	EKUITAS	5.3.1		
93	Ekuitas		2.038.589.655.418,39	2.048.089.882.945,89
94	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (91+93)		2.052.107.356.713,82	2.054.587.865.894,71

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2022 (Audited)	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.2.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		5.588.247.094,00	4.915.584.868,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		2.879.649.883,20	2.563.893.827,51
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		2.207.175.564,00	3.688.014.444,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		22.972.454.047,89	22.108.634.560,52
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		10.204.297.703,00	11.895.627.458,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		-	-
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		407.250.885.737,00	407.222.571.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		145.665.009.049,00	121.284.707.710,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		1.150.865.000,00	8.410.250.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		80.345.106.000,00	89.221.092.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		17.957.938.909,00	13.567.127.294,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi		-	-
15	Penerimaan Hibah		-	-
16	Penerimaan Dana Darurat		-	-
17	Penerimaan Lainnya		6.019.350.048,00	15.824.910.133,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 18)		702.240.979.035,09	700.702.413.295,03
20	Arus Keluar Kas			
21	Pembayaran Pegawai		267.524.611.956,00	263.787.905.340,00
22	Pembayaran Barang		169.078.523.799,79	186.246.100.112,21
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		17.552.418.715,00	11.751.630.550,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		21.844.542.863,00	16.447.476.155,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan		125.622.910.700,00	138.669.366.600,00
28	Pembayaran Tak Terduga		4.450.062.433,00	3.700.259.187,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		656.442.065,00	522.000.000,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		395.578.715,00	541.000.000,00
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 31)		607.125.091.246,79	621.665.737.944,21
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)		95.115.887.788,30	79.036.675.350,82
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2		
35	Arus Masuk Kas			
36	Pencairan Dana Cadangan		-	-
37	Penjualan atas Tanah		-	-
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		612.507.188,00	-
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
42	Penjualan Aset Lainnya		-	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		62.249.135,00	97.564.873,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s.d. 44)		674.756.323,00	97.564.873,00
46	Arus Keluar Kas			
47	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
48	Perolehan Tanah		3.059.090.000,00	-
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		13.935.502.529,00	60.974.475.110,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan		17.863.000.833,00	37.508.371.047,80
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		70.200.187.042,50	76.696.279.403,28
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		8.941.510.084,00	1.837.244.716,55
53	Perolehan Aset Lainnya		-	17.800.000,00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

No.	Uraian	Reff CaLK	2022 (Audited)	2021
55	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s.d 55)		118.999.290.488,50	182.034.170.277,63
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45- 56)		(118.324.534.165,50)	(181.936.605.404,63)
58	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.2.3		
59	Arus Masuk Kas			
60	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		36.748.695.615,52	40.118.405.735,89
61	Penerimaan Kembali Sisa UP & TU TA 2021		-	-
62	Penerimaan Kembali Sisa UP & TU TA 2022		19.071.115.039,00	27.696.172.810,00
63	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s.d. 62)		55.819.810.654,52	67.814.578.545,89
64	Arus Keluar Kas			
65	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		33.475.959.907,52	41.261.325.606,00
66	Pengeluaran UP/TUP 2022		19.071.115.039,00	27.696.172.810,00
67	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s.d 66)		52.547.074.946,52	68.957.498.416,00
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (63 - 67)		3.272.735.708,00	(1.142.919.870,11)
69	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+68)	5.5.2.4	(19.935.910.669,20)	(104.042.849.923,92)
70	Saldo Awal Kas		40.404.133.159,69	144.446.983.083,61
71	Koreksi Saldo Awal Kas		(258.699.112,69)	-
72	Saldo Kas Setelah Koreksi		40.145.434.047,00	144.446.983.083,61
73	Saldo Akhir Kas Fungsi Perbendaharaan (69+72)		20.209.523.377,80	40.404.133.159,69
74	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
75	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
76	Kas Lainnya (PFK OPD)		83.981.178,00	66.467.216,00
77	Saldo Akhir Kas Seluruhnya	5.5.2.5	20.293.504.555,80	40.470.600.375,69
78	Kas di Kas Daerah		7.945.846.988,26	38.478.982.482,94
79	Kas di Bendahara Penerimaan		-	4.096.000,00
80	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
81	Saldo Akhir Kas di BLUD		12.197.770.967,13	1.446.207.509,65
82	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi di FKTP		9.674.517,20	346.103.952,20
83	Saldo Akhir Kas Dana BOS		56.230.905,21	128.743.214,90
84	Setara Kas		-	-
85	Kas Lainnya		83.981.178,00	66.467.216,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada 1 (satu) periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas;

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen;

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi;

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*);

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja.

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.



1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- 2) Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- 3) Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
- 4) Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo anggaran lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus kas.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 5) Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- 6) Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai suatu entitas pelaporan. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo terdiri dari:

1.1.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA;
- e) Penerimaan Pembiayaan;
- f) Pengeluaran Pembiayaan;
- g) Pembiayaan Netto; dan
- h) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA).

1.1.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SiLPA/SiKPA);
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain;
- f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

Disamping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



1.1.2.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Aset Lainnya;
- h) Kewajiban jangka pendek;
- i) Kewajiban jangka panjang; dan
- j) Ekuitas.

1.1.2.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional. Penyajian laporan disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;
- c) Surplus/Defisit dari operasi;
- d) Kegiatan non operasional;
- e) Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa
- f) Pos luar biasa;
- g) Surplus/Defisit LO.

1.1.2.5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan arus kas terdiri dari :

- a) Aktivitas Operasi;
- b) Aktivitas Investasi;
- c) Aktivitas Pendanaan;
- d) Aktivitas Transitoris.

1.1.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

1.1.2.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan runtutan sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, Undang-Undang/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nagekeo disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2022, merupakan Tahun kedelapan laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi Perangkat Daerah dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sampai dengan tersaji sebagai satu entitas tunggal.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan Hukum Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo;
30. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

31. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 Nomor 67).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro;
- 2.2. Kebijakan Keuangan;
- 2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
- 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO;
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan;
- 4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
- 4.3. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
- 4.4. Kebijakan Akuntansi Transfer;
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- 4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- 4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang;
- 4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- 4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi;
- 4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- 4.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
- 4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
- 4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- 4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
- 4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan;
- 4.17. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi; dan
- 4.18. Kebijakan Akuntansi Setelah Tanggal Pelaporan;

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran;
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Saldo Anggaran Lebih;
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca;
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional;
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas;
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,05%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,97%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,314%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,22%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) untuk tahun 2022 data masih belum tersedia, dan untuk tahun 2021 sebesar 1,95%;
- f. Tingkat Inflasi (Kabupaten Nagekeo) untuk tahun 2022 data belum tersedia;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp2.346.535,00 (dalam jutaan rupiah).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 2.1

Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nagekeo

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
1	Kab/Kota (%)	12,91	12,05	-0,86
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	19,11	18,01	-5,76
3	Provinsi (%)	20,99	20,05	-0,94
4	Nasional (%)	10,14	9,54	-0,60
5	Peringkat Provinsi	4	4	0
6	Peringkat Nasional			

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nagekeo

Persentase penduduk miskin Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2021 sebesar 12,91% mengalami penurunan pada Tahun 2022. Persentase penduduk miskin turun hingga menjadi 12,05%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Nagekeo di bawah Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masih di atas Persentase penduduk miskin nasional, kondisi pandemi *Covid-19* memberikan kontribusi terbesar bertambahnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap program penanggulangan kemiskinan dan mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD). Peningkatan dukungan APBD dalam rangka mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan serta terus bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Tabel 2.2

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Nagekeo

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,73	1,30	-24,85
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	3,96	3,63	-8,33
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,59	-7,01
4	Peringkat Provinsi	4	1	3
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nagekeo

Tabel 2.3

Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nagekeo

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,32	0,24	-25,00
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	1,05	0,93	-11,43
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	-7,14
4	Peringkat Provinsi	4	1	3
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nagekeo



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 adalah sebesar 2,97%, sebagaimana dijelaskan tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nagekeo

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	0,97	2,97	2
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,77	3,54	-0,23
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	-0,63
4	Peringkat Provinsi	1	9	-8
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nagekeo

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,97%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,97% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Dengan demikian TPT Kabupaten Nagekeo lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,54% dan lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Nasional yang sebesar 5,86%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagekeo pada saat ini berada pada di urutan 7 dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada pada di urutan 109 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *Uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/ timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 adalah sebesar 0,314 poin, sebagaimana dijelaskan tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Gini Ratio Kabupaten Nagekeo

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,376	0,314	-16,489
2	Tingkat Provinsi	0,346	0,334	-3,468
3	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0
3	Peringkat Provinsi	22	12	10
4	Peringkat Nasional			

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nagekeo

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*A Long And Healthy Life*), pengetahuan (*Knowledge*), dan standar hidup layak (*Decent Standart Of Living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo realisasi pencapaian IPM Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 adalah sebesar 66,22 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel.2.6
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota	65,82	66,22	0,60
2	Provinsi	65,28	65,90	0,95
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,86
4	Peringkat Provinsi	4	4	0,00
5	Peringkat Nasional			

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nagekeo

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 adalah sebesar 66,22 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 65,82 poin mengalami peningkatan sebesar 0,60 poin. Dengan demikian IPM Kabupaten Nagekeo masih lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 65,9 dan lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional yaitu sebesar 72,91.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

IPM di Kabupaten Nagekeo pada saat ini berada pada urutan empat dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada pada urutan 405 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu, sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	1.378.671,30	1.406.360,00	1.450.124,10		
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,60	1,95			
3	Peringkat Provinsi	12	13			
4	Peringkat Nasional (Indonesia)					

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nagekeo

Selama kurun waktu tahun 2020 - 2021 perekonomian Kabupaten Nagekeo mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,95% dan pada periode Tahun 2021 – 2022 belum memiliki informasi data dari sumber data BPS kabupaten.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Nagekeo dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*Creeping Inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Perhitungan laju inflasi Kota Mbay sebagai barometer di Kabupaten Nagekeo belum bisa dilakukan karena perhitungan inflasi harus didasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK). Hal ini disebabkan karena paket komoditas barang dan jasa yang digunakan sebanyak 341 jenis komoditas sebagai basis data penghitungan IHK belum terjual secara lengkap. Untuk itu sebagai pendekatan dalam memantau perkembangan harga barang dan jasa di wilayah ini menggunakan hasil monitoring harga dari Kabupaten Sikka (Kota Maumere).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo Tingkat Inflasi Nagekeo Tahun 2022 masih belum memiliki data sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.8 berikut.

Tabel.2.8
Tingkat Inflasi Kabupaten Nagekeo

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)			
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,67	6,65	298,203
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	194,652
4	Peringkat Provinsi			
5	Peringkat Nasional			

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nagekeo

Tingkat inflasi di Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 dan 2022 menurut data BPS masih belum tersedia. Tingkat inflasi Provinsi NTT yaitu sebesar 6,65% dan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%.

2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diamati melalui beberapa indikator ekonomi makro salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Nagekeo merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah dari produk barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Nagekeo. Besaran nilai PDRB ini merupakan indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo. PDRB Kabupaten Nagekeo yang dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga yang Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada data PDRB tahun 2020 sebesar Rp2.274.078,80, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp2.346.535,00, dan tahun 2022 meningkat lagi menjadi sebesar Rp2.487.435,42.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Laju Pertumbuhannya menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (dalam juta Rupiah) terurai dalam tabel 2.9 berikut ini.

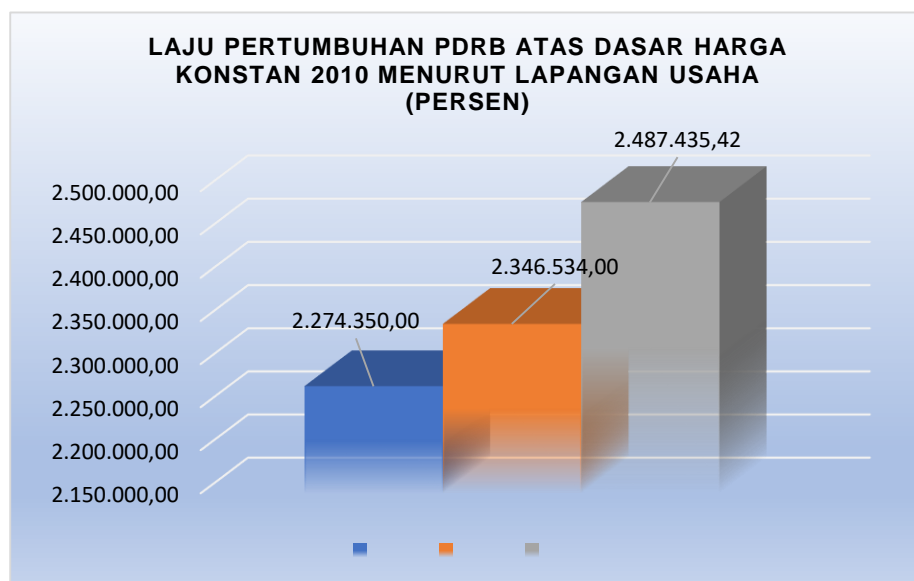


Tabel.2.9
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.179.031,00	1.221.459,00	1.320.993,04
Pertambangan dan Penggalian	14.247,00	14.767,00	15.311,91
Industri Pengolahan	37.524,00	37.553,00	40.635,82
Pengadaan Listrik dan Gas	1.045,00	1.071,00	1.196,90
Pengadaan Air, Pengelolaan.Sampah, Limbah dan Daur Ulang	218	222	227,98
Konstruksi	112.092,00	122.527,00	133.741,62
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	128.277,00	133.165,00	145.583,12
Transportasi dan Pergudangan	59.582,00	61.467,00	66.383,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.863,00	2.968,00	3.194,02
Informasi dan Komunikasi	106.857,00	111.254,00	115.815,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	35.604,00	37.551,00	40.097,69
<i>Real Estate</i>	15.334,00	15.608,00	17.210,36
Jasa Perusahaan	636	561	563,84
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	544.768,00	550.223,00	550.059,47
Jasa Pendidikan	30.795,00	30.560,00	30.691,43
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.109,00	2.288,00	2.332,77
Jasa Lainnya	3.368,00	3.290,00	3.395,82
Produk Domestik Regional Bruto	2.274.350,00	2.346.535,00	2.487.435,42

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nagekeo

Grafik 2.1
Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Nagekeo
Tahun 2020 - 2022





PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, PDRB tahun 2020 sebesar Rp1.378.043,12 tahun 2021 sebesar Rp1.406.189,55 dan tahun 2022 meningkat lagi sebesar Rp1.450.124,10.

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk persentase menunjukkan PDRB Kabupaten Nagekeo yang diukur atas dasar harga konstan selama periode 2020 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan, jika diukur dengan menggunakan harga konstan 2010, Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Harga Konstan) tahun 2020 tumbuh sebesar 0,60%, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,93%, dan tahun 2022 data belum tersedia dari sumber data BPS kabupaten Nagekeo.

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2022 pertumbuhan PDRB Kabupaten Nagekeo mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp2.369.439,81. Pada periode Tahun 2020 – Tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kabupaten Nagekeo sebesar Rp2.346.534,00 dan pada kurun waktu Tahun 2021 – Tahun 2022 pertumbuhan PDRB Kabupaten Nagekeo sebesar Rp2.487.435,42.

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUAPBD) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Kebijakan alokasi penganggaran dimaksudkan dalam rangka mencapai target RKPD Tahun 2022 yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018- 2023 dan juga mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi NTT.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi NTT, Dana Kemitraan Dunia Usaha Kerjasama, dan Kontribusi Pelaku Usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan target-target makro ekonomi tahun 2022 yang berimplikasi pada skala prioritas pembangunan daerah. Pada sisi pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja dilaksanakan berdasarkan pada prinsip *Money Follow* program prioritas yang lebih difokuskan pada 1) Pengurangan kemiskinan dan pengentasan stunting; 2) Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3)



Peningkatan sumber daya aparatur dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan formal dan non formal; 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi; 5) Peningkatan tata kelola dan optimalisasi fungsi aset daerah; 6) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata; 7) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah perkotaan dan perdesaan serta mitigasi bencana dan 8) Penegasan hak atas tanah.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Sesuai Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah; b) Pendapatan transfer, yang terbagi menjadi dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun dana transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa. Sementara dana transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

2.2.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2022

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada Tahun Anggaran 2022, antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan yang dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan



Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- f. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Untuk mendorong pertumbuhan PAD melalui peningkatan pertumbuhan investasi, Pemerintah Daerah tidak melakukan pemungutan sesuai Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Dalam meningkatkan iklim perekonomian yang kondusif Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo tidak melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun Anggaran 2021 nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 3. Hasil kerja sama daerah;
 4. Jasa giro;
 5. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 6. Pendapatan bunga;
 7. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 8. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 9. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 10. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 11. Pendapatan denda pajak daerah;
 12. Pendapatan denda retribusi daerah;
 13. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 14. Pendapatan dari pengembalian;
 15. Pendapatan dari BLUD; dan
 16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun



Anggaran 2020;

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020;
- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022;
- d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari:



1) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Nagekeo dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

2) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Kabupaten Nagekeo yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

3) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

5) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Nagekeo pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan seperti pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Perkiraan
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah/ berkurang	
		2021	2022	Rp	%
1	PENDAPATAN	723.436.149.143,00	737.915.867.966,00	14.479.718.823,00	2,00%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.860.944.530,00	52.210.826.688,00	12.349.882.158,00	30,98%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.848.118.698,00	11.319.781.170,00	6.471.662.472,00	133,49%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.686.842.489,00	13.177.405.529,00	7.490.563.040,00	131,72%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah	3.688.014.444,00	2.614.351.128,00	(1.073.663.316,00)	-29,11%



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah/ berkurang	
		2021	2022	Rp	%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	25.637.968.899,00	25.099.288.861,00	(538.680.038,00)	-2,10%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	668.060.524.613,00	679.146.119.178,00	11.085.594.565,00	1,66%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	7.870.762.265,00	7.447.456.278,00	(423.305.987,00)	-5,38%
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.116.921.325,00	1.927.011.667,00	810.090.342,00	72,53%
1.2.3	Dana Alokasi Umum	407.222.571.000,00	407.517.873.000,00	295.302.000,00	0,07%
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	131.720.881.787,00	153.109.560.143,00	21.388.678.356,00	16,24%
1.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	8.410.250.000,00	2.301.731.000,00	(6.108.519.000,00)	-72,63%
1.2.6	Dana Desa	89.221.092.000,00	80.345.106.000,00	(8.875.986.000,00)	-9,95%
1.2.7	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.498.046.236,00	26.497.381.090,00	3.999.334.854,00	17,78%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.514.680.000,00	6.558.922.100,00	(8.955.757.900,00)	-57,72%
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0
1.3.2	Dana Penyesuaian	0	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	0	0	0	0
1.3.4	Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	0	0
1.3.5	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
1.3.6	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.7	Pendapatan Lainnya	0	6.558.922.100,00	6.558.922.100,00	100,00%
1.3.8	Pendapatan Hibah Dana BOS	15.514.680.000,00	0,00	(15.514.680.000)	-100,%

Target pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp737.915.867.966,00 bertambah sebesar Rp14.479.718.823,00 atau 2,00 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp723.436.149.143,00 sumber penerimaan Pendapatan Daerah diproyeksi berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 diproyeksi sebesar Rp52.210.826.688,00 naik sebesar Rp12.349.882.158,00 atau 30,98 persen dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp39.860.944.530,00;
2. Sumber Pendapatan Transfer pada tahun 2022 diperhitungkan sebesar Rp679.146.119.178,00 naik Rp11.085.594.565,00 atau 1,66 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.514.680.000,00;
3. Pendapatan Daerah dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperhitungkan sebesar Rp6.558.922.100,00 turun sebesar Rp8.955.757.900,00 atau 57,72 persen, dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.514.680.000,00



2.2.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Upaya Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam rangka mencapai target PAD ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada;
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
3. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Peningkatan kualitas data dasar potensi pendapatan asli daerah;
9. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
10. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
11. Pembentukan UPTD Pengelola BMD sebagai ujung tombak pelayanan publik dan peningkatan PAD;
12. Peningkatan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi-instansi terkait dalam upaya peningkatan Dana Transfer;
13. Melaksanakan pembangunan sarana/fasilitas yang mendatangkan PAD melalui pembayaran retribusi;
14. Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi riil yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
15. Menerapkan *reward* dan *punishment* baik bagi wajib pajak/retribusi dan pengelola;

b) Dana Perimbangan

Upaya Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam rangka meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2021 dapat ditempuh melalui:

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa;
- 2) Menginput usulan DAK melalui Aplikasi KRISNA DAK pada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait;
- 3) Melakukan validasi data teknis dan data dukung lainnya dalam mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana DAK;
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan DAK dan DAU agar pelaksanaan lebih optimal dan tepat waktu.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Upaya Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang dapat dilakukan guna meningkatkan penerimaan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah:

- 1) Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah;
- 2) Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
- 3) Meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah, penetapan APBD tepat waktu menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) guna meningkatkan lain-lain pendapatan daerah melalui Dana Insentif Daerah (DID).

2.2.2 Belanja Daerah

2.2.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang.

Belanja daerah Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 diprioritaskan untuk 1) Pengurangan kemiskinan dan pengentasan stunting; 2) Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3) Peningkatan sumber daya aparatur dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan formal dan non formal; 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi; 5) Peningkatan tata kelola dan optimalisasi fungsi aset daerah; 6) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata serta sektor-sektor pendukung; 7) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah perkotaan dan perdesaan serta mitigasi bencana; 8) Penegasan hak atas tanah.

Pola pembelanjaan daerah Tahun 2021 diupayakan lebih akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Pengalokasian belanja daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan harus sudah dilengkapi dengan Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, Kerangka Acuan Kerja Kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis. Sehingga diharapkan Perangkat Daerah dapat secara bertahap memperbaiki kualitas perencanaan serta meningkatkan penyerapan anggaran guna menunjang tercapainya target indikator kinerja utama daerah.

Perkembangan penyerapan alokasi belanja daerah Kabupaten Nagekeo kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.11 sebagai berikut.



Tabel 2.11
Perkembangan Penyerapan Alokasi Belanja Daerah
Kabupaten Nagekeo Kurun waktu 2017-2021

Tahun	Belanja Daerah		Lebih/kurang	
	Anggaran	Realisasi	Rp	%
2017	838.522.761.259,00	736.553.625.110,00	(101.969.136.149)	87,84
2018	787.056.405.848,00	719.985.970.970,00	(67.070.434.878)	91,48
Tahun	Belanja Daerah		Lebih/kurang	
	Anggaran	Realisasi	Rp	%
2019	851.840.036.402,00	774.330.245.043,25	(77.509.791.359)	90,90
2020	838.993.725.138,00	721.550.188.332,00	(117.443.536.805)	86,00
2021	859.987.462.256,00	658.967.541.621,84	(201.019.920.634)	76,63

Berdasarkan tabel 2.11 dapat dijelaskan bahwa perkembangan penyerapan realisasi belanja daerah Kabupaten Nagekeo dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 selalu fluktuatif dengan rata-rata penyerapan anggaran belanja per tahun sebesar 86,57 persen. Hal ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Penganggaran belanja operasi dialokasikan untuk: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa; (3) belanja bunga; (4) belanja subsidi; (5) belanja hibah; dan (6) belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal belanja tersebut dapat digambarkan pada uraian dibawah ini:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dan belanja barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *Medical Check Up*, kepada:
 - 1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *Medical Check Up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
 - h) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- j) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- m) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
 - 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- n) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya dalam wilayah Kabupaten Nagekeo. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya yang tidak dapat diselenggarakan didalam wilayah Kabupaten Nagekeo dapat diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Nagekeo. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.
- o) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.
- p) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal



46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Belanja Bunga

Tidak terdapat belanja bunga pada anggaran belanja tahun 2022.

4. Belanja Subsidi

Tidak terdapat belanja bunga pada anggaran belanja tahun 2022.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

a) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nagekeo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Hibah Kabupaten Nagekeo pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksi sebesar Rp18.106.796.800,00 naik sebesar Rp6.194.855.250,00 atau 34,21 persen jika dibandingkan target Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.911.941.550,00.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksi sebesar Rp21.846.070.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.326.370.000,00 atau 0,24 persen dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp16.519.700.000,00.

Rekapitulasi rincian rencana anggaran Belanja Operasi Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021, sebagaimana pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12

Rekapitulasi Belanja Operasi TA. 2021 dan Proyeksi TA. 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah/ berkurang	
		2021	2022	Rp	%
2.1	Belanja Operasi	519.447.244.565,00	511.025.944.824,00	(8.421.299.741,00)	(1,62)%
2.1.1	Belanja Pegawai	277.077.273.965,00	276.305.411.495,00	(771.862.470,00)	(0,28)%
2.1.2	Belanja Barang	213.938.329.050,00	194.767.666.529,00	(19.170.662.521,00)	(8,96)%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	11.911.941.550,00	18.106.796.800,00	6.194.855.250,00	52,01%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.519.700.000,00	21.846.070.000,00	5.326.370.000,00	32,24%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, 2022



2.2.2.1.2 Kebijakan Belanja Tak Terduga

1. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak tersebut, meliputi:
 - a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksi sebesar Rp8.054.124.643,00 naik sebesar Rp2.102.667.827,00 atau 26,11 persen dari Anggaran 2021 sebesar Rp5.951.456.816,00.

2.2.2.1.3 Kebijakan Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Belanja bagi hasil pajak pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksi sebesar Rp9.374.467.945,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.311.467.945,00 atau 88,66 persen dari target yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.063.000.000,00.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Pemerintah kabupaten Nagekeo menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Nagekeo menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, Kabupaten memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Belanja bantuan keuangan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksi sebesar Rp125.622.910.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.046.455.900,00 atau 9,41 persen dari target yang dianggarkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp138.669.366.600,00.

Tabel 2.13
Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga & Belanja transfer
TA. 2021 dan Proyeksi TA. 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah/ berkurang	
		2021	2022	Rp	%
1.1	Belanja Tak Terduga	5.951.456.816,00	8.054.124.643,00	2.102.667.827,00	35,33%
1.1.1	Belanja Tak Terduga	5.951.456.816,00	8.054.124.643,00	2.102.667.827,00	35,33%
1.2	Belanja Transfer	139.732.366.600,00	126.674.931.480,00	(13.057.435.120,00)	(9,34)%
1.2.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	1.063.000.000,00	1.052.020.780,00	(10.979.220,00)	(1,03)%
1.2.2	Belanja Bantuan Keuangan	138.669.366.600,00	125.622.910.700,00	(13.046.455.900,00)	(9,41)%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, 2022

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*Prudential Management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA.

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.



APBD Kabupaten Nagekeo setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nagekeo mencakup:

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a) Pelampauan penerimaan PAD;
 - b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e) Penghematan belanja;
 - f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (Obligasi Daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:

- a) Persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c) Kerangka acuan kegiatan;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;
- i) Rencana pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:
 - a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- 5) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh



pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggangkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- b. Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- c. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nagekeo menganggangkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- e. Jumlah pembiayaan *netto* digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.14

Pembiayaan Daerah TA 2021 dan Proyeksi TA 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah/ berkurang	
		2021	2022	Rp	%
4	Pembiayaan				
4.1	Penerimaan Pembiayaan	141.711.624.113,00	38.811.694.059,00	(102.899.930.054,00)	(72,61)
4.1.1	Penggunaan SILPA Tahun Lalu	140.711.624.113,00	37.811.694.059,00	(102.899.930.054,00)	(72,14)
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Penyertaan Modal Pemda	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00	0,00
4.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	136.711.624.113,00	33.811.694.059,00	(102.899.930.054,00)	(75,27)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 2.15
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 dan Proyeksi TA 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah/ berkurang	
		2021	2022	Rp	%
1	PENDAPATAN	723.436.149.143,00	737.915.867.966,00	14.479.718.823,00	2,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.860.944.530,00	52.210.826.688,00	12.349.882.158,00	30,98
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.848.118.698,00	11.319.781.170,00	6.471.662.472,00	133,49
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.686.842.489,00	13.177.405.529,00	7.490.563.040,00	131,72
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah	3.688.014.444,00	2.614.351.128,00	(1.073.663.316,00)	(29,11)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	25.637.968.899,00	25.099.288.861,00	(538.680.038,00)	(2,10)
1.2	DANA PERIMBANGAN	668.060.524.613,00	679.146.119.178,00	11.085.594.565,00	1,66
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	7.870.762.265,00	7.447.456.278,00	(423.305.987,00)	(5,38)
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.116.921.325,00	1.927.011.667,00	810.090.342,00	72,53
1.2.3	Dana Alokasi Umum	407.222.571.000,00	407.517.873.000,00	295.302.000,00	0,07
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	131.720.881.787,00	153.109.560.143,00	21.388.678.356,00	16,24
1.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	8.410.250.000,00	2.301.731.000,00	(6.108.519.000,00)	(72,63)
1.2.6	Dana Desa	89.221.092.000,00	80.345.106.000,00	(8.875.986.000,00)	(9,95)
1.2.7	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.498.046.236,00	26.497.381.090,00	3.999.334.854,00	17,78
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.514.680.000,00	6.558.922.100,00	(8.955.757.900,00)	(57,72)
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Pendapatan Lainnya	0,00	6.558.922.100,00	6.558.922.100,00	100,00
1.3.8	Pendapatan Hibah Dana BOS	15.514.680.000,00	0,00	(15.514.680.000,00)	(100,00)
2	BELANJA DAERAH	860.147.773.256,00	771.727.562.025,00	(88.420.211.231,00)	(10,28)
2.1	Belanja Operasi	519.447.244.565,00	511.025.944.824,00	(8.421.299.741,00)	(1,62)
2.1.1	Belanja Pegawai	277.077.273.965,00	276.305.411.495,00	(771.862.470,00)	(0,28)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	213.938.329.050,00	194.767.666.529,00	(19.170.662.521,00)	(8,96)
2.1.3	Belanja Hibah	11.911.941.550,00	18.106.796.800,00	6.194.855.250,00	52,01
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	16.519.700.000,00	21.846.070.000,00	5.326.370.000,00	32,24
2.2	Belanja Modal	195.016.705.275,00	125.972.561.078,00	(69.044.144.197,00)	(35,40)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	3.148.590.000,00	3.148.590.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran		Bertambah/ berkurang	
		2021	2022	Rp	%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	64.477.183.609,00	17.031.320.607,00	(47.445.863.002,00)	(73,59)
2.2.3	Belanja Modal Gedung Bangunan	49.073.988.823,00	19.336.271.259,00	(29.737.717.564,00)	(60,60)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.368.300.521,00	77.033.933.712,00	(2.334.366.809,00)	(2,94)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.079.432.322,00	9.422.445.500,00	7.343.013.178,00	353,13
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	17.800.000,00	0,00	(17.800.000,00)	(1,00)
2.3	Belanja Tak Terduga	5.951.456.816,00	8.054.124.643,00	2.102.667.827,00	0,35
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.951.456.816,00	8.054.124.643,00	2.102.667.827,00	0,35
2.4	Belanja Transfer	139.732.366.600,00	126.674.931.480,00	(13.057.435.120,00)	(0,09)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.063.000.000,00	1.052.020.780,00	(10.979.220,00)	(0,01)
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	138.669.366.600,00	125.622.910.700,00	(13.046.455.900,00)	(0,09)
	SURPLUS/DEFISIT	-136.711.624.113,00	(33.811.694.059,00)	102.899.930.054,00	(0,75)
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	141.711.624.113,00	38.811.694.059,00	(102.899.930.054,00)	(72,61)
3.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	140.711.624.113,00	37.811.694.059,00	(102.899.930.054,00)	(73,13)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4 Strategi Pembiayaan daerah

Untuk mencapai target pembiayaan daerah strategi yang dilakukan antara lain: Mengoptimalkan penagihan pinjaman dana bergulir sesuai surat Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) serta bekerjasama dengan KPKNL.

2.2.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

1. Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nihil.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Pendapatan Daerah

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Pendapatan daerah Kabupaten Nagekeo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN DAERAH	784.151.338.330,89	700.702.413.295,03	702.853.486.223,09	(5,80)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.159.170.059,48	33.276.127.700,03	34.260.033.777,09	1,61
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.060.107.523,00	4.915.584.868,00	5.588.247.094,00	14,72
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.867.696.241,48	2.563.893.827,51	2.879.649.883,20	(0,46)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah	3.809.587.236,35	3.688.014.444,00	2.207.175.564,00	(35,19)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	22.421.779.058,65	22.108.634.560,52	23.584.961.235,89	2,42
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	660.135.682.458,00	651.601.375.462,00	662.574.102.398,00	0,17
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	6.514.114.523,00	9.974.863.838,00	8.033.561.355,00	5,26
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	933.322.195,00	1.920.763.620,00	2.170.736.348,00	31,46
1.2.3	Dana Alokasi Umum	412.477.821.000,00	407.222.571.000,00	407.250.885.737,00	(0,64)
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	151.055.508.740,00	121.284.707.710,00	145.665.009.049,00	(3,90)
1.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	8.410.250.000,00	1.150.865.000,00	(265,39)
1.2.6	Dana Desa	89.154.916.000,00	89.221.092.000,00	80.345.106.000,00	(5,49)
1.2.7	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	13.567.127.294,00	17.957.938.909,00	62,23



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

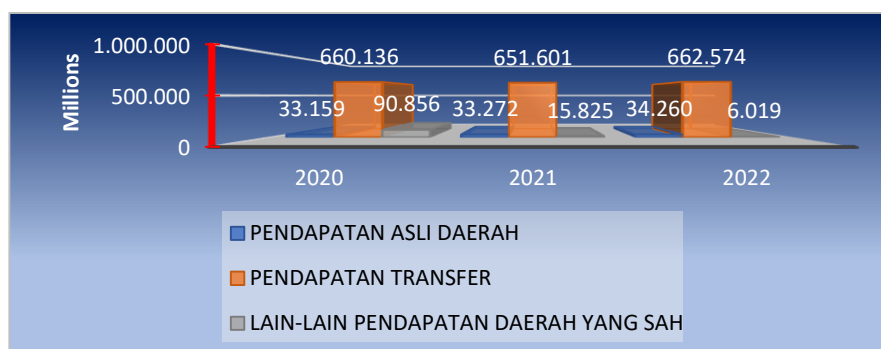
No	Uraian	Realisasi (Rp)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.856.485.813,41	15.824.910.133,00	6.019.350.048,00	(318,52)
1.3.1	Dana Penyesuaian	23.710.906.000,00	0,00	0,00	
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	15.803.314.333,41	0,00	0,00	
1.3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Pendapatan Hibah	30.673.337.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Pendapatan Lainnya	20.668.928.480,00	15.824.910.133,00	6.019.350.048,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan data realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 hingga tahun 2022 berfluktuatif. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp784.151.338.330,89, Pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp700.702.413.295,03 hal ini dikarenakan pendapatan yang bersumber dari dana transfer mengalami penurunan, sementara pada Tahun Anggaran 2022 realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan menjadi Rp702.853.486.223,09.

Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020-2022 jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan yang paling dominan bersumber dari Pendapatan Transfer disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kontribusi paling kecil terhadap pendapatan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Nagekeo masih bergantung pada Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui penerimaan dana transfer. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Nagekeo selama tahun 2020-2022 menunjukkan tren yang terus menurun, yakni sebesar (5,80)%. Adapun perkembangan kontribusi dari masing komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut.

Grafik 2.2

**Perkembangan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 – 2022**





PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian fiskal yang lebih besar. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD riil yang sistematis dan rasional. Tingginya kebutuhan fiskal daerah sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi sehingga terjadi kesenjangan fiskal (*Fiscal Gap*). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu menerapkan manajemen PAD terkait dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Untuk mengukur dan menganalisa kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Rasio Kemandirian APBD

Rasio Kemandirian APBD (otonomi fiskal) adalah rasio yang mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (*Halim, 2012*). Hasil perhitungan Rasio Kemandirian APBD disajikan pada tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Perhitungan Rasio Kemandirian APBD
Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020-2022
(Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Dana Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	2020	33.159.170.059,48	570.980.766.458,00	5,81	Rendah Sekali
2	2021	33.272.031.700,03	651.601.375.462,00	5,11	Rendah Sekali
3	2022	34.260.033.777,09	662.574.102.398,00	5,17	Rendah Sekali

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2.17 Rasio Kemandirian APBD Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020–2022 sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2020 Rasio Kemandirian APBD sebesar 5,81%, dikategorikan rendah sekali karena interval kurang dari 25%;
2. Pada Tahun Anggaran 2021 Rasio Kemandirian APBD mencapai 5,11%, jika dibandingkan dengan rasio kemandirian APBD pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar 5,81% maka Rasio Kemandirian APBD pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 0,70%. Rasio Kemandirian APBD Tahun Anggaran 2021 dikategorikan rendah sekali.
3. Pada Tahun Anggaran 2022 Rasio Kemandirian APBD mencapai 5,17%, jika dibandingkan dengan rasio kemandirian APBD pada periode Tahun Anggaran 2021 sebesar 5,11%, maka Rasio Kemandirian APBD pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,06%.

Rata-rata Rasio Kemandirian APBD Pemerintah Kabupaten Nagekeo selama periode 3 (tiga) tahun adalah sebesar 5,36%. Hasil tersebut, berdasarkan kriteria kinerja keuangan, Pemerintah Kabupaten Nagekeo masuk dalam kategori rendah sekali dan berdasarkan kategori pola hubungan dan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nagekeo masuk dalam pola hubungan Instruktif yakni peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian keuangan pemerintah daerah atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah (Halim,2001).

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal disajikan pada tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah
Kabupaten Nagekeo Tahun 2020–2022

No	Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Kemampuan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	2020	33.159.170.059,48	784.151.338.330,89	4,23	Sangat Kurang
2	2021	33.272.031.700,03	700.698.317.295,03	4,75	Sangat Kurang
3	2022	34.260.033.777,09	702.853.486.223,09	4,87	Sangat Kurang

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2.18 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020–2022 sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2020 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mencapai 4,23%, dengan kategori sangat kurang karena interval kurang dari 10%;
2. Pada Tahun Anggaran 2021 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mencapai 4,75%, jika dibandingkan dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada periode yang sama Tahun Anggaran 2020 sebesar 4,23% maka Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,52%. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2021 masih dalam kategori sangat kurang karena masih dalam rentang kurang dari 10%.
3. Pada Tahun Anggaran 2022 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mencapai 4,87% jika dibandingkan dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada periode yang sama Tahun Anggaran 2021 sebesar 4.75%, maka Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2022 masih dalam kategori sangat kurang karena masih dalam rentang kurang dari 10%.

Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Nagekeo selama periode 3 (Tiga) tahun adalah sebesar 4,62%. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi sangat besar yakni 95,38%. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam menopang Pendapatan Daerah, serta peran Pendapatan Asli Daerah atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan di bawah 10%. Upaya Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam meningkatkan kapasitas fiskal khususnya PAD dinilai belum cukup optimal. Langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam upaya meningkatkan PAD adalah dengan menghitung potensi riil PAD secara sistematis dan rasional. Kebijakan untuk meningkatkan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pendapatan Asli Daerah lebih didorong pada Pendapatan Retribusi Daerah hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah langsung berhubungan dan berdampak masyarakat pengguna layanan publik.

c. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan (*Mahmudi, 2010*). Semakin tinggi Rasio Efektivitas, maka dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Hasil perhitungan Rasio Efektivitas disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.19

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020-2022 (Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
1	2020	34.492.769.317,00	33.159.170.059,48	96,13	Sangat Efektif
2	2021	39.860.944.530,00	33.272.031.700,03	83,47	Efektif
3	2022	52.210.826.688,00	34.260.033.777,09	65,62	Efektif

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2.19 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020–2022 sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2020 Rasio Efektivitas mencapai 96.13%, dengan kategori **sangat efektif** karena berada pada rentang lebih dari 99%;
2. Pada Tahun Anggaran 2021 Rasio Efektivitas mencapai 83,47%, jika dibandingkan dengan Rasio Efektivitas pada periode yang sama Tahun Anggaran 2020 sebesar 96.13% maka Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 12,66%. Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2021 masuk dalam kategori **efektif**, karena dibawah dari 90%;
3. Pada Tahun Anggaran 2022 Rasio Efektivitas mencapai 65,62%, jika dibandingkan dengan Rasio Efektivitas pada periode yang sama Tahun Anggaran 2021 sebesar 83,47% maka Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 17,85%. Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2022 masuk dalam kategori **efektif**, karena dibawah dari 90%;

Rata-rata Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Nagekeo selama periode 3 (tiga) tahun adalah sebesar 81,74%, dengan kategori **efektif**, karena rasio efektivitas dibawah dari 90%. Tingkat efektivitas tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah bekerja efektif karena telah mampu merealisasikan PAD memenuhi target yang ditetapkan. Walaupun kalau dirinci per komponen PAD ada yang belum mencapai target yang ditetapkan.

2.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan;
- 2) Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya serta Belanja Aset Lainnya; dan
- 3) Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2020 – 2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	
1	Belanja Daerah	721.550.188.332,04	798.699.908.221,84	721.124.381.735,29	0,49
1.1	Belanja Operasi	449.625.347.694,75	478.233.112.157,21	476.000.097.333,79	2,95
1.1.1	Belanja Pegawai	245.789.204.055,00	263.787.905.340,00	267.524.611.956,00	4,37
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	193.085.593.639,75	186.246.100.112,21	169.078.523.799,79	(6,38)
1.1.3	Belanja Hibah	6.533.900.000,00	11.751.630.550,00	17.552.418.715,00	64,61
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.216.650.000,00	16.447.476.155,00	21.844.542.863,00	161,44
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Belanja Modal	117.443.332.875,29	177.034.170.277,63	114.008.290.488,50	7,57
1.2.1	Belanja Modal Tanah	1.599.807.000,00	0,00	3.059.090.000,00	(50,00)
1.2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	36.127.386.557,00	60.974.475.110,00	13.940.302.529,00	(5,89)
1.2.3	Belanja Modal Gedung Bangunan	42.102.134.755,66	37.508.371.047,80	17.863.000.833,00	(31,64)
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.120.185.161,18	76.696.279.403,28	70.200.187.042,50	59,42
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.493.819.401,45	1.837.244.716,55	8.936.710.084,00	169,63
1.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Tak Terduga	17.675.113.127,00	3.700.259.187,00	4.450.062.433,00	(29,40)
1.3.1	Belanja Tak Terduga	17.675.113.127,00	3.700.259.187,00	4.450.062.433,00	(29,40)
1.4	Belanja Transfer	136.806.394.635,00	139.732.366.600,00	126.674.931.480,00	(3,60)
1.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	496.388.926,00	1.063.000.000,00	1.052.020.780,00	56,56
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	136.310.005.709,00	138.669.366.600,00	125.622.910.700,00	(3,84)

Berdasarkan tabel 2.20 diperoleh gambaran pada periode Tahun Anggaran 2020–2022 belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,49%. Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Operasional memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 2,95%. Rata-rata pertumbuhan dari komponen Belanja Modal 7,57%



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

adalah yang paling tinggi, hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp59.590.837.407,34 dari tahun anggaran sebelumnya 2020, Belanja Tak Terduga yang mencapai (29,40%) dan Belanja Transfer sebesar 3,60%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Operasi diperoleh gambaran bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Operasi memiliki rata-rata penurunan sebesar 2,95%. Rata-rata pertumbuhan dari komponen Belanja Operasi yang paling tinggi dari Belanja Bantuan Sosial yang mencapai sebesar 161,44%, hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp21.844.542.863,00 dari sebelumnya tahun anggaran 2021 hanya sebesar Rp16.447.476.155,00 dan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.216.650.000,00.

Pengukuran kinerja keuangan suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja daerah yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja daerah semakin bagus kinerja keuangan suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Berikut ini akan dianalisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dari pos Belanja Daerah, seperti diuraikan berikut.

a. Rasio Keresasian Belanja

Rasio Keresasian Belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dengan perhitungan Rasio Keresasian Belanja yang terdiri dari Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, yang dapat disajikan berikut ini:

1. Rasio Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran atau belanja untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi disajikan pada tabel 2.21 sebagai berikut.

Tabel 2.21

Rasio Belanja Operasi

Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 – 2022

No	Tahun Anggaran	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
1	2	3	4	5
1	2020	449.625.347.694,75	584.743.793.697,04	76,89
2	2021	478.233.112.157,21	658.967.541.621,84	72,57
3	2022	476.000.097.333,79	594.449.450.255,29	80,07

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2.21 Rasio Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 – 2022 sebagai berikut:

- a. Pada Tahun Anggaran 2020 Rasio Belanja Operasional sebesar 76,89%;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- b. Pada Tahun Anggaran 2021 Rasio Belanja Operasional sebesar 72,57 %, jika dibandingkan dengan Rasio Belanja Operasional pada periode yang sama Tahun Anggaran 2020 sebesar 76,89%, maka Rasio Belanja Operasional Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 4,32%;
- c. Pada Tahun Anggaran 2022 Rasio Belanja Operasional sebesar 80,07%, jika dibandingkan dengan Rasio Belanja Operasional pada periode yang sama Tahun Anggaran 2021 sebesar 72,57% maka Rasio Belanja Operasional Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 6,57%;

Rata-Rata Rasio Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Nagekeo selama periode 3 (tiga) tahun adalah sebesar 76,51%. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Operasional dibandingkan untuk belanja langsung.

2. Rasio Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran atau belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Hasil perhitungan Rasio Belanja Modal disajikan pada tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22

Rasio Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 – 2022

No	Tahun Anggaran	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
1	2	3	4	5
1	2020	117.443.332.875,29	584.743.793.697,04	20,08
2	2021	177.034.170.277,63	658.967.541.621,84	26,87
3	2022	113.999.290.488,50	594.449.450.255,29	19,18

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2.22 Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 – 2022 sebagai berikut:

- a. Pada Tahun Anggaran 2020 Rasio Belanja Modal mencapai 20,08%;
- b. Pada Tahun Anggaran 2021 Rasio Belanja Modal mencapai 26,87%, jika dibandingkan dengan Rasio Belanja Modal pada periode yang sama Tahun Anggaran 2020 sebesar 20,08% maka Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,78%;
- c. Pada Tahun Anggaran 2022 Rasio Belanja Modal mencapai 19,18%, jika dibandingkan dengan Rasio Belanja Modal pada periode yang sama Tahun Anggaran 2021 sebesar 26,87% maka Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 7,69%;

Rata-rata Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nagekeo selama periode 3 (tiga) tahun adalah sebesar 22,04%. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo sangat sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Modal dibandingkan untuk Belanja Operasional.



3. Rasio Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atau belanja atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hasil perhitungan Rasio Belanja Tak Terduga disajikan pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23

Rasio Belanja Tak Terduga

Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 – 2022

No	Tahun Anggaran	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Tak Terduga (%)
1	2	3	4	5
1	2020	17.675.113.127,00	584.743.793.697,04	3,02
2	2021	3.700.259.187,00	658.967.541.621,84	0,56
3	2022	4.450.062.433,00	594.449.450.255,29	0,75

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2.23 Rasio Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 – 2022 sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2020 Rasio Belanja Tak Terduga mencapai 3,02%;
- Pada Tahun Anggaran 2021 Rasio Belanja Tak Terduga mencapai 0,56%, jika dibandingkan dengan Rasio Belanja Tak Terduga pada periode yang sama Tahun Anggaran 2020 sebesar 3,02% maka Rasio Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 2,46%;
- Pada Tahun Anggaran 2022 Rasio Belanja Tak Terduga mencapai 0,75%, jika dibandingkan dengan Rasio Belanja Tak Terduga pada periode yang sama Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,56% maka Rasio Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,19%;

Rata-rata Rasio Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Nagekeo selama periode 3 (tiga) tahun adalah sebesar 1,44%. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo sangat sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tak Terduga dibandingkan untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

4. Rasio Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Hasil perhitungan Rasio Belanja Transfer disajikan pada tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24 Rasio Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 – 2022

No	Tahun Anggaran	Belanja Transfer (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Transfer (%)
1	2	3	4	5
1	2020	136.806.394.635,00	584.743.793.697,04	23,40
2	2021	139.732.366.600,00	658.967.541.621,84	21,20
3	2022	126.674.931.480,00	594.449.450.255,29	21,31



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2.24 Rasio Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020 – 2022 sebagai berikut:

- a. Pada Tahun Anggaran 2020 Rasio Belanja Transfer mencapai 23,40%;
- b. Pada Tahun Anggaran 2021 Rasio Belanja Transfer mencapai 21,20%, jika dibandingkan dengan Rasio Belanja Transfer pada periode yang sama Tahun Anggaran 2020 sebesar 23,40% maka Rasio Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 2,19%;
- c. Pada Tahun Anggaran 2022 Rasio Belanja Transfer mencapai 21,31%, jika dibandingkan dengan Rasio Belanja Transfer pada periode yang sama Tahun Anggaran 2021 sebesar 21,20% maka Rasio Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,10%;

Rata-rata Rasio Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Nagekeo selama periode 3 (tiga) tahun adalah sebesar 21,97%. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Transfer lebih rendah dibandingkan untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

2.3.3 Pembiayaan Daerah

Selain Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam struktur APBD. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran yang bersumber dari selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Secara umum komponen pembiayaan daerah terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- 3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel 2.25 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 2.25
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2020 – 2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Rata-Rata Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	
4	Pembiayaan				
4.1	Penerimaan Pembiayaan	80.110.474.113,64	140.809.188.985,49	37.615.244.080,99	1,24
4.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	79.920.824.613,64	140.711.624.112,49	37.552.994.945,99	1,38
4.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	189.649.500,00	97.564.873,00	62.249.135,00	(42,38)
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	75,00
4.2.2	Penyertaan Modal Pemda	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	75,00
	Pembiayaan Netto	78.110.474.113,64	135.809.188.985,49	32.615.244.080,99	(1,06)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	140.711.624.112,49	37.809.874.058,68	14.344.348.568,79	(67,62)

Berdasarkan tabel 2.25 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan *netto* dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memiliki rata-rata pertumbuhan negatif sebesar (1,06)%. Penerimaan pembiayaan daerah memiliki rata-rata pertumbuhan positif sebesar 1,24%, Penerimaan kembali pinjaman daerah memiliki rata-rata pertumbuhan negatif yakni sebesar (42,38)%, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan daerah diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan memiliki rata-rata pertumbuhan positif sebesar 75,00%, sementara realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh gambaran rata-rata pertumbuhan negatif sebesar (67,62)%.

2.3.4 Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
2. Alokasi anggaran fungsi kesehatan sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Alokasi anggaran fungsi infrastruktur sebesar 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo

2.3.4.1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp193.987.738.275,00 dari total anggaran sebesar Rp771.727.562.025,00 atau 25,14%. Rincian alokasi anggaran fungsi pendidikan Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.26
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	189.260.565.375,00
	1) Belanja Operasi	
	a. Belanja Pegawai	137.336.078.394,00
	b. Belanja barang dan jasa	27.167.739.481,00
	c. Belanja hibah	13.894.940.000,00
	d. Belanja bantuan social	0,00
	2) Belanja Modal	10.861.807.500,00
	3) Belanja Transfer	0,00
	Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan pemerintah desa yang menunjang bidang Pendidikan	0,00
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan antara lain:	4.727.172.900,00
	1) Sub Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	786.283.000,00
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	57.870.800,00
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50.311.000,00
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.018.917.100,00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	55.555.000,00
	2) Sub Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Penyelenggaraan seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	389.278.000,00
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	368.958.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	193.987.738.275,00
3	Total Belanja Daerah	771.727.562.025,00
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,14

2.3.4.2. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Nagekeo

Alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp102.186.663.859,00 dari total



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

anggaran diluar belanja Gaji sebesar Rp557.256.988.709,00 atau 18,34%. Rincian Alokasi anggaran fungsi kesehatan Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.27

Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	101.649.429.677,00
	1) Belanja Operasi	90.217.467.319,00
	a. Belanja Pegawai	45.466.087.669,00
	b. Belanja barang dan jasa	44.451.379.650,00
	c. Belanja hibah	300.000.000,00
	d. Belanja bantuan sosial	0,00
	2) Belanja Modal	11.431.962.358,00
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain :	537.234.182,00
	1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.120.000,00
	2) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	74.984.000,00
	3) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.200,00
	4) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	109.235.000,00
	5) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	283.502.982,00
	6) Pengendalian Program KKBPK	40.017.000,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	102.186.663.859,00
3	Total Belanja Daerah	771.727.562.025,00
4	Gaji ASN	214.470.573.316,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	557.256.988.709,00
6	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	18,34

2.3.4.3. Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 menjelaskan Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Alokasi anggaran fungsi infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp256.999.702.018,00 dari total anggaran belanja dalam APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sebesar Rp731.346.168.413,00 atau 35,14%. Rincian Alokasi anggaran fungsi infrastruktur Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada Tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 2.28
Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD
1	a. Belanja Modal	
	1) Tanah	3.148.590.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	17.031.320.607,00
	3) Bangunan dan Gedung	19.336.271.259,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	77.033.933.712,00
	5) Aset Tetap Lainnya	9.422.445.500,00
	6) Aset Lainnya	0,00
	b. Belanja Pemeliharaan	10.729.168.140,00
2	a. Belanja Hibah	18.106.796.800,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	21.846.070.000,00
	c. Belanja Bantuan Keuangan	80.345.106.000,00
3	Jumlah Infrastruktur Daerah (1+2)	256.999.702.018,00
4	Belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa	731.346.168.413,00
5	Persentase Belanja Infrastruktur	35,14%



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp702.853.486.223,09 atau 95,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp737.915.867.966,00. Adapun realisasi belanja dan transfer sebesar Rp721.124.381.735,29 atau 93,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp771.727.562.025,00. Dengan demikian berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah mengalami defisit sebesar Rp(18.270.895.512,20).

Realisasi Pendapatan daerah sebesar Rp702.853.486.223,09 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	34.260.003.777,09
- Pendapatan Transfer	Rp	662.574.102.398,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	6.019.350.048,00
Jumlah	Rp	702.853.486.223,09

3.1.2. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2022

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp721.124.381.735,29 atau 93,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp771.727.562.025,00.

Realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp721.124.381.735,29 tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	476.000.097.333,79
- Belanja Modal	Rp	113.999.290.488,50
- Belanja Tak Terduga	Rp	4.450.062.433,00
- Belanja Transfer	Rp	126.674.931.480,00
Jumlah	Rp	721.124.381.735,29

3.1.3. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Ur a i a n	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.811.694.059,00	37.552.994.945,99	99,32
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	62.249.135,00	6,22



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
JumlahPenerimaan	38.811.694.059,00	37.615.244.080,99	96,92
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
JumlahPengeluaran	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	33.811.694.059,00	32.615.244.080,99	96,46

3.2. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

1. Pendapatan-LO Tahun 2022

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan sebesar Rp672.873.758.164,98 yang terdiri dari:

-Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp	35.230.002.061,38
-Pendapatan Transfer-LO	Rp	581.336.883.806,00
-Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Rp	56.306.872.297,60
Jumlah	Rp	672.873.758.164,98

2. Beban Tahun 2022

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Beban sebesar Rp650.233.802.528,29 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp605.403.977.048,29 dan Beban Transfer sebesar Rp44.829.825.480,00.

Beban Operasi sebesar Rp605.403.977.048,29 terdiri dari:

- Beban Pegawai	Rp	267.940.998.054,51
- Beban Persediaan	Rp	65.509.979.574,88
- Beban Jasa	Rp	79.609.741.598,90
- Beban Pemeliharaan	Rp	6.424.693.701,50
- Beban Perjalanan Dinas	Rp	31.121.832.328,00
- Beban Bunga	Rp	0,00
- Beban Subsidi	Rp	0,00
- Beban Hibah	Rp	17.552.418.715,00
- Beban Bantuan Sosial	Rp	21.826.487.263,00
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	29.340.397.931,26
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	17.468.758.534,97
- Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi	Rp	64.636.131.020,67



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
- Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp	0,00
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	437.517.622,00
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Rp	321.995.074,34
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	Rp	177.285.360,00
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	484.605.685,83
- Beban Penyisihan Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Rp	(1.668.500,00)
- Beban Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Rp	0,00
- Beban Penyisihan Dana Bergulir	Rp	1.980.671.970,00
- Beban Lain-lain	Rp	572.131.113,43
Jumlah	Rp	605.403.977.048,29

Adapun beban transfer Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp44.829.825.480,00 terdiri dari:

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp	656.442.065,00
- Beban Transfer Bagi Hasil Pendaanatan Lainnya	Rp	395.578.715,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp	43.777.804.700,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp	0,00
- Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	Rp	0,00
Jumlah	Rp	44.829.825.480,0

3.3. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

3.3.1. Pendapatan Daerah

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan daerah Kabupaten Nagekeo, bila dilihat dari realisasi pendapatan daerah maka secara umum tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 65,62%, namun bila dilihat dari realisasi per komponen pendapatan daerah maka terdapat beberapa komponen pendapatan daerah yang tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan antara lain sebagai berikut:

- Rendahnya permintaan masyarakat terhadap pemakaian jasa traktor pada Dinas Pangan akibat traktor tidak bisa digunakan karena rusak, tidak tersedia suku cadang dan umur ekonomisnya yang semakin tua
- Alat panen padi (*Combine Harvester*) dan traktor roda empat sering mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi secara maksimal
- Kendaraan Angkutan pada Dinas Perhubungan tidak disewakan lagi karena tidak kooperatifnya para penyewa dalam memenuhi kewajibannya.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan;
- Belum terintegrasinya pelayanan perijinan secara penuh dari persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam pengajuan perijinan;
- Rendahnya SDM yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.
- Kurang optimalnya pengawasan pengelolaan penerimaan dari hasil retribusi daerah, dalam rangka meminimalisir penyimpangan atas hasil penerimaan retribusi tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

3.3.2. Belanja Daerah dan Transfer

Penyerapan belanja dan transfer daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 93,44%. Sisa Belanja daerah yang tidak terserap disebabkan antara lain:

- a. Tidak terealisasinya beberapa kegiatan pembangunan dengan sumber dananya adalah Dana Alokasi Khusus;
- b. Kurang adanya konsistensi pada kalender kerja daerah;
- c. Kurang cermat dalam proses perencanaan kegiatan.

3.3.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah khususnya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya sangat rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam pengembalian oleh peminjam.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN

A. Pendahuluan

1. Tujuan

- a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah dan SKPD yang memiliki UPTD selaku entitas akuntansi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan UPTD, SKPD yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD, UPTD yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan basis kas.

B. Tujuan Laporan Keuangan

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
 4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo anggaran lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus kas.
 5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
 6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

C. Komponen Laporan Keuangan

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali:
 - a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah, dan SKPD/UPTD yang menerapkan PPK BLUD yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP.
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

D. Periode Pelaporan dan Ketepatan Waktu Pelaporan

1. Laporan keuangan secara lengkap disajikan dalam Laporan Tahunan, Laporan keuangan secara lengkap selain CaLK disajikan dalam Laporan Semesteran, dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara bulanan atau triwulanan.
2. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas pelaporan untuk diaudit pemeriksa eksternal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan entitas akuntansi kepada entitas pelaporan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

E. Struktur dan Isi Laporan Keuangan

1. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dengan menyajikan informasi:
 - a. nama Pemda/SKPD/UPTD;
 - b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
 - e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dengan realisasi periode sebelumnya.
 - b. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas pada halaman pertama, dan dapat diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - 1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - 2) cakupan entitas pelaporan;
 - 3) periode yang dicakup;
 - 4) mata uang pelaporan; dan
 - 5) satuan angka yang digunakan.
 - c. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
 - d. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
 - e. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh UPTD/SKPD/SKPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- f. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer;
 - 4) Surplus/defisit-LRA;
 - 5) Penerimaan pembiayaan;
 - 6) Pengeluaran pembiayaan;
 - 7) Pembiayaan *netto*; dan
 - 8) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- g. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Penjelasan lebih rinci dapat pula disajikan dalam bentuk lampiran.
- h. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- j. Berikut format Laporan Realisasi Anggaran.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil				
11	Dana Alokasi Umum				
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik				
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik				



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah				
17	Dana Desa				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya				
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil				
21	Bantuan Keuangan				
22	Jumlah Transfer Antar Daerah				
23	Total Pendapatan Transfer				
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
29	JUMLAH PENDAPATAN				
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai				
33	Belanja Barang dan Jasa				
34	Belanja Bunga				
35	Belanja Subsidi				
36	Belanja Hibah				
37	Belanja Bantuan Sosial				
38	Jumlah Belanja Operasi				
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah				
41	Belanja Peralatan dan Mesin				
42	Belanja Gedung dan Bangunan				
43	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi				
44	Belanja Aset Tetap Lainnya				
45	Belanja Aset Lainnya				
46	Jumlah Belanja Modal				
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tidak Terduga				
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga				
50	BELANJA TRANSFER				
51	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota				
52	Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Provinsi				
53	Belanja Ban. Keuangan Kota ke Desa				
54	Jumlah Belanja Transfer				
55	JUMLAH BELANJA				
56	SURPLUS (DEFISIT)-LRA				



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
57	PEMBIAYAAN				
58	Penerimaan Pembiayaan				
59	Penggunaan SiLPA				
60	Pencairan Dana Cadangan				
61	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemda Lainnya				
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga				
64	Keuangan Bank				
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga				
65	Keuangan Bukan Bank				
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat				
66	(Obligasi Daerah)				
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
69	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
70	Pengeluaran Pembiayaan				
71	Pembentukan Dana Cadangan				
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
73	Pembayaran dari Pemerintah Pusat				
74	Pembayaran dari Pemda Lainnya				
75	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bank				
76	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
	Pembayaran dari Pinjaman Masyarakat (Obligasi				
77	Daerah)				
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Lainnya				
79	Pemberian Pinjaman Daerah				
80	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
81	Jumlah Pengeluaran				
82	Pembiayaan Neto				
83	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mbay, 31 Maret 20XX
Bupati Nagekeo,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
 - 5) Lain-lain; dan
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Berikut format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Sub Total		
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Sub Total		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mbay, 31 Maret 20XX
Bupati Nagekeo,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

4. Neraca
- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 - b. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
 - c. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - d. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang- barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non-lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
 - e. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non-keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non-lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
 - f. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut:
 - 1) kas dan setara kas;
 - 2) investasi jangka pendek;
 - 3) piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain;
 - 4) persediaan;
 - 5) investasi jangka panjang;
 - 6) aset tetap;
 - 7) kewajiban jangka pendek;
 - 8) kewajiban jangka panjang; dan
 - 9) ekuitas.
 - g. Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran.
 - h. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
 - 1) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - 2) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
 - 3) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
 - i. Berikut format Neraca Pemerintah Kabupaten Nagekeo.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Kas di BLUD		
8	Kas Dana BOS		
9	Kas Dana Kapitasi FKTP		
10	Kas Lainnya		
11	Setara Kas		
12	Investasi Jangka Pendek		
13	Piutang Pajak		
14	Piutang Retribusi		
15	Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan		
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
18	Piutang Transfer Antar Daerah		
19	Piutang Lainnya		
20	Penyisihan Piutang		
21	Beban Dibayar Dimuka		
22	Persediaan		
23	Jumlah Aset Lancar		
24	Investasi Jangka Panjang		
25	Investasi Nonpermanen		
26	Investasi kepada BUMN		
27	Investasi kepada BUMD		
28	Investasi dalam Obligasi		
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
30	Dana Bergulir		
31	Jumlah Investasi Nonpermanen		
32	Investasi Permanen		
33	Penyertaan Modal Pemda		
34	Investasi Pemberian Pinjaman Daerah		
35	Jumlah Investasi Permanen		
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
37	Aset Tetap		
38	Tanah		
39	Peralatan dan Mesin		
40	Gedung dan Bangunan		
41	Jalan, Jaringan dan Irigasi		



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	20Xx-1	20Xx-2
42	Aset Tetap Lainnya		
43	Konstruksi dalam Pengerjaan		
44	Jumlah Aset Tetap-Harga Perolehan		
45	<i>Akumulasi Penyusutan</i>		
46	Jumlah Aset Tetap-Nilai Buku		
47	Dana Cadangan		
48	Dana Cadangan		
49	Jumlah Dana Cadangan		
50	Aset Lainnya		
51	Tagihan Jangka Panjang		
52	Tagihan Penjualan Angsuran		
53	Tuntutan Ganti Rugi		
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
55	Aset Tak Berwujud		
56	Aset Lain-lain		
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
59	Jumlah Aset Lainnya		
60	KEWAJIBAN		
61	Kewajiban Jangka Pendek		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
63	Utang Bunga		
64	Utang Pinjaman Jangka Pendek		
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
66	Pendapatan Diterima Dimuka		
67	Utang Belanja		
68	Utang Jangka Pendek Lainnya		
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
70	Kewajiban Jangka Panjang		
71	Utang kepada Pemerintah Pusat		
72	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bank		
73	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
74	Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)		
75	Premium (Diskonto) Obligasi		
76	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
77	Ekuitas		
78	Ekuitas		
79	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mbay, 31 Maret 20XX

Bupati Nagekeo,

(.....)



5. Laporan Operasional

- a. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- b. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- c. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - 1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - 2) cakupan entitas pelaporan;
 - 3) periode yang dicakup;
 - 4) mata uang pelaporan; dan
 - 5) satuan angka yang digunakan.
- d. Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LO;
 - 2) Beban;
 - 3) Surplus (Defisit) dari Operasi;
 - 4) Kegiatan Non Operasional;
 - 5) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
 - 6) Pos Luar Biasa;
 - 7) Surplus (Defisit)-LO.
- e. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.
- g. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
- h. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.
- i. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.
- j. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung,



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

- k. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non-lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.
- l. Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:
 - 1) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 2) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.
- m. Format Laporan Operasional disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pend. Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil				
11	Dana Alokasi Umum				
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik				
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah				
17	Dana Desa				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya				
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan (Penurunan)	%
20	Pendapatan Bagi Hasil				
21	Bantuan Keuangan				
22	Jumlah Transfer Antar Daerah				
23	Total Pendapatan Transfer				
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
29	JUMLAH PENDAPATAN				
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Beban Pegawai				
33	Beban Barang dan Jasa				
34	Beban Bunga				
35	Beban Subsidi				
36	Beban Hibah				
37	Beban Bantuan Sosial				
38	Jumlah Beban Operasi				
39	Beban Penyisihan, Penyusutan dan Amortisasi				
40	Beban Penyisihan Kerugian Piutang				
41	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
42	Beban Penyusutan Gdeung dan Bangunan				
43	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi				
44	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
45	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
46	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
47	Jlh Beban Penyisihan, Penyusutan & Amortisasi				
48	BEBAN TRANSFER				
49	Beban Bagi Hasil				
50	Beban Bantuan Keuangan				
51	Jumlah Beban Transfer				
52	BEBAN TAK TERDUGA				
53	Beban Tak Terduga				
54	JUMLAH BEBAN				
55	Surplus (Defisit) dari Operasi				
56	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
58	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
60	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
61	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional				



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan (Penurunan)	%
63	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
64	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
65	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
66	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Op.				
67	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa				
68	Pos Luar Biasa				
69	Pendapatan Luar Biasa				
70	Pendapatan Luar Biasa				
71	Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
72	Beban Luar Biasa				
73	Beban Luar Biasa				
74	Jumlah Beban Luar Biasa				
75	Jumlah Pos Luar Biasa				
76	Surplus (Defisit)-LO				

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mbay, 31 Maret 20XX
Bupati Nagekeo,

(.....)

6. Laporan Arus Kas

- a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- c. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.
- d. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- e. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - 1) Penerimaan Pajak Daerah;
 - 2) Penerimaan Retribusi Daerah;
 - 3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah;
 - 5) Dana Bagi Hasil Pajak;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 6) Dana Bagi Hasil SDA;
 - 7) Dana Alokasi Umum;
 - 8) Dana Alokasi Khusus;
 - 9) Dana Penyesuaian;
 - 10) Penerimaan Bagi Hasil Pajak;
 - 11) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
 - 12) Penerimaan Hibah;
 - 13) Penerimaan Dana Darurat;
 - 14) Penerimaan Lainnya;
 - 15) Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa;
- f. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- 1) Pembayaran Pegawai;
 - 2) Pembayaran Barang;
 - 3) Pembayaran Bunga;
 - 4) Pembayaran Subsidi;
 - 5) Pembayaran Hibah;
 - 6) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - 7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga;
 - 8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
 - 9) Pembauran Bagi Hasil Retribusi;
 - 10) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
 - 11) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.
- g. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- h. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
- 1) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - 2) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.
- j. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- k. Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut:
- 1) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 2) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
 - 3) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
 - 4) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- l. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
 - m. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
 - n. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Penerimaan dari Pencairan Dana Cadangan
 - 2) Penerimaan dari Penjualan Tanah
 - 3) Penerimaan dari Penjualan Mesin dan Peralatan
 - 4) Penerimaan dari Penjualan Gedung dan Bangunan
 - 5) Penerimaan dari Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - 6) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
 - 7) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya
 - 8) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 9) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen
 - o. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan
 - 2) Perolehan Tanah
 - 3) Perolehan Mesin dan Peralatan
 - 4) Perolehan Gedung dan Bangunan
 - 5) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi f. Perolehan Aset Tetap Lainnya
 - 6) Perolehan Aset Lainnya
 - 7) Penyertaan Modal Pemda
 - 8) Perolehan Investasi Non Permanen
 - p. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
 - q. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
 - r. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - 1) Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
 - 2) Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
 - 3) Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
 - 4) Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - 5) Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 6) Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
 - 7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - 8) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - 9) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya.
- s. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- 1) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
 - 2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
 - 3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
 - 4) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - 5) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
 - 6) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
 - 7) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - 8) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - 9) Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya.
- t. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- u. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
- v. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- w. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
- x. Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Daerah/Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya.
- 1) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya;
 - 2) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan;
 - 3) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi;
 - 4) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi;
 - 5) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya;
 - 6) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.
- y. Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
- 1) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
 - 2) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
 - a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
 - 3) Transaksi Bukan Kas
 - a) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
 - 4) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.
 - 5) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
 - 6) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.
- z. Penyajian Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung yaitu metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		
12	Penerimaan Dana Desa		
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		
14	Penerimaan Hibah		
15	Penerimaan Dana Darurat		
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
17	Jumlah Arus Masuk Kas		
18	Arus Kas Keluar		
19	Pembayaran Pegawai		
20	Pembayaran Barang dan Jasa		
21	Pembayaran Bunga		
22	Pembayaran Subsidi		
23	Pembayaran Hibah		
24	Pembayaran Bantuan Sosial		
25	Pembayaran Tak Terduga		
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kab/Kota		
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
28	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa		
29	Jumlah Arus Kas Keluar		
30	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
31	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
32	Arus Masuk Kas		
33	Pencairan Dana Cadangan		
34	Penjualan atas Tanah		
35	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
36	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
37	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		
38	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		
39	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
41	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
42	Jumlah Arus Masuk Kas		
43	Arus Keluar Kas		
44	Pembentukan Dana Cadangan		
45	Perolehan Tanah		
46	Perolehan Peralatan dan Mesin		
47	Perolehan Gedung dan Bangunan		
48	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya		



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
50	Perolehan Aset Lainnya		
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
52	Perolehan Investasi Non Permanen		
53	Jumlah Arus Keluar Kas		
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
55	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
56	Arus Masuk Kas		
57	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
58	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
59	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
60	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
61	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
62	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
63	Jumlah Arus Masuk Kas		
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bank		
66	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
67	Pembayaran dari Pinjaman Masyarakat (Obligasi Daerah)		
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Lainnya		
69	Pemberian Pinjaman Daerah		
70	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
71	Jumlah Pengeluaran		
72	Jumlah Arus Keluar Kas		
73	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
74	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
75	Arus Kas Masuk		
76	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
77	Jumlah Arus Kas Masuk		
78	Arus Kas Keluar		
79	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
80	Jumlah Arus Kas Keluar		
81	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
82	Kenaikan/Penurunan Kas		
83	Saldo Awal Kas		
84	Saldo Akhir Kas		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mbay, 31 Maret 20XX

Bupati Nagekeo,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

7. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
 - 1) Ekuitas awal
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas akhir.
- b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Berikut format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus (Defisit) LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
	Koreksi Nilai Persediaan		
	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	Lain-lain		
4	Ekuitas Akhir		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mbay, 31 Maret 20XX
 Bupati Nagekeo,

(.....)

8. Catatan atas Laporan Keuangan

- a. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
 - 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- b. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- d. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:
- 1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- e. Ilustrasi penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dengan struktur sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20x^(X-1) Dan 20x^(X-2)

1. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan
2. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
4. 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang adal dalam SAP pemerintah daerah
5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos laporan laporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 6.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Pendapatan-LO
 - 5.1.5 Beban
 - 5.1.6 Aset
 - 5.1.7 Kewajiban
 - 5.1.8 Ekuitas
 - 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
6. Penjelasan atas informasi nonkeuangan pemerintah daerah
7. Penutup

4.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.
 - b. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - c. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - d. Pendapatan-LRA juga didefinisikan sebagai penerimaan Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Klasifikasi
Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah,Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kelompok	Jenis
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
 - d. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - e. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
2. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b. Diterima oleh SKPD; atau
 - c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
3. Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti:
 - a. Pendapatan BLUD diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA SKPD/UPTD yang menerapkan BLUD;
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan notifikasi penyaluran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan yang disalurkan langsung kepada rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN di FKTP dan laporan penyaluran Dana Kapitasi JKN yang diterima dari BPJS Kesehatan melalui kepala SKPD Dinas Kesehatan.
 - c. Pendapatan Dana BOS diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penyaluran dana BOS yang diterima dari PPKD Provinsi selaku BUD Provinsi.
 - d. Pendapatan Dana Desa diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

oleh BUD berdasarkan salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN untuk penyaluran Dana Desa.

4. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:
 - a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
 - b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika wajib pajak melakukan Pembayaran pajak.
 - 2) Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.
 - c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.
 - d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan-LRA pada saat pembayaran telah diterima pada RKUD.
 - e. Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh SKPD Pelaksana maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima, dan pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh SKPD Pelaksana.
 - f. Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
 - g. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
 - h. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset tetap sejenis.

D. PENYAJIAN

1. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2xx^{x-1} Dan 2xx^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pend. Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
16	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
17	Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xx



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan (Penurunan)	%
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
22	Jumlah Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xx
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xxx	xx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xx

2. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi **dalam kode rekening**.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2xx^{x-1} dan 2xx^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
17	Dana Desa	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Jumlah Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
2. penjelasan mengenai hibah aset tetap;
3. penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;
4. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
5. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi

- a. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban.
- b. Belanja disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
- c. Beban disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).
- d. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- e. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- f. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- g. Perbedaan Beban dengan Belanja sebagai berikut:

No	Beban	Belanja
1	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
2	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

2. Klasifikasi

- a. Beban diklasifikasikan menurut ekonomi yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Beban	Kewenangan
1	Beban Pegawai	SKPD
2	Beban Barang dan Jasa	SKPD
3	Beban Bunga	PPKD
4	Beban Subsidi	PPKD
5	Beban Hibah	PPKD dan SKPD
6	Beban Bantuan Sosial	PPKD dan SKPD
7	Beban Penyisihan Piutang	SKPD
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
9	Beban Transfer	PPKD
10	Beban Lain-Lain	PPKD dan SKPD

- b. Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi, organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi meliputi klasifikasi berdasarkan jenis belanja yaitu:

No	Belanja	Kewenangan
	Belanja Operasi	
1	Belanja Pegawai	SKPD
2	Belanja Barang dan Jasa	SKPD
3	Belanja Bunga	PPKD
4	Belanja Subsidi	PPKD
5	Belanja Hibah	PPKD dan SKPD
6	Belanja Bantuan Sosial	PPKD dan SKPD
	Belanja Modal	
7	Belanja Modal Aset Tetap Tanah	SKPD
8	Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	SKPD
9	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	SKPD
10	Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	SKPD
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	SKPD
	Belanja Tak Terduga	
12	Belanja Tak Terduga	PPKD

- c. Klasifikasi organisasi meliputi klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja pada Organisasi Pengguna Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebarakan
6	Dinas Sosial
7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Pangan Daerah
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Dinas Pariwisata
20	Dinas Pertanian
21	Dinas Peternakan
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
23	Sekretariat Daerah
24	Sekretariat DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja pada Organisasi Pengguna Anggaran
25	Inspektorat
26	Badan Keuangan Daerah
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
29	Kecamatan Nangaroro
30	Kecamatan Mauponggo
31	Kecamatan Wolowae
32	Kecamatan Aesesa
33	Kecamatan Keo Tengah
34	Kecamatan Boawae
35	Kecamatan Aesesa Selatan

Perubahan klasifikasi organisasi disesuaikan dengan Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah.

B. PENGAKUAN

1. Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi.
2. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kabupaten Nagekeo menggunakan Pendekatan Beban yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
3. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU)/tambahan uang persediaan (TU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
4. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti:
 - a. Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA SKPD/UPTD yang menerapkan BLUD;
 - b. Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PA/KPA Dinas Kesehatan/FKTP.
- c. Belanja Dana BOS diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PA/KPA Dinas Pendidikan.
5. Mutasi aset ke SKPD lain dalam satu entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah tidak diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai pengurang aset dan pengurang ekuitas bagi SKPD pemberi.
 6. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
 - a. Metode pendekatan beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin seperti keperluan sehari-hari perkantoran. Dengan pendekatan beban, maka sisa persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*), diakui sebagai pengurang beban yang bersangkutan. Metode pendekatan beban diterapkan selain yang diterapkan dalam metode pendekatan aset di bawah ini.
 - b. Metode pendekatan aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai penambah persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga (*buffer stock*). Dengan pendekatan aset, maka beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.
 7. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga terakhir yang diperoleh untuk setiap jenis persediaan.
 8. Mutasi aset ke SKPD lain dalam satu entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah tidak diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai pengurang aset dan pengurang ekuitas bagi SKPD pemberi.

C. PENGUKURAN

1. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar nilai tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui PA/KPA.
 - b. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar nilai tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban Pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
 - c. Beban Bunga
Beban bunga dicatat sebesar nilai tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui PA/KPA.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- d. **Beban Subsidi**
Beban subsidi dicatat sebesar nilai tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
- e. **Beban Hibah**
Beban hibah dicatat sebesar nilai tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
- f. **Beban Bantuan Sosial**
Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai tagihan belanja bantuan sosial dan/ atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
- g. **Beban Penyisihan Piutang**
Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.
- h. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- i. **Beban Transfer**
Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/ atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.
- j. **Beban Lain-Lain**
Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan/atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
- k. Jika terdapat koreksi dan pengembalian atas beban maka:
 - 1) Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan Kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 - 2) Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.
 - 3) Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/ atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 2. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

3. Belanja modal untuk konstruksi yang dibangun dengan cara swakelola atau melalui penyedia meliputi biaya konstruksi/fisik, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya perijinan.

D. PENILAIAN

1. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).
2. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

E. PENYAJIAN

1. Beban disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan (Penurunan)	%
30	BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx
31	BEBAN OPERASI	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
37	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
38	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xx
39	Beban Penyisihan, Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
40	Beban Penyisihan Kerugian Piutang	xxx	xxx	xxx	xx
41	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xx
42	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
43	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx	xxx	xxx	xx
44	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
45	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
46	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xx
47	Beban Penyisihan, Penyusutan & Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
48	BEBAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
49	Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
50	Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
51	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
52	BEBAN TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xx
53	Beban Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xx
54	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
35	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
38	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	BELANJA TRANSFER				
51	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota				
52	Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
53	Belanja Ban. Keuangan Kota ke Desa	xxx	xxx	xx	xxx
54	Jumlah Belanja Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
55	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban dan belanja, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam laporan operasional, beban dilaporkan sampai dengan jenis beban. Beban disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah realisasi tahun berjalan dengan realisasi periode sebelumnya.
3. Dalam catatan atas laporan keuangan, beban dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis beban.
4. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja dilaporkan sampai dengan jenis belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dengan realisasi anggaran tahun berjalan dan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
6. Dalam catatan atas laporan keuangan, belanja dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis belanja, yaitu sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD untuk LRA dalam LKPD dan sesuai DPA untuk LRA dalam Laporan Keuangan SKPD.
7. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk Ranperda Realisasi APBD dan Raperkada Penjabaran Realisasi APBD.

4.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
 - c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.
2. Klasifikasi
Kebijakan akuntansi transfer meliputi:
 - a. Pendapatan Transfer-LO.
 - b. Beban Transfer.
 - c. Utang Transfer.
 - d. Piutang Transfer.
 - e. Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer.

B. PENDAPATAN TRANSFER-LO

1. Definisi dan Jenis Pendapatan Transfer-LO
 - a. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Atas penerimaan atau hak untuk menerima dimaksud, entitas tidak mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kepada entitas lain. Mengacu pada struktur pemerintahan yang ada, entitas pelaporan yang lazim menerima pendapatan operasional transfer adalah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
 - b. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan-LO
 - (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO
 - (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
 - b) Dana Insentif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berupa Bantuan Keuangan:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO
- a. Pengakuan pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh Pemerintah Pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.
 - b. Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
 - c. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
 - d. Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana BOS dan Dana Desa.
 - e. Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemerintah kabupaten karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten.
2. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO
- a. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
 - b. Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur dapat terjadi terutama disebabkan oleh entitas penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

dibagihasilkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi pengurang pendapatan yang telah diakui sebelumnya pada tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil perhitungan selisih antara DBH berdasarkan penerimaan definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan entitas penerima terbit, maka pengakuan atas pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.

3. Pencatatan dan Penyajian Pendapatan Transfer-LO
 - a. Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada umumnya dicatat dan disajikan sebagai pendapatan. Namun, atas kelebihan penyaluran transfer sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai atas pendapatan transfer diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - b. Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya kurang bayar/salur yang belum diterima maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat sebagai piutang. Apabila informasi kurang bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka entitas penerima mengakui kurang bayar/salur transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.
 - c. Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode belum dibayar maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan per jenis piutang transfer.
 - d. Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan dana transfer, dicatat sebagai pengurang pendapatan transfer.
4. Penerimaan Dana Transfer Yang Bukan Pendapatan LO
 - a. Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Terdapat dua jenis dana yang masuk dalam kategori ini, yaitu Dana BOS dan Dana Desa.
 - b. Pada saat menerima transfer yang merupakan kewajiban untuk segera disalurkan Dana BOS atau Dana Desa, sehingga dicatat sebagai Kas pada Utang Dana BOS/Dana Desa.
 - c. Pada Dana Desa, pemerintah kabupaten tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan, tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten.

C. BEBAN TRANSFER

1. Definisi dan Jenis Beban Transfer

1. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Sedangkan PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.

3. Beban Transfer terdiri dari:
 - 1) Beban Bagi Hasil
 - Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - b) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
 - d) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
2. Pengakuan Beban Transfer
 - a. Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran dana transfer, Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat:
 - 1) terjadi pengeluaran kas dari rekening kas daerah, dan
 - 2) terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.
 - b. Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai piutang transfer.
 - c. Selain itu terdapat jenis transfer berdasarkan kebijakan/program Pemerintah Pusat dan/atau ketentuan perundang-undangan yang menempatkan penerima transfer bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus menyalurkan kepada entitas atau unit kerja dari entitas lainnya. Dengan kata lain, entitas yang menerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud secara langsung, tetapi harus segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai entitas unit pelaksana kegiatan. Contoh dari jenis transfer ini adalah dana BOS dan Dana Desa.
 - d. Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasar tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau laporan keuangan belum terbit, maka jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.
 - e. Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi beban transfer sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud. Secara umum dasar pertimbangan pengakuan ini adalah bahwa pada mekanisme transfer, peristiwa kurang atau lebih salur dapat terjadi berulang. Misalnya dapat terjadi suatu setoran pendapatan transfer yang pada awalnya dicatat berasal dari suatu daerah, setelah dilakukan verifikasi atau suatu sebab lain ternyata setoran tersebut berasal dari daerah lainnya. Hal ini akan menyebabkan lebih salur terhadap daerah yang telah menerima dan kurang salur pada daerah yang seharusnya berhak menerima.
3. Pengukuran Beban Transfer
 - a. Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- b. Beban transfer DBH dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas negara/daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran. Pada Pemerintah Pusat, penyaluran DBH dilakukan secara periodik dan pada penyaluran tahap terakhir didasarkan pada prognosa. Realisasi penerimaan yang sebenarnya baru dapat diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut menyebabkan dapat terjadi (1) jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah prognosa yang menjadi dasar penyaluran sehingga terjadi kurang salur, atau (2) jumlah penerimaan yang harus dibagihasilkan lebih kecil dari prognosa sehingga kas yang disalurkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, maka kelebihan tadi merupakan pengurang beban. Dalam hal penyaluran tidak berdasar prognosa tetapi langsung mengacu pada realisasi, kelebihan penyaluran tetap dimungkinkan terjadi sehingga selain jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening entitas penyalur, Beban Transfer DBH tetap harus memperhitungkan jumlah lebih atau kurang salur.
 - c. Bantuan keuangan pada pemerintah daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara/daerah. Dalam hal entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur berkewajiban untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam keadaan demikian, Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi. Akan tetapi, jika terdapat daerah penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu tahap pencairan, maka nilai yang sudah dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya sehingga Bantuan Keuangan tetap sebesar kas yang telah disalurkan.
 - d. Beban dana transfer lainnya dinilai sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyaluran dana transfer lainnya mewajibkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi entitas penerima pada setiap tahap penyaluran, maka beban transfer diukur sebesar jumlah kas yang telah disalurkan ke entitas penerima ditambah transfer yang belum disalurkan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.
4. Pencatatan dan Penyajian Beban Transfer
- Transfer keluar dicatat dan disajikan pada LO sebagai Beban Transfer.

D. UTANG DAN PIUTANG TRANSFER

1. Utang Transfer

- a. Utang transfer timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan. Misal hingga akhir periode, jumlah suatu jenis DBH yang disalurkan kurang dari persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka selisihnya harus diakui sebagai utang transfer sebesar nominalnya.
- b. Atas utang transfer dibuat daftar daerah penerima beserta dengan nilainya masing-masing. Jenis, daftar utang dan tahun timbulnya utang dimaksud diungkapkan pada CaLK. Dalam hal belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap daerah, maka secara akumulasi utang transfer dimaksud dicatat sebagai utang diestimasi.
- c. Utang transfer dapat timbul pada entitas penerima transfer apabila entitas tersebut menerima penyaluran lebih besar daripada jumlah yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pengakuan utang mengacu pada pencatatan lebih salur entitas penyalur yang mencatat sebagai piutang transfer.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2. Piutang Transfer

- a. Piutang transfer pada entitas pemberi timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, piutang transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan.
- b. Piutang transfer pada entitas pemberi diakui pada saat diketahui telah terjadi lebih salur sebesar nilai nominalnya. Informasi lebih salur dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan antara jumlah yang telah disalurkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya disalurkan.
- c. Jika jumlah dan daerah yang mengalami lebih salur dapat dipastikan dan diidentifikasi tiap-tiap daerah, nilai lebih salur dicatat sebagai piutang lebih salur sesuai dengan jenis transfer dan dirinci per daerah yang mengalami lebih salur. Dapat terjadi lebih salur sudah terjadi tetapi indentifikasi untuk tiap-tiap daerah yang mengalami lebih salur belum dapat diidentifikasi, maka lebih salur dimaksud merupakan Piutang Transfer Diestimasi. Selanjutnya piutang lebih salur disajikan pada laporan keuangan beserta penjelasannya pada CaLK dan diberitahukan kepada entitas yang mengalami lebih salur agar dicatat sebagai utang transfer.
- d. Bagi entitas penerima, piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudited. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.
- e. Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang transfer bagi entitas penerima transfer.

3. Koreksi Utang-Piutang Transfer

- a. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.
- b. Penentuan hak dan kewajiban entitas atas dana transfer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, hak dan kewajiban dimaksud ada yang bersifat mengikat dan pasti seperti DAU atau disesuaikan dengan kondisi yang terjadi kemudian. Perubahan jumlah atau “penghapus-bukuan” utang-piutang transfer hanya dimungkinkan karena adanya kekeliruan/kesalahan dalam proses penghitungan/pencatatan. Utang atau piutang transfer dimaksud sebenarnya tidak terjadi, atau secara materiil tidak pernah ada. Jika terjadi demikian, perlakuan akuntansi adalah koreksi dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan serta pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan koreksi yang dilakukan. Koreksi atas utang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi atas piutang. Begitupun sebaliknya, koreksi atas piutang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi utang oleh entitas penerima.
- c. Dalam hal piutang transfer terjadi karena lebih salur, maka entitas pemberi mempunyai kewenangan sedemikian rupa sehingga piutang dimaksud dipastikan dapat diselesaikan. Tatacara penyelesaian piutang dimaksud dapat dalam bentuk pengembalian melalui penyeteroran oleh entitas penerima. Jika cara ini tidak dilakukan, maka entitas pemberi dapat melakukan pemotongan atas kelebihan salur pada saat realisasi penyaluran periode



berikutnya. Praktik yang selama ini atas piutang lebih salur adalah dengan melakukan pemotongan terhadap penyaluran dana transfer tahun yang sama atau tahun berikutnya serta pada umumnya terjadi pada transfer Dana Bagi Hasil.

- d. Koreksi atas utang-piutang transfer dapat terjadi karena kekeliruan dalam perhitungan atau penentuan daerah lebih/kurang salur. Dalam hal terjadi demikian tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang/piutang daerah yang mengalami lebih salur. Tetapi jika hal itu berdampak pada nilai total, maka dilakukan penyesuaian pada akun Ekuitas.

E. Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer

1. Definisi dan Jenis Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer
 - a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - c. Dalam rangka pertanggungjawaban realisasi anggaran, pendapatan transfer dan belanja transfer mengacu pada basis penyusunan anggaran itu sendiri. Oleh karena basis anggaran masih menggunakan basis kas maka pelaporan belanja dan pendapatan transfer dalam rangka pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas.
 - d. Secara umum, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, belanja transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari entitas pelaporan, sedangkan pendapatan transfer diakui pada saat kas diterima oleh entitas pelaporan.
 - e. Belanja transfer, terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan tranfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.
 - f. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan-LRA
 - (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA
 - (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA
 - b) Dana Insentif Daerah (DID)-LRA
 - c) Dana Desa-LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA
 - a) Bantuan Keuangan
 - (1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - (3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - (4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - g. Belanja Transfer terdiri dari:
 - 1) Belanja Bagi Hasil
 - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
 - d) Beban Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten ke Desa
2. Pengakuan
 - a. Pendapatan-LRA dan Belanja Transfer diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Titik kritis pengakuan belanja dan pendapatan daerah adalah keluar atau masuk uang melalui RKUD. Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.
 - b. Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dan dana penyesuaian yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
 - c. Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 - d. Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:
 - 1) Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
 - 2) Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 - e. Pengakuan pendapatan basis kas didasarkan pada aliran kas masuk ke entitas pelaporan yang menjadi hak entitas dan tidak perlu dibayar kembali di kemudian hari. RKUD yang sebelumnya merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subyek pengelola kas negara atau kas daerah.
 - f. Pendapatan basis kas diakui pada saat:
 - 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- g. Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada kas daerah.
- h. Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Pendapatan Dana Desa diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN untuk penyaluran Dana Desa.
- i. Pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD, atau entitas yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.
- j. Belanja transfer diakui berdasarkan mutasi keluar kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
- k. Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari RKUD seperti dana bagi hasil pajak daerah atau retribusi daerah kepada Desa, serta bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lain atau Desa.
- l. Belanja Dana Desa diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD sesuai Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD.

F. PENYAJIAN

1. Pendapatan Transfer-LO dan Beban Transfer disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
2	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
3	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
4	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xx
5	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
6	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
8	BEBAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
9	Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
10	Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
11	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
12	BEBAN TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xx
13	Beban Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xx
14	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2. Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer Transfer disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
1	PENDAPATAN TRANSFER				
2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
3	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
4	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
5	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
6	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
8	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
9	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
10	Dana Desa	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
13	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
14	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
16	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
17	BELANJA TRANSFER				
18	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota				
19	Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Ban. Keuangan Kota ke Desa	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Belanja Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
22	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xx	xxx

G. PENGUNGKAPAN

1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - 1) Transfer keluar harus dirinci;
 - 2) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk Pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

 - a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

D. PENYAJIAN

1. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Berikut adalah ilustrasi penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2xx^{x-1} dan 2xx^{x-1}

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2xx ^{x-1}	Realisasi 2xx ^{x-1}	%	Realisasi 2xx ^{x-2}
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pemb. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pemb. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keu. Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pengeluaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xx	xxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

- a. Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan Pembayaran.
- b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
- c. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

B. PENGUKURAN

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai Rupiahnya.
2. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3. Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

C. PENYAJIAN

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Berikut adalah ilustrasi penyajian kas dan setara kas dalam neraca:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2_{xx}^(x-1) dan 2_{xx}^(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2 _{xx} ^(x-1)	2 _{xx} ^(x-2)
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
 - b. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.
 - c. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
 - d. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
 - e. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi;
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Transfer Lainnya;
- 5) Piutang Bagi Hasil;
- 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 7) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

B. PENGAKUAN

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

4. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
5. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
6. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim Pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan Pembayaran.
8. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
9. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.
10. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
11. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
12. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.
13. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

14. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
15. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
16. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan Pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan Pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
4. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal.
6. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
7. Pemberhentian Pengakuan
8. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
9. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat di pertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
10. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah di hapusbukukan, ada kemungkinan diterima Pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. PENILAIAN

1. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

3. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
5. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
6. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
7. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
8. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
10. Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
11. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet.
13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
15. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
16. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PENYAJIAN

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi	xxx	xxx
15	Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
5. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.8. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

b. Barang Tak Habis Pakai

Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

c. Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

- a. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit/Dinas Kesehatan/Puskesmas dan persediaan di Sekretariat SKPD.

- b. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Contohnya adalah persediaan untuk pendukung kegiatan sehari-hari perkantoran di SKPD.

3. Inventarisasi fisik persediaan atau *stock opname*

- a. Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah *stock opname* yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester.
- b. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai.
- c. Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.
- d. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan mendebet atau mengkredit persediaan dan beban persediaan.

4. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kadaluarsa (*expired*) dikeluarkan dari akun persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara *opname* persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENGUKURAN

1. Persediaan disajikan sebesar:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - c. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - d. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - e. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
 3. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *first in first out (FIFO)*, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.
 4. Dalam hal metode *FIFO* tidak dapat diterapkan dan setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

1. Pencatatan atas persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.
2. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

E. PENYAJIAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
2. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Persediaan	xxx	xxx
4	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan



3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kadaluarsa/*expired*, rusak atau kesalahan pencatatan.

4.9. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akruwal Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.
- 2) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

B. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*).
3. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai)berdasarkan



dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

C. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Investasi Non Permanen Dana Bergulir
Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - a) Penentuan kualitas dana bergulir;
 - b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - c) Pencatatan penyisihan dana bergulir;
 - d) Pelaporan dana bergulir; dan
 - e) Penghapusan dana bergulir.Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:
 - a) Kualitas lancar jika umur piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
 - c) Kualitas diragukan jika umur piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan
 - d) Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 (lima) tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*).

Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:

- a) Beban penyisihan dana bergulir; dan
- b) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih

Beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca.

Penghapusan dana bergulir meliputi:

- a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
- b) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusan dana bergulir) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan Dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. METODE PENILAIAN INVESTASI

1. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.
4. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.

E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

1. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
2. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
4	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
5	Investasi Jangka Panjang		
6	Investasi Nonpermanen		
7	Investasi kepada BUMN	xxx	xxx
8	Investasi kepada BUMD	xxx	xxx
9	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
10	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
11	Dana Bergulir	xxx	xxx



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

12	Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
13	Investasi Permanen		
14	Penyertaan Modal Pemda	xxx	xxx
15	Investasi Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
16	Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
17	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx

Dana bergulir dengan klasifikasi macet dilakukan reklasifikasi yang dituangkan dalam berita acara reklasifikasi dari Aset Investasi ke Aset Lain-lain oleh Pengguna Anggaran diketahui oleh PPKD untuk selanjutnya diusulkan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang- kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

4.10. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

- b. Perubahan fungsi penggunaan Aset Tetap direklasifikasi ke pos Aset Tetap yang sesuai dengan fungsi atau kegunaannya.
- c. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan daerah direklasifikasi ke Aset Lainnya.
- d. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintahan Daerah karena rusak berat atau usang direklasifikasi ke Aset Lainnya.
- e. Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, direklasifikasi ke Aset Lainnya.
- f. Dalam hal Aset Tetap yang hilang telah ditemukan kembali, dilakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap apabila dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- g. Reklasifikasi Aset Tetap karena Aset bersejarah dilakukan apabila Aset Tetap merupakan Aset bersejarah untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
- h. Aset bersejarah dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang bersejarah, tidak disajikan dalam neraca, dibuat dalam catatan atas laporan keuangan dan dicatat dalam kuantitas tanpa nilai.
- i. Dalam hal Aset bersejarah dapat memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, diterapkan prinsip yang sama dengan Aset Tetap Lainnya.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Aset Tetap Tanah

- a. Aset tetap tanah diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.
- c. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila SKPD A mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca SKPD A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.
- d. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas,



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.

- e. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
- 1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - 3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - f. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- g. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- h. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten A melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.
- c. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- d. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
- e. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.
- f. Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pengakuan Aset Tetap Gedung dan **Bangunan**

- a. Aset Tetap Gedung Dan Bangunan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
- c. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”
- d. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, dan pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- e. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
- f. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
- g. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian pembelian diakui diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- h. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pengakuan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi, harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Jalan, Jaringan dan Irigasi diakui pada saat Jalan, Jaringan dan Irigasi telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
 - c. Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
 - d. Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.
 - e. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi.
5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya
- a. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:
 - 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
 - 4) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

- b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.
6. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
 - 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - b. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
 - c. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
 - 2) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:
 - a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
 - b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
 - 3) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset 31 tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

d. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
- 2) Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

1. Pengukuran Aset Tetap Tanah

- a. Aset tetap tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- c. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
- d. Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.
- e. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- f. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- g. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.
 - h. Kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal tanah dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal tanah salah saji, dilakukan koreksi atas tanah dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal tanah.
2. Pengukuran Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 - b. Kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Peralatan dan Mesin dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin salah saji, dilakukan koreksi atas Peralatan dan Mesin dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin.
3. Pengukuran Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, serta biaya perencanaan dan biaya pengawasan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
 - c. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - d. Kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal gedung dan bangunan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan salah saji, dilakukan koreksi atas gedung dan bangunan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal gedung dan bangunan.
4. Pengukuran Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
- a. Jalan, Jaringan dan Irigasi diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut siap pakai.

- b. Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - c. Kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi salah saji, dilakukan koreksi atas Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.
5. Pengukuran Aset Tetap Lainnya
- a. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 - b. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
 - c. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
 - d. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e. Kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya salah saji, dilakukan koreksi atas Aset Tetap Lainnya dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya.
6. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola
 - 1) Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
 - 2) biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - 3) Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - 4) Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 5) Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

b. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

- 1) Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 2) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
- 4) Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

c. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

- 1) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp10.000.000.

- 2) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000, dan aset C sebesar Rp100.000.000. Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.
 - b) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.
 - c) Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Masa Manfaat, Kapitalisasi, Penyusutan, dan *Overhaul* dan Renovasi Aset Tetap

1. Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3				Aset Tetap		
1	3	1			Tanah		
1	3	1	01		Tanah		1
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	
1	3	1	01	03	Lapangan	-	
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01		Alat Besar		
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	10.000.000
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8	10.000.000
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7	1.000.000
1	3	2	02		Alat Angkutan		
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	10.000.000
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	1.000.000
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	1.000.000
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	1.000.000
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	1.000.000
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur		500.000
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	
1	3	2	04		Alat Pertanian		500.000
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga		500.000
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		500.000
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan		500.000
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	
1	3	2	08		Alat Laboratorium		500.000
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	5	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10	
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10	
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	10	
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10	
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10	
1	3	2	09		Alat Persenjataan		500.000
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	
1	3	2	10		Komputer		500.000
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	
1	3	2	11		Alat Eksplorasi		500.000
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	
1	3	2	12		Alat Pengeboran		500.000
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		500.000
1	3	2	13	01	Sumur	10	
1	3	2	13	02	Produksi	10	
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	10	
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi		500.000
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja		500.000
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	
1	3	2	15	03	Alat Sar	2	
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	
1	3	2	16		Alat Peraga		500.000
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi		500.000
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5	
1	3	2	18		Rambu - Rambu		500.000
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10	
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga		500.000



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3	
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01		Bangunan Gedung		20.000.000
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30	
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30	
1	3	3	02		Monumen		20.000.000
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	30	
1	3	3	03		Bangunan Menara		20.000.000
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	30	
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti		20.000.000
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	30	
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan		1
1	3	4	01	01	Jalan	10	
1	3	4	01	02	Jembatan	30	
1	3	4	02		Bangunan Air		1
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	30	
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	30	
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	20	
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	30	
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	30	
1	3	4	03		Instalasi		1
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	20	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	20	
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	30	
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	30	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	30	
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	
1	3	4	04		Jaringan		1
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	20	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	20	
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	20	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	5			Aset Tetap Lainnya		
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan		1
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	
1	3	5	01	04	Musik	-	
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	-	
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts and Realita	-	
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga		500.000
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4	
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	4	
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	-	
1	3	5	03		Hewan		500.000
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	
1	3	5	03	02	Ternak	-	
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	
1	3	5	04		Biota Perairan		
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	
1	3	5	05		Tanaman		500.000
1	3	5	05	01	Tanaman	-	
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya		500.000
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi		20.000.000
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	5 ¹⁾	
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan		



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Gedung dan Bangunan	-	20.000.000
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	1

*Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 5 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.*

- a. Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan dan pengawasan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dan pengawasan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya, dengan nilai kapitalisasi mengikuti tabel di atas, masuk dalam aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau hutang belanja dalam neraca.
- b. Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.
- c. Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

2. Penyusutan

- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) setiap tahun selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Peralatan dan Mesin;
 - 2) Gedung dan Bangunan;
 - 3) Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - 4) Aset Tetap Lainnya; dan
 - 5) Aset Lainnya.Aset Tetap Lainnya, meliputi:
 - 1) Aset tetap dalam renovasi; dan
 - 2) Alat musik modern.
- d. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Aset Tetap Tanah;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - 3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
 - 4) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
 - 5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
 - 6) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
 - 7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
- e. Rumus beban penyusutan adalah nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat tanpa nilai sisa.
 - f. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan dasar tanggal penggunaan dan/atau bulan serah terima. Dengan pendekatan bulan penggunaan dan/atau serah terima maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen sumber.
 - g. Dalam hal perhitungan penyusutan berdasarkan tanggal, bulan, tahun perolehan belum dapat diterapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan periode bulanan atau semesteran sesuai waktu perolehan sebagai dasar perhitungan penyusutan.
3. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) berupa renovasi, restorasi, dan overhaul.
- a. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
 - b. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) renovasi;
 - 2) restorasi; atau
 - 3) *overhaul*.
 - c. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
 - d. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - e. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
 - f. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan berupa *overhaul* dan renovasi akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
 - 2) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).
 - 3) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.
 - 4) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara. Dalam hal nilai yang diganti tidak diketahui, tidak dapat dihitung, atau nilai bukunya sudah habis, maka tidak perlu dilakukan pengurangan nilai aset lama.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5) Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahkan Masa Manfaat Renovasi, Restorasi dan Overhaul			
						(Tahun)	≤ 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3				Aset Tetap					
1	3	1			Tanah					
1	3	1	01		Tanah					
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	-	-	-	-
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	-	-	-	-
1	3	1	01	03	Lapangan	-	-	-	-	-
1	3	2			Peralatan dan Mesin					
1	3	2	01		Alat Besar					
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	0	3	4	5
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8	0	2	3	4
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7	0	2	3	4
1	3	2	02		Alat Angkutan					
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	2	3	4
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	0	1	1	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	0	3	4	5
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	0	1	1	2
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	0	5	7	10
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur					
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	4	5
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	2	3
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	0	1	2	3
1	3	2	04		Alat Pertanian					
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	0	1	2	2
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga					
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	0	1	2	3
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	0	1	2	3
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	1	2	3
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar					
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	0	1	2	3
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	0	1	2	3
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	0	3	4	5
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	0	3	4	5



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahkan Masa Manfaat Renovasi, Restorasi dan Overhaul			
						(Tahun)	≤ 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan					
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	0	1	2	3
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	0	1	2	3
1	3	2	08		Alat Laboratorium					
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	5	0	1	2	3
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10	0	3	4	5
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	0	3	4	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10	0	3	4	5
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	0	3	4	5
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	10	0	3	4	5
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	0	1	2	3
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10	0	3	4	5
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10	0	3	4	5
1	3	2	09		Alat Persenjataan					
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	0	3	4	5
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	0	1	2	2
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	0	1	2	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	0	1	2	2
1	3	2	10		Komputer					
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4	0	1	2	2
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4	0	1	2	2
1	3	2	11		Alat Eksplorasi					
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5	0	1	2	3
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	5	0	1	2	3
1	3	2	12		Alat Pengeboran					
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10	0	3	4	5
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10	0	3	4	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian					
1	3	2	13	1	Sumur	10	0	3	4	5
1	3	2	13	2	Produksi	10	0	3	4	5
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	10	0	3	4	5
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi					
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10	0	3	4	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10	0	3	4	5



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahkan Masa Manfaat Renovasi, Restorasi dan Overhaul			
						(Tahun)	≤ 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja					
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5	0	1	2	3
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5	0	1	2	3
1	3	2	15	3	Alat Sar	2	0	1	1	1
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10	0	3	4	5
1	3	2	16		Alat Peraga					
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	0	3	4	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi					
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	5	0	1	2	3
1	3	2	18		Rambu - Rambu					
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	0	1	2	3
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	0	1	2	3
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10	0	3	4	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga					
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3	0	1	1	2
1	3	3			Gedung dan Bangunan					
1	3	3	01		Bangunan Gedung					
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30	0	5	10	15
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30	0	5	10	15
1	3	3	02		Monumen					
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	30	0	5	10	15
1	3	3	03		Bangunan Menara					
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	30	0	5	10	15
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti					
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	30	0	5	10	15
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi					
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan					
1	3	4	01	01	Jalan	10	0	3	4	5
1	3	4	01	02	Jembatan	30	0	5	10	15
1	3	4	02		Bangunan Air					
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	30	0	5	10	15
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	30	0	5	10	15
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	20	0	4	8	12
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	0	3	4	5



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahkan Masa Manfaat Renovasi, Restorasi dan Overhaul			
						(Tahun)	≤ 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	0	5	10	15
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	30	0	5	10	15
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	30	0	5	10	15
1	3	4	03		Instalasi					
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	20	0	5	7	10
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	20	0	5	7	10
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	3	4	5
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	3	4	5
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	30	0	5	10	15
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	30	0	5	10	15
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	0	5	10	15
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	0	5	10	15
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	30	0	5	10	15
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	0	5	7	10
1	3	4	04		Jaringan					
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	20	0	5	7	10
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	20	0	5	7	10
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	0	5	7	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	20	0	5	7	10
1	3	5			Aset Tetap Lainnya					
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan					
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-	-	-
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-	-	-	-
1	3	5	01	04	Musik	-	-	-	-	-
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-	-	-	-
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts and Realita	-	-	-	-	-
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	-	-	-	-
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga					
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4	0	1	2	2
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	4	0	1	2	2
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	-				
1	3	5	03		Hewan					
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	-	-	-	-
1	3	5	03	02	Ternak	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahkan Masa Manfaat Renovasi, Restorasi dan Overhaul			
						(Tahun)	≤ 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	-	-	-	-
1	3	5	04		Biota Perairan					
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	-	-	-	-
1	3	5	05		Tanaman					
1	3	5	05	01	Tanaman	-	-	-	-	-
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya					
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi					
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	5 ^{*)}	-	-	-	-
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan					
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan					
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-

Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 5 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.

- 6) Tambahan masa manfaat aset tetap dari overhaul atau renovasi hanya dapat menjadikan masa manfaat aset tetap setelah overhaul atau renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat perolehan aset tetap baru.
- 7) Penambahan aset tetap sebagaimana dimaksud pada tabel di atas berlaku terhadap satu satuan (unit/ruas aset tetap) baik overhaul/pemeliharaan terhadap seluruh atau sebagian unit/ruas aset tetap sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi.
- 8) Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

nilai renovasi, restorasi, dan overhaul aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul, dimana masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah tambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi, dan overhaul.

- 9) Perolehan aset tetap bekas pakai diakui sesuai tanggal perolehan dalam BAST sebesar nilai perolehan atau nilai wajar berdasarkan penilaian internal, dengan masa manfaat mengikuti ketentuan dalam tabel tambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi, dan overhaul.
- 10) Perolehan kembali aset tetap bekas pakai tanpa adanya pengeluaran uang diakui sebesar nilai wajar berdasarkan penilaian yang dilakukan secara internal yang dituangkan dalam BAST, dengan masa manfaat mengikuti ketentuan dalam tabel tambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi, dan overhaul.

E. Ketentuan Khusus

1. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

3. Renovasi Aset Tetap

a. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

b. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1) Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
- 2) Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut berupa BAST telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

c. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-diluar Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
- 2) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu bahwa pada SKPD yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di Neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (BAST) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

4. Aset Bersejarah

- a. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- c. Beberapa Aset Tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).
- d. Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:
 - 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

5. Pertukaran Aset

a. Definisi Pertukaran Aset Tetap

- 1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap aset tetap tertentu biasanya pemerintah melakukan pembelian/pengadaan. Namun, karena alasan tidak tersedianya dana dan untuk efisiensi, pemerintah dapat memperoleh suatu aset tetap melalui mekanisme pertukaran (ruislag/tukar guling).
- 2) Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.
- 3) PSAP 07 Paragraf 42 menyatakan bahwa “Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya....” Akan tetapi, pelaksanaan pertukaran aset atau sebagian aset tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.

b. Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

- 1) Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 2) Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

c. Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran

- 1) Dalam PSAP 07 Paragraf 42 dinyatakan bahwa “Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/diserahkan.”
- 2) Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) aset yang dilepas.
- 3) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:

- 1) Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
- 2) Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
- 3) Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.
6. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)
 - a. Penghentian Penggunaan Aset Tetap
 - 1) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. PSAP 07 Paragraf 79 yang menyatakan bahwa: Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.
 - 2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78 yang menyatakan bahwa:
 - a) Paragraf 77, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
 - b) Paragraf 77, Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
 - 4) Aset tetap rusak berat dan/atau sudah tidak dapat dipergunakan lagi diusulkan penghapusan kepada Bupati, mekanisme pelaksanaan penghapusan terlebih dahulu dilakukan cek fisik terhadap kondisi aset tetap yang rusak berat yang dituangkan dalam berita acara cek fisik lanjut dibuatkan berita acara reklasifikasi ke aset lain-lain. Penghapusan dilakukan setelah terbit SK Penghapusan dari Bupati.
 - b. Pelepasan Aset Tetap
 - 1) Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara: dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal daerah.
 - 2) Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78.
 - 3) Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.
 - 4) Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- 5) Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.

7. Aset Tetap Hilang

- a. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
- b. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban non operasional.

8. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap

- 1) Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan, tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan. Paragraf 79 PSAP 07 mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya. Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*
- 2) Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.
- 3) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.
- 4) Terhadap aset lainnya yang dinyatakan hilang atau tidak pernah diketemukan dan sudah dilakukan upaya pencarian dibuatkan berita acara sebagai dasar mengeluarkan dari neraca dengan cara mendebet beban non operasional dan mengkredit aset lainnya.

b. Koreksi Aset Tetap

- 1) Paragraf 4 PSAP 10 menyatakan bahwa: *koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.*
- 2) Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

- 3) Koreksi dilakukan oleh entitas yang bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan PPKD. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di PPKD, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.
- 4) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

F. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca, dengan ilustrasi sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ASET		
2	Aset Tetap		
3	Tanah	xxx	xxx
4	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
5	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
6	Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx	xxx
7	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
9	Jumlah Aset Tetap-Harga Perolehan	xxx	xxx
10	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(xxx)	(xxx)
11	Jumlah Aset Tetap-Nilai Buku	xxx	xxx

G. PENGUNGKAPAN

Dalam laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi;
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya ataupun aset lainnya, pertukaran aset, dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal;
 - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi menjadi jenis aset tetap yang lainnya ataupun aset lainnya dan lainnya);
 - d. Perubahan nilai, jika ada
4. Informasi penyusutan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
6. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
7. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - e. Jumlah Retensi.
8. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.11. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
2. Klasifikasi
Dana cadangan diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya/peruntukkannya.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

B. PENGAKUAN

1. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
2. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

C. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. PENYAJIAN

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset disisi aktiva.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ASET		
2	DANA CADANGAN		
3	Dana Cadangan	xxx	xxx
4	Jumlah Dana Cadangan (3)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke Rekening Dana Cadangan;



5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.12. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
 - b. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.
 - c. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
2. Klasifikasi
Aset Lainnya diklasifikasikan menjadi:
 - a. Tagihan Jangka Panjang:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran; dan
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - 1) Sewa;
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan;
 - 3) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); dan
 - 4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
 - c. Aset Tak Berwujud:
 - 1) *Goodwill*;
 - 2) Lisensi dan *Franscise*;
 - 3) Hak Cipta;
 - 4) Hak Paten;
 - 5) *Software*;
 - 6) Kajian;
 - 7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;
 - 8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan; dan
 - 9) Aset Tak Berwujud Lainnya.
 - d. Aset Lain-Lain
 - 1) Aset Tetap Rusak Berat/Usang;
 - 2) Aset Tetap yang Akan Dihilangkan;
 - 3) Aset Lain-lain, Lainnya:
 - a) Aset Rusak Berat; dan
 - b) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.
 - e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud:
 - 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
 - f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya:



- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.

B. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan penjualan angsuran diakui ketika perjanjian penjualan secara angsuran mulai berlaku, bukan dimulai pada tanggal angsuran pertama dilakukan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya - Kerjasama Pemanfaatan.

c. Bangun Guna Serah

1) Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

- 2) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
- 3) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
- 5) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil Pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil Pembayaran diakui sebagai pendapatan
- 6) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)

- 1) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- 2) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.
- 3) BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan
- 4) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/ liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan
- 5) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan Pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tak Berwujud

- a. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/ eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

b. Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

1) Dapat diidentifikasi;

2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau Jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - 4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- d. Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:
- 1) Tahap penelitian/ riset:

Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

 - a) Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;
 - b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
 - c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
 - d) Perumusan formula/ rum us, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.
 - 2) Tahap pengembangan

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

 - a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan
 - b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - d) Manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan;
 - e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
 - f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran- pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh tahap pengembangan diantaranya:

 - (1) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
 - (2) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 - (3) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
4. Aset Lain-Lain
- a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- b. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. PENGUKURAN

1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tak Berwujud
 - a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
 - b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 - c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - 2) Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- e. Amortisasi
- 1) Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
 - 2) Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
 - 3) Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan berdasarkan karakteristik dan harapan entitas untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut. Masa manfaat aset tak berwujud di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Goodwill</i>	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
Royalti	5 Tahun
<i>Software</i>	
a. Pengembangan Sendiri	5 Tahun
b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	5 Tahun
Lisensi	5 Tahun atau masa secara hukum (mana yang lebih pendek/ <i>which ever is shorter</i>)
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 Tahun
Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

- 4) Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
 - 5) ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis dimasa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
4. Aset Lain-lain
- a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya dengan cara melakukan reklasifikasi harga perolehan dan akumulasi penyusutan.

- b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.
- c. Masa manfaat Aset Lainnya
Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sebagai berikut:
 - 1) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

D. PENYAJIAN

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset disisi aktiva. Aset Lainnya disajikan pada lembar muka neraca sebesar harga perolehan serta akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan sebagai pengurang.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ASET		
2	Aset Lainnya		
3	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
4	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
5	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
6	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
7	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
8	Aset Lain-lain	xxx	xxx
9	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
10	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
11	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
4. informasi lainnya yang penting.



4.13. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Definisi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.
- c. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum;

2) Utang Bunga

Digunakan untuk mencatat biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;

3) Utang Pinjaman Jangka Pendek

Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;

5) Pendapatan Diterima Dimuka

Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

6) Utang Belanja

Digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga; dan

7) Utang Jangka Pendek Lainnya

Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap Pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

- 1) Utang kepada Pemerintah Pusat;
Digunakan untuk mencatat utang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 4) Utang kepada Masyarakat.
Digunakan untuk mencatat utang kepada masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

B. PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK;
 - b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah; dan
 - d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
4. Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.
 5. Penghapusan utang dalam bentuk lain seperti namun tidak terbatas pada ketidaklengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan tagihan kepada pemerintah daerah.
 6. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO.
 7. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan.
 8. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.
 9. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

C. PENGUKURAN

1. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
2. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
3. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.
 - a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- b. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
 - d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode;
 - e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan; dan
 - f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
4. Kewajiban atau Utang Jangka Panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:
- a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
 - b. Utang yang diperjualbelikan
 - 1) Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - 2) Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva (kewajiban dan ekuitas).

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	KEWAJIBAN		
2	Kewajiban Jangka Pendek		
3	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
4	Utang Bunga	xxx	xxx
5	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
7	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
8	Utang Belanja	xxx	xxx
9	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
10	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
11	Kewajiban Jangka Panjang		
12	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
13	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
14	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
15	Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)	xxx	xxx
16	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
17	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Utang pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya;
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) pengurangan pinjaman;
 - 2) modifikasi persyaratan utang;
 - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - g. biaya pinjaman:
 - 1) perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



4.14. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. UMUM

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset pemerintah dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai piutang, koreksi nilai persediaan, koreksi nilai aset tetap, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

2. Klasifikasi

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas awal
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas akhir.
- b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN

1. Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. Surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. Koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. Koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. Adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

2. Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. Defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. Koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. Koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. Adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

C. PENGUKURAN

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

D. PENYAJIAN

Ekuitas pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian ekuitas dalam Neraca Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	EKUITAS		
2	Ekuitas	xxx	xxx
3	Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
4	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan ekuitas, harus diungkapkan mutasi ekuitas sesuai dengan akun ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memuat:

- Jumlah ekuitas awal;
- Jumlah mutasi ekuitas; dan
- Jumlah ekuitas akhir.

4.15. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. UMUM

1. Definisi

- Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.



B. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, maupun Beban.
Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
 - 1) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
 - 2) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
 - a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - c) Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.
2. Kesalahan berulang
 - a. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 - b. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
3. Koreksi atas kesalahan saldo awal terhadap akun-akun laporan keuangan *audited* yang baru diketahui setelah penerbitan laporan keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Koreksi atas penetapan SiLPA Tahun Lalu dilakukan dengan memperbaiki akun Penggunaan SiLPA dalam Penerimaan Pembiayaan pada kolom realisasi tahun berjalan dan tidak diikuti dengan koreksi pada kolom anggarannya.
 - b. Koreksi atas akun-akun saldo awal rekening riil (neraca) dilakukan dengan melakukan koreksi atas akun aset atau akun kewajiban dengan rekening lawan akun ekuitas dan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

disajikan dalam LPE dengan sebutan saldo akun yang dikoreksi seperti koreksi saldo awal piutang, koreksi saldo awal persediaan, koreksi saldo awal aset tetap, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan, koreksi saldo awal kewajiban, atau koreksi saldo awal saldo akun lainnya.

- c. Penyajian atas adanya selisih akun ekuitas dalam neraca dan LPE yang nilainya belum ditemukan sampai batas akhir penyusunan laporan keuangan disajikan dengan uraian koreksi lainnya dalam LPE.

4.16. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1. Definisi
 - a. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 - b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 - c. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
 - d. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
 - e. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian
 - a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 06, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:
 - 1) Laporan keuangan konsolidasian arus kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; dan
 - 2) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih hanya disusun dan disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 - c. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
 - d. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
 - e. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- f. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.
3. Entitas Pelaporan
Suatu entitas pelaporan adalah:
 - a. Pemerintah Kabupaten Nagekeo; dan
 - b. SKPD atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAP.
4. Entitas Akuntansi
Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
5. Badan Layanan Umum Daerah
 - a. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - b. Selaku penerima APBD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
 - c. Selaku satuan kerja pelayanan berupa BLUD, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
 - d. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya, yaitu SAP.
6. Prosedur Konsolidasi
 - a. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik.
 - b. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
7. Pengungkapan
 - a. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.
 - b. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 19, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

4.17. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

A. Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menentukan:
 - a. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
 2. Kebijakan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.
- B. Ruang Lingkup**
 1. Kebijakan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan.
 2. Kebijakan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.
- C. Definisi**
 1. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
 2. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).
- D. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan**
 1. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
 2. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.
- E. Pengakuan dan Pengukuran**
 1. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
 2. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
- F. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan**
 1. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
 2. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
- b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

G. Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.
2. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Daerah setelah tanggal pelaporan.

H. Kestinambungan Entitas

1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
2. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
3. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
4. PSAP mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
 - a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal



tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau

- b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

I. Pengungkapan

1. Pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
3. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

J. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

1. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
2. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

K. Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

1. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - a. Sifat peristiwa; dan
 - b. Estimasi atas dampak keuangan, atau kebijakan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
2. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
 - a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp702.853.486.223,09 atau 95,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp737.915.867.966,00. Adapun realisasi belanja dan transfer sebesar Rp721.124.381.735,29 atau 93,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp771.727.562.025,00. Dengan demikian berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah mengalami defisit sebesar Rp(18.270.895.512,20).

Realisasi Pendapatan daerah sebesar Rp702.853.486.223,09 terdiri dari

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	34.260.033.777,09
- Pendapatan Transfer	Rp	662.574.102.398,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	6.019.350.048,00
Jumlah	Rp	702.853.486.223,09

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp721.124.381.735,29 atau 93,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp771.727.562.025,00.

Realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp721.124.381.735,29 tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	476.000.097.333,79
- Belanja Modal	Rp	113.999.290.488,50
- Belanja Tak Terduga	Rp	4.450.062.433,00
- Belanja Transfer	Rp	126.674.931.480,00
Jumlah	Rp	721.124.381.735,29

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan realisasi Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.1

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo
TA 2022 dan 2021

Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	52.210.826.688,00	34.260.033.777,09	(17.950.792.910,91)	65,62	33.276.127.700,03
Pendapatan Transfer	679.146.119.178,00	662.574.102.398,00	(16.572.016.780,00)	97,56	651.601.375.462,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	(539.572.052,00)	91,77	15.824.910.133,00
Jumlah	737.915.867.966,00	702.853.486.223,09	(35.062.381.742,91)	95,25	700.702.413.295,03



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp702.853.486.223,09 atau 95,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp737.915.867.966,00 apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp700.702.413.295,03 maka realisasi pencapaian target pendapatan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.151.072.928,06 atau sebesar 0,31%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2.

**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagekeo
TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	11.319.781.170,00	5.588.247.094,00	49,37	4.915.584.868,00
Pendapatan Retribusi Daerah	13.177.405.529,00	2.879.649.883,20	21,85	2.563.893.827,51
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.614.351.128,00	2.207.175.564,00	84,43	3.688.014.444,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.099.288.861,00	23.584.961.235,89	93,97	22.108.634.560,52
Jumlah	52.210.826.688,00	34.260.033.777,09	65,62	33.276.127.700,03

Berdasarkan tabel 5.2. diatas dapat dilihat bahwa target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp52.210.826.688,00 dengan realisasinya sebesar Rp34.260.033.777,09 atau 65,62% sehingga dari jumlah realisasi pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp983.906.077,06 atau 2,96% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33.276.127.700,03.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kontribusi wajib pajak kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tarif pendapatan pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Nagekeo TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pajak Hotel	323.000.000,00	362.146.291,00	112,12	355.792.034,00
Pajak Hotel	320.000.000,00	362.146.291,00	113,17	355.792.034,00
Pajak Wisma Pariwisata	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	1.042.500.000,00	1.230.976.522,00	118,08	1.041.262.213,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	990.000.000,00	1.190.047.522,00	120,21	986.772.213,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	50.500.000,00	40.929.000,00	81,05	54.490.000,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan	17.000.000,00	220.000,00	1,29	400.000,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.000.000,00	220.000,00	22,00	400.000,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	52.188.950,00	58.495.825,00	112,08	51.927.750,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	30.388.950,00	47.031.200,00	154,76	51.927.750,00
Pajak Reklame Kain	2.600.000,00	6.430.625,00	247,33	0,00
Pajak Reklame Selebaran	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame Berjalan	19.000.000,00	5.034.000,00	26,49	0,00
Pajak Penerangan Jalan	1.800.000.000,00	1.920.461.404,00	106,69	1.592.445.919,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.800.000.000,00	1.920.461.404,00	106,69	1.592.445.919,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	9.445.084,00	31,48	3.112.432,00
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	9.445.084,00	31,48	3.112.432,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.705.092.220,00	857.119.013,00	12,78	721.583.875,00
Pajak Pasir dan Kerikil	6.705.092.220,00	857.119.013,00	12,78	721.583.875,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.100.000.000,00	931.022.455,00	84,64	963.047.945,00
PBBP2	1.100.000.000,00	931.022.455,00	84,64	963.047.945,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	250.000.000,00	218.360.500,00	87,34	186.012.700,00
BPHTB-Pemindahan Hak	250.000.000,00	218.360.500,00	87,34	186.012.700,00
Jumlah	11.319.781.170,00	5.588.247.094,00	49,37	4.915.584.868,00

Berdasarkan tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.588.247.094,00 atau 49,37% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp11.319.781.170,00. Realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp672.662.226,00 atau 13,68% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.915.584.868,00.

Untuk Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 yang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan:

- Kegiatan intensifikasi tim pendataan dan penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo telah berjalan dengan baik sehingga konfirmasi wajib pajak untuk pajak hotel, reklame, penerangan jalan dan air bawah tanah mengalami kenaikan.
- Meningkatnya transaksi jual beli tanah dengan nilai diatas NTKP.

Untuk Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan:

- Sistem pemungutan pajak hiburan bersifat *self-assesment* dan terdiri dari empat rincian objek yaitu Pajak Diskotik-Karaode-Klub Malam-dan sejenisnya, Pajak Permainan Billiar-Bowlling, Pajak Pacuan Kuda-Kendaraan Bermotor-Permainan Ketangkasan, dan Pajak Pertandingan Olahraga. Meskipun potensi jumlah objek dan *event* penyelenggaraan hiburan cukup tersedia tetapi karena tidak dilaporkan oleh wajib pajak maka realisasi penerimaan sangat minim.
- Keterlambatan penyebaran SPPT pajak tahun 2022 berakibat pada terbatasnya waktu koordinasi dan berdampak pada rendahnya realisasi yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 3,21%. Penyebaran SPPT PBB P2 Tahun 2022 baru dilaksanakan pada awal bulan September karena proses penerbitan SPPT baru selesai pada akhir bulan Agustus 2022 yang didahului proses penginputan, penilaian, penetapan dari hasil pendataan masal pada tahun sebelumnya.



5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan. Besaran pungutan tarif retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai unit penghasil. Retribusi Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

A.	Retribusi Jasa Umum	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
		2.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
		3.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
		4.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
B.	Retribusi Jasa Usaha	5.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
		7.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
		9.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
		10.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
		11.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
C.	Retribusi Perijinan Tertentu	12.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
		13.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
		14.	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4
Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten NagekeoTA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.611.616.000,00	877.521.226,20	33,60	1.066.095.920,51
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.700.000.000,00	501.117.226,20	29,48	826.795.920,51
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	18.804.000,00	37,61	7.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	745.516.000,00	303.600.000,00	40,72	113.000.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	116.100.000,00	54.000.000,00	46,51	118.800.000,00
Retribusi Jasa Usaha	3.065.789.529,00	1.927.783.657,00	62,88	1.319.778.907,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.476.789.529,00	1.597.621.257,00	64,50	1.011.953.707,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	57.848.000,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	20.897.000,00	20,90	18.243.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	333.000.000,00	256.447.400,00	77,01	174.598.200,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000.000,00	15.068.000,00	15,07	10.986.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	15.000.000,00	7.300.000,00	48,67	6.650.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	41.000.000,00	30.450.000,00	74,27	39.500.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	7.500.000.000,00	74.345.000,00	0,99	178.019.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.500.000.000,00	74.345.000,00	0,99	178.019.000,00
Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	13.177.405.529,00	2.879.649.883,20	21,85	2.563.893.827,51

Berdasarkan tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.879.649.883,20 atau 21,85% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp13.177.405.529,00. Realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp315.756.055,69 atau 12,32% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.563.893.827,51. Rincian pemungut retribusi daerah Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	Jenis Retribusi	Nilai Retribusi (Rp)
		Retribusi Jasa Umum	
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	501.117.226,20
2	Dinas Perhubungan	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.804.000,00
3	Kecamatan Aesesa	Retribusi Pelataran	65.800.000,00
4	Kecamatan Boawae	Retribusi Pelataran	91.000.000,00
5	Kecamatan Mauponggo	Retribusi Pelataran	37.000.000,00
6	Kecamatan Nangaroro	Retribusi Pelataran	28.200.000,00
7	Kecamatan Keo tengah	Retribusi Pelataran	2.000.000,00
8	Kecamatan Aesesa	Retribusi Los	8.300.000,00
9	Kecamatan Nangaroro	Retribusi Los	6.800.000,00
10	Kecamatan Keo tengah	Retribusi Los	1.000.000,00
11	Kecamatan Aesesa	Retribusi Kios	57.600.000,00
12	Kecamatan Boawae	Retribusi Kios	720.000,00
13	Kecamatan Nangaroro	Retribusi Kios	1.800.000,00
14	Kecamatan Keo tengah	Retribusi Kios	3.380.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	54.000.000,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum		877.521.226,20
		Retribusi Jasa Usaha	
1	Badan Keuangan Daerah	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	36.971.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Retribusi Penyewaan Tanah	19.449.000,00
3	Dinas Kesehatan	Retribusi Penyewaan Tanah	3.101.000,00
4	Badan Keuangan Daerah	Retribusi Penyewaan Tanah	273.550.640,00
5	Kecamatan Nangaroro	Retribusi Penyewaan Tanah	177.840,00
6	Kecamatan Keo tengah	Retribusi Penyewaan Tanah	1.134.000,00
7	Badan Keuangan Daerah	Retribusi Penyewaan Bangunan	12.055.726,00
8	Kecamatan Nangaroro	Retribusi Penyewaan Bangunan	6.581.811,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Pemakaian Ruangan	8.564.074,00
10	Dinas Perhubungan	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	11.865.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Pemakaian Alat	1.061.269.166,00
12	Dinas Perhubungan	Retribusi Pemakaian Alat	2.070.000,00
13	Dinas Pangan	Retribusi Pemakaian Alat	25.472.000,00
14	Dinas Pertanian	Retribusi Pemakaian Alat	135.360.000,00
15	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	20.897.000,00
16	Dinas Pertenakan	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	256.447.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	Jenis Retribusi	Nilai Retribusi (Rp)
17	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	15.068.000,00
18	Dinas Pariwisata	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.300.000,00
19	Dinas Pertanian	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	30.450.000,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha			1.927.783.657,00
Retribusi Perizinan Tertentu			
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	74.345.000,00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu			74.345.000,00
Total Retribusi Daerah			2.879.649.883,20

Untuk Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 yang mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 disebabkan tingginya angka kunjungan pasien BPJS ke Puskesmas dan berkurangnya angka rujukan ke tingkat perawatan lebih lanjut ke RSUD Kabupaten lain.

Untuk Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan:

- Dengan semakin meningkatnya jumlah layanan jaminan kesehatan baik yang bersumber Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maka jumlah pelayanan kesehatan umum mengalami penurunan sehingga berakibat pada penurunan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.
- Penurunan penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diakibatkan karena beberapa provider belum melakukan pelunasan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran.
- Pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Retribusi Pelayanan Pasar - Rincian Objek Pelayanan Kios dicatat sebagai penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sedangkan pada Tahun 2022 Rincian Objek Pelayanan Kios dicatat sebagai penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.
- Penerimaan Retribusi Penjualan Usaha Produksi Usaha Daerah menurun seiring dengan menurunnya permintaan benih padi dan jagung.
- Pada Tahun 2021 sistem pemungutan masih dilaksanakan secara manual, sedangkan pada tahun 2022 sudah menerapkan aplikasi SIM-BG. Penyesuaian dengan sistem yang baru menyebabkan kendala dalam proses pengurusan oleh pemohon yang mengakibatkan penurunan jumlah permohonan ijin.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada PT. BPD NTT. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ini adalah hasil dari bagian Laba/Deviden PT. BPD NTT. Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel 5.6 berikut ini:

Tabel 5.6
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Nagekeo
TA 2022 dan 2021

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.614.351.128,00	2.207.175.564,00	84,43	3.688.014.444,00
Jumlah	2.614.351.128,00	2.207.175.564,00	84,43	3.688.014.444,00

Berdasarkan tabel 5.6 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.207.175.564,00 atau 84,43% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp2.614.351.128,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.688.014.444,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.480.838.880,00 atau 40,15%.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi pajak daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel 5.7 berikut ini:

Tabel 5.7
Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	612.507.188,00	204,17	5.000.000,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	612.507.188,00	204,17	5.000.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.700.000,00	5.940.000,00	104,21	0,00
Hasil Sewa BMD	5.700.000,00	5.940.000,00	104,21	0,00
Jasa Giro	1.071.666.276,00	708.405.222,14	66,10	1.093.870.986,84
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.071.666.276,00	708.405.222,14	66,10	1.093.870.986,84
Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00	20.775.000,00	41,55	2.350.000,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00	20.775.000,00	41,55	2.350.000,00
Pendapatan Bunga	2.380.753.425,00	1.047.033.390,08	43,98	3.939.009.378,35
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.380.753.425,00	1.047.033.390,08	43,98	3.939.009.378,35
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.000.000.000,00	824.558.245,68	20,61	755.369.290,80
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.000.000.000,00	824.558.245,68	20,61	755.369.290,80



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	422.143.500,00	278.436.830,00	65,96	440.387.452,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	422.143.500,00	278.436.830,00	65,96	440.387.452,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	238.000.000,00	1.555.234.401,52	653,46	360.654.923,68
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	238.000.000,00	1.555.234.401,52	653,46	360.654.923,68
Pendapatan Denda Pajak Daerah	26.461.200,00	33.487.495,00	126,55	46.473.567,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	848.500,00	1.852.940,00	218,38	241.500,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	500.000,00	393.500,00	78,70	764.012,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	3.771.520,00	0,00	72.920,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19.112.700,00	19.112.700,00	100,00	33.617.850,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000,00	8.356.835,00	139,28	11.777.285,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	205.620,00	0,00	118.920,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	205.620,00	0,00	118.920,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	12.000.000,00	61.719.826,00	514,33	110.106.112,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12.000.000,00	61.719.826,00	514,33	110.106.112,00
Pendapatan BLUD	13.035.000.000,00	16.848.195.186,48	129,25	2.033.079.340,00
Pendapatan BLUD	13.035.000.000,00	16.848.195.186,48	129,25	2.033.079.340,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	857.564.460,00	1.586.880.200,00	185,05	13.322.214.589,85
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	857.564.460,00	1.586.880.200,00	185,05	13.322.214.589,85
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	1.582.630,99	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	1.582.630,99	0,00	0,00
Jumlah	25.099.288.861,00	23.584.961.235,89	93,97	22.108.634.560,52

Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp23.584.961.235,89 atau 93,97% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp25.099.288.861,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp1.476.326.675,37 atau sebesar 6,68% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.108.634.560,52.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, yakni pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka desentralisasi dan perimbangan keuangan di daerah.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel 5.8 berikut ini:

Tabel 5.8

Pendapatan Transfer Kabupaten Nagekeo TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.648.738.088,00	644.616.163.489,00	98,77	638.034.248.168,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.497.381.090,00	17.957.938.909,00	67,77	13.567.127.294,00
Jumlah Pendapatan Transfer	679.146.119.178,00	662.574.102.398,00	97,56	651.601.375.462,00

Berdasarkan tabel 5.8 di atas, menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp662.574.102.398,00 atau 97,56% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp679.146.119.178,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp10.972.726.936,00 atau sebesar 1,68% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp651.601.375.462,00.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pusat Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel 5.9 berikut ini:

Tabel 5.9

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Nagekeo

Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.374.467.945,00	10.204.297.703,00	108,85	11.895.627.458,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	407.517.873.000,00	407.250.885.737,00	99,93	407.222.571.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.109.560.143,00	145.665.009.049,00	95,14	121.284.707.710,00
Dana Insentif Daerah	2.301.731.000,00	1.150.865.000,00	50,00	8.410.250.000,00
Dana Desa	80.345.106.000,00	80.345.106.000,00	100,00	89.221.092.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.648.738.088,00	644.616.163.489,00	98,77	638.034.248.168,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan tabel 5.9 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp644.616.163.489,00 atau sebesar 98,77% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp652.648.738.088,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp6.581.915.321,00 atau sebesar 1,03% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp638.034.248.168,00.

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.204.297.703,00 atau 108,85% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp9.374.467.945,00. Terjadi penurunan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.691.329.755,00 atau sebesar 14,22% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.895.627.458,00 Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut ini:

Tabel 5.10

Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.225.262.104,00	5.878.395.264,00	112,50	7.445.049.046,00
DBH PPh Pasal 21	1.918.983.069,00	1.854.641.096,00	96,65	2.195.590.881,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	199.622.193,00	199.622.193,00	100,00	167.342.141,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	103.588.912,00	100.902.802,00	97,41	166.881.770,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perusahaan Panas Bumi	54.034.922,00	117.514.000,00	217,48	216.919.608,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	58.277.604,00	45.549.776,00	78,16	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	12.032.660,00	49.305.572,00	409,76	24.936.237,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	4.407.625,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	0,00	56.000,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.802.666.481,00	1.958.311.000,00	108,63	1.674.500.150,00
Jumlah Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	9.374.467.945,00	10.204.297.703,00	108,85	11.895.627.458,00

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Tidak terdapat Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022 dan tahun sebelumnya 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel 5.11 berikut ini:

Tabel 5.11
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp407.250.885.737,00 atau 99,93% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp407.517.873.000,00. Terdapat peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp28.314.737,00 atau sebesar 0,01% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp407.222.571.000,00. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut ini:

Tabel 5.12
Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAU	407.517.873.000,00	407.250.885.737,00	99,93	407.222.571.000,00
Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	407.517.873.000,00	407.250.885.737,00	99,93	407.222.571.000,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp145.665.009.049,00 atau 95,14% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp153.109.560.143,00. Terdapat peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp24.380.301.339,00 atau sebesar 20,10% dibandingkan dengan realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp121.284.707.710,00. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut ini:

Tabel 5.13
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.386.976.143,00	66.810.172.738,00	99,14	79.652.402.280,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.043.546.000,00	2.043.546.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.731.647.400,00	5.731.647.400,00	100,00	8.637.925.450,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.429.866.000,00	8.429.866.000,00	100,00	3.242.395.900,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	515.610.000,00	515.610.000,00	100,00	9.766.391.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	10.465.007.975,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	6.512.010.301,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.256.994.719,00	2.763.787.314,00	84,86	649.390.255,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.353.637.915,00	3.353.637.915,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	395.700.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	738.893.806,00	738.893.806,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	805.755.000,00	805.755.000,00	100,00	1.016.941.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	554.380.000,00	554.380.000,00	100,00	277.365.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	993.764.000,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.530.992.706,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.683.495.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	492.932.150,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	949.898.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.794.377.982,00	6.794.377.982,00	100,00	8.044.923.050,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.288.750.000,00	12.288.750.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.578.501.721,00	3.578.501.721,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.088.150.500,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	777.151.000,00	777.151.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.403.942.437,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.279.256.500,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi	10.229.435.900,00	10.229.435.900,00	100,00	5.336.194.600,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi	0,00	0,00		7.885.726.456,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan	7.546.905.000,00	7.546.905.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	741.523.700,00	657.927.700,00	88,73	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.722.584.000,00	78.854.836.311,00	91,99	41.632.305.430,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	27.252.580.000,00	26.472.771.567,00	97,14	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.125.157.000,00	26.430.875.600,00	90,75	30.214.960.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.947.000.000,00	1.947.000.000,00	100,00	1.423.700.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.068.480.000,00	832.946.142,00	40,27	1.496.566.100,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.124.600.000,00	2.124.600.000,00	100,00	2.028.210.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	308.300.000,00	308.300.000,00	100,00	614.500.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.706.880.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	16.102.686.000,00	17.861.251.762,00	110,92	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	209.782.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	1.982.407.600,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	278.316.342,00	69,44	347.610.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	2.058.370.730,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	670.360.000,00	631.171.399,00	94,15	862.008.000,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	603.973.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	388.654.000,00	299.460.629,00	77,05	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.057.605.000,00	1.323.576.470,00	43,29	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	359.700.000,00	344.566.400,00	95,79	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus	153.109.560.143,00	145.665.009.049,00	95,14	121.284.707.710,00

5.1.1.2.1.5 Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.150.865.000,00 atau 50,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp2.301.731.000,00. Terdapat penurunan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp7.259.385.000,00 atau sebesar 86,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.410.250.000,00. Anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini:

Tabel 5.14

Dana Insentif Daerah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	2.301.731.000,00	1.150.865.000,00	50,00	8.410.250.000,00
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	2.301.731.000,00	1.150.865.000,00	50,00	8.410.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5.1.1.2.1.6 Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp80.345.106.000,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp80.345.106.000,00. Terdapat penurunan Dana Desa sebesar Rp8.875.986.000,00 atau sebesar 9,95% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp89.221.092.000,00. Anggaran dan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut ini:

Tabel 5.15

Dana Desa TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Desa	80.345.106.000,00	80.345.106.000,00	100,00	89.221.092.000,00
Jumlah Dana Desa	80.345.106.000,00	80.345.106.000,00	100,00	89.221.092.000,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp17.957.938.909,00 atau 67,77% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp26.497.381.090,00. Terdapat peningkatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp4.390.811.615,00 atau sebesar 32,36% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.567.127.294,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.16 berikut ini:

Tabel 5.16

Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.497.381.090,00	17.957.938.909,00	67,77	13.567.127.294,00
Pendapatan Bagi Hasil	26.497.381.090,00	17.957.938.909,00	67,77	13.567.127.294,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.497.381.090,00	17.957.938.909,00	67,77	13.567.127.294,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.379.200.233,00	2.301.478.438,00	42,78	1.729.980.325,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.595.142.276,00	837.503.882,00	32,27	1.483.556.742,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.343.371.204,00	4.302.947.801,00	51,57	1.806.406.863,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.213.493,00	11.780.864,00	48,65	39.156.587,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.155.453.884,00	10.504.227.924,00	103,43	8.508.026.777,00



5.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6.019.350.048,00 atau 91,77% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp6.558.922.100,00. Terdapat penurunan sebesar Rp9.805.560.085,00 atau 61,96% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.824.910.133,00. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut ini:

Tabel 5.17

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	91,77	15.824.910.133,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	91,77	15.824.910.133,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.019.350.048,00 bersumber dari dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Rincian Pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut ini:

Tabel 5.18

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD Kabupaten Nagekeo

Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Puskesmas	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Puskesmas Danga	1.601.920.080,00	1.497.740.913,00	93,50	0,00
2	Puskesmas Kaburea	239.090.400,00	202.415.293,00	84,66	0,00
3	Puskesmas Nangaroro	854.562.690,00	830.304.974,00	97,16	0,00
4	Puskesmas Maunori	723.654.000,00	583.649.580,00	80,65	0,00
5	Puskesmas Mauponggo	985.217.040,00	919.896.882,00	93,37	0,00
6	Puskesmas Boawae	1.800.000.000,00	1.636.822.910,00	90,93	0,00
7	Puskesmas Jawakisa	334.477.890,00	336.306.896,00	100,55	0,00
8	Puskesmas Utetoto	20.000.000,00	12.212.600,00	61,06	0,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	6.558.922.100,00	6.019.350.048,00	91,77	0,00

5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu (i) belanja pemerintah daerah menurut urusan pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), (ii) belanja pemerintah daerah menurut fungsi, (iii) belanja pemerintah daerah menurut organisasi, (iv) belanja pemerintah daerah menurut kelompok belanja, dan (v) belanja pemerintah daerah menurut jenis.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada periode Tahun Anggaran 2022 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan pada tabel 5.19 sebagai berikut:

Tabel 5.19

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Belanja Operasi	511.025.944.824,00	476.000.097.333,79	93,15	478.233.112.157,21
2.	Belanja Modal	125.972.561.078,00	113.999.290.488,50	90,50	177.034.170.277,63
3.	Belanja Tak Terduga	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	55,25	3.700.259.187,00
Jumlah		645.052.630.545,00	594.449.450.255,29	92,16	658.967.541.621,84

Berdasarkan tabel 5.19 di atas menunjukkan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp594.449.450.255,29 atau 92,16% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp645.052.630.545,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp64.518.091.366,55 atau 9,79% dibanding realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp658.967.541.621,84.

5.1.2.2 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.20

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Pegawai	276.305.411.495,00	267.524.611.956,00	96,82	263.787.905.340,00
Belanja Barang dan Jasa	194.767.666.529,00	169.078.523.799,79	86,81	186.246.100.112,21
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	18.106.796.800,00	17.552.418.715,00	96,94	11.751.630.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja Bantuan Sosial	21.846.070.000,00	21.844.542.863,00	99,99	16.447.476.155,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	511.025.944.824,00	476.000.097.333,79	93,15	478.233.112.157,21

Berdasarkan tabel 5.20 diatas menunjukkan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp476.000.097.333,79 atau 93,15% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp511.025.944.824,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.233.014.823,42 atau 0,47% dibanding realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp478.233.112.157,21.

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp476.000.097.333,79 tersebut termasuk didalamnya belanja yang dilaksanakan dengan mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyedia Air Minum, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, Puskesmas-Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

5.1.2.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp267.524.611.956,00 atau 96,82% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp276.305.411.495,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.736.706.616,00 atau 1,42% dibanding realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp263.787.905.340,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan pada tabel 5.21 berikut ini:

Tabel 5.21
Belanja Pegawai Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	214.470.573.316,00	212.429.975.907,00	99,05	206.822.781.295,00
Belanja Gaji Pokok ASN	162.050.030.423,00	160.556.679.904,00	99,08	155.753.876.358,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.838.832.335,00	14.692.410.032,00	99,01	14.366.930.336,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.878.368.550,00	5.801.239.900,00	98,69	5.697.137.576,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.221.802.575,00	11.145.816.450,00	99,32	10.841.796.850,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.973.686.200,00	1.902.033.000,00	96,37	1.785.106.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	9.837.687.068,00	9.727.962.891,00	98,88	9.569.289.120,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	80.398.167,00	77.116.320,00	95,92	74.738.138,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.642.762,00	2.466.769,00	93,34	2.398.741,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.209.927.467,00	7.160.620.043,00	99,32	7.502.048.134,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	332.456.712,00	328.810.007,00	98,90	319.346.042,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.044.741.057,00	1.034.820.591,00	99,05	910.114.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	38.946.318.000,00	35.615.544.800,00	91,45	7.500.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	38.946.318.000,00	35.615.544.800,00	91,45	7.500.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.728.654.570,00	8.234.702.243,00	76,75	38.189.295.766,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	66.018.031,00	65.246.039,00	98,83	90.774.847,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	182.435.739,00	108.476.204,00	59,46	100.253.639,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	29.030.518.480,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.068.480.000,00	0,00	0,00	1.117.174.800,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.078.700.000,00	1.942.550.000,00	93,45	1.304.750.000,00
Belanja Honorarium	6.038.220.800,00	5.831.630.000,00	96,58	6.239.305.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	294.800.000,00	286.800.000,00	97,29	306.519.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.001.582.646,00	8.884.564.988,00	98,70	8.891.083.128,00
Belanja Uang Representasi DPRD	565.783.025,00	561.540.000,00	99,25	561.540.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	35.056.743,00	34.839.000,00	99,38	34.839.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	57.132.638,00	48.666.240,00	85,18	55.184.040,00
Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	48.132.000,00	85,71	48.132.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	819.321.956,00	814.233.800,00	99,38	814.233.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.128.500,00	71.253.000,00	85,71	71.253.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	26.075.350,00	12.606.300,00	48,35	12.606.300,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	472.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	181.185.862,00	154.418.268,00	85,23	154.418.268,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	15.616,00	12.540,00	80,30	13.680,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.911.228.956,00	1.872.363.840,00	97,97	1.872.363.840,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.904.000.000,00	2.904.000.000,00	100,00	2.904.000.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	62.282.963,00	43.430.559,00	69,73	182.405.688,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	3.041.640,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	846.832,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	1.960,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	16.504.502,00	16.311.505,00	98,83	8.276.209,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	45.778.461,00	27.119.054,00	59,24	14.419.047,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	410.000.000,00	410.000.000,00	100,00	409.998.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	109.998.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	2.686.000.000,00	1.906.393.459,00	70,98	1.792.341.463,00
Belanja Pegawai BLUD	2.686.000.000,00	1.906.393.459,00	70,98	1.792.341.463,00
Jumlah Belanja Pegawai	276.305.411.495,00	267.524.611.956,00	96,82	263.787.905.340,00

Rincian realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 per perangkat dapat dilihat pada tabel 5.22 berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.22
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Pegawai
1		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.769.839.529,00
		Dinas Kesehatan	44.454.717.680,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.096.987.764,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	896.961.303,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.258.183.035,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.127.516.618,00
		Dinas Sosial	1.587.459.082,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.242.778.606,00
		Dinas Pangan Daerah	1.086.918.793,00
		Dinas Lingkungan Hidup	1.247.740.154,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.351.230.315,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.245.773.190,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.120.962.459,00
		Dinas Perhubungan	1.164.010.973,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	784.555.120,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.287.133.821,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.220.507.843,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.044.894.124,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.138.802.040,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan	1.053.110.111,00
		Dinas Pariwisata	1.309.787.940,00
		Dinas Pertanian	8.058.527.045,00
		Dinas Peternakan	2.199.998.430,00
		Sekretariat Daerah	4.566.571.467,00
		Sekretariat DPRD	1.032.637.405,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.255.764.014,00
		Badan Keuangan Daerah	11.498.041.389,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.256.099.362,00
		Inspektorat	2.790.423.381,00
		Kecamatan Aesesa	2.601.125.268,00
		Kecamatan Boawae	3.251.946.017,00
		Kecamatan Mauponggo	1.353.825.136,00
		Kecamatan Nangaroro	1.352.692.299,00
		Kecamatan Wolowae	678.031.916,00
		Kecamatan Keo Tengah	864.471.971,00
		Kecamatan Aesesa Selatan	613.869.011,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Pegawai
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	566.081.296,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			212.429.975.907,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.775.544.800,00
		RSUD Aeramo	6.840.000.000,00
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN			35.615.544.800,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.417.910.000,00
		Dinas Kesehatan	728.340.000,00
		RSUD Aeramo	78.350.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	313.600.000,00
		Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum	71.160.000,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	87.850.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	83.550.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.000.000,00
		Dinas Sosial	86.560.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	83.650.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.860.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	74.880.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83.800.000,00
		Dinas Perhubungan	89.230.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	91.280.000,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	84.580.000,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80.500.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	88.240.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73.220.000,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	74.390.000,00
		Dinas Pangan Daerah	65.990.000,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan	147.510.000,00
		Dinas Pariwisata	94.610.000,00
		Dinas Pertanian	138.770.000,00
		Dinas Peternakan	98.440.000,00
		Sekretariat Daerah	689.930.000,00
		Sekretariat DPRD	90.330.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	142.040.000,00
		Badan Keuangan Daerah	581.612.243,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	76.270.000,00
		Inspektorat	65.690.000,00
		Kecamatan Aesesa	325.340.000,00
		Kecamatan Boawae	402.470.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Pegawai
		Kecamatan Mauponggo	113.100.000,00
		Kecamatan Nangaroro	97.320.000,00
		Kecamatan Wolowae	68.640.000,00
		Kecamatan Keo Tengah	68.640.000,00
		Kecamatan Aesesa Selatan	68.640.000,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	47.410.000,00
Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			8.234.702.243,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		
		Sekretariat DPRD	8.884.564.988,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD			8.884.564.988,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
		Badan Keuangan Daerah	43.430.559,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			43.430.559,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		
		Sekretariat Daerah	300.000.000,00
		Sekretariat DPRD	110.000.000,00
Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH			410.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD		
		RSUD Aeramo	130.990.000,00
		BLUD SPAM	1.775.403.459,00
Jumlah Belanja Pegawai BLUD			1.906.393.459,00
Jumlah Realisasi Belanja Pegawai			267.524.611.956,00

5.1.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp169.078.523.799,79 atau 86,81% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp194.767.666.529,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp17.167.576.312,42 atau 9,22% dibanding realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp186.246.100.112,21.

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan pada tabel 5.23 dan tabel 5.24 berikut ini:

Tabel 5.23 Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang dan Jasa	194.767.666.529,00	169.078.523.799,79	86,81	186.246.100.112,21
RKUD		145.690.339.689,79		166.338.049.685,11
BOS		12.326.190.899,00		13.286.825.060,10
BOP PAUD		509.122.000,00		0,00
JKN		6.125.606.683,00		6.310.596.053,00
BLUD		4.427.264.528,00		308.353.314,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.24
Rincian Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Barang	54.996.949.553,00	50.701.006.344,79	92,19	64.653.346.271,97
Belanja Barang Pakai Habis	54.990.601.553,00	50.695.876.344,79	92,19	64.533.852.271,97
RKUD	0,00	48.537.084.828,79	0,00	62.841.075.373,97
BOP PAUD	0,00	344.522.000,00	0,00	0,00
JKN	0,00	1.814.269.516,00	0,00	1.692.776.898,00
Belanja Bahan Tak Habis Pakai	6.348.000,00	5.130.000,00	80,81	119.494.000,00
RKUD	0,00	5.130.000,00	0,00	119.494.000,00
Belanja Jasa	88.155.241.836,00	76.800.540.951,00	87,12	82.366.952.192,54
Belanja Jasa Kantor	45.038.287.263,00	40.205.061.885,00	89,27	45.166.765.628,00
RKUD	0,00	35.901.034.718,00	0,00	40.854.936.843,00
BOP PAUD	0,00	164.600.000,00	0,00	0,00
JKN	0,00	4.139.427.167,00	0,00	4.311.828.785,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.882.440.000,00	8.837.850.000,00	99,50	8.093.599.800,00
RKUD	0,00	8.837.850.000,00	0,00	8.093.599.800,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin (RKUD)	2.136.465.404,00	2.101.299.404,00	98,35	1.163.315.952,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (RKUD)	997.817.000,00	923.130.000,00	92,51	400.310.000,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi (RKUD)	10.500.000,00	10.494.558,00	99,95	455.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi (RKUD)	5.913.905.419,00	5.364.166.522,00	90,70	3.711.448.726,44
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (RKUD)	11.000.000,00	10.137.391,00	92,16	3.492.400.408,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (RKUD)	0,00	0,00	0,00	188.650.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (RKUD)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (RKUD)	2.344.537.500,00	2.262.645.500,00	96,51	4.892.724.804,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (RKUD)	0,00	0,00	0,00	1.444.427.500,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	289.500.000,00	282.300.000,00	97,51	165.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (RKUD)				
Belanja Barang dan Jasa BOS (BOS)	12.542.304.000,00	12.326.190.899,00	98,28	8.612.298.385,10
Belanja Pegawai Dana BOS (BOS)	0,00	0,00	0,00	4.676.802.675,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD (BLUD)	9.938.485.250,00	4.427.264.528,00	44,55	308.353.314,00
Belanja Pemeliharaan	10.729.168.140,00	10.455.144.440,00	97,45	14.161.874.143,70
Belanja Pemeliharaan	10.729.168.140,00	10.455.144.440,00	97,45	14.161.874.143,70
RKUD	0,00	10.336.974.440,00	0,00	13.895.983.773,70
JKN	0,00	118.170.000,00	0,00	265.890.370,00
Belanja Perjalanan Dinas	40.886.307.000,00	31.121.832.328,00	76,12	25.063.927.504,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.886.307.000,00	31.121.832.328,00	76,12	25.063.927.504,00
RKUD	0,00	31.068.092.328,00	0,00	25.023.827.504,00
JKN	0,00	53.740.000,00	0,00	40.100.000,00
Jumlah	194.767.666.529,00	169.078.523.799,79	86,81	186.246.100.112,21

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 per perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 5.25 berikut ini:

Tabel 5.25

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Barang dan Jasa
1		Belanja Barang Pakai Habis	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.121.313.731,00
		Dinas Kesehatan	8.403.593.289,00
		RSUD Aera Mo	5.473.784.107,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.108.368.101,22
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	404.452.899,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	215.031.400,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	596.298.333,00
		Dinas Sosial	187.827.247,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	300.194.000,00
		Dinas Pangan Daerah	560.699.850,00
		Dinas Lingkungan Hidup	149.393.500,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	580.028.422,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	453.088.400,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	886.642.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Barang dan Jasa
		Dinas Perhubungan	981.097.072,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	149.756.800,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	339.936.913,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.053.050,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.250.442.871,63
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	140.142.600,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan	2.155.350.596,94
		Dinas Pariwisata	433.113.100,00
		Dinas Pertanian	2.690.551.270,00
		Dinas Peternakan	724.251.513,00
		Sekretariat Daerah	2.731.946.565,00
		Sekretariat DPRD	2.955.753.033,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	495.122.520,00
		Badan Keuangan Daerah	844.685.020,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	291.700.050,00
		Inspektorat	294.445.252,00
		Kecamatan Aesesa	1.830.883.832,00
		Kecamatan Boawae	2.694.874.299,00
		Kecamatan Mauponggo	416.978.900,00
		Kecamatan Nangaroro	330.060.800,00
		Kecamatan Wolowae	61.238.099,00
		Kecamatan Keo Tengah	64.701.000,00
		Kecamatan Aesesa Selatan	79.093.917,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	152.981.492,00
Jumlah Belanja Barang Pakai Habis			50.695.876.344,79
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai		
		Dinas Kesehatan	5.130.000,00
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN			5.130.000,00
3	Belanja Jasa Kantor		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.509.754.165,00
		Dinas Kesehatan	9.750.670.133,00
		RSUD Aeram	3.280.129.691,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.335.625.592,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	752.450.807,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.045.045.550,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	183.131.617,00
		Dinas Sosial	444.520.813,00
		Dinas Lingkungan Hidup	315.197.500,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	297.584.110,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	408.697.544,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Barang dan Jasa
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	723.648.909,00
		Dinas Perhubungan	128.227.324,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	888.293.247,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	297.838.788,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	163.871.894,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	370.631.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255.472.000,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	120.048.537,00
		Dinas Pangan Daerah	132.560.349,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan	112.029.012,00
		Dinas Pariwisata	387.877.600,00
		Dinas Pertanian	516.242.820,00
		Dinas Peternakan	340.431.960,00
		Sekretariat Daerah	2.883.996.645,00
		Sekretariat DPRD	460.446.425,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	772.864.614,00
		Badan Keuangan Daerah	3.006.242.074,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	408.814.970,00
		Inspektorat	992.739.950,00
		Kecamatan Aesesa	1.371.550.065,00
		Kecamatan Boawae	1.459.699.200,00
		Kecamatan Mauponggo	227.678.500,00
		Kecamatan Nangaroro	274.445.650,00
		Kecamatan Wolowae	39.225.300,00
		Kecamatan Keo Tengah	61.398.000,00
		Kecamatan Aesesa Selatan	111.161.590,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	374.817.940,00
		Jumlah Belanja Jasa Kantor	40.205.061.885,00
4	Belanja luran Jaminan/Asuransi		
		Dinas Kesehatan	8.090.588.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	747.262.000,00
		Jumlah Belanja luran Jaminan/Asuransi	8.837.850.000,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
		Dinas Kesehatan	121.048.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.617.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.340.259.404,00
		Dinas Lingkungan Hidup	7.400.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Barang dan Jasa
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	18.750.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	124.800.000,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.500.000,00
		Dinas Pangan Daerah	7.500.000,00
		Dinas Pariwisata	13.250.000,00
		Dinas Pertanian	33.875.000,00
		Dinas Peternakan	11.250.000,00
		Sekretariat Daerah	86.800.000,00
		Sekretariat DPRD	182.500.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.500.000,00
		Badan Keuangan Daerah	24.250.000,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.200.000,00
		Kecamatan Mauponggo	1.800.000,00
Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			2.101.299.404,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.440.000,00
		Dinas Kesehatan	39.380.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.400.000,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	68.750.000,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.000.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	67.960.000,00
		Dinas Pariwisata	152.650.000,00
		Sekretariat Daerah	189.750.000,00
		Sekretariat DPRD	371.300.000,00
		Badan Keuangan Daerah	1.500.000,00
Jumlah Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			923.130.000,00
7	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi		
		Dinas Kesehatan	10.494.558,00
Jumlah Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi			10.494.558,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.099.156.900,00
		Dinas Kesehatan	120.496.700,00
		RSUD Aeram	159.019.457,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.474.392.400,00
		Dinas Lingkungan Hidup	10.627.000,00
		Dinas Perhubungan	317.922.500,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.892.100,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	26.986.000,00
		Dinas Pangan Daerah	13.984.665,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Barang dan Jasa
		Dinas Pariwisata	105.694.600,00
		Dinas Pertanian	27.994.200,00
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi			5.364.166.522,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		
		Dinas Komunikasi dan Informatika	2.137.391,00
		Dinas Pertanian	8.000.000,00
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			10.137.391,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00
Jumlah Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			50.000.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	4.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.000.000,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	6.125.000,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	58.800.000,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	208.362.500,00
		Dinas Pertanian	30.700.000,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.718.172.000,00
		Kecamatan Boawae	10.000.000,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	224.486.000,00
Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			2.262.645.500,00
12	Belanja Pemeliharaan Tanah		
		Kecamatan Boawae	100.000.000,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Tanah			100.000.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.860.000,00
		Dinas Kesehatan	321.475.212,00
		RSUD Aeram	78.320.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	208.191.500,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.055.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	138.239.800,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.615.409,00
		Dinas Sosial	87.587.312,00
		Dinas Lingkungan Hidup	45.644.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.061.993,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46.010.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	43.085.300,00
		Dinas Perhubungan	4.050.300,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	52.765.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Barang dan Jasa
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	34.075.000,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.180.900,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	36.775.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.042.000,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	27.346.000,00
		Dinas Pangan Daerah	57.201.932,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan	43.358.500,00
		Dinas Pariwisata	42.872.000,00
		Dinas Pertanian	157.562.678,00
		Dinas Peternakan	39.674.567,00
		Sekretariat Daerah	565.609.666,00
		Sekretariat DPRD	246.316.008,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.897.000,00
		Badan Keuangan Daerah	62.072.000,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	38.416.000,00
		Inspektorat	36.910.000,00
		Kecamatan Aesesa	57.147.000,00
		Kecamatan Boawae	15.520.000,00
		Kecamatan Mauponggo	48.140.000,00
		Kecamatan Nangaroro	44.096.823,00
		Kecamatan Wolowae	57.177.000,00
		Kecamatan Keo Tengah	36.789.800,00
		Kecamatan Aesesa Selatan	53.746.000,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	36.820.000,00
		Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.031.706.700,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.859.274.000,00
		Dinas Kesehatan	8.000.000,00
		RSUD Aeram	2.949.000.000,00
		Dinas Perhubungan	507.163.740,00
		Jumlah Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.323.437.740,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	774.530.460,00
		Dinas Kesehatan	8.484.294.052,00
		RSUD Aeram	53.480.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.166.737.252,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	197.555.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	598.705.878,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	164.913.300,00
		Dinas Sosial	255.818.057,00
		Dinas Lingkungan Hidup	432.900.766,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Barang dan Jasa
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	540.769.508,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	913.598.312,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	889.970.400,00
		Dinas Perhubungan	402.088.220,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	295.724.000,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	551.792.900,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	382.176.582,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.208.335.684,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	372.103.689,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	365.127.333,00
		Dinas Pangan Daerah	161.252.079,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan	248.098.068,00
		Dinas Pariwisata	450.080.100,00
		Dinas Pertanian	809.476.755,00
		Dinas Peternakan	348.580.000,00
		Sekretariat Daerah	2.025.606.935,00
		Sekretariat DPRD	4.095.651.913,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	711.659.196,00
		Badan Keuangan Daerah	1.116.612.486,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	419.370.463,00
		Inspektorat	907.990.447,00
		Kecamatan Aesesa	359.926.000,00
		Kecamatan Boawae	509.041.001,00
		Kecamatan Mauponggo	159.040.000,00
		Kecamatan Nangaroro	158.090.000,00
		Kecamatan Wolowae	107.370.000,00
		Kecamatan Keo Tengah	177.038.400,00
		Kecamatan Aesesa Selatan	135.327.892,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	170.999.200,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			31.121.832.328,00
16	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.000.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	230.200.000,00
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			265.200.000,00
17	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			17.100.000,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOS		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.326.190.899,00
Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS			12.326.190.899,00
19	Belanja Barang dan Jasa BLUD		
		RSUD AERAMO	4.022.959.186,00
		BLUD SPAM	404.305.342,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD			4.427.264.528,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			169.078.523.799,79

5.1.2.2.3 Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah nihil.

5.1.2.2.4 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah nihil.

5.1.2.2.5 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.552.418.715,00 atau 96,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp18.106.796.800,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.800.788.165,00 atau 49,36% dibanding realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.751.630.550,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan pada tabel 5.26 dan 5.27 berikut ini:

Tabel 5.26
Belanja Hibah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	17.409.940.000	16.855.561.915,00	96,82	11.054.773.750,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	696.856.800,00	696.856.800,00	100,00	696.856.800,00
Jumlah	18.106.796.800,00	17.552.418.715,00	96,94	11.751.630.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.27
Rincian Belanja Hibah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
BOP PAUD DAN KESETARAAN		
1	KB Kalvari	6.600.000,00
2	Golden Ways	7.200.000,00
3	KB Anggrek	12.000.000,00
4	KB Cemara Indah	12.000.000,00
5	KB Fonga Sama	10.200.000,00
6	KB Harapan Baru	13.800.000,00
7	KB Harapan Majamere	15.600.000,00
8	KB Mawar Ladolima	8.400.000,00
9	KB Mawar Rendu Ola	9.000.000,00
10	KB Melati Gero	7.200.000,00
11	KB Naungan Kasih	10.200.000,00
12	KB Nolawonga Natasule	16.200.000,00
13	KB Nusa Bunga	17.400.000,00
14	KB Santa Theresia Dhereisa	6.000.000,00
15	KB Sedang Mekar	10.800.000,00
16	KB Sedang Mekar Nangamere	18.600.000,00
17	KB Sehati Lere	15.600.000,00
18	KB Sinar Harapan Wajomara	7.800.000,00
19	KB Sinar Harapan Wea Au	9.600.000,00
20	KB STA. Theresia Riti	4.200.000,00
21	KB ST. Carolus Jawatiwa	6.000.000,00
22	KB ST. Fraskus Asisi Munde	15.000.000,00
23	KB ST. Fraskus Asisi Kotakeo	12.600.000,00
24	KB ST. Klara Malawona	2.600.000,00
25	KB ST. Maria	23.400.000,00
26	KB ST. MARIA BOKI	7.200.000,00
27	KB ST. Martinus Kolilewa	9.600.000,00
28	KB ST. Petrus Pombo	8.400.000,00
29	KB. ST. Theresia Wolokoli	14.400.000,00
30	KB Tunas Baru Kajusopi	14.400.000,00
31	KB Tunas Baru Lambo	10.200.000,00
32	KB Tunas Baru Renduwawo	9.000.000,00
33	KB Tunas Harapan	7.200.000,00
34	KB Tunas Harapan Lari	13.800.000,00
35	KB Watudhoge	10.200.000,00
36	Kober Kasih PKK	13.800.000,00
37	Pos Paud Bintang Laut	9.600.000,00
38	TK Aegela	13.200.000,00
39	TK Boloroga	30.600.000,00
40	TK Delima	12.000.000,00
41	TK Dhawe	19.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
42	TK Harapan Bangsa	12.000.000,00
43	TK Harapan Bersama Boanio Satap Nataia	15.600.000,00
44	TK Kartini	13.200.000,00
45	TK Kartini Ndetunura	13.200.000,00
46	TK Kasih Ibu	15.600.000,00
47	TKK Binawirawan Boawae	40.200.000,00
48	TKK Budi Luhur Kelewae	17.400.000,00
49	TK KI Hajar Ngera	12.000.000,00
50	TK K Karitas Maukeli	18.600.000,00
51	TK K Kasih Bangsa	37.800.000,00
52	TK K Kihajar Nangambo	14.400.000,00
53	TK K MULAKOLI	22.200.000,00
54	TK K NGGOLONIO	18.000.000,00
55	TK K OLAEWA	13.800.000,00
56	TK K ST ARNOLDUS YANSEN	27.000.000,00
57	TK K ST CLARA MARIA INES	25.200.000,00
58	TK K ST MARTINUS WOLOSAMBI	21.600.000,00
59	TK K ST SERVASIUS SOLO	15.600.000,00
60	TK K ST THERESIA DANGA	43.800.000,00
61	TK KUNTUM MEKAR DANGA	28.800.000,00
62	TK K WAEMBURUNG	12.000.000,00
63	TK LEDHO	11.400.000,00
64	TK LOKA BONE	7.800.000,00
65	TK MAHKOTA	13.200.000,00
66	TK MALAPOMA	9.000.000,00
67	TK MANDIRI	30.600.000,00
68	TK MARIA MAGDALENA FRESCOBALDI	9.000.000,00
69	TK MELATI NIODEDE	11.400.000,00
70	TK MESU ANA	20.400.000,00
71	TK MUTIARA	10.800.000,00
72	TK NILA	13.200.000,00
73	TK OBOOJA	18.600.000,00
74	TK OBOR	11.400.000,00
75	TK PADHAPAE	19.800.000,00
76	TK PAGOPAWE	12.600.000,00
77	TK SANTA CLARA WUDU	46.800.000,00
78	TK SATAP BOKOGO	10.800.000,00
79	TK SATAP KELIMADO	16.800.000,00
80	TK SATAP LEGO	12.000.000,00
81	TK SATAP MALABAI	22.800.000,00
82	TK SATAP NEBE	22.800.000,00
83	TK SATAP PAUTOLA	9.600.000,00
84	TK SATAP ST.PAULUS BONAT	12.600.000,00
85	TK SAYANG ANAK	13.800.000,00
86	TK ST BERNARDUS	15.600.000,00
87	TK STELLAMARIS	14.400.000,00
88	TK ST FRANSISKUS ASISI RAJA	24.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
89	TK ST FRANSISKUS ASISI ROMBA	9.000.000,00
90	TK ST HUBERTUS III WATUAPI	10.800.000,00
91	TK ST HUBERTUS II MARILEWA	12.600.000,00
92	TK ST HUBERTUS IV ANAKOLI	22.200.000,00
93	TK ST HUBERTUS I WEKASEKO	20.400.000,00
94	TK ST HUBERTUS V KOBAKUA	13.200.000,00
95	TK ST.YOSEP II RATEDAO	9.000.000,00
96	TK ST.YOSEP OLAKILE	10.200.000,00
97	TK SUPILAPE	15.000.000,00
98	TK TARUNA LENA	15.600.000,00
99	TK TUNAS BANGSA BOAMASO	13.200.000,00
100	TK TUNAS HARAPAN 1	10.200.000,00
101	TK USAHA KITA	10.800.000,00
102	TK WAJO	13.200.000,00
103	TK WONGA DOA	19.800.000,00
104	PKBM PELITA HARAPAN AERAMO	308.300.000,00
JUMLAH		1.864.100.000,00
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA		
1	SMPS KATOLIK BERDIKARI RAJA	74.820.000,00
2	SMP SWASTA HANURA DANGA	176.734.000,00
3	SMPS ST PETRUS LOKATADHO	46.980.000,00
4	SMP SWASTA ST TERESIA DANGA	61.596.000,00
5	SMPS KATOLIK KOTAGOA BOAWAE	270.512.000,00
6	SMPS ST.YOSEPH KALASANSA BOANIO	46.284.000,00
7	SMP SWASTA ST TERESIA DANGA	73.771.900,00
8	SMPS ST MIKAEL MAUKELI	62.988.000,00
9	SMPS BATARENDE	69.948.000,00
10	SMPS ST CLEMENS BOAWAE	107.184.000,00
11	SMPS PATIMURA WUDU	84.564.000,00
12	SMPS PATIMURA WUDU	112.552.000,00
13	SMPS TOZUPAZO DANGA	59.817.647,00
14	SMPS ST MIKAEL MAUKELI	75.138.200,00
15	SMPS PATIMURA WUDU	84.564.000,00
16	SMPS KATOLIK BERDIKARI RAJA	99.760.000,00
17	SMPS TOZUPAZO DANGA	57.420.000,00
18	SMPS ST PETRUS KOLILEWA	36.984.500,00
19	SMP SWASTA HANURA DANGA	132.588.000,00
20	SMPS WOLTER MONGONSIDI	71.920.000,00
21	SMP SWASTA KATOLIK MANUNGAE NDORA	118.784.000,00
22	SMPS ST CLEMENS BOAWAE	141.602.000,00
23	SMPS BATARENDE	69.948.000,00
24	SMP SWASTA ST TERESIA DANGA	61.596.000,00
25	SMPS ST.YOSEPH KALASANSA BOANIO	61.712.000,00
26	SMPS KATOLIK KOTAGOA BOAWAE	202.884.000,00
27	SMPS WOLTER MONGONSIDI	53.940.000,00
28	SMPS STELLA MARIS MARAPOKOT	54.288.000,00
29	SMPS STELLA MARIS MARAPOKOT	72.167.651,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
30	SMPS KATHOLIK DIAKUI SETYA BUDI	43.500.000,00
31	SMPS ST CLEMENS BOAWAE	107.184.000,00
32	SMPS WOLTER MONGONSI	53.940.000,00
33	SMPS ST PETRUS KOLILEWA	29.580.000,00
34	SMPS KATOLIK KOTAGOA BOAWAE	202.884.000,00
35	SMP SWASTA KATOLIK MANUNGAE NDORA	89.088.000,00
36	SMPS KATHOLIK DIAKUI SETYA BUDI	43.500.000,00
37	SMPS TOZUPAZO DANGA	57.420.000,00
38	SMPS ST PETRUS LOKATADHO	62.640.000,00
39	SMPS KATOLIK BERDIKARI RAJA	74.820.000,00
40	SMPS KATHOLIK DIAKUI SETYA BUDI	55.830.000,00
41	SMPS ST.YOSEPH KALASANSA BOANIO	46.284.000,00
42	SMPS ST MIKAEL MAUKELI	62.988.000,00
43	SMPS ST PETRUS LOKATADHO	46.980.000,00
44	SMP SWASTA HANURA DANGA	132.588.000,00
45	SMPS STELLA MARIS MARAPOKOT	54.288.000,00
46	SMPS BATARENDE	79.419.000,00
47	SMP SWASTA KATOLIK MANUNGAE NDORA	89.088.000,00
48	SMPS ST PETRUS KOLILEWA	29.580.000,00
49	SD KATOLIK NAGESAPADHI	69.370.700,00
50	SD KATOLIK KELEWAE	33.464.000,00
51	SD KATOLIK MABHAULU	45.872.000,00
52	SD KATOLIK OLAKILE	50.196.000,00
53	SDK ROMBA	16.074.000,00
54	SD KATOLIK GERO	42.018.000,00
55	SD KATOLIK PENGINANGA	47.658.000,00
56	SD KATOLIK BOKOGO	42.864.000,00
57	SD KATOLIK LAPE	39.354.000,00
58	SD KATOLIK WOLORAE	38.634.000,00
59	SDK MABHAMBAWA	8.742.000,00
60	SD KATOLIK WATUGASE	51.888.000,00
61	SDK BENGGA	7.520.000,00
62	SDK GALAWEA	28.482.000,00
63	SDK KELIMALI	15.792.000,00
64	SD KATOLIK MABHASELE	12.690.000,00
65	SD KATOLIK MALASERA	30.456.000,00
66	SD KATOLIK RAJA	46.530.000,00
67	SD KATOLIK LARI	24.151.000,00
68	SD KATOLIK BOAMASO	24.674.000,00
69	SDK KOTOWUJI	28.952.000,00
70	SD KATOLIK SOLO	25.380.000,00
71	SD KATOLIK TARIAPO	42.722.000,00
72	SD KATOLIK BAJO	21.432.000,00
73	SDK WATUDHOGE	16.356.000,00
74	SD KATOLIK LARI	22.278.000,00
75	SD KATOLIK BOAWAE	35.250.000,00
76	SD KATOLIK RATEDAO	24.516.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
77	SD KATOLIK REGA	40.890.000,00
78	SD KATOLIK WOLORAE	38.634.000,00
79	SD KATOLIK BOKOGO	32.148.000,00
80	SD KATOLIK TOWAKLAING	24.252.000,00
81	SDK NIODEDE	26.790.000,00
82	SD KATOLIK WOLOPOGO	62.108.750,00
83	SD KATOLIK PENGINANGA	47.658.000,00
84	SD KATOLIK OLAKILE	65.328.000,00
85	SD KATOLIK ST STEFANUS NANGADHERO	31.411.000,00
86	SD KATOLIK MUNDE	35.250.000,00
87	SD KATOLIK DOKI	42.810.000,00
88	SD KATOLIK EKOWODO	27.354.000,00
89	SD KATOLIK BOAMASO	18.612.000,00
90	SD KATOLIK NATAIA	37.506.000,00
91	SD KATOLIK BOKOGO	32.148.000,00
92	SD KATOLIK WATUGASE	51.888.000,00
93	SDK TONGGO	10.139.000,00
94	SDK WOLOKOLI	17.766.000,00
95	SDK NANGARORO	33.276.000,00
96	SD KATOLIK ST STEFANUS NANGADHERO	24.252.000,00
97	SD KATOLIK BAJO	21.432.000,00
98	SD KATOLIK SOLO	25.380.000,00
99	SD KATOLIK ROWA	55.272.000,00
100	SD KATOLIK MABHASELE	16.920.000,00
101	SD KATOLIK NGERA	20.868.000,00
102	SD KATOLIK WOLOFEO	10.716.000,00
103	SD KATOLIK WOLOFEO	10.716.000,00
104	SDK WOKONDEKORORO	11.562.000,00
105	SDK NIODEDE	26.790.000,00
106	SD KATOLIK WATUAPI	11.844.000,00
107	SD KATOLIK NGERA	20.868.000,00
108	SD KATOLIK MALASERA	22.842.000,00
109	SDK PUSU	16.380.000,00
110	SD KATOLIK SUPILAPE	38.634.000,00
111	SD KATOLIK KELIMADO	24.252.000,00
112	SDK ST. TERESIA DANGA - MBAY	91.086.000,00
113	SD KATOLIK JAWATIWA	14.100.000,00
114	SDK PAUTOLA	22.936.000,00
115	SD KATOLIK LARI	22.278.000,00
116	SDK NIODEDE	35.720.000,00
117	SD KATOLIK EKOWODO	33.289.400,00
118	SD KATOLIK EKOWODO	27.354.000,00
119	SDK LENA	47.658.000,00
120	SD KATOLIK DAJA	20.868.000,00
121	SD KATOLIK RITI	20.586.000,00
122	SD KATOLIK NATANAGE	57.810.000,00
123	SDK MABHAMBAWA	26.226.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
124	SD KATOLIK NATANAGE	77.080.000,00
125	SDK WOLOKOLI	23.688.000,00
126	SDK WOKONDEKORORO	15.416.000,00
127	SD KATOLIK MABHASELE	12.690.000,00
128	SD KATOLIK KOEKOBHO	27.354.000,00
129	SD KATOLIK RATEDAO	18.612.000,00
130	SDK TONGGO	20.868.000,00
131	SD KATOLIK ROWA	55.272.000,00
132	SDK LENA	47.658.000,00
133	SDK GALAWEA	28.482.000,00
134	SD KATOLIK LAPE	35.814.000,00
135	SDK NGEDU	42.864.000,00
136	SDK NANGARORO	33.276.000,00
137	SD KATOLIK RENDU	30.656.200,00
138	SD KATOLIK DHAWE	38.352.000,00
139	SD KATOLIK WATUAPI	11.844.000,00
140	SDK MABHAMBAWA	26.226.000,00
141	SD KATOLIK REGA	40.890.000,00
142	SD KATOLIK WATUAPI	15.792.000,00
143	SDK ROMBA	16.074.000,00
144	SD KATOLIK WEA AU	24.440.000,00
145	SD KATOLIK TOWAKLAING	31.040.600,00
146	SD KATOLIK DOKI	32.148.000,00
147	SDK PUUNAGE	20.022.000,00
148	SDK BENGGA	5.640.000,00
149	SD KATOLIK DHAWE	28.764.000,00
150	SD KATOLIK KOEKOBHO	27.354.000,00
151	SDK PAUTOLA	17.202.000,00
152	SDK GALAWEA	34.916.000,00
153	SDK MAUPONGGO	23.688.000,00
154	SD KATOLIK NGERA	27.824.000,00
155	SD KATOLIK NATAIA	37.506.000,00
156	SDK PUSU	14.664.000,00
157	SDK YOHANES PAULUS II	99.264.000,00
158	SDK BENGGA	5.640.000,00
159	SD KATOLIK TARIAPO	34.404.000,00
160	SD KATOLIK ST. MARKUS	35.344.000,00
161	SD KATOLIK NATAIA	50.008.000,00
162	SDK KOTOWUJI	21.714.000,00
163	SDK SAWU	30.436.000,00
164	SDK NANGARORO	44.368.000,00
165	SD KATOLIK DERU	50.384.000,00
166	SDK LERE	25.916.000,00
167	SD KATOLIK NAGEOGA	58.280.000,00
168	SD KATOLIK MABHAULU	34.404.000,00
169	SDK MAUKELI	25.538.000,00
170	SD KATOLIK STELLA MARIS MARAPOKOT	40.621.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
171	SD KATOLIK ST. MARKUS	26.508.000,00
172	SDK YOHANES PAULUS II	124.068.000,00
173	SDK MAUKELI	23.406.000,00
174	SDK LERE	25.662.000,00
175	SD KATOLIK WOLOWAJO	28.576.000,00
176	SD KATHOLIK MAUNORI	19.552.000,00
177	SDK YOHANES PAULUS II	99.264.000,00
178	SD KATOLIK WOLOPOGO	51.324.000,00
179	SDK WATUDHOGE	16.356.000,00
180	SDK TONGGO	20.868.000,00
181	SDK PUUNAGE	22.696.000,00
182	SDK MAUKELI	23.406.000,00
183	SDK ST. TERESIA DANGA - MBAY	120.448.000,00
184	SD KATOLIK NGGOLONIO	29.046.000,00
185	SD KATOLIK MAJAMERE	36.096.000,00
186	SD KATOLIK MAJAMERE	27.072.000,00
187	SD KATOLIK WOLOPOGO	51.324.000,00
188	SD KATOLIK RITI	20.586.000,00
189	SD KATOLIK AERAMO	60.894.000,00
190	SD KATOLIK WEA AU	18.330.000,00
191	SD KATOLIK KELEWAE	25.098.000,00
192	SD KATOLIK SOLO	26.603.500,00
193	SD KATOLIK MULAKOLI	25.944.000,00
194	SD KATOLIK STELLA MARIS MARAPOKOT	31.584.000,00
195	SD KATOLIK PENGINANGA	54.704.000,00
196	SD KATOLIK WOLOWAJO	21.432.000,00
197	SD KATOLIK WOLOFEO	14.288.000,00
198	SD KATOLIK KOTA	29.046.000,00
199	SDK WOLOSAMBI	48.880.000,00
200	SD KATOLIK JAWATIWA	17.800.000,00
201	SD KATOLIK NGGOLONIO	29.046.000,00
202	SD KATOLIK RAJA	58.395.000,00
203	SD KATOLIK KELEWAE	25.098.000,00
204	SDK WATUDHOGE	17.923.000,00
205	SD KATOLIK MAJAMERE	27.072.000,00
206	SDK KOTOWUJI	21.714.000,00
207	SD KATOLIK WEA AU	18.330.000,00
208	SD KATOLIK DAJA	20.868.000,00
209	SD KATOLIK RATEDAO	18.612.000,00
210	SD KATOLIK KOTA	38.538.000,00
211	SD KATOLIK BOAMASO	18.612.000,00
212	SD KATOLIK KELIMADO	31.619.717,00
213	SD KATOLIK TARIAPO	34.404.000,00
214	SD KATOLIK OLAKILE	50.196.000,00
215	SDK SAWU	25.662.000,00
216	SD KATOLIK RITI	27.442.000,00
217	SDK WOLOKOLI	17.766.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
218	SD KATOLIK KELIMADO	24.252.000,00
219	SD KATOLIK MULAKOLI	27.908.500,00
220	SD KATOLIK BOAWAE	35.250.000,00
221	SDK WOLOSAMBI	36.660.000,00
222	SD KATOLIK BOAWAE	39.440.000,00
223	SD KATOLIK WOLOWAJO	21.432.000,00
224	SD KATOLIK DAJA	26.364.000,00
225	SD KATOLIK SUPILAPE	38.634.000,00
226	SD KATOLIK MABHAULU	34.404.000,00
227	SD KATOLIK KOEKOBHO	36.472.000,00
228	SDK MAUPONGGO	23.688.000,00
229	SDK MAUPONGGO	31.584.000,00
230	SD KATOLIK NAGEOGA	43.710.000,00
231	SD KATOLIK BAJO	28.486.000,00
232	SDK ST. TERESIA DANGA - MBAY	91.086.000,00
233	SD KATOLIK NGGOLONIO	38.728.000,00
234	SD KATOLIK SUPILAPE	45.488.000,00
235	SD KATOLIK REGA	42.965.000,00
236	SD KATOLIK MUNDE	35.250.000,00
237	SD KATOLIK DHAWE	28.764.000,00
238	SDK WOKONDEKORORO	11.562.000,00
239	SD KATOLIK WATUGASE	55.180.750,00
240	SDK LERE	25.662.000,00
241	SD KATOLIK DOKI	32.148.000,00
242	SD KATOLIK JAWATIWA	14.100.000,00
243	SD KATHOLIK MAUNORI	14.664.000,00
244	SDK LENA	60.433.000,00
245	SDK NGEDU	32.148.000,00
246	SD KATOLIK LAPE	35.814.000,00
247	SD KATOLIK MULAKOLI	25.944.000,00
248	SD KATOLIK TOWAKLAING	24.252.000,00
249	SD Katolik Nageoga	43.710.000,00
250	SDK Wolosambi	36.660.000,00
251	SD Katholik Maunori	14.664.000,00
252	SD Katolik Nagesapadhi	53.580.000,00
253	SDK Romba	19.207.000,00
254	SD Katolik Nagesapadhi	53.580.000,00
255	SD Katolik Malasera	22.842.000,00
256	SDK Sawu	25.662.000,00
257	SD Katolik Deru	37.788.000,00
258	SD Katolik Gero	42.018.000,00
259	SD Katolik Deru	37.788.000,00
260	SD Katolik Rendu	27.918.000,00
261	SD Katolik Kota	29.046.000,00
262	SD Katolik Gero	56.024.000,00
263	SD Katolik St Stefanus Nangadhero	24.252.000,00
264	SD Katolik Raja	46.530.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
265	SDK Ngedu	32.148.000,00
266	SD Katolik Aeramo	61.194.000,00
267	SD Katolik ST. Markus	26.508.000,00
268	SD Katolik Stella Maris Marapokot	31.584.000,00
269	SDK Puunage	20.022.000,00
270	SD Katolik Rendu	27.918.000,00
271	SDK Pautola	17.202.000,00
272	SD Katolik Wolorae	47.291.900,00
273	SD Katolik Natanage	57.810.000,00
274	SD Katolik Rowa	67.588.000,00
275	SDK Pusu	14.664.000,00
JUMLAH DANA BOS SEKOLAH SWASTA		11.512.841.915,00
DINAS KESEHATAN		
1	Hibah kepada Palang Merah Indonesia	150.000.000,00
2	Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	100.000.000,00
JUMLAH HBAH DINAS KESEHATAN		250.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		13.626.941.915,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
1	SMPS HANURA DANGA	18.620.000,00
Jumlah Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		18.620.000,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		13.645.561.915,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
1	Baznas (Belanja Hibah Uang)	10.000.000,00
2	Biara Congregation Imitation Jesus (CIJ) Yayasan Efata (Belanja Hibah Uang)	100.000.000,00
3	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kab. Nagekeo (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
4	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an Kab. Nagekeo (Belanja Hibah Uang)	350.000.000,00
5	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kab. Nagekeo (Belanja Hibah Uang)	30.000.000,00
6	Majelis Ulama Indonesia (Belanja Hibah Uang)	10.000.000,00
7	Sekolah Sepak Bola Malesama Nagekeo Muda (MNM) (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
8	Hibah Uang Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kab. Nagekeo	700.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		1.300.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
1	Gereja Hati Tersuci St. Maria Wudu (Belanja Hibah Uang)	100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Hibah	Realisasi 2022
		(Rp)
2	Gereja Masehi Injili Di Timor Mata Jemaat Pnil Boawae (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
3	Gereja Masehi Injili Di Timor Mata Jemaat Viktori (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
4	Gereja Pentekosta di Indonesia Jemaat Imanuel Mbay (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
5	Keuskupan Agung Ende (Belanja Hibah Uang)	200.000.000,00
6	Lingkungan ST. Paulus Ngera Paroki Hati Kudus Yesus Maunori (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
7	Masjid Al Anshar Mauwelu (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
8	Masjid Baiturrahman Maunori (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
9	Masjid Nurul Islam Kolikapa (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
10	OCDS St. Yosef Indonesia (Belanja Hibah Uang)	30.000.000,00
11	Panti Asuhan Bhakti Luhur (Belanja Hibah Uang)	30.000.000,00
12	Paroki St. Hubertus Wekeseko (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
13	Paroki St. Martinus Nagaroro (Belanja Hibah Uang)	150.000.000,00
14	Paroki St. Mikael Mundemi (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
15	Paroki St. Yosep Doki (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
16	Stasi Malasera KUB St. Gabriel Kekareki Paroki St. Martinus Nangaroro (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
17	Stasi Santa Maria Dolorosa Mulakoli Paroki Hati Tersuci Santa Maria Wudu (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
18	Stasi St. Paulus Fataleke (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
19	Stasi St. Petrus Ratongamobo (Belanja Hibah Uang)	50.000.000,00
20	KKs Persiapan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Ujung Pandang di Kabupaten Nagekeo (Belanja Hibah Uang)	700.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		1.910.000.000,00
Total Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		16.855.561.915,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	98.220.800,00
2	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	111.734.400,00
3	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	98.766.700,00
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68.381.700,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	65.518.300,00
6	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	67.980.000,00
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	45.577.500,00
8	Partai Demokrat	73.480.200,00
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	32.290.500,00
10	Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	34.906.700,00
Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		696.856.800,00
JUMLAH BELANJA HIBAH		17.552.418.715,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5.1.2.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.844.542.863,00 atau 99,99% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp21.846.070.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.397.066.708,00 atau 32,81% dibanding realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.447.476.155,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan pada tabel 5.28 dan tabel 5.29 berikut ini:

Tabel 5.28
Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Realisasi 2021 (Rp)
		(Rp)	%	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	464.570.000,00	464.570.000,00	100,00	427.776.155,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	21.200.000.000,00	21.200.000.000,00	100,00	15.849.700.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	181.500.000,00	179.972.863,00	99,16	170.000.000,00
Jumlah	21.846.070.000,00	21.844.542.863,00	99,99	16.447.476.155,00

Tabel 5.29
Rincian Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	Titus Kota	60.000.000,00
2	Petrus Mia	60.000.000,00
3	Hidayat Abdullah	50.000.000,00
4	Silvester Mite	50.000.000,00
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU		220.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		
Belanja Bantuan Sosial Permakanan bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial		
1	Perus Papu	499.200,00
2	Konstantinus Lako	499.200,00
3	Urbanus Nadu	432.000,00
4	Finsensius Turu	499.200,00
5	Rafael Rajo	499.200,00
6	Vinsen Goa	499.200,00
7	Hardinaus Moni	432.000,00
8	Aurelius Geli	633.600,00
9	Ferdinandus Dae	364.800,00
10	Martinus Lodhu	499.200,00
11	Lambertus Mosa	297.600,00
12	Petrus Sedu	432.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
13	Flavianus Meo	297.600,00
14	Fransiskus Siku	364.800,00
15	Maksimilianus Paso	432.000,00
16	Datus Bila	364.800,00
17	Ferdinandus Kepa	364.800,00
18	Arnoldus Nusa	432.000,00
19	Agustinus Minggu	432.000,00
20	Gaspar Nanga	633.600,00
21	Fransiskus Beka	364.800,00
22	Sakarias Labu	432.000,00
23	Konstantinus Siga	499.200,00
24	Susana Ito	499.200,00
25	Bibiana Mogi	566.400,00
26	Antonius Dora	432.000,00
27	Vinsensius Sola	499.200,00
28	Yoseph Bhoko	96.000,00
29	Yakobus Roga	96.000,00
30	Bergita Dodo	96.000,00
31	Yuliana Neno	96.000,00
32	Maksimimus Noko	96.000,00
33	Sebastianus Goa No	96.000,00
34	Susantus Kunda	96.000,00
35	Fransiska Pasu	96.000,00
36	Blasius Taa	151.000,00
37	Silvester Mite	151.000,00
38	Benyamin Lagho	151.000,00
39	Hidayat Abdullah	151.000,00
40	Bernadeta Bhiju	151.000,00
41	Priska Nirmala	151.000,00
42	Rahana Ari	151.000,00
43	Wilfridus Yordanius Mere	96.000,00
44	Sebastianus Busa	96.000,00
45	Amandus B. Doa	96.000,00
46	Yohanes Capistrano Nuwa	96.000,00
47	Kristianus Busa	96.000,00
48	Flavianus	96.000,00
49	Hermanus Jago	96.000,00
50	Febrianus Muwa	96.000,00
51	Junius Adolfus Betu	96.000,00
52	Konstantinus Joys Mosa	96.000,00
53	Moses Bio	499.200,00
54	Andreas Ta	768.000,00
55	Paulus Raja	364.800,00
56	Bernabas Jawa	297.600,00
57	Isnawa	297.600,00
58	Suntoro	364.800,00
59	Alexander Mola	377.000,00
60	Eisabeth Kodo	192.000,00
61	Bernadus Bhia	96.000,00
62	Muhamad Toje	137.000,00
63	Katiman	137.000,00
64	Hanafi Pua Dange	96.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
65	Siti Umrana	151.000,00
66	Muhamad Madu Mukema	96.000,00
67	Siti Aisyah	96.000,00
68	Aleksander Sinyo	96.000,00
69	Ariyanto Joro	192.000,00
70	Ardiansah	96.000,00
71	Nurma	137.000,00
72	Albina Dhue	137.000,00
73	Falentina Nago	137.000,00
74	Thomas Dopo	137.000,00
75	Syarifudin	137.000,00
76	Siti Zaenal	96.000,00
77	Angelus Mei	624.000,00
78	Yohanes Peda	489.600,00
79	Paulus Poa	460.800,00
80	Apolonaris Damratus Lako	364.800,00
81	Sevasius Ceme	393.600,00
82	Yasinta Biba	624.000,00
83	Salman Mustahid Langging	96.000,00
84	Persediaan	15.225.600,00
	JUMLAH	38.400.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Sandang bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	
1	Konstantinus Lako	915.000,00
2	Sakarias Labu	645.000,00
3	Konstantinus Siga	915.000,00
4	Susana Ito	750.000,00
5	Bibiana Mogi	750.000,00
6	Antonius Dora	280.000,00
7	Vinsensius Sola	610.000,00
8	Blasius Taa	1.200.000,00
9	Silvester Mite	1.200.000,00
10	Benyamin Lagho	1.200.000,00
11	Hidayat Abdullah	1.200.000,00
12	Bernadeta Bhiju	1.200.000,00
13	Priska Nirmala	1.200.000,00
14	Rahana Ari	645.000,00
15	Moses Bio	1.075.000,00
16	Andreas Ta	2.140.000,00
17	Paulus Raja	1.115.000,00
18	Bernabas Jawa	505.000,00
19	Isnawa	1.025.000,00
20	Suntoro	1.025.000,00
21	Alexander Mola	1.025.000,00
22	Angelus Mei	570.000,00
23	Yohanes Peda	645.000,00
24	Paulus Poa	645.000,00
25	Apolonaris Damratus Lako	645.000,00
26	Sevasius Ceme	645.000,00
27	Yasinta Biba	645.000,00
28	Salman Mustahid Langging	1.445.000,00
29	Wilfridus Yordanius Mere	545.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
30	Sebastianus Busa	505.000,00
31	Amandus B. Doa	415.000,00
32	Yohanes Capistrano Nuwa	505.000,00
33	Kristianus Busa	340.000,00
34	Flavianus	430.000,00
35	Hermanus Jago	430.000,00
36	Febrianus Muwa	430.000,00
37	Junius Adolfus Betu	430.000,00
38	Konstantinus Joys Mosa	430.000,00
39	Persediaan	1.930.000,00
	JUMLAH	32.250.000,00
Belanja Bantuan Sosial Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar		
1	ROFINA NOA	251.000,00
2	AURELIA W.S.K. DEWI	251.000,00
3	MARIA YASINTA AZI TAGO	251.000,00
4	SALMA REMBU	251.000,00
5	MARIA F. DHENGI WEA	251.000,00
6	FRANSISKA PORA DHAE	251.000,00
7	EDELTRUDIS EBU	251.000,00
8	ALOYSIUS JAGO	251.000,00
9	ARNOLDUS NUWA	251.000,00
10	YUSTINA CEME	251.000,00
11	PETRUS GOA WONA	251.000,00
12	LONGGINUS TAY LAY	251.000,00
13	KRISTINA NENA	251.000,00
14	MARIA FULGENSIA ITO	251.000,00
15	HILARIUS AJA NANGA	251.000,00
16	YOSEFINA BENE	251.000,00
17	SILVIANUS RAJA MORE	251.000,00
18	ARNOL DHAE	251.000,00
19	TAUFIK AHMAD	251.000,00
20	THOMAS GOA	251.000,00
21	ANASTASIA BHOKO	251.000,00
22	ERNESTA MEMA	251.000,00
23	PAULINA NGGUWA	251.000,00
24	DADI PUA GENO	251.000,00
25	YASINTA TOYO	251.000,00
26	DOYA SOO	251.000,00
27	DAENG TAHA	251.000,00
28	RUSMI ABDULAH	251.000,00
29	SITI SARI BANU	251.000,00
30	VERONIKA OKO	251.000,00
31	EMERENSIANA IKI	251.000,00
32	PAULUS MEO	251.000,00
33	PASKALIS SURU	251.000,00
34	PAULINA YUJU	251.000,00
35	SERVASIUS MENA	251.000,00
36	FERDINANDUS SATU	251.000,00
37	HIRONIMUS WALI	251.000,00
38	ANTONIUS DON CARLI	251.000,00
39	RUGAYA MAHMUD	251.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
40	WILHELMINA KODO	251.000,00
41	MARIA DILI WATI	251.000,00
42	BERNADUS BATA	251.000,00
43	URSULA UPA	251.000,00
44	VIKTOR ARA	251.000,00
45	FRANSISKA MOGI	251.000,00
46	VINSENSIUS NUWA TAWA	251.000,00
47	LAURENSIUS PAPU	251.000,00
48	YOSEP SEDA	251.000,00
49	ROSALIA CERE	251.000,00
50	SILFESTER DALA	251.000,00
51	MARIA PETI	251.000,00
52	ELISABETH CEME	251.000,00
53	ROMERO ANGI	251.000,00
54	DAFROSA NIA	251.000,00
55	ROFINUS RADA	251.000,00
56	ICAN RIA	251.000,00
57	ANASTASIA UNA	251.000,00
58	KATARINA TAWA	251.000,00
59	YOHANES R. NGANGE	251.000,00
60	FIDELIS MENGI	251.000,00
61	PETRONELA PORA	251.000,00
62	THOMAS COLA NGUZA	251.000,00
63	YOSEP BATA	251.000,00
64	HENDRIKA DEDE ULE	251.000,00
65	MATEUS AJO NUWA	251.000,00
66	YEREMIAS MITE LALI	251.000,00
67	WILIBRODUS AJO	251.000,00
68	MARIA FLORIDA PAWE DAE	251.000,00
69	EDELTRUDIS A. DAMARIS LAPE	251.000,00
70	MIKAEL WUDA	251.000,00
71	ANASTASIA PAU	251.000,00
72	KRISTINA DHEMA	251.000,00
73	KRISPINUS DEDE	251.000,00
74	GABRIEL KULU	251.000,00
75	EMIRENSIANA GOO	251.000,00
76	ZAKARIAS MAKU	251.000,00
77	YOHANES NANGA	251.000,00
78	YOHANES KEWA	251.000,00
79	SELFIANA OLA INA REBON	251.000,00
80	DEWITRI NATALIA BIO	251.000,00
81	NIKODEMUS NAI	251.000,00
82	DARIUS SADHI	251.000,00
83	SOFIA ENA	251.000,00
84	MARTA BENE	251.000,00
85	FIDELIS PILI	251.000,00
86	EMIRENSIANA WONA	251.000,00
87	ARKADIUS NAI	251.000,00
88	SEVERINUS GOA	251.000,00
89	MARIA GORETI OWA	251.000,00
90	TADEUS RANGGA	251.000,00
91	BERTA GOO	251.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
92	SOFIANA WEA	251.000,00
93	KRISPINA PIDI	251.000,00
94	SERILUS AJA	251.000,00
95	VIKTORIA TIMA	251.000,00
96	MOSES MONA	251.000,00
97	YONAS KOWA	251.000,00
98	PRIMUS MATHEUS MEGA	251.000,00
99	MARIA NDIKI	251.000,00
100	IGNASIUS SIGA	251.000,00
101	SA'UDAH	251.000,00
102	WILHELMINA EMBU LABA	251.000,00
103	YULIANA M. BOA	251.000,00
104	IMELDA SADA WULA	251.000,00
105	HERMINA UKO	251.000,00
106	YULIANA AWI	251.000,00
107	YULIANA BARA	251.000,00
108	ALEX JAGO YADHA	251.000,00
109	STEFANUS PAJA	251.000,00
110	ALOYSIUS REO	251.000,00
111	ANTONIUS BUU	251.000,00
112	LEONARDUS JATA	251.000,00
113	BENEDIKTA NEBO	251.000,00
114	LORIANUS MERE	251.000,00
115	THERESIA MENGE	251.000,00
116	THERESIA TO	251.000,00
117	LAMBERTUS LAGA	251.000,00
118	HENDRIKUS PEA OWA	251.000,00
119	KRESENSIANA MBUPU	251.000,00
120	AMBROSIUS FEA	251.000,00
121	SERGIANO WAKA	251.000,00
122	FRANSISKUS FRENGKI LIO	251.000,00
123	VINSENSIUS HERLINA AJA	251.000,00
124	ANASTASIA ANGELIKUE BURA	251.000,00
125	YOLENTA OI	251.000,00
126	ELENTRUSI LADO (PRIMUS M. MEGA)	1.200.000,00
127	HERMANUS TIU (THERESIA WONA)	600.000,00
	JUMLAH	33.175.000,00
Belanja Bantuan Sosial Sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar		
1	ROFINA NOA	195.000,00
2	AURELIA W.S.K. DEWI	195.000,00
3	MARIA YASINTA AZI TAGO	195.000,00
4	SALMA REMBU	195.000,00
5	MARIA F. DHENGI WEA	195.000,00
6	FRANSISKA PORA DHAE	195.000,00
7	EDELTRUDIS EBU	195.000,00
8	ALOYSIUS JAGO	195.000,00
9	ARNOLDUS NUWA	195.000,00
10	YUSTINA CEME	195.000,00
11	PETRUS GOA WONA	195.000,00
12	LONGGINUS TAY LAY	195.000,00
13	KRISTINA NENA	195.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
14	MARIA FULGENSIA ITO	195.000,00
15	HILARIUS AJA NANGA	195.000,00
16	YOSEFINA BENE	195.000,00
17	SILVIANUS RAJA MORE	195.000,00
18	ARNOL DHAE	195.000,00
19	TAUFIK AHMAD	195.000,00
20	THOMAS GOA	195.000,00
21	ANASTASIA BHOKO	195.000,00
22	ERNESTA MEMA	195.000,00
23	PAULINA NGGUWA	195.000,00
24	DADI PUA GENO	195.000,00
25	YASINTA TOYO	195.000,00
26	DOYA SOO	195.000,00
27	DAENG TAHA	195.000,00
28	RUSMI ABDULAH	195.000,00
29	SITI SARI BANU	195.000,00
30	VERONIKA OKO	195.000,00
31	EMERENSIANA IKI	195.000,00
32	PAULUS MEO	195.000,00
33	PASKALIS SURU	195.000,00
34	PAULINA YUJU	195.000,00
35	SERVASIUS MENA	195.000,00
36	FERDINANDUS SATU	195.000,00
37	HIRONIMUS WALI	195.000,00
38	ANTONIUS DON CARLI	195.000,00
39	RUGAYA MAHMUD	195.000,00
40	WILHELMINA KODO	195.000,00
41	MARIA DILI WATI	195.000,00
42	BERNADUS BATA	195.000,00
43	URSULA UPA	195.000,00
44	VIKTOR ARA	195.000,00
45	FRANSISKA MOGI	195.000,00
46	VINSENSIUS NUWA TAWA	195.000,00
47	LAURENSIUS PAPU	195.000,00
48	YOSEP SEDA	195.000,00
49	ROSALIA CERE	195.000,00
50	SILFESTER DALA	195.000,00
51	MARIA PETI	195.000,00
52	ELISABETH CEME	195.000,00
53	ROMERO ANGI	195.000,00
54	DAFROSA NIA	195.000,00
55	ROFINUS RADA	195.000,00
56	ICAN RIA	195.000,00
57	ANASTASIA UNA	195.000,00
58	KATARINA TAWA	195.000,00
59	YOHANES R. NGANGE	195.000,00
60	FIDELIS MENGI	195.000,00
61	PETRONELA PORA	195.000,00
62	THOMAS COLA NGUZA	195.000,00
63	YOSEP BATA	195.000,00
64	HENDRIKA DEDE ULE	195.000,00
65	MATEUS AJO NUWA	195.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
66	YEREMIAS MITE LALI	195.000,00
67	WILIBRODUS AJO	195.000,00
68	MARIA FLORIDA PAWE DAE	195.000,00
69	EDELTRUDIS A. DAMARIS LAPE	195.000,00
70	MIKAEL WUDA	195.000,00
71	ANASTASIA PAU	195.000,00
72	KRISTINA DHEMA	195.000,00
73	KRISPINUS DEDE	195.000,00
74	GABRIEL KULU	195.000,00
75	EMIRENSIANA GOO	195.000,00
76	ZAKARIAS MAKU	195.000,00
77	YOHANES NANGA	195.000,00
78	YOHANES KEWA	195.000,00
79	SELFIANA OLA INA REBON	195.000,00
80	DEWITRI NATALIA BIO	195.000,00
81	NIKODEMUS NAI	195.000,00
82	DARIUS SADHI	195.000,00
83	SOFIA ENA	195.000,00
84	MARTA BENE	195.000,00
85	FIDELIS PILI	195.000,00
86	EMIRENSIANA WONA	195.000,00
87	ARKADIUS NAI	195.000,00
88	SEVERINUS GOA	195.000,00
89	MARIA GORETI OWA	195.000,00
90	TADEUS RANGGA	195.000,00
91	BERTA GOO	195.000,00
92	SOFIANA WEA	195.000,00
93	KRISPINA PIDI	195.000,00
94	SERILUS AJA	195.000,00
95	VIKTORIA TIMA	195.000,00
96	MOSES MONA	195.000,00
97	YONAS KOWA	195.000,00
98	PRIMUS MATHEUS MEGA	195.000,00
99	MARIA NDIKI	195.000,00
100	IGNASIUS SIGA	195.000,00
	JUMLAH	19.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar		
1	LUKAS JUMA	330.000,00
2	HENDRIKUS NGUKU	330.000,00
3	BERTA JEMIUM	330.000,00
4	BERNADETA JE MUMAN	330.000,00
5	YULIUS GELA	330.000,00
6	ANTONIUS BU'U	330.000,00
7	KRISTOFEL TULE	330.000,00
8	ANDREAS TIMO TEA	330.000,00
9	KAROLINA KOMANG	330.000,00
10	LEONARDUS WAWO	330.000,00
11	YOSEF NGETA	330.000,00
12	URSULA UPA	330.000,00
13	VIKTOR ARA	330.000,00
14	ANASTASIA OWA	330.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
15	ELISABETH WEA	330.000,00
16	BERNADUS BATA	330.000,00
17	KRISTINA NOBI	330.000,00
18	ADOLFUS TOLO	330.000,00
19	KLEMENS DHOKA	330.000,00
20	PIUS LEBI	330.000,00
21	PETRONELA PASU	450.000,00
22	ARNOLDUS NUWA	450.000,00
23	MARIA KLAUDIA MOGI	450.000,00
24	SIMON ORA	450.000,00
25	ANTONIUS DON CARLI	450.000,00
26	YONAS KOWA	450.000,00
27	FIDELIS SIDE	450.000,00
28	FITALIS DONGO	450.000,00
29	HELENA NECE	450.000,00
30	AGUSTINUS SAPA	450.000,00
31	MARIA AZI TAWA	450.000,00
32	OFERUS APING	450.000,00
33	MONIKA MEZE	450.000,00
34	KLETUS WEGU	450.000,00
35	POLIKARPUS SIA	450.000,00
36	KRISPINUS DEDE	450.000,00
37	DAFROSA WONGA	450.000,00
38	GETRUDIS GUDHU	450.000,00
39	DEWITRI NATALIA BIO	450.000,00
40	MARGARETHA WEA	450.000,00
41	JUREDAN A. JAFAR	1.850.000,00
42	FATIMA HASAN	1.850.000,00
43	SERVASIUS SANDINO	1.850.000,00
44	ERMIANA BEI	1.850.000,00
45	KAMARIA KOTEN	1.850.000,00
46	AMINA YAHYA	1.850.000,00
47	ARNOL DHAE	1.850.000,00
48	AFRA NENU	1.850.000,00
49	AHMAD SEAR	1.850.000,00
50	BERTOLOMEUS BU'U GU	1.850.000,00
51	SARIA	1.850.000,00
52	ROBERTUS DONA	1.850.000,00
	JUMLAH	37.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial Permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
1	KAYETANUS DHAKI	226.000,00
2	AHMAD ALWI	226.000,00
3	AURELIUS DHAI KEZE	226.000,00
4	HERIBERTUS AJO NUWA	226.000,00
5	HILARIUS LADO ULE	226.000,00
6	FRANSISKUS EFALDO BEDHO	226.000,00
7	DON BOSCHO KODHI OWA	226.000,00
8	KAROLINA KOMANG	226.000,00
9	MARSELINUS DHALU	226.000,00
10	AGUSTINUS SEJA	226.000,00
11	SURATIN SAFRUDIN	226.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
12	ILMI NAVIA	226.000,00
13	MARIA DOLOROSA DHIDHANG	226.000,00
14	YOHANES WARLIS W. N. WONDA	226.000,00
15	MARIA TURIA	226.000,00
16	ANDREAS SEWA	226.000,00
17	MARTINUS TAGE SEWA	226.000,00
18	ANJELIKA MAKO SAPUTRI	226.000,00
19	AGUSTINUS MEKA	226.000,00
20	KRISTIANUS B. WEA	226.000,00
21	LAMBERTUS DUA	226.000,00
22	ALEXANDER TALO WOLO	226.000,00
23	MARIA ROSWITA LELE OWA	226.000,00
24	MARIA OKTAVIAN IGO	226.000,00
25	SERMIANUS NO	226.000,00
26	MARIA A. MALA WEA	226.000,00
27	MARIA NAU	226.000,00
28	ALOYSIUS BUU JE	226.000,00
29	PETRUS LADO	226.000,00
30	YOHANES LAKO BAE	226.000,00
31	KAROLUS B. LAPE	226.000,00
32	YOHANES SIGA WEA	226.000,00
33	HILDEGARDIS DEDE	226.000,00
34	YASINTA M. BEY	226.000,00
35	MARIANUS HENA	226.000,00
36	DAMIANUS BUU	226.000,00
37	FRANSISKO BETU DENG	226.000,00
38	MARIA ANJELIN E. DHEMA	226.000,00
39	MARIA ANJELEIN LELU	226.000,00
40	ANASTASIA TAI	226.000,00
41	THERESIA VIORENZHA KERON	226.000,00
42	VIKTORIA VIONA BOTHA	226.000,00
43	NATALIA ANGLICHA WULA	226.000,00
44	VALENTINO DEROSARIO KOTA	226.000,00
45	SILVANIA LUPITA WEA	226.000,00
46	JEREMIAS JONES JATA	226.000,00
47	MARQUINHOS KILION L. LONGA	226.000,00
48	ELZEAR SEPTIAPTO PELO LAPE	226.000,00
49	AGELINA NAHAK	226.000,00
50	LASIDA ERISKA BOA	226.000,00
51	GERAL HENDRIKUS DIAZ	226.000,00
52	OKTAVIANUS MERE	226.000,00
53	ANASTASIA CALISTA WADJU	226.000,00
54	ERIK CARDO FETO BHELA	226.000,00
55	HERKULANUS TEKU	226.000,00
56	YULIUS RENO DIO	226.000,00
57	AURELIA KOA	226.000,00
58	DHYRNA MERY INDA ASO	226.000,00
59	MIKHAELA JESIKA SEKE TAGO	226.000,00
60	AGNES DENTRI BERI	226.000,00
61	APRILIO REIFALDO MISA	226.000,00
62	STEVANIA JUMITA EJU	226.000,00
63	SISILIA TOYO	226.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
64	MARIA AFLIN TOYO KALE	226.000,00
65	YOHANES MERE	226.000,00
66	MATEUS ADVENTUS MITE	226.000,00
67	YASINTA TUE SETU	226.000,00
68	YOHANES LANGA	226.000,00
69	HILARIUS GANI	226.000,00
70	EMANUEL R. DHOSE MOSA	226.000,00
71	YOHANES PITA	226.000,00
72	THOMAS M. D. MENO	226.000,00
73	PETRUS DHAE	226.000,00
74	DAMIANUS DAWI	226.000,00
75	DOMINIK LEJO LELU	226.000,00
76	MARIA CELINA TOYO	226.000,00
77	PETROSIA ARISTA LELI	226.000,00
78	MARIA YOSEFINA KOLO	226.000,00
79	AGATA FEBRIANA BUDE	226.000,00
80	ANSGARIUS CAROL KOSA KESA	226.000,00
81	FRANSISKUS RIONALDO R. JOKO	226.000,00
82	EUFEMIA NUNU	226.000,00
83	KARTIKA A. TEKU	226.000,00
84	TUNITA BENEDIKTA MOGI	226.000,00
85	NATALIA KUA	226.000,00
86	MARIA PRISKA BHOKO	226.000,00
87	ROSADALIMA PODI	226.000,00
88	MARIA GRISVAN NDEYU	226.000,00
89	ANTONIETA VERANI REO	226.000,00
90	YULIANA REALINO COO GEGO	226.000,00
91	YOHANES D. NDUU PEE	226.000,00
92	DONATUS M. COO	226.000,00
93	KLEMENTINUS DJAWA	226.000,00
94	RUSTIKA WULA	226.000,00
95	MARIA NGOLI	226.000,00
96	MILHILDA BULE	226.000,00
97	ARDIANA PURWATI ELU GA	226.000,00
98	WENSLAUS MOLA	226.000,00
99	MARIA KOLUMBA BUPU	226.000,00
100	YOHANES STENLY J. EDO	226.000,00
101	MARIA ADELFINA PETI	226.000,00
102	DIANA GISKA TU	226.000,00
103	MARIA ANTONIA KUTU	226.000,00
104	ANNA YUNIARTI MBUPU	226.000,00
105	MARIA FRUMENSIA BULE	226.000,00
106	OLGA ARI PADA	226.000,00
107	VINSENSIA WEA	226.000,00
108	MARIA TOYO	226.000,00
109	KALISTA ARI BULE	226.000,00
110	YULITA F. COO MOI	226.000,00
111	MARIA R. K. CEME	226.000,00
112	DELFINA LOGA ASO	226.000,00
113	OKTAVIANA KARMILA PUI	226.000,00
114	FRANSISKA C. D. GAWO	226.000,00
115	KALIS GOU	226.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
116	HENDRIKUS LI	226.000,00
117	MARIA DARMA	226.000,00
118	KAROLUS KEWA	226.000,00
119	SERLYANTI ARIFIN	226.000,00
120	SITI AMINAH	226.000,00
121	HELMUD BENEDIKTUS DOI	226.000,00
122	KRISTIANUS DELON DERA BHERI	226.000,00
123	MARIANUS ANDRE MITE WEA	226.000,00
124	MARIA GUADALUPE SADA HO'O	226.000,00
125	MARIA MAGDALENA NGAO	226.000,00
126	SASKIA PUTRI NURHAYATI GEKU	226.000,00
127	GABRIELA FRANATA SUE	226.000,00
128	FAUSTINA KASI	226.000,00
129	KONSTANTINUS TAO	226.000,00
130	IGNASIUS GOA	226.000,00
131	MARIA MARSELINA BOA	226.000,00
132	SEBASTIANUS SARE	226.000,00
133	KATARINA MUNDE	226.000,00
134	MARTINUS DOLO	226.000,00
135	LUSIA LODA	226.000,00
136	FATIMA WAHAB	226.000,00
137	ANDREAS FETO	226.000,00
138	PAOLA BULE	226.000,00
139	SEBASTIANA SARA	226.000,00
140	FRADITA ASO	226.000,00
141	ANGELA GOO	226.000,00
142	FAZI AHMAD	226.000,00
143	SAMNUEL ADRIANUS SETU	226.000,00
144	YOHANES MARVELIUS GEJU	226.000,00
145	YOLENTA DOBE NGOLE	226.000,00
	JUMLAH	32.770.000,00
Belanja Bantuan Sosial Sandang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
1	KAYETANUS DHAKI	195.000,00
2	AHMAD ALWI	195.000,00
3	AURELIUS DHAI KEZE	195.000,00
4	HERIBERTUS AJO NUWA	195.000,00
5	HILARIUS LADO ULE	195.000,00
6	FRANSISKUS EFALDO BEDHO	195.000,00
7	DON BOSCHO KODHI OWA	195.000,00
8	KAROLINA KOMANG	195.000,00
9	MARSELINUS DHALU	195.000,00
10	AGUSTINUS SEJA	195.000,00
11	SURATIN SAFRUDIN	195.000,00
12	ILMI NAVIA	195.000,00
13	MARIA DOLOROSA DHIDHANG	195.000,00
14	YOHANES WARLIS W. N. WONDA	195.000,00
15	MARIA TURIA	195.000,00
16	ANDREAS SEWA	195.000,00
17	MARTINUS TAGE SEWA	195.000,00
18	ANJELIKA MAKO SAPUTRI	195.000,00
19	AGUSTINUS MEKA	195.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
20	KRISTIANUS B. WEA	195.000,00
21	LAMBERTUS DUA	195.000,00
22	ALEXANDER TALO WOLO	195.000,00
23	MARIA ROSWITA LELE OWA	195.000,00
24	MARIA OKTAVIAN IGO	195.000,00
25	SERMIANUS NO	195.000,00
26	MARIA A. MALA WEA	195.000,00
27	MARIA NAU	195.000,00
28	ALOYSIUS BUU JE	195.000,00
29	PETRUS LADO	195.000,00
30	YOHANES LAKO BAE	195.000,00
31	KAROLUS B. LAPE	195.000,00
32	YOHANES SIGA WEA	195.000,00
33	HILDEGARDIS DEDE	195.000,00
34	YASINTA M. BEY	195.000,00
35	MARIANUS HENA	195.000,00
36	DAMIANUS BUU	195.000,00
37	FRANSISKO BETU DENG	195.000,00
38	MARIA ANJELIN E. DHEMA	195.000,00
39	MARIA ANJELEIN LELU	195.000,00
40	ANASTASIA TAI	195.000,00
41	THERESIA VIORENZHA KERON	195.000,00
42	VIKTORIA VIONA BOTHA	195.000,00
43	NATALIA ANGLICHA WULA	195.000,00
44	VALENTINO DEROSARIO KOTA	195.000,00
45	SILVANIA LUPITA WEA	195.000,00
46	JEREMIAS JONES JATA	195.000,00
47	MARQUINHOS KILION L. LONGA	195.000,00
48	ELZEAR SEPTIAPTO PELO LAPE	195.000,00
49	AGELINA NAHAK	195.000,00
50	LASIDA ERISKA BOA	195.000,00
51	GERAL HENDRIKUS DIAZ	195.000,00
52	OKTAVIANUS MERE	195.000,00
53	ANASTASIA CALISTA WADJU	195.000,00
54	ERIK CARDO FETO BHELA	195.000,00
55	HERKULANUS TEKU	195.000,00
56	YULIUS RENO DIO	195.000,00
57	AURELIA KOA	195.000,00
58	DHYPNA MERY INDA ASO	195.000,00
59	MIKHAELA JESIKA SEKE TAGO	195.000,00
60	AGNES DENTRI BERI	195.000,00
61	APRILIO REIFALDO MISA	195.000,00
62	STEVANIA JUMITA EJU	195.000,00
63	SISILIA TOYO	195.000,00
64	MARIA AFLIN TOYO KALE	195.000,00
65	YOHANES MERE	195.000,00
66	MATEUS ADVENTUS MITE	195.000,00
67	YASINTA TUE SETU	195.000,00
68	YOHANES LANGA	195.000,00
69	HILARIUS GANI	195.000,00
70	EMANUEL R. DHOSE MOSA	195.000,00
71	YOHANES PITA	195.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
72	THOMAS M. D. MENO	195.000,00
73	PETRUS DHAE	195.000,00
74	DAMIANUS DAWI	195.000,00
75	DOMINIK LEJO LELU	195.000,00
76	MARIA CELINA TOYO	195.000,00
77	PETROSIA ARISTA LELI	195.000,00
78	MARIA YOSEFINA KOLO	195.000,00
79	AGATA FEBRIANA BUDE	195.000,00
80	ANSGARIUS CAROL KOSA KESA	195.000,00
81	FRANSISKUS RIONALDO R. JOKO	195.000,00
82	EUFEMIA NUNU	195.000,00
83	KARTIKA A. TEKU	195.000,00
84	TUNITA BENEDIKTA MOGI	195.000,00
85	NATALIA KUA	195.000,00
86	MARIA PRISKA BHOKO	195.000,00
87	ROSADALIMA PODI	195.000,00
88	MARIA GRISVAN NDEYU	195.000,00
89	ANTONIETA VERANI REO	195.000,00
90	YULIANA REALINO COO GEGO	195.000,00
91	YOHANES D. NDU A PEE	195.000,00
92	DONATUS M. COO	195.000,00
93	KLEMENTINUS DJAWA	195.000,00
94	RUSTIKA WULA	195.000,00
95	MARIA NGOLI	195.000,00
96	MILHILDA BULE	195.000,00
97	ARDIANA PURWATI ELU GA	195.000,00
98	WENSLAUS MOLA	195.000,00
99	MARIA KOLUMBA BUPU	195.000,00
100	YOHANES STENLY J. EDO	195.000,00
101	MARIA ADELFINA PETI	195.000,00
102	DIANA GISKA TU	195.000,00
103	MARIA ANTONIA KUTU	195.000,00
104	ANNA YUNIARTI MBUPU	195.000,00
105	MARIA FRUMENSIA BULE	195.000,00
106	OLGA ARI PADA	195.000,00
107	VINSENSIA WEA	195.000,00
108	MARIA TOYO	195.000,00
109	KALISTA ARI BULE	195.000,00
110	YULITA F. COO MOI	195.000,00
111	MARIA R. K. CEME	195.000,00
112	DELFINA LOGA ASO	195.000,00
113	OKTAVIANA KARMILA PUI	195.000,00
114	FRANSISKA C. D. GAWO	195.000,00
115	KALIS GOU	195.000,00
116	HENDRIKUS LI	195.000,00
117	MARIA DARMA	195.000,00
118	KAROLUS KEWA	195.000,00
119	SERLYANTI ARIFIN	195.000,00
120	SITI AMINAH	195.000,00
121	HELMUD BENEDIKTUS DOI	195.000,00
122	KRISTIANUS DELON DERA BHERI	195.000,00
123	MARIANUS ANDRE MITE WEA	195.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
124	MARIA GUADALUPE SADA HO'O	195.000,00
125	MARIA MAGDALENA NGAO	195.000,00
126	SASKIA PUTRI NURHAYATI GEKU	195.000,00
127	GABRIELA FRANATA SUE	195.000,00
128	FAUSTINA KASI	195.000,00
129	KONSTANTINUS TAO	195.000,00
130	IGNASIUS GOA	195.000,00
131	MARIA MARSELINA BOA	195.000,00
132	SEBASTIANUS SARE	195.000,00
133	KATARINA MUNDE	195.000,00
134	MARTINUS DOLO	195.000,00
135	LUSIA LODA	195.000,00
136	FATIMA WAHAB	195.000,00
137	ANDREAS FETO	195.000,00
138	PAOLA BULE	195.000,00
139	SEBASTIANA SARA	195.000,00
140	FRADITA ASO	195.000,00
141	ANGELA GOO	195.000,00
142	FAZI AHMAD	195.000,00
143	SAMNUEL ADRIANUS SETU	195.000,00
144	YOHANES MARVELIUS GEJU	195.000,00
145	YOLENTA DOBE NGOLE	195.000,00
	JUMLAH	28.275.000,00
Belanja Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
1	SAIDA AHMAD	330.000,00
2	MAGDALENA LEGHO	330.000,00
3	BERNADETHA WEA	330.000,00
4	KRISTINA DHEMA	330.000,00
5	EMIRENSIANA WONA	330.000,00
6	SITI SALEHA	450.000,00
7	SRI WULANDARY	450.000,00
8	YOLENTA DOBE NGOLE	450.000,00
9	YOSEFINA MITE	1.850.000,00
10	PRIMUS MATEUS MEGA	1.850.000,00
11	LUKAS JUMA	1.850.000,00
12	HAMID SUARA	1.850.000,00
13	ARFAH	1.850.000,00
14	CINTA CANTIKA	1.850.000,00
15	ROFINUS MENO	1.850.000,00
16	YASINTA ASO	1.850.000,00
17	MARIA MARSELINA BOA	1.850.000,00
18	SOPHIA TINA	1.850.000,00
19	PERSEDIAAN	900.000,00
	JUMLAH	22.400.000,00
	JUMLAH BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU UNTUK INDIVIDU	244.570.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
PENERIMA HIBAH BANTUAN PROGRAM PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
	AERAMO	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
1	ADOLFUS JAWA	20.000.000,00
2	ADRIANUS WONA	20.000.000,00
3	AGNES DE'E	20.000.000,00
4	BASILIUJON BONGO	20.000.000,00
5	BENYAMIN RAY	20.000.000,00
6	BLASIUJON SEKO	20.000.000,00
7	BONEFANTURA DHADU	20.000.000,00
8	DOMINIKUS JEMU	20.000.000,00
9	DONATUS LATO	20.000.000,00
10	DONBOSKO POI	20.000.000,00
11	EDITA MARSELINA EA	20.000.000,00
12	ERNESTA BHALA	20.000.000,00
13	ESTER EMA	20.000.000,00
14	FERDINANDUS PAJU	20.000.000,00
15	GALUS GOA	20.000.000,00
16	GERADUS GOA	20.000.000,00
17	HARUN JELIL	20.000.000,00
18	HIRONIMUS DANDO	20.000.000,00
19	IGNASIUJON REGHO	20.000.000,00
20	JUMADIN MAHMUD	20.000.000,00
21	KAROLUS GOA	20.000.000,00
22	KRISTIANA NONA	20.000.000,00
23	KRISTIANUS KOTA	20.000.000,00
24	LAURENSIUJON NDADA	20.000.000,00
25	MARGARETHA AGHO	20.000.000,00
26	MARIA FATIMA MUKE	20.000.000,00
27	MARIA GORETI TOLO	20.000.000,00
28	MARTA KARA	20.000.000,00
29	MARTINUS MAE	20.000.000,00
30	MARTINUS MINGGU MERE	20.000.000,00
31	RIDWAN GURU SUMBAWA	20.000.000,00
32	ROFINUS DHAE	20.000.000,00
33	SARILA LITI	20.000.000,00
34	SEBASTIANUS SOBA	20.000.000,00
35	SEVERINUS MENO	20.000.000,00
36	SILFINUS MAE TA'A	20.000.000,00
37	SIMON JAWA	20.000.000,00
38	SIMON JO	20.000.000,00
39	TRESIA NGOE	20.000.000,00
40	VIKTOROFUS BETU GEGO	20.000.000,00
41	YEREMIAS SINGGA	20.000.000,00
42	YOHANES ABE	20.000.000,00
43	YOHANES HENDRA SIGA	20.000.000,00
44	YOHANES TOWA	20.000.000,00
45	YOHANES WEDO	20.000.000,00
46	YOSEP JO	20.000.000,00
47	YUSTINA EA	20.000.000,00
	JUMLAH	940.000.000,00
	DANGA	
1	ADRIANUS EKO	20.000.000,00
2	ALBERTUS KANA	20.000.000,00
3	ALOYSIUJON B. AKU GOA	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
4	ALOYSIUS SIKU	20.000.000,00
5	ANDREAS JAWA	20.000.000,00
6	ANDREAS JENA	20.000.000,00
7	ANGELISA PARERA	20.000.000,00
8	ANTONIUS GEJU	20.000.000,00
9	BASILIUUS DU'A	20.000.000,00
10	DIDIMUS LARA	20.000.000,00
11	DONATUS LANANG	20.000.000,00
12	FRIDS YOHANES LOBO	20.000.000,00
13	HENDRIKUS LAWI OJA	20.000.000,00
14	HERONIMUS DJAMI	20.000.000,00
15	KAROLUS SEDA LAKI	20.000.000,00
16	KLAUDINUS GOLFRIDUS NIKA	20.000.000,00
17	KRISTIANUS DOLAN NEKU	20.000.000,00
18	LODOVIKUS PELO	20.000.000,00
19	LORENSIUS JANGA	20.000.000,00
20	MARIA ALFIRA TUNGA	20.000.000,00
21	MARIA EVALDINA	20.000.000,00
22	MARIA GORETI POPY	20.000.000,00
23	MARIA MATILDE JENE SESO	20.000.000,00
24	MARTINUS MERE	20.000.000,00
25	MAXIMILIANUS TIBO	20.000.000,00
26	MONIKA MIKA	20.000.000,00
27	MUHAMAD RAIS MANE TIMA	20.000.000,00
28	NILUH KADEX HELNI WATI	20.000.000,00
29	PATRISIUS CONRADUS MEO	20.000.000,00
30	PAULUS MALI	20.000.000,00
31	PELIPUS BEDO	20.000.000,00
32	RIKARDUS MIGU	20.000.000,00
33	SELVIA WEA GOWA	20.000.000,00
34	SERVASIUS SUE	20.000.000,00
35	STANISLAUS APRINO MAKIN	20.000.000,00
36	STEFANUS DJEBHA	20.000.000,00
37	TANTISIANA WETO	20.000.000,00
38	THERESIA NADU NDAPA	20.000.000,00
39	WILYBRODUS BELA BOY	20.000.000,00
40	YASINTA DAU	20.000.000,00
41	YOAKIM DAY	20.000.000,00
42	YOSEPH MAKARIUS LISE	20.000.000,00
	JUMLAH	840.000.000,00
	DHAWE	
1	ANSELMUS LAO	20.000.000,00
2	ADRIANUS ANGI	20.000.000,00
3	BENEDIKTUS PI	20.000.000,00
4	BERNABAS RABHA	20.000.000,00
5	BERNADUS KESA	20.000.000,00
6	BONEFASIUS GELU	20.000.000,00
7	EDIGINASIUS LAGA	20.000.000,00
8	FERDINANDUS LAWA	20.000.000,00
9	FRANSISKUS PAI	20.000.000,00
10	GASPAR LAJA	20.000.000,00
11	MARKUS UKU	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
12	NIKOLAUS DHADHU	20.000.000,00
13	PAULUS MIKI KOBAS SEBHO	20.000.000,00
14	PETRUS FAE	20.000.000,00
15	RADEGUNDE WEGU	20.000.000,00
16	WILIBRODUS DAKI	20.000.000,00
17	YOHANES BHIA	20.000.000,00
	JUMLAH	340.000.000,00
	LABOLEWA	
1	GRADUS LADO	20.000.000,00
	JUMLAH	20.000.000,00
	LAPE	
1	ADRIANUS ENDE	20.000.000,00
2	AGUSTINUS SATU	20.000.000,00
3	ALBINA KODO	20.000.000,00
4	ALOYSIUS RESI	20.000.000,00
5	ANTONIUS SIGA TEA	20.000.000,00
6	ARKADIUS DHIMA	20.000.000,00
7	DAMIANUS GOA	20.000.000,00
8	EMANUEL ANTONIUS JOGO	20.000.000,00
9	FRANSISKUS JANUA	20.000.000,00
10	FRANSISKUS TURU	20.000.000,00
11	YULIUS LANDO	20.000.000,00
12	IGNASIUS KERIDEN JAWAN	20.000.000,00
13	KRISPIANUS RIWU	20.000.000,00
14	LONGGINUS MESA	20.000.000,00
15	MALKUS DOROTEUS NUKA	20.000.000,00
16	MARIA MELLA	20.000.000,00
17	MARIANUS CEME	20.000.000,00
18	MARKUS BHOLO	20.000.000,00
19	MONTANUS NAHASON OLA	20.000.000,00
20	PAULUS MEZE	20.000.000,00
21	RAYMUNDUS RAJA	20.000.000,00
22	SERVASIUS BEU	20.000.000,00
23	SERVASIUS MENA	20.000.000,00
24	SIMON PETRUS OJA	20.000.000,00
25	STANISLAUS DHENO	20.000.000,00
26	STEFANUS RABU	20.000.000,00
27	THEODORUS CEME	20.000.000,00
28	THEODORUS PASO	20.000.000,00
29	TIBORTIUS TUDU	20.000.000,00
30	VINCENTIUS FERRER LASA	20.000.000,00
31	WILIBALDUS RABU	20.000.000,00
32	WILIBRODUS MELA	20.000.000,00
33	YOHANES DONBOSKO MITE	20.000.000,00
34	YOSEF STURMIUS CEME	20.000.000,00
35	ZAKARIAS JUMA	20.000.000,00
	JUMLAH	700.000.000,00
	MARAPOKOT	
1	BAMBANG AHMAD SUELE	20.000.000,00
2	HABACO	20.000.000,00
3	MASHURIN SULAIMAN	20.000.000,00
4	RESYID PUA WARU	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
5	SAFRUDIN HALE	20.000.000,00
6	SITI NURMA LAKA	20.000.000,00
	JUMLAH	120.000.000,00
	MBAY I	
1	ABDULLAH NOLA MANE TIMA	20.000.000,00
2	AGUSTINUS LAHA	20.000.000,00
3	ASMAWATI	20.000.000,00
4	AZWAR ZULKIFLI	20.000.000,00
5	BHABHA KIFLIN	20.000.000,00
6	EDISON MARYONI MEAK	20.000.000,00
7	HENDRA TATRA SAPUTRA TIBA	20.000.000,00
8	MAIMUNA EBAS	20.000.000,00
9	MARIAMA SULAIMAN	20.000.000,00
10	MUHAMAD DONG	20.000.000,00
11	MUHAMMAD NATSIR	20.000.000,00
12	GATOT SUHERMAN SYEH	20.000.000,00
13	OSKAR DHAE	20.000.000,00
14	PUA JENA YAHYA	20.000.000,00
15	REGIUS POLIKARPUS WALA	20.000.000,00
16	RIFANTO DAHLAN	20.000.000,00
17	RUDIN PAJI	20.000.000,00
18	SAIFUL ISMAIL RENA	20.000.000,00
19	SALMAN MUSTAHID LANGGING	20.000.000,00
20	SITI HAMIDAH	20.000.000,00
21	SITI KARTINI AHMAD	20.000.000,00
22	YOHANES PRETA	20.000.000,00
23	ZUL SALEH REMA	20.000.000,00
	JUMLAH	460.000.000,00
	MBAY II	
1	AGUSTINUS MINGGU	20.000.000,00
2	ANASTASIA JALI	20.000.000,00
3	ANSELMUS TEGU	20.000.000,00
4	BARNABAS NEPANG	20.000.000,00
5	IBRAHIM LANGKAS	20.000.000,00
6	RINA MELI	20.000.000,00
	JUMLAH	120.000.000,00
	NANGADHERO	
1	EMANUEL LOY	20.000.000,00
2	ERMELINDA ARI	20.000.000,00
3	MARIA GUWA	20.000.000,00
4	SEFRIDUS API	20.000.000,00
	JUMLAH	80.000.000,00
	NGEGHEDHAWA	
1	AMBROSIUS AKA	20.000.000,00
2	BENEDIKTUS JERA	20.000.000,00
	JUMLAH	40.000.000,00
	NGGOLOMBAY	
1	ABDULRAHMAN MUTHALIB MARENG	20.000.000,00
2	AHMAD KEBO	20.000.000,00
3	ALI BIN NURDIN	20.000.000,00
4	ASMAWATI DAENG	20.000.000,00
5	FATMA BHILI	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
6	FERDINANDUS NOE	20.000.000,00
7	HAMSA ABDURAHMAN	20.000.000,00
8	ISMAIL AHMAD	20.000.000,00
9	AISYA AHMAD	20.000.000,00
10	JAMIL KARANGASENG	20.000.000,00
11	MUCKLIS HELUNGARA	20.000.000,00
12	MUHAMAD RAFIQ	20.000.000,00
13	MUTHALIB CLAO	20.000.000,00
14	ROBERTUS RAPA	20.000.000,00
15	RUSLI DO	20.000.000,00
16	RUSMINI ABDURAHMAN	20.000.000,00
17	SAFARUDIN ISMAIL	20.000.000,00
18	SAFRUDIN MADE	20.000.000,00
19	SAHRUL BAORA	20.000.000,00
20	SITI NURMAYA	20.000.000,00
21	SRI PURWANTI	20.000.000,00
22	SUMIYATI RAGHU	20.000.000,00
23	YOSEPH WAJA	20.000.000,00
24	YUNUS LADO	20.000.000,00
	JUMLAH	480.000.000,00
	NGGOLONIO	
1	FRANSISKUS JO	20.000.000,00
2	PATRISIUS MINING	20.000.000,00
3	PETRUS PITA	20.000.000,00
4	VIKTOR TIBO	20.000.000,00
5	YOHANES NUWA	20.000.000,00
6	YOHANES WODA	20.000.000,00
	JUMLAH	120.000.000,00
	OLAIA	
1	ADOLFUS FAO	20.000.000,00
2	DAMIANUS DHOSA	20.000.000,00
3	DAMIANUS DOSA	20.000.000,00
4	EMANUEL DEWA	20.000.000,00
5	EMANUEL MAI	20.000.000,00
6	MARIA GORETI DHENGI	20.000.000,00
7	MARKUS MARA	20.000.000,00
8	ROBERTUS LEZA	20.000.000,00
9	RONATUS NUSA	20.000.000,00
10	SOFIA BEKU	20.000.000,00
11	STANISLAUS NA'A	20.000.000,00
12	VINSENSIUS GUI	20.000.000,00
13	YAKOBUS ABO	20.000.000,00
14	YOHANES D SERA	20.000.000,00
15	YOHANES DONBOSCO KOLO	20.000.000,00
16	YOSEPH MESA	20.000.000,00
	JUMLAH	320.000.000,00
	TEDAKISA	
1	ADRIANUS DOA	20.000.000,00
2	AMBROSIUS JEBHA	20.000.000,00
3	BERNABAS WADA	20.000.000,00
4	DIDIMUS PIANA	20.000.000,00
5	FERDINANDUS WATU	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
6	FIDELIS U	20.000.000,00
7	FRANSISKUS FETO	20.000.000,00
8	FRANSISKUS KOKA	20.000.000,00
9	FRIDUS WARAS	20.000.000,00
10	KAROLUS NUKA	20.000.000,00
11	MARSELINUS RAE	20.000.000,00
12	MATHEUS DOA	20.000.000,00
13	PATRISIUS NUKA	20.000.000,00
14	PELIPUS PESA	20.000.000,00
15	POLIKARPUS KEU	20.000.000,00
16	SEBASTIANUS MAWO	20.000.000,00
17	WILHELMUS NANGA	20.000.000,00
18	YOHAKIM BILA	20.000.000,00
	JUMLAH	360.000.000,00
	TEDAMUDE	
1	ALOYSIUS DHANTO	20.000.000,00
2	BERTOLOMEUS JAWA	20.000.000,00
3	DIDAKUS GAWA	20.000.000,00
4	ELIAS NUKA DAI	20.000.000,00
5	HENDRIKUS TOLI	20.000.000,00
6	KLETUS LOGHO	20.000.000,00
7	LORENSIUS SAING	20.000.000,00
8	MAKSIMUS TANGA	20.000.000,00
9	MARIA NGOLE	20.000.000,00
10	MARSELINUS ROE	20.000.000,00
11	MATHEUS LY	20.000.000,00
12	NIKODEMUS GELU	20.000.000,00
13	NIKOLAUS REMBO	20.000.000,00
14	RAIMUNDUS DJOGO	20.000.000,00
15	STANISLAUS MBANI	20.000.000,00
	JUMLAH	300.000.000,00
	TONGGURAMBANG	
1	KLETUS TIRO	20.000.000,00
2	SIMURNI BIN BUYUNG	20.000.000,00
3	ZAINUDIN ABDULLAH	20.000.000,00
	JUMLAH	60.000.000,00
	TOWAK	
1	BENYAMIN JUANING	20.000.000,00
2	STEFANUS OJE	20.000.000,00
3	MOSES ROGE	20.000.000,00
4	KATARINA TURE	20.000.000,00
	JUMLAH	80.000.000,00
	WAEKOKAK	
1	ABDULLAH RESE	20.000.000,00
2	BASILIIUS LOY	20.000.000,00
3	GASPAR RANGGA	20.000.000,00
4	GENOVEVA ANA MARIA REGIS GOA	20.000.000,00
5	ISHAK EBO	20.000.000,00
6	KLEMENS MULA	20.000.000,00
7	KRISOGONUS SOBA	20.000.000,00
8	LAMBERTUS DOPO	20.000.000,00
9	MARIA FATIMA PAPIK	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
10	MARKUS GURU	20.000.000,00
11	SYAFRUDIN ALI	20.000.000,00
12	SYAFRUDIN NUR	20.000.000,00
13	WILHEMUS DIAZ SORE	20.000.000,00
14	YOHANES JEA	20.000.000,00
15	YULIUS WA'I	20.000.000,00
	JUMLAH	300.000.000,00
	JUMLAH KECAMATAN AESESA	5.680.000.000,00
	LANGEDHAWE	40.000.000,00
1	BLASIUS DASA	20.000.000,00
2	ERNESTA KONGA	20.000.000,00
	RENDUBUTOWE	40.000.000,00
1	SERVASIUS PADHA	20.000.000,00
2	YOHANES JAWA	20.000.000,00
	RENDUTENO	20.000.000,00
1	LEONARDUS LELO	20.000.000,00
	RENDUTUTUBHADA	20.000.000,00
1	THEOFILUS TENGA	20.000.000,00
	TENGATIBA	40.000.000,00
1	FLORIANUS SEDA	20.000.000,00
2	PETRUS PAPU	20.000.000,00
	JUMLAH KECAMATAN AESESA SELATAN	160.000.000,00
	ANAKOLI	20.000.000,00
1	YOHANES MASAN BOLENG	20.000.000,00
	NATATOTO	80.000.000,00
1	BONEFASIUS FA'A	20.000.000,00
2	FRIDUS GURU	20.000.000,00
3	YOHANES DJODO	20.000.000,00
4	YUVENSIUS BIU	20.000.000,00
	TENDAKINDE	820.000.000,00
1	ADI SUKMANA	20.000.000,00
2	ARKADIUS METO	20.000.000,00
3	ARMAWAN	20.000.000,00
4	ARNOLDUS YANSSEN RUNGA	20.000.000,00
5	BERNADUS GENE	20.000.000,00
6	BERTOLOMEUS WANDA	20.000.000,00
7	BUKHARI	20.000.000,00
8	DAHLIA	20.000.000,00
9	EFENDI	20.000.000,00
10	EFRIZAL	20.000.000,00
11	FARIDA	20.000.000,00
12	GREGORIUS WEGU	20.000.000,00
13	HAYADIN	20.000.000,00
14	HIRONIMUS MOA	20.000.000,00
15	IMRAN	20.000.000,00
16	INDRA	20.000.000,00
17	JUBAIDAH GIRMAN	20.000.000,00
18	LA DJAMAL LUDDIN	20.000.000,00
19	LA HIRISANI	20.000.000,00
20	LA KABOY	20.000.000,00
21	LADINI DAGA	20.000.000,00
22	MIKAEL MINGGU	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
23	MUHAMAD IQBAL	20.000.000,00
24	MUHAMMAD AZHAR	20.000.000,00
25	MUHAMMAD MIRWAN FAWZI	20.000.000,00
26	MUHAMMAD NASIR	20.000.000,00
27	MURSALIM PUA MBUSA	20.000.000,00
28	MUSTAKIM LA AHMADI	20.000.000,00
29	NUR NAENI	20.000.000,00
30	OSKAR DAKA	20.000.000,00
31	RAMLII	20.000.000,00
32	RIDWAN HARUN	20.000.000,00
33	ROMUALDUS KIWAN MUDAY	20.000.000,00
34	SARAFUDIN	20.000.000,00
35	SELESTINUS TANI	20.000.000,00
36	SYARIFUDIN	20.000.000,00
37	VINSENSIUS KAKARUA	20.000.000,00
38	WA DAYA	20.000.000,00
39	WA JUHURIA	20.000.000,00
40	YOVITA VIA	20.000.000,00
41	ZULKARNAIN	20.000.000,00
	TENDATOTO	240.000.000,00
1	ANSELMUS PAGAN	20.000.000,00
2	BLASIUS MARE	20.000.000,00
3	DAMIANUS DAKI	20.000.000,00
4	ERNESTA UE	20.000.000,00
5	FABIANUS MAKU DHAKI	20.000.000,00
6	FLORENTINA TUKU	20.000.000,00
7	KANISIUS NGITA	20.000.000,00
8	MIKHAEL EMA	20.000.000,00
9	NIKOLAUS NONO	20.000.000,00
10	PETRUS GELU	20.000.000,00
11	STEFANUS WEGU	20.000.000,00
12	YASINTA NAGO	20.000.000,00
	TOTOMALA	600.000.000,00
1	AGUSTINUS BESU DEDU	20.000.000,00
2	AGUSTINUS RABU	20.000.000,00
3	AMANDUS SATU	20.000.000,00
4	ANTONIA WEA	20.000.000,00
5	DANIEL DAKE	20.000.000,00
6	DONATUS NANGA	20.000.000,00
7	ERMELINDA RIO	20.000.000,00
8	FERDINANDUS JUMA	20.000.000,00
9	FIDELIS DITI	20.000.000,00
10	FITALIS AKA	20.000.000,00
11	FLORIANUS SA	20.000.000,00
12	FREDERIKUS GUKA	20.000.000,00
13	KANISIUS TAGE	20.000.000,00
14	KLETUS ATA	20.000.000,00
15	KORNELIS GOA	20.000.000,00
16	LEONARDUS LAGA	20.000.000,00
17	MARGARETHA HAWA	20.000.000,00
18	MARIA GORETI SOI	20.000.000,00
19	MARTINA NGOLE	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
20	PANKRASIUS SUMA	20.000.000,00
21	SIPRIANUS DHALU	20.000.000,00
22	SIPRIANUS DOSA	20.000.000,00
23	SKOLASTIKA AVILA LELA	20.000.000,00
24	STEFANUS SAWU	20.000.000,00
25	URBANUS SAMA	20.000.000,00
26	VENANSIUS BENGU	20.000.000,00
27	VERONIKA FENI	20.000.000,00
28	YEREMIAS DINO	20.000.000,00
29	YOSEPH RETA	20.000.000,00
30	YULIANA NENA	20.000.000,00
	JUMLAH KECAMATAN WOLOWAE	1.760.000.000,00
	DHEREISA	
1	ARNOLDUS DHAЕ	20.000.000,00
2	ANSELMUS WASO EA	20.000.000,00
3	ARNOLDUS LADHO LALO	20.000.000,00
4	DARIUS LADO	20.000.000,00
5	DIDAKUS LARU WEA	20.000.000,00
6	FEBRIANA ZAU	20.000.000,00
7	FERDINANDUS KODO	20.000.000,00
8	FRANSISKA ULE	20.000.000,00
9	LASARUS LADO SEWA	20.000.000,00
10	LEONARDUS KOTA DHUGE	20.000.000,00
11	MARIA FRUMENSIA NGOLE ITO	20.000.000,00
12	MARSELINUS LADO	20.000.000,00
13	MELANIA SUSANA SYUKUR	20.000.000,00
14	MIKAEL KODO WONA	20.000.000,00
15	SILVESTER TEDA	20.000.000,00
16	YOHANES DOSA BENE	20.000.000,00
17	YUSTINA DORA	20.000.000,00
	JUMLAH	340.000.000,00
	GERODHERE	
1	ANTONIUS LIWA MIGA	20.000.000,00
2	BENEDIKTUS MEZE	20.000.000,00
3	EDISIUS NIPA	20.000.000,00
4	EMERENSIANA TEI	20.000.000,00
5	FALENTINUS MOLA OWA	20.000.000,00
6	FRANSISKUS MOSA	20.000.000,00
7	FREDERIKUS PAGA DAI	20.000.000,00
8	HERONIMUS GOA	20.000.000,00
9	HERONIMUS TODA ITO	20.000.000,00
10	KOSMAS TEDA	20.000.000,00
11	MARGARETA GOWA	20.000.000,00
12	THEODORUS TUE	20.000.000,00
13	YOHANES NUWA WOGA	20.000.000,00
	JUMLAH	260.000.000,00
	KELEWAE	
1	OKTAVIANUS BENYAMIN MEO	20.000.000,00
	JUMLAH	20.000.000,00
	KELIMADO	
	BONEFASIUS LEDO	20.000.000,00
	JUMLAH	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
	LEGUDERU	
1	ANTONIUS TEBE	20.000.000,00
2	ARKILES MEZE	20.000.000,00
3	MARIANUS LEWA	20.000.000,00
4	EMILIANUS DJE'E	20.000.000,00
5	FAUSTINUS NGEBU	20.000.000,00
6	MATIAS KISA	20.000.000,00
	JUMLAH	120.000.000,00
	MULAKOLI	
1	ADRIANUS MEZE	20.000.000,00
2	ALFONSIUS BUSA	20.000.000,00
3	ANTONIUS COO	20.000.000,00
4	LORENSIUS TAY	20.000.000,00
5	MATEUS MEZE	20.000.000,00
6	SERVASIUS TUE	20.000.000,00
7	YOHANES LOWA	20.000.000,00
	JUMLAH	140.000.000,00
	NAGEOGA	
1	ALBERTUS EGHO IDI	20.000.000,00
2	ALEXANDER TASI WEA	20.000.000,00
3	ALOYSIUS GASO	20.000.000,00
4	ALOYSIUS MITE	20.000.000,00
5	ANASTASIA RIO BANI	20.000.000,00
6	ANJELINA NAGO DEDE	20.000.000,00
7	ARNOLDUS DHAY NGOLE	20.000.000,00
8	ASRIANUS PADA GEGO	20.000.000,00
9	AVIA EBU NANGA	20.000.000,00
10	BALTASAR SADA COO	20.000.000,00
11	BENYAMIN BHAGA	20.000.000,00
12	BIBIANA MUKU	20.000.000,00
13	DARIUS CEME	20.000.000,00
14	DIONISIUS JOGO UDA	20.000.000,00
15	DOMINIKUS GOU	20.000.000,00
16	ELISABETH MOGI	20.000.000,00
17	FABIANUS JEE	20.000.000,00
18	FRANSISKUS CEME SADA	20.000.000,00
19	FRANSISKUS DHOI	20.000.000,00
20	FRANSISKUS LELE WONA	20.000.000,00
21	FRANSISKUS XAVERIUS LOWA	20.000.000,00
22	GABRIEL GU	20.000.000,00
23	HENDRIKUS MEO	20.000.000,00
24	HERMANUS LENA LALO	20.000.000,00
25	HERMANUS MEZE	20.000.000,00
26	HILARIUS MEO BAGHI	20.000.000,00
27	HONORATUS SIGA WEA	20.000.000,00
28	ISIDORUS DHAE OY	20.000.000,00
29	KONSTATINUS LAKO	20.000.000,00
30	KORNELIS KOKE	20.000.000,00
31	KRISTOFORUS AJO WEA	20.000.000,00
32	KRISTOFORUS KOLO TIWU	20.000.000,00
33	LEONARDUS MEZE MENGE	20.000.000,00
34	LUSIUS THEOFILUS MBAWO	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
35	MARIA ANJELINA SADA	20.000.000,00
36	MARIA ITO KONGA	20.000.000,00
37	MAXIMILIANUS NUWA EBU	20.000.000,00
38	MIKHAEL MITE ZAU	20.000.000,00
39	PERPETUA PALE	20.000.000,00
40	PETRONELA WEA	20.000.000,00
41	ROMANUS LENGI	20.000.000,00
42	SEBASTIANA WEA	20.000.000,00
43	SELFIANA NGOLE DEDE	20.000.000,00
44	SEVERINUS BABO	20.000.000,00
45	SILVESTER MEO BII	20.000.000,00
46	SOFIA DU'A	20.000.000,00
47	WILHELMUS SAWU	20.000.000,00
48	WILHELMUS WAE	20.000.000,00
49	YOHANES TAI WONA	20.000.000,00
50	YOSEPHINA DIAN MARINI COLA	20.000.000,00
	JUMLAH	1.000.000.000,00
	NAGESAPADHI	
1	ABDON TAY NALE	20.000.000,00
2	ADRIANUS LADO DHUGE	20.000.000,00
3	ANDRIANUS BABO	20.000.000,00
4	DANIEL NGEI DHAE	20.000.000,00
5	FABIANUS PELO	20.000.000,00
6	FLORA MENO EDE	20.000.000,00
7	GASPAR WELU DEDE	20.000.000,00
8	KLEMENTINUS LALU WATU	20.000.000,00
9	KORNELIS KODHI	20.000.000,00
10	KRISTOFORUS MUGA SADA	20.000.000,00
11	MARSELUS KOI DOA	20.000.000,00
12	OKTAVIANUS KOLO HALO	20.000.000,00
13	OSTIANUS SIGA ULE	20.000.000,00
14	OSWALDUS BETU	20.000.000,00
15	SEVERINUS LAJA DEDE	20.000.000,00
16	VINSENSIUS PAPE GALE	20.000.000,00
17	YOHANES LERA BOWMANS URAN	20.000.000,00
	JUMLAH	340.000.000,00
	NATANAGE	
1	ADRIANUS LAPE MUKU	20.000.000,00
2	AMBROSIUS POMA	20.000.000,00
3	BENEDIKTUS KISA	20.000.000,00
4	BIBIANA FRANSISKA NANGA	20.000.000,00
5	BLANDINA TAWA	20.000.000,00
6	FRANSISKA DEDE WEA	20.000.000,00
7	HIRONIMUS TEDA	20.000.000,00
8	INDRA ARIES MUHAMAD YUSUF	20.000.000,00
9	KAROLINA DOY	20.000.000,00
10	LUDGARDUS CO'O	20.000.000,00
11	MARIA DEWA	20.000.000,00
12	MARIANUS RIKARDUS TOE BELA	20.000.000,00
13	MUKSIN PUA NATA	20.000.000,00
14	NURANI H. KASIM	20.000.000,00
15	SILVESTER AN	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
16	SIPRIANUS LOMA WEA	20.000.000,00
17	STEFANUS TEBE LEGE	20.000.000,00
18	URBANUS PADU	20.000.000,00
19	VINSENSIUS TAI WEA	20.000.000,00
20	YOHANES BERCHMANS MANCE	20.000.000,00
21	YOHANES BHIA DODA	20.000.000,00
22	YOHANES DE BRITO FETO	20.000.000,00
23	YOHANES EGHO WEA	20.000.000,00
24	YORIANUS KONSTANTINUS MITE BII	20.000.000,00
25	YULIANA MENGE SADA	20.000.000,00
26	ZAKARIAS SIGA	20.000.000,00
	JUMLAH	520.000.000,00
	NATANAGE TIMUR	
1	DARIUS ANU	20.000.000,00
2	FRANSISKUS BATA RADA	20.000.000,00
3	HENDRIKUS DUA LAKO	20.000.000,00
4	HIRONIMUS DOMBO	20.000.000,00
5	KRISTOFORUS KODHI	20.000.000,00
6	LASARUS CEME	20.000.000,00
7	LIDVINA BOLA	20.000.000,00
8	MARIA REYNELDIS AZI	20.000.000,00
9	MARSELINUS MEO	20.000.000,00
10	MARTINUS DHANGA DEDA	20.000.000,00
11	MONIKA TEKU	20.000.000,00
12	SIRILUS SIGA ITO	20.000.000,00
13	ADELTRUDIS MEO RAGA	20.000.000,00
14	YOHANES LAGA MUKU	20.000.000,00
	JUMLAH	280.000.000,00
	OLAKILE	
1	AURELIUS TAI BHOJA	20.000.000,00
2	BALTASAR DAGA	20.000.000,00
3	ERMELINDA KONGA DARU	20.000.000,00
4	HERMANUS ZEWE BUPU	20.000.000,00
5	MARGARETA LENGI '	20.000.000,00
6	MARKUS OHE UNA	20.000.000,00
7	MELKHIOR TAWA DAY	20.000.000,00
8	MIKHAEL TAI ULE	20.000.000,00
9	OKTAFIANUS POA	20.000.000,00
10	OSWALDUS POTO NANGA	20.000.000,00
11	RAIMUNDUS BU'U TO	20.000.000,00
12	USWALDUS GOA MOLA	20.000.000,00
13	VINSENSIUS WEDHO	20.000.000,00
14	YEREMIAS ALFRIDUS BHILA OLI	20.000.000,00
15	ZAKARIAS DHAE	20.000.000,00
	JUMLAH	300.000.000,00
	RAJA	
1	DOMINGGUS DJARI DJADA	20.000.000,00
2	FITALIS NAPA	20.000.000,00
3	HIRONIMUS AGA	20.000.000,00
4	KRISTOFORUS EDE WEA	20.000.000,00
5	MARSIANUS MAKU	20.000.000,00
6	MELKIOR LELE	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
	JUMLAH	120.000.000,00
	RAJA SELATAN	
1	ANTONIUS TUE	20.000.000,00
2	BENEDIKTUS GOU	20.000.000,00
3	PAULUS KOPA	20.000.000,00
	JUMLAH	60.000.000,00
	RAJA TIMUR	
1	FRIDUS GEDA	20.000.000,00
2	FIDELIS NUWA WEDO	20.000.000,00
3	YOHANES ALBERTUS MEO	20.000.000,00
4	YOHANES DON BOSKO BIKU	20.000.000,00
	JUMLAH	80.000.000,00
	RATONGAMOBO	
1	AZARIAS ABE	20.000.000,00
2	FIRMINA MUKU	20.000.000,00
3	FRUMENSIA DHEMA	20.000.000,00
4	KORNELIS DIWA	20.000.000,00
5	KRISTOFORUS BHEO	20.000.000,00
6	KRISTOFORUS GODHO TEDA	20.000.000,00
7	LASARUS JAGO	20.000.000,00
8	MARIA SELVINA LIU	20.000.000,00
9	PASKALIS MANA	20.000.000,00
10	PETRUS NUWA ULE	20.000.000,00
11	RAIMUNDUS BHIA WEA	20.000.000,00
12	REGINA MOGI	20.000.000,00
13	SIMON GALE	20.000.000,00
14	TIMOTIUS LELE	20.000.000,00
15	YULIUS FETO	20.000.000,00
	JUMLAH	300.000.000,00
	REGA	
1	ARKADIUS LADO AZI	20.000.000,00
2	FELIX AMU	20.000.000,00
3	KAMILUS MEO	20.000.000,00
4	LONGGINUS MITE	20.000.000,00
5	MARSIANUS BU'U	20.000.000,00
6	LIDIA ELU	20.000.000,00
7	RINELDIS UGHA	20.000.000,00
8	SABINUS AGA	20.000.000,00
9	SILVESTER MAKO	20.000.000,00
10	YOHANES OLA DORI	20.000.000,00
	JUMLAH	200.000.000,00
	RIGI	
1	MARIA LEONI LEBI	20.000.000,00
	JUMLAH	20.000.000,00
	ROWA	
1	AGUSTINUS RADHO	20.000.000,00
2	AMBROSIUS SEME	20.000.000,00
3	BERNADUS GEGA	20.000.000,00
4	MIKAEL MEO	20.000.000,00
5	PETRUS TOSE	20.000.000,00
6	ROBERTUS BELARMINUS RADHO	20.000.000,00
	JUMLAH	120.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
	WEA AU	
1	AGUSTINUS MEZE	20.000.000,00
2	AFRA MELI	20.000.000,00
3	AGUSTINUS MOLA	20.000.000,00
4	ALEXANDER AMEKAE	20.000.000,00
5	ANDREAS FETO	20.000.000,00
6	BERNADETE CEME	20.000.000,00
7	EMIRENSIANA DHENGI	20.000.000,00
8	FRANS KATA	20.000.000,00
9	KUNIBERTUS TIBA	20.000.000,00
10	MARSELINUS NUWA	20.000.000,00
11	MARTINUS LELE	20.000.000,00
12	MODESTA AZI TJEME	20.000.000,00
13	ROFINUS EGHO AZI	20.000.000,00
14	THERESIA KALE	20.000.000,00
15	VIKTOR MANA MUDE	20.000.000,00
16	YASINTUS LADO	20.000.000,00
17	YUDIFIKA WEA	20.000.000,00
18	ZAKARIAS ATU ELU	20.000.000,00
	JUMLAH	360.000.000,00
	WOLOPOGO	
1	ANISIA VERONIKA BUSA	20.000.000,00
2	ANTONIUS JO WEA	20.000.000,00
3	DOROTEA ASO	20.000.000,00
4	FITALIS TUE	20.000.000,00
5	FRANSISKUS LAKO	20.000.000,00
6	HILARIUS PEA UKO	20.000.000,00
7	KATARINA AKO	20.000.000,00
8	ROBERTUS LAKO	20.000.000,00
9	TIMOTEUS LAKO	20.000.000,00
10	WILBRODUS SEDA SINA	20.000.000,00
11	YOHANES MEZE	20.000.000,00
	JUMLAH	220.000.000,00
	WOLOWEA	
1	ARNOLDUS NUWA	20.000.000,00
2	AGUSTINUS KEBU	20.000.000,00
3	ANASTASIA TAWA	20.000.000,00
4	DAMIANUS MANA	20.000.000,00
5	DANIEL BAJO	20.000.000,00
6	DANIEL DIWA	20.000.000,00
7	EPARANUS MEZE	20.000.000,00
8	ESTER WONA	20.000.000,00
9	FLAVIANUS LADO	20.000.000,00
10	FRANSISKUS AMEKAE	20.000.000,00
11	KORNELIS MEZE	20.000.000,00
12	LAMBERTUS BOBE	20.000.000,00
13	LUKAS ALU	20.000.000,00
14	PETRUS DJOGO BENGA	20.000.000,00
15	RAIMUNDA MOGI	20.000.000,00
16	SAKARIAS JEKE	20.000.000,00
17	SIPRIANUS PAGA	20.000.000,00
18	STANISLAUS BUSA	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
19	SUSANA ITO	20.000.000,00
20	YOVITA ULE	20.000.000,00
	JUMLAH	400.000.000,00
	WOLOWEA BARAT	
1	ALFONSUS MEO EA	20.000.000,00
2	ARNOLDINA EA	20.000.000,00
3	DAMIANUS CEME	20.000.000,00
4	GRADUS MITE	20.000.000,00
5	MARSELINA WEA	20.000.000,00
6	MATIAS TIBA	20.000.000,00
7	PATRIANUS SEDA	20.000.000,00
8	PAULUS EDE TUWA	20.000.000,00
9	YOHANES DHAE	20.000.000,00
10	YOHANES DIWA	20.000.000,00
	JUMLAH	200.000.000,00
	WOLOWEA TIMUR	
1	ANDREAS SEDA	20.000.000,00
2	ANTONIUS SIGA	20.000.000,00
3	ARNOLDUS NUWA	20.000.000,00
4	BLASIUS MERE	20.000.000,00
5	DARIUS RAJA	20.000.000,00
6	FITALIS CEME OWA	20.000.000,00
7	MARSELINUS PILI ULE	20.000.000,00
	JUMLAH	140.000.000,00
	JUMLAH KECAMATAN BOAWAE	5.560.000.000,00
	AEWOE	
1	GERALDUS RAGA	20.000.000,00
	JUMLAH	20.000.000,00
	BELA	
1	BERNADETA BEKA	20.000.000,00
2	CYRILLUS MERE	20.000.000,00
3	ELYSIUS GHAE	20.000.000,00
4	MARSELINUS KOTA	20.000.000,00
5	MATEUS MITE	20.000.000,00
6	OSWALDUS LENA	20.000.000,00
7	PIUS PAJA	20.000.000,00
8	ROBERTUS DUA	20.000.000,00
9	SILVESTER DERE	20.000.000,00
	JUMLAH	180.000.000,00
	JAWAPOGO	
1	ALEXIUS MERE	20.000.000,00
2	AGUSTINUS LALU	20.000.000,00
3	FRANSISKUS MEO	20.000.000,00
4	FRANSISKUS RAGA	20.000.000,00
5	MARSELINA UNA	20.000.000,00
6	MATHEUS GAWA	20.000.000,00
7	RAWI KORNELIA	20.000.000,00
8	ROMANUS GUBE	20.000.000,00
9	SEVERINUS MEO	20.000.000,00
10	SIANUS LAKI	20.000.000,00
11	SILVESTER BO	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
12	VINSENSIUS KOKA	20.000.000,00
13	WILFRIDUS RAGA	20.000.000,00
14	YOSEF FERNANDES MERE BULE	20.000.000,00
	JUMLAH	280.000.000,00
	KELIWATULEWA	
1	FIDELIS DIMU	20.000.000,00
2	GAUDENSIANA REA	20.000.000,00
3	HENDRIKUS DOI	20.000.000,00
4	HERIBERTUS MERE	20.000.000,00
5	MARIA WONGA	20.000.000,00
6	PETOMEUS WAWO	20.000.000,00
7	PETRUS KLAVER WALA	20.000.000,00
8	PETRUS WULI SOO	20.000.000,00
9	SERILUS JODO	20.000.000,00
	JUMLAH	180.000.000,00
	KOTAGANA	
1	CANISIUS RENGA	20.000.000,00
2	FERDINANDUS JAWA	20.000.000,00
3	FINSSENSIUS DEPAUL LOY	20.000.000,00
4	FRANSISKA UTA	20.000.000,00
5	GREGORIUS GADE	20.000.000,00
6	HIRONIMUS SARE	20.000.000,00
7	KONSTANTINUS WAWO	20.000.000,00
8	LEONARDUS EA	20.000.000,00
9	MARTINUS SAVERIUS DAGA	20.000.000,00
10	PETRUS LENGI	20.000.000,00
11	PETRUS PILI	20.000.000,00
12	PLASIDUS DHAE	20.000.000,00
13	PRIMUS MEO	20.000.000,00
14	ROBERTUS SELU BULE	20.000.000,00
15	SALEH JAFAR	20.000.000,00
16	TARSISIUS MOE	20.000.000,00
17	TRESIA UGHA	20.000.000,00
	JUMLAH	340.000.000,00
	LAJAWAJO	
1	ANDREAS DEMU	20.000.000,00
2	BERNADETA BARA	20.000.000,00
3	DAMIANUS BABO	20.000.000,00
4	EDELBERTUS RAGA	20.000.000,00
5	ENTIANUS WAJA	20.000.000,00
6	FRANSISKUS SEKE	20.000.000,00
7	PHILIPUS MEO BUPU	20.000.000,00
8	STEFANUS JEA	20.000.000,00
9	YOHANES DHOY	20.000.000,00
10	YOHANES MARSEL CEME	20.000.000,00
	JUMLAH	200.000.000,00
	LODAULO	
1	ALBERTUS BULE	20.000.000,00
2	DAMIANUS DJATA	20.000.000,00
3	GASPAR RAGA	20.000.000,00
4	GAUDENSIA ITO	20.000.000,00
	JUMLAH	80.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
	LOKALABA	
1	AMIRUDIN M. NATSIR	20.000.000,00
2	AHMAT ALI	20.000.000,00
3	AMBROSIUS WAJA	20.000.000,00
4	KURANI TOYO	20.000.000,00
5	MARTINUS MOGI	20.000.000,00
6	RIFQI TOJA	20.000.000,00
7	SAID MUDIN	20.000.000,00
8	WAHYUDIN ALWAN	20.000.000,00
	JUMLAH	160.000.000,00
	MAUPONGGO	
1	ASTUTI A. NGGOLU	20.000.000,00
2	FELIX TODJA	20.000.000,00
3	FRANSISKUS AE HEWOT	20.000.000,00
4	ABDUL RAHMAN SAMBI	20.000.000,00
5	RAFAEL RAGA	20.000.000,00
6	YUSTINA KRISTINA DEA	20.000.000,00
	JUMLAH	120.000.000,00
	SAWU	
1	DIDIMUS LAKO	20.000.000,00
2	EMANUEL LENA	20.000.000,00
3	ERNALINDA NAGE	20.000.000,00
4	FERDINANDUS GOO	20.000.000,00
5	FLORENTINA MEDHO	20.000.000,00
6	MARIA ASTIANA UDE EDE	20.000.000,00
7	NOBERTUS RAGA	20.000.000,00
8	YOHANA SANDA	20.000.000,00
	JUMLAH	160.000.000,00
	SELALEJO	
1	DISMAS KWIRINUS FUJA	20.000.000,00
2	MARTINUS SUTA	20.000.000,00
3	SERILUS WENDO	20.000.000,00
4	SERVASIUS AJA	20.000.000,00
5	YOHANES AJA	20.000.000,00
6	YOHANES KOBAN	20.000.000,00
7	YOHANES NUWA BHOKO	20.000.000,00
	JUMLAH	140.000.000,00
	SELALEJO TIMUR	
1	BONEFASIUS MEO	20.000.000,00
	JUMLAH	20.000.000,00
	UA	
1	EDISIUS YEGHO	20.000.000,00
2	EWALDUS SEBHO	20.000.000,00
3	HERMINA WEA	20.000.000,00
4	LEONARDUS LEWA	20.000.000,00
5	NIKOLAUS AGUSTINUS JO	20.000.000,00
6	SABINA SOO	20.000.000,00
7	YOSAFAT TONGO	20.000.000,00
	JUMLAH	140.000.000,00
	ULULOGA	
1	BERNADINUS TENDA	20.000.000,00
2	EMILIUS CEME	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
3	SEREFULUS MANGO	20.000.000,00
4	FIDELIS JI	20.000.000,00
5	FLAFIANUS LAKO	20.000.000,00
6	MARIETA NAGE	20.000.000,00
7	MELCHIOR WARA	20.000.000,00
8	ROFINUS LAKO	20.000.000,00
9	SIRILUS RIWU	20.000.000,00
10	FRUMENSIUS MERE	20.000.000,00
	JUMLAH	200.000.000,00
	WOEWOLO	
1	GABRIEL FETO	20.000.000,00
2	HENDRIKUS MOLA	20.000.000,00
3	KAROLUS EMU	20.000.000,00
4	WILIBRODUS GOU ELU	20.000.000,00
	JUMLAH	80.000.000,00
	WOLOEDE	
1	HELENA OY	20.000.000,00
2	NIKODEMUS LEWA	20.000.000,00
3	SELSIUS MARSELINUS AME	20.000.000,00
4	SIMON WOTI	20.000.000,00
	JUMLAH	80.000.000,00
	WOLOKISA	
1	ADRIANUS KOA	20.000.000,00
2	ALEXIUS DUGE	20.000.000,00
3	GODELFRIDUS BATU	20.000.000,00
4	LAMBERTUS KODE	20.000.000,00
5	SIMPLISIUS JAGO	20.000.000,00
	JUMLAH	100.000.000,00
	WOLOTELU	
1	ABDURAHMAN NDAO	20.000.000,00
2	ADRIANUS NDONA	20.000.000,00
3	ALI AME	20.000.000,00
4	ARKAN WAWO	20.000.000,00
5	BLASIUS SEKE	20.000.000,00
6	BONEFASIUS WANI	20.000.000,00
7	DIDAKUS BETU	20.000.000,00
8	GABRIEL POMA	20.000.000,00
9	GASPAR ESI	20.000.000,00
10	GERARDUS GERA	20.000.000,00
11	HARTONO ABDURAHMAN	20.000.000,00
12	IBRAHIM MARJUKI	20.000.000,00
13	LUKMAN MEO WALE	20.000.000,00
14	MARTINUS SUTA	20.000.000,00
15	MAXIMUS RAGA	20.000.000,00
16	MOH. ALI SINA	20.000.000,00
17	MUSA ROFA	20.000.000,00
18	PETRUS KAKA	20.000.000,00
19	PIUS MEA	20.000.000,00
20	RAFAEL BELE	20.000.000,00
21	REBEKA GOO	20.000.000,00
22	SILVESTER NAE	20.000.000,00
23	SISWANTO ABUBEKAR	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
24	SYUKUR LIPU	20.000.000,00
	JUMLAH	480.000.000,00
	WULIWALO	
1	ANTONIUS BHOJA	20.000.000,00
2	FALENTINUS WARA	20.000.000,00
3	FERDINANDUS JATA	20.000.000,00
4	GAUDENSIA WEA	20.000.000,00
5	LIDIA BHAYA	20.000.000,00
6	MARTINUS KOTA	20.000.000,00
7	SERFULUS ISAK WATU	20.000.000,00
8	YOSEPH JAWA	20.000.000,00
	JUMLAH	160.000.000,00
	JUMLAH KECAMATAN MAUPONGGO	3.120.000.000,00
	BIDOA	
1	ALOYSIUS MEO	20.000.000,00
2	HILARIUS DENG BONGO	20.000.000,00
3	LUSIA MEO	20.000.000,00
4	SERVASIUS AJO UTA	20.000.000,00
5	SILVESTER DHENGA DERO	20.000.000,00
6	STANISLAUS ROGA	20.000.000,00
	JUMLAH	120.000.000,00
	DEGALEA	
1	GRADIANA TAWA	20.000.000,00
2	MARTEN DEPORES WOLO	20.000.000,00
3	YASINTA ITO	20.000.000,00
4	YOHANES BERKHMANS AJA	20.000.000,00
	JUMLAH	80.000.000,00
	KOTAKEO	
1	ADRIANUS MEO	20.000.000,00
2	ALEKSANDER WASO	20.000.000,00
3	BRUNO AJA	20.000.000,00
4	DARIUS BUSA	20.000.000,00
5	FLAFIANUS AJA	20.000.000,00
6	FRANSISKUS BHEO WEA	20.000.000,00
7	KASIRINUS LADO	20.000.000,00
8	KORBIANUS PILI WEA	20.000.000,00
9	KRISTIANUS DHAZ AZI	20.000.000,00
10	MARKUS JO	20.000.000,00
11	RICHARDO GELU	20.000.000,00
12	SEVERINUS TAGE	20.000.000,00
13	WOLFGANG AMADEUS GOA	20.000.000,00
14	YOHANES TUE	20.000.000,00
	JUMLAH	280.000.000,00
	KOTAKEO I	
1	Adrianus Wasa	20.000.000,00
2	Albertus Go	20.000.000,00
3	Albina Bewu	20.000.000,00
4	Ambrosius Busa	20.000.000,00
5	Anselmus Lele	20.000.000,00
6	Finsensius Amekae	20.000.000,00
7	Fransiskus Mosa	20.000.000,00
8	Getrudis Mogi	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
9	Gradus Sawu	20.000.000,00
10	Gregorius Ede Pasu	20.000.000,00
11	Hendrikus Lebi Nuwa	20.000.000,00
12	Hendrikus Odo	20.000.000,00
13	Hermina Miso	20.000.000,00
14	Kanisius Lowa	20.000.000,00
15	Kornelis Koro	20.000.000,00
16	Leonardus Siga	20.000.000,00
17	Patrianus Meka	20.000.000,00
18	Severinus Maku	20.000.000,00
19	Severinus Witu	20.000.000,00
20	Silvester Dala	20.000.000,00
21	Thomas Meo	20.000.000,00
22	Titianus Dominggus Kewa	20.000.000,00
23	Tresia Sela	20.000.000,00
24	Wendelinus Weke	20.000.000,00
25	Yakobus Gowang	20.000.000,00
26	Yoseph Nuwa	20.000.000,00
27	Yustina Wugha	20.000.000,00
	JUMLAH	540.000.000,00
	KOTAKEO II	
1	Agnes Nembo	20.000.000,00
2	Dominikus Meye	20.000.000,00
3	Fespasianus Lato	20.000.000,00
4	Getrudis Elu	20.000.000,00
5	Manfredus Nestorius Aja	20.000.000,00
6	Marselina Ona Rene	20.000.000,00
7	Marsianus Sabu	20.000.000,00
8	Polikarpus Lado	20.000.000,00
9	Titus Tema	20.000.000,00
	JUMLAH	180.000.000,00
	NANGARORO	
1	Stefania Maria Bahagia	20.000.000,00
2	Yuventus Djogo	20.000.000,00
	JUMLAH	40.000.000,00
	NATAUTE	
1	Agnes Niba	20.000.000,00
2	Alex Dhae	20.000.000,00
3	Katrina Riti	20.000.000,00
4	Yohanes Gare	20.000.000,00
	JUMLAH	80.000.000,00
	PAGOMOGO	
1	Agustinus Endo	20.000.000,00
2	Karolina Gua	20.000.000,00
3	Leonardus Buu	20.000.000,00
4	Pelipus Lado	20.000.000,00
5	Tribaldus Jebarus Bai	20.000.000,00
6	Vinsensius Averianus Jogo	20.000.000,00
7	Zakarias Pita	20.000.000,00
	JUMLAH	140.000.000,00
	PODENURA	
	Sabinus Vincensius Mite	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
	JUMLAH	20.000.000,00
	RITI	
1	Firmus Dhae	20.000.000,00
2	Klara Wea	20.000.000,00
3	Silvester Mosa	20.000.000,00
4	Vinsensius Sogha	20.000.000,00
5	Yeremias Dewa	20.000.000,00
	JUMLAH	100.000.000,00
	TONGGO	
1	Aloysius Uwa	20.000.000,00
2	Ayu Binti Sarif Safdila	20.000.000,00
3	Benedikta Gheje	20.000.000,00
4	Emirensiana Ine	20.000.000,00
5	Eugemianus Dawi	20.000.000,00
6	Feliks Bhia	20.000.000,00
7	Gabrielis Gu	20.000.000,00
8	Marselinus Daga	20.000.000,00
9	Marselinus Mbuu	20.000.000,00
10	Martha Owa	20.000.000,00
11	Mustafar Nur	20.000.000,00
12	Petrus Claver Daki	20.000.000,00
13	Pitarius Batu	20.000.000,00
14	Rofinus Masa	20.000.000,00
15	Romaldus Dhae	20.000.000,00
16	Siprianus Soba	20.000.000,00
17	Tadeus Dora	20.000.000,00
18	Taufik Hidayah	20.000.000,00
19	Wilhelmus Watu	20.000.000,00
20	Yulius Ndao	20.000.000,00
	JUMLAH	400.000.000,00
	ULUPULU	
1	Alfonsius Sema	20.000.000,00
2	Antonius Witu	20.000.000,00
3	Emilius Nuwa Ledu	20.000.000,00
4	Ferdinandus Bongo	20.000.000,00
5	Finsensius Aga	20.000.000,00
6	Hendrikus Pili	20.000.000,00
7	Herman Yosep Sadha	20.000.000,00
8	Kristoforus Aha	20.000.000,00
9	Santo Gregorius Tarsan	20.000.000,00
10	Wilfridus Peti	20.000.000,00
11	Yakobus Taloim	20.000.000,00
12	Yohanes Adolfus Nuka	20.000.000,00
13	Yohanes No	20.000.000,00
14	Yohanes Vianey Sale	20.000.000,00
	JUMLAH	280.000.000,00
	ULUPULU I	
1	Benediktus Boy	20.000.000,00
2	Falentinus Kebu	20.000.000,00
3	Fransiskus K. Djo	20.000.000,00
4	Fransiskus Wuli	20.000.000,00
5	Hermanus Nuwa	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
6	Hironimus Lae	20.000.000,00
7	Martina Susanti	20.000.000,00
8	Melkior Dani	20.000.000,00
9	Regina Rei	20.000.000,00
10	Sebastianus Towa	20.000.000,00
	JUMLAH	200.000.000,00
	UTETOTO	
1	Amandus Timo	20.000.000,00
2	Yakobus Kowa	20.000.000,00
	JUMLAH	40.000.000,00
	WOEDOA	
1	Anselmus Wae	20.000.000,00
2	Benediktus Mepa	20.000.000,00
3	Bernadus Nelu	20.000.000,00
4	Gabriel Lobo	20.000.000,00
5	Gaspar Lara Djoa	20.000.000,00
6	Simon Toma	20.000.000,00
7	Venantius Betu	20.000.000,00
8	Yohanes Amekae	20.000.000,00
9	Yuvensius Ndoa	20.000.000,00
	JUMLAH	180.000.000,00
	WOEWUTU	
1	Anastasia Bunga	20.000.000,00
2	Ansar Pua Waru	20.000.000,00
3	Konradus Gade	20.000.000,00
4	Laurensius Eo	20.000.000,00
5	Lorensius Lobo	20.000.000,00
6	Marianus Sare	20.000.000,00
7	Martinus Ndoa	20.000.000,00
8	Muhamad Hetab Mbango	20.000.000,00
9	Muhamad Iksan Yunus	20.000.000,00
	JUMLAH	180.000.000,00
	WOKODEKORORO	
1	Antonius Moi	20.000.000,00
2	Dorothea Elu	20.000.000,00
3	Kristina Nggesu	20.000.000,00
4	Martinus Muda	20.000.000,00
5	Moses Radja	20.000.000,00
6	Philippus Biku	20.000.000,00
7	Romanus Mesu	20.000.000,00
8	Saolus Samson Pau	20.000.000,00
9	Tarsisius Nggode	20.000.000,00
	JUMLAH	180.000.000,00
	WOKOWOE	
1	Bernadus Pidi	20.000.000,00
2	Elias Pidi	20.000.000,00
3	Elphidus Wuda	20.000.000,00
4	Hironimus Dema	20.000.000,00
5	Levianus Meo	20.000.000,00
6	Makarius Miru	20.000.000,00
7	Maksimilianus Sambu	20.000.000,00
8	Martina Sue	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
9	Maximus Mema	20.000.000,00
10	Primus Dae	20.000.000,00
11	Rafael Wilhelmus Rasa	20.000.000,00
12	Viktor Pidi	20.000.000,00
13	Yohanes Kanisius Nilo	20.000.000,00
14	Yonas Ceme	20.000.000,00
15	Yoseph Taa	20.000.000,00
	JUMLAH	300.000.000,00
	JUMLAH KECAMATAN NANGARORO	3.340.000.000,00
	KOTODIRUMALI	
1	Emiana Basi	20.000.000,00
2	Geraadus Waja	20.000.000,00
3	Krispianus Tonda	20.000.000,00
	JUMLAH	60.000.000,00
	KOTOWUJI BARAT	
1	Daniel Satu	20.000.000,00
2	Flavianus Dja	20.000.000,00
3	Gaspar Goo	20.000.000,00
4	Hironimus Ame	20.000.000,00
5	Klara Tina	20.000.000,00
6	Laurensius Minggu	20.000.000,00
7	Martinus Mado	20.000.000,00
8	Pius Bheo	20.000.000,00
9	Sebastianus Ndiwa	20.000.000,00
10	Siprianus Goo	20.000.000,00
11	Thomas Dako	20.000.000,00
12	Virmus Roga	20.000.000,00
	JUMLAH	240.000.000,00
	KOTOWUJI TIMUR	
1	Abraham Lodo Wende	20.000.000,00
2	Alfonsius Bhala	20.000.000,00
3	Apolinaris Gati	20.000.000,00
4	Benediktus Aja	20.000.000,00
5	Bertolomeus Kedi	20.000.000,00
6	Emanuel Ude	20.000.000,00
7	Engelbertus Goo	20.000.000,00
8	Gaspar Jogo	20.000.000,00
9	Kletus Kodo	20.000.000,00
10	Krispianus Dando	20.000.000,00
11	Lambertus Roga	20.000.000,00
12	Moses Bio	20.000.000,00
13	Nikodemus Nai	20.000.000,00
14	Philipus Neri Jon Ndiwa	20.000.000,00
15	Rikardus Mbede	20.000.000,00
16	Siprianus Sede	20.000.000,00
17	Tibertius Niga	20.000.000,00
18	Yefrianus Rangga	20.000.000,00
	JUMLAH	360.000.000,00
	LEWANGERA	
1	Arkadius Sana	20.000.000,00
2	Ermanus No	20.000.000,00
3	Petronela Nura	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
4	Siprianus Ndapa	20.000.000,00
5	Yoseph Nuwa	20.000.000,00
	JUMLAH	100.000.000,00
	MBAENUAMURI	
1	Pius Ndiwa	20.000.000,00
	JUMLAH	20.000.000,00
	PAUMALI	
1	Moses Meo	20.000.000,00
	JUMLAH	20.000.000,00
	WAJO	
1	Aloysius Jogo	20.000.000,00
2	Albertus Magnus Mbawo	20.000.000,00
3	Aloysius Rajo	20.000.000,00
4	Antonius Goo	20.000.000,00
5	Bonefasius Tule	20.000.000,00
6	Edmundus Esi	20.000.000,00
7	Edmundus Hena	20.000.000,00
8	Ferdinandus Setu	20.000.000,00
9	Fransiskus Feto	20.000.000,00
10	Hermanus Djogo	20.000.000,00
11	Hipolitus Siga	20.000.000,00
12	Ignasius Daga	20.000.000,00
13	Irenius Wena	20.000.000,00
14	Kamilus Minggu	20.000.000,00
15	Kanisius Ena	20.000.000,00
16	Karolus Komba	20.000.000,00
17	Klemens Sede	20.000.000,00
18	Lasarus Mbusa	20.000.000,00
19	Longginus Minggu	20.000.000,00
20	Manfred Mbusa	20.000.000,00
21	Marianus Koba	20.000.000,00
22	Marselinus D. Riwu	20.000.000,00
23	Severinus Ali	20.000.000,00
24	Simon Ame	20.000.000,00
	JUMLAH	480.000.000,00
	WAJO TIMUR	
1	Didimus Pidi	20.000.000,00
2	Dominikus Nggoka	20.000.000,00
3	Geradus Daga	20.000.000,00
4	Marsiana Bhala	20.000.000,00
	JUMLAH	80.000.000,00
	WITUROMBAUA	
1	Alex Yanuarius Mbeke	20.000.000,00
2	Blasius Mere	20.000.000,00
3	Ernestu Ea	20.000.000,00
4	Gaspar Soba	20.000.000,00
5	Heronimus Gu	20.000.000,00
6	Kristoforus Dombo	20.000.000,00
7	Marianus Soba	20.000.000,00
8	Marselinus Kodo	20.000.000,00
9	Martinus Guru	20.000.000,00
10	Nikolaus Wuda	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)
11	Rafael Ria	20.000.000,00
	JUMLAH	220.000.000,00
	JUMLAH KECAMATAN KEO TENGAH	1.580.000.000,00
	JUMLAH BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA KELUARGA	21.200.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Masyarakat (KUBE)	
1	Fonga Wali	9.953.125,00
2	Tonggo Permai	9.996.000,00
3	Embo Indah	9.987.425,00
4	Fonga Sena	9.992.938,00
5	Sebo Susa	9.971.500,00
6	Sehati	9.965.375,00
7	Soi Susa	9.971.500,00
8	Canai	9.971.500,00
9	Papa Laka	9.971.500,00
10	Maju Bersama	9.996.000,00
11	Kamboja 3	9.996.000,00
12	Bintang Timur	10.000.000,00
13	Bintang Kejora	10.000.000,00
14	Tunas Baru	10.000.000,00
15	Cemerlang	10.000.000,00
16	Tunas Muda	10.000.000,00
17	Margot 1	10.000.000,00
18	Melati 1	10.000.000,00
	JUMLAH	179.772.863,00
	Belanja Bantuan Sosial Air Bersih	
1	SLB Malaruma	50.000,00
2	SMPN 2 Satap Aesesa	100.000,00
3	SMPN 2 Aesesa Selatan Satap	50.000,00
	JUMLAH	200.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	179.972.863,00
	JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL	21.844.542.863,00

5.1.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nagekeo dibagi ke dalam Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp113.999.290.488,50 atau 90,50% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp125.972.561.078,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp63.034.879.789,13 atau 35,61% dibanding realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp177.034.170.277,63.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Rincian anggaran dan realisasi Rincian lengkap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.30 berikut ini:

Tabel 5.30
Belanja Modal Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Tanah (RKUD)	3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	97,16	0,00
Belanja Peralatan & Mesin	17.031.320.607,00	13.940.302.529,00	81,85	60.974.475.110,00
RKUD	0,00	11.720.643.279,00	0,00	36.611.096.793,00
BOS	0,00	2.125.117.250,00	0,00	3.636.516.569,00
BOP PAUD	0,00	59.678.000,00	0,00	0,00
JKN	0,00	21.855.000,00	0,00	20.726.861.748,00
BLUD	0,00	13.009.000,00	0,00	0,00
Belanja Gedung & Bangunan (RKUD)	19.336.271.259,00	17.863.000.833,00	92,38	37.508.371.047,80
Belanja Jalan, Irigasi, & Jaringan	77.033.933.712,00	70.200.187.042,50	91,13	76.696.279.403,28
RKUD	0,00	70.200.187.042,50	0,00	76.690.479.403,28
BOS	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.422.445.500,00	8.936.710.084,00	94,84	1.837.244.716,55
RKUD	0,00	8.403.551.584,00	0,00	681.331.671,55
BOS	0,00	533.158.500,00	0,00	1.155.913.045,00
Belanja Aset Lainnya (RKUD)	0,00	0,00	100,00	17.800.000,00
Jumlah	125.972.561.078,00	113.999.290.488,50	90,50	177.034.170.277,63

5.1.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.31 sebagai berikut :

Tabel 5.31
Belanja Modal Tanah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	441.724.000,00	352.224.000,00	79,74	0,00
2.	Belanja Modal Lapangan	2.706.866.000,00	2.706.866.000,00	100,00	0,00
Jumlah		3.148.590.000,00	3.059.090.000,00	97,16	0,00

Berdasarkan tabel 5.31 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal tanah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.059.090.000,00 atau 97,16% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.148.590.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.059.090.000,00 dibanding realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

sebesar Rp0,00. Rincian realisasi belanja modal tanah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.32 sebagai berikut;

Tabel 5.32
Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Tanah
1	Belanja Modal Tanah Persil		
		Sekretariat Daerah	352.224.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Persil			352.224.000,00
2	Belanja Modal Lapangan		
		Sekretariat Daerah	2.706.866.000,00
Jumlah Belanja Modal Lapangan			2.706.866.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah			3.059.090.000,00

5.1.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.33 sebagai berikut :

Tabel 5.33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	6.582.499.999,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	83.050.000,00	18.000.000,00	21,67	13.650.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	936.779.996,00	905.160.996,00	96,62	6.387.219.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.850.000,00	7.850.000,00	100,00	1.872.374.030,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	630.000,00	0,00	0,00	1.287.500,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00	14.300.000,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	69.940.000,00	69.690.000,00	99,64	37.820.000,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	869.325.664,00	856.817.732,00	98,56	566.631.817,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	510.066.500,00	509.231.500,00	99,84	1.574.982.475,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	24.191.100,00
11	Belanja Modal Alat Studio	138.648.438,00	137.369.000,00	99,08	139.723.500,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	189.332.028,00	186.114.880,00	98,30	34.877.500,00
13	Belanja Modal Peralatan Pemancar	306.395.362,00	306.382.200,00	100,00	1.444.060,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.699.447.301,00	2.679.043.977,00	99,24	25.916.561.193,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.784.069.404,00	2.424.239.638,00	50,67	9.636.920.599,00
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	740.000.000,00	740.000.000,00	100,00	212.600.146,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	138.952.604,00
19	Belanja Modal Komputer Unit	2.719.984.154,00	2.626.767.096,00	96,57	3.121.368.666,00
20	Belanja Modal Peralatan Komputer	254.534.260,00	253.259.260,00	99,50	953.280.752,00
21	Belanja Modal Alat Pelindung	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Modal Peralatan Olahraga	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
23	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	72.265.600,00
24	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.139.017.500,00	2.125.117.250,00	99,35	3.636.516.569,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00	13.009.000,00	2,60	0,00
	Jumlah	17.031.320.607,00	13.940.302.529,00	81,85	60.974.475.110,00

Berdasarkan tabel 5.33 di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.940.302.529,00 atau 81,85% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp17.031.320.607,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp47.034.172.581,00 atau 77,14% dibanding realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.974.475.110,00. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.34 berikut ini:

Tabel 5.34
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1	Belanja Modal Alat Bantu		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.000.000,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal Alat Bantu		18.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		
		Dinas Kesehatan	29.080.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	518.381.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	357.699.996,00
	Jumlah Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		905.160.996,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin		
		Dinas Kelautan dan Perikanan	7.850.000,00
	Jumlah Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin		7.850.000,00
4	Belanja Modal Alat Ukur		
		Dinas Kesehatan	500.000,00
		Kecamatan Boawae	3.450.000,00
	Jumlah Belanja Modal Alat Ukur		3.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	Belanja Modal Alat Pengolahan		
		Dinas Kesehatan	4.000.000,00
		Dinas Pangan Daerah	8.000.000,00
		Dinas Peternakan	57.690.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Pengolahan			69.690.000,00
6	Belanja Modal Alat Kantor		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.076.000,00
		Dinas Kesehatan	50.955.000,00
		RSUD Aeramo	126.408.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	5.400.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.500.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.500.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	520.331.000,00
		Sekretariat Daerah	14.907.732,00
		Badan Keuangan Daerah	16.783.000,00
		Kecamatan Aesesa	6.032.000,00
		Kecamatan Boawae	23.425.000,00
		Kecamatan Nangaroro	8.800.000,00
		Kecamatan Keo Tengah	7.500.000,00
		Kecamatan Aesesa Selatan	7.500.000,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.450.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor			854.567.732,00
7	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.026.500,00
		Dinas Kesehatan	154.085.000,00
		RSUD Aeramo	50.000.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.200.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	5.000.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.907.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.854.000,00
		Dinas Perhubungan	50.970.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	23.627.000,00
		Dinas Pangan Daerah	700.000,00
		Dinas Pertanian	29.183.000,00
		Sekretariat Daerah	23.785.000,00
		Badan Keuangan Daerah	8.200.000,00
		Kecamatan Aesesa	15.125.000,00
		Kecamatan Boawae	8.930.000,00
		Kecamatan Mauponggo	23.259.000,00
		Kecamatan Keo Tengah	25.630.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Rumah Tangga			511.481.500,00
8	Belanja Modal Alat Studio		
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.050.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	90.354.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00
		Sekretariat Daerah	4.375.000,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.590.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Studio			137.369.000,00
9	Belanja Modal Alat Komunikasi		
		Dinas Kesehatan	2.500.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	11.287.650,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.910.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	166.457.230,00
		Sekretariat Daerah	1.960.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Komunikasi			186.114.880,00
10	Belanja Modal Peralatan Pemancar		
		Dinas Kesehatan	194.893.800,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	111.488.400,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Pemancar			306.382.200,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran		
		RSUD Aeramo	2.646.076.977,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.967.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran			2.679.043.977,00
12	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
		Dinas Kesehatan	2.424.239.638,00
Jumlah Belanja Modal Alat Kesehatan Umum			2.424.239.638,00
13	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	740.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Unit Alat Laboratorium			740.000.000,00
14	Belanja Modal Komputer Unit		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.269.750.969,00
		Dinas Kesehatan	108.668.000,00
		RSUD Aeramo	49.980.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.092.500,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	49.800.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.212.000,00
		Dinas Sosial	23.766.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	47.500.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.904.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47.532.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.940.000,00
		Dinas Perhubungan	3.000.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	25.653.590,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.574.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.016.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	62.200.000,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	17.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
		Dinas Pertanian	40.000.000,00
		Sekretariat Daerah	59.166.590,00
		Sekretariat DPRD	74.877.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	79.500.000,00
		Badan Keuangan Daerah	166.344.000,00
		Kecamatan Aesesa	38.453.180,00
		Kecamatan Boawae	111.091.200,00
		Kecamatan Mauponggo	13.212.000,00
		Kecamatan Wolowae	26.768.067,00
		Kecamatan Aesesa Selatan	23.766.000,00
Jumlah Belanja Modal Komputer Unit			2.626.767.096,00
15	Belanja Modal Peralatan Komputer		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.104.000,00
		Dinas Kesehatan	19.051.000,00
		RSUD Aeram	24.350.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.238.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	6.798.000,00
		Dinas Sosial	5.048.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	6.798.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.874.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	1.958.000,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.069.000,00
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8.000.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.600.000,00
		Badan Keuangan Daerah	36.049.000,00
		Kecamatan Aesesa	5.458.000,00
		Kecamatan Boawae	34.864.260,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer			253.259.260,00
16	Belanja Modal Alat Pelindung		
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.300.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Pelindung			3.300.000,00
17	Belanja Modal Peralatan Olahraga		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Olahraga			75.000.000,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.125.117.250,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS			2.125.117.350,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
		RSUD Aeram	13.009.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			13.009.000,00
Jumlah Peralatan dan Mesin			13.940.302.529,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5.1.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.35 sebagai berikut:

Tabel 5.35 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.160.113.795,00	16.913.862.780,00	98,56	33.522.576.373,80
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.061.834.339,00	837.272.790,00	78,85	1.045.563.611,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	117.221.350,00	111.865.263,00	95,43	549.200.038,00
5	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	997.101.775,00	0,00	0,00	2.389.531.025,00
	Jumlah	19.336.271.259,00	17.863.000.833,00	92,38	37.508.371.047,80

Berdasarkan tabel 5.35 di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.863.000.833,00 atau 92,38% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp19.336.271.259,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.645.370.214,80 atau 52,38% dibanding realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp37.508.371.047,80. Rincian realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.36 berikut ini:

Tabel 5.36 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.944.558.000,00
		Dinas Kesehatan	5.438.999.640,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.218.774.235,00
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	165.439.055,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	127.174.750,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.018.917.100,00
		Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.913.862.780,00
2		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	759.209.000,00
		Dinas Kesehatan	78.063.790,00
		Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	837.272.790,00
3		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	
		Dinas Pariwisata	111.865.263,00
		Jumlah Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	111.865.263,00
		Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.863.000.833,00



5.1.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.37 sebagai berikut :

Tabel 5.37
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Realisasi 2021 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Jalan	56.285.718.706,00	51.020.848.056,53	90,65	41.997.521.941,13
2	Belanja Modal Jembatan	3.652.198.690,00	3.401.912.368,51	93,15	2.117.334.660,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.054.401.015,00	3.894.682.725,00	96,06	18.157.511.389,38
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	199.950.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	524.899.997,00	524.284.883,00	99,88	558.333.852,90
6	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	191.947.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	14.990.000,00	14.990.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	299.082.798,00	199.911.105,45	66,84	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.338.146.628,00	5.661.447.252,19	89,32	586.568.700,00
10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.286.791.780,00	1.258.377.280,74	97,79	2.003.376.327,00
11	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	194.947.500,00
12	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.140.000.000,00	2.125.895.761,83	99,34	1.760.000.000,00
13	Belanja Modal Instalasi Lain	62.606.200,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Jaringan Air Minum	649.759.000,00	499.649.609,25	76,90	8.902.988.032,87
15	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.725.338.898,00	1.598.188.000,00	92,63	25.800.000,00
	Jumlah	77.033.933.712,00	70.200.187.042,50	91,13	76.696.279.403,28

Berdasarkan tabel 5.37 di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp70.200.187.042,50 atau 91,13% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp77.033.933.712,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.496.092.360,78 atau 8,47% dibanding realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp76.696.279.403,28. Rincian realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel 5.38 berikut ini:

Tabel 5.38
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	Belanja Modal Jalan		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.020.848.056,53
	Jumlah Belanja Modal Jalan		51.020.848.056,53



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	Belanja Modal Jembatan		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.880.003.690,00
		Dinas Pariwisata	1.521.908.678,51
Jumlah Belanja Modal Jembatan			3.401.912.368,51
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi		
		Dinas Kesehatan	149.923.208,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.589.252.700,00
		Dinas Pertanian	9.374.017,00
		Kecamatan Boawae	146.132.800,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air Irigasi			3.894.682.725,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
		Dinas Kesehatan	199.999.997,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	276.084.886,00
		Dinas Pariwisata	48.200.000,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			524.284.883,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.990.000,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku			14.990.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor		
		RSUD Aeramo	199.911.105,45
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air Kotor			199.911.105,45
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.661.447.252,19
Jumlah Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku			5.661.447.252,19
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.258.377.280,74
Jumlah Belanja Modal Instalasi Air Kotor			1.258.377.280,74
9	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik		
		RSUD Aeramo	2.125.895.761,83
Jumlah Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik			2.125.895.761,83
10	Belanja Modal Jaringan Air Minum		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	499.649.609,25
Jumlah Belanja Modal Jaringan Air Minum			499.649.609,25
11	Belanja Modal Jaringan Listrik		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.594.688.000,00
		Dinas Peternakan	3.500.000,00
Jumlah Belanja Modal Jaringan Listrik			1.598.188.000,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			70.200.187.042,50



5.1.2.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.39 sebagai berikut:

Tabel 5.39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2021		Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	61.564.000,00
5	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	279.893.750,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	7.161.407.000,00	6.777.555.584,00	94,64	9.556.921,55
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.702.000.000,00	1.625.996.000,00	95,53	284.317.000,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	559.038.500,00	533.158.500,00	95,37	1.155.913.045,00
	Jumlah	9.422.445.500,00	8.936.710.084,00	94,84	1.837.244.716,55

Berdasarkan tabel 5.39 di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.936.710.084,00 atau 94,84% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp9.422.445.500,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp7.099.465.367,45 atau 386,42% dibanding realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.837.244.716,55. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.40 berikut ini:

Tabel 5.40
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Rekening Belanja	Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		
		Dinas Perhubungan	6.777.555.584,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		6.777.555.584,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.300.000,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.524.696.000,00
		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		1.625.996.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	533.158.500,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		533.158.500,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		8.936.710.084,00



5.1.2.3.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.41 sebagai berikut:

Tabel 5.41
Belanja Modal Aset Lainnya Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00

Berdasarkan tabel 5.41 di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp17.800.00,00 dibanding realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.800.000,00.

5.1.2.4 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.42 sebagai berikut :

Tabel 5.42
Belanja Tak Terduga Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Tak Terduga	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	55,25	3.700.259.187,00
Jumlah	8.054.124.643,00	4.450.062.433,00	55,25	3.700.259.187,00

Berdasarkan tabel 5.42 di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.450.062.433,00 atau 55,25% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp8.054.124.643,00. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp749.803.246,00 atau 20,26% dibanding realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.700.259.187,00.

Rincian belanja Tak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.43
Rincian Belanja Tak Terduga Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dampak penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2022	
1	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga untuk penanganan dampak penularan Covid-19 di Kabupaten Nagekeo pada Dinas Kesehatan Tahap I TA.2022.	265.190.000,00
2	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga untuk kegiatan Operasi Gabungan bersama TNI dan POLRI untuk penanganan dampak penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Nagekeo kepada Satpol PP dan Kebakaran TA.2022.	53.757.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
3	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga untuk penanganan dampak penularan Covid-19 di Kabupaten Nagekeo pada Dinas Kesehatan Tahap II TA.2022	204.855.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dampak penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2022		523.802.000,00
B	Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Lainnya	
1	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga untuk pengembalian sisa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA.2020/2021.	200,00
2	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana di wilayah Kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	70.362.380,00
3	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana di wilayah Kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	611.750.293,00
4	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana dari kegiatan Pekerjaan perbaikan saluran Irigasi balejawa dan pekerjaan TPT dan Saluran di Wilayah Kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	134.514.000,00
5	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana di wilayah Kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	352.245.000,00
6	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana di wilayah Kecamatan Aesesa, Kecamatan Nangaroro dan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	590.545.700,00
7	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga dari Bantuan Sosial yang tidak direncanakan bentuk bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu serta pemeliharaan sarana prasarana tanggap darurat bencana alam dan bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo TA.2022.	16.606.100,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana di wilayah Kecamatan Aesesa, dan Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	271.739.000,00
9	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro di Kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	163.381.350,00
10	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana akibat badai Rossby (pembersihan Material longsor) di desa Ladolima Utara dan Desa Ngera pada Kecamatan Keo Tengah TA.2022 Kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	77.210.000,00
11	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana di wilayah Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Aesesa, dan Kecamatan Wolowae kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	822.680.000,00
12	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga dari Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu serta dan bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo TA.2022.	29.650.000,00
13	Pembayaran Belanja Bantuan Tak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya tanggap darurat Bencana Alam dari kegiatan perbaikan jembatan Alorawe di kecamatan Boawae kabupaten Nagekeo kepada Tim penanggulangan Bencana Daerah TA.2022.	452.636.400,00
14	Pembayaran Penyetoran pengembalian sisa dana BOS tahun 2011 dari PEMDA Kabupaten Nagekeo ke Rekening Kas Negara TA.2022	332.940.010,00
Jumlah Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Lainnya		3.926.260.433,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		4.450.062.433,00

Pengelolaan Belanja Tak Terduga oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Nagekeo. Realisasi SP2D Belanja Tidak



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Terduga Sebesar Rp4.637.104.703, sedangkan Realisasi Belanja sebesar Rp4.450.062.433,00. Sisanya disetor kembali ke Kas Daerah karena tidak dapat digunakan sebesar Rp 187.042.270 sesuai STS : No. 3.394/CP/BKD-PPKD/09/2022 tanggal 2 September 2022 sebesar Rp1.742.620, No. 4.0801/CP/DINSOS KAB.NGK/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp37.393.900, STS No.6889/CP/BKD-PPKD/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp147.800.150, dan STS No. 6688/CP/BKD-PPKD/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp105.600,00.

5.1.3 Belanja Transfer

Transfer Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.44 sebagai berikut:

Tabel 5.44
Belanja Transfer Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Realisasi 2021 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil	1.052.020.780,00	1.052.020.780,00	100,00	1.063.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	125.622.910.700,00	125.622.910.700,00	100,00	138.669.366.600,00
	Jumlah	126.674.931.480,00	126.674.931.480,00	100,00	139.732.366.600,00

Berdasarkan tabel 5.44 di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp126.674.931.480,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp126.674.931.480,00. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp13.057.435.120,00 atau 9,34% dibanding realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp139.732.366.600,00.

Rincian atas realisasi transfer sebagai berikut:

5.1.3.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.45 sebagai berikut:

Tabel 5.45
Belanja Bagi Hasil Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Realisasi 2021 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	656.442.065,00	656.442.065,00	100,00	522.000.000,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	395.578.715,00	395.578.715,00	100,00	541.000.000,00
	Jumlah	1.052.020.780,00	1.052.020.780,00	100,00	1.063.000.000,00

Berdasarkan tabel 5.45 di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.052.020.780,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.052.020.780,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.979.220,00 atau 1,03% dibanding realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.063.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp656.442.065,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp656.442.065,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp134.442.065,00 atau 25,76% dibanding realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp522.000.000,00.

Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.46 berikut ini:

Tabel 5.46
Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
A.1	Kecamatan Boawae	
1	Desa Rowa	15.222.000,00
2	Desa Solo	8.426.000,00
3	Desa Leguderu	6.980.000,00
4	Desa Nagerawe	5.640.000,00
5	Desa Kelewae	11.093.000,00
6	Desa Kelimado	10.155.000,00
7	Desa Mulakoli	7.635.000,00
8	Desa Weaau	7.876.000,00
9	Desa Raja	9.725.000,00
10	Desa Wolowea	9.495.000,00
11	Desa Gerodhere	7.874.000,00
12	Desa Dhereisa	6.808.000,00
13	Desa Rigi	9.673.000,00
14	Desa Alorawe	3.595.000,00
15	Desa Focolodorawe	3.770.000,00
16	Desa Wolowea Timur	5.892.000,00
17	Desa Wolowea barat	7.157.000,00
18	Desa Raja Timur	6.654.000,00
19	Desa Raja Selatan	6.132.000,00
A.2	Kecamatan Aesesa	
1	Desa labolewa	13.835.000,00
2	Desa Tedamude	5.866.000,00
3	Desa Nggolonio	6.124.000,00
4	Desa Olaia	9.252.000,00
5	Desa Aeramo	23.923.000,00
6	Desa Marapokot	18.945.000,00
7	Desa Tonggurambang	13.076.000,00
8	Desa Waekokak	9.591.000,00
9	Desa Ngegedhawe	14.575.000,00
10	Desa Tedakisa	6.902.000,00
11	Desa Nggolombay	6.619.000,00
12	Desa Nangadhero	4.809.000,00
A.3	Kecamatan Aesesa Selatan	
1	Desa Rendubutowe	5.153.000,00
2	Desa Tengtiba	8.006.000,00
3	Desa langedhawe	3.124.000,00
4	Desa Renduteno	3.299.000,00
5	Desa Renduwawo	4.689.000,00
6	Desa Wajomara	3.228.065,00
7	Desa Rendututubhada	3.299.000,00
A.4	Kecamatan Wolowae	
1	Desa Tendatoto	7.056.000,00
2	Desa Totomala	10.626.000,00
3	Desa Tendakinde	7.295.000,00
4	Desa Anakoli	6.387.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
5	Desa Natatoto	10.437.000,00
A.5	Kecamatan Nangaroro	
1	Desa Podenura	5.548.000,00
2	Desa Tonggo	4.533.000,00
3	Desa wokodekororo	5.052.000,00
4	Desa Riti	6.519.000,00
5	Desa Kotakeo	5.314.000,00
6	Desa Pagomogo	4.892.000,00
7	Desa Degalea	4.129.000,00
8	Desa Ulupulu	5.892.000,00
9	Desa Bidoa	9.312.000,00
10	Desa Utetoto	4.484.000,00
11	Desa Nataute	5.665.000,00
12	Desa Woedoa	6.504.000,00
13	Desa Woewutu	7.365.000,00
14	Desa Ulupulu I	5.536.000,00
15	Desa wokowoe	5.679.000,00
16	Desa Kotakeo I	5.696.000,00
17	Desa Kotakeo II	6.628.000,00
18	Desa Odaute	4.675.000,00
A.6	Kecamatan Mauponggo	
1	Desa Bela	7.820.000,00
2	Desa Wolokisa	7.442.000,00
3	Desa Wuliwalo	6.068.000,00
4	Desa Maukeli	5.416.000,00
5	Desa Aewoe	4.924.000,00
6	Desa Wolotelu	5.544.000,00
7	Desa Sawu	6.619.000,00
8	Desa Jawapogo	6.450.000,00
9	Desa Ululoga	5.369.000,00
10	Desa Lodaolo	5.973.000,00
11	Desa Woloede	4.660.000,00
12	Desa Woewolo	6.782.000,00
13	Desa Selalejo	6.608.000,00
14	Desa Ua	7.766.000,00
15	Desa kotagana	6.210.000,00
16	Desa Lokalaba	4.715.000,00
17	Desa Lajawajo	5.945.000,00
18	Desa Keliwatulewa	4.290.000,00
19	Desa Wololelu	4.723.000,00
20	Desa Selalejo Timur	6.227.000,00
A.7	Kecamatan Keo Tengah	
1	Desa Witurumbaua	5.055.000,00
2	Desa Lewangera	4.970.000,00
3	Desa Wajo	5.122.000,00
4	Desa Kotowuji Timur	4.658.000,00
5	Desa Kotowuji Barat	5.000.000,00
6	Desa Mbaenuamuri	6.388.000,00
7	Desa Udiworowatu	5.051.000,00
8	Desa Kotodirumali	5.936.000,00
9	Desa Pautola	5.658.000,00
10	Desa Ladolima	5.757.000,00
11	Desa Keli	3.881.000,00
12	Desa Ngera	3.471.000,00
13	Desa Ladolima Timur	4.125.000,00
14	Desa Ladolima Utara	5.068.000,00
15	Desa Wajo Timur	3.969.000,00
16	Desa Paumali	3.441.000,00
Total Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa		656.442.065,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Realisasi Transfer Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp395.578.715,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp395.578.715,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp145.421.285,00 atau 26,88% dibanding realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp541.000.000,00.

Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.47 berikut ini:

Tabel 5.47
Rincian realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
A.1	Kecamatan Boawae	
1	Desa Rowa	8.813.000,00
2	Desa Solo	5.007.000,00
3	Desa Leguderu	4.197.000,00
4	Desa Nagerawe	3.447.000,00
5	Desa Kelewae	6.500.000,00
6	Desa Kelimado	5.975.000,00
7	Desa Mulakoli	4.564.000,00
8	Desa WeaAu	4.699.000,00
9	Desa Raja	5.734.000,00
10	Desa Wolowea	5.606.000,00
11	Desa Gerodhere	4.698.000,00
12	Desa Dhereisa	4.101.000,00
13	Desa Rigi	5.705.000,00
14	Desa Alorawe	2.301.000,00
15	Desa Focolodorawe	2.399.000,00
16	Desa Wolowea Timur	3.588.000,00
17	Desa Wolowea Barat	4.296.000,00
18	Desa Raja Timur	4.015.000,00
19	Desa Raja Selatan	3.722.000,00
A.2	Kecamatan Aesesa	
1	Desa labolewa	8.036.000,00
2	Desa Tedamude	3.573.000,00
3	Desa Nggolonio	3.718.000,00
4	Desa Olaia	5.470.000,00
5	Desa Aeramo	13.685.000,00
6	Desa Marapokot	10.897.000,00
7	Desa Tonggurambang	7.611.000,00
8	Desa Waekokak	5.659.000,00
9	Desa Ngegedhawe	8.450.000,00
10	Desa Tedakisa	4.153.000,00
11	Desa Nggolombay	3.995.000,00
12	Desa Nangadhero	2.982.000,00
A.3	Kecamatan Aesesa Selatan	
1	Desa Rendubutowe	3.174.000,00
2	Desa Tengtiba	4.772.000,00
3	Desa langedhawe	2.042.000,00
4	Desa Renduteno	2.136.000,00
5	Desa Renduwawo	2.914.000,00
6	Desa Wajomara	2.092.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
7	Desa Rendututubhada	2.137.715,00
A.4	Kecamatan Wolowae	
1	Desa Tendatoto	4.240.000,00
2	Desa Totomala	6.239.000,00
3	Desa Tendakinde	4.374.000,00
4	Desa Anakoli	3.865.000,00
5	Desa Natatoto	6.133.000,00
A.5	Kecamatan Nangaroro	
1	Desa Podenura	3.395.000,00
2	Desa Tonggo	2.827.000,00
3	Desa Wokodekororo	3.117.000,00
4	Desa Riti	3.939.000,00
5	Desa Kotakeo	3.264.000,00
6	Desa Pagomogo	3.028.000,00
7	Desa Degalea	2.601.000,00
8	Desa Ulupulu	3.588.000,00
9	Desa Bidoa	5.503.000,00
10	Desa Utetoto	2.800.000,00
11	Desa Nataute	3.461.000,00
12	Desa Woedoa	3.930.000,00
13	Desa Woewutu	4.413.000,00
14	Desa Ulupulu I	3.389.000,00
15	Desa Wokowoe	3.469.000,00
16	Desa Kotakeo I	3.478.000,00
17	Desa Kotakeo II	4.000.000,00
18	Desa Odaute	2.906.000,00
A.6	Kecamatan Mauponggo	
1	Desa Bela	4.667.000,00
2	Desa Wolokisa	4.456.000,00
3	Desa Wuliwalo	3.686.000,00
4	Desa Maukeli	3.321.000,00
5	Desa Aewoe	3.046.000,00
6	Desa Wolotelu	3.393.000,00
7	Desa Sawu	3.995.000,00
8	Desa Jawapogo	3.900.000,00
9	Desa Ululoga	3.295.000,00
10	Desa Lodaolo	3.633.000,00
11	Desa Woloede	2.898.000,00
12	Desa Woewolo	4.086.000,00
13	Desa Selalejo	3.989.000,00
14	Desa Ua	4.637.000,00
15	Desa kotagana	3.766.000,00
16	Desa Lokalaba	2.929.000,00
17	Desa Lajawajo	3.618.000,00
18	Desa Keliwatulewa	2.691.000,00
19	Desa Wololelu	2.933.000,00
20	Desa Selalejo Timur	3.776.000,00
A.7	Kecamatan Keo Tengah	
1	Desa Witurumbaua	3.119.000,00
2	Desa Lewanger	3.072.000,00
3	Desa Wajo	3.157.000,00
4	Desa Kotowuji Timur	2.897.000,00
5	Desa Kotowuji Barat	3.089.000,00
6	Desa Mbaenuamuri	3.865.000,00
7	Desa Udiworowatu	3.117.000,00
8	Desa Kotodirumali	3.612.000,00
9	Desa Pautola	3.457.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
10	Desa Ladolima	3.512.000,00
11	Desa Keli	2.462.000,00
12	Desa Ngera	2.232.000,00
13	Desa Ladolima Timur	2.598.000,00
14	Desa Ladolima Utara	3.126.000,00
15	Desa Wajo Timur	2.511.000,00
16	Desa Paumali	2.215.000,00
Total Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		395.578.715,00

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.48 sebagai berikut :

Tabel 5.48
Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Anggaran 2021 (Rp)
		(Rp)	%	
Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	80.345.106.000,00	80.345.106.000,00	100,00	136.487.366.600,00
Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	45.277.804.700,00	45.277.804.700,00	100,00	2.182.000.000,00
Jumlah	125.622.910.700,00	125.622.910.700,00	100,00	138.669.366.600,00

Berdasarkan tabel 5.48 di atas menunjukkan bahwa realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp125.622.910.700,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp125.622.910.700,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp13.046.455.900,00 atau 9,41% dibanding realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp138.669.366.600,00.

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.345.106.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp80.345.106.000,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp56.142.260.600,00 atau 41,31% dibanding realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp136.487.366.600,00.

Rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.49 berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.49
Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Ke Desa Kabupaten
Nagekeo Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
A	Dana Desa (DD)	
A.1	Kecamatan Boawae	
1.	Desa Rowa	1.104.619.000,00
2.	Desa Solo	957.328.000,00
3.	Desa Leguderu	711.804.000,00
4.	Desa Nagerawe	957.316.000,00
5.	Desa Kelewae	739.357.000,00
6.	Desa Kelimado	921.980.000,00
7.	Desa Mulakoli	808.667.000,00
8.	Desa WeaAu	1.071.464.000,00
9.	Desa Raja	788.606.000,00
10.	Desa Wolowea	725.612.000,00
11.	Desa Gerodhere	1.136.409.000,00
12.	Desa Dhereisa	781.626.000,00
13.	Desa Rigi	713.935.000,00
14.	Desa Alorawe	1.009.391.000,00
15.	Desa Focolodorawe	1.030.890.000,00
16.	Desa Wolowea Timur	755.763.000,00
17.	Desa Wolowea barat	1.016.973.000,00
18.	Desa Raja Timur	957.121.000,00
19.	Desa Raja Selatan	734.181.000,00
A.2	Kecamatan Aesesa	
1.	Desa labolewa	1.042.978.000,00
2.	Desa Tedamude	876.404.000,00
3.	Desa Nggolonio	1.135.718.000,00
4.	Desa Olaia	1.015.841.000,00
5.	Desa Aeramo	945.282.000,00
6.	Desa Marapokot	742.454.000,00
7.	Desa Tonggurambang	797.726.000,00
8.	Desa Waekokak	750.030.000,00
9.	Desa Ngegedhawe	944.260.000,00
10.	Desa Tedakisa	982.604.000,00
11.	Desa Nggolombay	694.774.000,00
12.	Desa Nangadhero	716.906.000,00
A.3	Kecamatan Aesesa Selatan	
1.	Desa Rendubutowe	1.050.446.000,00
2.	Desa Tengtiba	1.010.546.000,00
3.	Desa langedhawe	1.001.287.000,00
4.	Desa Renduteno	1.075.133.000,00
5.	Desa Renduwawo	1.091.398.000,00
6.	Desa Wajomara	1.051.074.000,00
7.	Desa Rendututubhada	733.749.000,00
A.4	Kecamatan Wolowae	
1.	Desa Tendatoto	1.038.169.000,00
2.	Desa Totomala	782.812.000,00
3.	Desa Tendakinde	747.082.000,00
4.	Desa Anakoli	715.125.000,00
5.	Desa Natatoto	1.014.237.000,00
A.5	Kecamatan Nangaroro	
1.	Desa Podenura	679.642.000,00
2.	Desa Tonggo	902.226.000,00
3.	Desa wokodekororo	820.539.000,00
4.	Desa Riti	863.403.000,00
5.	Desa Kotakeo	703.397.000,00
6.	Desa Pagomogo	1.136.126.000,00
7.	Desa Degalea	741.973.000,00
8.	Desa Ulupulu	858.513.000,00
9.	Desa Bidoa	729.942.000,00
10.	Desa Utetoto	762.149.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
11.	Desa Nataute	687.784.000,00
12.	Desa Woedoa	933.545.000,00
13.	Desa Woewutu	738.135.000,00
14.	Desa ulupulu I	827.260.000,00
15.	Desa wokowoe	722.207.000,00
16.	Desa Kotakeo I	732.635.000,00
17.	Desa Kotakeo II	730.668.000,00
18.	Desa Odaute	675.750.000,00
A.6	Kecamatan Mauponggo	
1.	Desa Bela	771.209.000,00
2.	Desa Wolokisa	747.054.000,00
3.	Desa Wuliwalo	726.582.000,00
4.	Desa Maukeli	662.632.000,00
5.	Desa Aewoe	713.438.000,00
6.	Desa Wolotelu	721.224.000,00
7.	Desa Sawu	738.414.000,00
8.	Desa Jawapogo	785.584.000,00
9.	Desa Ululoga	735.550.000,00
10.	Desa Lodaolo	749.408.000,00
11.	Desa Woloede	723.922.000,00
12.	Desa Woewolo	683.988.000,00
13.	Desa Selalejo	781.920.000,00
14.	Desa Ua	1.013.075.000,00
15.	Desa kotagana	733.360.000,00
16.	Desa Lokalaba	789.076.000,00
17.	Desa Lajawajo	690.964.000,00
18.	Desa Keliwatulewa	714.722.000,00
19.	Desa Wololelu	715.189.000,00
20.	Desa Selalejo Timur	738.527.000,00
A.7	Kecamatan Keo Tengah	
1.	Desa Witurumbaua	695.417.000,00
2.	Desa Lewanger	913.810.000,00
3.	Desa Wajo	820.019.000,00
4.	Desa Kotowuji Timur	916.103.000,00
5.	Desa Kotowuji barat	751.912.000,00
6.	Desa Mbaenuamuri	651.183.000,00
7.	Desa Udiworowatu	662.642.000,00
8.	Desa Kotodirumali	676.394.000,00
9.	Desa pautola	754.721.000,00
10.	Desa Ladolima	710.359.000,00
11.	Desa Keli	940.856.000,00
12.	Desa Ngera	942.398.000,00
13.	Desa Ladolima Timur	682.532.000,00
14.	Desa Ladolima utara	711.215.000,00
15.	Desa Wajo Timur	730.472.000,00
16.	Desa Paumali	724.264.000,00
	Total Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	80.345.106.000,00

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Transfer Dana Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.277.804.700,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp45.277.804.700,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp43.095.804.700,00 atau 1.975,06% dibanding realisasi Transfer Dana Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Rp2.182.000.000,00 .Rincian realisasi Transfer Dana Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.50 berikut ini:

Tabel 5.50
Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
A	Alokasi Dana Desa (ADD)	
A.1	Kecamatan Boawae	
1.	Desa Rowa	506.351.000,00
2.	Desa Solo	445.896.000,00
3.	Desa Leguderu	458.592.000,00
4.	Desa Nagerawe	449.792.000,00
5.	Desa Kelewae	471.212.000,00
6.	Desa Kelimado	499.900.000,00
7.	Desa Mulakoli	486.254.000,00
8.	Desa WeaAu	479.457.000,00
9.	Desa Raja	507.438.000,00
10.	Desa Wolowea	476.945.000,00
11.	Desa Gerodhere	485.623.000,00
12.	Desa Dhereisa	450.473.000,00
13.	Desa Rigi	444.865.000,00
14.	Desa Alorawe	435.868.000,00
15.	Desa Focolodorawe	438.790.000,00
16.	Desa Wolowea Timur	373.315.000,00
17.	Desa Wolowea barat	392.021.000,00
18.	Desa Raja Timur	398.692.000,00
19.	Desa Raja Selatan	404.181.000,00
A.2	Kecamatan Aesesa	
1.	Desa labolewa	514.516.000,00
2.	Desa Tedamude	412.885.000,00
3.	Desa Nggolonio	495.751.000,00
4.	Desa Olaia	450.623.000,00
5.	Desa Aeramo	654.127.700,00
6.	Desa Marapokot	502.215.000,00
7.	Desa Tonggurambang	497.199.000,00
8.	Desa Waekokak	494.993.000,00
9.	Desa Ngegedhawe	476.993.000,00
10.	Desa Tedakisa	477.122.000,00
11.	Desa Nggolombay	409.497.000,00
12.	Desa Nangadhero	451.164.000,00
A.3	Kecamatan Aesesa Selatan	
1.	Desa Rendubutowe	492.621.000,00
2.	Desa Tengtiba	576.696.000,00
3.	Desa langedhawe	427.627.000,00
4.	Desa Renduteno	473.061.000,00
5.	Desa Renduwawo	432.012.000,00
6.	Desa Wajomara	441.432.000,00
7.	Desa Rendututubhada	428.058.000,00
A.4	Kecamatan Wolowae	
1.	Desa Tendatoto	465.906.000,00
2.	Desa Totomala	430.267.000,00
3.	Desa Tendakinde	456.096.000,00
4.	Desa Anakoli	367.712.000,00
5.	Desa Natatoto	463.139.000,00
A.5	Kecamatan Nangaroro	
1.	Desa Podenura	438.777.000,00
2.	Desa Tonggo	431.315.000,00
3.	Desa wokodekororo	463.945.000,00
4.	Desa Riti	498.378.000,00
5.	Desa Kotakeo	407.189.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
6.	Desa Pagomogo	507.017.000,00
7.	Desa Degalea	427.953.000,00
8.	Desa Ulupulu	474.723.000,00
9.	Desa Bidoa	417.684.000,00
10.	Desa Utetoto	418.544.000,00
11.	Desa Nataute	391.160.000,00
12.	Desa Woedoa	428.073.000,00
13.	Desa Woewutu	446.646.000,00
14.	Desa ulupulu I	497.577.000,00
15.	Desa wokowoe	464.633.000,00
16.	Desa Kotakeo I	464.464.000,00
17.	Desa Kotakeo II	402.344.000,00
18.	Desa Odaute	428.068.000,00
A.6	Kecamatan Mauponggo	
1.	Desa Bela	446.150.000,00
2.	Desa Wolokisa	458.653.000,00
3.	Desa Wuliwalo	434.308.000,00
4.	Desa Maukeli	406.779.000,00
5.	Desa Aewoe	457.199.000,00
6.	Desa Wolotelu	437.802.000,00
7.	Desa Sawu	450.265.000,00
8.	Desa Jawapogo	463.736.000,00
9.	Desa Ululoga	402.934.000,00
10.	Desa Lodaolo	440.191.000,00
11.	Desa Woloede	426.673.000,00
12.	Desa Woewolo	450.525.000,00
13.	Desa Selalejo	464.489.000,00
14.	Desa Ua	480.403.000,00
15.	Desa kotagana	445.901.000,00
16.	Desa Lokalaba	446.496.000,00
17.	Desa Lajawajo	420.343.000,00
18.	Desa Keliwatulewa	425.611.000,00
19.	Desa Wololelu	426.222.000,00
20.	Desa Selalejo Timur	432.594.000,00
A.7	Kecamatan Keo Tengah	
1.	Desa Witurumbaua	457.367.000,00
2.	Desa Lewangera	466.265.000,00
3.	Desa Wajo	430.625.000,00
4.	Desa Kotowuji Timur	471.586.000,00
5.	Desa Kotowuji barat	427.116.000,00
6.	Desa Mbaenuamuri	449.670.000,00
7.	Desa Udiworowatu	425.104.000,00
8.	Desa Kotodirumali	494.509.000,00
9.	Desa pautola	470.600.000,00
10.	Desa Ladolima	439.516.000,00
11.	Desa Keli	430.590.000,00
12.	Desa Ngera	430.011.000,00
13.	Desa Ladolima Timur	443.330.000,00
14.	Desa Ladolima utara	425.738.000,00
15.	Desa Wajo Timur	383.533.000,00
16.	Desa Paumali	409.103.000,00
	Sub Total Alokasi Dana Desa	43.777.804.700,00
B	PAMSIMAS	
1	KKM Nebe Desa Labolewa pada Kecamatan Aesesa	250.000.000,00
2	KKM Aunio Desa Lodaolo pada Kecamatan Mauponggo	250.000.000,00
3	KKM Raja Timur Desa Raja Timur pada Kecamatan Boawae	250.000.000,00
4	KKM Selalejo Timur Desa Selalejo Timur pada Kecamatan Mauponggo	250.000.000,00
5	KKM Tendakinde Desa Tendakinde pada Kecamatan Wolowae	250.000.000,00
6	KKM Odeute desa Odeute Kecamatan Nangaroro KKM Sama Fonga desa Weaau pada Kecamatan Boawae	250.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
	Total Transfer Dana Pamsimas	1.500.000.000,00
	Total Transfer Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa	45.277.804.700,00

Dana Transfer Bantuan Keuangan khusus dianggarkan di Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang terdiri dari Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Pamsimas yang kegiatannya untuk penanganan air bersih bagi Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) yang terdapat di 6 desa tersebut diatas.

5.1.3.2.3 Transfer Dana Otonomi Khusus

Tidak terdapat Realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022.

5.1.3.2.4 Surplus/Defisit Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp(18.290.236.512,20) atau 54,09 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp(33.811.694.059,00).

5.1.4 Pembiayaan Netto

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi Pembiayaan (Netto) adalah sebesar Rp32.615.244.080,99 atau 96,46% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp33.811.694.059,00. Pembiayaan terdiri dari (i) Penerimaan pembiayaan sebesar Rp37.615.244.080,99 dan (ii) Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan SiLPA yang terealisasi sebesar Rp37.552.995.945,99 dari yang dianggarkan sebesar Rp37.811.694.059,00. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya yang terealisasi Rp62.249.135,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Secara keseluruhan, Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp37.615.244.080,99 atau 96,92% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Rp38.811.694.059,00.

Tabel 5.51
Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Realisasi 2021 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.811.694.059,00	37.552.995.945,99	99,32	140.711.624.112,49
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	62.249.135,00	6,22	97.564.873,00
	Jumlah	38.811.694.059,00	37.615.244.080,99	96,92	140.809.188.985,49



5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00.

Tabel 5.52
Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Realisasi 2021 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
2.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00

5.1.4.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan surplus/defisit anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp14.344.348.568,79.

Tabel 5.53
Komposisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Jumlah	
		2022	2021
1	Kas di Kas Daerah	7.945.846.988,26	38.478.982.482,94
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.096.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	12.197.770.967,13	1.446.207.509,65
5	Kas Dana Kapitasi di FKTP	9.674.517,20	346.103.952,20
6	Kas Dana BOS	56.230.905,21	128.743.214,90
7	Setara Kas	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	83.981.178,00	66.467.216,00
9	Utang PFK	(5.949.155.987,01)	(2.658.906.317,01)
	Jumlah	14.344.348.568,79	37.811.694.058,68

5.1.4.4 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan surplus/defisit anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp14.344.348.568,79.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. LPSAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah penjumlahan saldo sebesar yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun – tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Rp37.811.694.058,68 menurun sebesar Rp102.899.930.053,81 dari Tahun 2021 sebesar Rp140.711.624.112,49 dengan rincian Saldo Anggaran Lebih Awal sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Kas Daerah	38.478.982.482,94
2	Kas di Bendahara Penerimaan	4.096.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4	Kas di BLUD	1.446.207.509,65
5	Kas Dana Kapitasi di FKTP	346.103.952,20
6	Kas Dana BOS	128.743.214,90
7	Setara Kas	0,00
8	Kas Lainnya	66.467.216,00
9	Utang PFK	(2.658.906.317,01)
Jumlah		37.811.694.058,68

Tabel 5.55
Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	37.811.694.058,68	140.711.624.112,49

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp37.811.694.058,68 .

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada tahun 2022, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp37.552.994.945,99 menurun sebesar Rp103.158.629.166,50 dari tahun 2021 sebesar Rp140.711.624.112,49.

Tabel 5.56
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	37.552.994.945,99	140.711.624.112,49

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2022 sebesar Rp14.344.348.568,79 atau mengalami penurunan sebesar Rp23.467.345.489,89 dari tahun 2021 sebesar Rp37.811.694.058,68 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebesar Rp702.853.486.223,09 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- b. Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebesar Rp721.124.381.735,29 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan;
- c. Surplus/(Defisit) sebesar Rp(18.270.895.512,20) merupakan hasil pengurangan antara Pendapatan dengan Belanja;
- d. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebesar Rp37.615.244.080,99 yang terdiri dari penggunaan SILPA sebesar Rp37.552.994.945,99 dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp62.249.135,00.
- e. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal kepada PT. BPD NTT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- f. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebesar Rp32.615.244.080,99 merupakan hasil pengurangan antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 5.57
Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi	
		2022	2021
1	Pendapatan Daerah	702.853.486.223,09	700.702.413.295,03
2	Belanja dan Transfer Daerah	721.124.381.735,29	798.699.908.221,84
3	Surplus/ Defisit	(18.270.895.512,20)	(97.997.494.926,81)
No	Uraian	Realisasi	
		2022	2021
4	Penerimaan Pembiayaan Daerah	37.615.244.080,99	140.809.188.985,49
5	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	32.615.244.080,99	135.809.188.985,49
SiLPA		14.344.348.568,79	37.811.694.058,68

Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.344.348.568,79 merupakan angka yang didapat dari selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp702.853.486.223,09 dan belanja dan transfer sebesar Rp721.124.381.735,29 serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp37.615.244.080,99 dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam APBD 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah Koreksi Kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Di tahun 2022 terdapat koreksi kesalahan pembukuan periode sebelumnya berupa penambahan SiLPa Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2021 sebagai akibat tidak dicatatnya saldo bank di tahun 2021 sebesar Rp951,31; pengurangan saldo awal Kas BOS (Kas di Bank) SDI Tuanio atas belanja modal yang dilakukan di tahun 2021 dan belum dicatat di 2021 sebesar Rp(47.976.000,00); pengurangan kas bendahara penerimaan tahun 2021 karena kurang catat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari pendapatan tunai non BPJS pada Empat Puskesmas: Maunori, Nangaroro, Mauponggo, Jawakisa (pendapatan tahun 2021 dan disetor di tahun 2022) sebesar Rp(4.096.000,00) dan pengurangan SiLPA Dana



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kapitasi JKN pada RSUD Aeramo sebesar Rp(206.627.800,00); dan koreksi atas Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada SDN Pomakeke yang semula diakui sebagai saldo awal senilai Rp264,00.

Tabel 5.58
Koreksi Kesalahan Pembukuan TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(258.699.112,69)	0,00

5.2.5. Lain-lain

Tidak terdapat saldo lain-lain di tahun 2022.

Tabel 5.59
Rincian Lain-Lain TA. 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Lain-lain	0,00	0,00

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 sebesar Rp14.344.348.568,79, bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 sebesar Rp37.811.694.058,68 maka mengalami penurunan sebesar Rp(23.467.345.489,89) atau (62,06)%. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 sebesar Rp14.344.348.568,79 terdiri dari :

- Defisit Pendapatan sebesar Rp35.062.381.742,91
- Sisa Belanja sebesar Rp50.603.180.025,71
- Sisa Pembiayaan Netto sebesar Rp1.196.449.714,01

Rincian Silpa tahun 2022 terdiri dari:

- Defisit Pendapatan sebesar Rp35.062.381.742,91 terdiri dari:
 - Defisit Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp17.950.792.910,91
 - Defisit Pendapatan Transfer sebesar Rp16.572.016.780,00
 - Defisit Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp539.572.052,00
- Sisa belanja sebesar Rp50.603.180.025,71 terdiri dari:
 - Sisa belanja Dana Perimbangan/Dana Transfer tahun 2022 sebesar Rp2.136.903.084,46 terdiri dari:
 - DAK Reguler sebesar Rp169.728.950,15
 - DAK Penugasan sebesar Rp1.818.867.386,00
 - DAK Non Fisik sebesar Rp10.787.496.927,00
 - BOS sebesar Rp36.890.169,21
 - DID sebesar Rp947.101.775,00
 - Sisa belanja di luar Dana Perimbangan/Dana Transfer tahun 2022 sebesar Rp36.879.984.987,56
- Sisa Pembiayaan Netto sebesar Rp1.196.449.714,01 terdiri dari:
 - Sisa Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.196.449.978,01
 - Sisa Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00



5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Dalam penjelasan Akun-Akun Neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.052.107.356.713,82 mengalami penurunan sebesar Rp2.480.509.180,89 dari Tahun 2021 sebesar Rp2.054.587.865.894,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian Aset TA 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
Jumlah Aset Lancar	49.122.663.356,99	77.396.885.355,73	(28.274.221.998,74)	(36,53)
Jumlah Investasi Jangka Panjang	41.439.218.395,00	38.482.139.500,00	2.957.078.895,00	7,68
Jumlah Aset Tetap	1.908.566.936.101,77	1.877.210.537.751,30	31.356.398.350,47	1,67
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	52.978.538.860,06	61.498.303.287,68	(8.519.764.427,62)	(13,85)
Jumlah Aset	2.052.107.356.713,82	2.054.587.865.894,71	(2.480.509.180,89)	(0,12)

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp49.122.663.356,99 mengalami penurunan sebesar Rp28.274.221.998,74 dari Tahun 2021 sebesar Rp77.396.885.355,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Aset Lancar TA 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Kas di Kas Daerah	7.945.846.988,26	38.478.982.482,94	(30.533.135.494,68)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.096.000,00	(4.096.000,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	12.197.770.967,13	1.446.207.509,65	10.751.563.457,48
Kas Dana Kapitasi di FKTP	9.674.517,20	346.103.952,20	(336.429.435,00)
Kas Dana BOS	56.230.905,21	128.743.214,90	(72.512.309,69)
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	83.981.178,00	66.467.216,00	17.513.962,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	4.206.709.706,00	3.557.497.813,25	649.211.892,75
Penyisihan Piutang Pajak	<u>(1.817.935.300,86)</u>	<u>(1.495.940.226,52)</u>	<u>(321.995.074,34)</u>
Piutang Pajak Netto	2.388.774.405,14	2.061.557.586,73	327.216.818,41
Piutang Retribusi	1.936.561.987,00	1.862.041.627,00	74.520.360,00
Penyisihan Piutang Retribusi	<u>(1.597.414.587,00)</u>	<u>(1.420.129.227,00)</u>	<u>(177.285.360,00)</u>
Piutang Retribusi Netto	339.147.400,00	441.912.400,00	(102.765.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.568.309.530,30	1.955.283.483,00	613.026.047,30
Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	(1.811.591.880,23)	(1.326.986.194,40)	(484.605.685,83)
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Netto	756.717.650,07	628.297.288,60	128.420.361,47
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	476.668.795,00	5.252.936.088,00	(4.776.267.293,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah	4.012.876.936,00	2.456.129.535,00	1.556.747.401,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.590.254.675,94	576.683.170,94	1.013.571.505,00
Piutang Lainnya	962.779.777,33	983.554.777,33	(20.775.000,00)
Penyisihan Piutang Lainnya	(569.533.777,33)	(571.202.277,33)	1.668.500,00
Piutang Lain-lain Netto	393.246.000,00	412.352.500,00	(19.106.500,00)
Persediaan	18.871.472.939,04	25.096.416.410,77	(6.224.943.471,73)
Jumlah	49.122.663.356,99	77.396.885.355,73	(28.274.221.998,74)

5.3.1.1.1 Kas

Kas merupakan aset lancar pada laporan Neraca yang paling likuid. Aset lancar pada pos ini menunjukkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Kas di bendahara OPD, Kas BLUD RSUD, BLUD SPAM, Kas Dana Kapitasi di FKTP, Kas Dana BOS serta kas lainnya baik berupa uang tunai dan rekening giro bank yang seluruhnya merupakan Kas Daerah. Saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.293.504.555,80 mengalami penurunan sebesar Rp20.177.095.819,89 dari Tahun 2021 sebesar Rp40.470.600.375,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Kas TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
1	Kas di Kas Daerah	7.945.846.988,26	38.478.982.482,94	(30.533.135.494,68)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.096.000,00	(4.096.000,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	12.197.770.967,13	1.446.207.509,65	10.751.563.457,48
5	Kas Dana Kapitasi di FKTP	9.674.517,20	346.103.952,20	(336.429.435,00)
6	Kas Dana BOS	56.230.905,21	128.743.214,90	(72.512.309,69)
7	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	83.981.178,00	66.467.216,00	17.513.962,00
	Jumlah Kas	20.293.504.555,80	40.470.600.375,69	(20.177.095.819,89)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.945.846.988,26 berada di rekening Bank NTT Cabang Mbay mengalami penurunan sebesar Rp30.533.135.494,68 dari Tahun 2021 sebesar Rp38.478.982.482,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Kas di Kas Daerah TA 2022 dan 2021

No Rekening	Bank	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
04001.04.000001-0	Bank NTT Cab. Mbay	7.945.845.753,27	38.478.978.309,45	(30.533.132.556,18)
04001.04.000015-0	Bank NTT Cab. Mbay	1.234,99	4.173,49	(2.938,50)
2185-01-000007-30-5	BRI KCP Mbay	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		7.945.846.988,26	38.478.982.482,94	(30.533.135.494,68)

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Saldo kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.096.000,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp4.096.000,00,

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Rekening BLUD Kabupaten Nagekeo merupakan rekening yang digunakan untuk penempatan, pencairan Dana BLUD. Terdapat 2 rekening BLUD di Kabupaten Nagekeo yaitu BLUD SPAM dan BLUD RSUD Aeram. Saldo Kas di BLUD Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.197.770.967,13 mengalami peningkatan sebesar Rp10.751.563.457,48 dari Tahun 2021 sebesar Rp1.446.207.509,65 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.64
Kas di BLUD TA 2022 dan 2021

No	Unit Kerja	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal		Saldo Setelah Koreksi	Pendapatan	Belanja			Total Belanja	Saldo Akhir
			Tambah	Kurang			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1	BLUD SPAM	68.214.086,00	0,00	0,00	68.214.086,00	1.982.576.382,00	1.752.690.588,00	176.982.955,00	0,00	1.929.673.543,00	121.116.925,00
2	RSUD Aeram	1.377.993.423,65	0,00	0,00	1.377.993.423,65	14.865.618.804,48	130.990.000,00	4.022.959.186,00	13.009.000,00	4.166.958.186,00	12.076.654.042,13
	Jumlah	1.446.207.509,65	0,00	0,00	1.446.207.509,65	16.848.195.186,48	1.883.680.588,00	4.199.942.141,00	13.009.000,00	6.096.631.729,00	12.197.770.967,13

5.3.1.1.1.5 Kas Dana Kapitasi di FKTP

Dana Kapitasi di FKTP Kabupaten Nagekeo dikelola oleh Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Kas Dana Kapitasi di FKTP terdapat di rekening pada Puskesmas Danga, Puskesmas Jawakisa, Puskesmas Kaburea, Puskesmas Boawae, Puskesmas Nangaroro, Puskesmas Mauponggo, Puskesmas Maunori dan Puskesmas Utetoto. Saldo Kas Dana Kapitasi di FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.674.517,20 mengalami penurunan sebesar Rp336.429.435,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp346.103.952,20. Rincian saldo Kas Dana Kapitasi di FKTP dapat dilihat pada tabel 5.65 berikut ini:

Tabel 5.65 Kas Dana Kapitasi di FKTP TA 2022

No	Unit Kerja	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal		Saldo Setelah Koreksi	Pendapatan	Belanja			Total Belanja	Saldo Akhir
			Tambah	Kurang			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1	Puskesmas Danga	18.605.037,00	0,00	0,00	18.605.037,00	1.497.740.913,00	0,00	1.516.123.610,00	0,00	1.516.123.610,00	222.340,00
2	Puskesmas Jawakisa	3.593.704,00	0,00	0,00	3.593.704,00	336.306.896,00	1.690.000,00	316.354.668,00	21.855.000,00	339.899.668,00	932,00
3	Puskesmas Kaburea	23.451.432,00	0,00	0,00	23.451.432,00	202.415.293,00	0,00	221.453.919,00	0,00	221.453.919,00	4.412.806,00
4	Puskesmas Boawae	55.030.315,00	0,00	0,00	55.030.315,00	1.636.822.910,00	0,00	1.691.805.791,00	0,00	1.691.805.791,00	47.434,00
5	Puskesmas Mauponggo	27.865.918,00	0,00	0,00	27.865.918,00	919.896.882,00	0,00	947.445.443,00	0,00	947.445.443,00	317.357,00
6	Puskesmas Nangaroro	376,00	0,00	0,00	376,00	830.304.974,00	0,00	829.928.192,00	0,00	829.928.192,00	377.158,00
7	Puskesmas Maunori	10.929.370,20	0,00	0,00	10.929.370,20	583.649.580,00	0,00	594.556.870,00	0,00	594.556.870,00	22.080,20
8	RSD Aeram	206.627.800,00	0,00	206.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Puskesmas Utetoto	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212.600,00	0,00	7.938.190,00	0,00	7.938.190,00	4.274.410,00
	Jumlah Kas Dana Kapitasi di FKTP	346.103.952,20	0,00	206.627.800,00	139.476.152,20	6.019.350.048,00	1.690.000,00	6.125.606.683,00	21.855.000,00	6.149.151.683,00	9.674.517,20



5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS merupakan Kas pada Satuan Pendidikan yang terdapat wilayah Pemerintah Kabupaten Nagekeo dengan jumlah 140 Satuan Pendidikan yang terdiri dari 40 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 100 Sekolah Dasar Negeri (SDN). Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.230.905,21 mengalami penurunan sebesar Rp72.512.309,69 dari Tahun 2021 sebesar Rp128.743.214,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66
Kas Dana BOS TA 2022

Nama Sekolah	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal		Pendapatan	Belanja		Total Belanja	Saldo Akhir
		Tambah	Kurang		Barang dan Jasa	Modal		
SMP NEGERI (40 Sekolah)	0,00	951,31	0,00	6.181.434.943,00	5.248.272.643,00	901.322.600,00	6.149.595.243,00	31.840.651,31
SD NEGERI (100 Sekolah)	128.743.214,90	0,00	47.976.264,00	8.778.494.709,00	7.077.918.256,00	1.756.953.150,00	8.834.871.406,00	24.390.253,90
Jumlah Kas Dana BOS	128.743.214,90	951,31	47.976.264,00	14.959.929.652,00	12.326.190.899,00	2.658.275.750,00	14.984.466.649,00	56.230.905,21



5.3.1.1.1.7 Setara Kas

Tidak terdapat saldo Setara Kas per 31 Desember 2022 yang merupakan penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam bentuk Deposito.

Tabel 5.67
Setara Kas TA 2022

No	Bank	Saldo Per 31 Desember 2022	Tanggal Simpan (Tanggal Penempatan Pertama)	Tanggal Jatuh Tempo	Ket
1	Bank NTT Cabang Mbay	0,00	-	-	-
		0,00	-	-	-
		0,00	-	-	-
2	BRI KCP Mbay	0,00	-	-	-
		0,00	-	-	-
Jumlah Setara Kas		0,00	-	-	-

5.3.1.1.1.8 Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan sisa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada perangkat daerah yang belum disetor sampai akhir tahun. Kas lainnya Pemerintah Kabupaten Nagekeo merupakan saldo pajak dana BOS yang belum disetor pada akhir tahun anggaran 2022. Saldo kas lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.981.178,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.513.962,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp66.467.216,00 dengan rincian sebagai berikut: dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68
Kas Lainnya TA 2022 dan 2021

No	SKPD	31 Desember 2022	Pajak 2022	Setoran Tahun 2022	31 Desember 2021
	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
1	BLUD	0,00	0,00	11.732.812,00	11.732.812,00
2	SMP Negeri	63.669.676,00	63.669.676,00	0,00	0,00
3	SD Negeri	20.311.502,00	20.311.502,00	54.734.404,00	54.734.404,00
Jumlah Kas Lainnya		83.981.178,00	83.981.178,00	66.467.216,00	66.467.216,00

5.3.1.1.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.957.685.862,15 mengalami penurunan sebesar Rp1.872.182.707,12 dari Tahun 2021 sebesar Rp11.829.868.569,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69
Piutang TA 2022 dan 2021

No	Jenis Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
1	PIUTANG PAJAK DAERAH	2.388.774.405,14	2.061.557.586,73	327.216.818,41
	Piutang Pajak Hotel	5.403.600,00	6.933.600,00	(1.530.000,00)
	Piutang Pajak Restoran	65.212.997,00	55.765.997,00	9.447.000,00
	Piutang Pajak Hiburan	35.321.250,00	35.169.250,00	152.000,00
	Piutang Pajak Reklame	221.907.412,00	211.510.312,00	10.397.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.808.517.810,00	2.327.980.817,00	480.536.993,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.070.346.637,00	920.137.837,25	150.208.799,75
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.817.935.300,86)	(1.495.940.226,52)	(321.995.074,34)
2	PIUTANG RETRIBUSI	339.147.400,00	441.912.400,00	(102.765.000,00)
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	629.786.860,00	613.870.860,00	15.916.000,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.211.575.127,00	1.212.370.767,009	(795.640,00)
	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	0,00	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	70.200.000,00	10.800.000,00	59.400.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.597.414.587,00)	(1.420.129.227,00)	(177.285.360,00)
3	PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	756.717.650,07	628.297.288,60	128.420.361,47
	Piutang BLUD	2.562.055.305,00	1.955.283.483,00	606.771.822,00
	Piutang Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Pendapatan Bunga	254.225,30	0,00	254.225,30
	Penyisihan Piutang BLUD	(1.811.591.880,23)	(1.326.986.194,40)	(484.605.685,83)
4	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	476.668.795,00	5.252.936.088,00	(4.776.267.293,00)
	Piutang Bagi Hasil Pajak	91.725.094,00	4.845.981.240,00	(4.754.256.146,00)
	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA	384.943.701,00	406.954.848,00	(22.011.147,00)
5	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	4.012.876.936,00	2.456.129.535,00	1.556.747.401,00
	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.012.876.936,00	2.456.129.535,00	1.556.747.401,00
6	BELANJA DIBAYAR DIMUKA	0,00	0,00	0,00
7	BAGIAN LANCAR PINJAMAN KEPADA BUMD	0,00	0,00	0,00
8	BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	0,00	0,00	0,00
9	BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	1.590.254.675,94	576.683.170,94	1.013.571.505,00
10	PIUTANG LAINNYA	393.246.000,00	412.352.500,00	(19.106.500,00)
	Piutang Lainnya	962.779.777,33	983.554.777,33	(20.775.000,00)
	Penyisihan Piutang Lainnya	(569.533.777,33)	(571.202.277,33)	1.668.500,00
	JUMLAH PIUTANG	9.957.685.862,15	11.829.868.569,27	(1.872.182.707,12)

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.388.774.405,14 bertambah sebesar Rp327.216.818,41 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp2.061.557.586,73. Rincian penambahan dan pengurangan piutang pajak daerah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Mutasi penambahan
 1. Koreksi tambah saldo awal piutang pajak hotel pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp29.831.950,00
 2. Koreksi tambah saldo awal piutang pajak rumah makan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp3.089.000,0
 3. Koreksi tambah saldo awal piutang pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp133.300,00
 4. Koreksi tambah saldo awal piutang pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp19.695.655,00
 5. Koreksi tambah saldo awal piutang pajak air tanah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp687.000,00
 6. Ketetapan Pajak Hotel sebesar Rp330.784.341,00, Pajak Rumah Makan sebesar Rp47.287.000,00, Pajak Hiburan sebesar Rp372.000,00, Pajak Reklame sebesar Rp68.759.625,00, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.391.863.793,00, Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp614.186.125,00 dan Pajak Air Tanah sebesar Rp8.758.084,00
- b. Mutasi pengurangan
 1. Koreksi kurang saldo awal piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp0,25
 2. Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp362.146.291,00, Pajak Rumah Makan sebesar Rp40.929.000,00, Pajak Hiburan sebesar Rp220.000,00, Pajak Reklame sebesar Rp58.495.825,00, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp931.022.455,00, Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp463.977.325,00 dan Pajak Air Tanah sebesar Rp9.445.084,00
 3. Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp1.193.800,00, Piutang Pajak Rumah Makan sebesar Rp24.726.323,50, Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp23.899.060,00, Piutang pajak reklame sebesar Rp104.050.566,00, Piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp1.557.201.451,36 dan Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp106.864.100,00.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Saldo piutang Retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp339.147.400,00 berkurang sebesar Rp102.765.000,00 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp441.912.400,00. Rincian penambahan dan pengurangan piutang retribusi Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi penambahan
 1. Koreksi tambah saldo awal piutang retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Boawae sebesar Rp33.641.000,00;
 2. Koreksi tambah saldo awal piutang retribusi pelayanan pasar di kecamatan Nangaroro sebesar Rp4.301.000,00;
 3. Koreksi tambah saldo awal piutang retribusi pelayanan pasar di kecamatan Aesesa sebesar Rp572.904.860,00;
 4. Koreksi tambah saldo awal piutang retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Keo Tengah sebesar Rp4.320.000,00;
 5. Ketetapan Retribusi pelayanan pasar Kecamatan Boawae sebesar Rp720.000;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

6. Ketetapan Retribusi pelayanan pasar Kecamatan Nangaroro sebesar Rp1.800.000,00;
 7. Ketetapan retribusi pelayanan pasar kecamatan Aesesa sebesar Rp72.000.000,00;
 8. Ketetapan retribusi pelayanan pasar kecamatan Keo Tengah sebesar Rp3.600.000,00;
 9. Ketetapan retribusi sewa tanah Badan Keuangan Daerah sebesar Rp321.678.726,00;
 10. Ketetapan retribusi sewa tanah dan bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.423.000,00;
 11. Ketetapan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp113.400.000,00;
- b. Mutasi Pengurangan
1. Koreksi kurang saldo awal piutang retribusi sewa tanah Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.420.000,00;
 2. Koreksi kurang saldo awal piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Dinas Kesehatan sebesar Rp3.350.000,00;
 3. Koreksi kurang piutang retribusi pelayanan pasar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp613.870.860;
 4. Realisasi retribusi pelayanan pasar Kecamatan Boawae sebesar Rp720.000,00 Kecamatan Nangaroro sebesar Rp1.800.000,00, Kecamatan Aesesa sebesar Rp57.600.000,00 dan Kecamatan Keo Tengah sebesar Rp3.380.000,00;
 5. Realisasi retribusi penyewaan tanah Badan Keuangan Daerah sebesar Rp322.577.366,00;
 6. Realisasi retribusi penyewaan tanah dan bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.449.000 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp3.101.000,00;
 7. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp54.000.000,00;
 8. Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar Kecamatan Boawae sebesar Rp31.221.000,00 Kecamatan Nangaroro sebesar Rp4.301.000,00 Kecamatan Aesesa sebesar Rp554.976.860,00 dan Kecamatan Keo Tengah sebesar Rp4.320.000,00;
 9. Penyisihan piutang retribusi sewa tanah Badan Keuangan Daerah sebesar Rp306.044.074,00;
 10. Penyisihan piutang retribusi sewa tanah dan bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp81.808.2022, Dinas Kesehatan sebesar Rp25.703.453 dan Kecamatan Aesesa sebesar Rp540.000,00;
 11. Penyisihan piutang retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebesar Rp563.500.000,00;
 12. Penyisihan piutang retribusi tempat pelelangan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp25.000.000,00.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp756.717.650,07 bertambah sebesar Rp128.420.361,47 dari saldo awal



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

pada tahun 2021 sebesar Rp628.297.288,60. Rincian penambahan dan pengurangan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Nagekeo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi penambahan
 1. Penetapan Pendapatan BLUD sebesar Rp2.349.854.540,00;
 2. Penambahan kelebihan pembayaran aji dan tunjangan pegawai pada Puskesmas Danga sebesar Rp6.000.000,00; dan
 3. Penambahan Saldo Remunerasi pada Rekening TDF-TKD per 31 Desember 2022 sebesar Rp254.225,30;
- b. Mutasi Pengurangan
 1. Koreksi kurang saldo awal piutang BLUD sebesar Rp266.800,00;
 2. Realisasi pembayaran piutang BLUD sebesar Rp1.742.815.918,00;
 3. Penyisihan piutang BLUD sebesar Rp1.811.590.609,10; dan
 4. Penyisihan piutang Bunga Remunerasi TKF-TKD sebesar Rp1.271,13;

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp476.668.795,00 berkurang sebesar Rp4.776.267.293,00 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp5.252.936.088,00. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang transfer pemerintah pusat antara lain sebagai berikut:

1. Mutasi Penambahan
 1. Koreksi tambah saldo awal piutang DBH Pasal 25/29 OP sebesar Rp6.626.052,00;
 2. Koreksi tambah saldo awal piutang DBH SDA Minerba – Royalti sebesar Rp8.555.334,00; dan
 3. Penetapan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Perpres 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 ditetapkan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp8.698.741.000,00.
2. Mutasi pengurangan
 1. Koreksi kurang saldo awal piutang Piutang DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp1.199.294.850,00;
 2. Koreksi kurang saldo awal Piutang DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp1.227.769.711,00;
 3. Koreksi kurang saldo awal Piutang DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp8.571.842,00;
 4. Koreksi kurang saldo awal Piutang DBH PBB Bagi Rata sebesar Rp1.188.292.832,00;
 5. Koreksi kurang saldo awal Piutang DBH Cukai Tembakau (CHT) sebesar Rp88.257.610,00;
 6. Koreksi kurang saldo awal Piutang DBH SDA Minerba dan Batu Bara - Iuran Tetap sebesar Rp1.101.877,00; dan
 7. Realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak dan pendapatan dana bagi hasil bukan pajak Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 9.776.900.957,00.



5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.012.876.936,00 bertambah sebesar Rp1.556.747.401,00 dari saldo awal pada Tahun 2021 sebesar Rp2.456.129.535,00. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang transfer antar daerah sebagai berikut:

a. Mutasi penambahan

1. Koreksi tambah saldo awal piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.418.920.301,00;
2. Koreksi tambah saldo awal piutang pajak kendaraan bermotor sebesar Rp61.165.531,00;
3. Koreksi tambah saldo awal Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp518.230.613,00;
4. Koreksi tambah saldo awal Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1.832.756.808,00;
5. Koreksi tambah saldo awal piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp6.767.349,00;
6. Penetapan Pendapatan transfer bagi hasil pajak berdasarkan Pergub Nomor 131 Tahun 2022 tentang perubahan pergub Nomor 44 Tahun 2022 ditetapkan pendapatan transfer bagi hasil Kabupaten Nagekeo sebesar Rp16.449.827.792,00.

b. Mutasi pengurangan

Realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak dan pendapatan dana bagi hasil bukan pajak Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.312.000.692,00

5.3.1.1.2.6 Belanja dibayar Dimuka

Tidak terdapat saldo Belanja dibayar Dimuka per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.2.7 Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.2.8 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.2.9 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.590.254.675,94 merupakan reklasifikasi dari kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran Dinas Kesehatan tahun 2015 yang hilang sebesar Rp430.236.534,00, koreksi tambah SKTJM Matilde Ema sebesar Rp3.895.338,94 dan penambahan SKTJM 2022 sebesar Rp1.479.114.108,00 (*Rinciannya dapat dilihat pada lampiran N-3*).

5.3.1.1.2.10 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp393.246.000,00 berkurang sebesar Rp19.106.500,00 dari saldo awal pada Tahun 2021 sebesar Rp412.352.500,00 dengan rinciannya sebagai berikut:



Tabel 5.70
Piutang Lainnya TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi		31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	681.491.444,00	0,00	20.775.000,00	660.716.444,00
2	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	(269.138.944,00)	1.668.500,00	0,00	(267.470.444,00)
3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	302.063.333,33	0,00	0,00	302.063.333,33
4	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(302.063.333,33)	0,00	0,00	(302.063.333,33)
	Jumlah	412.352.500,00	1.668.500,00	20.775.000,00	393.246.000,00

a) Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman

Bagian lancar tagihan pemberian pinjaman merupakan bunga atas tagihan dana bergulir pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Saldo Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp660.716.444,00 dan Rp681.491.444,00. Terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp20.775.000,00. *(Rinciannya dapat dilihat pada lampiran N-4.1)*

b) Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(267.470.444,00) dan Rp(269.138.944,00). Terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp1.668.500,00. *(Rinciannya dapat dilihat pada lampiran N-4.1)*

c) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan tagihan atas penjualan kapal ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2010. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp302.063.333,33, tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan. *(Rinciannya dapat dilihat pada lampiran N-4.2)*

d) Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(302.063.333,33) tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan. *(Rinciannya dapat dilihat pada lampiran N-4.2)*

5.3.1.1.3 Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.871.472.939,04 berkurang sebesar Rp6.224.943.471,73 dari saldo awal pada Tahun 2021 sebesar Rp25.096.416.410,77.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun 2022 yang terdiri atas:

Tabel 5.71
Persediaan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/ (Berkurang)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.575.000,00	51.925.680,00	(46.350.680,00)
2	Bahan Kimia	98.575.000,00	90.825.000,00	7.750.000,00
3	Bahan Bakar Minyak	0,00	515.000,00	(515.000,00)
4	Bahan Baku	0,00	56.773.600,00	(56.773.600,00)
5	Isi Tabung Gas	39.690.000,00	0,00	39.690.000,00
6	Bahan Lainnya	2.311.845.364,80	837.217.708,00	1.474.627.656,80
7	Suku Cadang Alat Angkut/Alat Berat	105.679.150,85	236.957.095,44	(131.277.944,59)
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	703.575.000,00	(703.575.000,00)
9	Alat Tulis Kantor	21.962.000,00	59.486.735,00	(37.524.735,00)
10	Kertas dan Cover	13.830.000,00	18.109.284,00	(4.279.284,00)
11	Barang Cetak	431.116.231,14	455.854.161,14	(24.737.930,00)
12	Bahan Komputer	4.129.000,00	6.009.700,00	(1.880.700,00)
13	Alat Listrik	413.000,00	8.566.848,00	(8.153.848,00)
14	Benda Pos	60.000,00	1.608.000,00	(1.548.000,00)
15	Obat	4.722.791.375,41	8.943.105.137,86	(4.220.313.762,45)
16	Obat-obatan Lainnya	5.387.397.349,31	0,00	5.387.397.349,31
17	Alat Kontrasepsi	0,00	143.660.173,67	(143.660.173,67)
18	Perabot Kantor	4.845.000,00	2.620.068,00	2.224.932,00
19	Komponen Lainnya	0,00	38.360.000,00	(38.360.000,00)
20	Barang Yang Akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	5.002.484.294,49	12.224.538.359,48	(7.222.054.064,99)
21	Pipa dan Aksesoris	721.080.173,04	1.216.708.860,18	(495.628.687,14)
	Jumlah Persediaan	18.871.472.939,04	25.096.416.410,77	(6.224.943.471,73)

Rincian Persediaan Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.72
Rincian Persediaan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

No	Rekening Persediaan	Perangkat Daerah	Nilai Persediaan (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi		5.575.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.575.000,00
2	Bahan Kimia		98.575.000,00
		BLUD SPAM	98.575.000,00
3	Isi Tabung Gas		39.690.000,00
		RSUD Aeramo	39.690.000,00
4	Bahan Lainnya		2.484.320.504,30
		Dinas Kesehatan	1.386.662.757,22
		Puskesmas Kaburea	850.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Persediaan	Perangkat Daerah	Nilai Persediaan (Rp)
		Puskesmas Maunori	7.304.500,00
		RSUD Aerao	1.089.293.247,08
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	210.000,00
5	Suku Cadang lainnya		105.679.150,85
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.679.150,85
6	Alat Tulis Kantor		21.962.000,00
		BLUD SPAM	2.678.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.825.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.459.000,00
7	Kertas dan Cover		13.830.000,00
		BLUD SPAM	10.975.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.855.000,00
8	Barang Cetak		431.116.231,14
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	262.932.000,00
		Badan Keuangan Daerah	168.184.231,14
9	Bahan Komputer		4.129.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.129.000,00
10	Alat Listrik		413.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	413.000,00
11	Benda Pos		60.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	60.000,00
12	Obat		4.587.076.081,41
		Dinas Kesehatan	2.789.292.861,12
		Puskesmas Danga	163.979.186,48
		Puskesmas Kaburea	48.360.962,47
		Puskesmas Nangaroro	209.211.384,18
		Puskesmas Maunori	68.354.915,74
		Puskesmas Mauponggo	178.503.803,26
		Puskesmas Boawae	90.745.453,98
		Puseksemas Jawakisa	63.567.552,87
		Puskesmas Utetoto	22.601.967,21
		RSUD Aerao	952.457.994,10
13	Obat-obatan Lainnya		5.350.637.503,81
		Dinas Kesehatan	1.256.649.420,00
		Puskesmas Danga	33.267.922,00
		Puskesmas Kaburea	11.730.833,00
		Puskesmas Nangaroro	79.211.395,00
		Puskesmas Maunori	23.966.796,00
		Puskesmas Mauponggo	59.707.383,00
		Puskesmas Boawae	120.080.681,00
		Puseksemas Jawakisa	8.578.000,00
		Puskesmas Utetoto	1.448.165,00
		RSUD Aerao	3.438.450.653,60
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	248.455.057,21
		Dinas Peternakan	69.091.198,00
14	Perabot Kantor		4.845.000,00
		RSUD Aerao	4.248.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	597.000,00
15	Barang Yang Akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga		5.002.484.294,49
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.945.381.715,24
		Dinas Sosial	63.760.600,00
		Dinas Pertanian	993.341.979,25



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekening Persediaan	Perangkat Daerah	Nilai Persediaan (Rp)
16	Pipa lainnya		721.080.173,04
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.583.703,19
		BLUD SPAM	684.496.469,85
Jumlah Persediaan			18.871.472.939,04

Rinciannya dapat dilihat pada lampiran N-5.

5.3.1.1.4 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.439.218.395,00 bertambah sebesar Rp2.957.078.895,00 dari saldo awal pada Tahun 2021 sebesar Rp38.482.139.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73
Investasi Jangka Panjang TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi		31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Investasi Non Permanen Lainnya	9.561.687.730,00	0,00	62.249.135,00	9.499.438.595,00
2	Penyisihan Investasi Non Permanen	(4.779.218.230,00)	0,00	1.980.671.970,00	(6.759.890.200,00)
3	Investasi Permanen	33.699.670.000,00	5.000.000.000,00	0,00	38.699.670.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		38.482.139.500,00	5.000.000.000,00	2.042.921.105,00	41.439.218.395,00

5.3.1.1.5 Investasi Non Permanen

Nilai ini merupakan nilai investasi non permanen yang terdiri atas Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya yang dikelola oleh beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang diharapkan kembali dalam jangka waktu beberapa tahun.

Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.739.548.395,00 terdiri dari Dana Pemberdayaan (Dana Bergulir -Pinjaman pada Koperasi, UKM dan Pokmas) sebesar Rp9.499.438.595,00 dikurangi penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebesar Rp(6.759.890.200,00).

Nilai bersih investasi non permanen diinvestasikan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada koperasi dan pokmas dalam rangka penguatan modal usaha koperasi dan pinjaman ekonomi produktif yang dimaksudkan untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Rincian lengkap Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel 5.74 berikut ini:

Tabel 5.74
Investasi Non Permanen TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi		31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dana Pemberdayaan	9.561.687.730,00	0,00	62.249.135,00	9.499.438.595,00
2	Penyisihan Dana Pemberdayaan yang Diragukan Tertagih	(4.779.218.230,00)	0,00	1.980.671.970,00	(6.759.890.200,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		4.782.469.500,00	0,00	2.042.921.105,00	2.739.548.395,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Penerapan penyajian nilai bersih 2022 sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Rincian nominatif Dana Bergulir dan perhitungan penyisihannya terdapat pada Lampiran Daftar Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022.

5.3.1.1.6 Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada PT. Bank NTT sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Investasi Permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagekeo adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Saldo Investasi Permanen Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.699.670.000,00 bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 Tahun 2021 sebesar Rp33.699.670.000,00. Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 24.17/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD PT.Bank NTT dari Pos Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah TA. 2022.

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2022 dan 2021. Perolehan aset tetap yang berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan.

Saldo Buku Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.908.566.936.101,77 dengan nilai perolehan aset tetap sebesar Rp2.841.140.906.950,68 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp(932.573.970.848,91).

Selanjutnya mengenai gambaran Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam kurun waktu Tahun 2021 – 2022 disajikan pada Tabel 5.75 berikut ini:

Tabel 5.75
Aset Tetap TA 2022 dan 2021

No	Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/ (Berkurang)
1	Tanah	777.912.254.381,71	774.938.314.381,71	2.973.940.000,00
2	Peralatan dan Mesin	285.400.295.730,04	278.652.348.623,72	6.747.947.106,32
3	Gedung dan Bangunan	553.285.552.863,66	466.199.496.896,11	87.086.055.967,55
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.149.850.484.372,68	1.066.398.022.301,43	83.452.462.071,25
5	Aset Tetap Lainnya	28.040.548.056,58	25.999.965.556,58	2.040.582.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.651.771.546,01	76.170.144.650,13	(29.518.373.104,12)
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(932.573.970.848,91)	(811.147.754.658,38)	(121.426.216.190,53)
Jumlah Aset Tetap		1.908.566.936.101,77	1.877.210.537.751,30	31.356.398.350,47



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan rincian tabel 5.75 di atas terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp31.356.398.350,47 atau 1,67%.

Mutasi Aset Tetap Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebesar Rp305.775.528.865,52 diperoleh dari:
- Belanja modal sebesar Rp113.999.290.488,50;
 - Belanja non modal sebesar Rp8.839.614.245,50;
 - Hibah sebesar Rp45.577.606.100,00;
 - Reklasifikasi dari persediaan sebesar Rp399.165.000,00;
 - Mutasi antar OPD sebesar Rp34.478.379.774,28;
 - Reklas dari peralatan dan mesin sebesar Rp11.478.000,00;
 - Reklas dari gedung dan bangunan sebesar Rp932.771.462,74;
 - Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp28.395.189.748,69;
 - Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp65.012.178.486,81;
 - Reklas dari aset tetap lainnya sebesar Rp6.817.305.584,00;
 - Koreksi nilai Aset tetap sebesar Rp1.312.549.975,00.
- b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebesar Rp152.992.914.324,52 berasal dari:
- Reklas ke beban sebesar Rp902.969.700,00;
 - Mutasi antar OPD sebesar Rp34.478.379.774,28;
 - Reklas ke peralatan dan mesin sebesar Rp842.551.462,74;
 - Reklas ke gedung dan bangunan sebesar Rp51.893.666.563,37;
 - Reklas ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp13.248.481.923,44;
 - Reklas ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp35.172.745.332,69;
 - Reklas ke aset tetap lainnya sebesar Rp11.478.000,00;
 - Reklas aset dari belanja modal yang tidak di kapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp572.131.113,43;
 - Koreksi pengurangan Nilai Aset Tetap tahun sebelumnya sebesar Rp2.300.895.797,00;
 - Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp7.191.527.947,58;
 - Reklas ke aset tak berwujud sebesar Rp115.720.000,00;
 - Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp6.262.366.709,99.

5.3.1.2.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp777.912.254.381,71 mengalami peningkatan sebesar Rp2.973.940.000,00 dari tahun 2021 sebesar Rp774.938.314.381,71, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	774.938.314.381,71
Mutasi Tambah	Rp	3.398.940.000,00
Mutasi Kurang	Rp	425.000.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	777.912.254.381,71



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nilai perolehan Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.973.940.000,00 berasal dari :

Mutasi tambah Aset Tetap –Tanah sebesar Rp3.398.940.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembelian tanah dari belanja modal sebesar Rp3.059.090.000,00 dengan rincian Tanah Pasar Raja Selatan sebesar Rp.352.224.000,00 dan Tanah Tempat Pemakaman Umum Aroleseng sebesar Rp2.706.866.000,00;
- b) Penambahan aset tetap tanah kelurahan rega yang berasal dari belanja pemeliharaan berupa tanah lapangan olahraga sebesar Rp100.000.000,00;
- c) Penambahan aset tetap tanah BKD yang dimutasi Kelurahan Rega dari belanja pemeliharaan berupa tanah lapangan olahraga sebesar Rp100.000.000,00;
- d) Penambahan aset tetap tanah Dinas P dan K berupa tanah Tanah SD Negeri Jawakisa dan SMP Negeri 2 Aesesa Selatan yang belum tercatat di tahun 2021 sebesar Rp139.850.000,00.

Mutasi kurang Aset Tetap – Tanah sebesar Rp425.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengurangan aset tetap tanah kelurahan rega yang berasal dari belanja pemeliharaan berupa tanah lapangan olahraga yang dimutasi ke BKD sebesar Rp100.000.000,00;
- b) Pengurangan aset tetap tanah Bagian Pemerintahan yang telah dicatat tahun sebelumnya sebesar Rp325.000.000,00.

Rincian per mutasi Aset Tetap - Tanah dijelaskan pada Lampiran N-7.1

5.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp285.400.295.730,04 mengalami peningkatan sebesar Rp6.747.947.106,32 dari tahun 2021 sebesar Rp278.652.348.623,72 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	278.652.348.623,72
Mutasi Tambah	Rp	25.652.844.067,06
Mutasi Kurang	Rp	18.904.896.960,74
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	285.400.295.730,04

Nilai perolehan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.747.947.106,32 berasal dari:

Mutasi tambah Aset Tetap – Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.652.844.067,06 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembelian peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp13.940.302.529,00 ;
- 2) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang & Jasa sebesar Rp11.605.500,00 dengan rincian berasal dari Dinas Satpol PP sebesar Rp5.070.000,00, Dinas Pertanian sebesar Rp1.690.000,00 dan SMP Negeri 1 Mauponggo sebesar Rp4.845.500,00;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- 3) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Hibah sebesar Rp2.232.740.611,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Hibah pada Dinas Kesehatan berupa alat kesehatan dan alat laboratorium yang berasal dari Hibah Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp386.295.671,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: KN.02.07/5/13583.329/2021, Nomor: KN.02.07/5/13510.310/2021, Nomor: KN.02.07/4.3/6364.281/2021, Nomor: KN.02.04/6/PPK/2362/X/2021, Nomor: 0388/IRR-SE/BAST/XII/2022, alat kesehatan dan alat laboratorium yang berasal dari Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebesar Rp2.083.333,00 berdasarkan BAST Nomor: KN.01.01/1.PPK/739.16/2021, dan alat kesehatan dan alat laboratorium yang berasal dari Hibah dari PT. Unilever sebesar Rp23.595.000,00 berdasarkan BAST Nomor: GCA/591/05/2021
 - b) Mutasi Aset Peralatan dan Mesin UPT Dinas Puskesmas Nangaroro berupa mesin GenxPERT 4 MODUL, UPS dan printer yang berasal dari Hibah kementerian Kesehatan RI sebesar Rp278.759.000,00;
 - c) Mutasi Aset Peralatan dan Mesin BPBD berupa Motor Trail yang berasal dari Hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp135.564.240,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: PRJ-138/BNPB/SU/RT/03.03/03/2020 / Nomor: 367/BPBD-NGK/48/2020; dan
 - d) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan yang berasal dari Hibah sebesar Rp1.406.443.367,00 berdasarkan BAST Nomor: PL.301/1/03/BPTDXIII-NTT/2022 / Nomor: 552/BPBJ-NGK/18b/03/2022.
- 4) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp8.547.797.964,32 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mutasi pada SD dan SMP Negeri berupa Peralatan Kantor, Rumah Tangga, dan Peralatan Komputer dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.154.502.000,00;
 - b) Mutasi Peralatan dan Mesin di Puskesmas berupa Peralatan Kantor, Rumah Tangga, Peralatan Komputer, Peralatan Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp7.344.828.974,32 dari Dinas Kesehatan; dan
 - c) Mutasi Peralatan dan Mesin RSD Aeramo yang berasal dari Mutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp15.499.990,00 dan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp32.967.000,00.
- 5) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Aset dari gedung dan bangunan sebesar Rp802.801.462,74 dengan rincian Reklasifikasi dari Gedung Bangunan Dinas PK sebesar Rp281.646.435,04, dan Reklasifikasi Aset dari Gedung dan Bangunan SMP Negeri dan SD Negeri sebesar Rp521.155.027,70;
- 6) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Aset Dari Aset Tetap Lainnya BOS SMP dan SD sebesar Rp39.750.000,00;
- 7) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Koreksi nilai sebesar Rp77.846.000,00 dengan rincian pada UPT Dinas Puskesmas Nangaroro tahun 2021 berupa *I-Phone* yang belum dicatat di tahun 2021 sebesar Rp29.870.000,00, dan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Peralatan dan Mesin SDI Tuanio yang belum dicatat di tahun 2021 sebesar Rp47.976.000,00;

Mutasi kurang Aset Tetap – Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.904.896.960,74 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang direklas ke beban persediaan OPD sebesar Rp753.000.000,00;
- b) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Mutasi Antar Perangkat Daerah sebesar Rp8.547.797.964,32 yaitu dari Dinas P dan K dimutasi ke SD dan SMP Negeri sebesar Rp1.154.502.000,00, dan dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo sebesar Rp7.360.328.964,32, serta Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dimutasi ke RSUD Aeramo sebesar Rp32.967.000,00;
- c) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang direklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.478.000,00 dengan rincian reklasifikasi pada SD dan SMP Negeri berupa Bahan Perpustakaan sebesar Rp5.478.000,00, dan reklasifikasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berupa Lukisan Kanvas sebesar Rp6.000.000,00;
- d) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Koreksi Nilai berupa Koreksi Nilai Belanja Modal di bawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Dibawah 500.000) sebesar Rp572.131.113,43;
- e) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin OPD yang direklas ke Aset lain - lain yang akan dihapuskan karena telah laku terjual dengan mekanisme lelang sebesar Rp3.710.671.325,00, dengan rincian yaitu Kendaraan Dinas pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Jawakisa sebesar Rp676.462.500,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/450/XII/2022, Kendaraan Dinas pada BLUD SPAM sebesar Rp167.750.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/444/XII/2022, Kendaraan Dinas pada Dinas Satpol PP dan Kebakaran sebesar Rp177.992.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/446/XII/2022, Kendaraan Dinas pada Dinas PMDP3A sebesar Rp21.480.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/451/XII/2022, Kendaraan Dinas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp600.789.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/445/XII/2022, Kendaraan Dinas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.120.920.825,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/449/XII/2022, Kendaraan Dinas pada Inspektorat sebesar Rp199.137.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/447/XII/2022, Kendaraan Dinas pada Bappelitbangda sebesar Rp360.750.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/448/XII/2022, Kendaraan Dinas pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp369.660.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/443/XII/2022, dan Kendaraan Dinas pada BK Diklat sebesar Rp15.730.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/442/XII/2022.
- f) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Badan Keuangan Daerah yang direklas ke Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud (ATB) Antivirus *Kaspersky Small Office* sebesar Rp14.420.000,00;



- g) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin OPD yang direklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp5.295.398.557,99, dengan rincian Kendaraan bermotor dalam proses penjualan melalui mekanisme lelang sebesar Rp4.175.273.317,32, Barang rusak Berat sebesar Rp306.103.940,67, Barang yang masih dalam penelusuran sebesar Rp814.021.300,00

Rincian per mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin dijelaskan pada Lampiran N-7.3

5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp553.285.552.863,66 mengalami peningkatan sebesar Rp87.086.055.967,55 dari Tahun 2021 sebesar Rp466.199.496.896,11, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	466.199.496.896,11
Mutasi Tambah	Rp	117.749.227.382,64
Mutasi Kurang	Rp	30.663.171.415,09
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	553.285.552.863,66

Nilai perolehan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp87.086.055.967,55 berasal dari:

Mutasi tambah Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebesar Rp117.749.227.382,64 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari belanja modal sebesar Rp17.863.000.833,00;
- b) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp6.629.398.220,50 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Belanja Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa belanja pemeliharaan Gedung SD dan SMP Negeri yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp3.306.568.538,50;
 - b) Belanja Dinas Kesehatan berupa belanja perencanaan Gedung rumah Petugas Puskesmas Jawakisa sebesar Rp15.985.200,00 dan Pengawasan Gedung RJ Puskesmas Boawae sebesar 32.500.000;
 - c) Belanja RSUD Aeramo berupa rehab gedung yang berasal dari belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp2.949.000.000,00 dan pengawasan pembangunan Pagar RSUD Aeramo yang berasal dari belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp39.860.832,00, dan Pengawasan Rehabilitasi/perbaikan Ruang Rawat Jalan sebesar Rp91.158.750,00;
 - d) Belanja Aset Gedung dan Bangunan Dinas PUPR berupa perencanaan gedung kantor Camat Nangaroro dan Kantor Lurah Nagespadhi yang berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp194.324.900,00.
- c) Penambahan aset gedung dan bangunan yang diperoleh dari hibah sebesar Rp16.580.536.013,00 dengan rincian perolehan hibah Puskesmas Nangaroro berupa garasi mobil ambulans yang berasal dari hibah CSR (CV.Maega Anugerah Mandiri) sebesar Rp30.000.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 06/MAM/CSR/X/2022, perolehan hibah pada Dinas Perhubungan berupa Pelabuhan Penyeberangan Marapokot dari Kementerian Perhubungan kepada Pemda Nagekeo sebesar Rp12.681.945.157,00 berdasarkan BAST Nomor: PL.301/1/03/BPTDXIII-NTT/2022 / Nomor: 552/BPBJ-NGK/18b/03/2022, perolehan hibah pada Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kopperindag berupa hibah Pasar Rakyat Danga dari Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp3.868.590.856,00 berdasarkan BAST No: 265/M-DAG/BAST/07/2022;

- d) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp271.225.000,00 pada Dinas Perhubungan berupa gedung kantor pelabuhan Marapokot sebesar Rp53.470.000,00, rumah mesin pelabuhan Marapokot sebesar Rp53.470.000,00, pagar pelabuhan Marapokot sebesar Rp82.142.500,00, dan pelataran parkir pelabuhan Marapokot sebesar Rp82.142.500,00;
- e) Penambahan Aset Gedung dan bangunan mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp23.474.315.177,77 dengan rincian Gedung dan bangunan SD dan SMP Negeri yang dimutasi dari Dinas P dan K sebesar Rp8.141.407.538,50, Aset Gedung dan bangunan Puskesmas Boawae yang dimutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp8.076.993.852,69, Aset Gedung dan bangunan Puskesmas Jawakisa yang dimutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp2.304.990.335,00, Aset Gedung dan bangunan Puskesmas Utetoto yang dimutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp4.950.923.451,58, dan Pengawasan Gedung RJ Puskesmas Boawae yang dimutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp32.500.000,00.
- f) Penambahan Aset Gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari KDP sebesar Rp51.893.666.563,37 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Reklasifikasi dari KDP pada Dinas Kesehatan berupa gedung RJ Puskesmas Boawae, gedung rumah petugas Puskesmas Jawakisa, dan gedung RS Pratama Raja sebesar Rp31.610.931.531,00;
 - b) Reklasifikasi dari KDP pada RSUD Aeramo berupa Pagar RSUD Aeramo sebesar Rp2.176.011.773,00;
 - c) Reklasifikasi dari KDP pada Dinas PUPR berupa Gedung Kantor Dinas PUPR sebesar Rp8.406.843.200,00;
 - d) Reklasifikasi dari KDP pada Dinas Koperindag berupa Gedung Revitalisasi Sentra IKM sebesar Rp1.421.749.171,37;
 - e) Reklasifikasi dari KDP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Bangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan sebesar Rp7.322.122.100,00;
 - f) Reklasifikasi dari KDP pada Dinas Pariwisata berupa Bangunan Menara Pengawas di DTW Enagera sebesar Rp549.200.038,00;
 - g) Reklasifikasi dari KDP pada Kecamatan Mauponggo berupa Bangunan Rumah Jabatan Camat Mauponggo sebesar Rp406.808.750,00.
- g) Koreksi nilai penambahan Aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.037.085.575,00 dengan rincian yaitu koreksi nilai pada RSUD Aeramo berupa pagar RSUD Aeramo yang belum dibayarkan sebesar Rp947.101.775,00, Koreksi nilai pada Dinas PUPR berupa gedung kantor Dinas PUPR yang belum dibayarkan sebesar Rp89.929.800,00, dan Koreksi nilai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Bangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan yang belum dibayarkan sebesar Rp54.000,00;

Mutasi kurang Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.663.171.415,09 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- a) Pengurangan aset gedung dan bangunan mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp23.474.315.177,77 dengan rincian yaitu mutasi Dinas P dan K ke SD dan SMP Negeri sebesar Rp8.141.407.538,50, mutasi Dinas Kesehatan ke Puskesmas Boawae sebesar Rp8.109.493.852,69, mutasi Dinas Kesehatan ke Puskesmas Jawakisa sebesar Rp2.304.990.335,00, dan mutasi Dinas Kesehatan ke Puskesmas Utetoto sebesar Rp4.950.923.451,58;
- b) Pengurangan aset gedung dan bangunan yang direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp802.801.462,74 dengan rincian reklasifikasi pada Dinas PK sebesar Rp281.646.435,04, dan reklasifikasi pada SMP Negeri dan SD Negeri sebesar Rp521.155.027,70;
- c) Pengurangan aset gedung dan bangunan yang direklasifikasi ke JIJ berupa Toilet (Jamban) SDI Lego sebesar Rp129.970.000,00;
- d) Koreksi Nilai Gedung Bangunan (Pembayaran Utang Belanja) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.811.760.000,00 ;
- e) Pengurangan aset gedung dan bangunan yang direklas ke aset lain- lain dikarenakan akan hapus sebesar Rp3.477.356.622,58 dengan rincian yaitu penghapusan bangunan gedung sekolah SDI Boloroga, SDI Kotakeo, SDI Tuanio dan SDI Mauwaru yang dimusnahkan sebesar Rp1.611.110.622,58 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/435/XII/2022 , penghapusan gedung dan bangunan UPT Dinas Puskesmas Boawae yang dimusnahkan sebesar Rp1.866.246.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/321/VIII/2022;
- f) Pengurangan aset gedung dan bangunan yang direklas ke aset lain-lain sebesar Rp966.968.152,00 dengan rincian yaitu reklasifikasi pada Dinas Koperindag berupa bangunan Pasar Aesesa 4 Unit sebesar Rp333.621.750,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor: 030/Diskoperindag-Ngk/7.a/01/2019, reklasifikasi pada Kecamatan Boawae sebesar Rp468.363.402,00 yang dalam kondisi rusak berat, dalam proses penghapusan, dan dalam proses penelusuran, dan reklasifikasi pada Kelurahan Nagespadhi sebesar Rp164.983.000,00 yang dalam proses penghapusan.

Rincian per mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dijelaskan pada Lampiran N-7.5

5.3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.149.850.484.372,68 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp83.452.462.071,25 dari Tahun 2021 sebesar Rp1.066.398.022.301,43, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	1.066.398.022.301,43
Mutasi Tambah	Rp	114.082.560.199,13
Mutasi Kurang	Rp	30.630.098.127,88
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	1.149.850.484.372,68

Nilai perolehan Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp83.452.462.071,25 berasal dari:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Mutasi tambah Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp114.082.560.199,13 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja modal sebesar Rp70.200.187.042,50;
- 2) Penambahan aset JIJ yang berasal dari belanja non modal sebesar Rp1.632.775.475,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Belanja Non Modal pada Dinas Kesehatan berupa instalasi meteran listrik Puskesmas Utetoto yang dibelanjakan pada barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp9.999.500,00, jasa konsultasi perencanaan pekerjaan bronjong dan TPT RS.Pratama Raja sebesar Rp15.994.000,00, dan jasa konsultasi pengawasan pematangan lahan dan pembangunan tembok penyokong RS Pratama Raja sebesar Rp11.055.000,00, belanja jasa konsultasi konstruksi yang dikapitalisasi jadi aset pada RSUD Aeramo sebesar Rp13.999.875,00 berupa perencanaan dan pengawasan rehabilitasi/perbaikan sanitasi UGD, LAB, GIZI, dan belanja jasa konsultasi konstruksi yang dikapitalisasi jadi aset pada Dinas PUPR sebesar Rp1.071.541.100,00 berupa perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan.
 - b) Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan Daerah yang dikapitalisasi jadi aset berupa perbaikan jalan, pembangunan TPT, dan perbaikan daerah irigasi sebesar Rp510.186.000,00.
- 3) Penambahan aset JIJ yang berasal dari hibah sebesar Rp26.764.329.476,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Aset JIJ Dinas PUPR yang diperoleh dari Hibah Kementerian berupa jalan Raja-Jawakisa sebesar Rp950.950.000,00;
 - b) Aset JIJ Dinas berupa Pelabuhan Penyeberangan Marapokot dari hibah Kementerian Perhubungan kepada Pemda Nagekeo sebesar Rp25.813.379.476,00 berdasarkan BAST Nomor: PL.301/1/03/BPTDXIII-NTT/2022 / Nomor: 552/BPBJ-NGK/18b/03/2022
- 4) Penambahan aset JIJ yang direklasifikasi dari persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp127.940.000,00 berupa instalasi air bersih pelabuhan Marapokot sebesar Rp25.000.000,00 dan instalasi listrik pelabuhan Marapokot sebesar Rp102.940.000,00 pada Dinas Perhubungan;
- 5) Penambahan aset JIJ yang diperoleh dari mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp2.062.077.882,19 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Aset JIJ SDI Lego yang dimutasi dari Dinas P dan K berupa Rehabilitasi WC SD Inpres Lego sebesar Rp14.990.000,00;
 - b) Aset tetap JIJ SMPN 6 Boawae yang dimutasi dari BPBD berupa tembok penahan tanah sebesar Rp144.210.336,00;
 - c) Penambahan aset tetap JIJ SDI Batalewa yang dimutasi dari BPBD berupa tembok penahan tanah sebesar Rp144.434.523,94;
 - d) Penambahan aset tetap JIJ UPT Puskesmas Maunori yang dimutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp246.607.143,75;
 - e) Penambahan aset tetap JIJ UPT Puskesmas Boawae yang dimutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp447.427.406,50;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- f) Penambahan aset tetap JIJ UPT Puskesmas Utetoto yang dimutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp554.222.472,00;
- g) Penambahan aset tetap JIJ Dinas PUPR yang dimutasi dari Badan Keuangan Daerah sebesar Rp510.186.000,00
- 6) Penambahan aset JIJ yang direklasifikasi dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp129.970.000,00 berupa Toilet (Jamban) SDI Lego;
- 7) Penambahan aset tetap JIJ yang direklasifikasi dari KDP sebesar Rp13.118,511.923,44 dengan rincian yaitu reklasifikasi pada Dinas PUPR yang sebesar Rp3.070.944.500,56, reklasifikasi pada BPBD sebesar Rp12.559.973,94, reklasifikasi pada Dinas Pariwisata sebesar Rp152.594.250,00; dan reklasifikasi dari KDP Dinas PUPR tahun-tahun sebelumnya yang fisiknya sudah 100% dan sudah digunakan sebesar Rp9.882.413.198,94.
- 8) Penambahan Koreksi nilai JIJ pada Dinas PUPR sebesar Rp46.768.400,00 berupa Pengawasan Pembangunan Jalan Strategis Desa (DAK) untuk mengakui utang belanja karena pekerjaan telah selesai 100%.

Mutasi kurang Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp30.630.098.127,88 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Koreksi Nilai Belanja Modal JIJ ke beban pemeliharaan pada Dinas PUPR berupa Pengerukan SP.KM II.b.I tengah pintu Langedhawe sebesar Rp149.969.700,00;
- b) Pengurangan Aset tetap JIJ mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp2.062.077.882,19 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Aset JIJ Dinas P dan K yang dimutasi ke SDI Lego berupa Rehabilitasi WC SD Inpres Lego sebesar Rp14.990.000,00;
 - b) Aset tetap JIJ BPBD yang dimutasi ke SMPN 6 Boawae berupa tembok penahan tanah sebesar Rp144.210.336,00;
 - c) Aset tetap JIJ BPBD yang dimutasi ke SDI Batalewa berupa tembok penahan tanah sebesar Rp144.434.523,94;
 - d) Aset tetap JIJ Dinas Kesehatan yang dimutasi ke UPT Puskesmas Maunori sebesar Rp246.607.143,75;
 - e) Aset tetap JIJ Dinas Kesehatan yang dimutasi ke UPT Puskesmas Boawae sebesar Rp447.427.406,50;
 - f) Aset tetap JIJ Dinas Kesehatan yang dimutasi ke UPT Puskesmas Utetoto sebesar Rp554.222.472,00;
 - g) Aset tetap JIJ Badan Keuangan Daerah yang dimutasi ke Dinas PUPR sebesar Rp510.186.000,00
- c) Pengurangan Aset JIJ yang di reklasifikasi ke KDP pada Dinas PUPR sebesar Rp28.395.189.748,69;
- d) Koreksi Nilai Pembayaran Utang Belanja JIJ sebesar Rp19.360.797,00 pada Dinas PUPR sebesar Rp9.986.780,00, dan pada Dinas Pertanian sebesar Rp9.374.017,00;
- e) Pengurangan aset JIJ UPT Puskesmas Boawae yang dihapus sebesar Rp 3.500.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/321/VIII/2022;



Rincian per mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan pada Lampiran N-7.7.

5.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap - Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.040.548.056,58 mengalami peningkatan sebesar Rp2.040.582.500,00 dari tahun 2021 sebesar Rp25.999.965.556,58, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	25.999.965.556,58
Mutasi Tambah	Rp	8.959.188.084,00
Mutasi Kurang	Rp	6.918.605.584,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	28.040.548.056,58

Nilai perolehan Aset Tetap - Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.040.582.500,00 berasal dari:

Mutasi tambah Aset Tetap – Aset Tetap lainnya sebesar Rp8.959.188.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal sebesar Rp 8.936.710.084,00;
- Penambahan aset Aset Tetap Lainnya yang direklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.478.000,00 pada SD dan SMP Negeri sebesar Rp5.478.000,00 dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp6.000.000,00;
- Koreksi tambah aset tetap lainnya pada Dinas Peternakan berupa anak sapi sebesar Rp11.000.000,00;

Mutasi kurang Aset Tetap – Aset Tetap lainnya sebesar Rp6.918.605.584,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pengurangan Aset Tetap Lainnya SD dan SMP Negeri yang direklas ke peralatan dan mesin sebesar Rp39.750.000,00;
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan ke KDP berupa moveable bridge pelabuhan Marapokot sebesar Rp6.777.555.584,00;
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang direklas ke ATB sebesar Rp101.300.000,00 pada Dinas PUPR sebesar Rp99.300.000,00 dan Dinas Penanaman Modal sebesar Rp2.000.000,00;

Rincian per mutasi Aset Tetap – Aset Tetap lainnya dijelaskan pada Lampiran N-7.9.

5.3.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.651.771.546,01 mengalami penurunan nilai sebesar Rp29.518.373.104,12 dari saldo tahun 2021 sebesar Rp76.170.144.650,13, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	76.170.144.650,13
Mutasi Tambah	Rp	35.932.769.132,69
Mutasi Kurang	Rp	65.451.142.236,81
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	46.651.771.546,01

Nilai perolehan Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp29.518.373.104,12 berasal dari:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Mutasi tambah Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp35.932.769.132,69 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp465.835.050,00 dengan rincian yaitu KDP pada Dinas Perhubungan berupa Perencanaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp99.567.000,00 dan Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Marapokot sebesar Rp218.355.500,00, KDP pada Dinas Pemuda dan Olahraga berupa Perencanaan Pekerjaan Jogging track Lapangan Hanura sebesar Rp7.892.100,00, dan KDP pada Dinas PUPR berupa Perencanaan Teknis Pembangunan TPS3R DAK 2023 sebesar Rp40.065.450,00 dan pengawasan peningkatan jalan Boazea-Roe Ring of Amagelu (Seg.Dokotogo-Kampung Kawa) sebesar Rp99.955.000,00;
- b) Mutasi KDP antar Perangkat Daerah pada Kecamatan Mauponggo berupa Bangunan Rumah Jabatan Camat Mauponggo sebesar Rp294.188.750,00 dari Dinas PUPR;
- c) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp28.395.189.748,69 dengan rincian berupa:
 - 1) Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Air Bersih sebesar Rp199.940.609,25;
 - 2) Peningkatan Jalan Masuk Kantor Camat Aesesa Selatan sebesar Rp1.104.500.000,00 dari nilai kontrak sebesar Rp1.175.000.000,00 (persentase realisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar 94%) Pekerjaan ini sudah di PHO dengan Nomor PHO : 620/DPUPR-NGK//PPK-PHO.CAS/01/XII/2022, Berita Acara PHO diserahkan Tahun 2023;
 - 3) Peningkatan Jalan Mauponggo-Ngera-Puuwada sebesar Rp11.327.000.000,00 dari nilai kontrak Rp12.050.000.000,00 (persentase realisasi fisik 94%). Pekerjaan ini baru dilaksanakan PHO pada tahun 2023 dengan Nomor PHO: 620/DPUR-NGK/PPK-PHO.RMPG/01/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;
 - 4) Peningkatan Jalan Kota Mbay (Segmen Dadiwuwu-Aeramo) sebesar Rp2.205.000.000,00 dari nilai kontrak Rp2.450.000.000,00 (persentase realisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar 90%). Pekerjaan ini baru dilaksanakan PHO pada tahun 2023 dengan Nomor PHO: 620/DPUPR-NGK/PPK.PHO-DA/01/II/2023 tanggal 05 Januari 2023;
 - 5) Peningkatan Jalan Raja -Maunori sebesar Rp8.588.595.709,44 dari nilai kontrak Rp9.596.196.323,41 (persentase realisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar 89,50%). Pekerjaan ini baru dilaksanakan PHO pada tahun 2023 dengan Nomor PHO: 620/DPUPR-NGK/PPK.PHO-RM/01/II/2023 tanggal 08 Februari 2023;
 - 6) Peningkatan Jalan Boazea-Roe Ring of Amagelu (Seg.Dokotogo-Kampung Kawa) sebesar Rp4.970.153.430,00 dari nilai kontrak Rp5.344.251.000,00 (persentase realisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar 93,00%). Pekerjaan ini baru dilaksanakan PHO pada tahun 2023 dengan Nomor PHO: 623/DPUPR-NGK/PLP-14b/PHO/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- d) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya sebesar Rp6.777.555.584,00 pada Dinas Perhubungan berupa *Moveable Bridge Pelabuhan Marapokot*;

Mutasi kurang Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp65.451.142.236,81 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- a) Mutasi KDP Antar Perangkat Daerah pada Kecamatan Mauponggo berupa Bangunan Rumah Jabatan Camat Mauponggo sebesar Rp294.188.750,00 dari Dinas PUPR;
- b) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.893.666.563,37;
- c) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp13.118.511.923,44;
- d) Koreksi Nilai ke beban pemeliharaan tahun sebelumnya pada Dinas PUPR berupa Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi Mbay Kanan tahun 2010 sebesar Rp144.775.000,00 yang masih tercatat pada KDP.

Rincian per mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dijelaskan pada Lampiran N-7.11.

5.3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp(932.573.970.848,91) mengalami peningkatan nilai sebesar Rp(121.426.216.190,53) dari tahun 2021 sebesar Rp(811.147.754.658,38). Akumulasi Penyusutan pada masing-masing akun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.76
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Akun	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang
Peralatan dan Mesin	(217.899.506.334,64)	(196.039.148.426,84)	(21.860.357.907,80)
Gedung dan Bangunan	(141.239.704.990,46)	(119.540.920.401,57)	(21.698.784.588,89)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(573.434.759.523,81)	(495.567.685.829,97)	(77.867.073.693,84)
Total	(932.573.970.848,91)	(811.147.754.658,38)	(121.426.216.190,53)

Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin 2022 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp(21.860.357.907,80) berasal dari:

- 1) Beban Penyusutan Peralatan dan mesin 2022 sebesar Rp(29.340.397.931,26);
- 2) Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2021 sebesar Rp(3.596.643.292,26) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Koreksi Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin 2021 pada puskesmas dan RSUD Aeramo yang dimutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp(2.075.747.718,47);
 - b) Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2021 yang diperoleh dari Hibah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp(58.001.566,80), Hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp(38.732.640,00), dan Hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(1.406.443.367,00);
 - c) Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2021 untuk barang yang belum dicatat pada tahun 2021 pada UPTD Puskesmas Nangaroro sebesar Rp(5.974.000,00), dan pada SD Inpres Tuanio sebesar Rp(11.744.000,00).
- 3) Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2021 sebesar Rp(11.076.683.315,73) dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- a) Koreksi Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin 2021 pada Dinas Kesehatan yang dimutasi ke puskesmas dan RSUD Aeramo sebesar Rp(2.075.747.718,47);
- b) Koreksi Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin 2021 yang direklas ke aset lain-lain sebesar Rp(5.290.264.272,26);
- c) Koreksi Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin 2021 berupa kendaraan dinas yang dihapuskan karena laku terjual melalui mekanisme lelang sebesar Rp(3.710.671.325,00).

Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2022 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp(21.698.784.588,89) berasal dari:

- 1) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2022 sebesar Rp(17.468.758.534,97);
- 2) Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021 sebesar Rp(7.143.000.264,21) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021 pada puskesmas dan RSUD Aeramo yang dimutasi dari Dinas Kesehatan sebesar Rp(929.538.234,82);
 - b) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021 yang diperoleh melalui hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(4.302.172.160,13), dan pada Dinas Koperindag sebesar Rp(386.859.085,60);
 - c) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021 pada Dinas PUPR tahun perolehan 2017 yang baru dicatat yang sebelumnya tercatat di KDP berupa Gedung Kantor Dinas PUPR sebesar Rp(1.416.128.833,33), dan koreksi nilai Bangunan Pasar Dinas Koperindag yang sebelumnya tercatat gelondongan sebesar Rp(26.940.200,33);
 - d) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Mauponggo sebesar Rp81.361.750,00 berupa Bangunan Rumah Jabatan Camat Mauponggo tahun perolehan 2016 yang baru direklasifikasi dari KDP.
- 3) Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021 sebesar Rp(2.912.974.210,29) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021 pada Dinas Kesehatan yang dimutasi ke puskesmas dan RSUD Aeramo sebesar Rp(929.538.234,82);
 - b) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021 pada Dinas Koperindag berupa nilai Bangunan Pasar yang sebelumnya tercatat gelondongan sebesar Rp(95.086.452,79);
 - c) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021 yang direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp(483.484.075,99);
 - d) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021 yang sudah dilakukan penghapusan sebesar Rp(1.404.865.446,69).

Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2022 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp(77.867.073.693,84) berasal dari:

- 1) Beban Penyusutan JIJ 2022 sebesar Rp(64.636.131.020,67);
- 2) Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan JIJ 2021 sebesar Rp(9.620.509.240,09) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Koreksi Akumulasi Penyusutan JIJ 2021 karena mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp(123.618.432,22) dengan rincian yaitu pada UPTD Puskesmas



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- Maunori sebesar Rp(12.330.357,20), pada UPTD Puskesmas Boawae sebesar Rp(32.869.968,46), dan pada UPTD Puskesmas Utetoto sebesar Rp(78.418.106,56) yang dimutasi dari Dinas Kesehatan;
- b) Koreksi Akumulasi Penyusutan JIJ 2021 yang berasal dari hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(9.464.905.807,87) berupa Pelabuhan Penyeberangan Marapokot dari kementerian perhubungan;
 - c) Koreksi Akumulasi Penyusutan JIJ 2021 yang berasal dari reklasifikasi Aset JIJ dari persediaan barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perhubungan berupa instalasi listrik Pelabuhan Marapokot dan instalasi air bersih Pelabuhan Marapokot sebesar Rp(31.985.000,00);
 - d) Koreksi Akumulasi Penyusutan JIJ 2021 yang direklasifikasi dari KDP tahun sebelumnya yang baru dicatat pada JIJ pada tahun 2022 sebesar Rp3.736.840.198,64.
- 3) Koreksi Kurang Akumulasi JIJ 2021 sebesar Rp(126.406.765,55) dengan rincian sebagai berikut:
- a) Koreksi Akumulasi Penyusutan JIJ 2021 karena mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp(123.618.432,22) pada Dinas Kesehatan yang dimutasi ke UPTD Puskesmas Maunori, UPTD Puskesmas Boawae, dan UPTD Puskesmas Utetoto.
 - b) Koreksi Akumulasi Penyusutan JIJ 2021 karena penghapusan sebesar Rp(2.788.333,33) berupa bangunan WC pada UPTD Puskesmas Boawae.

Rincian akumulasi penyusutan Aset tetap Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.78 berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.77
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022			Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022	Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.219.589.104,16)	(1.940.583.743,16)	(82.370.333,34)	(5.242.543.180,66)	(4.839.913.403,00)	(402.629.777,66)
2	SMPN Satap I Aesesa	(88.499.811,57)	(562.495.632,62)	0,00	(650.995.444,19)	(565.932.413,04)	(85.063.031,15)
3	SMPN Satap 2 Aesesa	(452.036.922,81)	(628.891.176,01)	(1.220.352,00)	(1.082.148.450,82)	(915.254.347,56)	(166.894.103,26)
4	SMP Negeri 6 Aesesa	(282.067.270,00)	(311.763.226,34)	0,00	(593.830.496,34)	(494.675.856,67)	(99.154.639,67)
5	SMP Negeri 5 Aesesa	(387.279.797,86)	(726.777.610,82)	(1.250.984,50)	(1.115.308.393,18)	(1.015.976.090,86)	(99.332.302,32)
6	SMP Negeri 4 Aesesa	(181.096.196,82)	(893.247.686,45)	(14.799.999,99)	(1.089.143.883,26)	(922.392.506,97)	(166.751.376,29)
7	SMP Negeri 3 Aesesa Satap	(129.131.038,00)	(236.422.327,80)	0,00	(365.553.365,80)	(317.560.235,43)	(47.993.130,37)
8	SMP Negeri 3 Aesesa	(452.420.909,11)	(758.575.015,32)	(14.800.000,00)	(1.225.795.924,43)	(1.022.493.557,79)	(203.302.366,64)
9	SMP Negeri 2 Aesesa	(176.065.622,00)	(1.257.867.443,21)	(35.814.420,83)	(1.469.747.486,04)	(1.328.219.894,62)	(141.527.591,42)
10	SMP Negeri 1 Aesesa	(640.397.687,99)	(2.079.799.437,74)	(1.037.863,50)	(2.721.234.989,23)	(2.516.564.057,26)	(204.670.931,97)
11	SMPN Satap 2 Aesesa Selatan	(145.049.670,00)	(265.535.340,00)	0,00	(410.585.010,00)	(342.915.310,00)	(67.669.700,00)
12	SMPN 1 Satap Aesesa Selatan	(166.295.898,00)	(512.057.095,87)	(14.980.000,00)	(693.332.993,87)	(602.119.963,07)	(91.213.030,80)
13	SMP Negeri 2 Aesesa Selatan	(151.669.638,00)	(690.681.922,70)	0,00	(842.351.560,70)	(731.216.464,21)	(111.135.096,49)
14	SMP Negeri 1 Aesesa Selatan	(555.792.709,66)	(674.191.861,15)	(1.250.984,50)	(1.231.235.555,31)	(1.083.068.968,88)	(148.166.586,43)
15	SMPN Satap 2 Boawae	(360.342.040,00)	(474.249.701,58)	0,00	(834.591.741,58)	(722.638.787,45)	(111.952.954,13)
16	SMPN Satap 1 Boawae	(256.369.324,50)	(617.849.115,75)	0,00	(874.218.440,25)	(743.839.267,13)	(130.379.173,12)
17	SMP Negeri 5 Boawae	(217.774.326,57)	(131.652.000,00)	0,00	(349.426.326,57)	(278.703.468,14)	(70.722.858,43)
18	SMP Negeri 4 Boawae	(226.758.708,93)	(939.877.657,49)	0,00	(1.166.636.366,42)	(986.255.914,81)	(180.380.451,61)
19	SMP Negeri 3 Boawae	(402.051.426,00)	(1.070.732.263,18)	(1.220.352,00)	(1.474.004.041,18)	(1.370.030.384,18)	(103.973.657,00)
20	SMP Negeri 2 Boawae	(630.269.059,00)	(1.606.165.455,40)	(2.000.000,00)	(2.238.434.514,40)	(2.096.674.338,84)	(141.760.175,56)
21	SMP Negeri 1 Boawae	(759.240.300,13)	(921.171.767,89)	(5.333.333,33)	(1.685.745.401,35)	(1.499.254.902,66)	(186.490.498,69)
22	SMP Negeri 6 Boawae	(167.429.454,51)	(427.960.339,82)	(14.421.033,60)	(609.810.827,93)	(480.598.951,90)	(129.211.876,03)
23	SMPN Satap 3 Boawae	(141.632.580,00)	(51.071.000,00)	(1.166.666,66)	(193.870.246,66)	(155.790.363,33)	(38.079.883,33)
24	SMPN Satap 2 Keo Tengah	(144.367.851,77)	(89.372.746,67)	0,00	(233.740.598,44)	(185.435.908,44)	(48.304.690,00)
25	SMPN Satap 1 Keo Tengah	(308.122.349,28)	(215.095.205,33)	0,00	(523.217.554,61)	(406.847.965,71)	(116.369.588,90)
26	SMP Negeri 1 Keo Tengah	(494.798.893,00)	(1.024.776.242,96)	0,00	(1.519.575.135,96)	(1.395.358.777,15)	(124.216.358,81)
27	SMPN Satap 3 Mauponggo	(275.193.500,00)	(573.510.851,30)	0,00	(848.704.351,30)	(760.235.597,33)	(88.468.753,97)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022			Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022	Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
28	SMPN Satap 2 Mauponggo	(369.578.340,16)	(632.356.800,00)	(1.220.352,00)	(1.003.155.492,16)	(904.996.066,96)	(98.159.425,20)
29	SMPN Satap 1 Mauponggo	(277.096.900,00)	(598.789.033,17)	0,00	(875.885.933,17)	(769.087.221,37)	(106.798.711,80)
30	SMP Negeri 2 Mauponggo	(235.602.163,00)	(545.109.626,29)	(16.649.037,50)	(797.360.826,79)	(695.049.044,27)	(102.311.782,52)
31	SMP Negeri 1 Mauponggo	(345.769.411,56)	(877.268.433,70)	0,00	(1.223.037.845,26)	(1.054.816.176,93)	(168.221.668,33)
32	SMP Negeri 3 Mauponggo	(182.565.310,00)	(403.074.102,99)	0,00	(585.639.412,99)	(465.572.948,75)	(120.066.464,24)
33	SMPN Satap 2 Nangaroro	(103.015.033,00)	(268.262.053,34)	0,00	(371.277.086,34)	(313.362.782,67)	(57.914.303,67)
34	SMPN Satap 1 Nangaroro	(220.900.872,26)	(452.382.612,37)	0,00	(673.283.484,63)	(588.718.673,73)	(84.564.810,90)
35	SMPN 3 Nangaroro Satap Di Aegela	(172.372.398,00)	(331.401.743,33)	(20.737.933,33)	(524.512.074,66)	(454.785.566,00)	(69.726.508,66)
36	SMP Negeri 3 Nangaroro	(246.724.402,77)	(158.614.240,00)	(1.220.352,00)	(406.558.994,77)	(350.724.564,80)	(55.834.429,97)
37	SMP Negeri 2 Nangaroro	(224.048.611,84)	(498.480.468,76)	(400.000,00)	(722.929.080,60)	(555.124.984,56)	(167.804.096,04)
38	SMP Negeri 1 Nangaroro	(439.697.713,40)	(1.692.434.784,73)	(14.800.000,00)	(2.146.932.498,13)	(2.018.471.985,18)	(128.460.512,95)
39	SMP Negeri 4 Nangaroro Satap Di Sorowea	(117.920.950,00)	(193.215.115,40)	0,00	(311.136.065,40)	(261.444.854,10)	(49.691.211,30)
40	SMPN Satap 1 Wolowae	(178.594.001,18)	(626.053.904,02)	(450.000,00)	(805.097.905,20)	(693.784.482,31)	(111.313.422,89)
41	SMP Negeri 1 Wolowae	(372.677.757,00)	(1.602.456.406,88)	(25.250.984,50)	(2.000.385.148,38)	(1.852.874.577,60)	(147.510.570,78)
42	SD Inpres Danga	(269.693.440,00)	(235.480.293,55)	0,00	(505.173.733,55)	(394.299.317,81)	(110.874.415,74)
43	SD Inpres Malabai	(48.495.142,86)	(491.857.877,12)	(8.826.000,00)	(549.179.019,98)	(484.434.574,23)	(64.744.445,75)
44	SD Inpres Marapokot	(137.390.333,00)	(1.076.465.860,00)	0,00	(1.213.856.193,00)	(1.114.103.411,33)	(99.752.781,67)
45	SD Inpres Mbay	(131.463.858,10)	(199.814.730,00)	0,00	(331.278.588,10)	(273.544.808,73)	(57.733.779,37)
46	SD Inpres Nebe	(172.229.328,00)	(899.239.887,78)	(5.333.333,33)	(1.076.802.549,11)	(976.829.158,09)	(99.973.391,02)
47	SD Inpres Rata	(273.309.792,86)	(983.338.558,45)	(13.021.425,00)	(1.269.669.776,31)	(1.119.055.326,89)	(150.614.449,42)
48	SD Inpres Ratedosa	(182.903.250,00)	(249.095.859,50)	(533.333,33)	(432.532.442,83)	(359.316.800,92)	(73.215.641,91)
49	SD Inpres Tonggurambang	(197.764.929,74)	(465.487.793,33)	(300.000,00)	(663.552.723,07)	(608.387.567,81)	(55.165.155,26)
50	SD Inpres Towak	(95.810.333,34)	(49.059.704,93)	(8.326.666,66)	(153.196.704,93)	(132.405.861,50)	(20.790.843,43)
51	SD Inpres Waemburung	(102.503.233,00)	(666.622.321,22)	0,00	(769.125.554,22)	(720.464.815,44)	(48.660.738,78)
52	SD Inpres Waturedu	(252.484.041,18)	(160.979.343,91)	(2.248.333,34)	(415.711.718,43)	(327.457.174,74)	(88.254.543,69)
53	SD Negeri Ameaba	(66.856.796,00)	(439.616.679,33)	0,00	(506.473.475,33)	(428.803.251,72)	(77.670.223,61)
54	SD Negeri Dhawe Dori	(150.325.674,60)	(250.015.366,67)	0,00	(400.341.041,27)	(338.909.971,07)	(61.431.070,20)
55	SD Negeri Lambo	(106.448.741,18)	(175.182.543,33)	0,00	(281.631.284,51)	(239.136.603,53)	(42.494.680,98)
56	SD Negeri Lego	(157.871.840,00)	(187.567.800,00)	(10.600.000,01)	(356.039.640,01)	(305.026.680,00)	(51.012.960,01)
57	SD Negeri Nataia	(204.403.786,00)	(199.483.308,89)	0,00	(403.887.094,89)	(350.309.098,33)	(53.577.996,56)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022			Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022	Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
58	SD Negeri Peresambi	(39.674.986,00)	(223.018.568,85)	0,00	(262.693.554,85)	(231.614.680,42)	(31.078.874,43)
59	SD Negeri Pomakeke	(204.934.772,57)	(462.543.891,68)	(751.880,00)	(668.230.544,25)	(587.307.883,98)	(80.922.660,27)
60	SD Negeri Tongananga	(120.541.006,18)	(291.671.378,98)	0,00	(412.212.385,16)	(368.298.995,28)	(43.913.389,88)
61	SD Negeri Towak	(31.509.706,00)	0,00	0,00	(31.509.706,00)	(24.897.155,00)	(6.612.551,00)
62	SD Inpres Butata	(195.894.287,00)	(151.219.283,33)	(2.133.333,33)	(349.246.903,66)	(301.555.915,83)	(47.690.987,83)
63	SD Inpres Malawona	(142.168.544,00)	(190.281.638,88)	(9.000.000,00)	(341.450.182,88)	(283.626.305,14)	(57.823.877,74)
64	SD Inpres Natatadi	(136.318.850,00)	(314.228.050,00)	(9.110.833,34)	(459.657.733,34)	(368.321.946,67)	(91.335.786,67)
65	SD Negeri Bonat	(159.444.788,00)	(300.124.828,78)	0,00	(459.569.616,78)	(377.901.188,49)	(81.668.428,29)
66	SD Negeri Malapoma	(135.378.390,00)	(101.300.000,00)	0,00	(236.678.390,00)	(202.351.946,67)	(34.326.443,33)
67	SD Negeri Natakupe	(114.217.825,72)	(224.045.160,00)	0,00	(338.262.985,72)	(288.986.926,19)	(49.276.059,53)
68	SD Negeri Rendu Ola	(93.960.086,11)	(50.113.388,07)	0,00	(144.073.474,18)	(106.577.586,01)	(37.495.888,17)
69	SD Negeri Tasikapa	(97.704.490,00)	(671.225.070,77)	0,00	(768.929.560,77)	(708.966.197,58)	(59.963.363,19)
70	SD Negeri Jawakisa	(108.446.636,00)	(198.684.480,00)	0,00	(307.131.116,00)	(227.573.941,67)	(79.557.174,33)
71	SD Negeri Wajomara	(32.213.236,00)	(169.592.066,67)	(1.250.000,00)	(203.055.302,67)	(166.106.521,67)	(36.948.781,00)
72	SD Inpres Alorawe	(144.989.621,29)	(297.778.500,00)	(3.392.400,00)	(446.160.521,29)	(406.193.999,86)	(39.966.521,43)
73	SD Inpres Denaano	(116.415.520,00)	(291.247.876,33)	0,00	(407.663.396,33)	(369.036.127,98)	(38.627.268,35)
74	SD Inpres Dhereisa	(252.701.589,85)	(217.971.432,89)	(10.456.666,67)	(481.129.689,41)	(406.363.944,42)	(74.765.744,99)
75	SD Inpres Dorameli	(232.652.777,00)	(65.687.524,45)	0,00	(298.340.301,45)	(202.670.792,59)	(95.669.508,86)
76	SD Inpres Hobopadu	(233.332.001,18)	(708.273.733,72)	0,00	(941.605.734,90)	(849.982.286,40)	(91.623.448,50)
77	SD Inpres Kekakapa	(141.258.528,57)	(612.644.989,34)	0,00	(753.903.517,91)	(670.549.735,67)	(83.353.782,24)
78	SD Inpres Lego	(144.827.700,00)	(770.349.759,33)	(7.415.333,33)	(922.592.792,66)	(812.007.190,00)	(110.585.602,66)
79	SD Inpres Malalaja	(150.784.340,00)	(384.821.118,90)	0,00	(535.605.458,90)	(488.611.585,64)	(46.993.873,26)
80	SD Inpres Olaewa	(104.226.699,60)	(695.385.142,84)	(10.600.000,00)	(810.211.842,44)	(714.049.331,49)	(96.162.510,95)
81	SD Inpres Padhapae	(115.976.205,46)	(406.917.542,22)	0,00	(522.893.747,68)	(442.630.956,78)	(80.262.790,90)
82	SD Inpres Ratongamobo	(71.876.190,14)	(280.747.778,83)	(36.666.666,66)	(389.290.635,63)	(347.190.043,34)	(42.100.592,29)
83	SD Inpres Rawe	(187.720.278,32)	(852.257.939,22)	0,00	(1.039.978.217,54)	(915.788.956,74)	(124.189.260,80)
84	SD Inpres Tibakisa	(115.829.500,00)	(293.936.921,66)	0,00	(409.766.421,66)	(370.002.524,44)	(39.763.897,22)
85	SD Inpres Wudu	(178.152.984,60)	(541.249.289,34)	0,00	(719.402.273,94)	(640.386.148,97)	(79.016.124,97)
86	SD Negeri Nido	(162.102.206,67)	(303.136.276,67)	0,00	(465.238.483,34)	(415.020.046,67)	(50.218.436,67)
87	SD Negeri Rawe li	(49.956.975,93)	(700.759.520,67)	(850.000,00)	(751.566.496,60)	(693.406.780,05)	(58.159.716,55)
88	SD Negeri Aebowo	(83.271.271,70)	(245.597.166,66)	0,00	(328.868.438,36)	(259.612.416,89)	(69.256.021,47)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022			Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022	Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
89	SD Inpres Giriwawo	(44.824.178,00)	(328.167.316,40)	0,00	(372.991.494,40)	(307.116.577,70)	(65.874.916,70)
90	SD Inpres Kodiwuwu	(89.623.753,60)	(167.865.835,56)	0,00	(257.489.589,16)	(219.758.656,85)	(37.730.932,31)
91	SD Inpres Ladolima	(127.948.333,00)	(264.733.890,00)	0,00	(392.682.223,00)	(331.496.516,37)	(61.185.706,63)
92	SD Inpres Maunori	(104.392.865,28)	(289.268.097,60)	0,00	(393.660.962,88)	(352.066.594,20)	(41.594.368,68)
93	SD Inpres Nasawewe	(134.058.000,00)	(206.564.183,62)	0,00	(340.622.183,62)	(295.663.816,04)	(44.958.367,58)
94	SD Inpres Witu	(19.382.142,85)	(646.306.507,09)	0,00	(665.688.649,94)	(601.870.902,56)	(63.817.747,38)
95	SD Negeri Bale Sama	(125.194.156,00)	(161.484.360,00)	(1.665.000,00)	(288.343.516,00)	(251.953.545,33)	(36.389.970,67)
96	SD Negeri Keliwatuwea	(117.277.087,14)	(142.965.379,07)	0,00	(260.242.466,21)	(218.865.088,72)	(41.377.377,49)
97	SD Negeri Mauara	(110.374.699,60)	(278.490.226,67)	0,00	(388.864.926,27)	(329.558.995,34)	(59.305.930,93)
98	SD Negeri Nuasele	(73.156.936,78)	(116.543.813,33)	0,00	(189.700.750,11)	(159.831.511,33)	(29.869.238,78)
99	SD Negeri Pomadhedhu	(41.966.571,43)	(295.918.420,01)	0,00	(337.884.991,44)	(292.117.019,95)	(45.767.971,49)
100	SD Inpres Aekela	(149.536.867,28)	(430.171.836,24)	0,00	(579.708.703,52)	(495.255.480,42)	(84.453.223,10)
101	SD Inpres Batalewa	(114.290.650,00)	(368.339.516,66)	(14.443.452,39)	(497.073.619,05)	(413.578.453,33)	(83.495.165,72)
102	SD Inpres Boki	(103.801.000,00)	(373.273.573,33)	0,00	(477.074.573,33)	(419.764.365,83)	(57.310.207,50)
103	SD Inpres Boloroga	(159.896.500,00)	(161.144.410,66)	0,00	(321.040.910,66)	(405.741.547,33)	84.700.636,67
104	SD Inpres Ebetada	(76.099.639,30)	(551.663.610,00)	0,00	(627.763.249,30)	(564.840.154,92)	(62.923.094,38)
105	SD Inpres Kajusopi	(81.998.140,00)	(418.503.421,11)	0,00	(500.501.561,11)	(457.382.533,75)	(43.119.027,36)
106	SD Inpres Ledho	(138.722.362,84)	(427.793.570,00)	(18.000.000,00)	(584.515.932,84)	(537.891.631,43)	(46.624.301,41)
107	SD Inpres Mauponggo	(129.502.100,00)	(460.299.818,34)	0,00	(589.801.918,34)	(518.228.346,67)	(71.573.571,67)
108	SD Inpres Natasule	(185.445.344,00)	(352.686.982,08)	0,00	(538.132.326,08)	(463.152.333,08)	(74.979.993,00)
109	SD Inpres Tanatoyo	(214.061.741,18)	(208.540.580,00)	0,00	(422.602.321,18)	(344.297.226,86)	(78.305.094,32)
110	SD Inpres Wolooka	(131.878.399,80)	(657.571.493,97)	0,00	(789.449.893,77)	(729.597.120,87)	(59.852.772,90)
111	SD Negeri Batawa	(109.242.340,00)	(315.679.286,67)	0,00	(424.921.626,67)	(375.606.676,67)	(49.314.950,00)
112	SD Negeri Mauwaru	(167.177.383,00)	(558.954.924,37)	0,00	(726.132.307,37)	(778.377.620,47)	52.245.313,10
113	SD Negeri Obooja	(108.203.700,00)	(370.275.496,66)	0,00	(478.479.196,66)	(423.334.300,08)	(55.144.896,58)
114	SD Negeri Uluwagha	(96.439.421,00)	(501.901.263,29)	(1.394.547,60)	(599.735.231,89)	(539.578.348,54)	(60.156.883,35)
115	SD Negeri Wolotoba	(52.180.000,00)	(186.300.000,00)	0,00	(238.480.000,00)	(187.469.166,67)	(51.010.833,33)
116	SD Inpres Dombe	(53.397.936,00)	(227.378.460,00)	(8.323.333,34)	(289.099.729,34)	(251.223.138,67)	(37.876.590,67)
117	SD Inpres Kotakeo	(108.517.737,00)	(416.258.871,61)	0,00	(524.776.608,61)	(596.928.203,53)	72.151.594,92
118	SD Inpres Lea	(78.192.030,00)	(370.437.178,33)	(750.000,00)	(449.379.208,33)	(408.052.920,00)	(41.326.288,33)
119	SD Inpres Madambake	(131.529.068,71)	(682.827.781,60)	0,00	(814.356.850,31)	(769.402.399,18)	(44.954.451,13)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022			Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022	Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
120	SD Inpres Ndetu	(63.848.333,00)	(216.070.263,34)	0,00	(279.918.596,34)	(219.364.451,37)	(60.554.144,97)
121	SD Inpres Ndora	(236.795.633,00)	(293.411.749,85)	0,00	(530.207.382,85)	(439.274.472,27)	(90.932.910,58)
122	SD Inpres Sorowea	(207.358.166,00)	(472.866.404,38)	0,00	(680.224.570,38)	(590.939.622,84)	(89.284.947,54)
123	SD Inpres Tendakowe	(68.109.000,00)	(436.286.858,34)	0,00	(504.395.858,34)	(473.006.021,67)	(31.389.836,67)
124	SD Inpres Tongatey	(56.738.425,00)	(470.482.534,00)	0,00	(527.220.959,00)	(475.050.811,33)	(52.170.147,67)
125	SD Inpres Tuanio	(145.023.152,67)	(33.495.720,00)	(3.000.000,00)	(181.518.872,67)	(239.768.877,00)	58.250.004,33
126	SD Inpres Udumabha	(112.638.071,18)	(336.366.663,76)	0,00	(449.004.734,94)	(399.621.517,31)	(49.383.217,63)
127	SD Inpres Wodomia	(71.149.500,00)	(534.499.883,33)	0,00	(605.649.383,33)	(559.288.138,33)	(46.361.245,00)
128	SD Negeri Aegela	(97.768.551,00)	(191.557.066,66)	0,00	(289.325.617,66)	(251.781.771,03)	(37.543.846,63)
129	SD Negeri Boalobo	(54.882.738,40)	(54.776.400,00)	0,00	(109.659.138,40)	(87.964.456,60)	(21.694.681,80)
130	SD Negeri Fataleke	(136.439.115,01)	(279.054.264,79)	0,00	(415.493.379,80)	(359.062.923,66)	(56.430.456,14)
131	SD Negeri Koli	(51.876.477,00)	(137.681.800,00)	0,00	(189.558.277,00)	(149.977.715,67)	(39.580.561,33)
132	SD Negeri Mbamo	(89.559.074,51)	(333.903.135,95)	0,00	(423.462.210,46)	(386.767.852,15)	(36.694.358,31)
133	SD Negeri Ndenasangi	(124.594.737,00)	(490.675.961,94)	(5.000.000,00)	(620.270.698,94)	(574.596.683,60)	(45.674.015,34)
134	SD Negeri Ndetunura	(94.350.537,80)	(388.828.439,17)	0,00	(483.178.976,97)	(423.028.132,90)	(60.150.844,07)
135	SD Negeri Ndora	(78.907.891,18)	(36.709.376,67)	0,00	(115.617.267,85)	(88.186.753,53)	(27.430.514,32)
136	SD Inpres Kobakua	(48.919.031,40)	(690.892.772,44)	0,00	(739.811.803,84)	(702.807.966,16)	(37.003.837,68)
137	SD Inpres Raterunu	(109.983.695,00)	(325.133.516,66)	0,00	(435.117.211,66)	(376.475.995,03)	(58.641.216,63)
138	SD Negeri Anakoli	(87.307.579,60)	(436.312.900,00)	0,00	(523.620.479,60)	(447.998.122,67)	(75.622.356,93)
139	SD Negeri Kaburea	(82.107.923,20)	(757.331.882,00)	0,00	(839.439.805,20)	(765.965.312,80)	(73.474.492,40)
140	SD Negeri Kuru	(171.280.141,18)	(419.312.040,00)	(760.000,00)	(591.352.181,18)	(520.317.933,53)	(71.034.247,65)
141	SD Negeri Nipado	(137.109.541,18)	(58.927.898,21)	(10.599.999,99)	(206.637.439,38)	(161.983.375,52)	(44.654.063,86)
142	Dinas Kesehatan	(10.991.076.237,48)	(3.155.465.804,89)	(241.536.391,64)	(14.388.078.434,01)	(13.299.783.545,67)	(1.088.294.888,34)
143	UPT Dinas Puskesmas Danga	(4.277.645.490,29)	(4.040.568.542,70)	(228.029.272,99)	(8.546.243.305,98)	(7.052.511.082,25)	(1.493.732.223,73)
144	UPT Dinas Puskesmas Kaburea	(3.463.842.035,19)	(2.724.645.223,24)	(154.245.530,83)	(6.342.732.789,26)	(5.366.121.479,27)	(976.611.309,99)
145	UPT Dinas Puskesmas Nangaroro	(4.415.035.857,87)	(3.594.878.994,69)	(159.967.062,91)	(8.169.881.915,47)	(6.744.533.645,03)	(1.425.348.270,44)
146	UPT Dinas Puskesmas Maunori	(3.967.843.594,42)	(3.241.650.110,81)	(30.010.714,38)	(7.239.504.419,61)	(6.456.545.819,87)	(782.958.599,74)
147	UPT Dinas Puskesmas Mauponggo	(4.693.416.744,03)	(3.198.279.658,60)	(771.554.635,33)	(8.663.251.037,96)	(7.248.026.751,21)	(1.415.224.286,75)
148	UPT Dinas Puskesmas Boawae	(4.247.897.799,30)	(2.170.177.639,83)	(830.304.179,45)	(7.248.379.618,58)	(6.995.099.296,73)	(253.280.321,85)
149	UPT Dinas Puskesmas Jawakisa	(3.942.687.856,06)	(1.420.271.214,65)	(422.275.624,34)	(5.785.234.695,05)	(5.430.515.452,12)	(354.719.242,93)
150	UPT Dinas Puskesmas Utetoto	(1.439.433.716,82)	(990.184.690,32)	(102.886.591,38)	(2.532.504.998,52)	0,00	(2.532.504.998,52)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022			Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022	Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
151	Rumah Sakit Umum Daerah Aeraemo	(53.670.223.016,48)	(8.026.260.631,65)	(3.219.611.145,53)	(64.916.094.793,66)	(53.571.027.131,52)	(11.345.067.662,14)
152	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(15.599.531.839,37)	(4.499.111.980,81)	(538.688.816.586,50)	(558.787.460.406,68)	(491.976.541.329,12)	(66.810.919.077,56)
153	Badan Layanan Umum Daerah - SPAM	(950.408.469,85)	(680.021.962,97)	(4.711.190.804,58)	(6.341.621.237,40)	(5.778.884.098,73)	(562.737.138,67)
154	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(739.874.066,01)	(179.963.016,66)	(2.028.252.380,25)	(2.948.089.462,92)	(2.806.212.785,38)	(141.876.677,54)
155	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	(1.594.296.194,49)	(67.807.894,66)	(158.260.000,00)	(1.820.364.089,15)	(1.860.134.985,82)	39.770.896,67
156	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	(498.381.560,71)	0,00	0,00	(498.381.560,71)	(491.817.246,43)	(6.564.314,28)
157	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.549.927.044,00)	0,00	(2.265.681.729,11)	(4.815.608.773,11)	(3.939.664.196,47)	(875.944.576,64)
158	Dinas Sosial	(1.328.464.072,08)	(322.352.533,33)	(7.694.850,01)	(1.658.511.455,42)	(1.472.933.713,20)	(185.577.742,22)
159	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(271.276.214,28)	0,00	0,00	(271.276.214,28)	(216.541.407,14)	(54.734.807,14)
160	Dinas Pangan Daerah	(1.062.624.086,99)	(29.593.022,23)	(5.400.000,00)	(1.097.617.109,22)	(1.092.633.190,97)	(4.983.918,25)
161	Dinas Lingkungan Hidup	(2.050.877.874,09)	(417.657.584,53)	(212.659.733,33)	(2.681.195.191,95)	(2.419.425.973,54)	(261.769.218,41)
162	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.997.729.355,86)	(39.041.733,33)	0,00	(2.036.771.089,19)	(1.728.854.838,10)	(307.916.251,09)
163	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan PA	(1.222.236.645,53)	(381.243.411,11)	(13.000.000,00)	(1.616.480.056,64)	(1.654.299.509,75)	37.819.453,11
164	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(4.477.137.428,97)	(624.952.397,29)	(5.574.695,00)	(5.107.664.521,26)	(5.309.400.021,76)	201.735.500,50
165	Dinas Perhubungan	(7.197.049.251,34)	(5.095.646.554,92)	(10.363.733.790,40)	(22.656.429.596,66)	(7.618.664.863,96)	(15.037.764.732,70)
166	Dinas Komunikasi dan Informasi	(2.755.827.438,86)	(662.147.458,34)	(1.053.011.292,99)	(4.470.986.190,19)	(3.963.585.439,80)	(507.400.750,39)
167	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	(2.019.519.817,77)	(8.817.379.642,39)	(305.321.529,24)	(11.142.220.989,40)	(9.319.220.509,34)	(1.823.000.480,06)
168	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.019.649.798,73)	(248.833.600,00)	(7.320.000,00)	(1.275.803.398,73)	(1.127.576.767,31)	(148.226.631,42)
169	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(247.472.400,00)	(37.539.605,80)	0,00	(285.012.005,80)	(244.433.885,60)	(40.578.120,20)
170	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.100.126.140,26)	(391.253.106,66)	(4.875.000,00)	(1.496.254.246,92)	(978.447.934,23)	(517.806.312,69)
171	Dinas Kelautan dan Perikanan	(2.420.277.028,43)	(1.676.434.561,03)	(1.075.738.972,30)	(5.172.450.561,76)	(4.882.002.888,99)	(290.447.672,77)
172	Dinas Pariwisata	(927.811.107,14)	(377.944.896,05)	(1.149.209.218,59)	(2.454.965.221,78)	(2.041.604.301,93)	(413.360.919,85)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022			Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022	Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
173	Dinas Pertanian	(7.637.451.565,33)	(1.973.428.171,10)	(298.471.814,07)	(9.909.351.550,50)	(9.044.036.313,80)	(865.315.236,70)
174	Dinas Peternakan	(2.704.051.255,72)	(1.804.303.980,66)	(164.230.478,60)	(4.672.585.714,98)	(4.100.631.137,65)	(571.954.577,33)
175	Sekretariat Daerah	(1.761.548.679,59)	(402.415.367,97)	(21.642.153,30)	(2.185.606.200,86)	(2.308.785.794,70)	123.179.593,84
176	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	(463.492.014,29)	0,00	(1.245.000,00)	(464.737.014,29)	(639.022.092,86)	174.285.078,57
177	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	(618.613.164,29)	0,00	0,00	(618.613.164,29)	(588.027.528,57)	(30.585.635,72)
178	Bagian Hukum	(355.424.290,00)	0,00	0,00	(355.424.290,00)	(405.800.995,00)	50.376.705,00
179	Bagian Organisasi	(467.846.444,53)	0,00	0,00	(467.846.444,53)	(486.792.247,69)	18.945.803,16
180	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	(975.922.409,10)	0,00	(18.387.600,00)	(994.310.009,10)	(921.898.142,05)	(72.411.867,05)
181	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(572.913.307,14)	(103.467.500,00)	0,00	(676.380.807,14)	(695.011.545,24)	18.630.738,10
182	Bagian Administrasi Umum	(6.951.559.350,57)	(8.024.504.044,33)	(82.016.751,23)	(15.058.080.146,13)	(13.776.691.379,11)	(1.281.388.767,02)
183	Bagian Pemerintahan	(602.849.747,50)	0,00	0,00	(602.849.747,50)	(586.707.385,71)	(16.142.361,79)
184	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(4.450.582.146,40)	(59.377.359,15)	(13.314.666,66)	(4.523.274.172,21)	(4.140.068.876,73)	(383.205.295,48)
185	Kecamatan Mauponggo	(541.099.585,71)	(723.717.908,34)	(230.000.000,00)	(1.494.817.494,05)	(1.266.859.671,43)	(227.957.822,62)
186	Kelurahan Mauponggo	(108.578.480,00)	(1.999.999,99)	(317.889.200,14)	(428.467.680,13)	(350.753.298,43)	(77.714.381,70)
187	Kecamatan Nangaroro	(685.080.009,51)	(503.014.243,74)	(393.874.449,94)	(1.581.968.703,19)	(1.479.772.250,53)	(102.196.452,66)
188	Kelurahan Nangaroro	(106.940.739,20)	0,00	(373.461.759,45)	(480.402.498,65)	(391.553.553,14)	(88.848.945,51)
189	Kecamatan Aesesa	(632.355.576,77)	(812.043.105,86)	(118.734.942,25)	(1.563.133.624,88)	(1.273.373.798,43)	(289.759.826,45)
190	Kelurahan Towak	(67.978.306,00)	(30.839.764,27)	(88.008.730,30)	(186.826.800,57)	(158.868.549,60)	(27.958.250,97)
191	Kelurahan Dhawe	(99.452.600,00)	(8.266.666,67)	(25.075.320,00)	(132.794.586,67)	(126.105.409,76)	(6.689.176,91)
192	Kelurahan Lape	(146.831.194,99)	(171.467.133,34)	0,00	(318.298.328,33)	(275.221.007,02)	(43.077.321,31)
193	Kelurahan Mbay I	(134.857.397,50)	(137.483.074,00)	0,00	(272.340.471,50)	(246.987.402,40)	(25.353.069,10)
194	Kelurahan Danga	(96.615.657,15)	(270.852.413,34)	(10.393.833,32)	(377.861.903,81)	(334.994.169,84)	(42.867.733,97)
195	Kelurahan Mbay II	(88.677.750,01)	(108.665.370,13)	(1.624.999,99)	(198.968.120,13)	(182.573.213,07)	(16.394.907,06)
196	Kecamatan Boawae	(667.456.730,70)	(954.640.225,54)	(6.900.000,01)	(1.628.996.956,25)	(1.639.741.838,43)	10.744.882,18
197	Kelurahan Ratongamobo	(64.223.150,00)	(135.545.751,13)	(291.766.700,00)	(491.535.601,13)	(417.632.116,87)	(73.903.484,26)
198	Kelurahan Natanage	(62.342.863,20)	(422.023.744,44)	(73.437.490,00)	(557.804.097,64)	(484.979.626,60)	(72.824.471,04)
199	Kelurahan Natanage Timur	(59.645.182,00)	(55.601.147,00)	(294.704.900,00)	(409.951.229,00)	(336.924.218,53)	(73.027.010,47)
200	Kelurahan Nageoga	(113.357.510,00)	(161.187.748,89)	(299.705.900,00)	(574.251.158,89)	(516.216.686,67)	(58.034.472,22)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022			Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022	Total Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
201	Kelurahan Wolopogo	(109.041.124,50)	(87.147.163,00)	(532.953.500,80)	(729.141.788,30)	(619.150.606,60)	(109.991.181,70)
202	Kelurahan Rega	(56.518.250,00)	(26.666.666,67)	(388.814.896,00)	(471.999.812,67)	(371.626.453,67)	(100.373.359,00)
203	Kelurahan Olakile	(82.967.433,80)	(100.086.525,00)	(178.036.620,00)	(361.090.578,80)	(309.070.071,90)	(52.020.506,90)
204	Kelurahan Nagesapadhi	(45.542.460,00)	0,00	(275.522.400,00)	(321.064.860,00)	(326.812.300,00)	5.747.440,00
205	Kecamatan Wolowae	(716.503.669,61)	(790.792.551,59)	(21.417.376,92)	(1.528.713.598,12)	(1.382.723.186,85)	(145.990.411,27)
206	Kecamatan Keo Tengah	(600.555.000,00)	(394.783.642,98)	0,00	(995.338.642,98)	(898.763.187,70)	(96.575.455,28)
207	Kecamatan Aesesa Selatan	(613.617.608,57)	(573.089.033,33)	(93.976.960,00)	(1.280.683.601,90)	(1.222.528.495,95)	(58.155.105,95)
208	Inspektorat	(1.401.804.801,60)	(404.186.583,33)	(3.217.500,00)	(1.809.208.884,93)	(1.842.524.184,50)	33.315.299,57
209	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(1.405.718.507,80)	(19.716.666,66)	(44.503.158,34)	(1.469.938.332,80)	(1.910.472.990,19)	440.534.657,39
210	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	(5.962.006.037,17)	(225.804.890,13)	(78.121.169,51)	(6.265.932.096,81)	(8.815.519.506,93)	2.549.587.410,12
212	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	(1.276.083.286,00)	0,00	0,00	(1.276.083.286,00)	(1.273.403.127,00)	(2.680.159,00)
	TOTAL	(217.899.506.334,64)	(141.239.704.990,46)	(573.434.759.523,81)	(932.573.970.848,91)	(811.147.754.658,38)	(121.426.216.190,53)



5.3.1.3 Dana Cadangan

Tidak terdapat saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.978.538.860,06 mengalami penurunan sebesar Rp8.519.764.427,62 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp61.498.303.287,68.

Selanjutnya mengenai gambaran Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam kurun waktu Tahun 2021 – 2022 disajikan pada Tabel 5.78 berikut ini:

Tabel 5.78
Aset Lainnya TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi		31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.684.309.110,01	0,00	1.276.650.316,01	6.407.658.794,00
4	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tidak Berwujud	4.591.691.220,00	115.720.000,00	0,00	4.707.411.220,00
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.521.708.849,00)	0,00	437.517.622,00	(2.959.226.471,00)
7	Aset Lain-lain	78.928.222.090,75	0,00	3.159.930.055,85	75.768.292.034,90
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(27.184.210.284,08)	0,00	4.809.606.698,76	(31.993.816.982,84)
9	Aset Lain-lain – TDF-TKD	0,00	1.048.220.265,00	0,00	1.048.220.265,00
Jumlah Aset Lainnya		61.498.303.287,68	1.163.940.265,00	9.683.704.692,62	52.978.538.860,06

5.3.1.4.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3.1.4.1.2 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat saldo Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3.1.4.1.3 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.407.658.794,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.276.650.316,01 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp7.684.309.110,01. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Nilai mengalami penurunan sebesar Rp1.276.650.316,01 berasal dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Koreksi Saldo Awal:
 - a. Mutasi tambah temuan Inspektorat Kabupaten yang belum dicatat pada tahun 2021 sebesar Rp44.850.100,00
 - b. Mutasi kurang temuan Inspektorat Kabupaten yang belum dicatat pada tahun 2021 sebesar Rp11.760.000,00
2. Mutasi Tahun 2022
 - 2.1 BPK RI:
 - a) Mutasi penambahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp247.642.735,1, merupakan temuan BPK RI pada tahun 2022;
 - b) Mutasi pengurangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp43.884.600,00, merupakan realisasi penyetoran di tahun 2022 atas temuan BPK RI.
 - 2.2 Inspektorat Kabupaten :
 - a) Mutasi penambahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp202.617.100,00, merupakan temuan Inspektorat Kabupaten pada tahun 2022;
 - b) Mutasi pengurangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.716.115.651,14, merupakan realisasi penyetoran di tahun 2022 atas temuan Inspektorat kabupaten.
(Rinciannya dapat dilihat pada lampiran N-8).

5.3.1.4.1.4 Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tidak terdapat saldo Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3.1.4.1.5 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Saldo Aset tidak berwujud Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.707.411.220,00 mengalami peningkatan sebesar Rp115.720.000,00 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp4.591.691.220,00.

Selanjutnya mengenai gambaran Aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam kurun waktu Tahun 2021 – 2022 disajikan pada Tabel 5.79 berikut ini:

**Tabel 5.79
Aset Tidak Berwujud Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

Akun	Aset Tidak Berwujud 2022	Aset Tidak Berwujud 2021	Bertambah/ Berkurang
Software	3.618.774.720,00	3.602.354.720,00	16.420.000,00
Kajian	1.088.636.500,00	989.336.500,00	99.300.000,00
Jumlah Aset Tidak Berwujud	4.707.411.220,00	4.591.691.220,00	115.720.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Penurunan aset tidak berwujud sebesar Rp115.720.000,00 berasal dari:

1. Mutasi penambahan aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Nagekeo 2022 sebesar Rp115.720.000,00 yang diperoleh dari reklasifikasi aset tak berwujud dari aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Keuangan Daerah berupa Antivirus *Kaspersky Small Office* sebesar Rp14.420.000,00, reklasifikasi aset tak berwujud yang direklas dari aset tetap lainnya pada Dinas PUPR sebesar Rp99.300.000,00 berupa Kajian Teknis Air Bersih Wilayah Aesesa Selatan dan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa Software Editing Video sebesar Rp2.000.000,00;

Rincian Aset Tidak Berwujud Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel 5.80 berikut ini:

Tabel 5.80
Rincian Aset Tidak Berwujud Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

PERANGKAT DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD 2022	ASET TIDAK BERWUJUD 2021	BERTAMBAH/BERKURANG
Dinas Kesehatan	0,00	185.460.000,00	(185.460.000,00)
UPT Dinas Puskesmas Danga	185.460.000,00	0,00	185.460.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Aeram	201.099.470,00	201.099.470,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	742.278.500,00	642.978.500,00	99.300.000,00
Badan Layanan Umum Daerah - SPAM	519.145.000,00	519.145.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informasi	685.407.000,00	685.407.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	379.660.000,00	377.660.000,00	2.000.000,00
Dinas Pariwisata	49.940.000,00	49.940.000,00	0,00
Dinas Pertanian	199.020.000,00	199.020.000,00	0,00
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	281.359.850,00	281.359.850,00	0,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Kecamatan Wolowae	69.795.000,00	69.795.000,00	0,00
Inspektorat	155.993.000,00	155.993.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	430.140.000,00	430.140.000,00	0,00
Badan Keuangan Daerah (SKPD)	738.113.400,00	723.693.400,00	14.420.000,00
Jumlah Aset Tidak Berwujud	4.707.411.220,00	4.591.691.220,00	115.720.000,00

5.3.1.4.1.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2022 sebesar Rp(2.959.226.471,00) mengalami penurunan sebesar Rp437.517.622,00 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp(2.521.708.849,00).



Tabel 5.81

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Akun	Aset Tidak Berwujud 2022	Aset Tidak Berwujud 2021	Bertambah/ Berkurang
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.959.226.471,00)	(2.521.708.849,00)	(437.517.622,00)
JUMLAH	(2.959.226.471,00)	(2.521.708.849,00)	(437.517.622,00)

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Kabupaten Nagekeo dapat dilihat tabel 5.81 berikut ini:

Tabel 5.82

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

PERANGKAT DAERAH	AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD S/D TAHUN 2022	AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD S/D TAHUN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
Dinas Kesehatan	0,00	(37.092.000,00)	37.092.000,00
UPT Dinas Puskesmas Danga	(55.638.000,00)	0,00	(55.638.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo	(60.329.841,00)	(40.219.894,00)	(20.109.947,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(330.061.000,00)	(271.809.150,00)	(58.251.850,00)
Badan Layanan Umum Daerah - SPAM	(467.230.500,00)	(415.316.000,00)	(51.914.500,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(40.000.000,00)	(40.000.000,00)	0,00
Dinas Komunikasi dan Informasi	(596.529.900,00)	(527.989.200,00)	(68.540.700,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(264.562.000,00)	(226.596.000,00)	(37.966.000,00)
Dinas Pariwisata	(9.988.000,00)	(4.994.000,00)	(4.994.000,00)
Dinas Pertanian	(79.608.000,00)	(59.706.000,00)	(19.902.000,00)
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	(147.015.970,00)	(126.229.985,00)	(20.785.985,00)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(15.000.000,00)	(12.000.000,00)	(3.000.000,00)
Kecamatan Wolowae	(13.959.000,00)	(6.979.500,00)	(6.979.500,00)
Inspektorat	(46.797.900,00)	(31.198.600,00)	(15.599.300,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(232.923.000,00)	(190.906.500,00)	(42.016.500,00)
Badan Keuangan Daerah (SKPD)	(599.583.360,00)	(530.672.020,00)	(68.911.340,00)
Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.959.226.471,00)	(2.521.708.849,00)	(437.517.622,00)

5.3.1.4.1.7 Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya dengan cara melakukan reklasifikasi harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Saldo Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.768.292.034,90 mengalami penurunan sebesar Rp3.159.930.055,85 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp78.928.222.090,75. Penurunan saldo aset lain-lain sebesar Rp3.159.930.055,85 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi penambahan aset lain-lain yang direklas dari aset tetap sebesar Rp6.262.366.709,99 dengan rincian reklasifikasi dari peralatan mesin Rp.5.295.398.557,99, reklasifikasi dari gedung dan bangunan sebesar Rp966.968.152,00;
2. Mutasi pengurangan aset lain-lain sebesar Rp9.422.296.765,84 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mutasi pengurangan aset lain-lain karena penghapusan sebesar Rp 1.546.748.891,05 dengan rincian yaitu penghapusan aset lain-lain gedung dan bangunan pada Dinas P dan K sebesar Rp591.278.925,05 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/435/XII/2022, penghapusan aset lain-lain peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp17.050.000,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/450/XII/2022, penghapusan peralatan dan mesin dan JIJ pada Dinas Pariwisata sebesar Rp219.399.699,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/323/VIII/2022, penghapusan peralatan dan mesin pada Bagian Hukum sebesar Rp94.093.767,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/325/VIII/2022; penghapusan peralatan dan mesin pada Bappelitbangda sebesar Rp319.346.900,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/322/VIII/2022; dan penghapusan peralatan dan mesin pada Bappelitbangda sebesar Rp305.579.600,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 065.3/BO-NGK/324/VIII/2022
 - b) Mutasi koreksi pengurangan nilai aset lain-lain sebesar Rp7.875.547.874,79 dengan rincian yaitu pengurangan aset lain-lain Dinas PUPR berupa jalan desa yang dihibahkan ke desa sebesar Rp901.345.825,00, dan koreksi kurang aset lain-lain pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp6.974.202.049,79 berupa nilai tanah Maroladho yang merupakan tanah diluar tanah Pemda yang sebelumnya dicatat gabung dengan tanah Pemda;

(Rinciannya dapat dilihat pada lampiran N-10)

Rincian Aset lain lain Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel 5.82 berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.83
Rincian Aset Lain lain Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	ASET LAIN LAIN PER 31 DESEMBER 2022	ASET LAIN LAIN PER 31 DESEMBER 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.250.069.903,16	18.791.963.828,21	(541.893.925,05)
2	SD Inpres Butata	850.302.602,00	850.302.602,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	10.256.057.336,00	10.227.117.336,00	28.940.000,00
4	UPT Dinas Puskesmas Danga	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
5	UPT Dinas Puskesmas Maunori	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
6	UPT Dinas Puskesmas Boawae	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.477.178.000,00	12.327.353.825,00	(850.175.825,00)
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	499.491.357,00	353.188.857,00	146.302.500,00
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	460.691.600,00	241.287.600,00	219.404.000,00
10	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	16.182.400,00	16.182.400,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.850.000,00	36.850.000,00	0,00
12	Dinas Sosial	62.639.800,00	47.789.800,00	14.850.000,00
13	Dinas Pangan Daerah	405.693.850,00	372.762.600,00	32.931.250,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	1.940.646.300,00	1.940.646.300,00	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	141.596.300,00	141.596.300,00	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan PA	181.029.333,33	61.536.000,00	119.493.333,33
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	587.033.849,99	434.992.100,00	152.041.749,99
18	Dinas Perhubungan	655.099.167,00	134.647.767,00	520.451.400,00
19	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	350.471.750,00	0,00	350.471.750,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	184.767.850,00	133.152.850,00	51.615.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60.850.000,00	9.000.000,00	51.850.000,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.191.689.467,00	6.175.458.300,00	16.231.167,00
23	Dinas Pariwisata	117.250.000,00	219.399.699,00	(102.149.699,00)
24	Dinas Pertanian	630.579.000,00	630.579.000,00	0,00
25	Dinas Peternakan	1.115.550.000,00	1.115.550.000,00	0,00
26	Sekretariat Daerah	316.000.000,00	4.000.000,00	312.000.000,00
27	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	247.460.400,00	61.504.000,00	185.956.400,00
28	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00
29	Bagian Hukum	63.644.000,00	94.093.767,00	(30.449.767,00)
30	Bagian Organisasi	56.503.540,67	0,00	56.503.540,67
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
32	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	119.844.400,00	85.344.400,00	34.500.000,00
33	Bagian Administrasi Umum	1.502.721.884,00	1.445.771.884,00	56.950.000,00
34	Bagian Pemerintahan	132.484.200,00	132.484.200,00	0,00
35	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.157.193.050,00	2.157.193.050,00	0,00
36	Kecamatan Mauponggo	87.207.454,00	87.207.454,00	0,00
37	Kelurahan Mauponggo	75.850.000,00	75.850.000,00	0,00
38	Kelurahan Nangaroro	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
39	Kecamatan Aesesa	307.564.875,00	307.564.875,00	0,00
40	Kelurahan Towak	53.306.100,00	53.306.100,00	0,00
41	Kelurahan Dhawe	15.471.516,00	15.471.516,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	ASET LAIN LAIN PER 31 DESEMBER 2022	ASET LAIN LAIN PER 31 DESEMBER 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
42	Kelurahan Lape	33.822.600,00	33.822.600,00	0,00
43	Kelurahan Mbay I	12.715.000,00	12.715.000,00	0,00
44	Kelurahan Danga	19.655.225,00	19.655.225,00	0,00
45	Kelurahan Mbay II	30.462.600,00	30.462.600,00	0,00
46	Kecamatan Boawae	539.703.902,00	71.340.500,00	468.363.402,00
47	Kelurahan Ratongamobo	24.371.600,00	24.371.600,00	0,00
48	Kelurahan Natanage	303.814.550,00	303.814.550,00	0,00
49	Kelurahan Natanage Timur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
50	Kelurahan Nageoga	219.231.093,00	219.231.093,00	0,00
51	Kelurahan Wolopogo	26.383.000,00	26.383.000,00	0,00
52	Kelurahan Rega	22.885.600,00	22.885.600,00	0,00
53	Kelurahan Olakile	17.489.524,00	17.489.524,00	0,00
54	Kelurahan Nagesapadhi	211.715.200,00	46.732.200,00	164.983.000,00
55	Kecamatan Wolowae	84.798.000,00	84.798.000,00	0,00
56	Kecamatan Keo Tengah	46.029.400,00	46.029.400,00	0,00
57	Kecamatan Aesesa Selatan	102.599.000,00	84.349.000,00	18.250.000,00
58	Inspektorat	192.974.400,00	47.434.400,00	145.540.000,00
59	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	187.690.000,00	319.346.900,00	(131.656.900,00)
60	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	13.856.920.055,75	18.358.032.888,54	(4.501.112.832,79)
61	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	97.310.000,00	316.679.600,00	(219.369.600,00)
Jumlah Aset Lain-lain		75.768.292.034,90	78.928.222.090,75	(3.159.930.055,85)

5.3.1.4.1.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2022 sebesar Rp(31.993.816.982,84) mengalami penurunan sebesar Rp4.809.606.698,76 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp(27.184.210.284,08). Penurunan saldo aset lain-lain sebesar Rp4.809.606.698 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain yang direklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp(5.773.748.348,26);
- Mutasi Pengurangan akumulasi penyusutan asset lain-lain yang dihapuskan sebesar Rp964.141.649,50.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset lainnya Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel 5.83 berikut ini:

Tabel 5.84
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN S/D TAHUN 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN S/D TAHUN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.337.136.143,39)	(5.436.187.758,16)	99.051.614,77
2	SD Inpres Butata	(396.807.880,93)	(396.807.880,93)	0,00
3	Dinas Kesehatan	(9.783.886.949,33)	(9.752.511.235,04)	(31.375.714,29)
4	UPT Dinas Puskesmas Danga	(17.000.000,00)	0,00	(17.000.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN S/D TAHUN 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN S/D TAHUN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
5	UPT Dinas Puskesmas Maunori	(17.000.000,00)	0,00	(17.000.000,00)
6	UPT Dinas Puskesmas Boawae	(17.000.000,00)	0,00	(17.000.000,00)
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(126.516.320,00)	(75.346.320,00)	(51.170.000,00)
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(369.868.200,00)	(223.565.700,00)	(146.302.500,00)
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	(447.323.742,86)	(227.919.742,86)	(219.404.000,00)
10	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	(16.182.400,00)	(16.182.400,00)	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(36.850.000,00)	(36.850.000,00)	0,00
12	Dinas Sosial	(61.744.800,00)	(46.894.800,00)	(14.850.000,00)
13	Dinas Pangan Daerah	(382.054.564,29)	(349.123.314,29)	(32.931.250,00)
14	Dinas Lingkungan Hidup	(800.686.610,00)	(800.686.610,00)	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(128.745.300,00)	(128.745.300,00)	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan PA	(181.029.333,33)	(61.536.000,00)	(119.493.333,33)
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(573.579.749,99)	(421.538.000,00)	(152.041.749,99)
18	Dinas Perhubungan	(621.137.345,00)	(100.685.945,00)	(520.451.400,00)
19	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	(183.660.875,00)	0,00	(183.660.875,00)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(184.580.287,50)	(132.965.287,50)	(51.615.000,00)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(60.850.000,00)	(9.000.000,00)	(51.850.000,00)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	(5.385.281.467,00)	(5.369.050.300,00)	(16.231.167,00)
23	Dinas Pariwisata	(117.250.000,00)	(119.044.519,88)	1.794.519,88
24	Dinas Pertanian	(583.234.568,57)	(583.234.568,57)	0,00
25	Dinas Peternakan	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat Daerah	(316.000.000,00)	(4.000.000,00)	(312.000.000,00)
27	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	(245.660.400,00)	(59.704.000,00)	(185.956.400,00)
28	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	(18.250.000,00)	0,00	(18.250.000,00)
29	Bagian Hukum	(63.644.000,00)	(90.271.624,14)	26.627.624,14
30	Bagian Organisasi	(56.503.540,67)	0,00	(56.503.540,67)
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	0,00
32	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(119.393.900,00)	(84.893.900,00)	(34.500.000,00)
33	Bagian Administrasi Umum	(61.578.571,43)	(4.628.571,43)	(56.950.000,00)
34	Bagian Pemerintahan	(128.764.200,00)	(128.764.200,00)	0,00
35	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(974.335.910,00)	(974.335.910,00)	0,00
36	Kecamatan Mauponggo	(62.437.396,86)	(62.437.396,86)	0,00
37	Kelurahan Mauponggo	(31.741.279,07)	(31.741.279,07)	0,00
38	Kelurahan Nangaroro	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	0,00
39	Kecamatan Aesesa	(100.504.000,00)	(100.504.000,00)	0,00
40	Kelurahan Towak	(49.413.600,00)	(49.413.600,00)	0,00
41	Kelurahan Dhawe	(15.471.516,00)	(15.471.516,00)	0,00
42	Kelurahan Lape	(30.798.314,29)	(30.798.314,29)	0,00
43	Kelurahan Mbay I	(12.715.000,00)	(12.715.000,00)	0,00
44	Kelurahan Danga	(19.655.225,00)	(19.655.225,00)	0,00
45	Kelurahan Mbay II	(28.526.885,71)	(28.526.885,71)	0,00
46	Kecamatan Boawae	(278.205.058,13)	(44.023.357,14)	(234.181.700,99)
47	Kelurahan Ratongamobo	(24.371.600,00)	(24.371.600,00)	0,00
48	Kelurahan Natanage	(57.084.060,64)	(57.084.060,64)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN S/D TAHUN 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN S/D TAHUN 2021	BERTAMBAH/BERKURANG
49	Kelurahan Natanage Timur	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	0,00
50	Kelurahan Nageoga	(50.304.430,98)	(50.304.430,98)	0,00
51	Kelurahan Wolopogo	(15.167.857,14)	(15.167.857,14)	0,00
52	Kelurahan Rega	(22.885.600,00)	(22.885.600,00)	0,00
53	Kelurahan Olakile	(17.489.524,00)	(17.489.524,00)	0,00
54	Kelurahan Nagesapadhi	(129.223.700,00)	(46.732.200,00)	(82.491.500,00)
55	Kecamatan Wolowae	(42.464.666,67)	(42.464.666,67)	0,00
56	Kecamatan Keo Tengah	(45.499.800,00)	(45.499.800,00)	0,00
57	Kecamatan Aesesa Selatan	(102.494.577,78)	(84.244.577,78)	(18.250.000,00)
58	Inspektorat	(191.970.900,00)	(46.430.900,00)	(145.540.000,00)
59	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(182.555.714,28)	(309.445.400,00)	126.889.685,72
60	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	(2.548.089.217,00)	(75.000.000,00)	(2.473.089.217,00)
61	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	(94.710.000,00)	(290.829.205,00)	196.119.205,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(31.993.816.982,84)	(27.184.210.284,08)	(4.809.606.698,76)

5.3.1.4.1.9 Aset Lain-lain TDF-TKD

Aset lain-lain TDF-TKD berisi Saldo Pokok pada Rekening TDF-TKD Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2022. Saldo aset lain-lain TDF-TKD per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.048.220.265,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.048.220.265,00 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1 Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2022 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.517.701.295,43 mengalami peningkatan sebesar Rp7.019.718.346,61 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp6.497.982.948,82. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.85
Kewajiban Jangka Pendek TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/Berkurang
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.949.155.987,01	2.658.906.317,01	3.290.249.670,00
2	Utang Belanja	4.833.916.498,51	32.181.000,00	4.801.735.498,51
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.734.628.809,91	3.806.895.631,81	(1.072.266.821,90)
Jumlah		13.517.701.295,43	6.497.982.948,82	7.019.718.346,61

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Kabupaten Nagekeo kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.949.155.987,01 mengalami peningkatan sebesar



Rp3.290.249.670,00 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp2.658.906.317,01. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 5.86 berikut:

Tabel 5.86
Utang Perhitungan Fihak Ketiga TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/Berkurang
1.	PFK BUD	5.865.174.809,01	2.592.439.101,01	3.272.735.708,00
2.	PFK OPD	0,00	0,00	0,00
3.	PFK BLUD	0,00	11.732.812,00	(11.732.812,00)
4.	PFK BOS	83.981.178,00	54.734.404,00	29.246.774,00
Jumlah		5.949.155.987,01	2.658.906.317,01	3.290.249.670,00

Dari saldo utang PFK BUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.865.174.809,01 terdiri dari sebesar Rp5.786.397.691,00 merupakan utang PFK murni 2022 dari BUD dan telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp5.639.787.645,00 dan tanggal 03 Februari 2023 sebesar Rp146.610.046,00, sedangkan sebesar Rp57.992.615,28 merupakan utang PFK atas kekeliruan penyeteroran PFK yang terjadi sebelum tahun 2019, dan sebesar Rp20.784.502,73 merupakan utang PFK BUD tahun sebelumnya. *(Rincian dapat dilihat pada lampiran N-11)*

5.3.2.1.2 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.833.916.498,51 mengalami peningkatan sebesar Rp4.801.735.498,51 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp32.181.000,00 yang terdiri atas:

1. Utang belanja pegawai sebesar Rp440.407.498,51 berupa kekurangan pembayaran untuk pegawai dengan status meninggal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.094.400,00 yang belum dibayar karena tidak adanya ahli waris, Sekretariat Daerah sebesar Rp6.167.000,00 yang dibayarkan di tahun 2023; kekurangan pembayaran THR dan Gaji 13 kepada pegawai yang telah meninggal pada Kecamatan Mauponggo sebesar Rp3.815.520,00; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.701.320,00; UPTD Puskesmas Boawae sebesar Rp3.584.052,00 dan BLUD SPAM sebesar Rp412.045.206,51 merupakan utang atas gaji pegawai yang belum dibayar selama bulan Oktober -Desember tahun 2022;
2. Utang belanja barang dan jasa sebesar sebesar Rp4.393.509.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp14.169.000,00 berupa Jasa Pengawasan Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya pada SMPN 2 Aesesa dan pada RSUD Aeramo sebesar Rp4.379.340.000,00 berupa alat medis (*Disposable ECG Elektrode*) yang belum dibayarkan sebesar Rp1.340.000,00; Jasa pelayanan kesehatan yang belum dibayar sebesar Rp4.378.000.000,00.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang belanja dan hutang retensi pemerintah Kabupaten Nagekeo kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Saldo Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2022 Kabupaten Nagekeo sebesar Rp2.734.628.809,91 mengalami penurunan sebesar Rp1.072.266.821,90 dari saldo awal pada tahun 2021 sebesar Rp 3.806.895.631,81. Rincian Hutang Jangka Pendek lainnya dapat dilihat pada tabel 5.86 berikut ini;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel.5.87
Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2022

Perangkat Daerah	Uraian	Jenis Hutang Jangka Pendek Lainnya	Nilai Hutang Jangka Pendek Lainnya
Dinas Sosial	Pembangunan Gedung Kantor Dinas SKCTT Tahun 2009	Hutang Retensi	23.683.450,00
Dinas Kesehatan	Pembangunan Selasar dari ruangan VK keruangan perawatan puskesmas Boawae	Hutang Retensi	1.674.500,00
	Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Mauponggo	Hutang Retensi	3.410.000,00
	Rumah Kepala Dinas (Rehab)	Hutang Retensi	4.480.000,00
	Selasar Puskesmas Danga	Hutang Retensi	1.442.500,00
	Kelanjutan Pembangunan Ruang Pojok Laktasi Pusk. Kaburea	Hutang Retensi	1.690.000,00
	Lanjutan Rehab Berat Rumah Dokter Gigi Pusk. Boawae	Hutang Retensi	1.775.000,00
	Pembangunan Sterilisasi, gudang, dapur dan laundry Jawakisa	Hutang Belanja	20.704.342,00
	Pengawas Mess Petugas Puskesmas Kaburea (2)	Hutang Belanja	37.456.925,00
	Pengawas Mess Petugas Puskesmas Kaburea (1)	Hutang Belanja	37.456.925,00
	Alkes Poliklinik Ruang Rawat Jalan	Hutang Belanja	8.100.000,00
	Alkes Ruang Rawat Inap	Hutang Belanja	4.050.000,00
	Pengawasan TPT RS Pratama Raja	Hutang Belanja	11.999.350,00
Bagian Ekonomi	Pembangunan Pos Jaga Marilewa Kecamatan Wolowae	Hutang Retensi	1.000.000,00
	Pembangunan Pos Jaga Olakile Kecamatan Boawae	Hutang Retensi	1.000.000,00
Kecamatan Keo Tengah	Pembangunan Dapur Rumah Jabatan	Hutang Retensi	2.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Air Bersih Olakile	Hutang Retensi	12.348.500,00
	Lanjutan Pembangunan Jaringan Air Bersih Raja Timur	Hutang Retensi	25.840.000,00
	Lanjutan Pembangunan Jaringan Air Bersih Lowomeli	Hutang Retensi	44.540.000,00
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Aebhaka Desa Kotim Menuju Paroki Maunori	Hutang Retensi	14.859.500,00
	Peningkatan D.I.Pocolodorawe	Hutang Retensi	19.337.600,00
	Pembangunan Embung Molusule	Hutang Retensi	53.353.500,00
	Peningkatan Jalan Nangaroro-Maunura-Maunori (segmen Maunura-Maunori)	Hutang Retensi	249.497.500,00
	Peningkatan Jalan Waelama-Ekodoa Desa Kelewae	Hutang Retensi	7.479.750,00
	Pelebaran Jalan Wajomara-Dhadhowawo Desa Wajomara	Hutang Retensi	9.975.000,00
	Lanjutan Pembukaan Jalan Dekotogo-Kampung Adat Kawa Lambo	Hutang Retensi	5.997.500,00
	Pembangunan Perumahan Masyarakat	Hutang Retensi	3.729.450,00
	Peningkatan jalan dalam kota Mbay	Hutang Retensi	7.874.416,00
	Rehab Rumah Kepala Dinas PU	Hutang Retensi	2.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Perangkat Daerah	Uraian	Jenis Hutang Jangka Pendek Lainnya	Nilai Hutang Jangka Pendek Lainnya
	Pembangunan jalan Kodiwuwu - wuji	Hutang Retensi	9.752.500,00
	Pembukaan jalan translok Gezu	Hutang Retensi	2.250.000,00
	Pembukaan jalan Solo - Lebilaja	Hutang Retensi	2.500.000,00
	Pemahatan cadas Ua - Selalejo	Hutang Retensi	2.250.000,00
	Peningkatan Jalan Raterunu - Watuapi (Agg B)	Hutang Retensi	7.658.000,00
	Saluran pembuangan pengarah arus belakang kantor Bapeddas	Hutang Retensi	2.500.000,00
	Peningkatan Jln Lorong SPP Boawae	Hutang Retensi	1.500.000,00
	Jalan Lego - Rega (Segmen depan Gereja st. Maria wudu)	Hutang Retensi	6.995.000,00
	Jalan Wayupea - Aewoe	Hutang Retensi	15.874.750,00
	Tembok Penyokong rumah Guru di Riti	Hutang Retensi	1.000.000,00
	Peningkatan jalan lingkungan Terabhoja - Wolowayu	Hutang Retensi	2.500.000,00
	Drainase pasar Aewoe	Hutang Retensi	3.983.750,00
	Rabat beton jalan masuk kampung Pajomala	Hutang Retensi	4.745.300,00
	Tembok penyokong lapangan natasule	Hutang Retensi	2.500.000,00
	Tembok penyokong rumah guru Riti	Hutang Retensi	2.500.000,00
	Pembukaan jalan baru Sorowea - Bhungakaka	Hutang Retensi	8.627.200,00
	Pembukaan jalan baru Jawatiwa - Napu - Natabhada	Hutang Retensi	4.539.000,00
	Rabat beton Tonga -SMPN Nangaroro	Hutang Retensi	2.497.300,00
	Pembukaan Jalan Baru Kolija - Garo	Hutang Retensi	10.000.000,00
	Peningkatan Jalan Raja-Maunori (segmen Jembatan Ekoeti)	Hutang Retensi	13.487.500,00
	Peningkatan Jalan Kelimado-Weaau	Hutang Retensi	4.998.650,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SMP SATAP III Nggolonio	Hutang Retensi	5.000.000,00
	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SMP SATAP III Nggolonio	Hutang Retensi	2.143.000,00
	Pembangunan PAH Desa Ngegedhawe	Hutang Retensi	1.250.000,00
	Penanganan Air Bersih Tedakisa	Hutang Retensi	16.510.650,00
	Pembangunan Air Bersih Kolikapa	Hutang Retensi	8.816.950,00
	Penanganan Air Bersih di SD Lambo	Hutang Retensi	3.494.350,00
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Labopondo	Hutang Retensi	7.046.350,00
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Rowa	Hutang Retensi	7.475.500,00
	Pembongkaran pipa eks wugha - wugha	Hutang Retensi	2.500.000,00
	Penanganan air bersih kubhu kana	Hutang Retensi	2.500.000,00
	Pengadaan sumur air minum Mbay I	Hutang Retensi	2.000.000,00
	D.I. Pisakabi	Hutang Retensi	4.592.600,00
	D.I. Watujara	Hutang Retensi	1.250.000,00
	D.I. Mburumere	Hutang Retensi	4.500.000,00
	D.I.Watuapi	Hutang Retensi	4.776.750,00
	Normalisasi Kali Aetoro (Segmen BPP Aetoro)	Hutang Retensi	7.500.000,00
	Boog Duicker Aesesa Selatan	Hutang Retensi	4.979.250,00
	D. I. Aeraga Desa Loka Laba	Hutang Retensi	4.901.276,00
	D.I. Penginenu	Hutang Retensi	2.536.816,00
	Normalisasi Kali Aeramo (Segmen Wakasa)	Hutang Retensi	7.500.000,00
	Pembangunan Jalan Inspeksi Sekunder I.IA	Hutang Retensi	8.950.000,00
	Pengawasan Teknis Drainase jalan 2017	Hutang Belanja	50.000.000,00
	Pembukaan Jalan Baru Jawakisa Renduwawo	Hutang Retensi	7.226.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Perangkat Daerah	Uraian	Jenis Hutang Jangka Pendek Lainnya	Nilai Hutang Jangka Pendek Lainnya
	Peningkatan Jalan Aemali - Danga	Hutang Retensi	295.987.150,46
	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pipa Distribusi Wolokisa Untuk Desa Wolokisa	Hutang Retensi	23.397.139,82
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Natanage Timur 2	Hutang Retensi	9.995.112,05
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun I Desa Rigi	Hutang Retensi	5.720.118,55
	Pembangunan Drainase Jalan Tendatoto	Hutang Retensi	14.857.527,98
	Lanjutan Pagar Kantor	Hutang Retensi	2.500.000,00
	Pembangunan Deucker TPA Mbay I	Hutang Retensi	9.986.150,00
	Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas PUPR	Hutang Retensi	89.929.800,00
	Pek.Peningkatan D.I.Jaranoko	Hutang Retensi	19.904.794,05
	Pek.Lanjt.Pembukaan Jalan Jawakisa-Woloboa	Hutang Retensi	7.372.500,00
	Pengawasan Jalan Anakoli - Fataleke	Hutang Belanja	46.768.400,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan gedung RKB SMPN Satap 1 Wolowae	Hutang Retensi	19.627.700,00
	Pembangunan Perpustakaan SDN Pomadhedhu	Hutang Retensi	3.957.600,00
	SDI Rata	Hutang Retensi	4.975.000,00
	Pengerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Boki	Hutang Retensi	3.976.900,00
	Pengerjaan Ruang Perpustakaan dan Meubeler SDN Anakoli	Hutang Retensi	3.997.400,00
Dinas Pertanian	Pos Kesehatan Hewan (PKH)	Hutang Retensi	11.189.550,00
	Pembangunan Gedung UPPO	Hutang Retensi	7.487.850,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tugu Selamat Datang di Rowa Kecamatan Boawae	Hutang Belanja	22.490.250,00
	Penggusuran Lokasi TPST dan TPU	Hutang Belanja	8.893.350,00
	Jasa Perencanaan Teknis PLMH Selalejo Tahun 2016	Hutang Belanja	48.900.000,00
	Jasa Pengawasan Teknis PLTMH Selalejo Tahun 2016	Hutang Belanja	49.940.000,00
	Jasa Perencanaan Teknis PLTS di Desa Ngera Kec. Keo Tengah 2016	Hutang Belanja	48.950.000,00
	Jasa Pengawasan Teknis PLTS di Desa Ngera Kec. Keo Tengah,	Hutang Belanja	49.940.000,00
	Jasa Pengawasan Teknis PLTS Tersebar di Desa Paumali, Motu Desa Kelewae, Desa Gerodhere, Desa Alorawe, Desa Tedakisa, Desa Tedamude, Kel. Dhawe Lanjutan Tahun 2015	Hutang Belanja	32.780.000,00
	Jasa Pengawasan Teknis PLTS di Desa Odaute, Desa Pagomogo, Desa Riti Kec. Nangaroro, Desa Keli Kec. Keo Tengah	Hutang Belanja	41.450.000,00
Puskesmas Jawakisa	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Printer Epson L3210	Hutang Belanja	3.134.092,00
RSUD Aeramo	Pembangunan Pagar RSD Aeramo	Hutang Belanja	947.101.775,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan	Hutang Belanja	54.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Perangkat Daerah	Uraian	Jenis Hutang Jangka Pendek Lainnya	Nilai Hutang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya			2.734.628.809,91

(Rincian dapat dilihat pada lampiran N-12.4)

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022.

5.3.1 Ekuitas

Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.038.589.655.418,39 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal Rp2.048.089.882.945,89
 - 1) Surplus/Defisit – LO sebesar Rp19.984.857.219,25
Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan
 - 2) Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,00
 - 3) Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00
 - 4) Koreksi Ekuitas Lainnya Rp(29.485.084.746,75)
- b. Ekuitas Akhir Rp2.038.589.655.418,39

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih rinci tersaji pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp672.873.758.164,98 mengalami peningkatan sebesar Rp54.515.223.991,79 dari Tahun 2021 sebesar Rp618.358.534.173,19 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.88
Pendapatan - LO TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1.	PAD – LO	35.230.002.061,38	35.913.904.768,72	(683.902.707,34)	(1,90)
2.	Pendapatan Transfer – LO	581.336.883.806,00	566.333.771.601,00	15.003.112.205,00	2,65
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	56.306.872.297,60	16.110.857.803,47	40.196.014.494,13	249,50
	Jumlah	672.873.758.164,98	618.358.534.173,19	54.515.223.991,79	8,82



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 adalah Pendapatan Asli Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp35.230.002.061,38 mengalami penurunan sebesar Rp683.902.707,34 dari Tahun 2021 sebesar Rp35.913.904.768,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89
Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pajak Daerah – LO	6.184.022.082,00	6.052.382.264,25	131.639.817,75
2.	Retribusi Daerah – LO	2.957.644.243,20	2.798.792.827,51	158.851.415,69
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2.207.175.564,00	3.688.014.444,00	(1.480.838.880,00)
4.	Lain Lain PAD yang Sah – LO	23.881.160.172,18	23.374.715.232,96	506.444.939,22
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO	35.230.002.061,38	35.913.904.768,72	(683.902.707,34)

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 adalah Pendapatan Asli Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.184.022.082,00 mengalami peningkatan sebesar Rp131.639.817,75 dari tahun 2021 sebesar Rp6.052.382.264,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90
Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Pajak Daerah – LO	6.184.022.082,00	6.052.382.264,25	131.639.817,75
1	Pajak Hotel	330.784.341,00	325.825.271,00	4.959.070,00
2	Pajak Restoran	1.237.334.522,00	1.034.891.213,00	202.443.309,00
3	Pajak Hiburan	372.000,00	520.000,00	(148.000,00)
4	Pajak Reklame	68.759.625,00	58.156.150,00	10.603.475,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.920.461.404,00	1.592.445.919,00	328.015.485,00
6	Pajak Air Tanah	8.758.084,00	3.112.432,00	5.645.652,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.007.327.813,00	1.538.742.625,25	(531.414.812,25)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.391.863.793,00	1.312.675.954,00	79.187.839,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	218.360.500,00	186.012.700,00	32.347.800,00



Tabel 5.91
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA TA 2022

Pendapatan Pajak Daerah - LO	Jumlah	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Pajak Daerah – LO	6.184.022.082,00	Pajak Daerah – LRA	5.588.247.094,00	595.774.988,00
Pajak Hotel – LO	330.784.341,00	Pajak Hotel – LRA	362.146.291,00	(31.361.950,00)
Pajak Restoran– LO	1.237.334.522,00	Pajak Restoran– LRA	1.230.976.522,00	6.358.000,00
Pajak Hiburan– LO	372.000,00	Pajak Hiburan– LRA	220.000,00	152.000,00
Pajak Reklame– LO	68.759.625,00	Pajak Reklame– LRA	58.495.825,00	10.263.800,00
Pajak Penerangan Jalan– LO	1.920.461.404,00	Pajak Penerangan Jalan– LRA	1.920.461.404,00	0,00
Pajak Air Tanah– LO	8.758.084,00	Pajak Air Tanah– LRA	9.445.084,00	(687.000,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan– LO	1.007.327.813,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan– LRA	857.119.013,00	150.208.800,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan– LO	1.391.863.793,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan– LRA	931.022.455,00	460.841.338,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)– LO	218.360.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)– LRA	218.360.500,00	0,00

Selisih Pendapatan Pajak Daerah- LO dan Pendapatan Pajak Daerah -LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Selisih Pajak Hotel-LO dan Pajak Hotel-LRA sebesar Rp(31.361.950,00) dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang pajak hotel tahun 2022 sebesar Rp362.146.291,00 dan penambahan atas piutang pajak hotel tahun 2022 sebesar Rp330.784.341,00 pada Badan Keuangan Daerah;
- Selisih Pajak Restoran-LO dan Pajak Restoran-LRA sebesar Rp6.358.000,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp40.929.000,00 dan penambahan atas piutang pajak tahun 2022 sebesar Rp47.287.000,00 Badan Keuangan Daerah;
- Selisih Pajak Hiburan-LO dan Pajak Hiburan-LRA sebesar Rp152.000,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang pajak hiburan tahun 2022 sebesar Rp220.000,00 dan penambahan atas piutang pajak hiburan tahun 2022 sebesar Rp372.000,00 Badan Keuangan Daerah;
- Selisih Pajak Reklame-LO dan Pajak Reklame-LRA sebesar Rp10.263.800,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp58.495.825,00 dan penambahan atas piutang pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp68.759.625,00 Badan Keuangan Daerah;
- Selisih Pajak Air Tanah-LO dan Pajak Air Tanah-LRA sebesar Rp(687.000,00) dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang pajak air tanah tahun 2022 sebesar Rp9.445.084,00 dan penambahan atas piutang pajak air tanah tahun 2022 sebesar Rp8.758.084,00 Badan Keuangan Daerah;
- Selisih Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar Rp150.208.800,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 sebesar Rp463.977.325,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

dan penambahan atas piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 sebesar Rp614.186.125,00 Badan Keuangan Daerah;

- g) Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LRA sebesar Rp460.841.338,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2022 sebesar Rp931.022.455,00 dan penambahan atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2022 sebesar Rp1.391.863.793,00 Badan Keuangan Daerah.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah -LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 adalah Pendapatan Asli Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.957.644.243,20 mengalami peningkatan sebesar Rp158.851.415,69 dari Tahun 2021 sebesar Rp2.798.792.827,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92
Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA TA 2022

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Retribusi Daerah – LO	2.957.644.243,20	2.798.792.827,51	158.851.415,69
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	501.117.226,20	826.795.920,51	(325.678.694,31)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	18.804.000,00	7.500.000,00	11.304.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	318.220.000,00	131.232.000,00	186.988.000,00
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	113.400.000,00	116.100.000,00	(2.700.000,00)
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	57.848.000,00	(57.848.000,00)
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.601.595.617,00	1.231.320.707,00	370.274.910,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.897.000,00	18.243.000,00	2.654.000,00
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	256.447.400,00	174.598.200,00	81.849.200,00
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	15.068.000,00	10.986.000,00	4.082.000,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	7.300.000,00	6.650.000,00	650.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.450.000,00	39.500.000,00	(9.050.000,00)
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	74.345.000,00	178.019.000,00	(103.674.000,00)

Tabel 5.93
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA TA 2022

Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Jumlah	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Retribusi Daerah – LO	2.957.644.243,20	Retribusi Daerah – LRA	2.879.649.883,20	77.994.360,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	501.117.226,20	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	501.117.226,20	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan – LO	18.804.000,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan – LRA	18.804.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	318.220.000,00	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	303.600.000,00	14.620.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Jumlah	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	113.400.000,00	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	54.000.000,00	59.400.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.601.595.617,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	1.597.621.257,00	3.974.360,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	20.897.000,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	20.897.000,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	256.447.400,00	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	256.447.400,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	15.068.000,00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LRA	15.068.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	7.300.000,00	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LRA	7.300.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	30.450.000,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	30.450.000,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	74.345.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	74.345.000,00	0,00

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah- LO dan Pendapatan Retribusi Daerah -LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Selisih Retribusi Pelayanan Pasar-LO dan Retribusi Pelayanan Pasar-LRA sebesar Rp14.620.000,00 dapat dijelaskan terdapat penyeteroran atas piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2022 pada Kecamatan Aesesa sebesar Rp57.600.000,00 dan penambahan atas piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2022 pada Kecamatan Aesesa sebesar Rp72.000.000,00; dan penyeteroran atas piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2022 pada Kecamatan Keo Tengah sebesar Rp4.514.000,00 dan penambahan atas piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2022 pada Kecamatan Keo Tengah sebesar Rp4.734.000,00;
- b) Selisih Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi -LO dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LRA sebesar Rp59.400.000,00 dapat dijelaskan terdapat penyeteroran atas piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp54.000.000,00 dan penambahan atas piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp113.400.000,00;
- c) Selisih Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -LO dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA sebesar Rp3.974.360,00 dapat dijelaskan terdapat penyeteroran atas piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp322.577.366,00 dan penambahan atas piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp321.678.726,00; penyeteroran atas piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.449.000,00 dan penambahan atas piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.423.000,00; penyeteroran atas piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.101.000,00.



5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Kabupaten Nagekeo untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.207.175.564,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.480.838.880,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp3.688.014.444,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan LRA TA 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2.207.175.564,00	3.688.014.444,00	(1.480.838.880,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.207.175.564,00	3.688.014.444,00	(1.480.838.880,00)

Tabel 5.95

Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan LRA TA 2022

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	Jumlah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	Jumlah (Rp)	Selisih
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2.207.175.564,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.207.175.564,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN– LO	2.207.175.564,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN– LRA	2.207.175.564,00	0,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah -LO Kabupaten Nagekeo untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp23.881.160.172,18 mengalami peningkatan sebesar Rp506.444.939,22 dari Tahun 2021 sebesar Rp23.374.715.232,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96

Lain lain PAD yang Sah - LO dan LRA TA 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Lain- lain PAD yang Sah - LO	23.881.160.172,18	23.374.715.232,96	506.444.939,22
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	612.507.188,00	5.000.000,00	607.507.188,00
Hasil Sewa BMD	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
Penerimaan Jasa Giro	708.405.222,14	1.093.870.986,84	(385.465.764,70)
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga	1.047.287.615,38	3.939.009.378,35	(2.891.721.762,97)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	528.239.334,67	2.023.799.963,24	(1.495.560.628,57)
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	278.436.830,00	440.387.452,00	(161.950.622,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.555.234.401,52	360.654.923,68	1.194.579.477,84
Pendapatan Denda Pajak	33.487.495,00	46.473.567,00	(12.986.072,00)
Pendapatan Denda Retribusi	205.620,00	118.920,00	86.700,00
Pendapatan dari Pengembalian	67.719.826,00	110.106.112,00	(42.386.286,00)
Pendapatan BLUD	17.455.233.808,48	2.033.079.340,00	15.422.154.468,48
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.582.630,99	0,00	1.582.630,99
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.586.880.200,00	13.322.214.589,85	(11.735.334.389,85)

Tabel 5.97

Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO dan LRA TA 2022

Lain- lain PAD yang Sah - LO	Jumlah	Lain- lain PAD yang Sah - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Lain- lain PAD yang Sah- LO	23.881.160.172,18	Lain- lain PAD yang Sah- LRA	23.584.961.235,89	296.198.936,29
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin- LO	612.507.188,00	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin- LRA	612.507.188,00	0,00
Hasil Sewa BMD- LO	5.940.000,00	Hasil Sewa BMD- LRA	5.940.000,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro- LO	708.405.222,14	Penerimaan Jasa Giro- LRA	708.405.222,14	0,00
Hasil dari pengelolaan dana bergulir- LO	0,00	Hasil dari pengelolaan dana bergulir- LRA	20.775.000,00	(20.775.000,00)
Pendapatan Bunga- LO	1.047.287.615,38	Pendapatan Bunga- LRA	1.047.033.390,08	254.225,30
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah- LO	528.239.334,67	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah- LRA	824.558.245,68	(296.318.911,01)
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah- LO	278.436.830,00	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah- LRA	278.436.830,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- LO	1.555.234.401,52	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- LRA	1.555.234.401,52	0,00
Pendapatan Denda Pajak- LO	33.487.495,00	Pendapatan Denda Pajak- LRA	33.487.495,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi- LO	205.620,00	Pendapatan Denda Retribusi- LRA	205.620,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian- LO	67.719.826,00	Pendapatan dari Pengembalian- LRA	61.719.826,00	6.000.000,00
Pendapatan BLUD- LO	17.455.233.808,48	Pendapatan BLUD- LRA	16.848.195.186,48	607.038.622,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya- LO	1.582.630,99	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya- LRA	1.582.630,99	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN- LO	1.586.880.200,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN- LRA	1.586.880.200,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Selisih Pendapatan Lain- lain PAD yang Sah -LO dan Pendapatan Lain- lain PAD yang Sah -LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Selisih Hasil dari pengelolaan dana bergulir -LO dan Hasil dari pengelolaan dana bergulir-LRA sebesar Rp(20.775.000,00) dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang pengelolaan dana bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp20.775.000,00;
- b) Selisih Pendapatan Bunga -LO dan Pendapatan Bunga -LRA sebesar Rp254.225,30 dapat dijelaskan terdapat penambahan atas piutang bunga atas Saldo Remunerasi pada Rekening TDF-TKD per 31 Desember 2022 sebesar Rp254.225,30;
- c) Selisih Tuntutan Ganti Kerugian Daerah -LO dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah -LRA sebesar Rp(296.318.911,01) dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2022 sebesar Rp2.225.692.854,14 dan penambahan atas piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2022 sebesar Rp1.929.373.943,13;
- d) Selisih Pendapatan dari Pengembalian-LO dan Pendapatan dari Pengembalian-LRA sebesar Rp6.000.000,00 dapat dijelaskan terdapat penambahan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tahun 2022 pada Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas Danga) sebesar Rp6.000.000,00;
- e) Selisih Pendapatan BLUD-LO dan Pendapatan BLUD-LRA sebesar Rp607.038.622,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2022 sebesar Rp1.742.815.918,00 dan penambahan atas piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2022 sebesar Rp2.349.854.540,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp581.336.883.806,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.003.112.205,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp566.333.771.601,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98
Pendapatan Transfer - LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Pendapatan Transfer – LO	581.336.883.806,00	566.333.771.601,00	15.003.112.205,00
1.	Transfer Pemerintah Pusat – LO	564.241.117.797,00	552.095.936.533,00	12.145.181.264,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.174.358.011,00	15.178.407.823,00	(5.004.049.812,00)
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum	407.250.885.737,00	407.222.571.000,00	28.314.737,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.810.172.738,00	80.059.304.280,00	(13.249.131.542,00)
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78.854.836.311,00	41.225.403.430,00	37.629.432.881,00
	Dana Desa	0,00	0,00	0,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	1.150.865.000,00	8.410.250.000,00	(7.259.385.000,00)
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	17.095.766.009,00	14.237.835.068,00	2.857.930.941,00
	Pendapatan Bagi Hasil	17.095.766.009,00	14.237.835.068,00	2.857.930.941,00



5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO Kabupaten Nagekeo untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp564.241.117.797,00 mengalami peningkatan sebesar Rp12.145.181.264,00 dari tahun 2021 sebesar Rp552.095.936.533,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - LO	564.241.117.797,00	552.095.936.533,00	12.145.181.264,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.174.358.011,00	15.178.407.823,00	(5.004.049.812,00)
Dana Alokasi Umum	407.250.885.737,00	407.222.571.000,00	28.314.737,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.810.172.738,00	80.059.304.280,00	(13.249.131.542,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78.854.836.311,00	41.225.403.430,00	37.629.432.881,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	1.150.865.000,00	8.410.250.000,00	(7.259.385.000,00)
Dana Desa	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.100
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dan LRA TA 2022

Transfer Pemerintah Pusat - LO	Jumlah	Transfer Pemerintah Pusat - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Transfer Pemerintah Pusat - LO	564.241.117.797,00	Transfer Pemerintah Pusat - LRA	644.616.163.489,00	(80.375.045.692,00)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	10.174.358.011,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	10.204.297.703,00	(29.939.692,00)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LO	0,00	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LRA	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum - LO	407.250.885.737,00	Dana Alokasi Umum - LRA	407.250.885.737,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	66.810.172.738,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	66.810.172.738,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	78.854.836.311,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	78.854.836.311,00	0,00
Dana Desa - LO	0,00	Dana Desa - LRA	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID) - LO	1.150.865.000,00	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	1.150.865.000,00	0,00
Dana Desa - LO	0,00	Dana Desa - LRA	80.345.106.000,00	(80.345.106.000,00)

Selisih Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- a) Selisih Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO dan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA sebesar Rp(29.939.692,00) dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 pada sebesar Rp9.776.900.957,00; penambahan atas piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 sebesar Rp8.698.741.000,00 dan koreksi atas Saldo Pokok pada Rekening TDF-TKD per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.048.220.265,00; Saldo Pokok pada Rekening TDF-TKD Kabupaten Nagekeo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.048.220.265,00 belum dicairkan pada Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility*, remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD paling cepat bulan April untuk remunerasi bulan Desember sampai dengan bulan Maret. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF memiliki *holding period*. *Holding period* ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/ atau DAU di fasilitas TDF;
- b) Selisih Dana Desa -LO dan Dana Desa-LRA sebesar Rp(80.345.106.000,00) dapat dijelaskan terdapat Penerimaan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang tidak diakui sebagai pendapatan Dana Desa- LO sebesar Rp(80.345.106.000,00).

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Kabupaten Nagekeo untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.095.766.009,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.857.930.941,00 dari tahun 2021 sebesar Rp14.237.835.068,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dan LRA TA 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah			
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	17.095.766.009,00	14.237.835.068,00	2.857.930.941,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.006.150.559,00	2.122.652.465,00	883.498.094,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	920.134.512,00	1.712.493.126,00	(792.358.614,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.664.890.698,00	1.885.218.820,00	779.671.878,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	362.316,00	9.443.880,00	(9.081.564,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.504.227.924,00	8.508.026.777,00	1.996.201.147,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.102
Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dan LRA TA 2022

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	Jumlah	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA		
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	17.095.766.009,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	17.957.938.909,00	(862.172.900,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	3.006.150.559,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	2.301.478.438,00	704.672.121,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	920.134.512,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	837.503.882,00	82.630.630,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	2.664.890.698,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	4.302.947.801,00	(1.638.057.103,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	362.316,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LRA	11.780.864,00	(11.418.548,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	10.504.227.924,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	10.504.227.924,00	0,00

Selisih Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LRA sebesar Rp704.672.121,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp2.301.478.438,00 dan penambahan atas Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar Rp3.006.150.559,00;
- Selisih Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -LO dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA sebesar Rp82.630.630,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp837.503.882,00 dan penambahan atas piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar Rp920.134.512,00;
- Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -LO dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA sebesar Rp(1.638.057.103,00) dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp4.302.947.801,00 dan penambahan atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar Rp2.664.890.698,00;
- Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan -LO dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan -LRA sebesar Rp(11.418.548,00) dapat dijelaskan terdapat penyetoran atas piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp11.780.864,00 dan penambahan atas Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2022 sebesar Rp362.316,00.



5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp56.306.872.297,60 mengalami peningkatan sebesar Rp40.196.014.494,13 dari tahun 2021 sebesar Rp16.110.857.803,47.

Tabel 5.103
Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah- LO	56.306.872.297,60	16.110.857.803,47	40.196.014.494,13
Pendapatan Hibah – LO	50.287.522.249,60	285.947.670,47	50.001.574.579,13
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	6.019.350.048,00	15.824.910.133,00	(9.805.560.085,00)

Tabel 5.104
Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO dan LRA TA 2022

Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	Jumlah	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Lain-Lain Pendapatan yang Sah- LO	56.306.872.297,60	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	6.019.350.048,00	50.287.522.249,60
Pendapatan Hibah – LO	50.287.522.249,60	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	50.287.522.249,60
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	6.019.350.048,00	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	6.019.350.048,00	0.00

Perbedaan antara Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp50.287.522.249,60 disebabkan karena:

- Penerimaan Pendapatan hibah UPT Dinas Puskesmas Nangaroro berupa garasi mobil ambulans yang berasal dari hibah CSR (CV. Maega Anugerah Mandiri) sebesar Rp30.000.000,00;
- Penerimaan Pendapatan hibah UPT Dinas Puskesmas Nangaroro berupa mesin GenxPERT 4 MODUL, UPS dan printer yang berasal dari Hibah kementerian Kesehatan RI sebesar Rp278.759.000,00;
- Penerimaan Pendapatan hibah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kementerian Desa berupa jalan Raja Jawakisa sebesar Rp950.950.000,00;
- Penerimaan Pendapatan hibah Dinas Kesehatan yang berasal dari Kementerian Kesehatan berupa Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine sebesar Rp117.000.000,00.
- Penerimaan Pendapatan hibah obat RSUD Aeramo yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp125.100.000,00;
- Penerimaan Pendapatan hibah obat RSUD Aeramo yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebesar Rp476.111.220,00;
- Penerimaan Pendapatan hibah BMHP Dinas Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp233.635.307,92;



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

- h) Penerimaan Pendapatan hibah obat Dinas Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp1.200.761.132,68;
- i) Penerimaan Pendapatan hibah vaksin Dinas Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp3.104.846.733,00;
- j) Penerimaan Pendapatan hibah Gedung dan Bangunan berupa Pasar Rakyat Danga yang berasal dari Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp3.868.590.856,00;
- k) Penerimaan Pendapatan hibah Peralatan dan Mesin yang berasal dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.406.443.367,00;
- l) Penerimaan Pendapatan hibah Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp12.681.945.157,00;
- m) Penerimaan Pendapatan hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp25.813.379.476,00.

5.4.2 Beban- LO

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp650.233.802.528,29 mengalami peningkatan sebesar Rp14.937.821.205,98 dari Tahun 2021 sebesar Rp635.295.981.322,31 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.105
Beban - LO TA 2022 dan 2021**

No	Beban	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Beban Operasi – LO	605.403.977.048,29	584.784.706.722,31	20.619.270.325,98
2.	Beban Transfer – LO	44.829.825.480,00	50.511.274.600,00	(5.681.449.120,00)
	Jumlah	650.233.802.528,29	635.295.981.322,31	14.937.821.205,98

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp605.403.977.048,29 mengalami peningkatan sebesar Rp20.619.270.325,98 dari Tahun 2021 sebesar Rp584.784.706.722,31 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.106
Beban Operasi - LO TA 2022 dan 2021**

No	Beban Operasi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Beban Pegawai	267.940.998.054,51	263.804.916.340,00	4.136.081.714,51
2.	Beban Persediaan	65.509.979.574,88	60.952.675.483,16	4.557.304.091,72
3.	Beban Jasa	79.609.741.598,90	80.571.174.797,41	(961.433.198,51)
4.	Beban Pemeliharaan	6.424.693.701,50	13.634.746.653,70	(7.210.052.952,20)
5.	Beban Perjalanan Dinas	31.121.832.328,00	25.063.927.504,00	6.057.904.824,00
6.	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
7.	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
8.	Beban Hibah	17.552.418.715,00	11.751.630.550,00	5.800.788.165,00
9.	Beban Bantuan Sosial	21.826.487.263,00	16.447.476.155,00	5.379.011.108,00
10.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.340.397.931,26	32.752.449.707,31	(3.412.051.776,05)
11.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.467.654.596,32	14.735.760.904,01	2.731.893.692,31
12.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	64.593.198.721,06	62.088.929.877,97	2.504.268.843,09



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Beban Operasi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
13.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
14.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
15.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	437.517.622,00	433.295.622,00	4.222.000,00
16.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	321.995.074,34	(90.058.560,65)	412.053.634,99
17.	Beban Penyisihan Retribusi	177.285.360,00	(39.980.300,00)	217.265.660,00
18.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	484.605.685,83	294.108.940,90	190.496.744,93
19.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	(1.668.500,00)	127.885.222,00	(129.553.722,00)
20.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0,00	33.655.000,00	(33.655.000,00)
21.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	1.980.671.970,00	1.121.615.850,50	859.056.119,50
22.	Beban Lain-lain	572.131.113,43	1.100.496.975,00	(528.365.861,57)
	Jumlah	605.403.977.048,29	584.784.706.722,31	20.619.270.325,98

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp267.940.998.054,51 mengalami peningkatan sebesar Rp4.136.081.714,51 dari Tahun 2021 sebesar Rp263.804.916.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107
Beban Operasi - LO TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai	267.940.998.054,51	263.804.916.340,00	4.136.081.714,51
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	212.441.076.799,00	206.822.781.295,00	5.618.295.504,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	35.615.544.800,00	7.500.000.000,00	28.115.544.800,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.227.942.243,00	38.206.306.766,00	(29.978.364.523,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	8.884.564.988,00	8.891.083.128,00	(6.518.140,00)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	43.430.559,00	182.405.688,00	(138.975.129,00)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.000.000,00	409.998.000,00	2.000,00
Beban Pegawai BLUD	2.318.438.665,51	1.792.341.463,00	526.097.202,51

Tabel 5.108
Perbandingan Beban Pegawai - LO dan Belanja Pegawai LRA TA 2022

Beban Pegawai - LO	Jumlah	Belanja Pegawai - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Beban Pegawai - LO	267.940.998.054,51	Belanja Pegawai - LRA	267.524.611.956,00	416.386.098,51
Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	212.441.076.799,00	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LRA	212.429.975.907,00	11.100.892,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Beban Pegawai - LO	Jumlah	Belanja Pegawai - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	35.615.544.800,00	Belanja Tambahan Penghasilan ASN - LRA	35.615.544.800,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	8.227.942.243,00	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LRA	8.234.702.243,00	(6.760.000,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	8.884.564.988,00	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD - LRA	8.884.564.988,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO	43.430.559,00	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LRA	43.430.559,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LO	410.000.000,00	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LRA	410.000.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD - LO	2.318.438.665,51	Belanja Pegawai BLUD - LRA	1.906.393.459,00	412.045.206,51

Terdapat perbedaan realisasi Beban pada Laporan Operasional dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai sebesar Rp416.386.098,51. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya :

- Penambahan beban persediaan sebesar Rp412.045.206,51 diperoleh dari penambahan beban pegawai BLUD SPAM berupa Gaji Pegawai BLUD-SPAM yang belum dibayarkan di tahun 2022;
- Penambahan beban pegawai Kantor Camat Mauponggo berupa kekurangan pembayaran THR dan Gaji 13 kepada pegawai yang telah meninggal sebesar Rp Rp3.815.520,00;
- Penambahan beban pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa kekurangan pembayaran THR dan Gaji 13 kepada pegawai yang telah meninggal sebesar Rp3.701.320,00;
- Penambahan beban pegawai UPTD Puskesmas Boawae berupa kekurangan pembayaran THR dan Gaji 13 kepada pegawai yang telah meninggal sebesar Rp3.584.052,00;
- Pengurangan beban pegawai sebesar Rp(6.760.000) diperoleh dari Pengurangan beban pegawai berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 Satpol PP yang menjadi aset peralatan dan mesin sebesar Rp(5.070.000,00) dan Pengurangan beban pegawai berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 Dinas Pertanian yang menjadi aset peralatan dan mesin sebesar Rp(1.690.000,00).

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp65.509.979.574,88 mengalami peningkatan sebesar Rp4.557.304.091,72 dari Tahun 2021 sebesar Rp60.952.675.483,16 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.109
Beban Persediaan - LO TA. 2022 dan TA.2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan	65.509.979.574,88	60.952.675.483,16	4.557.304.091,72
Beban Barang Pakai Habis	65.504.849.574,88	60.833.181.483,16	4.671.668.091,72
Beban Barang Tak Habis Pakai	5.130.000,00	119.494.000,00	(114.364.000,00)

Tabel 5.110
Perbandingan Beban Persediaan - LO dan LRA TA 2022

Beban Persediaan - LO	Jumlah	Belanja Persediaan - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Beban Persediaan - LO	65.509.979.574,88	Belanja Persediaan - LRA	50.701.006.344,79	14.808.973.230,09
Beban Barang Pakai Habis - LO	65.504.849.574,88	Belanja Barang Pakai Habis - LRA	50.695.876.344,79	14.808.973.230,09
Beban Barang Tak Habis Pakai - LO	5.130.000,00	Belanja Barang Tak Habis Pakai - LRA	5.130.000,00	0,00

Selisih Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Selisih Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut: : Penambahan Persediaan Awal Tahun sebesar Rp25.096.416.410,77 dikurangi Persediaan Akhir Tahun sebesar Rp(18.871.472.939,04)
- b) Penambahan beban persediaan atas beban obat 2022 yang belum dibayar pada RSUD Aeramo sebesar Rp1.340.000,00;
- c) Penambahan beban persediaan Dinas PUPR yang berasal dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp747.500.000,00;
- d) Penambahan beban persediaan RSD yang direklas dari beban jasa sebesar Rp547.439.691,10;
- e) Penambahan beban persediaan Dinas Sosial yang direklas dari beban bantuan sosial yang menjadi persediaan barang yang akan diserahkan kepada kelompok/masyarakat/individu sebesar Rp18.055.600,00;
- f) Penambahan beban persediaan BMHP Dinas Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi sebesar Rp233.635.307,92;
- g) Penambahan beban persediaan obat Dinas Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi sebesar Rp1.200.761.132,68;
- h) Penambahan beban persediaan vaksin Dinas Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi sebesar Rp3.104.846.733,00;
- i) Penambahan beban persediaan obat RSUD Aeramo yang berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi sebesar Rp125.100.000,00;
- j) Penambahan beban persediaan obat RSUD Aeramo yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebesar Rp476.111.220,00;
- k) Penambahan beban persediaan PPKD yang direklas dari beban BTT sebesar Rp848.656.523,00;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- l) Penambahan beban persediaan atas pekerjaan program pamsimas TA.2022 yang diserahkan kepada Desa yang sebelumnya sudah dibebankan kedalam Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa sebesar Rp1.500.000.000,00;
- m) Pengurangan beban persediaan Dinas Kesehatan yang direklas ke aset tetap JII sebesar Rp(9.999.500,00);
- n) Koreksi kurang saldo awal persediaan obat Dinas Kesehatan sebesar Rp(209.416.949,34).

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp79.609.741.598,90 mengalami penurunan sebesar Rp961.433.198,51 dari Tahun 2021 sebesar Rp80.571.174.797,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111
Beban Jasa - LO dan LRA TA 2022

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Jasa	79.609.741.598,90	80.571.174.797,41	(961.433.198,51)
Beban Jasa Kantor	43.014.262.796,90	45.119.085.628,00	(2.104.822.831,10)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.837.850.000,00	8.093.599.800,00	744.250.200,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.101.299.404,00	1.163.315.952,00	937.983.452,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	923.130.000,00	400.310.000,00	522.820.000,00
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.494.558,00	455.000,00	10.039.558,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.364.166.522,00	2.066.589.766,31	3.297.576.755,69
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.137.391,00	3.492.400.408,00	(3.482.263.017,00)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	188.650.000,00	(188.650.000,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.262.645.500,00	4.892.724.804,00	(2.630.079.304,00)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	265.200.000,00	165.400.000,00	99.800.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.100.000,00	1.444.427.500,00	(1.427.327.500,00)
Beban Barang dan Jasa BOS	12.326.190.899,00	13.185.862.625,10	(859.671.726,10)
Beban Barang dan Jasa BLUD	4.427.264.528,00	308.353.314,00	4.118.911.214,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.112
Perbandingan Beban Jasa - LO dan LRA TA 2022

Beban Jasa - LO	Jumlah	Belanja Jasa - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Beban Jasa - LO	79.609.741.598,90	Belanja Jasa	76.800.540.687,00	2.809.200.911,90
Beban Jasa Kantor - LO	43.014.262.796,90	Belanja Jasa Kantor - LRA	40.205.061.885,00	2.809.200.911,90
Beban Jaminan/Asuransi - LO	8.837.850.000,00	Belanja Jaminan/Asuransi - LRA	8.837.850.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO	2.101.299.404,00	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin - LRA	2.101.299.404,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan - LO	923.130.000,00	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - LRA	923.130.000,00	0,00
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	10.494.558,00	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi - LRA	10.494.558,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi - LO	5.364.166.522,00	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi - LRA	5.364.166.522,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi - LO	10.137.391,00	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi - LRA	10.137.391,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS - LO	50.000.000,00	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - LRA	50.000.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan - LO	2.262.645.500,00	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan - LRA	2.262.645.500,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	265.200.000,00	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	265.200.000,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	17.100.000,00	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	17.100.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS - LO	12.326.190.899,00	Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA	12.326.190.899,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD - LO	4.427.264.528,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD - LRA	4.427.264.528,00	0,00

Selisih Beban Jasa Kantor -LO dan Belanja Jasa Kantor-LRA sebesar Rp2.809.200.911,90 dapat dijelaskan sebagai berikut::

- Penambahan beban jasa pelayan kesehatan 2022 pada RSUD Aeramo yang belum dibayar sebesar Rp4.378.000.000,00;
- Penambahan beban jasa BOS yang direklas dari Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp5.500.000,00;
- Penambahan beban jasa Dinas P dan K berupa jasa pengawasan pembangunan ruang laboratorium beserta perabotannya SMPN 2 Aesesa (Dana DAU) oleh V.Sahwana yang belum dibayar sebesar Rp14.169.000,00;
- Penambahan beban jasa PPKD yang direklas dari beban BTT sebesar Rp916.071.810,00;
- Penambahan aset JIJ yang berasal dari belanja non modal berupa jasa konsultansi perencanaan pekerjaan bronjong dan TPT RS.Pratama Raja yang mengurangi beban jasa Dinas kesehatan sebesar Rp(15.994.000,00);



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- f) Penambahan aset JIJ yang berasal dari belanja non modal berupa jasa konsultasi pengawasan pematangan lahan dan pembangunan tembok penyokong RS. Pratama Raja yang mengurangi beban jasa Dinas kesehatan sebesar Rp(11.055.000,00);
- g) Penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari belanja non modal berupa jasa konsultan pengawas pembangunan rumah petugas puskesmas Jawakisa yang mengurangi beban jasa Dinas kesehatan sebesar Rp(15.985.200,00);
- h) Pengurangan beban jasa konsultasi konstruksi berupa pengawasan pembangunan Pagar RSUD Aeramo yang menjadi aset gedung dan bangunan pada RSUD Aeramo sebesar Rp(39.860.832,00);
- i) Pengurangan beban jasa berupa perencanaan gedung kantor Camat Nangaroro dan Kantor Lurah Nagespadhi pada Dinas PUPR yang menjadi aset gedung dan bangunan sebesar Rp(194.324.900,00);
- j) Pengurangan beban jasa Dinas Perhubungan yang menjadi aset KDP sebesar Rp(99.567.000,00);
- k) Pengurangan beban jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi aset KDP sebesar Rp(7.892.100,00);
- l) Penambahan beban persediaan RSD yang direklas dari beban jasa sebesar Rp(547.439.691,10);
- m) Pengurangan beban jasa SMPN 1 Mauponggo yang menambah Aset Peralatan dan Mesin berupa meja tenis sebesar Rp(4.845.500,00);
- n) Pengurangan beban jasa konsultan konstruksi pada Dinas Kesehatan, RSUD Aeramo, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan yang menambah aset gedung dan bangunan, JIJ dan KDP sebesar Rp(1.567.575.675,00).

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.424.693.701,50 mengalami penurunan sebesar Rp7.210.052.952,20 dari Tahun 2021 sebesar Rp13.634.746.653,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113
Beban Pemeliharaan - LO dan LRA TA 2022

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Pemeliharaan	6.424.693.701,50	13.634.746.653,70	(7.210.052.952,20)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.031.706.700,00	3.245.459.425,00	(213.752.725,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.067.869.201,50	10.189.337.228,70	(9.121.468.027,20)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.325.117.800,00	199.950.000,00	2.125.167.800,00



Tabel 5.114
Perbandingan Beban Jasa - LO dan LRA TA 2022

Beban Pemeliharaan - LO	Jumlah	Belanja Pemeliharaan - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Beban Pemeliharaan - LO	6.424.693.701,50	Belanja Pemeliharaan - LRA	10.455.144.440,00	(4.030.450.738,50)
Beban Pemeliharaan Tanah - LO	0,00	Belanja Pemeliharaan Tanah - LRA	100.000.000,00	(100.000.000,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	3.031.706.700,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LRA	3.031.706.700,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	1.067.869.201,50	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LRA	7.323.437.740,00	(6.255.568.538,50)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO	2.325.117.800,00	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LRA	0,00	2.325.117.800,00

Selisih Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp(4.030.450.738,50) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Selisih Beban Pemeliharaan Tanah-LO dan Belanja Pemeliharaan Tanah-LRA sebesar Rp(100.000.000,00) dapat dijelaskan terdapat pengurangan beban pemeliharaan tanah Kelurahan Rega yang dimutasi ke Badan Keuangan Daerah dan diakui sebagai aset tanah pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp(100.000.000,00);
- Selisih Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LO dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LRA sebesar Rp(6.255.568.538,50) dapat dijelaskan terdapat pengurangan beban pemeliharaan gedung berupa rehab gedung yang menjadi aset gedung dan bangunan pada RSUD Aeramo sebesar Rp(2.949.000.000,00); dan koreksi tambah aset gedung dan bangunan yang berasal dari Beban pemeliharaan gedung dan bangunan Dinas PK sebesar Rp(3.306.568.538,50);
- Selisih Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan -LO dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi -LRA sebesar Rp2.325.117.800,00 dapat dijelaskan terdapat penambahan beban pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas PUPR berupa pengerukan sungai Langedhawe yang direklas dari aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp149.969.700,00; dan penambahan beban pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi PPKD yang direklas dari beban BTT sebesar Rp2.175.148.100,00.

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp31.121.832.328,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.057.904.824,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp25.063.927.504,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Beban Perjalanan Dinas - LO TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Perjalanan Dinas	31.121.832.328,00	25.063.927.504,00	6.057.904.824,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.050.900.099,00	10.297.217.036,00	2.753.683.063,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Beban Perjalanan Dinas Tetap	651.600.000,00	1.064.860.000,00	(413.260.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.675.878.163,00	13.125.314.468,00	3.550.563.695,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	739.954.066,00	373.176.000,00	366.778.066,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.500.000,00	203.360.000,00	(199.860.000,00)

Tabel 5.116
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas - LO dan LRA TA 2022

Beban Perjalanan Dinas - LO	Jumlah	Belanja Perjalanan Dinas - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Beban Perjalanan Dinas - LO	31.121.832.328,00	Belanja Perjalanan Dinas - LRA	31.121.832.328,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa - LO	13.050.900.099,00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - LRA	13.050.900.099,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap - LO	651.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Tetap - LRA	651.600.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota - LO	16.675.878.163,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - LRA	16.675.878.163,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - LO	739.954.066,00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - LRA	739.954.066,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - LO	3.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - LRA	3.500.000,00	0,00

5.4.2.1.6 Beban Hibah

Beban Hibah - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.552.418.715,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.800.788.165,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp11.751.630.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117
Beban Hibah - LO TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Hibah	17.552.418.715,00	11.751.630.550,00	5.800.788.165,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.645.561.915,00	4.862.273.750,00	8.783.288.165,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	1.910.000.000,00	6.192.500.000,00	(4.282.500.000,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	696.856.800,00	696.856.800,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.118
Perbandingan Beban Hibah - LO dan LRA TA 2022

Beban Hibah - LO	Jumlah	Belanja Hibah - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Beban Hibah - LO	17.552.418.715,00	Belanja Hibah	17.552.418.715,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	13.645.561.915,00	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	13.645.561.915,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LO	1.300.000.000,00	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LRA	1.300.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - LO	1.910.000.000,00	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - LRA	1.910.000.000,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LO	696.856.800,00	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LRA	696.856.800,00	0,00

5.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.826.487.263,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.379.011.108,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp16.447.476.155,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119
Beban Bantuan Sosial – LO TA.2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Bantuan Sosial	21.826.487.263,00	16.447.476.155,00	5.379.011.108,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	220.000.000,00	427.776.155,00	-207.776.155,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	226.514.400,00	0,00	226.514.400,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	21.200.000.000,00	15.849.700.000,00	5.350.300.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	179.972.863,00	170.000.000,00	9.972.863,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.120
Perbandingan Beban Bantuan Sosial - LO dan LRA TA 2022

Beban Bantuan Sosial - LO	Jumlah	Belanja Bantuan Sosial - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Beban Bantuan Sosial - LO	21.826.487.263,00	Belanja Bantuan Sosial - LRA	21.844.542.863,00	(18.055.600,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu - LO	220.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu - LRA	220.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - LO	226.514.400,00	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu - LRA	244.570.000,00	(18.055.600,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga - LO	21.200.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga - LRA	21.200.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat - LO	179.972.863,00	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat - LRA	179.972.863,00	0,00

Selisih Beban Bantuan Sosial -LO dan Belanja Bantuan Sosial -LRA sebesar Rp(18.055.600,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Selisih Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu -LO dan Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu -LRA sebesar Rp(18.055.600,00) dapat dijelaskan terdapat pengurangan beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Dinas Sosial yang direklas ke beban persediaan yang menjadi persediaan barang yang akan diserahkan kepada kelompok/masyarakat/individu sebesar Rp(18.055.600,00).

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp29.340.397.931,26 mengalami penurunan sebesar Rp3.412.051.776,06 dari Tahun 2021 sebesar Rp32.752.449.707,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO TA.2022 dan 2021

KODE BARANG	NAMA BARANG	BEBAN PENYUSUTAN 2022	BEBAN PENYUSUTAN 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	29.340.397.931,26	32.752.449.707,31	(3.412.051.776,05)
1.3.2.01	ALAT BESAR			
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	1.336.883.789,90	1.375.431.789,90	(38.548.000,00)
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01.03	Alat Bantu	350.403.377,17	327.851.648,70	22.551.728,47
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN			
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.285.441.132,10	4.736.019.669,87	(450.578.537,77)
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	22.076.900,00	22.076.900,00	0,00
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE BARANG	NAMA BARANG	BEBAN PENYUSUTAN 2022	BEBAN PENYUSUTAN 2021	KENAIKAN/PENURUNAN
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	56.273.596,00	65.426.596,00	(9.153.000,00)
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	2.867.500,00	7.460.300,00	(4.592.800,00)
1.3.2.03.03	Alat Ukur	154.451.148,03	198.071.148,03	(43.620.000,00)
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN			
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	81.002.250,00	114.169.987,75	(33.167.737,75)
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1.3.2.05.01	Alat Kantor	1.373.329.838,55	1.390.543.728,80	(17.213.890,25)
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	3.373.779.499,44	3.632.509.800,31	(258.730.300,87)
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	87.697.871,50	82.097.748,00	5.600.123,50
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
1.3.2.06.01	Alat Studio	201.844.797,60	190.482.981,60	11.361.816,00
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	797.111.985,80	820.849.655,80	(23.737.670,00)
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	13.193.246,00	2.044.406,00	11.148.840,00
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	9.730.479.401,24	12.832.563.767,60	(3.102.084.366,36)
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	233.085.220,60	152.513.220,60	80.572.000,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM			
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	1.564.906.127,00	1.734.621.198,40	(169.715.071,40)
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	7.500.000,00	7.900.000,00	(400.000,00)
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	197.884.104,00	195.668.070,01	2.216.033,99
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3.049.150,00	3.049.150,00	0,00
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	7.717.728,67	7.717.728,67	0,00
1.3.2.08.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	1.989.914,70	1.989.914,70	0,00
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	39.176.612,80	37.776.612,80	1.400.000,00
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.288.560,00	3.288.560,00	0,00
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN			
1.3.2.09.01	Senjata Api	0,00	0,00	0,00
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	0,00	0,00	0,00
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	KOMPUTER			
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4.161.431.979,51	3.538.927.319,62	622.504.659,89
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	968.862.441,00	995.500.403,00	(26.637.962,00)
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI			
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN			
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
1.3.2.13.01	Sumur	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.02	Produksi	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE BARANG	NAMA BARANG	BEBAN PENYUSUTAN 2022	BEBAN PENYUSUTAN 2021	KENAIKAN/PENURUNAN
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI			
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA			
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.03	Alat Sar	37.132.800,00	86.213.800,00	(49.081.000,00)
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ALAT PERAGA			
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	38.989.500,00	38.989.500,00	0,00
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU			
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	93.338.376,80	142.339.176,80	(49.000.800,00)
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA			
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	114.209.082,85	8.354.924,35	105.854.158,50

Tabel 5.122
Perbandingan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 (LO)	29.340.397.931,26
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 (Neraca)	(217.899.506.334,64)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 (Neraca)	(196.039.148.426,84)
	Selisih (1-(3-2))	7.480.040.023,46

Selisih Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 -LO dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021 (Neraca) sebesar Rp7.480.040.023,46 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(3.596.643.292,27) yang berasal dari:
 - (1) Mutasi masuk sebesar Rp (2.075.747.718,47)
 - (2) Hibah masuk sebesar Rp(1.503.177.573,80);
 - (3) Koreksi nilai masuk sebesar Rp(17.718.000,00);
- b) Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp11.076.683.315,73 yang berasal dari:
 - (1) Mutasi keluar sebesar Rp2.075.747.718,46;
 - (2) Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp5.458.014.272,27;
 - (3) Penghapusan aset sebesar Rp3.542.921.325,00 ;

5.4.2.1.9 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.468.758.534,97 mengalami peningkatan sebesar Rp2.732.997.630,96 dari Tahun 2021 sebesar Rp14.735.760.904,01 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.123
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO TA.2022 dan 2021

KODE BARANG	NAMA BARANG	BEBAN PENYUSUTAN 2022	BEBAN PENYUSUTAN 2021	KENAIKAN/PENURUNAN
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	17.468.758.534,97	14.735.760.904,01	2.732.997.630,96
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG			
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.459.481.761,32	12.943.131.221,17	2.516.350.540,15
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.667.446.865,33	1.613.479.032,53	53.967.832,80
1.3.3.02	MONUMEN			
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	6.574.158,33	6.574.158,33	0,00
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA			
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	335.255.749,99	172.576.491,98	162.679.258,01

Tabel 5.124
Perbandingan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (LO)	17.468.758.534,97
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (Neraca)	(141.239.704.990,46)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 (Neraca)	(119.540.920.401,57)
	Selisih (1-(3-2))	(4.230.026.053,92)

Selisih Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 -LO dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021 (Neraca) sebesar Rp(4.230.026.053,92) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(7.143.000.264,21) yang berasal dari:
 - (1) Mutasi masuk sebesar Rp(929.538.234,82);
 - (2) Hibah masuk sebesar Rp(4.689.031.245,73);
 - (3) Koreksi nilai masuk sebesar Rp(1.524.430.783,66)
- b) Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.912.974.210,29 yang berasal dari:
 - (1) Mutasi keluar sebesar Rp929.538.234,82;
 - (2) Hibah keluar sebesar Rp95.086.452,79;
 - (3) Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp483.484.075,99;
 - (4) Penghapusan aset sebesar Rp1.404.865.446,69.

5.4.2.1.10 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan – LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp64.636.131.020,67 mengalami peningkatan sebesar Rp2.547.201.142,70 dari Tahun 2021 sebesar Rp 62.088.929.877,97 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.125
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi – LO TA.2022 dan 2021**

KODE BARANG	NAMA BARANG	BEBAN PENYUSUTAN 2022	BEBAN PENYUSUTAN 2021	KENAIKAN/PENURUNAN
1.3.4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	64.636.131.020,67	62.088.929.877,97	2.547.201.142,70
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN			
1.3.4.01.01	Jalan	50.655.917.879,53	50.092.434.119,16	563.483.760,37
1.3.4.01.02	Jembatan	2.787.901.061,51	1.745.105.348,05	1.042.795.713,46
1.3.4.02	BANGUNAN AIR			
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	3.530.224.735,21	3.273.437.975,87	256.786.759,34
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	1.467.217.710,73	1.356.165.977,81	111.051.732,92
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	918.000,00	918.000,00	0,00
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	605.379.231,58	518.202.629,08	87.176.602,50
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	59.430.743,26	52.300.377,23	7.130.366,03
1.3.4.03	INSTALASI			
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	2.637.882.949,51	2.486.452.386,09	151.430.563,42
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	264.513.594,00	264.513.594,00	0,00
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	270.112.754,61	270.112.754,61	0,00
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	177.478.294,76	177.478.294,76	0,00
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	36.851.968,23	36.851.968,23	0,00
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	229.939.433,59	229.939.433,59	0,00
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	89.322.137,65	35.395.650,15	53.926.487,50
1.3.4.04	JARINGAN			
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	1.486.276.802,17	1.332.144.035,36	154.132.766,81
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	294.224.374,33	174.937.983,98	119.286.390,35
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	42.539.350,00	42.539.350,00	0,00

**Tabel 5.126
Perbandingan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 (LO)	64.636.131.020,67
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 (Neraca)	(573.434.759.523,81)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 (Neraca)	(495.567.685.829,97)
	Selisih (1-(3-2))	(13.230.942.673,17)

Selisih Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 -LO dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021 (Neraca) sebesar Rp(13.230.942.673,17) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(13.357.349.438,72) yang berasal dari:
 - (1) Hibah masuk sebesar Rp(123.618.432,22);
 - (2) Hibah masuk sebesar Rp(9.464.905.807,86);
 - (3) Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp(31.985.000,00);
 - (4) Koreksi nilai masuk sebesar Rp(3.736.840.198,64);



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

- b) Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp126.406.765,55 yang berasal dari:
- (1) Hibah keluar sebesar Rp123.618.432,22;
 - (2) Penghapusan aset sebesar Rp2.788.333,33.

5.4.2.1.11 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud – LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp437.517.622,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.222.000,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp433.295.622,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.127
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud – LO TA.2022 dan 2021**

Perangkat Daerah	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	437.517.622,00	433.295.622,00	4.222.000,00
UPT DINAS PUSKESMAS DANGA	18.546.000,00	18.546.000,00	0,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AERAMO	20.109.947,00	20.109.947,00	0,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	58.251.850,00	48.321.850,00	9.930.000,00
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - SPAM	51.914.500,00	51.914.500,00	0,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	68.540.700,00	68.540.700,00	0,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	37.966.000,00	37.766.000,00	200.000,00
DINAS PARIWISATA	4.994.000,00	4.994.000,00	0,00
DINAS PERTANIAN	19.902.000,00	19.902.000,00	0,00
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	20.785.985,00	28.135.985,00	(7.350.000,00)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
KECAMATAN WOLOWAE	6.979.500,00	6.979.500,00	0,00
INSPEKTORAT	15.599.300,00	15.599.300,00	0,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	42.016.500,00	42.016.500,00	0,00
BADAN KEUANGAN DAERAH	68.911.340,00	67.469.340,00	1.442.000,00

5.4.2.1.12 Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban Penyisihan Piutang Pajak - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp321.995.074,34 mengalami peningkatan sebesar Rp412.053.634,99 dari Tahun 2021 sebesar Rp(90.058.560,65) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.128
Beban Penyisihan Piutang Pajak – LO TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	321.995.074,34	(90.058.560,65)	412.053.634,99
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(733.025,00)	857.965,00	(1.590.990,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan	7.675.603,80	7.119.874,70	555.729,10
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	5.429.410,00	3.410.430,00	2.018.980,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	16.543.664,30	23.744.570,75	(7.200.906,45)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	206.473.423,69	(143.539.438,11)	350.012.861,80
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	86.605.997,55	18.348.037,01	68.257.960,54

5.4.2.1.13 Beban penyisihan Piutang Retribusi

Beban Penyisihan Piutang Retribusi - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp177.285.360,00 mengalami peningkatan sebesar Rp217.265.660,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp(39.980.300,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129
Beban Penyisihan Piutang Retribusi – LO TA.2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	177.285.360,00	(39.980.300,00)	217.265.660,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	49.668.000,00	(7.768.000,00)	57.436.000,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	127.617.360,00	(32.212.300,00)	159.829.660,00

5.4.2.1.14 Beban penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah – LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp484.605.685,83 mengalami peningkatan sebesar Rp190.496.744,93 dari Tahun 2021 sebesar Rp294.108.940,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah – LO TA.2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	484.605.685,83	294.108.940,90	190.496.744,93
Beban Penyisihan Piutang Bunga	1.271,13	0,00	1.271,13
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	484.604.414,70	294.108.940,90	190.495.473,80

5.4.2.1.15 Beban Penyisihan Bagian Lancar Pemberian Pinjaman

Beban Penyisihan Bagian Lancar Pemberian Pinjaman - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.668.500,00) mengalami penurunan sebesar Rp129.553.722,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp127.885.222,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.131
Beban Penyisihan Bagian Lancar Pemberian Pinjaman – LO TA.2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	(1.668.500,00)	127.885.222,00	(129.553.722,00)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	(1.668.500,00)	127.885.222,00	(129.553.722,00)

5.4.2.1.16 **Beban Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran**

Beban Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp33.655.000,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp33.655.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132
Beban Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran – LO TA.2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0,00	33.655.000,00	(33.655.000,00)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0,00	33.655.000,00	(33.655.000,00)

5.4.2.1.17 **Beban Penyisihan Dana Bergulir**

Beban Penyisihan Dana Bergulir - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.980.671.970,00 mengalami peningkatan sebesar Rp859.056.119,50 dari Tahun 2021 sebesar Rp1.121.615.850,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133
Beban Penyisihan Dana Bergulir – LO TA.2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	1.980.671.970,00	1.121.615.850,50	859.056.119,50
Beban Penyisihan Dana Bergulir	1.980.671.970,00	1.121.615.850,50	859.056.119,50

5.4.2.1.18 **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain merupakan beban yang digunakan untuk mencatat beban-beban yang tidak masuk pada klasifikasi beban sebelumnya. Beban Lain-lain - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp572.131.113,43 adalah beban atas belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap dan mengalami penurunan sebesar Rp528.365.861,57 dari Tahun 2021 sebesar Rp1.100.496.975,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.134
Beban Lain-lain - LO TA 2022 dan 2021

No	Beban Lain-lain	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		572.131.113,43	1.100.496.975,00	(528.365.861,57)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	318.207.835,43	711.232.507,00	(393.024.671,57)
2.	Dinas Kesehatan	83.654.238,00	265.428.340,00	(181.774.102,00)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo	61.705.000,00	793.010,00	60.911.990,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
6.	Dinas Sosial	0,00	3.425.000,00	(3.425.000,00)
7.	Dinas Pangan Daerah	700.000,00	920.000,00	(220.000,00)
8.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.708.000,00	400.000,00	3.308.000,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan PA	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.000.000,00	10.225.250,00	(2.225.250,00)
12.	Dinas Perhubungan	50.970.000,00	10.836.230,00	40.133.770,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informasi	3.290.040,00	4.320.000,00	(1.029.960,00)
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	85.696,00	(85.696,00)
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.476.000,00	0,00	5.476.000,00
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	600.000,00	910.160,00	(310.160,00)
17.	Dinas Pariwisata	0,00	2.922.000,00	(2.922.000,00)
18.	Dinas Pertanian	1.854.000,00	15.604.500,00	(13.750.500,00)
19.	Dinas Peternakan	0,00	1.442.000,00	(1.442.000,00)
20.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.960.000,00	1.000.000,00	0,00
21.	Bagian Administrasi Umum	0,00	950.000,00	960.000,00
22.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	0,00	30.000.000,00	(950.000,00)
23.	Sekretariat Daerah	0,00	12.296.000,00	(30.000.000,00)
24.	Kelurahan Lape	8.582.000,00	0,00	(12.296.000,00)
25.	Kecamatan Boawae	258.000,00	0,00	8.582.000,00
26.	Kelurahan Ratongamobo	3.480.000,00	3.218.500,00	258.000,00
27.	Kelurahan Natanage	5.000.000,00	4.979.432,00	261.500,00
28.	Kelurahan Natanage Timur	450.000,00	865.000,00	20.568,00
29.	Kelurahan Nageoga	0,00	15.084.350,00	(415.000,00)
30.	Kelurahan Olakile	450.000,00	0,00	(15.084.350,00)
31.	Kecamatan Keo Tengah	0,00	1.017.000,00	450.000,00
32.	Inspektorat	0,00	1.442.000,00	(1.017.000,00)
33.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian	0,00	650.000,00	(1.442.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	dan Pengembangan Daerah			
34	Badan Keuangan Daerah	1.992.000,00	0,00	(650.000,00)
35	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	0,00	450.000,00	1.992.000,00

5.4.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer - LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp44.829.825.480,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.681.449.120,00 dari Tahun 2021 sebesar Rp50.511.274.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135
Beban Transfer - LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		44.829.825.480,00	50.511.274.600,00	(5.681.449.120,00)
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	656.442.065,00	522.000.000,00	134.442.065,00
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	395.578.715,00	541.000.000,00	(145.421.285,00)
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	43.777.804.700,00	47.266.274.600,00	(3.488.469.900,00)
4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	2.182.000.000,00	(2.182.000.000,00)
5.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.136
Perbandingan Beban Transfer - LO dan LRA TA 2022

Beban Transfer - LO	Jumlah	Belanja Transfer - LRA	Jumlah	Selisih
	(Rp)		(Rp)	
Beban Transfer - LO	44.829.825.480,00	Belanja Transfer - LRA	126.674.931.480,00	(81.845.106.000,00)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LO	656.442.065,00	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LRA	656.442.065,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - LO	395.578.715,00	Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - LRA	395.578.715,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LO	00,00	Belanja Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	80.345.106.000,00	(80.345.106.000,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LO	43.777.804.700,00	Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	45.277.804.700,00	(1.500.000.000,00)
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus - LO	0,00	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus - LRA	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Selisih Beban Transfer -LO dan Belanja Transfer -LRA sebesar Rp(81.845.106.000,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Selisih Beban Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa -LO dan Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa -LRA sebesar Rp(80.345.106.000,00) dapat dijelaskan terdapat pengurangan penerimaan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang tidak diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp(80.345.106.000,00);
- b) Selisih Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa -LO dan Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa -LRA sebesar Rp(1.500.000.000,00) dapat dijelaskan terdapat pengurangan atas pekerjaan program Pamsimas TA 2022 yang belum diserahkan kepada Desa yang sebelumnya sudah dibebankan kedalam Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa sebesar Rp(1.500.000.000,00).

5.4.2.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp22.639.955.636,69 mengalami peningkatan sebesar Rp39.577.402.785,81 dari Tahun 2021 sebesar Rp(16.937.447.149,12).

5.4.3 Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(2.655.098.417,44) merupakan nilai sisa dari aset-aset yang dihapus pada tahun berjalan dan mengalami penurunan sebesar Rp2.655.098.417,44 dari Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.3.1 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(2.655.098.417,44) merupakan nilai sisa dari aset tetap gedung yang dihapus pada UPTD Puskesmas Boawae sebesar Rp915.705.500,00 dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.156.785.675,89; serta aset lain-lain yang dihapus pada tahun berjalan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp442.842.310,28; Dinas Kesehatan sebesar Rp2.435.714,29; Dinas Pariwisata sebesar Rp100.355.179,12; Bagian Hukum sebesar Rp3.822.142,86; Bappelitbangda sebesar Rp9.901.500,00 dan BK-Diklat sebesar Rp23.250.395,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.137
Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dan LRA TA 2022**

Penghapusan Gedung dan Bangunan			
Perangkat Daerah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Surplus/Defisit
UPTD Puskesmas Boawae	1.866.246.000,00	(950.540.500,00)	915.705.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.611.110.622,58	(454.324.946,69)	1.156.785.675,89



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Penghapusan Aset Lain-lain			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	591.278.925,05	(148.436.614,77)	442.842.310,28
Dinas Kesehatan	17.050.000,00	(14.614.285,71)	2.435.714,29
Dinas Pariwisata	219.399.699,00	(119.044.519,88)	100.355.179,12
Bagian Hukum	94.093.767,00	(90.271.624,14)	3.822.142,86
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	319.346.900,00	(309.445.400,00)	9.901.500,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	305.579.600,00	(282.329.205,00)	23.250.395,00
Total	5.024.105.513,63	(2.369.007.096,19)	2.655.098.417,44

5.4.4 Beban Luar Biasa

Beban Luar biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah.

5.4.4.1 Beban Luar Biasa

Tidak terdapat Beban Luar Biasa Tahun 2022. Beban dari kegiatan luar biasa yang berasal dari belanja tidak terduga tahun 2022 sebesar Rp4.450.062.433,00 telah direklas ke beban barang dan jasa.

5.4.5 Surplus/Defisit LO

Surplus /Defisit-LO Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp19.984.857.219,25 mengalami peningkatan sebesar Rp40.622.563.555,37 dari Tahun 2021 sebesar Rp(20.637.706.336,12).

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

5.5.1. Penjelasan Umum Laporan Arus Kas

a. Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk, arus kas keluar, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi pada tanggal pelaporan.

b. Definisi

- 1) Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas;
- 2) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah;
- 3) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



c. Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan/ arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan transfer pusat, dan penerimaan transfer provinsi. Sedangkan pengeluaran/ arus keluar kas dari aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja barang dan jasa.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset lainnya yang tidak masuk dalam aset. Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan antara lain berupa penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus kas keluar antara lain berupa kas untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya.

Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan aset dan surplus anggaran.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain berupa penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, dan penjualan investasi permanen lainnya. Sedangkan arus keluar kas antara lain berupa pembayaran cicilan utang, pembayaran obligasi pemerintah dan penyertaan modal pemerintah.

Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah. Arus masuk kas non anggaran antara lain berupa penerimaan pihak ketiga dan kiriman uang masuk, sedangkan arus keluar kas antara lain berupa pengeluaran untuk pihak ketiga dan kiriman uang keluar.

5.5.2. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

5.5.2.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.115.887.788,30 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp702.240.979.035,09 merupakan Pendapatan Daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp702.853.486.223,09 dikurangi penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp612.507.188,00 yang dicatat sebagai arus kas masuk pada aktivitas investasi. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp607.125.091.246,79 merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp476.000.097.333,79 ditambah Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.450.062.433,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp126.674.931.480,00.



Tabel 5.138
Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	5.588.247.094,00	4.915.584.868,00
Penerimaan Retribusi Daerah	2.879.649.883,20	2.563.893.827,51
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.207.175.564,00	3.688.014.444,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.972.454.047,89	22.108.634.560,52
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	10.204.297.703,00	11.895.627.458,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	407.250.885.737,00	407.222.571.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	145.665.009.049,00	121.284.707.710,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	1.150.865.000,00	8.410.250.000,00
Penerimaan Dana Desa	80.345.106.000,00	89.221.092.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	17.957.938.909,00	13.567.127.294,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	6.019.350.048,00	15.824.910.133,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	702.240.979.035,09	700.702.413.295,03
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	267.524.611.956,00	263.787.905.340,00
Pembayaran Barang	169.078.523.799,79	186.246.100.112,21
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	17.552.418.715,00	11.751.630.550,00
Pembayaran Bantuan Sosial	21.844.542.863,00	16.447.476.155,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	125.622.910.700,00	138.669.366.600,00
Pembayaran Tak Terduga	4.450.062.433,00	3.700.259.187,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	656.442.065,00	522.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	395.578.715,00	541.000.000,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	607.125.091.246,79	621.665.737.944,21
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	95.115.887.788,30	79.036.675.350,82

5.5.2.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp(118.324.534.165,50).

Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:

- Arus masuk kas sebesar Rp674.756.323,00 merupakan Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp612.507.188,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp62.249.135,00;



- b) Arus keluar kas sebesar Rp118.999.290.488,50 merupakan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp113.999.290.488,50 dan penambahan pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00.

Tabel 5.139
Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	612.507.188,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	62.249.135,00	97.564.873,00
Jumlah Arus Masuk Kas	674.756.323,00	97.564.873,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	3.059.090.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	13.935.502.529,00	60.974.475.110,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	17.863.000.833,00	37.508.371.047,80
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.200.187.042,50	76.696.279.403,28
Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.941.510.084,00	1.837.244.716,55
Perolehan Aset Lainnya	0,00	17.800.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	118.999.290.488,50	182.034.170.277,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(118.324.534.165,50)	(181.936.605.404,63)

5.5.2.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 surplus sebesar Rp3.272.735.708,00 mencerminkan penerimaan Transitoris lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran Transitoris yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali Uang Persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris sebesar Rp55.819.810.654,52 meliputi penerimaan PFK sebesar Rp36.748.695.615,52 serta penerimaan kembali sisa UP dan TU Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.071.115.039,00 yang terdiri dari GU Nihil sebesar Rp6.260.280.558,00; TU Nihil sebesar Rp10.709.129.641,00; setoran sisa UP sebesar Rp1.657.434.442,00 dan setoran sisa TU sebesar Rp444.270.398,00.

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp52.547.074.946,52 meliputi pengeluaran PFK BUD sebesar Rp33.475.959.907,52 dan pengeluaran transitoris berupa



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

pengeluaran Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp19.071.115.039,00 yang terdiri dari pengeluaran Uang Persediaan (UP) sebesar Rp7.917.715.000,00 dan Tambah Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp11.153.400.039,00. Terdapat perbedaan Saldo utang PFK di neraca tahun berjalan dengan saldo utang PFK di neraca tahun sebelumnya ditambah penerimaan PFK tahun berjalan dikurangi pengeluaran PFK tahun berjalan di LAK sebesar Rp17.513.962,00 yang merupakan pengurangan utang PFK tahun sebelumnya dari bendahara BOS dan BLUD sebesar Rp66.467.216,00, utang PFK tahun berjalan dari Dana BOS sebesar Rp83.981.178,00 disebabkan karena pada LAK tidak memuat penyetoran utang PFK dari Perangkat Daerah.

Tabel 5.140
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36.748.695.615,52	40.118.405.735,89
Penerimaan Kembali Sisa UP & TU TA 2021	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Sisa UP & TU TA 2022	19.071.115.039,00	27.696.172.810,00
Jumlah Arus Masuk Kas	55.819.810.654,52	67.814.578.545,89
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	33.475.959.907,52	41.261.325.606,00
Pengeluaran UP/TUP 2022	19.071.115.039,00	27.696.172.810,00
Jumlah Arus Keluar Kas	52.547.074.946,52	68.957.498.416,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3.272.735.708,00	(1.142.919.870,11)

5.5.2.4 Kenaikan/Penurunan Kas

Dengan adanya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp95.115.887.788,30, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(118.324.534.165,50), dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp3.272.735.708,00, maka pada tahun 2022 terdapat Penurunan Kas sebesar Rp(19.935.910.669,20).

Tabel 5.141
Kenaikan/Penurunan Kas TA 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Bersih		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	95.115.887.788,30	79.036.675.350,82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(118.324.534.165,50)	(181.936.605.404,63)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3.272.735.708,00	(1.142.919.870,11)
Kenaikan/Penurunan Kas	(19.935.910.669,20)	(104.042.849.923,92)

5.5.2.5 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas sebesar Rp20.293.504.555,80 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp20.177.095.819,89 dari saldo kas tahun 2021 sebesar Rp40.470.600.375,69. Saldo akhir kas dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 5.142
Saldo Akhir Kas TA 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	7.945.846.988,26	38.478.982.482,94
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.096.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	12.197.770.967,13	1.446.207.509,65
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi di FKTP	9.674.517,20	346.103.952,20
Saldo Akhir Kas Dana BOS	56.230.905,21	128.743.214,90
Saldo Akhir Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya (PFK)	83.981.178,00	66.467.216,00
Jumlah	20.293.504.555,80	40.470.600.375,69



5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

5.6.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp2.048.089.882.945,89 merupakan reklasifikasi dari ekuitas 2021.

5.6.2. Penambahan Ekuitas Dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp19.984.857.219,25.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp(29.485.084.746,75) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.143

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2022

URAIAN	NILAI KOREKSI
Koreksi Ekuitas-Kas	(258.699.112,69)
Koreksi tambah Saldo awal Kas BOS (Kas di Bank) yang belum dicatat di 2021	951,31
Koreksi kurang Saldo awal Kas BOS (Kas di Bank) SDI Tuanio atas belanja modal yang dilakukan di tahun 2021 dan belum dicatat di 2021	(47.976.000,00)
Koreksi kurang kas bendahara penerimaan karena kurang catat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari pendapatan tunai non BPJS pada Empat Puskesmas:Maunori, Nangaroro, Mauponggo, Jawakisa (pendapatan tahun 2021 dan disetor di tahun 2022)	(4.096.000,00)
Koreksi kurang Kas Dana Kapitasi di FKTP BLUD RSUD tahun 2021 yang disetor ke Kas Daerah di tahun 2022	(206.627.800,00)
Koreksi kurang Saldo awal Kas BOS (Kas di Bank) yang semula dicatat pada LK Unaudited	(264,00)
Koreksi Ekuitas-Piutang	(1.229.340.930,25)
Koreksi Tambah Saldo Awal Piutang	
Koreksi tambah piutang retribusi pelayanan pasar -kios pada Kecamatan Aesesa yang direklas dari Dinas Kopperindag	571.608.860,00
Koreksi tambah piutang pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2022	61.165.531,00
Koreksi tambah piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2022	518.230.613,00
Koreksi tambah piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2022	1.832.756.808,00
Koreksi tambah piutang Pajak Air Permukaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2022	6.767.349,00
Koreksi tambah saldo awal piutang DBH Pasal 25/29 OP karena adanya penetapan kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan PMK NO. 127/PMK,07/2022.	6.626.052,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	NILAI KOREKSI
koreksi tambah saldo awal piutang DBH SDA Minerba - Royalti karena adanya penetapan kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan PMK NO. 127/PMK,07/2022.	8.555.334,00
Koreksi tambah saldo awal piutang pajak hotel karena penyesuaian realisasi penerimaan piutang pajak hotel tahun 2020 dan 2021 yang nilai piutangnya belum tercatat	29.831.950,00
Koreksi tambah saldo awal piutang Pajak Rumah Makan karena penyesuaian realisasi penerimaan piutang pajak rumah makan tahun 2021 yang nilai piutangnya tidak tercatat sebelumnya	3.089.000,00
Koreksi tambah saldo awal piutang pajak reklame karena terdapat kelebihan stor pada beberapa objek untuk beberapa objek pada tahun 2021	133.300,00
Koreksi tambah saldo awal piutang pajak Bumi dan Bangunan karena penyesuaian kembali saldo piutang tahun pajak 2008,20210,2011,2012,2013,2014,2020, dan 2021 atas penghapusan piutang	19.695.655,00
Koreksi tambah saldo awal piutang pajak air tanah	687.000,00
koreksi tambah saldo awal piutang retribusi kios kecamatan Aesesa	1.296.000,00
Koreksi tambah piutang retribusi pelayanan pasar-kios pada Kecamatan Boawae yang direklas dari Dinas Kopperindag	33.641.000,00
Koreksi tambah piutang retribusi pelayanan pasar-kios pada Kecamatan Nangaroro yang direklas dari Dinas Kopperindag	4.301.000,00
Koreksi tambah piutang retribusi pelayanan pasar-kios pada Kecamatan Keo Tengah yang direklas dari Dinas Kopperindag	4.320.000,00
Koreksi tambah nilai temuan SKTJM 2021 an.Hardianus Nu	150.000,00
Koreksi Kurang Saldo Awal Piutang	
Koreksi kurang saldo awal piutang DBH PPh Pasal 21 karena adanya penetapan kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan PMK NO. 127/PMK,07/2022	(1.199.294.850,00)
Koreksi kurang saldo piutang DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota karena adanya penetapan kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan PMK NO. 127/PMK,07/2022	(1.227.769.711,00)
Koreksi kurang saldo awal piutang DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota karena adanya penetapan kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan PMK NO. 127/PMK,07/2022	(8.571.842,00)
Koreksi kurang saldo awal DBH PBB Bagi Rata karena adanya penetapan kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan PMK NO. 127/PMK,07/2022	(1.188.292.832,00)
Koreksi kurang saldo awal piutang DBH Cukai Tembakau (CHT) karena adanya penetapan kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan PMK NO. 127/PMK,07/2022	(88.257.610,00)
Koreksi kurang saldo awal piutang DBH SDA Minerba - Iuran Tetap karena adanya penetapan kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan PMK NO. 127/PMK,07/2022	(1.101.877,00)
Koreksi kurang saldo awal piutang pajak mineral bukan logam dan batuan karena penyesuaian kembali terhadap kelebihan pencatatan nilai piutang tahun 2021	(0,25)
Koreksi kurang piutang retribusi pelayanan pasar -kios pada Dinas Kopperindag yang direklas ke kecamatan Aesesa	(571.608.860,00)
Koreksi kurang piutang retribusi pelayanan pasar -kios pada Dinas Kopperindag yang direklas ke kecamatan Boawae	(33.641.000,00)
Koreksi kurang piutang retribusi pelayanan pasar-kios pada Dinas Kopperindag yang direklas ke kecamatan Nangaroro	(4.301.000,00)
Koreksi kurang piutang retribusi pelayanan pasar-kios pada Dinas Kopperindag yang direklas ke kecamatan Keo Tengah	(4.320.000,00)
Koreksi kurang saldo awal piutang retribusi sewa rumah dinas tahun 2021 pada Dinas Kesehatan yang telah disetor di tahun 2021	(3.350.000,00)
Koreksi kurang saldo awal piutang retribusi sewa tanah BKD karena penyesuaian kembali terhadap kelebihan pencatatan piutang tahun 2020,2021 akibat pendobelan penetapan retribusi terhadap beberapa subjek	(1.420.000,00)
Koreksi kurang saldo awal piutang air pada BLUD SPAM karena tagihan tidak sesuai meter air	(266.800,00)
Koreksi Ekuitas- Persediaan	(209.416.949,34)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	NILAI KOREKSI
Koreksi tambah saldo awal persediaan obat Dinas Kesehatan yang belum dicatat tahun 2021	408.513.574,66
Koreksi kurang saldo awal persediaan obat Dinas Kesehatan yang dicatat double tahun 2021	(617.930.524,00)
Koreksi Ekuitas- Aset Tetap	899.124.244,00
Koreksi Tambah Aset Tetap	
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin Tahun 2020 BPBD yang diperoleh dari Hibah BNPB berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: PRJ-138/BNPB/SU/RT.03.03/03/2020	135.564.240,00
Koreksi tambah aset tetap JIJ SMPN 6 Boawae yang dimutasi dari BPBD	144.210.336,00
Koreksi tambah aset tetap JIJ SDI Batalewa berupa TPT yang dimutasi dari BPBD	144.434.523,94
Koreksi tambah aset tanah BKD yang dimutasi dari Kelurahan Rega	100.000.000,00
koreksi tambah aset peralatan dan mesin RSD berupa peralatan kedokteran (laparotomiset instrumen set) tahun 2022 yang dimutasi dari Dinas KB	32.967.000,00
koreksi tambah aset peralatan dan mesin RSD berupa neon box tahun 2021 yang dimutasi dari Dinas Kesehatan	15.499.990,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Utetoto yang direklas dari Dinas Kesehatan	1.606.032.659,32
Koreksi tambah aset gedung dan bangunan UPT Dinas Puskesmas Utetoto yang direklas dari Dinas Kesehatan	4.950.923.451,58
Koreksi tambah aset JIJ UPT Dinas Puskesmas Utetoto yang direklas dari Dinas Kesehatan	554.222.472,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Jawakisa yang direklas dari Dinas Kesehatan	235.916.490,00
Koreksi tambah aset gedung dan bangunan UPT Dinas Puskesmas Jawakisa yang direklas dari Dinas Kesehatan	2.304.990.335,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Boawae yang direklas dari Dinas Kesehatan	777.328.503,00
Koreksi tambah aset gedung dan bangunan UPT Dinas Puskesmas Boawae yang direklas dari Dinas Kesehatan	8.044.493.852,69
Koreksi tambah aset JIJ UPT Dinas Puskesmas Boawae yang direklas dari Dinas Kesehatan	447.427.406,50
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Mauponggo yang direklas dari Dinas Kesehatan	1.216.708.802,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Maunori yang direklas dari Dinas Kesehatan	424.480.139,00
Koreksi tambah aset JIJ UPT Dinas Puskesmas Maunori yang direklas dari Dinas Kesehatan	246.607.143,75
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Nangaroro yang direklas dari Dinas Kesehatan	1.026.045.539,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Nangaroro tahun 2021 berupa I-Phone yang belum dicatat	29.870.000,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Kaburea yang direklas dari Dinas Kesehatan	883.382.539,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Danga yang direklas dari Dinas Kesehatan	1.174.934.303,00
Penambahan Penambahan aset JIJ dan Gedung Dinas Perhubungan yang berasal dari persediaan tahun 2021 Dinas Perhubungan yang berasal dari persediaan tahun 2021	399.165.000,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin Dinas Kesehatan yang berasal dari hibah Kementerian	269.295.671,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin Dinas Kesehatan yang berasal dari hibah PT. Unilever Indonesia berdasarkan BA No.....	23.595.000,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin Dinas Kesehatan yang berasal dari hibah Propinsi	2.083.333,00
Koreksi tambah aset peralatan dan mesin sekolah-sekolah yang dimutasi dari Dinas PK	1.154.502.000,00
Koreksi tambah aset gedung dan bangunan sekolah-sekolah yang dimutasi dari Dinas PK	4.834.839.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	NILAI KOREKSI
Koreksi tambah aset JIJ SD Inpres Lego berupa Rehab WC SD Inpres Lego yang dimutasi dari Dinas PK	14.990.000,00
Koreksi tambah aset tetap tanah Dinas PK berupa tanah Tanah SDN Jawakisa dan SMPN 2 Aesesa Selatan yang belum tercatat	139.850.000,00
Koreksi tambah aset JIJ PUPR yang dimutasi dari BTT PPKD	510.186.000,00
koreksi tambah aset peralatan dan mesin SDI Tuanio yang belum dicatat di tahun 2021	47.976.000,00
Koreksi Kurang Aset Tetap	
Koreksi kurang aset tetap JIJ BPBD yang dimutasi ke SMPN 6 Boawae	(144.210.336,00)
Koreksi kurang aset tetap JIJ BPBD berupa TPT yang dimutasi ke SDI Batalewa	(144.434.523,94)
Koreksi kurang aset tanah kelurahan Rega yang berasal belanja pemeliharaan tanah Kelurahan Rega yang dimutasi ke BKD	(100.000.000,00)
koreksi kurang aset peralatan dan mesin Dinas KB berupa peralatan kedokteran (laparotomiset instrumen set) yang dimutasi ke RSD	(32.967.000,00)
Koreksi kurang aset JIJ UPT Dinas Puskesmas Boawae yang telah dihapus berdasarkan BA..	(3.500.000,00)
Koreksi kurang aset peralatan dan mesin Dinas Kesehatan yang direklas ke UPT Dinas Puskesmas...	(7.360.328.964,32)
Koreksi kurang aset gedung dan bangunan Dinas Kesehatan yang direklas ke UPT Dinas Puskesmas...	(15.300.407.639,27)
Koreksi kurang aset JIJ Dinas Kesehatan yang direklas ke UPT Dinas Puskesmas	(1.248.257.022,25)
Koreksi kurang aset peralatan dan mesin Dinas PK atas aset yang dimutasi ke sekolah-sekolah	(1.154.502.000,00)
Koreksi kurang aset Gedung dan bangunan Dinas PK atas aset yang dimutasi ke sekolah-sekolah	(4.834.839.000,00)
Koreksi kurang aset JIJ Dinas PK berupa Rehab WC SD Inpres Lego yang dimutasi ke SD Inpres Lego	(14.990.000,00)
koreksi kurang aset JIJ BTT pada PPKD yang dimutasi ke Dinas PUPR	(510.186.000,00)
koreksi kurang atas KDP yang telah selesai 100% dikarenakan nilai tersebut tidak menjadi aset pmda, nilai tersebut merupakan kegiatan "Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi Mbay Kanan" dilakukan pada tahun 2010 yang seharusnya menjadi beban pemeliharaan pada tahun 2010	(144.775.000,00)
Koreksi Ekuitas- Penyusutan	(20.870.213.823,58)
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan Dinas Kopperindag berupa hibah Pasar Rakyat Danga dari Kementerian Perdagangan RI berdasarkan BAST No: 265/M-DAG/BAST/07/2022	(386.859.085,60)
koreksi tambah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Dinas Kopperindag berupa bangunan pasar Wolowae/Mariewa karena perubahan nilai perolehan yang awalnya dicatat gabung	(5.462.484,33)
koreksi tambah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Dinas Kopperindag berupa bangunan pasar Keo Tengah karena perubahan nilai perolehan yang awalnya dicatat gabung	(14.093.549,33)
koreksi tambah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Dinas Kopperindag berupa bangunan pasar Nangaroro karena perubahan nilai perolehan yang awalnya dicatat gabung	(5.060.000,00)
koreksi tambah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Dinas Kopperindag berupa bangunan pasar Raja Selatan karena perubahan nilai perolehan yang awalnya dicatat gabung	(2.324.166,67)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin Tahun 2020 BPBD yang diperoleh dari Hibah BNPB berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: PRJ-138/BNPB/SU/RT.03.03/03/2020	(38.732.640,00)
koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin RSD berupa neon box tahun 2021 yang dimutasi dari Dinas Kesehatan	(3.099.998,00)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Utetoto yang direklas dari Dinas Kesehatan	(1.377.288.214,32)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan UPT Dinas Puskesmas Utetoto yang direklas dari Dinas Kesehatan	(825.153.908,60)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	NILAI KOREKSI
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset JIJ UPT Dinas Puskesmas Utetoto yang direklas dari Dinas Kesehatan	(78.418.106,56)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Jawakisa yang direklas dari Dinas Kesehatan	(11.644.598,00)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan UPT Dinas Puskesmas Jawakisa yang direklas dari Dinas Kesehatan	(63.289.539,46)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Boawae yang direklas dari Dinas Kesehatan	(55.100.998,00)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan UPT Dinas Puskesmas Boawae yang direklas dari Dinas Kesehatan	(41.094.786,76)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset JIJ UPT Dinas Puskesmas Boawae yang direklas dari Dinas Kesehatan	(32.869.968,46)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Mauponggo yang direklas dari Dinas Kesehatan	(114.261.398,00)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Maunori yang direklas dari Dinas Kesehatan	(22.436.390,43)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset JIJ UPT Dinas Puskesmas Maunori yang direklas dari Dinas Kesehatan	(12.330.357,19)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Nangaroro yang direklas dari Dinas Kesehatan	(106.118.990,43)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Nangaroro tahun 2021 berupa <i>I-Phone</i> yang belum dicatat	(5.974.000,00)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Kaburea yang direklas dari Dinas Kesehatan	(106.118.990,43)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin UPT Dinas Puskesmas Danga yang direklas dari Dinas Kesehatan	(279.678.140,86)
Penambahan akumulasi penyusutan aset JIJ yang diperoleh dari hibah berdasarkan BAST Hibah berupa Pelabuhan Penyeberangan Marapokot dari Kementerian Perhubungan kepada Pemda Nagekeo Nomor: PL.301/1/03/BPTDXIII-NTT/2022 ; Nomor: 552/BPBJ-NGK/18b/03/2022	(9.464.905.807,87)
Penambahan akumulasi penyusutan aset JIJ Dinas Perhubungan dari dari persediaan tahun 2021	(31.985.000,00)
Penambahan akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan yang diperoleh dari hibah berdasarkan BAST Hibah berupa Pelabuhan Penyeberangan Marapokot dari Kementerian Perhubungan kepada Pemda Nagekeo Nomor: PL.301/1/03/BPTDXIII-NTT/2022 ; Nomor: 552/BPBJ-NGK/18b/03/2022	(4.302.172.160,13)
Penambahan akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin yang diperoleh dari hibah berdasarkan BAST Hibah berupa Pelabuhan Penyeberangan Marapokot dari Kementerian Perhubungan kepada Pemda Nagekeo Nomor: PL.301/1/03/BPTDXIII-NTT/2022 ; Nomor: 552/BPBJ-NGK/18b/03/2022	(1.406.443.367,00)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan (2017) Dinas PUPR yang berasal dari KDP	(1.416.128.833,33)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin Dinas Kesehatan yang berasal dari hibah Kementerian	(52.865.900,20)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin Dinas Kesehatan yang berasal dari hibah PT. Unilever Indonesia	(4.719.000,00)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin Dinas Kesehatan yang berasal dari hibah Propinsi	(416.666,60)
Koreksi tambah akumulasi aset peralatan dan mesin SDI Tuanio yang belum dicatat di tahun 2021	(11.744.000,00)
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
koreksi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Dinas Kopperindag berupa bangunan pasar Raja Selatan karena perubahan nilai perolehan yang awalnya dicatat gabung	86.380.666,67
Koreksi kurang akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin Dinas Kesehatan yang direklas ke UPT Dinas Puskesmas	2.075.747.718,46
Koreksi kurang akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan Dinas Kesehatan yang direklas ke UPT Dinas Puskesmas...	929.538.234,82
Koreksi kurang akumulasi penyusutan aset JIJ Dinas Kesehatan yang direklas ke UPT Dinas Puskesmas	123.618.432,22
Koreksi kurang akumulasi penyusutan aset JIJ UPT Dinas Puskesmas Boawae yang telah dihapus berdasarkan BA..	2.788.333,33



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	NILAI KOREKSI
koreksi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Dinas Kopperindag berupa bangunan pasar Aewoe karena perubahan nilai perolehan yang awalnya dicatat gabung	8.705.786,12
koreksi tambah akumulasi penyusutan atas penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dan aset gedung dan bangunan dari KDP tahun selesai s.d tahun 2021.	(3.736.840.198,64)
koreksi tambah akumulasi penyusutan atas penambahan aset gedung dan bangunan atas KDP dikarenakan terdapat perencanaan dan pemeliharaan yang dilakukan sebelum tahun 2022 dan pekerjaan tersebut telah selesai	(81.361.750,00)
Koreksi Ekuitas- Aset Lainnya	(7.831.457.774,79)
Koreksi Tambah Aset Lainnya	
Koreksi tambah aset tetap lainnya pada Dinas Peternakan berupa anak sapi	11.000.000,00
Koreksi tambah ATB UPTD Puskemas Danga yang direklas dari Dinkes	185.460.000,00
Koreksi Kurang Aset Lainnya	
Koreksi kurang ATB Dinkes yang direklas ke UPTD Puskemas Danga	(185.460.000,00)
Koreksi kurang aset lain-lain PUPR berupa jalan desa yang dihibahkan ke desa	(901.345.825,00)
Koreksi kurang aset lain-lain berupa nilai tanah Maroladho yang merupakan tanah diluar tanah Pemda yang sebelumnya dicatat gabung dengan tanah Pemda	(6.974.202.049,79)
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
Koreksi kurang amortisasi ATB Dinkes yang direklas ke UPTD Puskemas Danga	37.092.000,00
Koreksi tambah amortisasi ATB UPTD Puskemas Danga yang direklas dari Dinkes	(37.092.000,00)
Koreksi tambah saldo awal TGR 2022	44.850.100,00
Koreksi kurang saldo awal TGR 2022	(11.760.000,00)
Koreksi Ekuitas- Kewajiban	14.919.599,90
Koreksi kurang utang jangka pendek lainnya tahun 2021 pada Dinas PUPR yang telah dibayarkan	0,03
Koreksi kurang utang jangka pendek lainnya Dinas Pertanian berupa Pembangunan Jaringan Irigasi Perpipa BPP Rendu yang telah dicairkan	(0,13)
koreksi kurang utang beban pegawai atas kekurangan pembayaran gaji pegawai kecamatan Nangaroro tahun 2021 yang telah dicairkan	14.919.600,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	(29.485.084.746,75)
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(29.485.084.746,75)

5.6.4. Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.038.589.655.418,39.



BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Nagekeo adalah salah satu daerah otonom yang terbentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan pembangunan daerah menjadi suatu hal yang sangat penting, mendasar dan harus benar-benar dilaksanakan secara arif dan bijaksana serta terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar tercapainya cita-cita luhur yang didambakan setiap masyarakat Nagekeo yaitu kesejahteraan di semua aspek kehidupannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 telah menetapkan bahwa Kabupaten Nagekeo adalah salah satu Kabupaten baru yang definitif dan otonom dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena kebijakan pembangunan daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo, sembari tetap menjalin kerja sama yang intens dengan masyarakat demi kebaikan bersama. Kebijakan Pemerintah Nagekeo tersebut telah dituangkan dalam visi daerah periode 2018-2023 "*Nagekeo SMART (Sejahtera, Nyaman, Bermartabat)*" dengan misi:

1. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi komoditas dan sektor potensial;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal;
3. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan infrastruktur wilayah untuk pembangunan kota persinggahan wisata;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional; dan
6. Melakukan percepatan revolusi mental berbasis budaya dan kearifan lokal.

Letak Geografis Kabupaten Nagekeo merupakan satu dari sembilan kabupaten di daratan Pulau Flores dan Lembata. Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ibu kota Mbay. Letak Geografis Kabupaten Nagekeo adalah di antara 8°-26' 00" - 8°64' 40" Lintang Selatan dan 121°6'20" -121°32' 00" Bujur Timur.

Secara Geografis Batas Wilayah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut: Bagian Utara berbatasan dengan Laut Flores, bagian Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Ende dan Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngada. Kabupaten Nagekeo tergolong daerah yang beriklim tropis dan terbentang hampir sebagian besar padang rumput, juga ditumbuhi pepohonan seperti kemiri, asam, kayu manis, lontar dan sebagainya serta kaya dengan fauna, antara lain hewan-hewan besar, hewan-hewan kecil, unggas, binatang menjalar, dan binatang liar. Disamping itu daerah ini kaya dengan obyek wisata seperti Pantai Ena Gera, Pantai Watuapi, Pantai Nagekeke, Muara Kalianjing, Muara Gurumoreng, Pantai Nangadhero dan lain-lain. Panorama alam seperti air panas (Putu) dan wisata budaya seperti peninggalan batu rumah adat tradisional, kesenian dan kerajinan tangan. Luas wilayah Kabupaten Nagekeo 1.416,96 km². Kabupaten Nagekeo bertopografi daratan, berbukit dan bergunung-gunung dengan puncak tertinggi pada Gunung Ebulobo ± 2.149 km.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 sebanyak 166.154 jiwa, rincian laki-laki 82.479 jiwa dan perempuan 83.675 jiwa merupakan modal pembangunan daerah dan nasional. Pada dasarnya penduduk merupakan sumber daya utama penyelenggaraan dan keberhasilan pembangunan. Namun, dengan kualitas mayoritas penduduk yang rendah, akan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri. Aspek demografi, ditentukan oleh berbagai variabel internal dan eksternal daerah yang saling terkait dan tidak mudah dalam pengendaliannya.

Angka Kelahiran Total (TFR) 2022 sebesar 2.422 dimana lahir hidup adalah 2.397 atau 98,7% dan lahir mati 25 atau 1,03%. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai daerah otonom baru sangat membutuhkan Perangkat Daerah yang dapat melayani kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik secara profesional kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022, didukung dengan SDM baik dari tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas. Data SDM yang ditampilkan disini hanya PNS sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rincian lengkap Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering sebagai berikut:

Eselon	Jenis Kelamin		Total Jabatan/ Eselon
	Laki-Laki	Perempuan	
Eselon II	25	8	33
Eselon III	108	33	141
Eselon IV	90	92	182
Jumlah	223	133	356

Sumber Data: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagekeo

Rincian lengkap Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan sebagai berikut:

No	Pendidikan	Pendidikan		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S2	38	27	65
2.	S1	702	1228	1930
3.	DIV/DIII/DII/DI	215	768	983
4.	SMA	188	206	394
5.	SMP	8	2	10
6.	SD	1	2	3
	Jumlah	1152	2233	3385

Sumber Data: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagekeo

Rincian lengkap Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan sebagai berikut:

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Golongan I	2	1	3
Golongan II	150	263	413
Golongan III	787	1755	2542
Golongan IV	213	214	427
Jumlah	1.152	2.233	3.385

Sumber Data: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagekeo



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Rincian lengkap Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Pendidikan sebagai berikut:

No	Pendidikan	Pendidikan		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S1	53	70	123
2.	DIV/DIII/DII/DI	4	3	7
3.	SMA	11	4	15
Jumlah		68	77	145

Sumber Data: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagekeo

Rincian lengkap Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Golongan sebagai berikut:

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
PPPK Golongan V	11	4	15
PPPK Golongan VII	4	3	7
PPPK Golongan IX	53	70	123
Jumlah	68	77	145

Sumber Data: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagekeo



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) guna meningkatkan *Good Governance*.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan lebih optimal apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa di-komitmen-kan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	SALDO 31 DES 2022	KOREKSI SALDO AWAL SETELAH AUDIT		SALDO 31 DES 2022 SETELAH DI KOREKSI	PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2021	MUTASI TAHUN 2022		SALDO 31 DES 2022	PENYISIHAN TAHUN 2022	BEBAN PENYISIHAN	NILAI PIUTANG BERSIH
		TAMBAH	KURANG			TAMBAH	KURANG				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(7)-(8)	(10)	(11)=(10)-(6)	(12)=(9)-(11)
PAJAK DAERAH	3.557.497.813,25	53.436.905,00	0,25	3.610.247.718,00	1.495.940.226,52	2.462.010.968,00	1.866.235.980,00	4.206.709.706,00	1.817.935.300,86	321.995.074,34	2.388.774.405,14
Pajak Hotel	6.933.600,00	29.831.950,00		36.765.550,00	1.926.825,00	330.784.341,00	362.146.291,00	5.403.600,00	1.193.800,00	(733.025,00)	4.209.800,00
Pajak Rumah Makan	55.765.997,00	3.089.000,00		58.854.997,00	17.050.719,70	47.287.000,00	40.929.000,00	65.212.997,00	24.726.323,50	7.675.603,80	40.486.673,50
Pajak Hiburan	35.169.250,00			35.169.250,00	18.469.650,00	372.000,00	220.000,00	35.321.250,00	23.899.060,00	5.429.410,00	11.422.190,00
Pajak Reklame	211.510.312,00	133.300,00		211.643.612,00	87.506.901,70	68.759.625,00	58.495.825,00	221.907.412,00	104.050.566,00	16.543.664,30	117.856.846,00
Pajak Bumi dan Bangunan	2.327.980.817,00	19.695.655,00		2.347.676.472,00	1.350.728.027,67	1.391.863.793,00	931.022.455,00	2.808.517.810,00	1.557.201.451,36	206.473.423,69	1.251.316.358,64
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	920.137.837,25	-	0,25	920.137.837,00	20.258.102,45	614.186.125,00	463.977.325,00	1.070.346.637,00	106.864.100,00	86.605.997,55	963.482.537,00
Pajak Air Tanah	-	687.000,00	-	687.000,00	-	8.758.084,00	9.445.084,00	-	-	-	-
RETRIBUSI DAERAH	1.862.041.627,00	615.166.860,00	618.640.860,00	1.858.567.627,00	1.420.129.227,00	540.621.726,00	462.627.366,00	1.936.561.987,00	1.597.414.587,00	177.285.360,00	339.147.400,00
Retribusi Pelayanan Pasar	613.870.860,00	615.166.860,00	613.870.860,00	615.166.860,00	545.150.860,00	78.120.000,00	63.500.000,00	629.786.860,00	594.818.860,00	49.668.000,00	34.968.000,00
Dinas Koperasi, UMMK, Perindustrian dan Perdagangan	613.870.860,00		613.870.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kecamatan Boawae	-	33.641.000,00	-	33.641.000,00	28.801.000,00	720.000,00	720.000,00	33.641.000,00	31.221.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
- Kecamatan Nangaroro	-	4.301.000,00	-	4.301.000,00	4.301.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	-	-
- Kecamatan Aesesa	-	572.904.860,00	-	572.904.860,00	507.728.860,00	72.000.000,00	57.600.000,00	587.304.860,00	554.976.860,00	47.248.000,00	32.328.000,00
- Kecamatan Keo Tengah	-	4.320.000,00	-	4.320.000,00	4.320.000,00	3.600.000,00	3.380.000,00	4.540.000,00	4.320.000,00	-	220.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.212.370.767,00	-	4.770.000,00	1.207.600.767,00	849.978.367,00	349.101.726,00	345.127.366,00	1.211.575.127,00	977.595.727,00	127.617.360,00	233.979.400,00
Retribusi Sewa Tanah											
- Badan Keuangan Daerah	521.459.594,00		1.420.000,00	520.039.594,00	190.378.214,00	321.678.726,00	322.577.366,00	519.140.954,00	306.044.074,00	115.665.860,00	213.096.880,00
a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan	127.411.173,00	-	3.350.000,00	124.061.173,00	96.100.153,00	27.423.000,00	22.550.000,00	128.934.173,00	108.051.653,00	11.951.500,00	20.882.520,00
-Dinas PPO	89.021.000,00	-	-	89.021.000,00	73.207.700,00	27.423.000,00	19.449.000,00	96.995.000,00	81.808.200,00	8.600.500,00	15.186.800,00
-Dinas Kesehatan	32.154.453,00	-	3.350.000,00	28.804.453,00	22.352.453,00	-	3.101.000,00	25.703.453,00	25.703.453,00	3.351.000,00	-
- Kecamatan Aesesa	540.000,00	-	-	540.000,00	540.000,00	-	-	540.000,00	540.000,00	-	-
-Bagian Administrasi Umum	3.295.720,00	-	-	3.295.720,00	-	-	-	3.295.720,00	-	-	3.295.720,00
-Kecamatan Wolowae	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
b.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	563.500.000,00	-	-	563.500.000,00	563.500.000,00	-	-	563.500.000,00	563.500.000,00	-	-
-Dinas Perhubungan	563.500.000,00	-	-	563.500.000,00	563.500.000,00	-	-	563.500.000,00	563.500.000,00	-	-
Retribusi Tempat Pelelangan	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	113.400.000,00	54.000.000,00	70.200.000,00	-	-	70.200.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	113.400.000,00	54.000.000,00	70.200.000,00	-	-	70.200.000,00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	1.955.283.483,00	-	266.800,00	1.955.016.683,00	1.326.986.194,40	2.356.108.765,30	1.742.815.918,00	2.568.309.530,30	1.811.591.880,23	484.605.685,83	756.717.650,07
a. Pendapatan BLUD	1.955.283.483,00	-	266.800,00	1.955.016.683,00	1.326.986.194,40	2.349.854.540,00	1.742.815.918,00	2.562.055.305,00	1.811.590.609,10	484.604.414,70	750.464.695,90
BLUD SPAM	1.955.283.483,00	-	266.800,00	1.955.016.683,00	1.326.986.194,40	2.349.854.540,00	1.742.815.918,00	2.562.055.305,00	1.811.590.609,10	484.604.414,70	750.464.695,90
b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas Danga)	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
c. Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-	254.225,30	-	254.225,30	1.271,13	1.271,13	252.954,17
Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	254.225,30	-	254.225,30	1.271,13	1.271,13	252.954,17
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.252.936.088,00	15.181.386,00	3.713.288.722,00	1.554.828.752,00	-	8.698.741.000,00	9.776.900.957,00	476.668.795,00	-	-	476.668.795,00
Dana Bagi Hasil Pajak	4.845.981.240,00	6.626.052,00	3.712.186.845,00	1.140.420.447,00	-	6.620.466.000,00	7.669.161.353,00	91.725.094,00	-	-	91.725.094,00
DBH PPh Pasal 21	1.357.355.919,00	-	1.199.294.850,00	158.061.069,00	-	1.760.922.000,00	1.854.641.096,00	64.341.973,00	-	-	64.341.973,00

URAIAN	SALDO 31 DES 2022	KOREKSI SALDO AWAL SETELAH AUDIT		SALDO 31 DES 2022 SETELAH DI KOREKSI	PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2021	MUTASI TAHUN 2022		SALDO 31 DES 2022	PENYISIHAN TAHUN 2022	BEBAN PENYISIHAN	NILAI PIUTANG BERSIH
		TAMBAH	KURANG			TAMBAH	KURANG				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(7)-(8)	(10)	(11)=(10)-(6)	(12)=(9)-(11)
DBH Pasal 25/29 OP	98.335.141,00	6.626.052,00		104.961.193,00			94.661.000,00	199.622.193,00	-		-
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	1.288.576.868,00	-	1.227.769.711,00	60.807.157,00			822.948.000,00	863.776.557,00	19.978.600,00		19.978.600,00
DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	10.683.792,00	-	8.571.842,00	2.111.950,00			28.575.000,00	30.686.950,00	-		-
DBH PBB Bagi Rata	1.991.959.998,00	-	1.188.292.832,00	803.667.166,00			3.820.583.000,00	4.619.531.755,00	4.718.411,00		4.718.411,00
DBH CukaiTembakau (CHT)	99.069.522,00	-	88.257.610,00	10.811.912,00			92.777.000,00	100.902.802,00	2.686.110,00		2.686.110,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	406.954.848,00	8.555.334,00	1.101.877,00	414.408.305,00	-	-	2.078.275.000,00	2.107.739.604,00	384.943.701,00		384.943.701,00
DBH SDA Minerba dan Batu Bara - Iuran Tetap	1.761.049,00		1.101.877,00	659.172,00			28.813.000,00	29.472.172,00	-		-
DBH SDA Minerba - Royalti	20.250.098,00	8.555.334,00		28.805.432,00			15.606.000,00	44.411.432,00	-		-
DBH SDA Panas Bumi -Iuran Tetap	36.880.054,00	-		36.880.054,00			73.038.000,00	73.038.000,00	36.880.054,00		36.880.054,00
DBH SDA Panas Bumi -Iuran Produksi	13.780.758,00	-		13.780.758,00			41.936.000,00	41.936.000,00	13.780.758,00		13.780.758,00
DBH SDA Kehutanan	790.717,00	-		790.717,00			56.000,00	56.000,00	790.717,00		790.717,00
DBH SDA-Perikanan	333.492.172,00	-		333.492.172,00			1.918.826.000,00	1.918.826.000,00	333.492.172,00		333.492.172,00
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.456.129.535,00	2.418.920.301,00	-	4.875.049.836,00	-	-	16.449.827.792,00	17.312.000.692,00	4.012.876.936,00	-	4.012.876.936,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.456.129.535,00	2.418.920.301,00	-	4.875.049.836,00	-	-	16.449.827.792,00	17.312.000.692,00	4.012.876.936,00	-	4.012.876.936,00
-Pajak Kendaraan Bermotor	1.125.359.306,00	61.165.531,00	-	1.186.524.837,00	-	-	3.006.150.559,00	2.301.478.438,00	1.891.196.958,00		1.891.196.958,00
-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	319.273.269,00	518.230.613,00	-	837.503.882,00	-	-	920.134.512,00	837.503.882,00	920.134.512,00		920.134.512,00
-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.006.483.445,00	1.832.756.808,00	-	2.839.240.253,00	-	-	2.664.890.698,00	4.302.947.801,00	1.201.183.150,00		1.201.183.150,00
- Pajak Air Permukaan	5.013.515,00	6.767.349,00	-	11.780.864,00	-	-	362.316,00	11.780.864,00	362.316,00		362.316,00
-Pajak Rokok			-		-	-	9.858.289.707,00	9.858.289.707,00			
TOTAL PIUTANG PENDAPATAN	15.083.888.546,25	3.102.705.452,00	4.332.196.382,25	13.853.710.616,00	4.243.055.647,92		30.507.310.251,30	31.160.580.913,00	13.201.126.954,30	5.226.941.768,09	983.886.120,17
BELANJA DIBAYAR DIMUKA											
- Belanja dibayar dimuka	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH											
- Temuan Inspektorat Kabupaten	576.683.170,94	150.000,00		576.833.170,94		-	1.479.114.108,00	465.692.603,00	1.590.254.675,94		1.590.254.675,94
BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGS	302.063.333,33	-	-	302.063.333,33	302.063.333,33		-	-	302.063.333,33	302.063.333,33	-
BAGIAN LANCAR TAGIHAN PEMBERIAN PINJA	681.491.444,00	-	-	681.491.444,00	269.138.944,00		-	20.775.000,00	660.716.444,00	267.470.444,00	(1.668.500,00)
TOTAL PIUTANG LAINNYA	1.560.237.948,27	150.000,00	-	1.560.387.948,27	571.202.277,33		1.479.114.108,00	486.467.603,00	2.553.034.453,27	569.533.777,33	- 1.668.500,00
TOTAL PIUTANG DAERAH	16.644.126.494,52	3.102.855.452,00	4.332.196.382,25	15.414.098.564,27	4.814.257.925,25		31.986.424.359,30	31.647.048.516,00	15.754.161.407,57	5.796.475.545,42	982.217.620,17

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	SALDO 31 DES 2022	KOREKSI SALDO AWAL SETELAH AUDIT		SALDO 31 DES 2022 SETELAH DI KOREKSI	PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2021	MUTASI TAHUN 2022		SALDO 31 DES 2022	PENYISIHAN TAHUN 2022	BEBAN PENYISIHAN	NILAI PIUTANG BERSIH
		TAMBAH	KURANG			TAMBAH	KURANG				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(7)-(8)	(10)	(11)=(10)-(6)	(12)=(9)-(11)
PAJAK DAERAH	3.557.497.813,25	53.436.905,00	0,25	3.610.247.718,00	1.495.940.226,52	2.462.010.968,00	1.866.235.980,00	4.206.709.706,00	1.817.935.300,86	321.995.074,34	2.388.774.405,14
Pajak Hotel	6.933.600,00	29.831.950,00		36.765.550,00	1.926.825,00	330.784.341,00	362.146.291,00	5.403.600,00	1.193.800,00	(733.025,00)	4.209.800,00
Pajak Rumah Makan	55.765.997,00	3.089.000,00		58.854.997,00	17.050.719,70	47.287.000,00	40.929.000,00	65.212.997,00	24.726.323,50	7.675.603,80	40.486.673,50
Pajak Hiburan	35.169.250,00			35.169.250,00	18.469.650,00	372.000,00	220.000,00	35.321.250,00	23.899.060,00	5.429.410,00	11.422.190,00
Pajak Reklame	211.510.312,00	133.300,00		211.643.612,00	87.506.901,70	68.759.625,00	58.495.825,00	221.907.412,00	104.050.566,00	16.543.664,30	117.856.846,00
Pajak Bumi dan Bangunan	2.327.980.817,00	19.695.655,00		2.347.676.472,00	1.350.728.027,67	1.391.863.793,00	931.022.455,00	2.808.517.810,00	1.557.201.451,36	206.473.423,69	1.251.316.358,64
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	920.137.837,25	-	0,25	920.137.837,00	20.258.102,45	614.186.125,00	463.977.325,00	1.070.346.637,00	106.864.100,00	86.605.997,55	963.482.537,00
Pajak Air Tanah	-	687.000,00	-	687.000,00	-	8.758.084,00	9.445.084,00	-	-	-	-
RETRIBUSI DAERAH	1.862.041.627,00	615.166.860,00	618.640.860,00	1.858.567.627,00	1.420.129.227,00	540.621.726,00	462.627.366,00	1.936.561.987,00	1.597.414.587,00	177.285.360,00	339.147.400,00
Retribusi Pelayanan Pasar	613.870.860,00	615.166.860,00	613.870.860,00	615.166.860,00	545.150.860,00	78.120.000,00	63.500.000,00	629.786.860,00	594.818.860,00	49.668.000,00	34.968.000,00
Dinas Koperasi, UMMK, Perindustrian dan Perdagangan	613.870.860,00		613.870.860,00	-	-		-	-	-	-	-
- Kecamatan Boawae	-	33.641.000,00	-	33.641.000,00	28.801.000,00	720.000,00	720.000,00	33.641.000,00	31.221.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
- Kecamatan Nangaroro	-	4.301.000,00	-	4.301.000,00	4.301.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	-	-
- Kecamatan Aesesa	-	572.904.860,00	-	572.904.860,00	507.728.860,00	72.000.000,00	57.600.000,00	587.304.860,00	554.976.860,00	47.248.000,00	32.328.000,00
- Kecamatan Keo Tengah	-	4.320.000,00	-	4.320.000,00	4.320.000,00	3.600.000,00	3.380.000,00	4.540.000,00	4.320.000,00	-	220.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.212.370.767,00	-	4.770.000,00	1.207.600.767,00	849.978.367,00	349.101.726,00	345.127.366,00	1.211.575.127,00	977.595.727,00	127.617.360,00	233.979.400,00
Retribusi Sewa Tanah											
- Badan Keuangan Daerah	521.459.594,00		1.420.000,00	520.039.594,00	190.378.214,00	321.678.726,00	322.577.366,00	519.140.954,00	306.044.074,00	115.665.860,00	213.096.880,00
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan	127.411.173,00	-	3.350.000,00	124.061.173,00	96.100.153,00	27.423.000,00	22.550.000,00	128.934.173,00	108.051.653,00	11.951.500,00	20.882.520,00
-Dinas PPO	89.021.000,00	-	-	89.021.000,00	73.207.700,00	27.423.000,00	19.449.000,00	96.995.000,00	81.808.200,00	8.600.500,00	15.186.800,00
-Dinas Kesehatan	32.154.453,00	-	3.350.000,00	28.804.453,00	22.352.453,00	-	3.101.000,00	25.703.453,00	25.703.453,00	3.351.000,00	-
- Kecamatan Aesesa	540.000,00	-	-	540.000,00	540.000,00	-	-	540.000,00	540.000,00	-	-
-Bagian Administrasi Umum	3.295.720,00	-	-	3.295.720,00	-	-	-	3.295.720,00	-	-	3.295.720,00
-Kecamatan Wolowae	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	563.500.000,00	-	-	563.500.000,00	563.500.000,00	-	-	563.500.000,00	563.500.000,00	-	-
-Dinas Perhubungan	563.500.000,00	-	-	563.500.000,00	563.500.000,00	-	-	563.500.000,00	563.500.000,00	-	-
Retribusi Tempat Pelelangan	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	113.400.000,00	54.000.000,00	70.200.000,00	-	-	70.200.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	113.400.000,00	54.000.000,00	70.200.000,00	-	-	70.200.000,00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	1.955.283.483,00	-	266.800,00	1.955.016.683,00	1.326.986.194,40	2.356.108.765,30	1.742.815.918,00	2.568.309.530,30	1.811.591.880,23	484.605.685,83	756.717.650,07
a. Pendapatan BLUD	1.955.283.483,00	-	266.800,00	1.955.016.683,00	1.326.986.194,40	2.349.854.540,00	1.742.815.918,00	2.562.055.305,00	1.811.590.609,10	484.604.414,70	750.464.695,90
BLUD SPAM	1.955.283.483,00	-	266.800,00	1.955.016.683,00	1.326.986.194,40	2.349.854.540,00	1.742.815.918,00	2.562.055.305,00	1.811.590.609,10	484.604.414,70	750.464.695,90
b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas Danga)	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
c. Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-	254.225,30	-	254.225,30	1.271,13	1.271,13	252.954,17
Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	254.225,30	-	254.225,30	1.271,13	1.271,13	252.954,17
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.252.936.088,00	15.181.386,00	3.713.288.722,00	1.554.828.752,00	-	8.698.741.000,00	9.776.900.957,00	476.668.795,00	-	-	476.668.795,00
Dana Bagi Hasil Pajak	4.845.981.240,00	6.626.052,00	3.712.186.845,00	1.140.420.447,00	-	6.620.466.000,00	7.669.161.353,00	91.725.094,00	-	-	91.725.094,00
DBH PPh Pasal 21	1.357.355.919,00		1.199.294.850,00	158.061.069,00		1.760.922.000,00	1.854.641.096,00	64.341.973,00			64.341.973,00

URAIAN	SALDO 31 DES 2022	KOREKSI SALDO AWAL SETELAH AUDIT		SALDO 31 DES 2022 SETELAH DI KOREKSI	PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2021	MUTASI TAHUN 2022		SALDO 31 DES 2022	PENYISIHAN TAHUN 2022	BEBAN PENYISIHAN	NILAI PIUTANG BERSIH
		TAMBAH	KURANG			TAMBAH	KURANG				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(7)-(8)	(10)	(11)=(10)-(6)	(12)=(9)-(11)
DBH Pasal 25/29 OP	98.335.141,00	6.626.052,00		104.961.193,00		94.661.000,00	199.622.193,00	-			-
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	1.288.576.868,00	-	1.227.769.711,00	60.807.157,00		822.948.000,00	863.776.557,00	19.978.600,00			19.978.600,00
DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	10.683.792,00	-	8.571.842,00	2.111.950,00		28.575.000,00	30.686.950,00	-			-
DBH PBB Bagi Rata	1.991.959.998,00	-	1.188.292.832,00	803.667.166,00		3.820.583.000,00	4.619.531.755,00	4.718.411,00			4.718.411,00
DBH CukaiTembakau (CHT)	99.069.522,00	-	88.257.610,00	10.811.912,00		92.777.000,00	100.902.802,00	2.686.110,00			2.686.110,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	406.954.848,00	8.555.334,00	1.101.877,00	414.408.305,00	-	2.078.275.000,00	2.107.739.604,00	384.943.701,00			384.943.701,00
DBH SDA Minerba dan Batu Bara - Iuran Tetap	1.761.049,00		1.101.877,00	659.172,00		28.813.000,00	29.472.172,00	-			-
DBH SDA Minerba - Royalti	20.250.098,00	8.555.334,00		28.805.432,00		15.606.000,00	44.411.432,00	-			-
DBH SDA Panas Bumi -Iuran Tetap	36.880.054,00	-		36.880.054,00		73.038.000,00	73.038.000,00	36.880.054,00			36.880.054,00
DBH SDA Panas Bumi -Iuran Produksi	13.780.758,00	-		13.780.758,00		41.936.000,00	41.936.000,00	13.780.758,00			13.780.758,00
DBH SDA Kehutanan	790.717,00	-		790.717,00		56.000,00	56.000,00	790.717,00			790.717,00
DBH SDA-Perikanan	333.492.172,00	-		333.492.172,00		1.918.826.000,00	1.918.826.000,00	333.492.172,00			333.492.172,00
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.456.129.535,00	2.418.920.301,00	-	4.875.049.836,00	-	16.449.827.792,00	17.312.000.692,00	4.012.876.936,00	-	-	4.012.876.936,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.456.129.535,00	2.418.920.301,00	-	4.875.049.836,00	-	16.449.827.792,00	17.312.000.692,00	4.012.876.936,00	-	-	4.012.876.936,00
-Pajak Kendaraan Bermotor	1.125.359.306,00	61.165.531,00	-	1.186.524.837,00	-	3.006.150.559,00	2.301.478.438,00	1.891.196.958,00			1.891.196.958,00
-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	319.273.269,00	518.230.613,00	-	837.503.882,00	-	920.134.512,00	837.503.882,00	920.134.512,00			920.134.512,00
-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.006.483.445,00	1.832.756.808,00	-	2.839.240.253,00	-	2.664.890.698,00	4.302.947.801,00	1.201.183.150,00			1.201.183.150,00
- Pajak Air Permukaan	5.013.515,00	6.767.349,00	-	11.780.864,00	-	362.316,00	11.780.864,00	362.316,00			362.316,00
-Pajak Rokok	-	-	-	-	-	9.858.289.707,00	9.858.289.707,00	-			-
TOTAL PIUTANG PENDAPATAN	15.083.888.546,25	3.102.705.452,00	4.332.196.382,25	13.853.710.616,00	4.243.055.647,92	30.507.310.251,30	31.160.580.913,00	13.201.126.954,30	5.226.941.768,09	983.886.120,17	7.974.185.186,21
BELANJA DIBAYAR DIMUKA											
- Belanja dibayar dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH											
- Temuan Inspektorat Kabupaten	576.683.170,94	150.000,00	-	576.833.170,94	-	1.479.114.108,00	465.692.603,00	1.590.254.675,94	-	-	1.590.254.675,94
BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGS	302.063.333,33	-	-	302.063.333,33	302.063.333,33	-	-	302.063.333,33	302.063.333,33	-	-
BAGIAN LANCAR TAGIHAN PEMBERIAN PINJA	681.491.444,00	-	-	681.491.444,00	269.138.944,00	-	20.775.000,00	660.716.444,00	267.470.444,00	(1.668.500,00)	393.246.000,00
TOTAL PIUTANG LAINNYA	1.560.237.948,27	150.000,00	-	1.560.387.948,27	571.202.277,33	1.479.114.108,00	486.467.603,00	2.553.034.453,27	569.533.777,33	- 1.668.500,00	1.983.500.675,94
TOTAL PIUTANG DAERAH	16.644.126.494,52	3.102.855.452,00	4.332.196.382,25	15.414.098.564,27	4.814.257.925,25	31.986.424.359,30	31.647.048.516,00	15.754.161.407,57	5.796.475.545,42	982.217.620,17	9.957.685.862,15

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran X
 Nomor
 Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 : 1 Tahun 2023
 : 15 Juli 2023

No	URAIAN	TANGGAL AWAL	TANGGAL JATUH TEMPO	TAHUN JATUH TEMPO	Nilai Berdasar Umur Piutang					Penyisihan Berdasar tarif Penyisihan				Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2021	
					DANA BERGULIR				Nilai Piutang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
					Masih Berjalan	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan								Macet
						<sampai dengan 1 Tahun	>1 - 2 Tahun	>2 - 5 tahun	> 5 Tahun		0,50%	10%	50%	100%		
DANA GULIR BAGIAN LANCAR PEMBERIAN PINJAMAN (BUNGA)																
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan																
	Pinjaman Modal Usaha Kepada UKM	10/01/2011	10/12/2013	2013												
	Kelompok Minyak Atsiri (IKM)	10/01/2012	31/12/2015	2015												
	Pinjaman Modal Usaha Kepada POKMAS	10/08/2012	10/07/2015	2015												
	Pinjaman Modal Usaha 2013	10/12/2013	10/11/2016	2016												
	Pinjaman Modal Usaha 2014	10/04/2015	10/03/2018	2018												
	Pinjaman Modal Usaha 2015	10/04/2016	10/03/2019	2019												
	Pinjaman Modal Usaha 2019	17/12/2019	17/11/2022	2019												
	TOTAL DANA GULIR BAGIAN LANCAR PEMBERIAN PINJAMAN (BUNGA)															
DANA GULIR INVESTASI NON PERMANEN (POKOK)																
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan																
	Pinjaman Modal Usaha Kepada Uk	10/01/2011	10/12/2013	2013												
	Kelompok Minyak Atsiri (IKM)	10/01/2012	31/12/2015	2015												
	Pinjaman Modal Usaha Kepada PC	10/08/2012	10/07/2015	2015												
	Pinjaman Modal Usaha 2013	10/12/2013	10/11/2016	2016												
	Pinjaman Modal Usaha 2014	10/04/2015	10/03/2018	2018												
	Pinjaman Modal Usaha 2015	10/04/2016	10/03/2019	2019												
	Pinjaman Modal Usaha 2019	17 Des 2019	17 Nop 2022	2022												
	DINAS PERTANIAN															
	Pinjaman Modal Usaha 2012	26 Nov 2012	26 Nov 2017	2017												
	Pinjaman Modal Usaha (Paronisas	29 Feb 2012	15 Des 2012	2015												
	Pinjaman Modal Usaha (Pembibita	12 Feb 2014	12 Feb 2019	2019												
	TOTAL DANA GULIR INVESTASI NON PERMANEN (POKOK)															
	TOTAL DANA GULIR DAN PENYISIHAN															



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor :
 Tanggal :

No	URAIAN	TANGGAL AWAL	TANGGAL JATUH TEMPO	TAHUN JATUH TEMPO	Nilai Berdasar Umur Piutang					Penyisihan Berdasar tarif Penyisihan				Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2021	
					DANA BERGULIR					Nilai Piutang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan			Macet
					Masih Berjalan	Lancar <sampai dengan 1 Tahun	Kurang Lancar >1 - 2 Tahun	Diragukan >2 - 5 tahun	Macet > 5 Tahun							
DANA GULIR BAGIAN LANCAR PEMBERIAN PINJAMAN (BUNGA)																
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan																
	Pinjaman Modal Usaha Kepada UKM	10/01/2011	10/12/2013	2013	-	-	-	-	13.125.000,00	13.125.000,00	-	-	-	13.125.000,00	13.125.000,00	
	Kelompok Minyak Atsiri (IKM)	10/01/2012	31/12/2015	2015	-	-	-	-	25.750.000,00	25.750.000,00	-	-	-	25.750.000,00	25.750.000,00	
	Pinjaman Modal Usaha Kepada POKMAS	10/08/2012	10/07/2015	2015	-	-	-	-	23.190.000,00	23.190.000,00	-	-	-	23.190.000,00	23.190.000,00	
	Pinjaman Modal Usaha 2013	10/12/2013	10/11/2016	2016	-	-	-	-	41.146.444,00	41.146.444,00	-	-	-	41.146.444,00	41.146.444,00	
	Pinjaman Modal Usaha 2014	10/04/2015	10/03/2018	2018	-	-	-	93.750.000,00	93.750.000,00	-	-	46.875.000,00	-	46.875.000,00	47.825.000,00	
	Pinjaman Modal Usaha 2015	10/04/2016	10/03/2019	2019	-	-	-	232.455.000,00	232.455.000,00	-	-	116.227.500,00	-	116.227.500,00	118.102.500,00	
	Pinjaman Modal Usaha 2019	17/12/2019	17/11/2022	2019	-	231.300.000,00	-	-	231.300.000,00	231.300.000,00	1.156.500,00	-	-	1.156.500,00	-	
	TOTAL DANA GULIR BAGIAN LANCAR PEMBERIAN PINJAMAN (BUNGA)				-	231.300.000,00	-	326.205.000,00	103.211.444,00	660.716.444,00	1.156.500,00	-	163.102.500,00	103.211.444,00	267.470.444,00	
DANA GULIR INVESTASI NON PERMANEN (POKOK)																
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan																
	Pinjaman Modal Usaha Kepada Uk	10/01/2011	10/12/2013	2013	-	-	-	-	315.596.563,00	315.596.563,00	-	-	-	315.596.563,00	315.596.563,00	
	Kelompok Minyak Atsiri (IKM)	10/01/2012	31/12/2015	2015	-	-	-	-	120.088.093,00	120.088.093,00	-	-	-	120.088.093,00	122.166.500,00	
	Pinjaman Modal Usaha Kepada PC	10/08/2012	10/07/2015	2015	-	-	-	-	356.646.442,00	356.646.442,00	-	-	-	356.646.442,00	356.796.442,00	
	Pinjaman Modal Usaha 2013	10/12/2013	10/11/2016	2016	-	-	-	-	588.987.497,00	588.987.497,00	-	-	-	588.987.497,00	588.465.225,00	
	Pinjaman Modal Usaha 2014	10/04/2015	10/03/2018	2018	-	-	-	837.752.000,00	837.752.000,00	-	-	418.876.000,00	-	418.876.000,00	420.651.000,00	
	Pinjaman Modal Usaha 2015	10/04/2016	10/03/2019	2019	-	-	-	1.541.267.000,00	1.541.267.000,00	-	-	770.633.500,00	-	770.633.500,00	773.402.500,00	
	Pinjaman Modal Usaha 2019	17 Des 2019	17 Nop 2022	2022	-	1.360.421.000,00	-	-	1.360.421.000,00	1.360.421.000,00	6.802.105,00	-	-	6.802.105,00	-	
	DINAS PERTANIAN															
	Pinjaman Modal Usaha 2012	26 Nov 2012	26 Nov 2017	2017	-	-	-	-	3.970.840.000,00	3.970.840.000,00	-	-	-	3.970.840.000,00	1.990.720.000,00	
	Pinjaman Modal Usaha (Paronisas	29 Feb 2012	15 Des 2012	2015	-	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Pinjaman Modal Usaha (Pembibita	12 Feb 2014	12 Feb 2019	2019	-	-	-	392.840.000,00	392.840.000,00	-	-	196.420.000,00	-	196.420.000,00	196.420.000,00	
	TOTAL DANA GULIR INVESTASI NON PERMANEN (POKOK)				-	1.360.421.000,00	-	2.379.019.000,00	5.367.158.595,00	9.499.438.595,00	6.802.105,00	-	1.385.929.500,00	5.367.158.595,00	6.759.890.200,00	
	TOTAL DANA GULIR DAN PENYISIHAN				-	1.591.721.000,00	-	2.705.224.000,00	5.470.370.039,00	10.160.155.039,00	7.958.605,00	-	1.549.032.000,00	5.470.370.039,00	5.048.357.174,00	



Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023 :
 Tanggal : 15 Juli 2023 :

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Tahun Penyeretaan Modal	Nama Lembaga	Dasar Hukum Penyeretaan Modal	Bentuk Penyeretaan Modal Daerah	Jumlah Penyeretaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyeretaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir Tahun	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyeretaan Modal Daerah Tahun ini	Jumlah Modal yang diterima kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal yang disertakan sampai dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2008	PT Bank NTT	Paraturan Daerah Nomor :02 Tahun 2010 tentang Penyeretaan Modal Daerah pada PT Bank NTT	Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
2	2009	PT Bank NTT		Saham	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
3	2010	PT Bank NTT		Saham	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
4	2011	PT Bank NTT		Saham	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
5	2012	PT Bank NTT		Saham	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
6	2013	PT Bank NTT		Saham	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
7	2014	PT Bank NTT	Paraturan Daerah Nomor :10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyeretaan Modal Daerah pada PT Bank NTT	Saham	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
8	2015	PT Bank NTT		Saham	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
9	2016	PT Bank NTT			-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
10	2017	PT Bank NTT			-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
11	2018	PT Bank NTT		Saham	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
12	2019	PT Bank NTT	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peyeretaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Saham	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
13	2020	PT Bank NTT		Saham	3.699.670.000,00	3.699.670.000,00	0,00	3.699.670.000,00	0,00	0,00	0,00	3.699.670.000,00
14	2021	PT Bank NTT		Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
15	2022	PT Bank NTT		Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah					38.699.670.000,00	38.699.670.000,00	-	38.699.670.000,00	-	-	-	38.699.670.000,00



Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor :
 Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Tahun Penyeretaan Modal	Nama Lembaga	Dasar Hukum Penyeretaan Modal	Bentuk Penyeretaan Modal Daerah	Jumlah Penyeretaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyeretaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir Tahun	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyeretaan Modal Daerah Tahun ini	Jumlah Modal yang diterima kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal yang disertakan sampai dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2008	PT Bank NTT	Paraturan Daerah Nomor :02 Tahun 2010 tentang Penyeretaan Modal Daerah pada PT Bank NTT	Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
2	2009	PT Bank NTT		Saham	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
3	2010	PT Bank NTT		Saham	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
4	2011	PT Bank NTT		Saham	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
5	2012	PT Bank NTT		Saham	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
6	2013	PT Bank NTT		Saham	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
7	2014	PT Bank NTT	Paraturan Daerah Nomor :10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyeretaan Modal Daerah pada PT Bank NTT	Saham	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
8	2015	PT Bank NTT		Saham	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
9	2016	PT Bank NTT			-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
10	2017	PT Bank NTT			-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
11	2018	PT Bank NTT		Saham	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
12	2019	PT Bank NTT	Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyeretaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Saham	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
13	2020	PT Bank NTT		Saham	3.699.670.000,00	3.699.670.000,00	0,00	3.699.670.000,00	0,00	0,00	0,00	3.699.670.000,00
14	2021	PT Bank NTT		Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
15	2022	PT Bank NTT		Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah					38.699.670.000,00	38.699.670.000,00	-	38.699.670.000,00	-	-	-	38.699.670.000,00

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal			Mutasi Aset Tetap		Saldo Akhir		
		Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Aset Tetap	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Akhir Aset Tetap
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.840.016.519,44	(4.839.913.403,00)	16.000.103.116,44	11.887.779.442,54	9.675.641.675,80	23.052.154.286,18	(5.242.543.180,66)	17.809.611.105,52
10	SMPN SATAP I AESESA	1.952.431.081,81	(565.932.413,04)	1.386.498.668,77	20.200.000,00	400.000,00	1.972.231.081,81	(650.995.444,19)	1.321.235.637,62
11	SMPN SATAP 2 AESESA	2.382.968.000,00	(915.254.347,56)	1.467.713.652,44	1.710.816.719,75	119.146.619,75	3.974.638.100,00	(1.082.148.450,82)	2.892.489.649,18
12	SMP NEGERI 6 AESESA	1.737.417.350,00	(494.675.856,67)	1.242.741.493,33	450.520.000,00	4.850.000,00	2.183.087.350,00	(593.830.496,34)	1.589.256.853,66
13	SMP NEGERI 5 AESESA	2.416.922.094,33	(1.015.976.090,86)	1.400.946.003,47	25.000.000,00	-	2.441.922.094,33	(1.115.308.393,18)	1.326.613.701,15
14	SMP NEGERI 4 AESESA	2.613.765.643,50	(922.392.506,97)	1.691.373.136,53	1.653.420.354,72	132.555.558,32	4.134.630.439,90	(1.089.143.883,26)	3.045.486.556,64
15	SMP NEGERI 3 AESESA SATAP	869.864.204,00	(317.560.235,43)	552.303.968,57	8.262.000,00	-	878.126.204,00	(365.553.365,80)	512.572.838,20
16	SMP NEGERI 3 AESESA	4.022.859.984,69	(1.022.493.557,79)	3.000.366.426,90	17.244.000,00	2.360.000,00	4.037.743.984,69	(1.225.795.924,43)	2.811.948.060,26
17	SMP NEGERI 2 AESESA	3.275.794.396,32	(1.328.219.894,62)	1.947.574.501,70	507.220.000,00	66.350.000,00	3.716.664.396,32	(1.469.747.486,04)	2.246.916.910,28
18	SMP NEGERI 1 AESESA	6.530.102.174,39	(2.516.564.057,26)	4.013.538.117,13	54.326.000,00	8.460.000,00	6.575.968.174,39	(2.721.234.989,23)	3.854.733.185,16
19	SMPN SATAP 2 AESESA SELATAN	1.249.542.850,00	(342.915.310,00)	906.627.540,00	3.261.000,00	-	1.252.803.850,00	(410.585.010,00)	842.218.840,00
20	SMPN 1 SATAP AESESA SELATAN	2.120.477.574,00	(602.119.963,07)	1.518.357.610,93	16.013.000,00	-	2.136.490.574,00	(693.332.993,87)	1.443.157.580,13
21	SMP NEGERI 2 AESESA SELATAN	2.426.394.044,62	(731.216.464,21)	1.695.177.580,41	24.000.000,00	-	2.450.394.044,62	(842.351.560,70)	1.608.042.483,92
22	SMP NEGERI 1 AESESA SELATAN	3.401.970.015,35	(1.083.068.968,88)	2.318.901.046,47	36.400.000,00	28.000.000,00	3.410.370.015,35	(1.231.235.555,31)	2.179.134.460,04
23	SMPN SATAP 2 BOAWAE	2.085.785.063,80	(722.638.787,45)	1.363.146.276,35	9.700.000,00	-	2.095.485.063,80	(834.591.741,58)	1.260.893.322,22
24	SMPN SATAP 1 BOAWAE	2.782.055.459,56	(743.839.267,13)	2.038.216.192,43	33.867.000,00	-	2.815.922.459,56	(874.218.440,25)	1.941.704.019,31
25	SMP NEGERI 5 BOAWAE	1.182.508.010,00	(278.703.468,14)	903.804.541,86	43.426.900,00	-	1.225.934.910,00	(349.426.326,57)	876.508.583,43

No	Nama SKPD	Saldo Awal			Mutasi Aset Tetap		Saldo Akhir		
		Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Aset Tetap	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Akhir Aset Tetap
26	SMP NEGERI 4 BOAWAE	2.619.133.005,15	(986.255.914,81)	1.632.877.090,34	1.556.280.295,96	73.834.891,26	4.101.578.409,85	(1.166.636.366,42)	2.934.942.043,43
27	SMP NEGERI 3 BOAWAE	2.712.156.753,96	(1.370.030.384,18)	1.342.126.369,78	24.811.000,00	-	2.736.967.753,96	(1.474.004.041,18)	1.262.963.712,78
28	SMP NEGERI 2 BOAWAE	4.379.510.697,98	(2.096.674.338,84)	2.282.836.359,14	54.900.100,00	13.000.000,00	4.421.410.797,98	(2.238.434.514,40)	2.182.976.283,58
29	SMP NEGERI 1 BOAWAE	3.591.845.749,10	(1.499.254.902,66)	2.092.590.846,44	26.729.000,00	20.075.000,00	3.598.499.749,10	(1.685.745.401,35)	1.912.754.347,75
30	SMP NEGERI 6 BOAWAE	2.189.068.938,81	(480.598.951,90)	1.708.469.986,91	231.730.336,00	-	2.420.799.274,81	(609.810.827,93)	1.810.988.446,88
31	SMPN SATAP 3 BOAWAE	580.265.800,00	(155.790.363,33)	424.475.436,67	33.250.000,00	-	613.515.800,00	(193.870.246,66)	419.645.553,34
32	SMPN SATAP 2 KEO TENGAH	604.504.831,77	(185.435.908,44)	419.068.923,33	53.000.000,00	-	657.504.831,77	(233.740.598,44)	423.764.233,33
33	SMPN SATAP 1 KEO TENGAH	1.227.261.000,00	(406.847.965,71)	820.413.034,29	627.303.000,00	28.295.000,00	1.826.269.000,00	(523.217.554,61)	1.303.051.445,39
34	SMP NEGERI 1 KEO TENGAH	3.504.287.589,00	(1.395.358.777,15)	2.108.928.811,85	15.315.000,00	7.315.000,00	3.512.287.589,00	(1.519.575.135,96)	1.992.712.453,04
35	SMPN SATAP 3 MAUPONGGO	2.389.904.430,12	(760.235.597,33)	1.629.668.832,79	7.113.000,00	-	2.397.017.430,12	(848.704.351,30)	1.548.313.078,82
36	SMPN SATAP 2 MAUPONGGO	2.297.392.484,16	(904.996.066,96)	1.392.396.417,20	28.800.000,00	21.100.000,00	2.305.092.484,16	(1.003.155.492,16)	1.301.936.992,00
37	SMPN SATAP 1 MAUPONGGO	2.371.140.745,10	(769.087.221,37)	1.602.053.523,73	17.010.000,00	-	2.388.150.745,10	(875.885.933,17)	1.512.264.811,93
38	SMP NEGERI 2 MAUPONGGO	2.154.110.854,75	(695.049.044,27)	1.459.061.810,48	38.438.000,00	5.850.000,00	2.186.698.854,75	(797.360.826,79)	1.389.338.027,96
39	SMP NEGERI 1 MAUPONGGO	4.113.577.874,09	(1.054.816.176,93)	3.058.761.697,16	70.390.500,00	20.200.000,00	4.163.768.374,09	(1.223.037.845,26)	2.940.730.528,83
40	SMP NEGERI 3 MAUPONGGO	2.515.266.177,10	(465.572.948,75)	2.049.693.228,35	16.000.000,00	-	2.531.266.177,10	(585.639.412,99)	1.945.626.764,11
41	SMPN SATAP 2 NANGARORO	1.338.550.610,00	(313.362.782,67)	1.025.187.827,33	10.965.000,00	3.275.000,00	1.346.240.610,00	(371.277.086,34)	974.963.523,66
42	SMPN SATAP 1 NANGARORO	1.934.138.274,26	(588.718.673,73)	1.345.419.600,53	13.819.000,00	-	1.947.957.274,26	(673.283.484,63)	1.274.673.789,63
43	SMPN 3 NANGARORO SATAP DI AEGELA	1.402.326.010,00	(454.785.566,00)	947.540.444,00	5.265.500,00	-	1.407.591.510,00	(524.512.074,66)	883.079.435,34
44	SMP NEGERI 3 NANGARORO	1.090.712.048,00	(350.724.564,80)	739.987.483,20	11.875.000,00	1.125.000,00	1.101.462.048,00	(406.558.994,77)	694.903.053,23
45	SMP NEGERI 2 NANGARORO	2.373.515.682,78	(555.124.984,56)	1.818.390.698,22	1.013.101.250,00	131.689.500,00	3.254.927.432,78	(722.929.080,60)	2.531.998.352,18
46	SMP NEGERI 1 NANGARORO	3.886.531.071,37	(2.018.471.985,18)	1.868.059.086,19	22.850.000,00	2.500.000,00	3.906.881.071,37	(2.146.932.498,13)	1.759.948.573,24
47	SMP NEGERI 4 NANGARORO SATAP DI SOROWEA	1.041.916.769,02	(261.444.854,10)	780.471.914,92	5.665.000,00	-	1.047.581.769,02	(311.136.065,40)	736.445.703,62
48	SMPN SATAP 1 WOLOWAE	2.763.491.804,64	(693.784.482,31)	2.069.707.322,33	461.600.000,00	22.650.000,00	3.202.441.804,64	(805.097.905,20)	2.397.343.899,44
49	SMP NEGERI 1 WOLOWAE	3.448.425.379,08	(1.852.874.577,60)	1.595.550.801,48	21.950.000,00	8.200.000,00	3.462.175.379,08	(2.000.385.148,38)	1.461.790.230,70
50	SD INPRES DANGA	1.419.057.388,00	(394.299.317,81)	1.024.758.070,19	26.250.600,00	5.000.000,00	1.440.307.988,00	(505.173.733,55)	935.134.254,45
51	SD INPRES MALABAI	1.775.731.295,24	(484.434.574,23)	1.291.296.721,01	38.278.000,00	10.000.000,00	1.804.009.295,24	(549.179.019,98)	1.254.830.275,26

No	Nama SKPD	Saldo Awal			Mutasi Aset Tetap		Saldo Akhir		
		Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Aset Tetap	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Akhir Aset Tetap
52	SD INPRES MARAPOKOT	2.778.485.466,39	(1.114.103.411,33)	1.664.382.055,06	41.050.000,00	14.950.000,00	2.804.585.466,39	(1.213.856.193,00)	1.590.729.273,39
53	SD INPRES MBAY	873.813.150,00	(273.544.808,73)	600.268.341,27	24.850.000,00	-	898.663.150,00	(331.278.588,10)	567.384.561,90
54	SD INPRES NEBE	2.536.427.986,13	(976.829.158,09)	1.559.598.828,04	16.098.000,00	-	2.552.525.986,13	(1.076.802.549,11)	1.475.723.437,02
55	SD INPRES RATA	2.625.506.460,63	(1.119.055.326,89)	1.506.451.133,74	16.560.000,00	7.360.000,00	2.634.706.460,63	(1.269.669.776,31)	1.365.036.684,32
56	SD INPRES RATEDOSA	1.336.812.876,86	(359.316.800,92)	977.496.075,94	31.000.000,00	-	1.367.812.876,86	(432.532.442,83)	935.280.434,03
57	SD INPRES TONGGURAMBANG	1.532.669.380,71	(608.387.567,81)	924.281.812,90	55.000.000,00	-	1.587.669.380,71	(663.552.723,07)	924.116.657,64
58	SD INPRES TOWAK	547.279.942,24	(132.405.861,50)	414.874.080,74	19.324.000,00	5.773.000,00	560.830.942,24	(153.196.704,93)	407.634.237,31
59	SD INPRES WAEMBURUNG	1.594.604.306,92	(720.464.815,44)	874.139.491,48	33.008.000,00	-	1.627.612.306,92	(769.125.554,22)	858.486.752,70
60	SD INPRES WATUREDU	1.226.828.339,03	(327.457.174,74)	899.371.164,29	65.520.000,00	13.500.000,00	1.278.848.339,03	(415.711.718,43)	863.136.620,60
61	SD NEGERI AMEABA	2.183.890.435,24	(428.803.251,72)	1.755.087.183,52	24.814.000,00	-	2.208.704.435,24	(506.473.475,33)	1.702.230.959,91
62	SD NEGERI DHAWE DORI	1.416.419.771,00	(338.909.971,07)	1.077.509.799,93	25.000.000,00	-	1.441.419.771,00	(400.341.041,27)	1.041.078.729,73
63	SD NEGERI LAMBO	745.034.871,71	(239.136.603,53)	505.898.268,18	11.648.000,00	1.778.000,00	754.904.871,71	(281.631.284,51)	473.273.587,20
64	SD NEGERI LEGO	995.005.740,00	(305.026.680,00)	689.979.060,00	35.764.000,00	-	1.030.769.740,00	(356.039.640,01)	674.730.099,99
65	SD NEGERI NATAIA	1.097.074.460,00	(350.309.098,33)	746.765.361,67	7.750.000,00	-	1.104.824.460,00	(403.887.094,89)	700.937.365,11
66	SD NEGERI PERESAMBI	849.104.150,84	(231.614.680,42)	617.489.470,42	9.000.000,00	-	858.104.150,84	(262.693.554,85)	595.410.595,99
67	SD NEGERI POMAKEKE	1.750.262.613,41	(587.307.883,98)	1.162.954.729,43	31.500.000,00	1.750.000,00	1.780.012.613,41	(668.230.544,25)	1.111.782.069,16
68	SD NEGERI TONGANANGA	1.337.574.803,59	(368.298.995,28)	969.275.808,31	15.245.000,00	-	1.352.819.803,59	(412.212.385,16)	940.607.418,43
69	SD NEGERI TOWAK	126.071.905,24	(24.897.155,00)	101.174.750,24	10.000.000,00	-	136.071.905,24	(31.509.706,00)	104.562.199,24
70	SD INPRES BUTATA	943.640.370,00	(301.555.915,83)	642.084.454,17	11.317.700,00	-	954.958.070,00	(349.246.903,66)	605.711.166,34
71	SD INPRES MALAWONA	1.191.378.067,24	(283.626.305,14)	907.751.762,10	11.000.000,00	-	1.202.378.067,24	(341.450.182,88)	860.927.884,36
72	SD INPRES NATATADI	1.475.185.220,24	(368.321.946,67)	1.106.863.273,57	139.837.000,00	-	1.615.022.220,24	(459.657.733,34)	1.155.364.486,90
73	SD NEGERI BONAT	1.068.976.468,24	(377.901.188,49)	691.075.279,75	128.311.000,00	-	1.197.287.468,24	(459.569.616,78)	737.717.851,46
74	SD NEGERI MALAPOMA	741.723.400,00	(202.351.946,67)	539.371.453,33	-	-	741.723.400,00	(236.678.390,00)	505.045.010,00
75	SD NEGERI NATAKUPE	1.235.561.800,00	(288.986.926,19)	946.574.873,81	1.764.000,00	-	1.237.325.800,00	(338.262.985,72)	899.062.814,28
76	SD NEGERI RENDU OLA	525.128.178,71	(106.577.586,01)	418.550.592,70	13.216.000,00	-	538.344.178,71	(144.073.474,18)	394.270.704,53
77	SD NEGERI TASIKAPA	1.594.306.820,50	(708.966.197,58)	885.340.622,92	9.431.200,00	-	1.603.738.020,50	(768.929.560,77)	834.808.459,73

No	Nama SKPD	Saldo Awal			Mutasi Aset Tetap		Saldo Akhir		
		Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Aset Tetap	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Akhir Aset Tetap
78	SD NEGERI JAWAKISA	894.498.400,91	(227.573.941,67)	666.924.459,24	138.998.000,00	-	1.033.496.400,91	(307.131.116,00)	726.365.284,91
79	SD NEGERI WAJOMARA	1.007.133.400,91	(166.106.521,67)	841.026.879,24	11.350.000,00	-	1.018.483.400,91	(203.055.302,67)	815.428.098,24
80	SD INPRES ALORAWE	1.085.445.435,91	(406.193.999,86)	679.251.436,05	3.542.000,00	-	1.088.987.435,91	(446.160.521,29)	642.826.914,62
81	SD INPRES DENAANO	1.046.752.578,80	(369.036.127,98)	677.716.450,82	19.120.000,00	-	1.065.872.578,80	(407.663.396,33)	658.209.182,47
82	SD INPRES DHEREISA	1.078.575.071,71	(406.363.944,42)	672.211.127,29	145.748.000,00	3.300.000,00	1.221.023.071,71	(481.129.689,41)	739.893.382,30
83	SD INPRES DORAMELI	927.783.995,00	(202.670.792,59)	725.113.202,41	11.550.000,00	-	939.333.995,00	(298.340.301,45)	640.993.693,55
84	SD INPRES HOBOPADU	1.959.301.668,80	(849.982.286,40)	1.109.319.382,40	25.000.000,00	-	1.984.301.668,80	(941.605.734,90)	1.042.695.933,90
85	SD INPRES KEKAKAPA	1.888.920.588,00	(670.549.735,67)	1.218.370.852,33	22.000.000,00	-	1.910.920.588,00	(753.903.517,91)	1.157.017.070,09
86	SD INPRES LEGO	1.773.910.280,24	(812.007.190,00)	961.903.090,24	707.400.600,00	141.680.500,00	2.339.630.380,24	(922.592.792,66)	1.417.037.587,58
87	SD INPRES MALALAJA	1.172.145.660,00	(488.611.585,64)	683.534.074,36	305.260.000,00	3.996.000,00	1.473.409.660,00	(535.605.458,90)	937.804.201,10
88	SD INPRES OLAEWA	2.671.238.101,55	(714.049.331,49)	1.957.188.770,06	32.200.000,00	-	2.703.438.101,55	(810.211.842,44)	1.893.226.259,11
89	SD INPRES PADHAPAE	1.646.657.491,71	(442.630.956,78)	1.204.026.534,93	41.185.000,00	2.300.000,00	1.685.542.491,71	(522.893.747,68)	1.162.648.744,03
90	SD INPRES RATONGAMOBO	1.139.505.266,89	(347.190.043,34)	792.315.223,55	8.500.000,00	-	1.148.005.266,89	(389.290.635,63)	758.714.631,26
91	SD INPRES RAWE	2.916.304.452,96	(915.788.956,74)	2.000.515.496,22	27.667.000,00	-	2.943.971.452,96	(1.039.978.217,54)	1.903.993.235,42
92	SD INPRES TIBAKISA	1.086.144.858,00	(370.002.524,44)	716.142.333,56	45.720.000,00	8.050.000,00	1.123.814.858,00	(409.766.421,66)	714.048.436,34
93	SD INPRES WUDU	1.654.506.870,24	(640.386.148,97)	1.014.120.721,27	56.918.000,00	-	1.711.424.870,24	(719.402.273,94)	992.022.596,30
94	SD NEGERI NIDO	1.525.088.361,91	(415.020.046,67)	1.110.068.315,24	8.100.000,00	-	1.533.188.361,91	(465.238.483,34)	1.067.949.878,57
95	SD NEGERI RAWE II	1.438.964.317,47	(693.406.780,05)	745.557.537,42	29.285.000,00	-	1.468.249.317,47	(751.566.496,60)	716.682.820,87
96	SD NEGERI AEBOWO	1.623.150.400,91	(259.612.416,89)	1.363.537.984,02	11.550.000,00	-	1.634.700.400,91	(328.868.438,36)	1.305.831.962,55
97	SD INPRES GIRIWAHO	1.617.268.206,00	(307.116.577,70)	1.310.151.628,30	15.500.000,00	-	1.632.768.206,00	(372.991.494,40)	1.259.776.711,60
98	SD INPRES KODIWUWU	775.767.951,24	(219.758.656,85)	556.009.294,39	12.500.000,00	-	788.267.951,24	(257.489.589,16)	530.778.362,08
99	SD INPRES LADOLIMA	1.283.289.233,00	(331.496.516,37)	951.792.716,63	13.152.000,00	-	1.296.441.233,00	(392.682.223,00)	903.759.010,00
100	SD INPRES MAUNORI	952.756.283,00	(352.066.594,20)	600.689.688,80	10.565.000,00	-	963.321.283,00	(393.660.962,88)	569.660.320,12
101	SD INPRES NASAWEWI	942.295.320,00	(295.663.816,04)	646.631.503,96	-	-	942.295.320,00	(340.622.183,62)	601.673.136,38
102	SD INPRES WITU	1.814.889.843,75	(601.870.902,56)	1.213.018.941,19	14.500.000,00	-	1.829.389.843,75	(665.688.649,94)	1.163.701.193,81
103	SD NEGERI BALE SAMA	857.178.140,00	(251.953.545,33)	605.224.594,67	5.022.000,00	1.850.000,00	860.350.140,00	(288.343.516,00)	572.006.624,00

No	Nama SKPD	Saldo Awal			Mutasi Aset Tetap		Saldo Akhir		
		Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Aset Tetap	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Akhir Aset Tetap
104	SD NEGERI KELIWATUWEA	903.047.286,91	(218.865.088,72)	684.182.198,19	56.000,00	-	903.103.286,91	(260.242.466,21)	642.860.820,70
105	SD NEGERI MAUARA	1.146.961.137,46	(329.558.995,34)	817.402.142,12	15.040.000,00	-	1.162.001.137,46	(388.864.926,27)	773.136.211,19
106	SD NEGERI NUASELE	768.820.456,38	(159.831.511,33)	608.988.945,05	900.000,00	-	769.720.456,38	(189.700.750,11)	580.019.706,27
107	SD NEGERI POMADHEDHU	1.201.686.599,50	(292.117.019,95)	909.569.579,55	51.308.000,00	-	1.252.994.599,50	(337.884.991,44)	915.109.608,06
108	SD INPRES AEKELA	1.952.815.057,11	(495.255.480,42)	1.457.559.576,69	14.960.000,00	12.000.000,00	1.955.775.057,11	(579.708.703,52)	1.376.066.353,59
109	SD INPRES BATALEWA	1.457.871.412,00	(413.578.453,33)	1.044.292.958,67	158.454.523,94	-	1.616.325.935,94	(497.073.619,05)	1.119.252.316,89
110	SD INPRES BOKI	1.128.407.043,00	(419.764.365,83)	708.642.677,17	6.276.000,00	-	1.134.683.043,00	(477.074.573,33)	657.608.469,67
111	SD INPRES BOLOROGA	1.429.925.060,00	(405.741.547,33)	1.024.183.512,67	15.000.000,00	405.897.400,00	1.039.027.660,00	(321.040.910,66)	717.986.749,34
112	SD INPRES EBETADA	1.511.776.774,67	(564.840.154,92)	946.936.619,75	12.726.500,00	-	1.524.503.274,67	(627.763.249,30)	896.740.025,37
113	SD INPRES KAJUSOPI	993.587.217,50	(457.382.533,75)	536.204.683,75	16.016.000,00	-	1.009.603.217,50	(500.501.561,11)	509.101.656,39
114	SD INPRES LEDHO	1.008.660.795,57	(537.891.631,43)	470.769.164,14	32.230.000,00	5.695.000,00	1.035.195.795,57	(584.515.932,84)	450.679.862,73
115	SD INPRES MAUPONGGO	2.223.484.450,00	(518.228.346,67)	1.705.256.103,33	12.600.000,00	-	2.236.084.450,00	(589.801.918,34)	1.646.282.531,66
116	SD INPRES NATASULE	1.477.734.883,24	(463.152.333,08)	1.014.582.550,16	27.750.000,00	-	1.505.484.883,24	(538.132.326,08)	967.352.557,16
117	SD INPRES TANATOYO	1.190.932.249,71	(344.297.226,86)	846.635.022,85	142.850.000,00	-	1.333.782.249,71	(422.602.321,18)	911.179.928,53
118	SD INPRES WOLOOKA	1.232.459.042,30	(729.597.120,87)	502.861.921,43	131.932.000,00	-	1.364.391.042,30	(789.449.893,77)	574.941.148,53
119	SD NEGERI BATAWA	1.447.097.459,24	(375.606.676,67)	1.071.490.782,57	11.550.000,00	-	1.458.647.459,24	(424.921.626,67)	1.033.725.832,57
120	SD NEGERI MAUWARU	1.170.079.065,61	(778.377.620,47)	391.701.445,14	19.500.000,00	150.367.295,00	1.039.211.770,61	(726.132.307,37)	313.079.463,24
121	SD NEGERI OBOOJA	1.331.597.295,50	(423.334.300,08)	908.262.995,42	8.570.000,00	1.000.000,00	1.339.167.295,50	(478.479.196,66)	860.688.098,84
122	SD NEGERI ULUWAGHA	1.587.619.316,18	(539.578.348,54)	1.048.040.967,64	16.690.000,00	-	1.604.309.316,18	(599.735.231,89)	1.004.574.084,29
123	SD NEGERI WOLOTOBA	1.172.475.090,91	(187.469.166,67)	985.005.924,24	4.500.000,00	-	1.176.975.090,91	(238.480.000,00)	938.495.090,91
124	SD INPRES DOMBE	1.148.356.686,00	(251.223.138,67)	897.133.547,33	10.400.000,00	-	1.158.756.686,00	(289.099.729,34)	869.656.956,66
125	SD INPRES KOTAKEO	1.514.176.499,10	(596.928.203,53)	917.248.295,57	13.436.000,00	275.629.618,75	1.251.982.880,35	(524.776.608,61)	727.206.271,74
126	SD INPRES LEA	1.237.839.989,24	(408.052.920,00)	829.787.069,24	2.000.000,00	-	1.239.839.989,24	(449.379.208,33)	790.460.780,91
127	SD INPRES MADAMBAKE	1.588.056.913,57	(769.402.399,18)	818.654.514,39	31.026.250,00	-	1.619.083.163,57	(814.356.850,31)	804.726.313,26
128	SD INPRES NDETU	826.844.528,24	(219.364.451,37)	607.480.076,87	130.998.000,00	-	957.842.528,24	(279.918.596,34)	677.923.931,90
129	SD INPRES NDORA	1.476.638.462,74	(439.274.472,27)	1.037.363.990,47	151.035.000,00	8.580.000,00	1.619.093.462,74	(530.207.382,85)	1.088.886.079,89

No	Nama SKPD	Saldo Awal			Mutasi Aset Tetap		Saldo Akhir		
		Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Aset Tetap	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Akhir Aset Tetap
130	SD INPRES SOROWEA	1.269.593.061,08	(590.939.622,84)	678.653.438,24	17.390.000,00	-	1.286.983.061,08	(680.224.570,38)	606.758.490,70
131	SD INPRES TENDAKOWE	1.140.362.883,00	(473.006.021,67)	667.356.861,33	30.050.000,00	-	1.170.412.883,00	(504.395.858,34)	666.017.024,66
132	SD INPRES TONGATEY	1.588.429.093,00	(475.050.811,33)	1.113.378.281,67	9.735.000,00	-	1.598.164.093,00	(527.220.959,00)	1.070.943.134,00
133	SD INPRES TUANIO	1.171.541.814,06	(239.768.877,00)	931.772.937,06	60.196.000,00	785.566.308,83	446.171.505,23	(181.518.872,67)	264.652.632,56
134	SD INPRES UDUMABHA	1.364.957.721,70	(399.621.517,31)	965.336.204,39	5.074.000,00	-	1.370.031.721,70	(449.004.734,94)	921.026.986,76
135	SD INPRES WODOMIA	1.074.282.792,00	(559.288.138,33)	514.994.653,67	3.704.000,00	-	1.077.986.792,00	(605.649.383,33)	472.337.408,67
136	SD NEGERI AEGELA	929.109.385,00	(251.781.771,03)	677.327.613,97	14.000.000,00	-	943.109.385,00	(289.325.617,66)	653.783.767,34
137	SD NEGERI BOALOBO	388.754.910,00	(87.964.456,60)	300.790.453,40	1.743.000,00	-	390.497.910,00	(109.659.138,40)	280.838.771,60
138	SD NEGERI FATALEKE	1.078.205.946,10	(359.062.923,66)	719.143.022,44	11.290.000,00	-	1.089.495.946,10	(415.493.379,80)	674.002.566,30
139	SD NEGERI KOLI	766.759.295,00	(149.977.715,67)	616.781.579,33	13.302.000,00	-	780.061.295,00	(189.558.277,00)	590.503.018,00
140	SD NEGERI MBAMO	1.067.513.373,22	(386.767.852,15)	680.745.521,07	13.702.000,00	-	1.081.215.373,22	(423.462.210,46)	657.753.162,76
141	SD NEGERI NDENASANGI	1.103.562.601,00	(574.596.683,60)	528.965.917,40	134.749.545,77	8.706.091,54	1.229.606.055,23	(620.270.698,94)	609.335.356,29
142	SD NEGERI NDETUNURA	1.534.471.661,00	(423.028.132,90)	1.111.443.528,10	5.000.000,00	-	1.539.471.661,00	(483.178.976,97)	1.056.292.684,03
143	SD NEGERI NDORA	380.401.513,47	(88.186.753,53)	292.214.759,94	10.780.000,00	-	391.181.513,47	(115.617.267,85)	275.564.245,62
144	SD INPRES KOBAKUA	1.685.277.505,20	(702.807.966,16)	982.469.539,04	2.980.000,00	1.500.000,00	1.686.757.505,20	(739.811.803,84)	946.945.701,36
145	SD INPRES RATERUNU	1.460.715.787,09	(376.475.995,03)	1.084.239.792,06	15.000.000,00	-	1.475.715.787,09	(435.117.211,66)	1.040.598.575,43
146	SD NEGERI ANAKOLI	1.927.897.897,00	(447.998.122,67)	1.479.899.774,33	27.286.000,00	-	1.955.183.897,00	(523.620.479,60)	1.431.563.417,40
147	SD NEGERI KABUREA	2.185.858.827,24	(765.965.312,80)	1.419.893.514,44	7.096.800,00	-	2.192.955.627,24	(839.439.805,20)	1.353.515.822,04
148	SD NEGERI KURU	1.875.205.076,47	(520.317.933,53)	1.354.887.142,94	17.300.000,00	-	1.892.505.076,47	(591.352.181,18)	1.301.152.895,29
149	SD NEGERI NIPADO	786.420.763,01	(161.983.375,52)	624.437.387,49	12.105.000,00	-	798.525.763,01	(206.637.439,38)	591.888.323,63
150	Dinas Kesehatan	88.661.700.973,88	(13.299.783.545,67)	75.361.917.428,21	40.631.169.308,00	57.784.637.656,84	71.508.232.625,04	(14.388.078.434,01)	57.120.154.191,03
151	UPT Dinas Puskesmas Danga	23.659.644.208,70	(7.052.511.082,25)	16.607.133.126,45	1.174.934.303,00	18.308.213,00	24.816.270.298,70	(8.546.243.305,98)	16.270.026.992,72
152	UPT Dinas Puskesmas Kaburea	18.432.632.106,88	(5.366.121.479,27)	13.066.510.627,61	883.382.539,00	582.400,00	19.315.432.245,88	(6.342.732.789,26)	12.972.699.456,62
153	UPT Dinas Puskesmas Nangaroro	23.834.590.704,09	(6.744.533.645,03)	17.090.057.059,06	1.379.072.539,00	12.354.200,00	25.201.309.043,09	(8.169.881.915,47)	17.031.427.127,62
154	UPT Dinas Puskesmas Maunori	15.941.077.146,19	(6.456.545.819,87)	9.484.531.326,32	671.087.282,75	18.019.200,00	16.594.145.228,94	(7.239.504.419,61)	9.354.640.809,33
155	UPT Dinas Puskesmas Mauponggo	23.072.566.904,07	(7.248.026.751,21)	15.824.540.152,86	1.486.184.802,00	60.462.812,00	24.498.288.894,07	(8.663.251.037,96)	15.835.037.856,11

No	Nama SKPD	Saldo Awal			Mutasi Aset Tetap		Saldo Akhir		
		Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Aset Tetap	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Akhir Aset Tetap
156	UPT Dinas Puskesmas Boawae	16.035.449.590,37	(6.995.099.296,73)	9.040.350.293,64	9.301.749.762,19	1.888.199.813,00	23.448.999.539,56	(7.248.379.618,58)	16.200.619.920,98
157	UPT Dinas Puskesmas Jawakisa	11.226.386.616,06	(5.430.515.452,12)	5.795.871.163,94	2.589.261.825,00	308.473.600,00	13.507.174.841,06	(5.785.234.695,05)	7.721.940.146,01
158	UPT Dinas Puskesmas Utetoto	-	-	-	7.111.178.582,90	-	7.111.178.582,90	(2.532.504.998,52)	4.578.673.584,38
159	Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo	115.786.587.902,81	(53.571.027.131,52)	62.215.560.771,29	11.501.230.839,28	2.237.716.773,00	125.050.101.969,09	(64.916.094.793,66)	60.134.007.175,43
160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.070.283.139.629,67	(491.976.541.329,12)	578.306.598.300,55	121.932.363.621,90	51.257.230.878,19	1.140.958.272.373,38	(558.787.460.406,68)	582.170.811.966,70
161	Badan Layanan Umum Daerah - SPAM	15.307.014.836,61	(5.778.884.098,73)	9.528.130.737,88	-	167.750.000,00	15.139.264.836,61	(6.341.621.237,40)	8.797.643.599,21
162	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.537.639.296,00	(2.806.212.785,38)	2.731.426.510,62	1.574.496.000,00	146.302.500,00	6.965.832.796,00	(2.948.089.462,92)	4.017.743.333,08
163	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.794.074.081,00	(1.860.134.985,82)	1.933.939.095,18	31.455.650,00	402.386.000,00	3.423.143.731,00	(1.820.364.089,15)	1.602.779.641,85
164	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	626.525.375,00	(491.817.246,43)	134.708.128,57	4.450.000,00	-	630.975.375,00	(498.381.560,71)	132.593.814,29
165	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.176.992.633,09	(3.939.664.196,47)	19.237.328.436,62	473.471.099,94	301.204.833,88	23.349.258.899,15	(4.815.608.773,11)	18.533.650.126,04
166	Dinas Sosial	2.620.023.661,00	(1.472.933.713,20)	1.147.089.947,80	28.814.000,00	14.850.000,00	2.633.987.661,00	(1.658.511.455,42)	975.476.205,58
167	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	348.931.800,00	(216.541.407,14)	132.390.392,86	25.000.000,00	-	373.931.800,00	(271.276.214,28)	102.655.585,72
168	Dinas Pangan Daerah	1.189.915.337,00	(1.092.633.190,97)	97.282.146,03	8.700.000,00	33.631.250,00	1.164.984.087,00	(1.097.617.109,22)	67.366.977,78
169	Dinas Lingkungan Hidup	5.346.449.470,00	(2.419.425.973,54)	2.927.023.496,46	59.698.000,00	-	5.406.147.470,00	(2.681.195.191,95)	2.724.952.278,05
170	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.568.364.637,00	(1.728.854.838,10)	839.509.798,90	168.721.000,00	3.708.000,00	2.733.377.637,00	(2.036.771.089,19)	696.606.547,81
171	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan PA	2.477.960.790,00	(1.654.299.509,75)	823.661.280,25	56.886.000,00	142.827.333,33	2.392.019.456,67	(1.616.480.056,64)	775.539.400,03
172	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.749.588.690,39	(5.309.400.021,76)	3.440.188.668,63	469.980.996,00	793.797.749,99	8.425.771.936,40	(5.107.664.521,26)	3.318.107.415,14
173	Dinas Perhubungan	9.515.830.889,00	(7.618.664.863,96)	1.897.166.025,04	54.227.936.668,00	8.469.897.809,00	55.273.869.748,00	(22.656.429.596,66)	32.617.440.151,34
174	Dinas Komunikasi dan Informasi	6.522.403.354,00	(3.963.585.439,80)	2.558.817.914,20	435.257.630,00	3.290.040,00	6.954.370.944,00	(4.470.986.190,19)	2.483.384.753,81
175	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	40.966.090.274,72	(9.319.220.509,34)	31.646.869.765,38	5.499.432.672,37	1.772.220.921,37	44.693.302.025,72	(11.142.220.989,40)	33.551.081.036,32
176	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.432.635.256,91	(1.127.576.767,31)	1.305.058.489,60	25.574.000,00	53.615.000,00	2.404.594.256,91	(1.275.803.398,73)	1.128.790.858,18
177	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	558.017.356,00	(244.433.885,60)	313.583.470,40	136.082.850,00	-	694.100.206,00	(285.012.005,80)	409.088.200,20
178	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.075.553.865,00	(978.447.934,23)	8.097.105.930,77	10.951.320.200,00	7.379.448.100,00	12.647.425.965,00	(1.496.254.246,92)	11.151.171.718,08
179	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.776.186.007,18	(4.882.002.888,99)	4.894.183.118,19	7.850.000,00	16.831.167,00	9.767.204.840,18	(5.172.450.561,76)	4.594.754.278,42
180	Dinas Pariwisata	6.448.393.652,39	(2.041.604.301,93)	4.406.789.350,46	2.383.768.229,51	819.044.288,00	8.013.117.593,90	(2.454.965.221,78)	5.558.152.372,12

No	Nama SKPD	Saldo Awal			Mutasi Aset Tetap		Saldo Akhir		
		Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Aset Tetap	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Akhir Aset Tetap
181	Dinas Pertanian	18.308.580.733,85	(9.044.036.313,80)	9.264.544.420,05	137.937.017,00	11.228.017,00	18.435.289.733,85	(9.909.351.550,50)	8.525.938.183,35
182	Dinas Peternakan	11.021.251.614,96	(4.100.631.137,65)	6.920.620.477,31	14.500.000,00	-	11.035.751.614,96	(4.672.585.714,98)	6.363.165.899,98
183	Sekretariat Daerah	3.423.213.418,00	(2.308.785.794,70)	1.114.427.623,30	2.515.000,00	312.000.000,00	3.113.728.418,00	(2.185.606.200,86)	928.122.217,14
184	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	663.967.200,00	(639.022.092,86)	24.945.107,14	-	185.956.400,00	478.010.800,00	(464.737.014,29)	13.273.785,71
185	Bagian Administrasi Kemasyarakatan	723.704.050,00	(588.027.528,57)	135.676.521,43	34.435.000,00	20.210.000,00	737.929.050,00	(618.613.164,29)	119.315.885,71
186	Bagian Hukum	439.535.930,00	(405.800.995,00)	33.734.935,00	9.270.000,00	63.644.000,00	385.161.930,00	(355.424.290,00)	29.737.640,00
187	Bagian Organisasi	525.913.437,00	(486.792.247,69)	39.121.189,31	-	56.503.540,67	469.409.896,33	(467.846.444,53)	1.563.451,80
188	Bagian Adminstrasi Pembangunan	1.073.103.578,00	(921.898.142,05)	151.205.435,95	18.000.000,00	6.000.000,00	1.085.103.578,00	(994.310.009,10)	90.793.568,90
189	Bagian Administrasi Perekonomian	820.960.450,00	(695.011.545,24)	125.948.904,76	-	34.500.000,00	786.460.450,00	(676.380.807,14)	110.079.642,86
190	Bagian Adminstrasi Umum	36.819.318.800,96	(13.776.691.379,11)	23.042.627.421,85	-	56.950.000,00	36.762.368.800,96	(15.058.080.146,13)	21.704.288.654,83
191	Bagian Pemerintahan	7.086.045.100,00	(586.707.385,71)	6.499.337.714,29	3.090.156.590,00	325.000.000,00	9.851.201.690,00	(602.849.747,50)	9.248.351.942,50
192	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Bagian Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bagian Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.904.975.236,14	(4.140.068.876,73)	764.906.359,41	89.784.732,00	-	4.994.759.968,14	(4.523.274.172,21)	471.485.795,93
196	Kecamatan Mauponggo	2.649.686.500,00	(1.266.859.671,43)	1.382.826.828,57	724.256.500,00	406.808.750,00	2.967.134.250,00	(1.494.817.494,05)	1.472.316.755,95
197	Kelurahan Mauponggo	911.195.617,00	(350.753.298,43)	560.442.318,57	13.212.000,00	-	924.407.617,00	(428.467.680,13)	495.939.936,87
198	Kecamatan Nangaroro	2.326.238.156,94	(1.479.772.250,53)	846.465.906,41	8.800.000,00	-	2.335.038.156,94	(1.581.968.703,19)	753.069.453,75
199	Kelurahan Nangaroro	978.282.121,89	(391.553.553,14)	586.728.568,75	-	-	978.282.121,89	(480.402.498,65)	497.879.623,24
200	Kecamatan Aesesa	7.379.498.534,62	(1.273.373.798,43)	6.106.124.736,19	14.626.590,00	-	7.394.125.124,62	(1.563.133.624,88)	5.830.991.499,74
201	Kelurahan Towak	535.416.616,00	(158.868.549,60)	376.548.066,40	4.743.000,00	-	540.159.616,00	(186.826.800,57)	353.332.815,43
202	Kelurahan Dhawe	195.516.900,00	(126.105.409,76)	69.411.490,24	-	-	195.516.900,00	(132.794.586,67)	62.722.313,33
203	Kelurahan Lape	1.014.754.340,00	(275.221.007,02)	739.533.332,98	15.814.000,00	8.582.000,00	1.021.986.340,00	(318.298.328,33)	703.688.011,67
204	Kelurahan Mbay I	598.486.148,00	(246.987.402,40)	351.498.745,60	13.805.590,00	-	612.291.738,00	(272.340.471,50)	339.951.266,50
205	Kelurahan Danga	1.183.800.500,00	(334.994.169,84)	848.806.330,16	-	-	1.183.800.500,00	(377.861.903,81)	805.938.596,19
206	Kelurahan Mbay II	306.093.069,00	(182.573.213,07)	123.519.855,93	16.079.000,00	-	322.172.069,00	(198.968.120,13)	123.203.948,87

No	Nama SKPD	Saldo Awal			Mutasi Aset Tetap		Saldo Akhir		
		Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Aset Tetap	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	Total Saldo Akhir Aset Tetap
207	Kecamatan Boawae	6.441.884.810,00	(1.639.741.838,43)	4.802.142.971,57	26.195.000,00	468.621.402,00	5.999.458.408,00	(1.628.996.956,25)	4.370.461.451,75
208	Kelurahan Ratongamobo	887.242.291,00	(417.632.116,87)	469.610.174,13	5.841.000,00	3.480.000,00	889.603.291,00	(491.535.601,13)	398.067.689,87
209	Kelurahan Natanage	1.998.087.308,00	(484.979.626,60)	1.513.107.681,40	21.302.000,00	5.000.000,00	2.014.389.308,00	(557.804.097,64)	1.456.585.210,36
210	Kelurahan Natanage Timur	1.047.844.564,00	(336.924.218,53)	710.920.345,47	15.001.000,00	450.000,00	1.062.395.564,00	(409.951.229,00)	652.444.335,00
211	Kelurahan Nageoga	1.088.109.220,00	(516.216.686,67)	571.892.533,33	12.825.000,00	-	1.100.934.220,00	(574.251.158,89)	526.683.061,11
212	Kelurahan Wolopogo	1.412.675.726,00	(619.150.606,60)	793.525.119,40	16.212.000,00	-	1.428.887.726,00	(729.141.788,30)	699.745.937,70
213	Kelurahan Rega	1.187.518.100,00	(371.626.453,67)	815.891.646,33	103.090.000,00	100.000.000,00	1.190.608.100,00	(471.999.812,67)	718.608.287,33
214	Kelurahan Olakile	537.380.272,00	(309.070.071,90)	228.310.200,10	64.992.460,00	450.000,00	601.922.732,00	(361.090.578,80)	240.832.153,20
215	Kelurahan Nagesapadhi	820.940.760,00	(326.812.300,00)	494.128.460,00	162.434.800,00	164.983.000,00	818.392.560,00	(321.064.860,00)	497.327.700,00
216	Kecamatan Wolowae	3.097.372.188,46	(1.382.723.186,85)	1.714.649.001,61	26.768.067,00	-	3.124.140.255,46	(1.528.713.598,12)	1.595.426.657,34
217	Kecamatan Keo Tengah	1.760.510.115,57	(898.763.187,70)	861.746.927,87	33.130.000,00	-	1.793.640.115,57	(995.338.642,98)	798.301.472,59
218	Kecamatan Aesesa Selatan	2.179.481.650,00	(1.222.528.495,95)	956.953.154,05	31.266.000,00	18.250.000,00	2.192.497.650,00	(1.280.683.601,90)	911.814.048,10
219	Inspektorat	3.389.885.409,00	(1.842.524.184,50)	1.547.361.224,50	-	344.677.000,00	3.045.208.409,00	(1.809.208.884,93)	1.235.999.524,07
220	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.649.264.776,00	(1.910.472.990,19)	738.791.785,81	84.100.000,00	548.440.000,00	2.184.924.776,00	(1.469.938.332,80)	714.986.443,20
221	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	-	510.186.000,00	510.186.000,00	-	-	-
222	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	738.705.783.765,89	(8.815.519.506,93)	729.890.264.258,96	327.376.000,00	2.859.161.217,00	736.173.998.548,89	(6.265.932.096,81)	729.908.066.452,08
223	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.661.196.786,00	(1.273.403.127,00)	387.793.659,00	1.590.000,00	101.940.000,00	1.560.846.786,00	(1.276.083.286,00)	284.763.500,00
Jumlah Aset Tetap		2.688.358.292.409,68	(811.147.754.658,38)	1.877.210.537.751,30	305.775.528.865,52	152.992.914.324,52	2.841.140.906.950,68	(932.573.970.848,91)	1.908.566.936.101,77

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Tambah	Kurang	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	774.938.314.381,71	3.398.940.000,00	425.000.000,00	777.912.254.381,71
2	Peralatan dan Mesin	278.652.348.623,72	25.652.844.067,06	18.904.896.960,74	285.400.295.730,04
3	Gedung dan Bangunan	466.199.496.896,11	117.749.227.382,64	30.663.171.415,09	553.285.552.863,66
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.066.398.022.301,43	114.082.560.199,13	30.630.098.127,88	1.149.850.484.372,68
5	Aset Tetap Lainnya	25.999.965.556,58	8.959.188.084,00	6.918.605.584,00	28.040.548.056,58
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.170.144.650,13	35.932.769.132,69	65.451.142.236,81	46.651.771.546,01
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(811.147.754.658,38)	-	121.426.216.190,53	(932.573.970.848,91)
Jumlah Aset Tetap 2022		1.877.210.537.751,30	305.775.528.865,52	274.419.130.515,05	1.908.566.936.101,77



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2022

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 15 Juli 2023

No	SKPD	Saldo Awal	Bertambah				Berkurang				Saldo per 31 Desember 2022	
			Belanja Non Modal	Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi Aset		Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi Aset				
					Dari JJJ	Dari Aset tetap Lainnya		Ke Peralatan dan Mesin	Ke Gedung & Bangunan	Ke JJJ		koreksi nilai 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.844.000,00				-						100.844.000,00
2	Dinas Kesehatan	37.917.751.365,35				-		31.610.931.531,00				6.306.819.834,35
3	Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo	2.176.011.773,00				-		2.176.011.773,00				-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.725.383.479,47	140.020.450,00		28.395.189.748,69		294.188.750,00		8.406.843.200,00	12.953.357.699,50	144.775.000,00	31.461.429.028,66
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	121.046.000,00				-						121.046.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	200.750.000,00				-						200.750.000,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	123.024.000,00				-						123.024.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.559.973,94				-				12.559.973,94		(0,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	25.536.500,00				-						25.536.500,00
10	Dinas Perhubungan	7.990.000,00	317.922.500,00			-	6.777.555.584,00					7.103.468.084,00
11	Dinas Komunikasi dan Informasi	78.090.000,00				-						78.090.000,00
12	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.598.624.171,37				-		1.421.749.171,37				176.875.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.813.000,00				-						95.813.000,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.988.000,00	7.892.100,00			-						17.880.100,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.322.122.100,00				-		7.322.122.100,00				-
16	Dinas Pariwisata	701.794.288,00				-		549.200.038,00	152.594.250,00			-
17	Dinas Pertanian	349.862.999,00				-						349.862.999,00
18	Dinas Peternakan	8.000.000,00				-						8.000.000,00
19	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	149.787.000,00				-						149.787.000,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-				-						-
21	Kecamatan Mauponggo	112.620.000,00		294.188.750,00		-		406.808.750,00				-
22	Kelurahan Natanage Timur	-				-						-
23	Inspektorat	118.355.000,00				-						118.355.000,00
24	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	9.280.000,00				-						9.280.000,00
25	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	204.911.000,00				-						204.911.000,00
Jumlah Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan 2021		76.170.144.650,13	465.835.050,00	294.188.750,00	28.395.189.748,69	6.777.555.584,00	294.188.750,00	-	51.893.666.563,37	13.118.511.923,44	144.775.000,00	46.651.771.546,01

Lampiran XV :Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022

No	SKPD	Sado Awal	Koreksi Sado Awal		Sado Awal Setelah Koreksi	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=5+6-7
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Tagihan Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (Badan Keuangan Daerah)	7.684.309.110,01	44.850.100,00	11.760.000,00	7.717.399.210,01	450.259.835,13	1.760.000.251,14	6.407.658.794,00
4	Aset Tak Berwujud	2.069.982.371	-	-	2.069.982.371	189.416.150	511.213.772	1.748.184.749,00
	DINAS KESEHATAN	148.368.000			148.368.000,00	0,00	148.368.000,00	-
	PUSKESMAS DANGA	-			0,00	148.368.000,00	18.546.000,00	129.822.000,00
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AERAMC	160.879.576			160.879.576,00	0,00	20.109.947,00	140.769.629,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA	371.169.350			371.169.350,00	41.048.150,00	0,00	412.217.500,00
	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - SPA	103.829.000			103.829.000,00	0,00	51.914.500,00	51.914.500,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATA	-			0,00	0,00	0,00	-
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	157.417.800			157.417.800,00	0,00	68.540.700,00	88.877.100,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY	151.064.000			151.064.000,00	0,00	35.966.000,00	115.098.000,00
	DINAS PARIWISATA	44.946.000			44.946.000,00	0,00	4.994.000,00	39.952.000,00
	DINAS PERTANIAN	139.314.000			139.314.000,00	0,00	19.902.000,00	119.412.000,00
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JAS	155.129.865			155.129.865,00	0,00	20.785.985,00	134.343.880,00
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN R	18.000.000			18.000.000,00	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00
	KECAMATAN WOLOWAE	62.815.500			62.815.500,00	0,00	6.979.500,00	55.836.000,00
	INSPEKTORAT	124.794.400			124.794.400,00	0,00	15.599.300,00	109.195.100,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	239.233.500			239.233.500,00	0,00	42.016.500,00	197.217.000,00
	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)	193.021.380			193.021.380,00	0,00	54.491.340,00	138.530.040,00
5	Aset Lain-lain	51.744.011.806,67	0,00	0,00	51.744.011.806,67	0,00	0,00	43.774.475.052,06
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13.355.776.070,05			13.355.776.070,05	0,00	442.842.310,28	12.912.933.759,77
	SD INPRES BUTATA	453.494.721,07			453.494.721,07	0,00	0,00	453.494.721,07

No	SKPD	Sado Awal	Koreksi Sado Awal		Sado Awal Setelah Koreksi	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=5+6-7
	DINAS KESEHATAN	474.606.100,96			474.606.100,96	0,00	2.435.714,29	472.170.386,67
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA	12.252.007.505,00			12.252.007.505,00	0,00	901.345.825,00	11.350.661.680,00
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW	129.623.157,00			129.623.157,00	0,00	0,00	129.623.157,00
	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.367.857,14			13.367.857,14	0,00	0,00	13.367.857,14
	KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK D	0,00			0,00	0,00	0,00	-
	DINAS SOSIAL	895.000,00			895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
	DINAS PANGAN DAERAH	23.639.285,71			23.639.285,71	0,00	0,00	23.639.285,71
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.139.959.690,00			1.139.959.690,00	0,00	0,00	1.139.959.690,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATA	12.851.000,00			12.851.000,00	0,00	0,00	12.851.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DA	13.454.100,00			13.454.100,00	0,00	0,00	13.454.100,00
	DINAS PERHUBUNGAN	33.961.822,00			33.961.822,00	0,00	0,00	33.961.822,00
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIA	0,00			0,00	166.810.875,00	0,00	166.810.875,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY	187.562,50			187.562,50	0,00	0,00	187.562,50
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	806.408.000,00			806.408.000,00	0,00	0,00	806.408.000,00
	DINAS PARIWISATA	100.355.179,12			100.355.179,12	0,00	100.355.179,12	-
	DINAS PERTANIAN	47.344.431,43			47.344.431,43	0,00	0,00	47.344.431,43
	DINAS PETERNAKAN	1.115.550.000,00			1.115.550.000,00	0,00	0,00	1.115.550.000,00
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERA	1.800.000,00			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI	0,00			0,00	0,00	0,00	-
	BAGIAN HUKUM	3.822.142,86			3.822.142,86	0,00	3.822.142,86	-
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JAS	0,00			0,00	0,00	0,00	-
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER	450.500,00			450.500,00	0,00	0,00	450.500,00
	BAGIAN ADMINSTRASI UMUM	1.441.143.312,57			1.441.143.312,57	0,00	0,00	1.441.143.312,57
	BAGIAN PEMERINTAHAN	3.720.000,00			3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
	KEPALA DAERAH	0,00			0,00	0,00	0,00	-
	WAKIL KEPALA DAERAH	0,00			0,00	0,00	0,00	-
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN R	1.182.857.140,00			1.182.857.140,00	0,00	0,00	1.182.857.140,00
	KECAMATAN MAUPONGGO	24.770.057,14			24.770.057,14	0,00	0,00	24.770.057,14
	KELURAHAN MAUPONGGO	44.108.720,93			44.108.720,93	0,00	0,00	44.108.720,93
	KECAMATAN NANGARORO	0,00			0,00	0,00	0,00	-

No	SKPD	Sado Awal	Koreksi Sado Awal		Sado Awal Setelah Koreksi	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=5+6-7
	KELURAHAN NANGARORO	35.000.000,00			35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	KECAMATAN AESESA	207.060.875,00			207.060.875,00	0,00	0,00	207.060.875,00
	KELURAHAN TOWAK	3.892.500,00			3.892.500,00	0,00	0,00	3.892.500,00
	KELURAHAN LAPE	3.024.285,71			3.024.285,71	0,00	0,00	3.024.285,71
	KELURAHAN MBAY II	1.935.714,29			1.935.714,29	0,00	0,00	1.935.714,29
	KECAMATAN BOAWAE	27.317.142,86			27.317.142,86	234.181.701,01	0,00	261.498.843,87
	KELURAHAN NATANAGE	246.730.489,36			246.730.489,36	0,00	0,00	246.730.489,36
	KELURAHAN NAGEOGA	168.926.662,02			168.926.662,02	0,00	0,00	168.926.662,02
	KELURAHAN WOLOPOGO	11.215.142,86			11.215.142,86	0,00	0,00	11.215.142,86
	KELURAHAN NAGESAPADHI	0,00			0,00	82.491.500,00	0,00	82.491.500,00
	KECAMATAN WOLOWAE	42.333.333,33			42.333.333,33	0,00	0,00	42.333.333,33
	KECAMATAN KEO TENGAH	529.600,00			529.600,00	0,00	0,00	529.600,00
	KECAMATAN AESESA SELATAN	104.422,22			104.422,22	0,00	0,00	104.422,22
	INSPEKTORAT	1.003.500,00			1.003.500,00	0,00	0,00	1.003.500,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9.901.500,00			9.901.500,00	0,00	4.767.214,28	5.134.285,72
	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)	18.283.032.888,54			18.283.032.888,54	0,00	6.974.202.049,79	11.308.830.838,75
	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DA	25.850.395,00			25.850.395,00	0,00	23.250.395,00	2.600.000,00
6	Aset Lain-lain - TDF-TKD (BADAN KEUANGAN DAERAH)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.220.265,00	0,00	1.048.220.265,00
	Jumlah Aset Lainnya	61.498.303.287,68	44.850.100,00	11.760.000,00	61.531.393.387,68	1.687.896.250,13	2.271.214.023,14	52.978.538.860,06

Lampiran XVI :Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				-	-	-	-	-

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2022

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
I	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.658.906.317,01	3.301.982.482,00	11.732.812,00	5.949.155.987,01
1	Utang PFK BUD	2.592.439.101,01	3.272.735.708,00	-	5.865.174.809,01
2	Utang PFK OPD	-	-	-	-
3	Utang PFK BLUD	11.732.812,00	-	11.732.812,00	-
4	Utang PFK Bendahara Pengeluaran BOS	54.734.404,00	29.246.774,00	-	83.981.178,00
II	Utang Beban	32.181.000,00	4.801.735.498,51	-	4.833.916.498,51
1	Utang Beban Pegawai	32.181.000,00	4.801.735.498,51	-	4.833.916.498,51
III	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.806.895.631,81	1.073.867.194,97	2.146.134.016,87	2.734.628.809,91
1	Utang Belanja Modal	2.623.125.314,25	993.924.175,00	2.136.760.000,00	1.480.289.489,25
	- Dinas Kesehatan	1.931.527.542,00	-	1.811.760.000,00	119.767.542,00
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	303.343.600,00	-	-	303.343.600,00
	- RSD Aeramo	-	947.101.775,00	-	947.101.775,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.120.080,25	46.768.400,00	-	106.888.480,25
	- Dinas Perpustakaan	-	54.000,00	-	54.000,00
	- Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
	- Dinas Peternakan	-	-	-	-
	- Puskesmas Jawakisa	3.134.092,00	-	-	3.134.092,00
	- Bagian Administrasi Pemerintahan	325.000.000,00	-	325.000.000,00	-
3	Utang Retensi	1.183.770.317,56	79.943.019,97	9.374.016,87	1.254.339.320,67
	- Dinas Sosial	23.683.450,00	-	-	23.683.450,00
	- Dinas Kesehatan	14.472.000,00	-	-	14.472.000,00
	- Bagian Administrasi Perekonomian	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
	- Kecamatan Keo Tengah	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.077.028.850,69	79.943.019,97	-	1.156.971.870,67
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.534.600,00	-	-	36.534.600,00
	- Dinas Pertanian	28.051.416,87	-	9.374.016,87	18.677.400,00
	- Dinas Perpustakaan	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		6.497.982.948,82	9.177.585.175,48	2.157.866.828,87	13.517.701.295,43

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 15 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2022

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	

Lampiran XIX :Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah				Jumlah yang Masih Harus Dianggarkan Kembali pada APBD Berikutnya	Dasar Hukum
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Tambah/Kurang	%		

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Diseto	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+7+6	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18	
1	Bidang Perbankan																		
2	Bidang Asuransi																		
	Total Seluruh Bidang industri																		

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 15 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN
DAERAHDAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan								
2	Bidang Asuransi								
	Total Seluruh Bidang industri								